BAPPEDA
Pangandaran

Pemerintah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2024

RKPD
Tahun 2025
Kabupaten Pangandaran

Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 40 Tahun 2024

BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan pada Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. bahwa untuk memberikan pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) 2025 dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2025 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018–2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.

4. Rencana Keija Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (satu) tahun.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan Daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana keija dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II
RKPD

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana keija dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. Bab I Pendahuluan;
   b. Bab II Gambaran Umum Kondisi daerah;
   c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
   d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
   e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
   f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   g. Bab VII Penutup

(2) Rincian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:
a. Pedoman PD dalam menyusun Renja-PD;dan
b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA, PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 28 Juni 2024

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 28 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2024 NOMOR 40

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang **I-1**

1.2 Dasar Hukum **I-8**

1.3 Hubungan Antar Dokumen **I-14**

1.4 Maksud dan Tujuan **I-16**

1.5 Sistematika Dokumen RKPD **I-18**

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah **II-1**

2.1 Kondisi Umum Daerah **II-1**

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-33

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-54

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-114

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD **II-121**

2.2.1 Capaian Kinerja Makro, Tujuan dan Sasaran RPJMD II-121

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai dengan Tahun 2023 ..... II-129

2.2.3 Evaluasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program (Outcome) II-138

2.2.4 Realisasai Sasaran RPJMD II-167

2.2.5 Realisasai Sasaran RPJMD II-176

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah **II-195**

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-196

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah II-220

2.4 Inovasi Daerah **II-237**

2.4.1 Batukaras International Night Surfing II-237

2.4.2 Pariwisata Berbasis Hak Asasi Manusia di Destinasi Pariwisata Cukang Taneuh (Green Canyon).....II-240
2.4.3 BULE KERITING (Budidaya Ikan Lele untuk Keluarga Berisiko Stunting) II-242
2.4.4 SIGINA PERAWAN (Aplikasi Teknologi Tepat Guna Untuk Pengairan Sawah Tadah Hujan).....II-243
2.4.5 Gerakan Masyarakat Nelayan Mandiri (GEMAR LARI) dengan SITERI (Sistem Tempat Pelelangan Ikan Terintegrasi)...II-244
2.4.6 Hotel Maggot PAZERO (Pangandaran Zero Waste).....II-247

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ..... III-1
3.1.2 Inflasi III-8
3.1.3 Ketenagakerjaan III-8
3.1.4 Tingkat Kemiskinan III-9
3.1.5 Indeks Gini III-10
3.1.6 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 ..... III-11
3.1.7 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi III-17
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-23
3.2.1 Kondisi, Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-25
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-26
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-31
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-35
3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-39
3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) III-26
3.3.2 APBD Provinsi Jawa Barat III-40

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.....IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....IV-3
4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV-4
4.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat..... IV-6

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran IV-11
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-16
4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025..... IV-16
4.2.2 Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ..... IV-20
4.2.3 Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-21
4.2.4 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Kabupaten Pangandaran IV-24
4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran..... IV-29
4.2.6 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2025 ..... IV-62

BAB V Rencana Kerja dan Pendaaan Daerah..... V-1
5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2025 ..... V-2
5.1.1 Rencana Pendanaan Pembangunan yang Bersumber dari APBN Tahun 2025 ..... V-3
5.1.2 Rencana Pendukungan Alternatif Pendanaan Pembangunan yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ..... V-4
5.1.3 Rencana Pendukungan Alternatif Pendanaan Pembangunan yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ..... V-11
5.2 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 V-12
5.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025..... V-35
5.3.1 Proyek Strategis Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 .... V-60
5.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025..... V-68

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah VI-1
6.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama VI-3
6.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK) VI-5

BAB VII Penutup VII-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran II-1
Tabel 2.2 Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran II-4
Tabel 2.3 Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran II-5
Tabel 2.4 Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran II-10
Tabel 2.5 Jenis Tanah di Kabupaten Pangandaran II-12
Tabel 2.6 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pangandaran II-12
Tabel 2.7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran II-14
Tabel 2.8 Luasan Potensi Gempa di Kabupaten Pangandaran II-16
Tabel 2.9 Luasan Potensi Tsunami di Kabupaten II-17
Tabel 2.10 Luasan Potensi Gerakan Tanah di Kabupaten Pangandaran II-18
Tabel 2.11 Luasan Potensi Bencana Banjir di Kabupaten Pangandaran II-19
Tabel 2.12 Rencana Pola Ruang II-21
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran 2023 ..... II-23
Tabel 2.14 Persentase Penyebaran Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ..... II-24
Tabel 2.15 Persentase Penyebaran Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ..... II-25
Tabel 2.16 Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ..... II-26
Tabel 2.17 Jumlah Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ..... II-27
Tabel 2.18 Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ..... II-29
Tabel 2.19 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ..... II-31
Tabel 2.20 Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ..... II-32
Tabel 2.21 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2020-2023 .... II-34

Tabel 2.22 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah) II-34
Tabel 2.23 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga BerlakuMenurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2023 (Persen) II-35
Tabel 2.24 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah) II-37
Tabel 2.25 Pertumbuhan PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2023 (Persen) II-38
Tabel 2.26 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2019-2023 ..... II-39
Tabel 2.27 Nilai PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2023 (Milyar Rupiah) II-40
Tabel 2.28 Nilai PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah) II-40
Tabel 2.29 Nilai PDRB Per Kapita Tahun 2020-2023 (Juta Rp.) II-41
Tabel 2.30 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2019-2023 ..... II-44
Tabel 2.31 Perbandingan IPM Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2023 ..... II-45
Tabel 2.32 Perbandingan IPM Kabupaten Pangandaran danKabupaten/Kota Tetangga Tahun 2023 ..... II-45
Tabel 2.33 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2019-2023 ..... II-48
Tabel 2.34 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2023 ..... II-49
Tabel 2.35 Jumlah dan Tingkat Penduduk Miskin Ekstrem Tahun 2021-2022 ..... II-50
Tabel 2.36 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2023 ..... II-50
Tabel 2.37 Angka Melek Huruf Kabupaten Pangandaran II-51
Tabel 2.38 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2023 ..... II-52
Tabel 2.39 Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga Tahun 2019-

2023 ..... II-52
Tabel 2.40 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-56
Tabel 2.41 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-59
Tabel 2.42 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-64
Tabel 2.43 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-66
Tabel 2.44 Hasil Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-67
Tabel 2.45 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-69
Tabel 2.46 Hasil Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-73
Tabel 2.47 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-74
Tabel 2.48 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-76
Tabel 2.49 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-78
Tabel 2.50 Hasil Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup KabupatenPangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-79
Tabel 2.51 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-81
Tabel 2.52 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-83
Tabel 2.53 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-84
Tabel 2.54 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-86
Tabel 2.55 Hasil Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-86
Tabel 2.56 Hasil Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-87
Tabel 2.57 Hasil Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-89
Tabel 2.58 Hasil Capaian Kinerja Urusan Olahraga Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-90
Tabel 2.59 Hasil Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-91
Tabel 2.60 Hasil Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-92
Tabel 2.61 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-92
Tabel 2.62 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-94
Tabel 2.63 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-96
Tabel 2.64 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-97
Tabel 2.65 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-98
Tabel 2.66 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-99
Tabel 2.67 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-101
Tabel 2.68 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-102
Tabel 2.69 Hasil Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-103
Tabel 2.70 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-104
Tabel 2.71 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-106
Tabel 2.72 Hasil Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-107
Tabel 2.73 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-108

Tabel 2.74 Hasil Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-109
Tabel 2.75 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-110
Tabel 2.76 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-112
Tabel 2.77 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-113
Tabel 2.78 Hasil Capaian Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-114
Tabel 2.79 Hasil Capaian Kinerja Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-115
Tabel 2.80 Hasil Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-116
Tabel 2.81 Hasil Capaian Kinerja Urusan Iklim Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-118
Tabel 2.82 Rasio Kelulusan S1/S2/S3 Tahun 2019-2023 ..... II-119
Tabel 2.83 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-120
Tabel 2.84 Capaian Indikator Makro Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ..... II-121
Tabel 2.85 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2023 ..... II-123
Tabel 2.86 Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2023 ..... II-125
Tabel 2.87 Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 Sampai Triwulan IV Tahun 2023 ..... II-130
Tabel 2.88 Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 Sampai Triwulan IV Tahun 2023 ..... II-132
Tabel 2.89 Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Sampai Triwulan IV Tahun 2023 ..... II-134
Tabel 2.90 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-138
Tabel 2.91 Capaian Kinerja Sasaran II-167
Tabel 2.92 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pendidikan Tahun 2023 ..... II-176
Tabel 2.93 Anggaran SPM pada Urusan Pendidikan Tahun 2023 ..... II-177
Tabel 2.94 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Kesehatan Tahun 2023 ..... II-178
Tabel 2.95 Anggaran SPM pada Urusan Kesehatan Tahun 2023 ..... II-183
Tabel 2.96 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun 2023 ..... II-184
Tabel 2.97 Anggaran SPM pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun 2023 ..... II-185
Tabel 2.98 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 ..... II-186
Tabel 2.99 Anggaran SPM pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 ..... II-187
Tabel 2.100 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 ..... II-187
Tabel 2.101 Anggaran SPM pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 ..... II-191
Tabel 2.102 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Sosial Tahun 2023 ..... II-191
Tabel 2.103 Anggaran SPM pada Urusan Sosial Tahun 2023 ..... II-195
Tabel 2.104 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-197
Tabel 2.105 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran II-220
Tabel 2.106 Inovasi Daerah Kabupaten Pangandaran II-237
Tabel 2.107 Jumlah Kunjungan Wisatawan II-238
Tabel 2.108 Jumlah Kunjungan Wisatawan II-241
Tabel 2.109 Data Bantuan Kabupaten PangandaranTahun 2021-2023 II-246
Tabel 3.1 PDRB ADHB Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah) III-4

Tabel 3.2 PDRB ADHK Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah) III-5
Tabel 3.3 Perkembangan PDRB Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2023 ..... III-6
Tabel 3.4 Perbandingan Indikator Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ..... III-7
Tabel 3.5 Target dan Capaian Indikator Makro daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2025 ..... III-16
Tabel 3.6 Target Indikator Makro Nasional-Provinsi-Pangandaran Tahun 2025 ..... III-17
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pangandaran III-28
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran III-33
Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pangandaran III-38
Tabel 3.10 Alokasi APBN untuk Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2024 ..... III-40
Tabel 3.11 Alokasi APBD Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2024 ..... III-41
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ..... IV-8
Tabel 4.2 Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 .. IV-11
Tabel 4.3 Hubungan Visi – Misi – Tujuan – Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 IV-12
Tabel 4.4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan PokokPokok Pikiran DPRD IV-21
Tabel 4.5 Arah Kebijakan RKP 2025, Isu Strategis RPJMD, Permasalahan Pembangunan, Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026, dan Isu Strategis RKPD 2025 ..... IV-26
Tabel 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan 2025 dan Isu Strategis IV-29
Tabel 4.7 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 1 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab IV-31

Tabel 4.8 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 2 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab IV-33
Tabel 4.9 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 3 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab IV-35
Tabel 4.10 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 4 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab IV-35
Tabel 4.11 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 5 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab IV-36
Tabel 4.12 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 6 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab IV-38
Tabel 4.13 Keterkaitan Program Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) IV-40
Tabel 4.14 Program Pendukung Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Perangkat Daerah Penanggungjawab)..... IV-48
Tabel 4.15 Program Pendukung Percepatan Penurunan Stunting dan Perangkat Daerah Penanggungjawab..... IV-52
Tabel 4.16 Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Pangandaran IV-57
Tabel 4.17 Unsur Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Pangandaran IV-57
Tabel 4.18 Dukungan Kegiatan dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Pangandaran IV-58
Tabel 4.19 Proyek Strategis Nasional Kabupaten Pangandaran dalam Usulan Perubahan Perpres 87/2021 ..... IV-60

Tabel 4.20 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional-Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran IV-62
Tabel 4.21 Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dengan Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dan Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 ..... IV-64
Tabel 4.22 Tingkat Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2025 terhadap Program Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2025..... IV-75
Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah V-2
Tabel 5.2 Daftar Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ..... V-3
Tabel 5.3 Daftar Usulan Kegiatan Prioritas yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ..... V-4
Tabel 5.4 Rencana Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025..... V-13
Tabel 5.5 Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal V-18
Tabel 5.6 Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... V-35
Tabel 5.7 Program Dan Kegiatan Prioritas Stunting, Penanganan Kemiskinan, Pengendalian Inflasi, Ketahanan Pangan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Tahun 2025 ..... V-36
Tabel 5.8 Sinkronisasi Program Pembangunan Kabupaten Pangandaran terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ..... V-54
Tabel 5.9 Proyek Strategis Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ..... V-60
Tabel 6.1 Indikator Makro Daerah VI-2
Tabel 6.2 Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ..... VI-3
Tabel 6.3 Target Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024-2025..... VI-6
Tabel 6.4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat

Hasil/Outcome Kabupaten Pangandaran Tahun 2023, 2024, 2025 ..... VI-18

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Pendekatan Perencanaan Pembangunan I-3
Gambar 1.2 Tahapan Penyusuanan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ..... I-5
Gambar 1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Lain I-16
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran dan Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Pangandaran II-1
Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Pangandaran II-2
Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Pangandaran II-7
Gambar 2.4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran II-7
Gambar 2.5 Peta Curah Hujan II-8
Gambar 2.6 Peta Geologi Kabupaten Pangandaran II-9
Gambar 2.7 Peta Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pangandaran II-11
Gambar 2.8 Peta Batas DAS Kabupaten Pangandaran II-13
Gambar 2.9 Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran II-15
Gambar 2.10 Peta Rawan Gempa II-16
Gambar 2.11 Peta Rawan Tsunami II-17
Gambar 2.12 Peta Pergerakan Tanah II-18
Gambar 2.13 Peta Kelas Kemmapuan Lahan Lahan Kabupaten Pangandaran II-20
Gambar 2.14 Peta Rencana Struktur Ruang II-20
Gambar 2.15 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran II-22
Gambar 2.16 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran II-22
Gambar 2.17 Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ..... II-26
Gambar 2.18 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Pangandaran, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2016-2023 (persen) II-37
Gambar 2.19 Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2023 (Ribu Rupiah) II-41
Gambar 2.20 Laju Inflasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023 ..... II-42
Gambar 2.21 Realisasi Indeks Gini Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2022 (Ribu Rupiah) II-43

Gambar 2.22 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Pangandaran, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... II-43
Gambar 2.23 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten PangandaranTahun 2019-2023 ..... II-46
Gambar 2.24 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2023 ..... II-51
Gambar 2.25 Peselancar di Pantai Batukaras II-238
Gambar 2.26 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Pangandaran .. II-238
Gambar 2.27 Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi TPI Pangandaran II-238
Gambar 3.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2023 (%) III-3
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2023..... III-3
Gambar 3.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2023 (%) III-3
Gambar 3.3 Perbandingan Inflasi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2023 (%) III-8
Gambar 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2023 (%) III-9
Gambar 3.5 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2023 ..... III-10
Gambar 3.6 Indeks Gini Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2023 (Poin) III-11
Gambar 3.7 Arah Kebijakan Ekonomi 2025 Pangandaran..... III-23
Gambar 4.1 Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah IV-3

Pemerintah
Kabupaten Pangandaran

BAB I
PENDAHULUAN

RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran
2025

@pangandaranbappeda
https://bappeda.pangandarankab.go.id

Objek Wisata Citumang

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana amanat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan daerah. Perencanaan dilakukan untuk menentukan arah dan fokus pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Pasal 12 Ayat 3 menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang

berkembang termasuk antisipasi adanya resesi global bagi ekonomi di daerah, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah. RKPD Kabupaten Pangandaran disusun dengan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing untuk memastikan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat;
c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional;
e. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara terukur, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah digunakan 4 (empat) pendekatan sebagaimana tertuang pada Pasal 8 ayat (1-4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Pendekatan politis, dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat pemilih menentukan pilihannya didasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah;
2. Pendekatan teknokratik, dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. Pendekatan partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan *(stakeholders)* pembangunan, dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi, dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan atas-bawah *(top-down*) dan bawah–atas *(bottom-up*), merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah

pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Selain keempat pendekatan di atas, penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan penganggaran berbasis *money-follow program* serta pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

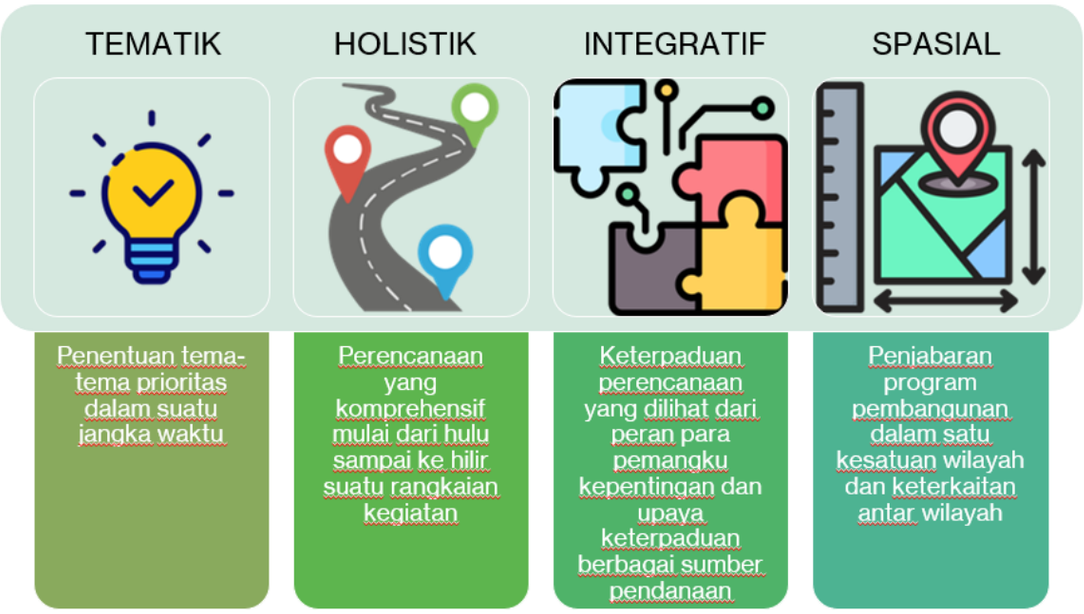

Gambar 1. 1 Pendekatan Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan RKPD dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RKPD juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD dijadikan

sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sehingga, RKPD diharapkan dapat memberikan arah yang tepat, akurat dan benar-benar menopang kebutuhan pembangunan di tengah terbatasnya kemampuan anggaran daerah. Prinsip-prinsip tersebut sekaligus menjadi dasar pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab, yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang diawali dengan *Kick Off Meeting* sebagai penanda dimulainya tahapan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025, persiapan penyusunan RKPD, penyusunan Rancangan Awal RKPD, Forum Konsultasi Publik yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran untuk penyempurnaan dokumen, penyusunan Rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang desa, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten, Forum Perangkat Daerah untuk membahas dan menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah. Pelaksanaan Musrenbang dan

Forum pembahasan RKPD ditempuh untuk menentukan kebijakan pada tahun rencana, melalui urutan prioritas yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Setelah rangkaian Musrenbang selesai, tahapan perencanaan pembangunan daerah dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Akhir RKPD untuk penajaman daftar prioritas rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja pembangunan daerah yang kemudian akan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan atau minggu ke-IV bulan Juni 2024.

Adapun tahapan dan jadwal penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 disajikan dalam gambar di bawah ini.

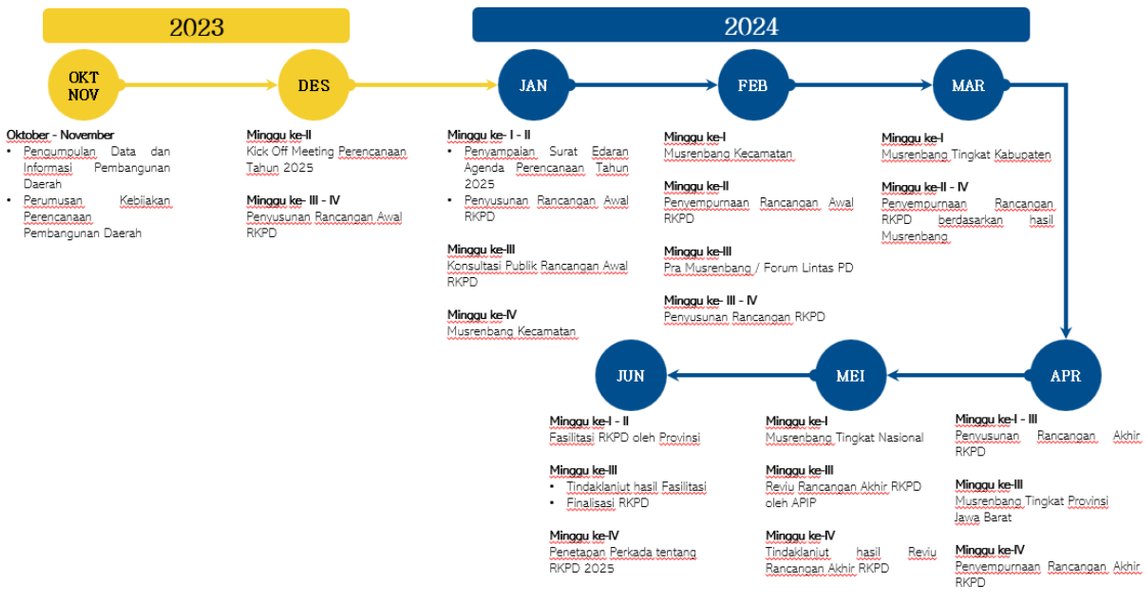

Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

Sumber: Bappeda Kabupaten Pangandaran, 2024

Penyusunan RKPD harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran, dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran. Keterkaitan rencana kinerja perangkat daerah dengan eksistensi kondisi dan potensi daerah yang dipadukan dengan permasalahan dan isu strategis terkini harus

mampu diformulasikan melalui dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 yang aktual dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan RKPD Provinsi Jawa Barat dengan prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021.

Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat dari Periode RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Pilkada, kepala daerah definitif tidak dapat menyelesaikan visi misinya sampai akhir periode di tahun 2026, karena pada awal tahun 2025 akan dilakukan pergantian kepala daerah baru berdasarkan hasil pilkada serentak pada November 2024 sebagaimana jadwal dan tahapan pelaksanaan telah ditetapkan oleh KPU melalui Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan memasuki tahap transisi arah pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan dan janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, sejak tahun 2024 arah kebijakan ditetapkan untuk percepatan pencapaian target akhir visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

Selain itu, kebijakan pembangunan diupayakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah yang mengalami ketidakstabilan diakibatkan oleh berbagai permasalahan yang terakumulasi sejak tahun 2019 yaitu pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya pembatasan kegiatan sosial masyarakat dan kebijakan *refocussing* anggaran untuk penanganan pandemi, bencana tsunami Pantai Anyer yang berdampak pada penurunan kunjungan wisata, penurunan pendapatan asli daerah akibat dari bencana Covid-19 dan isu bencana tsunami, dan adanya kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya penurunan kemampuan pembiayaan daerah dan menimbulkan utang daerah serta defisit anggaran sehingga mengharuskan dilakukannya pinjaman daerah supaya pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan. Salah satunya upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan fiskal daerah tersebut yaitu

melalui optimalisasi PAD, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, kebijakan portofolio pinjaman daerah yang diinisiasi pada tahun 2023 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan Kabupaten Pangandaran disusun dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju, kerangka pendanaan baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh melalui kolaborasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pihak swasta, akademisi dan dana umat serta mendorong partisipasi masyarakat.

Mengingat dinamika perkembangan daerah di atas, maka RKPD Tahun 2025 ini memiliki peran strategis dalam usaha pencapaian target kinerja akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan dari rangkaian prioritas pada tahun rencana RPJMD. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 mengusung tema **"Peningkatan Daya Saing Daerah"**. Tema pembangunan daerah tahun 2025 ditetapkan sebagai upaya untuk meningkatkan eksistensi, kemandirian, dan persaingan Pemerintah Kabupaten Pangandaran di tingkat provinsi dan nasional dalam berbagai bidang khususnya pada aspek daya saing sesuai dengan potensi yang dimiliki. Aspek daya saing daerah sesuai dengan indikator nasional Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dijabarkan ke dalam empat aspek indikator yaitu aspek ekosistem inovasi, aspek penguat/*enabling environtment*, aspek SDM/*Human Capital*, aspek pasar/market. Kebijakan tersebut didukung dari beberapa potensi dan capaian kinerja pembangunan daerah dibeberapa tahun terakhir diantaranya PDRB, pendapatan per kapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), IPM yang menunjukkan peningkatan. Namun dari sisi kemampuan fiskal dan pendapatan daerah masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain khususnya kabupaten/kota tetangga, oleh karenanya tema peningkatan daya saing daerah sudah sesuai dengan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2025 melalui interfensi kebijakan yang diarahkan pada peningkatan persaingan daerah khususnya di sektor SDM, perekonomian, dan inovasi daerah.

Tema tersebut berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang dioperasionalisasikan ke dalam enam prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut: 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mendongkrak perekonomian masyarakat

melalui penguatan industri pariwisata sebagai lokomotif pengembangan UMKM, peningkatan iklim investasi, dan pemberdayaan petani, nelayan, serta pembudidaya; 2) Penguatan sistem pendidikan kesetaraan, inklusif, berkarakter, dan berbudaya; 3) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan; 4) Pembangunan sosial budaya masyarakat yang tanggap terhadap bencana; 5) Pengelolaan lingkungan hidup dan pemerataan wilayah melalui penataan infrastruktur dasar, aksesibilitas serta konektivitas menuju pusat kegiatan strategis; dan 6) Reformasi birokrasi dan inovasi dalam tata kelola pemerintah dan pelayanan publik berbasis digital serta penguatan kondusifitas daerah dan stabilitas politik.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor xx Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasfikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 286);
39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan sebuah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun. Berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan antar suatu

dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen perencanaan terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20 tahunan,
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah 5 tahunan,
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga,
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan, dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD),
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sebagaimana dapat digambarkan sebagai berikut:

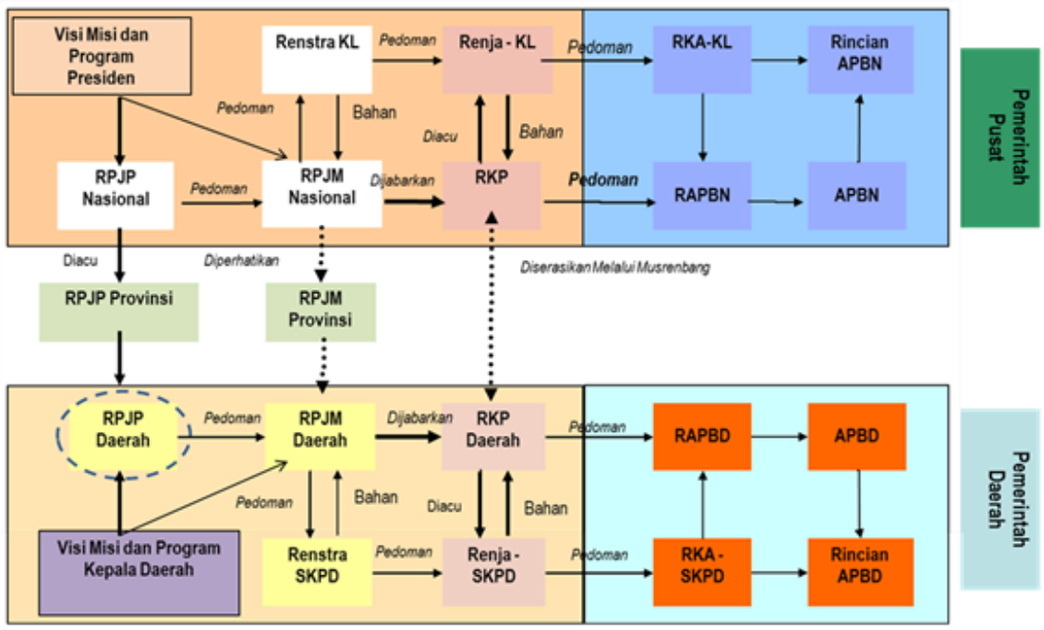

Gambar 1. 3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Lain
Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Hubungan antar dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. RPJMN dan RPJMD merupakan 2 dokumen perencanaan yang saling berhubungan dan bersinergi. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat 3.
b. RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah serta keuangan daerah.
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran disusun berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan prioritas program pembangunan daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.
d. RKPD disusun berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yaitu melalui penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya. Penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas

pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

e. RKPD disusun berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2026, yang dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi.
f. RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap perangkat daerah. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dan sifatnya saling memberi masukan antar dokumen.
g. Program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas bersama DPRD dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
h. RKPD menjadi pedoman/acuan para perangkat daerah untuk menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 tahun.

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menyempurnakan arah kebijakan dalam dokumen induk yaitu RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026. Selain itu, maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan sinergi antara sasaran dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026;
2. Untuk menjamin konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dapat dijadikan pedoman untuk:

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025;
3. Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025;
4. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana kerja tahunan agar target capaian RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, khususnya arah kebijakan pada tahun pertama dapat tercapai;
5. Memelihara keselarasan dan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyesuaian
1.3 Hubungan Antar Dokumen
1.4 Maksud dan Tujuan
1.5 Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Pada bab ini akan membahas mengenai evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Pangandaran pada Masa Pandemi
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah
2.4.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
2.4.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
2.5 Inovasi Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pangandaran
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.1.1 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional
4.1.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi
4.1.3 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025
4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

4.2.2 Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
4.2.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD
4.2.4 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Kabupaten Pangandaran
4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran
4.2.6 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2025

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

5.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2025
5.2. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan, yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

6.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama
6.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK)

BAB VII PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Tahun 2025, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pemerintah
Kabupaten Pangandaran

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran
2025

@pangandaranbappeda
https://bappeda.pangandarankab.go.id

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Bab ini berisi informasi kondisi umum daerah, potensi pengembangan wilayah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Bab ini juga menjadi acuan dalam perumusan arah kebijakan dan pengambilan keputusan penting pada masa mendatang.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi umum daerah terbagi menjadi tiga, yaitu aspek geografi, aspek demografi, dan potensi pengembangan wilayah. Keadaan Kabupaten Pangandaran secara umum potensi pengembangan wilayahnya dipengaruhi oleh beberapa kondisi wilayah eksisting yang disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran dan Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Pangandaran

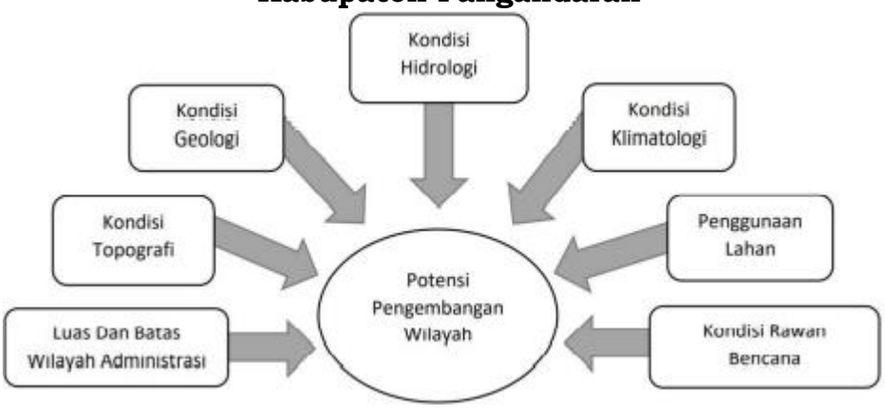

Sumber: Diolah Penyusun, 2023

Berdasarkan Gambar 2.1. terdapat enam kondisi yang mempengaruhi potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pangandaran yaitu batas wilayah administrasi, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, kondisi klimatologi, kondisi penggunaan lahan, dan kondisi daerah rawan bencana.

2.1.1.1 Karakteristik Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pangandaran ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten

Pangandaran di Provinsi Jawa Barat yang merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap).

Gambar 2. 2
Peta Administrasi Kabupaten Pangandaran

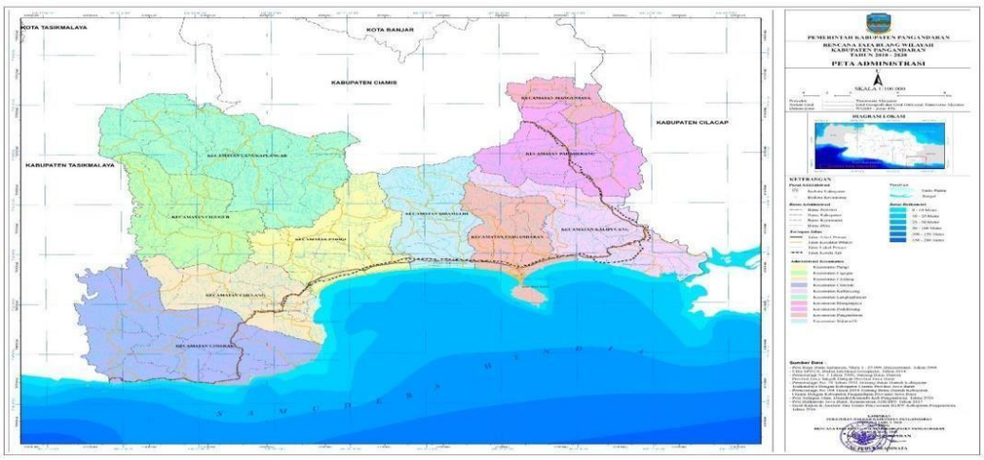

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Pangandaran terletak pada 108°8'0" sampai dengan 108°50'0" Bujur Timur dan 7°24'0" sampai dengan 7°54'20" Lintang Selatan. Sedangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, batas administratif wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

A. Sebelah Utara : Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

B. Sebelah Timur : Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah

C. Sebelah Selatan : Samudera Hindia

D. Sebelah Barat : Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari, Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya

Ibu Kota Kabupaten Pangandaran terletak di Kecamatan Parigi, yang memiliki cakupan wilayah terdiri dari 10 kecamatan dan 93 desa. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran kurang lebih 1.134,23 Km^2. Pembagian luas wilayah per-kecamatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Luas Administrtif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Parigi	111,23	10	53	122	399
2	Cijulang	94,37	7	38	90	252
3	Cimerak	190,22	11	51	99	357
4	Cigugur	117,82	7	39	64	200
5	Langkaplancar	205,54	15	66	115	414
6	Mangunjaya	31,98	5	28	47	233
7	Padaherang	112,76	14	60	142	443
8	Kalipucang	104,27	9	29	80	291
9	Pangandaran	75,57	8	33	90	344
10	Sidamulih	90,47	7	33	68	263
Jumlah		**1.134,23**	**93**	**430**	**917**	**3.196**

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran 2018-2038, diolah 2023

b. Kondisi Topografi

Kabupaten Pangandaran berada pada ketinggian antara 0 - 700 m di atas permukaan laut (dpl). Elevasi Kabupaten Pangandaran cenderung semakin tinggi dari arah selatan ke utara kecuali bagian barat pesisir yang wilayahnya perbukitan karst. Kondisi masing-masing kecamatan tercantum dalam tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2. 2 Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
1	Cimerak	• Kondisi geografis: bagian selatan dominan pesisir bertebing curam dan ke bagian utara merupakan perbukitan kapur. • Ketinggian: 3-80 mdpl dengan daerah dataran rendah atau pantai
2	Cijulang	• Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai. • Ketinggian: 2-185 mdpl dengan daerah dataran rendah/pantai.
3	Cigugur	• Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir melainkan perbukitan dan dataran tinggi. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Cigugur relatif sama antara 200-500 mdpl.
4	Langkaplancar	• Wilayah ini merupakan dataran tertinggi di Kabupaten Pangandaran. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Langkaplancar relatif sama antara 400-1.000 mdpl.
5	Parigi	• Ketinggian wilayah bervariasi antara 5-500 mdpl • Desa yang berada di dataran rendah yakni Desa Parigi, Karangjaladri, Cibenda, Karangbenda dan Ciliang.
6	Sidamulih	• Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai. • Ketinggian: 3-250 mdpl dengan daerah dataran tingginya yakni desa Kersaratu dan Kalijati.
7	Pangandaran	• Merupakan daerah pesisir pantai, merupakan ODTW Nasional dan memiliki Cagar Alam yang dilindungi. • Ketinggian: 3.500 mdpl.
8	Kalipucang	• Ketinggian wilayah bervariasi antara 2-400 mdpl, dengan desa yang berada di dataran tinggi yakni Desa Ciparakan (400 mdpl) dan Emplak (160 mdpl). • Daerah lainnya merupakan dataran rendah berkisar antara 2-8 mdpl.
9	Padaherang	• Wilayah ini bukan pesisir. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Padaherang bervariasi antara 13-600

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
		mdpl. ● Daerah yang berada di dataran tinggi yakni Desa Panyutran (600 mdpl) dan Bojongsari (245 mdpl). ● Sedangkan daerah lainnya merupakan dataran yang relatif sama berkisar antara 13-24 mdpl.
10	Mangunjaya	● Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir. ● Ketinggian wilayah di Kecamatan Mangunjaya relatif sama antara 13-17 mdpl.

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038, diolah 2023

Kabupaten Pangandaran berdasarkan kondisi tingkat kemiringan lerengnya, memiliki kemiringan lereng yang yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat garis sesar di bagian tengah timur Kabupaten Pangandaran yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga kemiringan lerengnya sangat curam. Kondisi masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
1	Cimerak	● Kemiringan lereng merata pada hampir semua desa dengan Kemiringan lereng sekitar 5% - 15%.
2	Cijulang	● Kemiringan lereng merata pada hampir semua desa dengan Kemiringan lereng sekitar 5% - 15%. ● Sebagian kecil wilayah di Desa Kertayasa dan Margacinta memiliki kemiringan lereng 15% - 25%.
3	Cigugur	● Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%. ● Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Harumandala dan Pagerbumi.
4	Langkaplancar	● Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%. ● Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian besar Desa Jayasari, Pangkalan, Bojongkondang, Bangunjaya, Langkaplancar, dan Cimanggu.

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
5	Parigi	• Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%. • Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Selasari.
6	Sidamulih	• Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%. • Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Kalijati, Sidamulih, dan Kersaratu.
7	Pangandaran	• Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%. • Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Pagergunung dan Sukahurip.
8	Kalipucang	• Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%. • Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil wilayah Desa Putrapinggan.
9	Padaherang	• Kemiringan lereng bervariasi antara 0% - 40%. • Wilayah pada bagian timur jalan provinsi hampir merata memiliki kemiringan lereng 0% - 8%. • Wilayah pada bagian barat jalan provinsi memiliki Kemiringan lereng yang bervariasi antara 8% - lebih dari 40%.
10	Mangunjaya	• Kemiringan lereng merata hampir pada seluruh desa dengan kisaran kemiringan lereng antara 0% - 5%.

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Wilayah dengan kemiringan lereng >40% perlu dikelola dengan baik, salah satunya adalah dengan upaya mempertahankan tanaman tegakannya untuk mengurangi risiko bencana longsor. Gambaran sebaran topografi dan kemiringan lereng di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sebagai gambaran topografi dan kemiringan lereng wilayah Kabupaten Pangandaran, dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2. 3
Peta Topografi Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Gambar 2. 4
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran

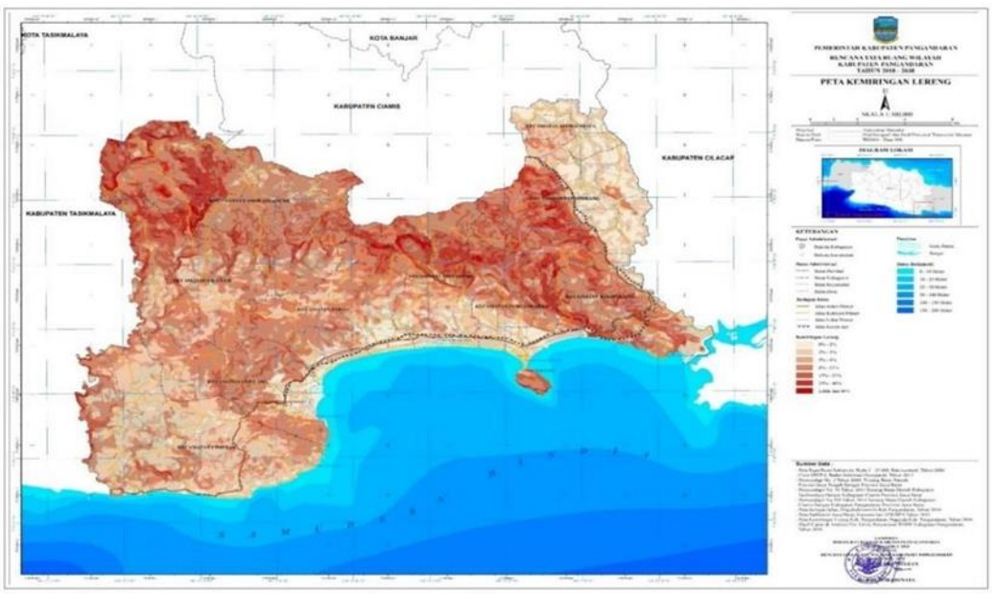

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

c. Kondisi Klimatologi

Iklim tropis yaitu musim kemarau (musim timur) dan musim penghujan (musim barat) di Kabupaten Pangandaran memiliki curah hujan rata-rata per tahun sekitar 1.647 mm, kelembaban udara antara 85-89% dengan suhu 20-30ºC. Musim kemarau dan musim hujan secara langsung akan mempengaruhi musim penangkapan ikan di perairan Pangandaran.

Musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Oktober, dimana pada saat musim ini laut tidak berombak besar dan perairan dalam keadaan tenang, sehingga operasi penangkapan ikan di laut tidak terganggu. Pada saat musim timur angin bersifat kering, karena membawa massa udara kering yang berdampak terjadi musim kemarau. Angin musim timur bergerak dari Australia ke Asia.

Pada saat musim hujan angin bertiup dari wilayah Asia kemudian melewati samudra Hindia menuju ke benua Australia. Pada kondisi ini, kedudukan semu matahari berada di belahan bumi selatan dan akan menyebabkan tekanan tinggi di kawasan Asia termasuk Indonesia, namun tekanan menjadi rendah di kawasan Australia. Peta sebaran curah hujan Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2. 5
Peta Curah Hujan

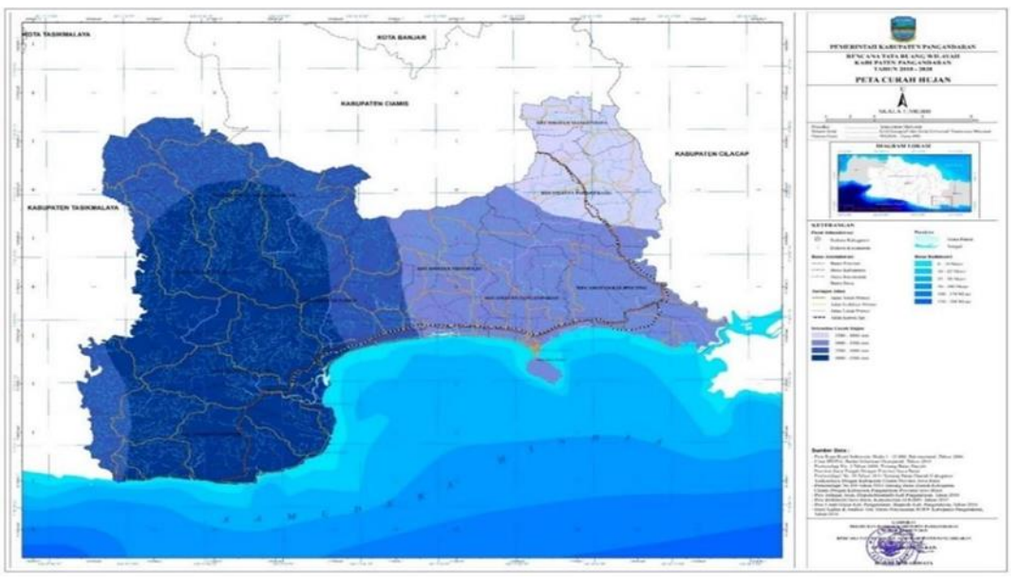

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

d. Kondisi Geologi

Berdasarkan kondisi geologi, Kabupaten Pangandaran merupakan daratan yang terbentuk pada periode tersier kecuali pada pantai yang landai merupakan daratan baru yang terbentuk akibat endapan laut yang berumur holosen. Kontrol struktur geologi sangat kuat di daerah ini. Di bagian tengah - timur terdapat patahan yang memanjang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara-barat laut. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan-lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa.

Gambar 2. 6
Peta Geologi Kabupaten Pangandaran

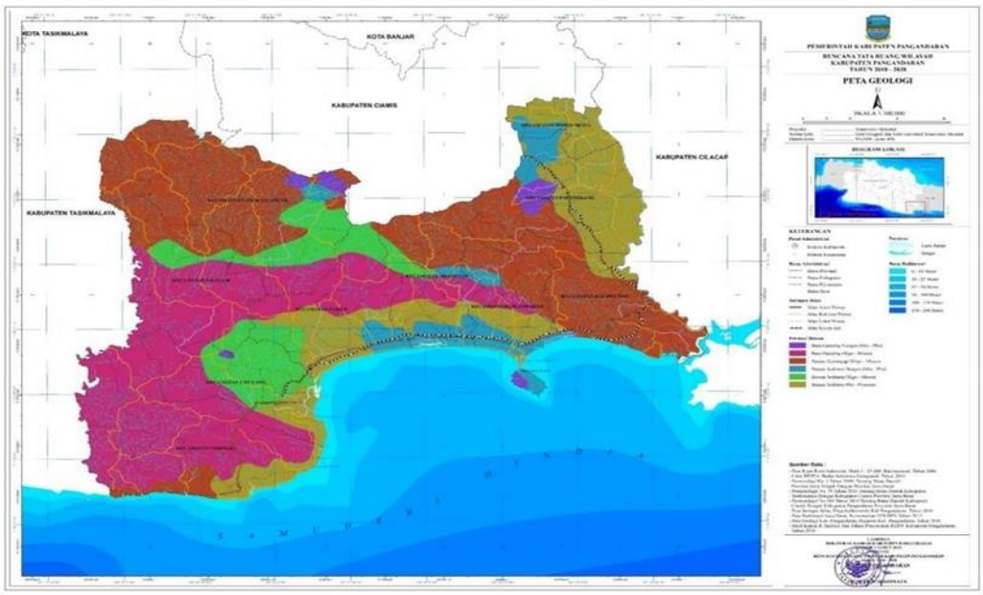

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Satuan geologi yang terdapat di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dalam lingkungan tertentu, diantaranya:

1. Satuan Geologi Lingkungan Dataran: Satuan berupa dataran dengan kemiringan lereng < 5%. Ketinggian antara 0-50 m di atas permukaan air laut. Melempar di pesisir pantai antara Pangandaran - Parigi - Cijulang dan Kalipucang.
2. Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Terjal: Kemiringan lereng >25%, ketinggian antara 100 - 700 m di atas permukaan laut, tersusun oleh breksi, batu pasir, batuan beku, batu gamping, dan tufa. Menghampar di bagian tengah memanjang ke arah Barat Daya Tenggara dan sebagian kecil di Bukit Pananjung membagi dua bagian zona pemisah air. Adapun yang paling banyak dijumpai yaitu di Kecamatan Langkaplancar.
   a. Perbukitan Terjal Padaherang-Kalipucang
      1) Tanah lapukan berupa lempung pasiran-kerikil, pasir lempungan, tebal berkisar antara 10-50 cm, daya dukung sedang- tinggi, agak kompak-kompak, permeabilitas sedang, porositas sedang. Muka air tanah berkisar antara 3-10 m, debit sumur gali <5 l/detik. Mata air debit <10 l/detik. Kualitas air tanah baik, jernih, tidak bau, warna air agak kekuningan.
      2) Longsoran mudah terjadi pada bukit terjal daya dukung tinggi kompak dan keras. Peruntukan ruang sebaiknya untuk

pengembangan hutan produksi dan yang lebih baik adalah untuk hutan lindung atau sebagai konservasi lahan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan baik pula untuk pengembangan komoditas perkebunan tanaman keras atau tanaman tahunan sebagai penguat tanah yang akan mengurangi gerakan tanah. Jalur jalan Kalipucang - Pangandaran bertumpu pada batuan yang kurang stabil. Sumber bahan galian terdiri atas batu belah lempung sebagai bahan bata merah, tras, dan tanah urug serta batu kapur.

b. Perbukitan Terjal Pananjung

Saat ini merupakan cagar alam dan hutan lindung untuk kepentingan pelestarian alam sekaligus sebagai obyek wisata. Fungsi kawasan lindung sangat baik yang berfungsi sebagai daerah resapan.

3. Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Karst (Batu Gamping): Merupakan morfologi yang khas batu gamping, batu gamping pasiran, permukaan kasar dan kemiringan lereng curam. Morfologi ini terhampar cukup luas di sekitar Pangandaran-Cijulang-Parigi hingga Cimerak dan meluas ke utara yaitu Padaherang-Kalipucang, dan penting sebagai daerah resapan. Debit air mata air >50 l/detik. Tanah lapukan umumnya berupa lempung berkerikil yang sangat subur untuk budidaya pertanian pada lahan kering. Ketebalan umumnya <1 m daya dukung sedang sampai dengan tinggi. Badan jalan yang bertumpu pada batuan ini sering terjadi jalan yang amblas, karena jenis batuan ini sangat labil. Adapun jenis batuan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4 Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)
1	Batu Gamping Neogen (Mio – Plio)	1.649,77
2	Batu Gamping Oligo – Miosen	35.296,43
3	Batuan Gunungapi Oligo – Miosen	37.349,30
4	Batuan Sedimen Neogen (Mio – Plio)	6.869,57
5	Batuan Sedimen Oligo – Miosen	11.800,95
6	Batuan Sedimen Plio – Plistosen	20.358,12

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)
Total		**113.324,15**

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Gambar 2. 7
Peta Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pangandaran

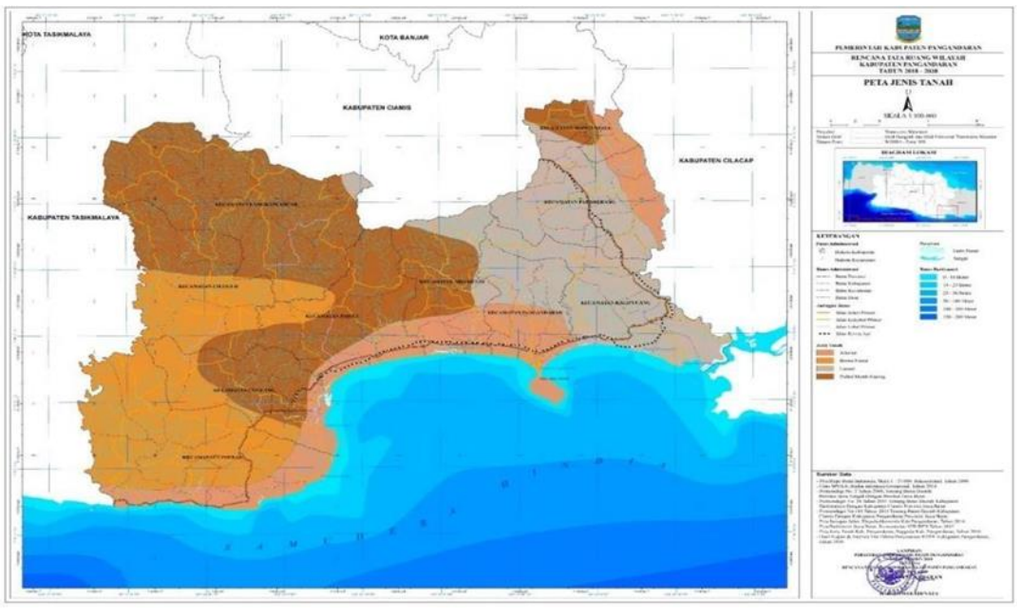

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Terdapat 4 jenis tanah di Kabupaten Pangandaran, diantaranya adalah alluvial, brown forest, latosol, dan podsol merah kuning. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium, tekstur beraneka ragam, belum terbentuk struktur, konsistensi dalam keadaan basah lekat. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai, dataran aluvial pantai dan daerah cekungan (depresi).

Jenis tanah brown forest merupakan jenis tanah mineral yang telah mengalami perkembangan profil, solum agak tebal, warna agak coklat kekelabuan hingga hitam, kandungan organik tinggi, tekstur geluh berdebu, struktur remah, konsistensi gembur dan bersifat licin berminyak (*smeary*), dan peka terhadap erosi. Tanah ini berasal dari batuan induk abu atau tuff vulkanik.

Jenis tanah latosol telah berkembang atau terjadi diferensiasi horizon, kedalaman dalam, tekstur lempung, struktur remah hingga gumpal, konsistensi gembur hingga agak teguh, warna coklat merah hingga kuning. Penyebarannya di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 300-1000 meter, batuan induk dari tuff, material vulkanik, breksi batuan beku intrusi.

Jenis tanah podsol merah kuning merupakan tanah mineral yang telah berkembang, solum (kedalaman) dalam, tekstur lempung hingga berpasir, struktur gumpal, konsistensi lekat, bersifat agak asam (pH kurang dari 5.5), kesuburan rendah hingga sedang, dan peka erosi. Tanah tersebar di daerah beriklim basah tanpa bulan kering, curah hujan lebih dari 2.500 mm/tahun. Luasan jenis tanah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Jenis Tanah di Kabupaten Pangandaran

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Alluvial	17.789,60
2	Brown Forest	26.458,61
3	Latosol	25.848,21
4	Podsol Merah Kuning	43.228,93
Total		113.325,35

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

e. Kondisi Hidrologi

Terdapat satu sungai besar yang melalui Kabupaten Pangandaran, yaitu sungai Citanduy yang merupakan muara bagi beberapa sungai kecil dengan muara terakhir sungai Citanduy ini adalah Sagara Anakan. Sungai Citanduy ini mengalir dari Panumbangan sampai Kalipucang. Kabupaten Pangandaran berada dalam dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu, DAS Ciwulan-Cilaki dan DAS Citanduy. Luasan masing-masing DAS yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pangandaran

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	DAS Ciwulan – Cilaki	91.250,39
2	DAS Citanduy	22.074,72
	Jumlah	**113.325,11**

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018- 2038

Gambar 2. 8
Peta Batas DAS Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Hidrologi di Kabupaten Pangandaran dibedakan dalam 2 estimasi produktivitas air tanah, yaitu:

1. Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir. Akuifer dengan produktifitas air sangat tinggi dengan kedalaman 10 meter terdapat pada fisiografi perbukitan bergelombang (lereng 15-40%). Komposisi litologi merupakan vulkan yang terdiri dari breksi gunung berapi, lava dan tufa, batu pasir, pasir tufaan, batu lanau, batu lempung sisipan lignit dan konglomerat. Akuifer ini terdapat di Kecamatan Pangandaran dan Parigi.
2. Akuifer dengan aliran melalui celahan, rekahan dan saluran. Akuifer ini terdapat dengan produktivitas sangat besar mencapai 10-100 liter/detik. Terdapat ada fisiografi datar bergelombang dengan komposisi litologi aluvium terdiri dari lempung, lanau, pasir dan kerikil. Penyebarannya terdapat di Kecamatan Cijulang dan Cimerak.

Air tanah dangkal di Kabupaten Pangandaran di kawasan pantai berasal langsung dari peresapan air hujan. Muka air tanah sangat bervariasi berkisar antara 2-9 m, pH berkisar antara 6-9 menunjukkan angka yang cukup tinggi. Mata air banyak dijumpai di daerah kaki bukit di daerah batu gamping dan breksi vulkanik. Debit mata air bervariasi di antara 0,2 liter/detik hingga 20 liter/detik bahkan ada juga yang mencapai 100 liter/detik.

Mata air di sekitar Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi sudah dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekitar. Kabupaten Pangandaran memiliki sumber air baku (mata air) yang merupakan milik Pemerintah Daerah yaitu:

1. Mata air Kalisodong yang terdapat di Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 105,0 C/det;
2. Mata air Guha Hawu yang terdapat di Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 7,5 C/det;
3. Mata air Madasari yang terdapat di Desa Masawah Kecamatan Cimerak, Debit 7,5 C/det;
4. Mata air Cijumleng yang terdapat di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih, Debit 32,5 C/det.

2.1.1.2 Kondisi Penggunaan Lahan

Kabupaten Pangandaran merupakan daerah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran sangat bervariatif dengan penggunaan lahan terbesar untuk lahan hutan rakyat yaitu seluas 30.202,04, kedua untuk lahan perkebunan negara atau swasta yaitu seluas kurang lebih 4.342,35 ha. Berikutnya penggunaan untuk lahan pekarangan dan bangunan seluas 24.678 Ha. Untuk lebih rinci penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2. 7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Irigasi teknis	9.651,00
2	Irigasi setengah teknis	3.578,98
3	Irigasi sederhana PU	1.950,00
4	Irigasi sederhana Non PU	-
5	Tadah hujan	8.906,00
6	Pasang surut	9,00
7	Lebak	607,00
8	Rawa	-
9	Pekarangan dan bangunan	24.678,00
10	Tegal/kebun/ladang/huma	24.917,00
11	Penggembalaan/padang rumput	1.758,00
12	Sementara tidak diusahakan	9.031,00
13	Hutan Rakyat	30.202,04
14	Hutan Negara	17.047,56
15	Hutan Mangrove	310,00

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
16	Perkebunan negara/swasta	4.342,35
17	Rawa yang ditanami	-
18	Tambak	-
19	Kolam/empang	13.272,00
20	Lain-lain	-
Grand Total		**150.259,93**

Sumber: LKPJ Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, diolah 2023

Gambar 2. 9
Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran

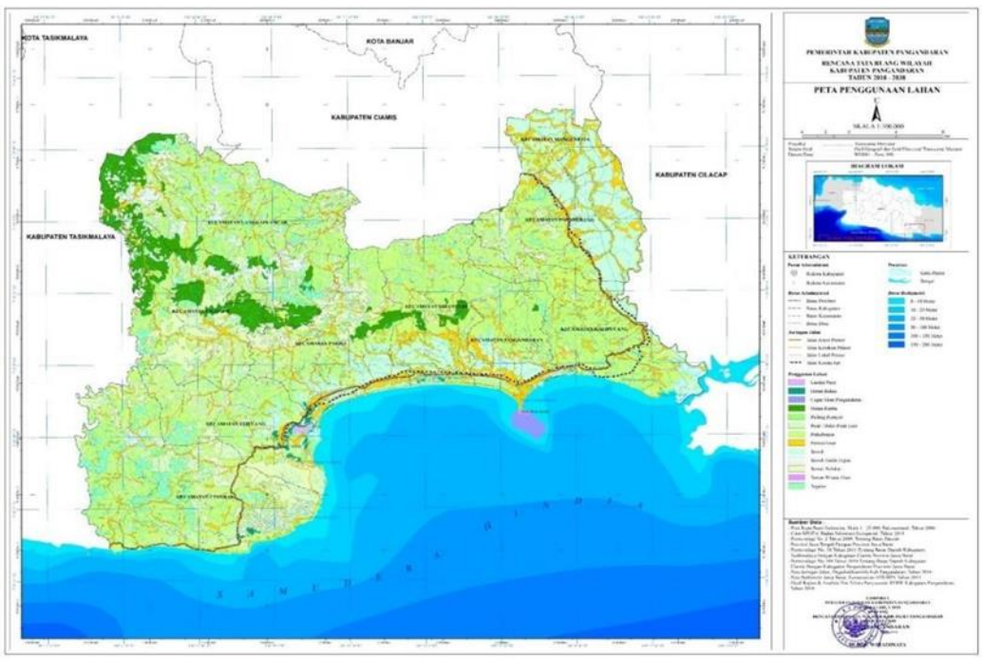

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2038

2.1.1.3 Kondisi Rawan Bencana

Kabupaten Pangandaran merupakan wilayah yang rawan terhadap kejadian bencana alam yang sering terjadi di Sebagian besar wilayah Kabupaten Pangandaran. Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Pangandaran diantaranya tsunami, gempa bumi, longsor, dan banjir. Tsunami rawan terjadi karena wilayah selatan Kabupaten Pangandaran berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, sementara banjir sering terjadi karena wilayah Kabupaten Pangandaran dilewati sungai besar dengan debit air yang cukup tinggi. Gempa bumi juga rawan terjadi karena terdapat patahan-patahan di wilayah Kabupaten Pangandaran, sementara bencana longsor dapat terjadi akibat jenis tanah yang memang rawan dan kemiringan terjal di beberapa tempat di Kabupaten Pangandaran.

1. Rawan Bencana Gempa Bumi Tektonik dan Tsunami

Terdapat patahan yang membentang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara-barat laut di bagian tengah-timur Kabupaten Pangandaran. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan-lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa. Letak Kabupaten Pangandaran yang rawan gempa dan berbatasan langsung dengan laut mengakibatkan Kabupaten Pangandaran juga sangat rawan terkena bencana tsunami.

Gambar 2. 10
Peta Rawan Gempa

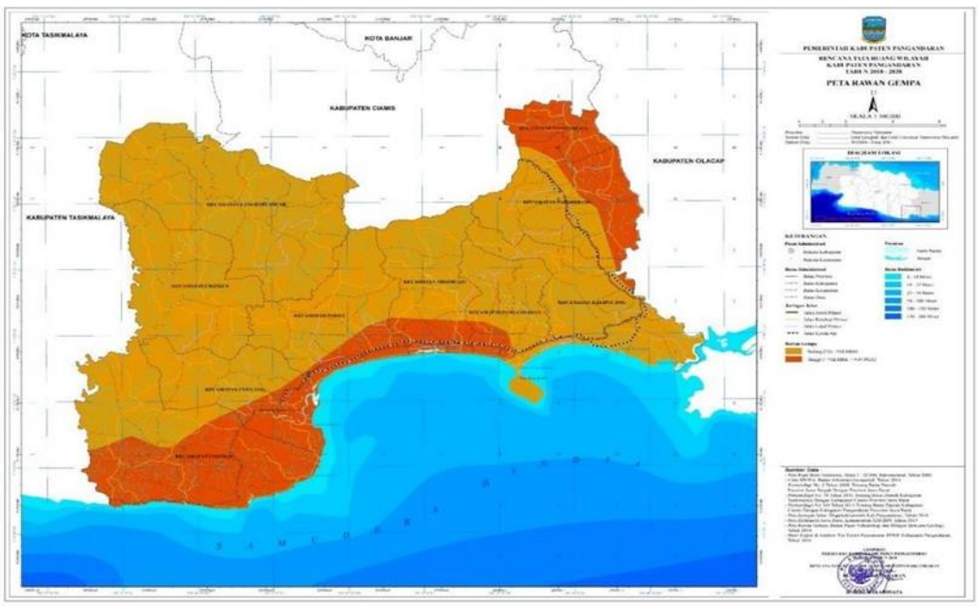

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Pantai Pangandaran yang berbentuk teluk dan memanjang dengan kemiringan lereng yang landai menjadi semacam “kantung tsunami” sehingga kawasan pesisirnya rawan bencana tsunami. Berikut adalah luasan wilayah Kabupaten Pangandaran yang rawan gempa dan tsunami:

Tabel 2. 8 Luasan Potensi Gempa di Kabupaten Pangandaran

No	Kerawanan Gempa	Luas (Ha)
1	MMI. VII – VIII	84.879,54
2	MMI. > VII	28.445,56
Total		**113.325,10**

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Tabel diatas menunjukan bahwa potensi terbesar gempa di Kabupaten Pangandaran berada di skala MMI. VII – VIII dengan luas wilayah sebesar 84.879,54 Ha. Sedangkan 28.445,56 Ha ada di skala MMI. > VII.

Tabel 2. 9 Luasan Potensi Tsunami di Kabupaten Pangandaran

No	Kerawanan Tsunami	Luas (Ha)
1	Zona Rawan Rendah Total	691,25
2	Zona Rawan Menengah Total	1.148,45
3	Zona Rawan Tinggi Total	1.425,42
Total		**3.265,12**

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Tabel diatas menunjukan bahwa total luasan potensi tsunami di Kabupaten Pangandaran sebesar 3.265,12 Ha. Luas potensi tsunami ini dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni zona rawan rendah total dengan luas sebesar 691,25 Ha, zona rawan menengah total dengan luas sebesar 1.148,45 Ha, dan zona rawan tinggi total dengan luas sebesar 1.425,42 Ha.

Gambar 2. 11
Peta Rawan Tsunami

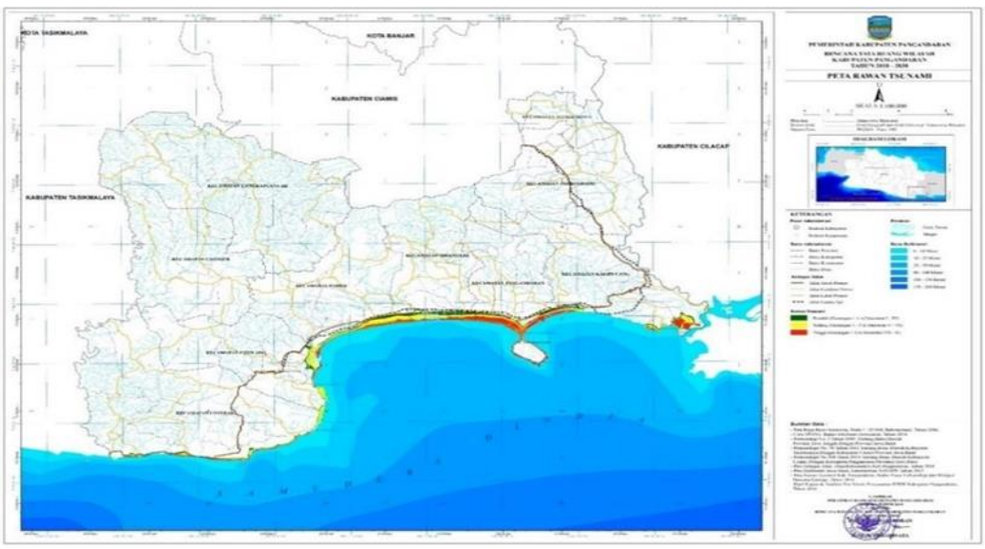

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

2. Rawan Bencana Gerakan Tanah

Daerah perbukitan Kabupaten Pangandaran merupakan Kawasan yang rawan bencana Gerakan tanah disebabkan kondisi tanah yang tidak stabil dan kemiringan lereng yang besar. Faktor lain penyebab rawan bencana Gerakan tanah adalah curah hujan yang tinggi dan alih fungsi lahan di daerah perbukitan. Dengan adanya kawasan-kawasan yang rawan gerakan tanah, berarti lahan permukiman harus berada pada tingkat kemiringan lereng yang rendah. Potensi gerakan tanah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2. 10 Luasan Potensi Gerakan Tanah di Kabupaten Pangandaran

No	Kerawanan Gerakan Tanah	Luas (Ha)
1	Sangat Rendah	25.774,32
2	Rendah	51.309,74
3	Menengah	34.519,48
4	Tinggi	1.721,57
Total		**113.325,11**

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Gambar 2. 12
Peta Pergerakan Tanah

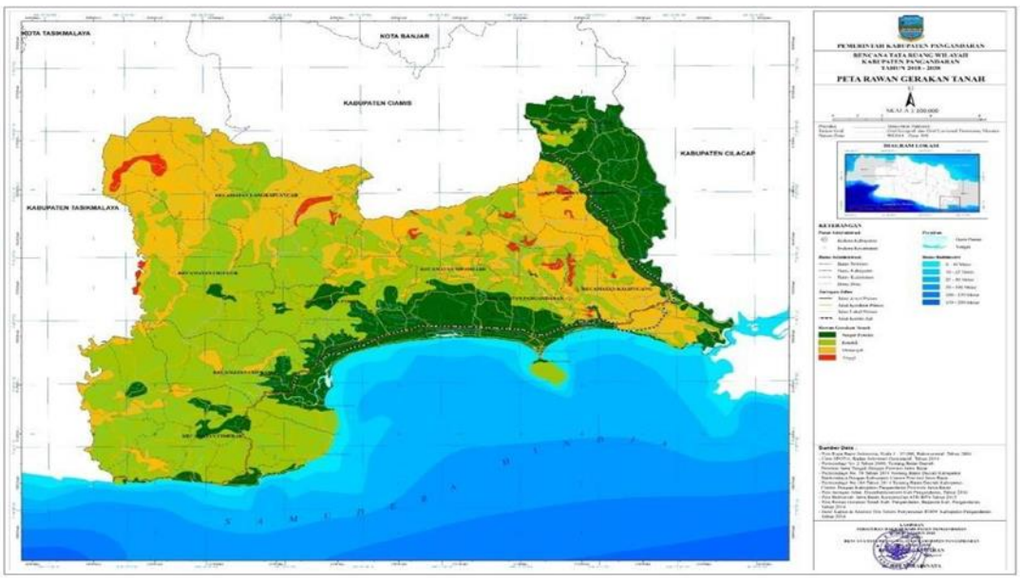

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

3. Rawan Bencana Banjir

Wilayah dataran rendah Kabupaten Pangandaran merupakan hasil proses pengendapan material laut dan sungai sehingga sesuai kodrat alam, daerah yang dekat dengan sungai merupakan daerah dataran banjir yang selalu tergenang jika debit air sungai meningkat. Dataran banjir ini adalah daerah yang cukup subur namun tidak dapat dikembangkan secara maksimal. Berikut adalah luasan wilayah Kabupaten Pangandaran yang rawan banjir pada Tabel 2.11.

Tabel 2. 11 Luasan Potensi Bencana Banjir di Kabupaten Pangandaran

No	Kerawanan Banjir	Luas (Ha)
1	Tidak Rawan Banjir	95.144,98
2	Rawan Banjir	18.180,35
Total		**113.325,33**

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Pangandaran memiliki luas wilayah 18.180,35 Ha yang berpotensi mengalami bencana banjir. Adapun wilayah yang rawan banjir tersebut meliputi sebagian kecil dari setiap kecamatan. Berikut merupakan kecamatan yang wilayahnya termasuk kedalam daerah rawan banjir yaitu Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Parigi, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Padaherang, dan Kecamatan Mangunjaya. Bencana banjir tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti curah hujan yang tinggi yang menyebabkan air sungai meluap serta air laut pasang yang menyebabkan banjir rob. Meskipun dari setiap kecamatan tersebut hanya sebagian kecil daerah yang rawan banjir namun daerah rawan banjir ini hendaknya segera diminimalisir untuk mengurangi dampak yang terjadi kedepannya.

2.1.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah dan Pola Ruang

Daya dukung Potensi Pengembangan Wilayah diperoleh dari analisis Satuan Kapasitas Lahan (SKL). Inti dari analisis SKL secara keseluruhan adalah analisis daya tampung lahan, melihat daya dukung lahan yang cocok untuk pengembangan sebagai kawasan perkotaan/pedesaan dengan intensitas kegiatan budidaya di dalamnya, baik itu pemukiman, pertanian, perkebunan dan budidaya lainnya.

Dalam analisis SKL yang menghasilkan daya pengembangan tanah dibagi menjadi 2 kelas yaitu rendah dan tinggi. Kawasan dengan kelas daya pengembangan tinggi menjadi kawasan budidaya, sedangkan kawasan dengan kelas daya pengembangan rendah hanya dapat digunakan untuk kawasan lindung. Peta kemampuan lahan dapat dilihat pada Gambar 2. 13.

Gambar 2. 13
Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Pangandaran

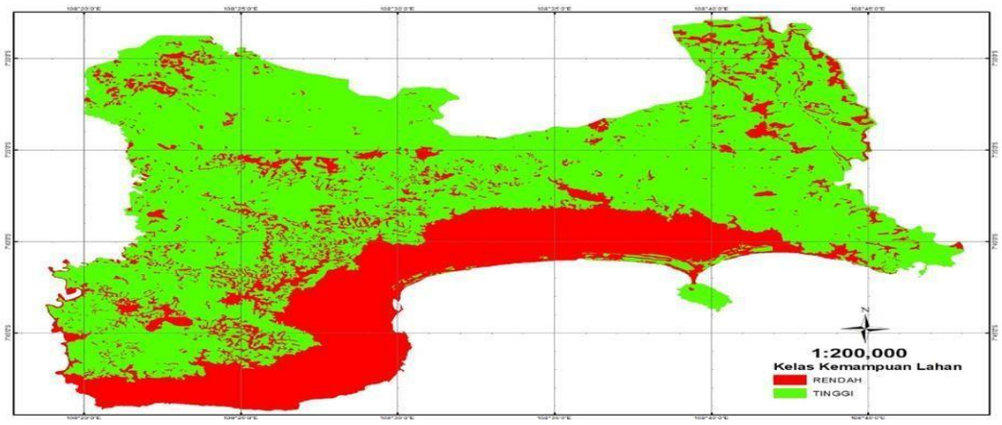

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038

Gambar 2. 14
Peta Rencana Struktur Ruang

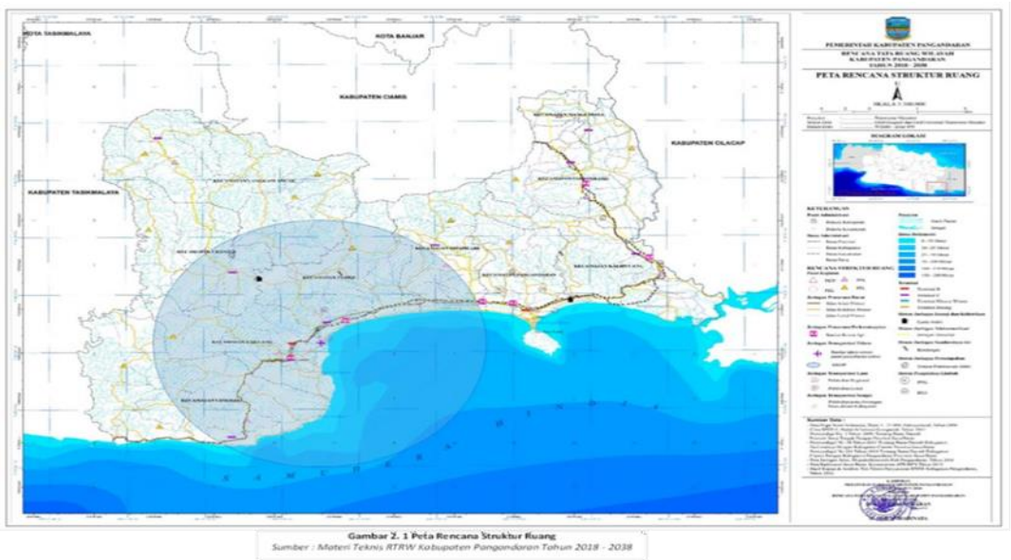

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038

Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran terdiri antara Rencana Kawasan Lindung dan Budidaya. Pembagian proporsi antara rencana kawasan lindung dan budidaya yaitu sebesar 22,66% untuk kawasan lindung dan 77,34% untuk kawasan budidaya.

1. Kawasan Lindung

Dalam rencana kawasan lindung terdapat daerah resapan air sebesar 3,02% dari luas wilayah Kabupaten Pangandaran, wilayah sempadan pantai sebesar 0,56% dari luas wilayah Kabupaten Pangandaran, wilayah sempadan sungai sebesar 3,50% dari total luas wilayah Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran, kawasan sekitar danau/situ/waduk sebesar 0,03% dari luas Kabupaten Pangandaran, Cagar Alam pananjung Pangandaran

sebesar 0,40% dari total luas Kabupaten Pangandaran, Cagar Alam laut pananjung Pangandaran sebesar 0,41% dari luas luas Kabupaten Pangandaran, kawasan hutan pantai mangrove 0,17% dari luas Kabupaten Pangandaran, taman wisata alam Pananjung 0,03% dari luas Kabupaten Pangandaran, kawasan lindung secara geologis 13,95% dari total wilayah Kabupaten Pangandaran dan wilayah bencana tsunami sebesar 0,59% dari luas wilayah Kabupaten Pangandaran

2. Kawasan Budidaya

Pada rencana kawasan budidaya terdapat hutan produksi sebesar 7,58% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, hutan produksi terbatas sebesar 7,12% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, pertanian lahan basah sebesar 13,28% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, pertanian lahan kering sebesar 7,12% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, perkebunan sebesar 26,26% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan industri sebesar 0,50% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan permukiman perkotaan sebesar 7,57% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran dan kawasan permukiman perdesaan sebesar 10,65% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran yang tersaji pada Tabel 2. 12.

Tabel 2. 12 Rencana Pola Ruang

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	(%)
Rencana Kawasan Lindung			
1	Kawasan Resapan Air	3.441,07	3,02 %
2	Kawasan Sempadan Pantai	636,60	0,56 %
3	Kaswasan Sempadan Sungai	3.990,00	3,50 %
4	Kawasan Sekitar danau/situ/embung	33,06	0,03 %
5	Cagar Alam Pananjung Pangandaran	454,62	0,40 %
6	Cagar Alam Laut Pananjung Pangandaran	470	0,41 %
7	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	188,00	0,17 %
8	Taman Wisata Alam Pananjung	34,32	0,03 %
9	Kawasan Lindung Geologi	15.882,42	13,95 %
10	Kawasan Bencana Tsunami	674,00	0,59 %
Jumlah		25.804,09	22,66 %
Rencana Kawasan Budidaya			
1	Hutan Produksi	8.626,00	7,58 %
2	Hutan Produksi Terbatas	8.102	7,12 %
3	Pertanian Lahan Basah	15.125ū	13,28 %
4	Pertanian Lahan Kering	4.997,00	7,12 %
5	Perkebunan	29.894,00	26,26 %

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	(%)
6	Kawasan Industri	565,08	0,50 %
7	Kawasan Permukiman Perkotaan	8.614,00	7,57 %
8	Kawasan Permukiman Perdesaan	12.125,00	10,65 %
Jumlah		88.046, 87	77,34 %
Jumlah Total Kabupaten		113.850,98	100%

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038

Di bawah ini adalah peta rencana pola ruang kawasan wisata (Gambar 2. 15) dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pangandaran (Gambar 2. 16).

Gambar 2. 15
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038

Gambar 2. 16
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran

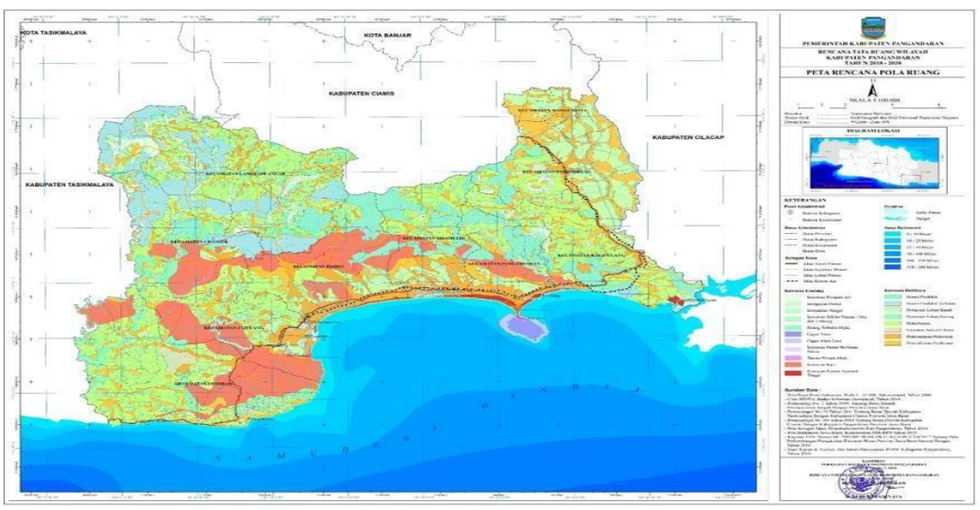

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038

2.1.1.5 Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Pada bagian ini menjelaskan secara umum keadaan demografi di Kabupaten Pangandaran. Adapun yang dibahas dalam sub bab ini adalah mengenai jumlah penduduk, kepadatan penduduk, komposisi penduduk, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan hingga jumlah penduduk yang bekerja.

Data disajikan dengan prinsip legal formal dan diperoleh dari instansi yang berwenang. Artinya bahwa data yang tersaji diperoleh langsung salah satunya dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan berdasarkan kartu identitas/KTP. Namun terkadang informasi dalam KTP tidak sesuai dengan kondisi saat ini, yang dapat diakibatkan tidak di updatenya kartu identitas/KTP oleh pemegangnya sehingga mengakibatkan perbedaan data dengan kenyataan di lapangan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 yaitu 431,46 ribu jiwa. Terdiri dari 215,69 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 215,76 ribu jiwa penduduk perempuan, sehingga angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Pangandaran sebesar 99-100 penduduk laki-laki di setiap 100 penduduk perempuan.

Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran 2023

No	Kecamatan	Penduduk (Ribu Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2023	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Parigi	47	0,64	97,88
2	Cijulang	28	0,19	96,41
3	Cimerak	50	0,92	100,28
4	Cigugur	23	0,53	101,74
5	Langkaplancar	52	0,54	102,12
6	Mangunjaya	33	0,81	100,06
7	Padaherang	69	0,72	100,41
8	Kalipucang	39	0,44	100,12
9	Pangandaran	60	0,80	100,47
10	Sidamulih	30	0,79	98,79
Jumlah		**431**	**0,67**	**99,97**

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2024

Jika dilihat berdasarkan kecamatan, Langkaplancar memiliki rasio jenis kelamin tertinggi, yaitu 102,12, sedangkan yang terendah Kecamatan Cijulang yaitu 96,41. Sebagian besar kecamatan memiliki angka rasio jenis kelamin lebih lebih dari 100, yang artinya jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi, kecuali di tiga kecamatan yakni Kecamatan Parigi, Cijulang, dan Sidamulih. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Padaherang yang dihuni sebanyak 69,48 ribu jiwa (16,10 persen). Sementara itu, kecamatan dengan populasi terkecil adalah Kecamatan Cigugur yang memiliki 23,13 ribu penduduk.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah. Pada tahun 2023, persebaran penduduk Kabupaten Pangandaran bervariasi antar kecamatan, dimulai dari yang terendah 226,23 jiwa per kilometer persegi yaitu di kecamatan Cigugur, dan yang memiliki kepadatan penduduk terendah kedua yaitu Kecamatan Kalipucang dengan tingkat kepadatan 283,28 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Mangunjaya dengan kepadatan 1.003,54 jiwa per kilometer persegi, dan tertinggi kedua yaitu Kecamatan Pangandaran dengan kepadatan 980,48 jiwa per kilometer persegi. Berikut gambaran luas wilayah, persentase jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Pangandaran tahun 2023.

Tabel 2. 14 Persentase Penyebaran Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km²
1	Parigi	111,23	10,90	479,92
2	Cijulang	94,37	6,47	316,86
3	Cimerak	190,22	11,69	426,20
4	Cigugur	117,82	5,36	226,23
5	Langkaplancar	205,54	11,99	292,04
6	Mangunjaya	31,98	7,63	1.003,54
7	Padaherang	112,76	16,11	585,27
8	Kalipucang	104,27	8,98	283,28
9	Pangandaran	75,57	13,81	980,48
10	Sidamulih	90,47	7,06	390,66
Jumlah		**1.134,23**	**100,00**	**426,80**

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2024

c. Komposisi Penduduk

Penduduk merupakan objek sasaran pembangunan sekaligus subjek pelaku pembangunan yang berperan menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Potensi dan tantangan pembangunan daerah juga ditentukan oleh keadaan riil penduduk dan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus menempatkan penduduk sebagai pusat dari setiap kebijakan pembangunan yang dikembangkan. Komposisi penduduk berdasarkan struktur usia berkisar antara 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, komposisi ini menggambarkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yang dapat menggambarkan semakin banyak jumlah penduduk yang produktif semakin rendah angka ketergantungannya dan sebaliknya.

Tabel 2. 15 Komposisi Penduduk Kabupaten Pangandaran Menurut Kelompok Umur Tahun 2023

No	Struktur Usia	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	0-4	16.136	15.441	31.577
2	5-9	14.419	13.722	28.141
3	10-14	15.411	14.413	29.824
4	15-19	16.774	15.795	32.569
5	20-24	16.872	15.950	32.822
6	25-29	16.932	15.875	32.807
7	30-34	15.881	15.206	31.087
8	35-39	14.624	14.503	29.127
9	40-44	13.710	13.964	27.674
10	45-49	13.746	14.514	28.260
11	50-54	13.855	15.006	28.861
12	55-59	13.344	14.585	27.929
13	60-64	12.041	12.865	24.906
14	65-69	9.534	10.025	19.559
15	70-74	6.737	6.837	13.574
16	75+	5.680	7.067	12.747
Jumlah		**215.696**	**215.768**	**431.464**

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2024

Gambar 2. 17
Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

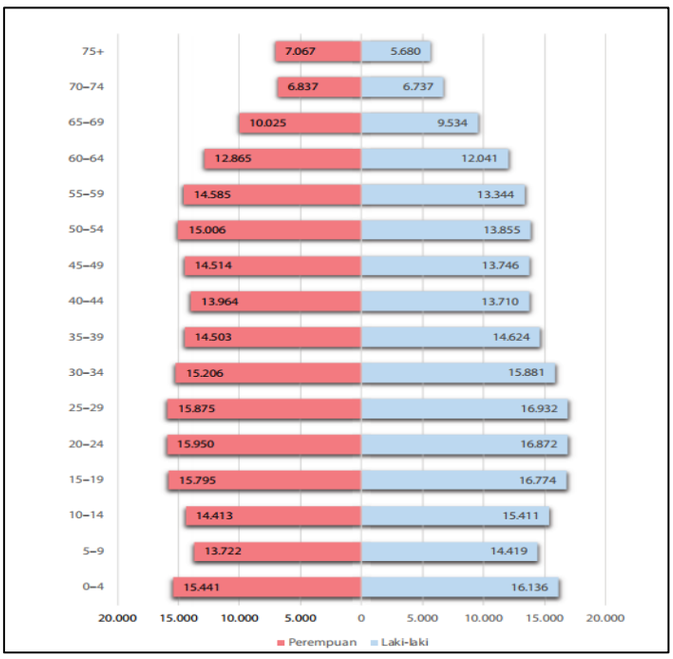

Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran, 2024

Pengaruh keberhasilan pembangunan kependudukan dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dari semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), yang berarti semakin rendah rasio beban tanggungan, dapat membuka peluang bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan kemampuannya di segala bidang. Tabel 2.16 di bawah ini menunjukkan angka beban ketergantungan penduduk.

Tabel 2. 16 Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Usia Produktif (15 – 64)	Usia Tidak Produktif		Dependency Rasio
			0 – 14	65 +	
1	Laki-laki	147.779	45.966	21.951	45,96
2	Perempuan	148.263	43.576	23.929	45,53
Jumlah		296.042	89.542	45.880	45,74

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2024 diolah

Berdasarkan tabel 2.16 yang menunjukkan jumlah tanggungan kurang dari 50%. Artinya kita sudah memasuki masa bonus demografi. Jika bonus demografi digunakan dengan benar, maka akan membuka *window of opportunity*. Peluang untuk mempercepat roda perekonomian lebih tinggi karena banyaknya kelompok usia produktif. Namun, jika periode bonus

demografi tidak digunakan, bukan peluang yang didapat, melainkan bencana sosial. Tingkat pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas dapat meningkat. Bonus demografi yang terkait dengan pembangunan manusia akan berdampak besar pada kemajuan daerah. Bersama-sama, era produktif menggerakkan roda perekonomian. Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya pengangguran dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya diharapkan puncak bonus demografi dan produktivitas penduduk akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Ketersediaan pekerjaan yang melimpah akan mencegah pekerja yang sangat terampil untuk mencari pekerjaan dan pindah ke kabupaten atau daerah lain. Semakin banyak sumber daya manusia yang berkualitas yang tinggal di daerah tersebut, semakin nyata keberhasilan pembangunan manusia. Karena tingkat ketergantungan yang tinggi, akan mengurangi pilihan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas hidupnya yang tentunya berdampak pada penurunan dan peningkatan angka IPM.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah akan sangat mempengaruhi peningkatan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) karena salah satu faktor dalam IPM adalah Pendidikan, yang merupakan gabungan dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Semakin banyak orang yang bersekolah dan menyelesaikan pendidikannya, maka nilai Indeks Pendidikan akan semakin tinggi. Kondisi Pendidikan penduduk Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2. 17.

Tabel 2. 17 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

No	Status Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	(orang)	(%)
1	Tidak/Blm Sekolah	61.285	56.955	118.240	26,74%
2	Blm Tamat SD/ Sederajat	14.381	12.475	26.856	6,07%
3	SD/Sederajat	75.577	86.876	162.453	36,74%
4	SMP/Sederajat	35.223	33.810	69.033	15,61%
5	SMA/Sederajat	27.255	21.794	49.049	11,09%
6	Diploma I/II	784	814	1.598	0,36%
7	Akademi/Diploma III	1.163	1.561	2.724	0,62%
8	Diploma IV/Strata I	5.660	5.857	11.517	2,60%

No	Status Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	(orang)	(%)
9	Strata-II	470	227	697	0,16%
10	Strata-III	27	11	38	0,01%
Jumlah		**221.825**	**220.380**	**442.205**	**100,00%**

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran yang menyelesaikan pendidikan strata 1 sebanyak 11.517 orang, jenjang Diploma I dan II sebanyak 1.598 orang, SMA/sederajat sebanyak 49.049 jiwa dan SMP/sederajat sebanyak 69.033 jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pangandaran sudah mulai meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak bersekolah/belum sekolah yaitu sebanyak 118.240 orang, dimana 31.577 orang tidak bersekolah (0-4 tahun) dan selebihnya adalah penduduk usia sekolah hingga dewasa, namun tidak mengenyam pendidikan. Dari kinerja tersebut menghasilkan indeks pendidikan sebesar 60,97 pada tahun 2023. Angka tersebut masih dibawah rata-rata indeks pendidikan Provinsi Jawa Barat, sehingga harus ada program pemerintah daerah untuk mendongkrak indeks pendidikan Kabupaten Pangandaran, khususnya dari jenjang pendidikan nonformal/kesetaraan.

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu ditujukan untuk meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha agar penduduk dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk menyerap tenaga kerja tambahan yang masuk ke pasar tenaga kerja setiap tahunnya, sehingga angka pengangguran dapat ditekan dengan cara menyalurkan tenaga kerja pada lapangan pekerjaan yang tersedia.

Dari sisi tenaga kerja, indikator kesempatan kerja (*demand for labour*) adalah hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan menyerap tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja/peluang bagi pencari kerja. Kesempatan kerja adalah kesempatan atau kondisi yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang mau dan mampu bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan

berdasarkan keahlian, keterampilan dan bakat masing-masing. Dengan demikian, kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan akan tenaga kerja. Sedangkan angkatan kerja *(labour force*) diartikan sebagai bagian dari penduduk yang mempunyai pekerjaan atau sedang mencari peluang untuk melakukan pekerjaan produktif sebagai sumber daya manusia. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat menyerap lebih banyak penduduk yang bekerja.

Tabel 2. 18 Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

NO	Pekerjaan	Jumlah Orang		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	(Orang)	(%)
1	Tidak/Belum Bekerja	80.234	66.755	146.989	33,24%
2	Mengurus Rumah Tangga	32	94.632	94.664	21,41%
3	Pelajar/Mahasiswa	13.816	10.444	24.260	5,49%
4	Pensiunan	1.547	682	2.229	0,50%
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2.063	1.925	3.988	0,90%
6	Tentara Nasional Indonesia	169	3	172	0,04%
7	Kepolisian Ri (Polri)	207	4	211	0,05%
8	Perdagangan	1.717	1.151	2.868	0,65%
9	Petani/Pekebun	39.916	21.429	61.345	13,87%
10	Peternak	71	15	86	0,02%
11	Nelayan/Perikanan	2.477	28	2.505	0,57%
12	Industri	110	15	125	0,03%
13	Konstruksi	24	3	27	0,01%
14	Transportasi	148	-	148	0,03%
15	Karyawan Swasta	6.935	2.520	9.455	2,14%
16	Karyawan Bumn	293	53	346	0,08%
17	Karyawan Bumd	59	19	78	0,02%
18	Karyawan Honorer	1.352	1.548	2.900	0,66%
19	Buruh Harian Lepas	14.871	1.933	16.804	3,80%
20	Buruh Tani/Perkebunan	13.647	6.006	19.653	4,44%
21	Buruh Nelayan/Perikanan	882	41	923	0,21%
22	Buruh Peternakan	55	20	75	0,02%
23	Pembantu Rumah Tangga	4	354	358	0,08%
24	Tukang Cukur	26	-	26	0,01%
25	Tukang Listrik	23	1	24	0,01%
26	Tukang Batu	139	2	141	0,03%
27	Tukang Kayu	615	-	615	0,14%
28	Tukang Sol Sepatu	6	1	7	0,00%
29	Tukang Las/Pandai Besi	83	1	84	0,02%
30	Tukang Jahit	453	308	761	0,17%
31	Tukang Gigi	4	-	4	0,00%
32	Penata Rias	3	41	44	0,01%
33	Penata Busana	1	2	3	0,00%
34	Penata Rambut	3	6	9	0,00%

NO	Pekerjaan	Jumlah Orang		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	(Orang)	(%)
35	Mekanik	333	1	334	0,08%
36	Seniman	62	15	77	0,02%
37	Tabib	5	-	5	0,00%
38	Paraji	1	50	51	0,01%
39	Perancang Busana	2	-	2	0,00%
40	Penterjemah	1	-	1	0,00%
41	Imam Masjid	97	-	97	0,02%
42	Pendeta	2	1	3	0,00%
43	Pastor	-	-	-	0,00%
44	Wartawan	14	-	14	0,00%
45	Ustadz/Mubaligh	261	37	298	0,07%
46	Juru Masak	1	5	6	0,00%
47	Promotor Acara	-	-	-	0,00%
48	Anggota Dpr Ri	-	-	-	0,00%
49	Anggota Dpd Ri	-	-	-	0,00%
50	Anggota Bpk	-	-	-	0,00%
51	Presiden	-	-	-	0,00%
52	Wakil Presiden	-	-	-	0,00%
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	-	-	-	0,00%
54	Anggota Kabinet Kementrian	-	-	-	0,00%
55	Duta Besar	-	-	-	0,00%
56	Gubernur	-	-	-	0,00%
57	Wakil Gubernur	-	-	-	0,00%
58	Bupati	1	-	1	0,00%
59	Wakil Bupati	1	-	1	0,00%
60	Walikota	-	-	-	0,00%
61	Wakil Walikota	-	-	-	0,00%
62	Anggota Dprd Prop.	1	-	1	0,00%
63	Anggota Dprd Kab./Kota	29	10	39	0,01%
64	Dosen	26	18	44	0,01%
65	Guru	439	695	1.134	0,26%
66	Pilot	-	-	-	0,00%
67	Pengacara	5	-	5	0,00%
68	Notaris	1	2	3	0,00%
69	Arsitek	3	-	3	0,00%
70	Akuntan	1	-	1	0,00%
71	Konsultan	10	-	10	0,00%
72	Dokter	45	44	89	0,02%
73	Bidan	-	258	258	0,06%
74	Perawat	105	143	248	0,06%
75	Apoteker	9	18	27	0,01%
76	Psikiater/Psikolog	-	-	-	0,00%
77	Penyiar Televisi	-	-	-	0,00%
78	Penyiar Radio	1	2	3	0,00%
79	Pelaut	51	-	51	0,01%
80	Peneliti	4	-	4	0,00%
81	Sopir	1.212	-	1.212	0,27%
82	Pialang	2	3	5	0,00%
83	Paranormal	1	-	1	0,00%
84	Pedagang	3.032	2.536	5.568	1,26%
85	Perangkat Desa	891	204	1.095	0,25%

NO	Pekerjaan	Jumlah Orang		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	(Orang)	(%)
86	Kepala Desa	75	1	76	0,02%
87	Biarawan/Biarawati	-	-	-	0,00%
88	Wiraswasta	33.094	6.371	39.465	8,92%
89	Anggota Lembaga Tinggi Lain	21	24	45	0,01%
90	Artis	-	-	-	0,00%
91	Atlit	-	-	-	0,00%
92	Cheff	-	-	-	0,00%
93	Manajer	-	-	-	0,00%
94	Tenaga Tata Usaha	-	-	-	0,00%
95	Operator	-	-	-	0,00%
96	Pekerja Pengolahan Kerajinan	1	-	1	0,00%
97	Teknisi	-	-	-	0,00%
98	Asisten Ahli	-	-	-	0,00%
99	Pekerjaan Lainnya	-	-	-	0,00%

Sumber: Disdukcapil Kab. Pangandaran, 2024

Data dimaksud merupakan gambaran jenis pekerjaan yang diajukan oleh penduduk saat pengurusan KTP dimana terdapat 99 jenis pekerjaan yang ada dalam database SIAK Terpusat, sehingga ada kemungkinan tidak menggambarkan kondisi riil dikarenakan tidak adanya updating pekerjaan pada KTP yang disampaikan kepada Disdukcapil.

Berdasarkan Tabel 2. 18, dapat disampaikan bahwa masih relatif tingginya jumlah penduduk yang belum dan atau tidak bekerja mengindikasikan bahwa usia yang masih belum siap bekerja (anak-anak) dan angkatan kerja yang cukup besar kurang lebih sebesar 274.550 orang dari total penduduk Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut menggambarkan yang masuk pada usia kerja masih belum terserap secara maksimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus difungsikan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Karena investasi pada "*human capital*" ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Pangandaran. Adapun data secara khusus mengenai ketenagakerjaan dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2. 19 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah pencari kerja yang dilatih (BLK, LPK, Swasta dan Perangkat Daerah/PD lainnya)	100 Pencari Kerja
2	Jumlah data BLK, LPK Swasta dan kejuruannya	14 LPK

No	Uraian	Jumlah
3	Jumlah pencari kerja yang terdaftar(laki-laki dan perempuan)	L = 1049
		P = 1168
4	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang bekerja	1850 Orang
5	Jumlah pencari kerja yang bersertifikat	516 Orang
6	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam negeri dan luar negeri)	DN = 1850
		LN = 371
7	Data perusahaan penempatan migran Indonesia (P2MI) dan sending dan organization(SO untuk negara tujuan)	1 P2MI
8	Rencana ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
9	Jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan PHK	4 Orang
10	Data perusahaan yang mulai operasi Kembali	955 Perusahaan
11	Angka perselisihan hubungan industrial antar pekerja dan perusahaan	4 Kasus
12	Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan	0 Kasus
13	Kepesertaan sistem jaminan sosial (Ketenagakerjaan dan Kesehatan)	112 Perusahaan

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Pangandaran, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa kualitas tenaga kerja di Kabupaten Pangandaran cukup baik yaitu ada 1.618 orang pencari kerja yang bersertifikat. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja harus terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Pangandaran. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa (padat karya) dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Rendahnya kesadaran warga untuk pemutakhiran data status ketenagakerjaan juga terlihat dari data jumlah penduduk yang bekerja sebagai pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran dalam Tabel 2. 20.

Tabel 2. 20 Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

Instansi	Pendidik		Tenaga Kependidikan		Kepsek	Jumlah
	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS		
SD Negeri	1.636	505	3	197	283	2.624
SD Swasta	0	41	0	8	5	54

Instansi	Pendidik		Tenaga Kependidikan		Kepsek	Jumlah
	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS		
SMP Negeri	692	88	9	172	33	994
SMP Swasta	4	110	0	23	18	155
Total						**3.827**

Sumber: Disdikpora Kabupaten Pangandaran, 2024

Berdasarkan perbedaan data dimaksud, untuk kepentingan pengambilan kebijakan sektoral, maka data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data sektoral. Data diatas menunjukkan masih banyak pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Terdapat beberapa aspek yang penting dan harus diperhatikan unutk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, antara lain aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan fokus pada seni budaya dan olahraga. Analisis aspek-aspek tersebut dilakukan terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menganalisis kinerja terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Indikator-indikator tersebut meliputi pertumbuhan PDRB, indeks gini, persentase penduduk miskin, laju inflasi, dan indeks pembangunan manusia.

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1 Pertumbuhan dan Distribusi PDRB

Untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, salah satu indikator pengukurannya adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator yang mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah dinyatakan dalam satuan rupiah. Indikator pengukuran dengan PDRB dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung dalam tahun tertentu, serta digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Selanjutnya PDRB menggambarkan atas dasar arus nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

atas dasar harga yang berlaku pada tahun tersebut dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses pertumbuhan output perkapita yang terlihat dalam jangka panjang. Konsep jangka panjang mengacu pada kesejahteraan masyarakat, yang digambarkan dalam peningkatan produksi per kapita, yang secara bersamaan menawarkan alternatif yang berbeda dalam hal konsumsi barang dan jasa dan sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat dan bersamaan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi rakyat. Dengan kata lain, arah pembangunan ekonomi adalah berusaha meningkatkan pendapatan masyarakat disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik-baiknya.

Tabel 2. 21 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB (miliar Rp.)	11.498,28	12.129,79	13.163,70	14.256,42
PDRB ADHK (miliar Rp.)	7.738,968	8.022,780	8.426,400	8.869,86

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2024

PDRB Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 atas dasar harga berlaku sebesar 14.256,42 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2023 sebesar 8.869,86 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2022, PDRB tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,093 triliun rupiah atau 8,30 persen. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2023 yaitu sebesar 5,26 persen.

Tabel 2. 22 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.143,79	3.241,83	3.485,23	3.631,92
B	Pertambangan dan Penggalian	64,07	72,32	75,09	77,82
C	Industri Pengolahan	549,52	592,38	663,41	710,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,16	9,03	9,70	9,97
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,84	2,07	2,13	2,14
F	Konstruksi	928,67	1.023,09	1.019,50	1.101,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.243,97	2.368,36	2.605,46	2.792,70
H	Transportasi dan Pergudangan	1.330,79	1.403,19	1.574,37	1.934,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.091,41	1.162,85	1.325,48	1.449,88
J	Informasi dan Komunikasi	229,65	242,55	249,04	261,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	214,09	237,91	267,33	276,11
L	Real Estate	328,40	361,77	395,47	412,92
M,N	Jasa Perusahaan	112,47	122,79	137,30	143,86

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	318,26	312,33	311,59	320,93
P	Jasa Pendidikan	728,21	767,95	793,54	848,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25,14	27,49	29,77	31,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	179,78	181,78	219,30	251,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		11.498,23	12.129,69	13.163,70	14.256,42

Sumber: BPS Pangandaran; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2024

Pada Tabel 2. 22 nilai PDRB Pangandaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 14,26 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,10 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 13,16 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada beberapa lapangan usaha dan adanya inflasi.

Selama empat tahun terakhir (2020-2023) struktur perekonomian Pangandaran didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Pangandaran.

Tabel 2. 23 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2023 (Persen)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27,34	26,73	26,48	25,48
B	Pertambangan dan Penggalian	0,56	0,60	0,57	0,55
C	Industri Pengolahan	4,78	4,88	5,04	4,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	8,08	8,43	7,74	7,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,52	19,53	19,79	19,59
H	Transportasi dan Pergudangan	11,57	11,57	11,96	13,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,49	9,59	10,07	10,17
J	Informasi dan Komunikasi	2,00	2,00	1,89	1,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,86	1,96	2,03	1,94
L	Real Estate	2,86	2,98	3,00	2,90
M,N	Jasa Perusahaan	0,98	1,01	1,04	1,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,77	2,57	2,37	2,25
P	Jasa Pendidikan	6,33	6,33	6,03	5,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,22	0,23	0,23	0,22

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,56	1,50	1,67	1,76
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Pangandaran; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2024

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Pangandaran pada tahun 2023 masih dihasilkan oleh kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 25,48 persen, kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 19,59 persen. Selanjutnya disusul oleh kategori lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, Sebesar 13,57 persen, kategori lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,17 persen serta kategori lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,72 persen. Sementara kontribusi kategori lapangan usaha lainnya masingmasing masih di bawah 6 (enam) persen.

Selama periode 2020-2023, diantara kelima kategori lapangan usaha tersebut, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah kategori yang kontribusinya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini wajar, Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu destinasi wisata yang sudah cukup terkenal baik pada level nasional maupun internasional. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran terus menata sarana dan prasarana pendukung pariwisata. Pantai Pangandaran direncanakan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menjadikan wisata kelas dunia sebagai salah satu program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Pangandaran pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Pangandaran tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 8,87 triliun rupiah. Angka tersebut naik sebesar 0,44 triliun rupiah dari tahun 2022 (8,43 triliun rupiah). Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26 persen, perekonomian Pangandaran mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 5,03 persen.

Tabel 2. 24 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.855,81	1.898,15	1.963,55	1.990,67
B	Pertambangan dan Penggalian	48,29	52,63	53,10	53,66
C	Industri Pengolahan	382,61	403,46	437,93	455,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,54	6,09	6,51	6,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,12	1,24	1,28	1,27
F	Konstruksi	688,58	729,18	712,27	754,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.698,73	1.759,30	1.861,28	1.944,78
H	Transportasi dan Pergudangan	843,37	871,80	938,53	1.091,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	689,69	711,21	785,69	834,47
J	Informasi dan Komunikasi	222,49	238,55	248,14	260,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	152,08	161,19	168,19	170,67
L	Real Estate	260,40	286,18	308,27	318,27
M,N	Jasa Perusahaan	71,70	77,82	85,14	86,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	231,60	224,90	224,97	229,31
P	Jasa Pendidikan	426,00	437,07	446,80	468,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,52	19,86	21,14	22,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	142,43	144,15	163,61	180,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		7.738,97	8.022,78	8.426,40	8.869,86

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2024

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan digunakan sebagai tolak ukur laju pertumbuhan ekonomi. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangandaran tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran 2016-2023 dapat dilihat dalam Gambar berikut:

Gambar 2. 18
Capaian Pertumbuhan Ekoomi Pangandaran, Jawa Barat dan Indonesia Than 2016-2023 (Persen)

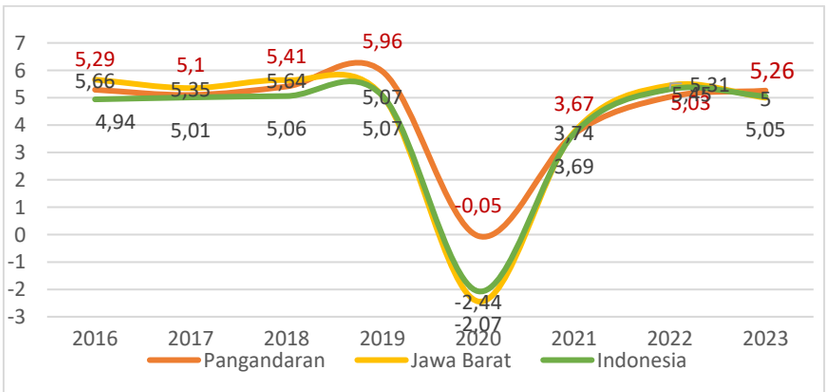

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Dalam pembangunan ekonomi, fokus tujuan utamanya adalah mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang lebih merata. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ukuran yang digunakan sebagai acuan pertama untuk menjelaskan kinerja perekonomian secara sederhana.

Pada tahun 2020 pandemi Covid-19 menyebabkan Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan yang signifikan. Namun seiring dengan membaiknya kondisi pasca pandemi membuat pertumbuhan ekonomi perlahan kembali tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran terus mengalami peningkatan yang positif hingga pada tahun 2023 mencapai 5,26.

Percepatan pertumbuhan ekonomi Pangandaran pada tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 disebabkan karena hampir sebagian besar kategori lapangan usaha seperti kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; kategori lapangan usaha Konstruksi, kategori lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, kategori lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, kategori lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, kategori lapangan usaha Jasa Pendidikan, mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kategori lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,31 persen. Dari ke-17 kategori lapangan usaha yang ada, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif dan hanya satu kategori yang mengalami pertumbuhan negatif.

Tabel 2. 25 Pertumbuhan PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2023 (Persen)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,79	2,79	3,45	1,38
B	Pertambangan dan Penggalian	0,64	8,97	0,90	1,06
C	Industri Pengolahan	-0,40	5,45	8,54	4,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,93	9,99	6,95	1,44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,86	11,48	3,14	-0,78
F	Konstruksi	-7,98	5,90	-2,32	5,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,58	3,57	5,80	4,49
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,45	3,37	7,65	16,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,32	3,12	10,47	6,21
J	Informasi dan Komunikasi	33,84	7,22	4,02	4,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,76	5,99	4,34	1,47
L	Real Estate	9,29	9,90	7,72	3,24
M,N	Jasa Perusahaan	-12,24	8,53	9,40	2,00

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,17	-2,89	0,03	1,93
P	Jasa Pendidikan	5,25	2,60	2,23	4,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-4,54	7,23	6,46	4,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	-1,86	1,21	13,50	10,47
PERTUMBUHAN PDRB		-0,05	3,67	5,03	5,26

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2024

Jika dibandingkan dengan capaian laju PDRB kabupaten/kota terdekat, Kabupaten Pangandaran mempunyai capaian yang relatif stabil lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota tetangga. Hal tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program kegiatan prioritas perangkat daerah yang diarahkan untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pangandaran. Percepatan pertumbuhan ekonomi Pangandaran pada tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 disebabkan karena hampir sebagian besar kategori lapangan usaha mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. 26 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2019-2023

Kabupaten/ Kota	Laju PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pangandaran	5,94	-0,05	3,67	5,03	5,26
Banjar	5,03	0,94	3,46	4,19	4,63
Ciamis	5,38	-0,14	3,66	5,02	4,99
Tasikmalaya	5,43	-0,98	3,43	4,70	4,69

Sumber*: BPS Provinsi Jawa Barat. Diolah. 2024*

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh Kabupaten Pangandaran. Pada periode tahun 2019-2023, PDRB Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Harga Berlaku terus meningkat, yakni mencapai 14.256,42 miliar rupiah pada tahun 2023. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk yang mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga. Peningkatan ini juga dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume konsumsi. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir.

Tabel 2. 27 Nilai PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.568,05	6.799,81	7.372,14	7.990,94
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	93,04	96,10	100,27	113,37
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.046,35	1.080,93	1.101,47	1.123,80
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.531,37	2.785,86	2.924,11	3.124,48
Pembentukan Inventori	278,03	-158,02	17,05	16,41
Net Ekspor Barang dan Jasa	981,39	1.525,03	1.648,66	1.887,41
PDRB	**11.498,23**	**12.129,69**	**13.163,70**	**14.256,42**

Selain dinilai Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Secara umum nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Pangandaran menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dengan nilai PDRB sebesar 8.869,86 miliar rupiah pada tahun 2023.

Tabel 2. 28 Nilai PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.549,67	4.633,61	4.810,50	4.996,20
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	63,13	64,38	65,39	70,93
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	637,68	643,66	638,96	638,41
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.684,38	1.780,82	1.764,57	1.852,05
Pembentukan Inventori	242,60	-127,27	13,69	12,78
Net Ekspor Barang dan Jasa	561,51	1.027,57	1.133,29	1.299,49
PDRB	**7.738,97**	**8.022,78**	**8.426,40**	**8.869,86**

2.1.2.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita atau yang biasa disebut dengan pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. Pendapatan per kapita digunakan sebagai indikator makro untuk melihat

kemakmuran suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan per kapita di suatu wilayah, maka wilayah tersebut semakin Makmur.

Tabel 2. 29
Nilai PDRB Per Kapita Tahun 2020-2023 (Juta Rp.)

Uraian	Pangandaran	Jawa Barat	Indonesia
PDRB per Kapita ADHB			
2021	28,50	45,23	62,26
2022	30,71	49,14	71,04
2023	33,04	52,65	74,96
PDRB per Kapita ADHK			
2021	18,85	30,94	40k78
2022	19,66	32,25	42,47
2023	20,56	33,48	44,14

Nilai PDRB per kapita Pangandaran atas dasar harga berlaku sejak tahun 2021 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 PDRB per kapita tercatat sebesar 28,50 juta rupiah. Jumlahnya meningkat pada tahun 2022 menjadi 30,71 juta rupiah dan tahun 2023 menjadi 33,04 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Sedangkan, PDRB per kapita atas dasar harga konstan mengalami juga mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 20,56 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Pangandaran menempati posisi terbaik kedua setelah kota Tasikmalaya.

Gambar 2. 19
Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2023 (Ribu Rupiah)

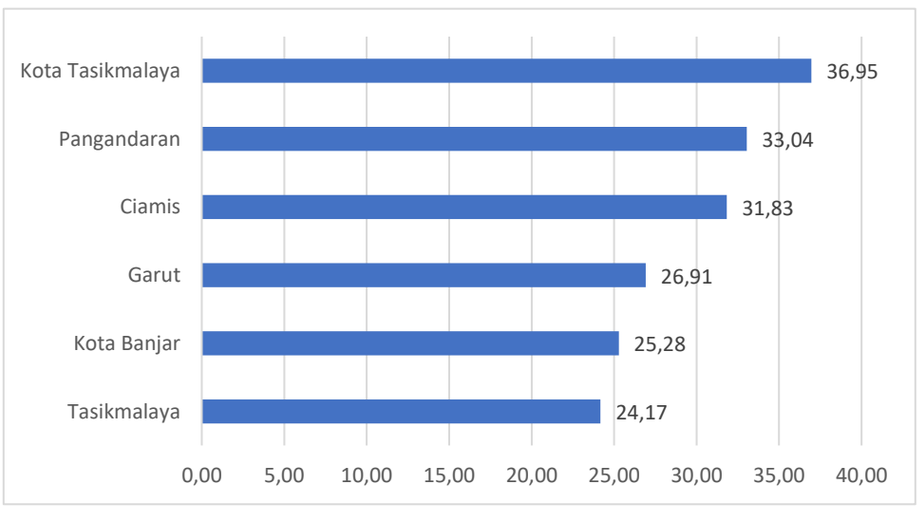

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, BPS, 2024

2.1.2.3 Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi dimana harga barang, jasa, dan faktor produksi naik. Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali jika kenaikan itu meluas ke barang, jasa, atau faktor produksi lainnya. Inflasi mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat yang berarti terjadi guncangan atau gangguan jaminan sosial akibat ketidakmampuan masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

Di Provinsi Jawa Barat, BPS secara rutin menghitung inflasi di 7 kota (biasa disebut kota Indeks Harga Konsumen). Kota-kota tersebut yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya. Khusus untuk wilayah Priangan Timur (Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran), data inflasi daerah yang dihitung hanya Kota Tasikmalaya, oleh Tim TPID Pihak Bank Indonesia (BI) Cabang Tasikmalaya bersama Tim Kabupaten/Kota dan BPS. Oleh karena di Kabupaten Pangandaran belum tersedia data inflasi tahunan karena tidak ada survei harga konsumen secara rutin, maka inflasi di Kabupaten Pangandaran dapat didekati pola/data inflasi kabupaten/kota yang kondisi perekonomiannya mirip diantaranya Kota Tasikmalaya, walaupun pada kenyataannya pasti akan sedikit berbeda, tapi diharapkan perbedaannya sedikit.

Gambar 2. 20
Laju Inflasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

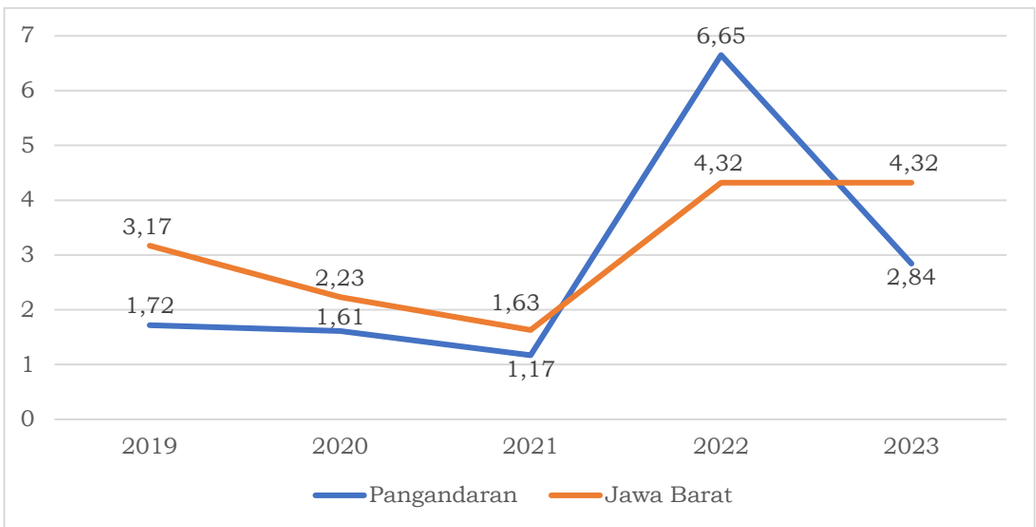

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Pada tahun 2023, perhitungan inflasi Kabupaten Pangandaran, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 inflasi secara umum telah mencapai 1,81%. Inflasi akan mendorong perekonomian menjadi lebih baik dengan meningkatnya pendapatan nasional, dan orang akan semakin semangat untuk bekerja, menabung, serta berinvestasi. Bagi pengusaha, inflasi akan memberikan keuntungan karena akan memberikan perolehan yang lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi.

2.1.2.4 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diukur dengan melihat peningkatan pendapatan penduduk di suatu daerah. Peningkatan pendapatan yang terjadi harus merata dan dapat dirasakan oleh seluruh strata sosial masyarakat, artinya aspek pemerataan pendapatan menjadi penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan tolok ukur keberhasilan hasil-hasil pembangunan suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Pangandaran. Kekhawatiran akan terjadinya ketimpangan hasil pembangunan kemudian berujung pada munculnya permasalahan sosial di masyarakat.

Gambar 2. 21
Realisasi Indeks Gini Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2022 (Ribu Rupiah)

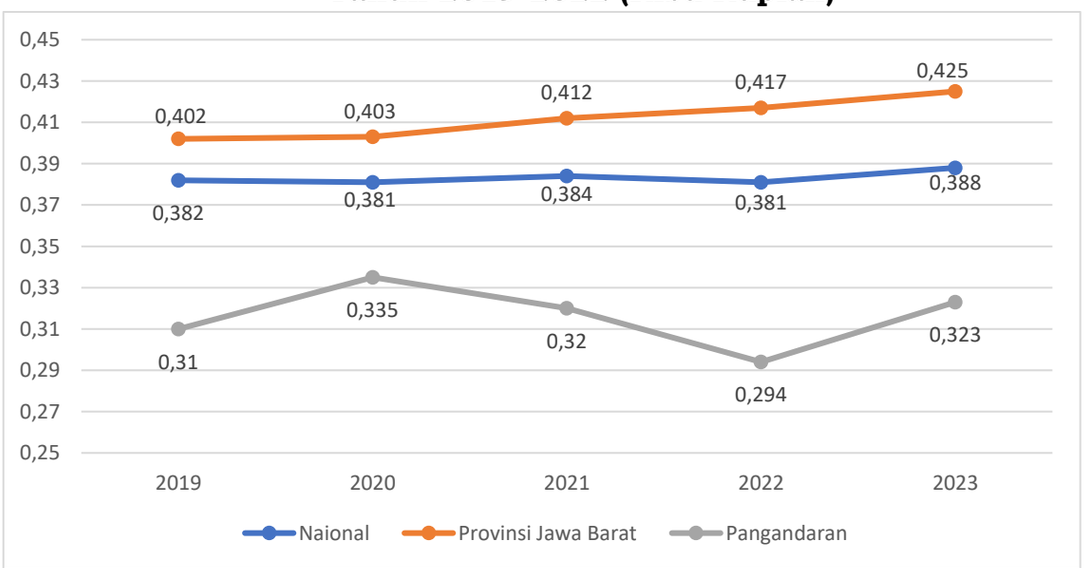

Sumber: BPS Pangandaran; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2024

Indeks Gini (*Gini Ratio*) digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan/ketidakmerataan pendapatan di suatu wilayah secara

keseluruhan dengan melihat perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga atau individu dengan total pendapatan. Indeks gini sebagai ukuran distribusi pendapatan memiliki nilai berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jika koefisien gini 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti terjadi ketimpangan sempurna mutlak.

Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 maka termasuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 dan 0,5 termasuk dalam kategori ketimpangan "sedang" dan jika nilainya lebih besar dari 0,5, maka terjadi ketimpangan yang "tinggi".

Tabel 2. 30 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2019-2023

Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Pangandaran	0,310	0,335	0,320	0,294	0,323
Kabupaten Tasikmalaya	0,322	0,343	0,378	0,378	0,404
Kabupaten Ciamis	0,354	0,336	0,342	0,337	0,341
Kota Banjar	0,302	0,312	0,341	0,362	0,337

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Diolah 2024

Rasio gini Kabupaten Pangandaran menunjukkan angka yang berfluktuasi dengan rata-rata termasuk ke dalam kategori ketimpangan sedang. Kondisi ini menggambarkan bahwa pendapatan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran hampir merata karena didukung oleh kebijakan pembangunan infrastruktur di semua wilayah untuk menunjang perekonomian masyarakat. Meskipun cenderung mengalami peningkatan, rasio gini Kabupaten Pangandaran jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota terdekat dapat dikatakan paling rendah di tahun 2023 yakni 0,323.

2.1.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses pembangunan yang berpusat pada manusia dengan mengukur perbandingan harapan hidup, pendidikan dan taraf hidup. IPM sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara termasuk negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Saat mengukur peringkat

negara, *United Nations Development Programme* (UNDP) memeringkat semua negara dalam skala dari 0 (terendah) hingga 1 (tertinggi) dalam hal pembangunan manusia di masing-masing negara tersebut.

IPM merupakan indikator agregat tunggal yang tidak dapat digunakan untuk mengukur semua dimensi pembangunan manusia, tetapi dapat digunakan untuk mengukur tiga dimensi utama pembangunan manusia dengan kemampuan dasar masyarakat. Tiga kapasitas dasar tersebut adalah umur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan, serta akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Gambar 2. 22
Capaian Indeks Pembangunan Manusia Pangandaran, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

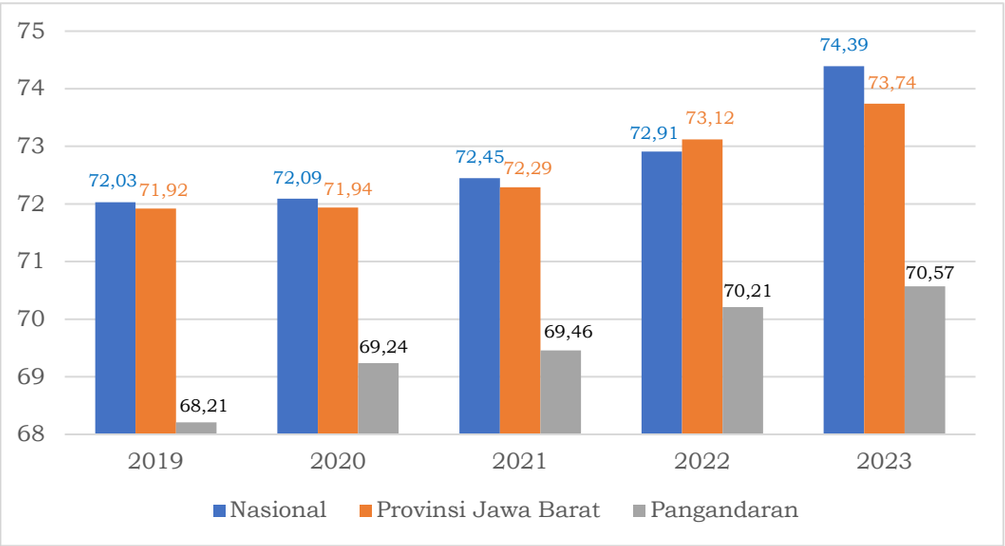

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran secara umum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun meskipun pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Angka capaian IPM Kabupaten Pangandaran masih berada di dibawah capaian nasional dan provinsi. Meskipun begitu, angka capaian IPM Kabupaten Pangandaran lima tahun terakhir mengalami tren laju pertumbuhan yang positif dengan peningkatan pada seluruh variabel komposit yang terdiri dari Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Daya Beli / Pengeluaran per Kapita. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 dapat dikategorikan tinggi, dengan capaian IPM antara 70,57.

Tabel 2. 31 Perbandingan IPM Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2023

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran (Ribu Rp.)	IPM
Kabupaten Pangandaran	74,88	12,30	8,04	9.406	70,57
Kabupaten Tasikmalaya	73,87	12,63	7,96	8.562	69,38
Kabupaten Ciamis	74,96	14,29	8,09	9.750	73,12
Kota Banjar	74,77	13,27	8,79	11.356	74,45

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. Diolah. 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perbandingan capaian IPM Kabupaten Pangandaran dengan kabupaten/kota tetangga yang menunjukkan posisi Kabupaten Pangandaran berada di atas capaian Kabupaten Tasikmalaya dan berada di bawah capaian Kabupaten Ciamis serta Kota Banjar.

Tabel 2. 32
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,21	69,24	69,46	70,21	70,57
Indeks Pendidikan	59,07	59,33	59,72	60,41	60,97
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,06	12,07	12,08	12,11	12,30
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,67	7,74	7,85	8,03	8,04
Indeks Kesehatan	78,65	83,26	83,57	84,00	84,43
Umur Harapan Hidup (tahun)	71,12	74,12	74,32	74,60	74,88
Indeks Pengeluaran	68,32	67,20	67,14	68,21	67,20
Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	9.423	9.084	9.065	9.389	9.406

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Gambar 2. 23 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

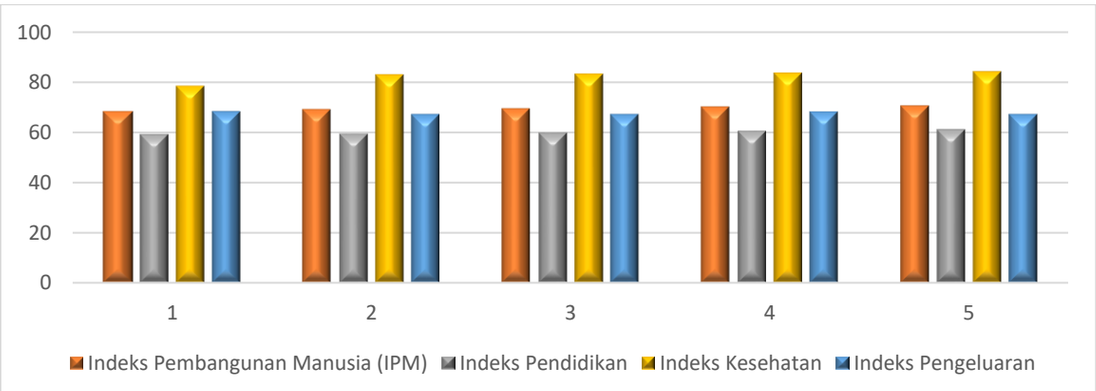

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Pembangunan manusia di Kabupaten Pangandaran terus mengalami kemajuan. Sejak 2021, status pembangunan manusia Indonesia sudah berada di level “tinggi”. IPM Kabupaten Pangandaran meningkat sebesar 0,36 persen pada tahun 2023, dari 70,21 menjadi 70,57. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,88 tahun, meningkat 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,19 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,11 tahun menjadi 12,30 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,01 tahun, dari 8,03 tahun menjadi 8,04 tahun pada 2023. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan meningkat 17 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia di Kabupaten Pangandaran, antara lain: selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat, karena hal ini merupakan salah satu penentu perbaikan derajat kesehatan masyarakat namun dalam kenyataannya hal ini cukup sulit diintervensi. Peran Pemerintah harus terus ditingkatkan salah satunya melalui program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat dan bersih. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus sekolah dengan melanjutkan kebijakan pendidikan gratis melalui Program Pangandaran Hebat. Disisi lain dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli.

2.1.2.6 Kemiskinan

a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Pembangunan adalah suatu proses untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Pada tingkat kesejahteraan ekonomi hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat yang dilihat

dari tingkat konsumsi akibat peningkatan pendapatan masyarakat. Salah satu indikator terpenting keberhasilan pembangunan adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin.

Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu tugas penting pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Pangandaran. Pemerintah telah mencoba untuk menerapkan beberapa jenis Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menekan angka kemiskinan hingga ke tingkat yang serendah mungkin.

Ukuran kemiskinan didasarkan dengan membandingkan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Tabel 2. 33 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2019-2023

Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin (Po)					Jumlah Penduduk Miskin (ribu)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pangandaran	7,71	8,99	9,65	9,32	8,98	30,7	36,05	39,07	37,91	36,7
Banjar	5,50	6,09	7,11	6,73	6,14	10,1	11,2	13,4	12,73	11,7
Ciamis	6,65	7,62	7,97	7,72	7,42	79,4	91,4	96,6	93,96	90,8
Tasikmalaya	9,12	10,34	11,15	10,73	10,28	159,9	181,5	200,6	194,1	186,9
Jawa Barat	6,91	7,88	8,40	8,06	7,62	3399,2	3920,2	4195,3	4070,98	3888,6

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. Diolah. 2024

Capaian program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan hingga 7,71%. Angka tersebut kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 yang mencapai 9,65% yang dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 8,98.

Selaras dengan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangandaran mencapai angka tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 39,07 ribu penduduk miskin dan mengalami penurunan secara bertahap hingga pada tahun 2023 sebanyak 36,7 ribu penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dan juga bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara rata-rata.

b. Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, terdapat dimensi lain yang perlu diperhatikan terkait angka kemiskinan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2.34 menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan pada periode 2019 hingga 2023 mengalami kenaikan mencapai 1,28, hal ini memberikan gambaran bahwa pada periode tersebut rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Hal ini tentu menjadi fokus Pemerintah Pangandaran untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan, dengan melaksanakan program prioritas perlindungan sosial bagi penduduk miskin ekstrem dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 0,27.

Tabel 2. 34 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,90	1,32	1,25	1,24	1,28
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,16	0,28	0,27	0,26	0,27

Sumber: Kabupaten Pangandaran Dalam Angka Tahun 2024

Data kemiskinan ekstrem diperlukan sebagai analisis penentuan kebijakan dalam penanganan kemiskinan berdasarkan kondisi terkini. Jumlah penduduk miskin ekstrem Kabupaten Pangandaran mengalami penurunan dari 5,93 ribu jiwa menjadi 2,65 ribu jiwa pada tahun 2023. Hal ini seiring dengan menurunnya tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pangandaran menjadi sebesar 0,65% pada tahun 2023

Tabel 2. 35 Jumlah dan Tingkat Penduduk Miskin Ekstrem Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Kemiskinan Ekstrem (Ribu Jiwa)			Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)		
	2021	2022	2023*	2021	2022	2023*
Pangandaran	5,61	5,93	2,65	1,38	1,46	0,65
Tasikmalaya	28,24	15,74	27,12	1,57	0,87	1,49
Ciamis	5,51	17,90	1,32	0,45	1,47	0,11
Garut	30,32	82,17	9,55	1,15	3,10	0,36
Kota Banjar	2,08	2,49	0,08	1,10	1,32	0,04
Kota Tasikmalaya	27,17	23,88	6,59	3,99	3,49	0,96

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

*Keterangan: *Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE*

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang terkait dengan pengukuran ketenagakerjaan yang merangkum masyarakat yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dengan menghitung rasio angkatan kerja (semua yang bekerja) terhadap total angkatan kerja pada waktu tertentu. Angkatan kerja di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 sebanyal 274.550 orang, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 80,15%.

Tabel 2. 36 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2023

Indikator Capaian Tenaga Kerja	2020	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	76,79	74,75	79,92	80,15
Angkatan Kerja (Orang)	245.619	241.542	260.761	274.550
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,08	3,25	1,56	1,52
Jumlah Pengangguran Terbuka (Orang)	12.476	7.839	4.077	4.164

Sumber: BPS Pangandaran; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Pangandaran lima tahun terakhir mengalami kenaikan, yang diikuti dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,52 pada tahun 2023. Keduanya memiliki persamaan memiliki penurunan pada tahun 2019 dan

2021 dimana terjadi pandemi sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka salah satu faktornya pendorongnya adalah ketersediaan lapangan kerja, namun hal ini belum beriringan dengan peningkatan standar hidup layak mengingat masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan Gambar 2.24 Kabupaten Pangandaran menempati posisi dengan TPT terendah se-Jawa Barat.

Gambar 2. 24
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2023

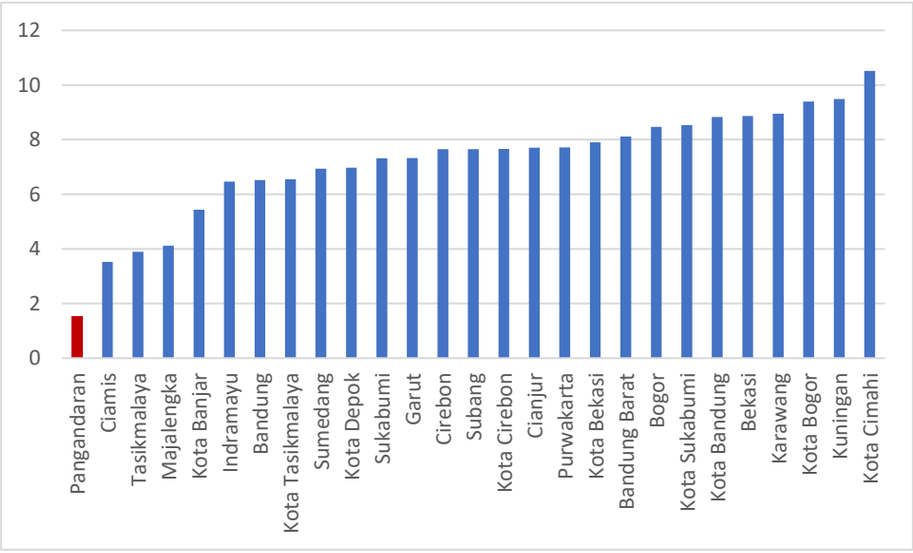

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

2.1.2.8 Angka Melek Huruf

Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Tabel 2. 37 Angka Melek Huruf Kabupaten Pangandaran

Kelompok Umur	2022	2023
15-24	100	100
15-44	100	100
15+	98,74	99,29
45+	97,26	98,62

Sumber: BPS Pangandaran; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2024

Tabel diatas menunjukan bahwa angka melek huruf di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 sebanyak 99,29 persen pada kelompok umur 15 tahun keatas dan sebanyak 98,62 persen kelompok umur 45 keatas, Hal ini menunjukkan hampir seluruh penduduk Kabupaten Pangandaran melek huruf. Sedangkan pada usia produktif yaitu 15-44 tahun seluruh penduduk Kabupaten Pangandaran sudah melek huruf. Pemerintah Kabupaten Pangandaran berhasil dalam meningkatkan angka melek huruf di Kabupaten Pangandaran melalui pendidikan dan usaha lain sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pangandaran.

2.1.2.9 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk suatu kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai (menurut umur penduduk dan ketentuan usia sekolah pada jenjang tersebut) relatif terhadap jumlah penduduk kelompok yang bersangkutan. kelompok usia sekolah. APM digunakan untuk menunjukkan berapa banyak penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan berapa banyak penduduk yang bersekolah pada usia yang memenuhi ketentuan kelompok usia wajib sekolah pada jenjang pendidikan yang diikuti.

Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah penduduk yang masih bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk) dan jumlah penduduk yang secara bersamaan memenuhi persyaratan resmi untuk penduduk yang bersekolah. pencapaian pendidikan. APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi umum penduduk pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Untuk menunjukkan seberapa besar kapasitas yang dapat ditawarkan oleh sistem pendidikan kepada siswa pada usia sekolah tertentu. Selain itu, APK juga merupakan indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat mencerminkan jumlah penduduk yang meningkat ke tingkat yang belum mencukupi bahkan melebihi usia sekolah.

Tabel 2. 38 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2023

Jenjang Pendidikan	APM			APK		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
SD/MI/Sederajat	95,84	99,99	99,49	103,54	103,60	104,08
SMP/MTs/Sederajat	84,97	84,63	87,83	94,59	85,57	97,24

Jenjang Pendidikan	APM			APK		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
SMA/SMK/MA/ Sederajat	67,27	66,78	59,26	84,79	84,31	76,54

Sumber: BPS Pangandaran; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2023 APM di Kabupaten Pangandaran untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat mengalami kenaikan, sedangkan untuk jenjang SD/MI/Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat mengalami penurunan. APK Tahun 2023 untuk jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat mengalami kenaikan dan untukjenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat terdapat penurunan.

Angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar yang naik menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pangandaran memiliki partisipasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan fasilitas dan layanan pendidikan di Kabupaten Pangandaran cukup memadai. Selain itu dukungan dari pihak yang lain juga membantu masyarakat dalam meningkatkan minat pendidikan di Kabupaten Pangandaran.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pemerintah kabupaten melakukan berbagai upaya dan berinovasi dalam mengembangkan kawasan wisata salah satunya dengan menarik wisatawan dengan memperkenalkan budaya yang ada. Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran yang strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, untuk meningkatkan kesegaran jasmani serta mengembangkan minat dan bakat masyarakat dalam bidang keolahragaan juga dikembangkan sektor olahraga di Kabupaten Pangandaran. Berikut merupakan capaian kinerja urusan kebudayaan dan olahraga di Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2. 39 Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kebudayaan						
Jumlah Cagar Budaya Dilestarikan	Cagar Budaya	165	151	151	159	166
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah	12	8	40	14	10
Jumlah Karya Budaya yang	Jumlah	6	0	3	11	4

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Direvitalisasi dan Inventarisasi						
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu	Jumlah	30	30	30	26	40
Persentase Kelompok Budaya Aktif	Jumlah	0	100	100	218	209
Pemuda dan Olahraga						
Jumlah organisasi olahraga/klub olahraga	Organisasi/ Klub	2	2	2	2	3
Jumlah Klub Olahraga	Klub	127	146	146	146	146
Jumlah Gedung Olahraga	Unit	117	117	117	117	121

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2024

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk mengejar ketertinggalan, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan pengurangan pengangguran sehingga dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan program pembangunan. Kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh institusi.

Aspek pelayanan umum terdiri dari beberapa kategori urusan yakni, 1) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 2) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 3) Urusan pilihan, 4) Unsur pendukung pemerintahan, dan 5) Unsur penunjang pemerintah. Aspek Pelayanan Umum yang berkaitan dengan Layanan urusan pemerintah wajib meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi, tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi,

usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan dan kearsipan.

Sementara aspek pelayanan umum urusan pilihan terdiri atas kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan ketransmigrasian. Sedangkan unsur penunjang terdiri atas, perencanaan; keuangan; kepegawaian; pendidikan dan pelatihan; serta penelitian dan pengembangan. Berikut merupakan penjelasan terkait urusan-urusan terkait aspek pelayanan umum serta data terkait.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Pemerintah daerah wajib melakukan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar seperti yang tertera didalam UU nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Berikut penjabaran masing-masing urusan.

2.1.3.1.1 Pendidikan

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembangunan di bidang pendidikan diperlukan peran serta yang aktif, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat sehingga semua program peningkatan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan bidang pendidikan. Peran pendidikan sangatlah penting sehingga pembangunan di bidang pendidikan baik secara formal ataupun

nonformal harus selalu ditingkatkan. Setidaknya terdapat tiga permasalahan pendidikan. Pertama yakni terkait pemerataan, baik pemerataan kualitas, pemerataan sarana maupun pemerataan guru (rasio guru yang cukup tetapi tidak merata). Kedua yakni kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terkait *how to have* (bagaimana memperoleh/rekrutmen) dan *how to empower* (bagaimana memberdayakan). Ketiga yakni terkait kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum merata

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting, sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan tidak hanya pada pendidikan formal, namun juga meliputi pendidikan nonformal. Dalam pemenuhan pelayanan di bidang pendidikan, pemerintah Kabupaten Pangandaran didukung dan dikuatkan oleh masyarakat dan swasta secara signifikan. Berikut adalah data capaian kinerja urusan pendidikan Kabupaten Pangandaran tahun 2019-2023.

Tabel 2. 40 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Siswa PAUD	Orang	7181	8005	8005	8257	8587
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	%	97,03	96	103,54	101,7	99,72
Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	99,29	98	94,59	104	102,82
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	88	91	95,84	96	94,60
Jumlah Anak Usia 5-6 tahun	Orang	12.553	12.032	12.032	12.296	12.482
Jumlah gedung sekolah SD/MI	Unit	344	344	344	347	348
Rasio Sekolah/penduduk Usia 13-15	Rasio	07: 01,8	07: 17,1	07: 17,1	9: 17	1: 58
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Orang	40.211	39.991	39.991	39.572	38.847
Jumlah gedung sekolah SMP/MTs	Unit	86	85	85	88	89
Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Orang	19.173	19.984	19.984	20.181	20.480
Rasio Sekolah SD/MI/SMP/MTS/penduduk Usia 7-	Rasio	0,1375	0,1382	0,1382	72,79	73,6595

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
12/3-15						
Jumlah Sekolah (SD/MI + SMP/MTs)	Unit	430	429	429	435	437
Jumlah Penduduk Usia (7-12) + (13-15) thn	Orang	59.384	59.975	59.975	59.753	59.327
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar	Rasio	72.41	71,01	71,51	87,68	73,87
Jumlah Guru SD/MI	Orang	3.539	1.584	1.584	2.972	2.979
Jumlah Murid SD/ MI	Orang	39.015	38.498	38.498	37.459	37.379
Rasio Perbandingan Jumlah Guru dan Jumlah Murid SD/MI	Rasio	1: 11,02	1: 24,30	1: 24,30	1: 12,60	1 : 12,55
Jumlah Guru SMP/MTs	Orang	1.547	680	680	1.631	1.599
Jumlah Murid SMP/MTs	Orang	19.036	19.498	19.,498	18.564	18.772
Rasio Perbandingan Jumlah Guru dan Jumlah Murid SMP/MTs	Rasio	1: 12,30	1: 28,67	1: 28,67	1: 11,38	1: 11,74
Jumlah Guru (SD/MI + SMP/MTs)	Orang	5.086	2.264	2.264	4.603	4.578
Jumlah Murid (SD/MI + SMP/MTs)	Orang	58.051	57.996	57.996	56.023	56.151
Rasio Perbandingan Jumlah Guru dengan Murid Sekolah Pendidikan Dasar + SMP/MTs	Rasio	1: 11,41	1: 25,61	1: 25,61	1: 12,17	1: 12,26
Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D–IV	Orang	4.527	4.349	4.349	4.171	4.188
Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/ SMK/MA	Orang	4627	4531	4531	4603	4578

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2023

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan

ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Pada data di atas dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2023 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya regulasi pemerintah pusat tentang zonasi. Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menangani permasalahan tersebut telah berupaya memaksimalkan sinergitas berbagai pihak dalam mensosialisasikan pentingnya melanjutkan pendidikan.

Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Pangandaran mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat dalam melanjutkan pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak akan pentingnya pendidikan.

Pada indikator jumlah murid di Kabupaten Pangandaran didominasi oleh tingkat SD/MI dan SMP/MTS yang jumlahnya mencapai 56.151 orang pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan kesadaran orang tua untuk menuntaskan pendidikan formal dari jenjang SD/MI sampai SMA/MA selama 12 tahun sebagai bagian daripada program pemerintah.

Pada indikator jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D–IV pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2023 yakni sebanyak 4.188 orang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan belum banyaknya Perguruan Tinggi (PT) di Kabupaten Pangandaran yang menyediakan jurusan sesuai dengan kebutuhan di lembaga pendidikan setingkat SD/MI dan/atau SMP/MTs.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Beberapa hal dapat dilakukan untuk meningkatkan gerakan hidup sehat antara lain dengan menyediakan air bersih dan sanitasi yang memadai, mengimbau masyarakat untuk patuh menjalankan protokol kesehatan dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu daerah.

Kualitas kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Balita, dan lain-lain. Pemerintah pusat melalui kementerian PPN/Bappenas menetapkan ada 8 area reformasi sistem kesehatan. Delapan area reformasi sistem kesehatan yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

a. Pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan;
b. Penguatan puskesmas;
c. Peningkatan kualitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK);
d. Kemandirian farmasi dan alat kesehatan;
e. Ketahanan kesehatan;
f. Pengendalian penyakit dan imunisasi;
g. Pembiayaan kesehatan; serta
h. Teknologi informasi pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan derajat kesehatan akan memberikan dampak positif terkait kemajuan kesehatan di Kabupaten Pangandaran. Realisasi kinerja Kabupaten Pangandaran di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 41 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 Kelahiran Hidup	5,4	5,43	5,43	6,25	7,08
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	49,08	49,39	49,39	71,42	18,64
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun	per 1000 Kelahiran Hidup	6,55	5,6	5,6	0,54	7,64
Rasio Posyandu Per Seratus Balita	Rasio	1,83	1,88	1,88	9,48	2,10

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio puskesmas per satuan penduduk	Rasio	1: 28.319	1: 28.432	1: 28.432	1: 29.116	1: 29.480
Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	Rasio	1: 12.494	1: 12.544	1: 12.544	1: 12.845	1: 13.400
Rasio poliklinik per satuan penduduk	Rasio	1: 20.228	1: 20.309	1: 20.309	1: 39.704	1: 17.008
Prevalensi Balita *Stunting*	%	3,3	3,94	3,94	2,21	1,93
Angka Harapan Hidup	Tahun	71,12	74,12	74,32	74,60	74,88
Angka Kematian Ibu	Orang	3	5	5	4	
Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih	Jumlah	6074	6095	6095	5596	
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	110,19	97,38	97,38	100	
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Rasio	99,23	102,10	102,10	100	
Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	88,17	87,1	87,1	82,8	90,3
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	%	102,8	101,5	101,5	100	100
Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	%	0	0	0	0	0
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
Penderita Diare Yang Ditangani	%	53,2	66,2	66,2	30,4	62,6
Angka Kejadian Malaria	Angka	0,02	0,02	0,02	0	0
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	1,04	0,27	0,27	0,57	
Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	100	100	100
Cakupan Pelayanan Nifas	%	98,67	100	100	100	100
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	%	69,76	57,42	57,42	66,67	
Cakupan Pelayanan	%	94,65	88,39	88,39	100	

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Anak Balita						
Persentase ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	100	100	88,6	100
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	23,37	98
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	74,77	58
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	74,85	100
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	65,6	100
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	89,39	100
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100
Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi	%	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Dini HIV Sesuai Standar						
Persentase Balita Gizi Buruk/*Stunting* yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100
Nilai rata rata IKM Puskesmas	Nilai	86,37	100	100	88,51	92,4
Persentase puskesmas akreditasi minimal madya	%	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Rasio	N/A	1: 426.483	1: 426.483	1: 436.748	1: 442.205
Rasio tenaga dokter per 100.000 penduduk	Rasio	10,78	12,42	12,42	19	18,63
Rasio Bidan Per Seratus Ribu Penduduk	Rasio	85,98	100,35	100,35	104,4	99,28
Jumlah Perawat	Orang	355	446	446	569	530
Jumlah Bidan	Orang	373	377	377	456	437
Jumlah Farmasi	Orang	48	136	136	108	114
Jumlah Ahli Gizi	Orang	20	20	20	46	31
Jumlah Dokter Spesialis	Orang	0	12	16	20	23
Jumlah Dokter Gigi	Orang	9	12	12	20	23
Jumlah Dokter Umum	Orang	43	56	56	63	59
Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Bayi	193	268	268	299	333
Gizi Buruk	Bayi	106,48	106,95	106,95	51	
Ibu Hamil Kunjungan K1	%	90,51	92,82	92,82	6138	
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	90,15	92,82	92,82	5666	
Kasus HIV	Orang	17	16	16	39	54
Angka kesakitan DBD	Orang	158	194	194	502	253
Angka kesakitan Diare	Orang	7873	4765	4765	3698	4175
Angka kesakitan ISPA	Orang	293	227	227	134	308
Angka kesakitan Tuberculosis	Orang	357	387	387	683	755
Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	%	100	100	100	100	100
Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, 2024

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi sebesar 6,25 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan pada indikator Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2021 yakni dari sebesar 5,6 per 1000 Kelahiran Hidup menjadi 0,54 per 1000 Kelahiran Hidup. Hal ini dikarenakan adanya dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan.

Pada indikator prevalensi balita *stunting* untuk tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 menjadi sebesar 2,21%. Hal ini membuktikan bahwa kondisi *stunting* balita di Kabupaten Pangandaran dapat dikurangi melalui penanganan gizi buruk dan *stunting* yang baik, dengan cara mengadopsi beberapa inovasi dari puskesmas. Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menangani permasalahan *stunting*.

Indeks kesehatan merupakan cerminan dari tingkat kesehatan di suatu daerah. Indeks kesehatan disusun berdasarkan Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). UHH adalah jumlah rata-rata tahun seseorang dapat hidup. Kesehatan merupakan aspek penting dan bagian dari indeks pembangunan manusia. Semakin meningkatnya kualitas kesehatan di Kabupaten Pangandaran, maka akan memberikan *multiplier effect* pada aspek kehidupan masyarakat lainnya. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 mengalami kenaikan yakni menjadi sebesar 71,89. Hal ini dikarenakan adanya dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan.

Pada indikator Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mencapai 100%. Hal ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menangani kasus gizi buruk pada balita. Demikian juga dengan indikator Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD sejak tahun 2019 hingga 2023 juga mencapai 100%. Hal ini dikarenakan penanganan penyakit DBD yang sesuai SOP sehingga penderita bisa ditangani dengan tepat.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari beberapa aspek di antaranya jalan, drainase, saluran irigasi dan jumlah tempat ibadah. Indikator pada informasi penataan ruang adalah persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

Tabel 2. 42 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Panjang Jalan Kondisi Baik	Km	401,2	429	445,8	470	580,23
Panjang Jalan Seluruhnya	Km	504,31	504,31	504,31	504,31	632,54
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten	Km	504,31	504,31	504,31	504,31	632,54
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	63,58	67,57	69,50	12.890, 79	12.903, 79
Luas Areal Irigasi	Ha	16.785, 38	16.785, 38	16.785, 38	17.889, 20	17889,2
Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	65	66	67	64	86,47
Panjang Jalan yang Terbangun	Km	0,98	5,94	0,838	5,74	20
Jumlah Jembatan yang Terbangun	Unit	4	6	1	5	1
Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	83	85,09	88,28	93,28	80,35

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Pangandaran, 2023

Pada tabel disebut dapat dilihat bahwa kinerja pembangunan Kabupaten Pangandaran ditinjau dari indikator panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Peningkatan ini akan berdampak pada kemudahan akses masyarakat di area kawasan Kabupaten Pangandaran. Persentase jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yakni menjadi sebesar

80,35%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan proporsi jalan dalam kondisi baik, serta terdapat jalan dengan kualitas yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pada indikator persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran masyarakat akan kebutuhan akses air bersih. Selain itu jumlah jembatan yang terbangun pada tahun 2023 adalah sebanyak 1 unit jembatan.

Pada indikator panjang jalan yang terbangun pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2022. Diharapkan melalui pembangunan infrastruktur pendukung ini nantinya akses dan pertumbuhan ekonomi kawasan di Kabupaten Pangandaran akan lebih mudah dan semakin meningkat.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011), sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat (Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011). Sedangkan, Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan, minimal bangunan dan kesehatan penghuni (Peraturan Menteri

PU No.2/PRT/M/2017). Berikut merupakan capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Pangandaran:

Tabel 2. 43 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Ketaatan terhadap RTRW	%	27	35	35	36,19	42,54
Persentase Sarana dan Prasarana Pusat Pemerintahan yang Terpenuhi	%	5,7	11,43	11,43	11,43	17,14
Indeks Risiko Sanitasi	Nilai	38	32,39	32	32	32
Rasio Rumah Layak Huni			75,46	87,49	88,09	88,26

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Pangandaran, 2024

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 untuk indikator ketaatan terhadap RTRW telah mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan terlaksananya rencana tata ruang wilayah beserta pembuatan dan pelaksanaan kebijakan penataan ruang. Pada tahun 2023, realisasi pemenuhan sarana dan prasarana pusat pemerintahan mencapai 17,14%. Di mana pada tahun 2019 hanya terealisasi 5,7%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kinerja disertai dengan peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan.

Pada indikator Indeks Risiko Sanitasi pada tahun 2023 tetap dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan tempat pembuangan sampah, penanganan limbah serta kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan demikian, capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu dioptimalkan kembali kinerja nya. Utamanya dalam peningkatan rumah tangga bersanitasi dan sarana prasarana pemerintah yang baik.

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang

diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu hal yang wajib diutamakan guna terciptanya ketertiban dan keamanan bagi seluruh masyarakat serta menumbuhkan masyarakat yang tangguh dan tanggap dalam menghadapi bencana. Sedangkan perlindungan masyarakat yakni suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan hukum. Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dilakukan untuk mewujudkan kondisi sosial yang tertib dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga keswadayaan masyarakat berkembang dan berperan dalam berbagai bidang, baik budaya, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial lainnya.

Berikut adalah hasil capaian kinerja pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Pangandaran tahun 2019-2023:

Tabel 2. 44 Hasil Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Penurunan Pelanggaran Perda	%	58	60	24	14	-242
Tingkat Penurunan Gangguan Ketertiban Umum	%	N/A	-270	27	-67	-82
Persentase peningkatan Kasus Kebakaran Yang Di respons Kurang 15 menit	%	28	33	63	75	73

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase desa/ kelurahan/kampung rawan bencana yang mendapat/ memperoleh informasi peringatan dini bencana	%	68,8	68,8	68,8	60,5	100
Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana	%	27	29	22	22	24
Persentase Korban Bencana yang mendapatkan penanganan	%	0,09	2,4	N/A	N/A	99
Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan	%	100	100	100	100	100
Persentase jumlah kerusakan akibat bencana yang terrehabilitasi	%	100	100	100	100	100
Kejadian Kebakaran	Kasus	53	79	35	37	90
Jumlah Pelanggaran K3 yang Dilaporkan Masyarakat dan Teridentifikasi	Kasus	10	37	28	24	82
Pelanggaran K3 yang Terselesaikan	Kasus	10	10	28	24	82
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100	100	100	100	100
Petugas Linmas di Kab/Kota	Orang	1908	1913	1946	1929	1928

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Pangandaran, 2024

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat penurunan pelanggaran Perda pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan yang signifikan akan pelanggaran Perda di Kabupaten Pangandaran. Sedangkan pada indikator tingkat penurunan gangguan ketertiban umum pada tahun 2022 sebesar -67%. Hal ini dikarenakan meningkatnya aduan dari masyarakat terkait gangguan ketertiban umum.

Persentase peningkatan kasus kebakaran yang di respons kurang 15 menit pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya optimalisasi pelayanan pemadam kebakaran dalam tingkat waktu tanggap. Sedangkan persentase desa/kelurahan tangguh bencana pada tahun 2018-2022 mengalami penurunan yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 sebesar 22%. Hal ini dikarenakan adanya *refocusing* anggaran yang digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca Covid-19, serta adanya kebijakan pembatasan kerumunan. Meskipun demikian, Kabupaten Pangandaran terus meningkatkan hal ini dengan cara melatih warga desa dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pada tahun 2023 terdapat 90 kasus kejadian kebakaran namun semuanya berhasil dipadamkan dengan cepat. Selain itu, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap terjadi pelanggaran K3 di Kabupaten Pangandaran dapat diselesaikan semuanya.

2.1.3.1.6 Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang disabilitas, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Untuk mengurangi angka penyandang disabilitas, maka diperlukan kerja sama dari pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan sosial Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 45 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	45.944	116.458	46.516	39.134	40.729
Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan	Jiwa	50.817	116,458	52.224	53.268	45.167

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
sosial (PPKS) yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun						
Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani	Jiwa	45.944	116.458	50.210	39.134	40.729
Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ada	Jiwa	50.817	116.458	52.224	53.268	45.167
Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang diberikan bantuan	Jiwa	45.944	116.458	46.516	39.134	40.729
Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang seharusnya menerima bantuan	Jiwa	50.817	116.458	52.224	53.268	45.167
Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	%	90,41	100	91	73	90
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	5,81	6,71	6	6,27	7,1
Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina	Jiwa	N/A	1.427	1.531	2.006	1.986
Persentase PSKS yang aktif sosialisasi/	%	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial						
Persentase PPKS yang mandiri	%	6,1	21,4	8	3,63	7,15
Jumlah Panti Sosial	Unit	23	22	23	31	31
Jumlah fakir miskin mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	Jiwa	45.944	117.471	47.516	39.134	40.729
Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial	Jiwa	45.944	117.471	45.417	644	1.331

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, 2023

Berdasarkan data di atas, jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Pangandaran mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya dimana pada tahun 2023 yakni sebanyak 40.729 jiwa. Sedangkan untuk jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang seharusnya memperoleh bantuan sosial di tahun 2023 yakni sebanyak 45.167 jiwa. Pendataan yang dilakukan merupakan keberhasilan dalam kerja sama antar *stakeholder* dan adanya dukungan anggaran sehingga pendataan di lapangan dapat dilakukan.

Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami pencapaian yang fluktuatif dimana pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi sebesar 90%. Persentase PSKS yang aktif sosialisasi/penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mencapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya kekompakan sumber daya manusia serta adanya dukungan anggaran.

Jumlah panti sosial di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 mengalami kenaikan yakni menjadi sebanyak 31 unit. Sedangkan jumlah fakir miskin mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi sebesar

40.729 jiwa. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Pangandaran terutama dibidang sosial untuk meningkatkan kinerjanya dengan penyediaan data yang valid dan akurat.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Nondasar

Fokus layanan urusan wajib nondasar mencakup: usaha kecil mikro dan menengah, tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; pemberdayaan masyarakat dan desa; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi dan UMKM, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan, yang disajikan sebagai berikut.

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, atau sebagainya.

Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Lalu yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan agar menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk dapat menjalankan urusan pemerintah daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat maka dibutuhkan serapan dan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

Berkaitan dengan tenaga kerja dapat disajikan data hasil kinerja bidang urusan tenaga kerja pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 46 Hasil Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Angka partisipasi angkatan kerja	%	237,582	245,619	241,542	260,761	274,550
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,08	76,79	74,75	79,92	80,15
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,48	5,08	3,25	1,56	1,52
Rasio penduduk yang bekerja	Rasio	90	57,97	87,95	78,67	73,38
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (usia kerja)	Rasio	95,48	94,52	96,75	98,44	98,48
Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	N/A	N/A	58,96	76,43	9,25
Rasio penduduk yang bekerja	Rasio	N/A	57,97	87,95	78,67	73,38
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	N/A	72	46,26	15,13	50

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Pangandaran, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pangandaran tahun 2019-2023 mengalami peningkatan angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2023 mencapai sebesar 80,15%. Hal ini dikarenakan rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap TPAK serta masyarakat yang masih tergolong mampu cukup banyak untuk memilih tidak segera mencari lowongan pekerjaan karena faktor dari keluarga yang finansialnya memadai.

Pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 1,52%. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang menyediakan lowongan pekerjaan serta adanya kompetensi yang sesuai dari para pencari kerja. Sedangkan pada indikator persentase pencari kerja yang ditempatkan terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2023 yakni menjadi sebesar 9,25%. Permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Pangandaran adalah terjadinya kesenjangan antara jumlah pencari kerja terhadap kesempatan untuk bekerja.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan usaha dalam mengalokasikan kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Kedudukan perempuan akan membaik jika ketika perempuan dapat mandiri serta mampu

menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, "Dalam penyelenggaraan perlindungan anak berbagai pihak seperti negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab didalamnya".

Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus mengupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Berikut adalah hasil capaian kinerja urusan pemberdayaan dan perlindungan anak Kabupaten Pangandaran tahun 2019-2023.

Tabel 2. 47 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	90,02	89,78	89,92	90,2	90,04
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	74,56	74,57	75,98	76,09	76,53
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	61,55	63,85	62,18	71,82	70,98

Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Anak Kabupaten Pangandaran, 2024

IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-Laki dan IPM Perempuan ditinjau dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPG di Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan yang fluktuatif dimana pada tahun 2023 yakni menjadi sebesar 90,04. Hal ini dikarenakan adanya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan diruang publik dan pribadi termasuk perdagangan orang, eksploitasi seksual dan berbagai jenis eksploitasi lainnya serta dengan menjamin partisipasi penuh, efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan mengalami penurunan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi sebesar 24,89%. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah tenaga kerja perempuan usia produktif dan belum optimalnya kesetaraan upah antara perempuan dan laki-laki. Pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya keterlibatan perempuan diparlemen, adanya partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan dari perempuan.

2.1.3.2.3 Pangan

Menurut UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pangan Pasal 1 menjelaskan definisi ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi. Ketahanan pangan sendiri adalah kondisi tersedianya pangan oleh negara untuk rakyatnya, tersedianya pangan yang cukup baik disertai dengan jumlah maupun mutunya, keamanan, keanekaragaman, gizi yang cukup, pemerataan, dan harga yang terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Manusia membutuhkan energi untuk hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari. Asupan energi harus mengandung karbohidrat, lemak dan protein untuk digunakan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Energi yang diserap dari asupan makanan harus sesuai dengan porsi yang dibutuhkan untuk asupan energi penuh. Pada urusan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersedian pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman bergam, bergizi dan imbang namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Berikut merupakan hasil kinerja bidang urusan pangan pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2019-2023:

Tabel 2. 48 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Angka kecukupan protein per kapita	Gram/Kap. Hari	68,8	70,6	70,6	64,8	68,5
Jumlah desa rawan pangan	Desa	9	8	6	16	1
Total desa pangan lestari	Desa	3	3	17	21	
Ketersedian pangan utama (*food availability*)	Ton/Tahun	61.823,74	38.727,46	141.806	171.154,06	162.754,03
Skor PPH Konsumsi	Skor	93,2	94,5	93,4	93,3	94,9
Angka Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/ Hari	6460	5525,18	5525,18	2100	2151
Angka Ketersediaan Protein	Gram/Kap/ Hari	180,89	350,72	350,72	N/A	55,38
Skor PPH Ketersediaan	Skor	93,2	94,5	93,4	93,3	75,11
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	82,56	81,99	80,64	81,12	83,57

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa angka kecukupan protein per kapita pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada indikator jumlah desa rawan pangan mengalami penurunan signifikan di tahun 2023 menjadi hanya 1 Desa. Hal ini dikarenakan meningkatnya stabilitas ekonomi, pemenuhan gizi keluarga dan pencegahan *stunting*.

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penurunan produksi namun ketersediaan pangan utama sudah terpenuhi. Sedangkan pada indeks ketahanan pangan mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 yakni menjadi sebesar 81,12. Hal ini meningkat dibandingkan tahun 2021 dikarenakan adanya

peningkatan pada aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan, dan aspek pemanfaatan pangan.

Skor PPH Konsumsi merujuk pada indikator penilaian kualitas makanan yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) untuk membantu konsumen dalam memilih makanan yang sehat. PPH singkatan dari "Peringkat Penuh" atau "Peringkat Penuh Potensi" dan mencerminkan kandungan nutrisi indikator suatu makanan. Skor PPH konsumsi yang ada di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 yakni sebesar 75,11, menurun dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya penurunan konsumsi dikelompok kacang-kacangan dan gula.

2.1.3.2.4 Pertanahan

Hak atas tanah merupakan hak yang memberikan wewenang kepada pemiliknya dalam menggunakan maupun memanfaatkan tanah yang dimilikinya. Kewenangan dalam hak atas tanah dijelaskan menurut regulasi UU Pokok Agraria Pasal 4 ayat 2 yaitu menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan langsung dengan tanah itu dalam batas-batas menurut UU ini dan regulasi yang berlaku.

Menurut pasal 33 (1) UUD 1945 dikatakan bahwa, "Bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara". Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat berhak menguasai kekayaan alam tersebut sebagaimana tercantum dalam UUPA Pasal 1 ayat (2) yang memberi wewenang kepada negara untuk: mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Penataan wilayah dan ruang melalui pembuatan peraturan tentang tata ruang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai konsekuensi pembangunan dan pertambahan jumlah penduduk. Konflik-konflik yang sering muncul pada urusan pertanahan di Kabupaten Pangandaran adalah berupa konflik perbatasan antar kecamatan, desa maupun antar penduduk, serta dengan *stakeholders* lain seperti pengusaha pertambangan dan

perkebunan. Berikut merupakan tabel hasil capaian kinerja urusan pertanahan Kabupaten Pangandaran:

Tabel 2. 49 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Jumlah kebijakan umum mengenai pedoman pelaksanaan pengembangan dan penataan batas wilayah yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100

Sumber: BPN Kabupaten Pangandaran, 2024

Berdasarkan tabel di atas capaian urusan pertanahan pemerintah Kabupaten Pangandaran telah mencapai 100%. Hal ini dikarenakan telah terlaksananya koordinasi dengan pihak BPN dan sudah tersertifikasi tanah yang ada di wilayah kabupaten pangandaran.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Sumber daya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintahan. Pengelolaan sumber daya alam memiliki tujuan yang sama yaitu agar terus tersedianya sumber daya alam yang dapat diperbarui, menghemat dan meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui serta mencari substitusi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berikut ini dapat disajikan realisasi dari kinerja di Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan mutu lingkungan hidup:

Tabel 2. 50 Hasil Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Volume sampah yang ditangani (m3)	m3	52.954	30.848	35.564	54.162	59.155
Volume produksi sampah	m3	181.475,86	183.136,82		188.985,16	192.099,05
Persentase Penanganan Sampah	%	29,18	16,84	19,30	28,66	30,79
Indeks Kualitas Air	Indeks	50	51.67	50	50	50
Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	N/A	N/A	92,9	79,76	
Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,68	77,79	88,66	88,16	90,96
Indeks Kualitas Vegetasi/IKTL	Indeks	52,28	65,25	68,84	69,05	39,07
Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	m3	150	210	210	222	138
Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Pelaku Usaha	8	6	3	6	8
Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pelaku Usaha	8	16	3	22	11
Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Kasus	5	4	3	3	1
Total pengaduan masyarakat yang teregister	Kasus	5	4	3	3	1

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Total timbunan sampah	ton/tahun	62.019	62.266,52	62.523,33	62.365,10	64.265,84
Jumlah Sampah 3R	ton/tahun	2.211.90	2.573,25	7.493,50	2.190	17.886,5
Total Jumlah Timbunan Sampah Kabupaten (Ton)	Ton	60,910.66	62,128.88	62.523,33	62.365,10	64.265,84
Luas area Kabupaten yang dilayani	Km2	295,00	170,25	195,12	289,75	311,29
Luas area Kabupaten keseluruhan	Km2	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penanganan sampah pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya meskipun pencapaian masih sangat rendah yakni sebesar 30,79%. Hal ini dikarenakan kurangnya armada pengangkut sampah, pertambahan penduduk, banyaknya pengunjung wisata yang menghasilkan sampah, dan kurangnya masyarakat dalam mengelola sampah.

Indeks kualitas air Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 yakni sebesar 50. Hal ini masih tergolong rendah dikarenakan kondisi alam saat musim hujan membawa sedimen yang larut dari air sungai dan adanya kegiatan pembuangan sampah/air limbah domestik yang tidak sesuai peraturan. Sedangkan indeks kualitas udara lebih baik yakni pada tahun 2023 sebesar 90,96. Penurunan IKAL terjadi dikarenakan adanya penambahan aktivitas pariwisata dan kurang optimalnya pengelolaan limbah dikawasan pantai terutama limbah yang berasal dari hotel.

Jumlah daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kabupaten Pangandaran tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sbesar 138m^3. Pada indikator jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dan izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten di Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan ditahun 2023. Hal ini dikarenakan belum banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang mengetahui aturan yang berlaku sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi.

Capaian urusan bidang lingkungan hidup Kabupaten Pangandaran tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan terutama terkait dengan penanganan sampah. Hal tersebut disebabkan oleh belum memadainya

sarana prasarana penanganan sampah, armada angkut sampah yang masih terbatas karena sebagian rusak serta belum tersedianya TPS3R di setiap Kecamatan. Untuk menunjang dan meningkatkan Indikator Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan kegiatan menanam pohon baik di hutan rakyat maupun hutan mangrove. Peningkatan capaian kinerja urusan lingkungan hidup, nantinya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaturan serta pengelolaan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan suatu hal penting dalam kehidupan masyarakat sebagai data pendukung dalam penentuan prioritas sasaran program pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Berikut adalah capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pangandaran tahun 2019-2023:

Tabel 2. 51 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Penerbitan KTP elektronik	%	91,96	96,95	99,17	98,35	98,58
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	17,03	26,78	98,2	93,85	99,61
Cakupan Perekaman Maturitas Elektronik	%	2,75	3,29	99,2	98,89	98,58
Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	26,51	14,66	56,26	51,97	56,05
Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	%	74,2	74,61	73,58	75,31	71,82
Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Perkawinan	%	57,94	59,54	100	63,86	68,03
Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian	%	61,05	67,25	78,87	99,68	100

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Validasi *database* Kependudukan	%	30,43	39,13	60,87	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, 2024

Pada tahun 2023, cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik sebesar 98,58%. Indikator penerbitan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2023 tahun 2023 sebesar 98,58%, terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pangandaran masih tergolong rendah yakni pada tahun 2023 sebesar 56,05%. Rendah atau turunnya angka pada indeks yang disebutkan di atas dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Persentase validasi *database* pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan yakni mencapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya implementasi regulasi Permendagri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian hak akses dan pemanfaatan data. Kebutuhan masyarakat terkait dengan administrasi kependudukan bisa didapat melalui pencatatan administrasi penduduk.

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan daerah kabupaten dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Upaya pemberdayaan masyarakat adalah salah satu indikator dalam menentukan kemandirian sumber daya manusia (SDM) di suatu daerah. Pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan upaya membendung arus urbanisasi ke kota, karena suatu daerah mampu melakukan pemberdayaan masyarakat, maka suatu daerah berhasil dalam melakukan proses pembangunan. Berikut merupakan hasil kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2. 52 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Desa Kategori Swasembada	%	4,30	8,60	18,28	38,70	100
Jumlah Desa Kategori Swasembada	Desa	4	8	17	36	93
Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	Lembaga	83	87	87	87	93
Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kategori Baik	%	44,09	59,14	58,06	65,59	100
Jumlah PKK Aktif	PKK	104	104	104	104	104
Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif dalam Pembangunan Desa	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, 2024

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase desa kategori swasembada pada tahun 2023 telah mencapai 100% Hal ini dikarenakan adanya kekompakan SDM, kerja sama antar *stakeholder*, dan adanya dukungan anggaran. Demikian juga pada jumlah desa kategori swasembada pada tahun 2023 mengalami peningkatan mencapai 93 Desa. Hal ini dikarenakan adanya kekompakan SDM, kerja sama antar *stakeholder*, dan adanya dukungan anggaran.

Pada tahun 2019 hingga tahun 2023 jumlah PKK aktif di Kabupaten Pangandaran mengalami angka yang stagnan yakni sebanyak 104 PKK. Demikian juga dengan persentase PKK aktif yang stabil yakni sebesar 100%. Hal ini dikarenakan adanya kekompakan SDM, kerja sama antar *stakeholder*, dan adanya dukungan anggaran.

Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan beberapa capaian ini menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilakukan telah mampu

menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di desa.

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk berfokus kepada edukasi masyarakat terkait jumlah anggota keluarga yang akan ditanggung di masa depan. Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat ditekan. Selain itu Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif di wilayah masing-masing.

Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diamanahkan berdasarkan regulasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu meliputi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal, distribusi peralatan dan perlengkapan kontrasepsi, pendayagunaan PKB/PLKB, serta pembinaan keluarga sejahtera.

Berikut merupakan data hasil kinerja bidang urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada 5 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2018 hingga tahun 2022 yang tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 53 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
TFR	-	2,42	2,32	2,29	2,51	2,22
CPR	%	75,15	76,41	60,25	73,37	69,81
Unmet Need	%	17,23	14,88	24,84	18,1	19,7
LPP	%	0,57	0,57	0,96	1,24	1,17
Ratio Akseptor KB	%	75,16	76,43	60,25	73,37	70,31
ASFR	-	13,45	17,61	18,01	19,81	27

Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Anak Kabupaten Pangandaran, 2023

Total *Fertility Rate* (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita per seribu wanita selama masa reproduksinya. Hipotesisnya adalah bahwa tidak ada wanita yang meninggal sebelum akhir masa reproduksinya dan tingkat kesuburan menurut usia tidak berubah dari

waktu ke waktu. TFR pada Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022 mengalami angka yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan penggunaan kontrasepsi selama wanita usia subur serta rendahnya PUS yang melahirkan dibawah usia 19 tahun.

Contrasepsi Prevalence Rate (CPR) adalah prevalensi penggunaan kontrasepsi yang membandingkan PUS peserta IB aktif (peserta IB yang sedang menggunakan metode kontrasepsi dengan PUS total). Indikator ini dapat memberikan informasi tentang seberapa besar peningkatan kesehatan ibu akibat regulasi fertilitas. Indikator-indikator ini dapat memberikan prediksi untuk mengukur akses terhadap layanan kesehatan reproduksi esensial. CPR di Kabupaten Pangandaran mengalami angka yang fluktuatif yakni pada tahun 2022 sebesar 69,81%. Hal ini dikarenakan masih tingginya angka kelahiran dan masih rendahnya pemakaian kontrasepsi.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Pangandaran mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan pembentukan kampung KB serta meningkatnya peserta KB aktif.

2.1.3.2.9 Perhubungan

Perhubungan merupakan hal yang penting dalam hal yang berkaitan tentang arus mobilisasi antar satu ke lainnya. Peran perhubungan sendiri tidak jauh dari hal distribusi barang maupun jasa pada kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Hal tersebut dapat mendorong, maupun menunjang pada segala aspek kehidupan bermasyarakat dengan suatu tujuan seperti halnya pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Proses mobilisasi dari masyarakat khususnya Kabupaten Pangandaran cukup terbatas dikarenakan adanya pembatasan sosial akibat dari pandemi Covid-19. Pembatasan sosial ini didukung juga dengan pengetatan beberapa ruas jalur penghubung yang ada di Kabupaten Pangandaran. Sehingga secara langsung pandemi ini mempengaruhi arus pergerakan masyarakat. Adapun data hasil kinerja bidang urusan perhubungan pemerintah Kabupaten Pangandaran pada 5 tahun terakhir ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 54 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Sarana Prasarana Perhubungan yang Ada dalam Kondisi Baik	%	76,3	76,9	78	96	96,5
Angka Kecelakaan Lalu Lintas	%	0,003	0,002	0,001	0,001	0,001
Jumlah Penumpang Angkutan Darat	Unit	631,396	474,383	482,441	487,356	437,882
Persentase Kecamatan yang Terlayani Angkutan Umum	%	50	60	50	50	80

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, 2024

Berdasarkan tabel di atas, rasio sarana prasarana perhubungan yang ada dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 mencapai 96,5%. Hal ini dikarenakan adanya bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat untuk pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (Smart PJU) di semua titik lokasi di 10 kecamatan, dan pagar pengaman jalan.

Persentase kecamatan yang terlayani angkutan umum pada tahun 2023 mengalami angka peningkatan yang cukup baik.

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informasi menjadi suatu hal yang sangat penting saat ini. Oleh karena itu urusan komunikasi dan informasi merupakan urusan yang sangat penting dalam proses kelangsungan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran. Berikut adalah capaian urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Pangandaran tahun 2019-2023.

Tabel 2. 55 Hasil Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase aplikasi *e-government* yang terintegrasi	%	30	40	45	48	50
Indeks SPBE	indeks	2,32	3,02	3,42	2,82	3,53
Jumlah IKM	jumlah	88,11	76,81	89,13	89,25	89,27
Jumlah KIM	kelompok	1	1	1	1	4

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Kabupaten Pangandaran, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase aplikasi *e-government* yang terintegrasi selalu meningkat setiap tahunnya, dimana pada

tahun 2023 mencapai 50%. Hal ini dikarenakan semua pengampu sistem memanfaatkan secara baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sedangkan pada indeks SPBE pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi sebesar 3,53%. Hal ini dikarenakan banyaknya penambahan pada nilai tingkat kematangan indikator SPBE.

Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja urusan komunikasi dan informasi Kabupaten Pangandaran memang menunjukkan capaian kinerja dengan nilai yang cukup positif. Namun, ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan dalam proses pencapaiannya, diantaranya terkait dengan pengintegrasian aplikasi pada setiap dinas ataupun unit kerja di jajaran perangkat daerah Kabupaten Pangandaran yang masih belum sepenuhnya tercapai.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha kecil dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. Usaha kecil dan menengah akan selalu menghadapi tantangan yang kompleks dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi. Untuk menguatkan perekonomian daerah, maka perlu dilakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penguatan UMKM merupakan salah satu faktor penggerak pembangunan ekonomi daerah agar masyarakat dapat hidup sejahtera. Berikut adalah capaian urusan koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2019-2023.

Tabel 2. 56 Hasil Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase koperasi aktif	%	33,96	89,02	89,02	91,56	100
Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	100	100	100	100	100
Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	%	13,04	14,29	16,66	8,4	10,53
Jumlah usaha mikro dan kecil	Jumlah	11.360	11.360	11.360	98.290	98.290

Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran, 2024

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase koperasi telah mencapai 100% pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya pembinaan dan pengawasan koperasi. Sedangkan persentase KSP/USP yang naik klasifikasi mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan stagnannya predikat kesehatan KSP/USP Koperasi.

Pada indikator jumlah usaha mikro dan kecil pada tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pendataan menyeluruh dari tiap desa. Dalam pencapaian kinerja di urusan koperasi dan UKM, terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu kurangnya data terkait jumlah anggota koperasi yang sejahtera dan perkembangan usaha UMKM.

Peningkatan jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Pangandaran disebabkan oleh beberapa faktor penggerak, salah satunya yaitu adanya fasilitas pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan untuk masyarakat. Tidak hanya memberikan pelatihan namun Kabupaten Pangandaran juga memberikan dukungan permodalan bagi usaha mikro dan kecil dengan bermitra oleh pihak ketiga, serta fasilitasi penjaminan untuk pengajuan kredit. Namun, pada realisasinya terdapat sejumlah faktor yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Pangandaran seperti mengubah pola pemikiran masyarakat tentang semangat kewirausahaan.

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Di era globalisasi seperti saat ini, persaingan dunia usaha semakin ketat. Agar dapat bertahan maka setiap daerah mulai berlomba-lomba untuk mengembangkan wilayahnya. Pengembangan yang diupayakan dimaksudkan untuk menarik investor agar masuk ke daerahnya, sehingga Pendapatan Asli

Daerah (PAD) meningkat. Berbagai upaya dilakukan seperti memanfaatkan kekayaan alam, menaikkan retribusi daerah dan ada juga yang memudahkan perizinan bagi investor untuk menanamkan modal di daerah tersebut. Realisasi kinerja Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangandaran tersajikan dalam data sebagai berikut:

Tabel 2. 57 Hasil Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah investor PMDN	Jumlah	131	2.124	1.050	6.120	67.564
PMA	Rp	0	0	0	31.010.000.000	0
PMDN	RP	471.716.357.987	349.898.121.679	219.437.739.336	1.750.354.863.491	1.539.208.559.642
Jumlah Investasi (PMA.PMDN)	Rp	471,8 M	349,9 M	795,7 M	1.781,4 M	1.539,2 M

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat penurunan pada indikator PMA dan PMDN dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 jumlah realisasi investasi (PMA dan PMDN) mencapai Rp. 1.539,2 Miliar. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak investor yang melihat adanya peluang investasi di Kabupaten Pangandaran yang memang terkenal sebagai tempat pariwisata bagi wisatawan nasional maupun internasional. Maka dari itu, banyak investor yang menginvestasikan modalnya untuk menjalankan usaha di Kabupaten Pangandaran.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran yang strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Dalam berbagai aspek pembangunan, pemuda memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional maupun lokal. Peranan pemuda sebagai aset untuk percepatan pembangunan, sangat tergantung pada kualitas sumber daya pemuda.

Pengoptimalan peran pemuda di Kabupaten Pangandaran memiliki peran penting dalam pembangunan daerah baik dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan, keamanan maupun sosial budaya. Pemberdayaan

pemuda dapat dilakukan melalui organisasi sosial kepemudaan seperti karang taruna maupun Non-Government Organization (NGO) pemuda yang bergerak di berbagai bidang. Selain itu, untuk meningkatkan kesegaran jasmani serta mengembangkan minat dan bakat masyarakat dalam bidang keolahragaan juga dikembangkan sektor olahraga di Kabupaten Pangandaran.

Selain itu, permasalahan pembangunan pada generasi muda saat ini adalah memiliki tubuh yang sehat, kuat dan berdaya saing. Oleh karena itu, jika pemuda tersebut memiliki hati jiwa dan raga yang sehat, maka dapat mengerahkan daya tahan tubuh yang kuat pula untuk mengatisipasi berbagai penyakit. Berikut merupakan capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2. 58 Hasil Capaian Kinerja Urusan Olahraga Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah organisasi olahraga/klub olahraga	Organisasi/ Klub	2	2	2	2	3
Jumlah Klub Olahraga	Klub	127	146	146	146	146
Jumlah Gedung Olahraga	Unit	117	117	117	117	121

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2024

Pada urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2023 umumnya tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya melakukan olahraga, menjadikan munculnya klub-klub olahraga berbasis prestasi, dan kesehatan. Dengan tercapainya medali dalam Pekan Olahraga Daerah Provinsi Jawa Barat, menunjukan bahwa Kabupaten Pangandaran bisa bersaing untuk cabang olahraga tertentu. Meskipun demikian, masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya berolahraga serta belum banyaknya cabang olahraga yang bisa mendapatkan medali, karena belum ditunjang oleh besaran anggaran, sarpras dan fasilitas lainnya yang representatif.

2.1.3.2.14 Statistik

Statistik merupakan upaya pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penyajian data yang sering digunakan untuk masalah ilmiah, industri maupun sosial. Tahap pengolahan data sangat menentukan tingkat

keakuratan dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. Dengan adanya lembaga statistik diharapkan mampu menyebarluaskan produk yang berkualitas terkait hasil pembangunan di berbagai sendi kehidupan, baik lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan pemerintahan. Statistik digunakan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam memahami kondisi daerahnya dan mempermudah dalam proses pengambilan keputusan.

Statistik pada pemerintahan dibantu dalam mendeskripsikan maupun mengimplementasikan data tentang data kepegawaian dan variabel yang akan diteliti. Oleh sebab itu, perbaikan maupun penyempurnaan terus dilakukan untuk mendukung perubahan atau penambahan nilai guna meningkatkan penilaian dan sebagai sumber informasi bagi Kabupaten Pangandaran. Adapun indikator capaian statistik Kabupaten Pangandaran sebagai berikut.

Tabel 2. 59 Hasil Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Publikasi	publikasi	1	0	0	2	3

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Kabupaten Pangandaran, 2024

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah publikasi statistik pada tahun 2023 yakni sebanyak 3 publikasi. Hal ini menunjukan adanya peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian peningkatannya belum signifikan dikarenakan produsen data (Perangkat Daerah) belum melakukan publikasi data secara lengkap dan berkala.

2.1.3.2.15 Persandian

Semakin berkembangnya E-Government memunculkan banyak inovasi baru yang semakin memberikan kemudahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan komunikasi publik. Persandian dan keamanan informasi adalah sebagai entitas pengaman data dan informasi. Namun demikian, hal tersebut memunculkan permasalahan yaitu ancaman keamanan data maupun transaksi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan mereka. Peran persandian dan keamanan informasi berada yaitu sebagai entitas pengaman data dan informasi sangat berperan aktif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Bidang tersebut

merupakan pengamanan data dan informasi yang dilakukan analisis guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

Tabel 2. 60 Hasil Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Sistem Informasi yang Menerapkan Sistem Keamanan Informasi	Sistem Informasi	16	20	21	25	59

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Kabupaten Pangandaran, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa sistem informasi yang menerapkan sistem keamanan informasi meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dimana pada tahun 2023 yakni sebanyak 59. Peningkatan tersebut didapat karena adanya pengembangan kompetensi SDM, pengembangan infrastruktur teknologi yang modern, meningkatkan komitmen pimpinan Perangkat Daerah untuk aktif dan mendukung implementasi penggunaan sandi serta melakukan proses monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

2.1.3.2.16 Kebudayaan

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kabupaten termuda yang ada di provinsi Jawa Barat, selain memiliki banyak wisata alam, kabupaten ini juga terkenal dengan wisata budaya dan wisata buatan yang memiliki keunikan dan beragam. Pemerintah kabupaten melakukan berbagai upaya dan berinovasi dalam mengembangkan kawasan wisata salah satunya dengan menarik wisatawan dengan memperkenalkan budaya yang ada. Perbatasan wilayah Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Cilacap menyebabkan Kabupaten Pangandaran kental akan kultur Sunda dan kultur Jawa. Berkembangnya era globalisasi cukup berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya. Berikut merupakan hasil capaian kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2. 61 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Cagar Budaya Dilestarikan	Cagar Budaya	30	30	35	32	40

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah	12	8	40	14	10
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah	6	0	3	11	4
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu	Jumlah	30	30	30	26	40
Persentase Kelompok Budaya Aktif	Jumlah	0	100	100	218	209

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah cagar budaya yang dilestarikan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan yang fluktutif dimana pada tahun 2023 yakni sebesar 40 cagar budaya. Capaian tersebut merupakan objek diduga cagar budaya yang terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ada 40 objek diduga cagar budaya.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pembatasan kegiatan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Meskipun demikian pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan walaupun kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 dan tahun 2023. Pada indikator persentase kelompok budaya aktif mengalami kenaikan yang signifikan ditahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya konsistensi pengawasan, pembinaan dan koordinasi yang baik antar stakeholder terkait.

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, bahwa dari salah satu ketujuh agenda pembangunan nasional adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia yang memiliki cara pikir yang terbuka, kritis, kreatif, dan memiliki karakter. Perkembangan literasi masyarakat Indonesia salah satunya bergantung pada kegemaran membaca yang tergambar dalam Indeks Literasi Masyarakat (IPLM). Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi berkontribusi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, berkarakter, mandiri dan berdaya saing yang pada akhirnya terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Perpustakaan

merupakan pusat kegiatan belajar, membaca dan mencari informasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Capaian kinerja urusan perpustakaan Kabupaten Pangandaran disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 62 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Selama 1 Tahun	Orang	12.567	3.931	3.104	14.740	26.425
Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Judul Buku	9.636	10.794	12.274	23.036	25.031
Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Koleksi Buku	10.083	10.761	11.900	23.036	25.031
Jumlah Seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai	Orang	1	1	265	364	695
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	Orang	12.567	3.931	3.104	14.740	26.425
Nilai IKM terhadap Pelayanan Perpustakaan	Nilai	31,426	42,99	87,58	88,92	89,02
Jumlah Perpustakaan	Perpustakaan	325	627	632	695	695
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Per Tahun	Orang	12.567	3.931	3.104	14.740	26.425
Jumlah Orang dalam Populasi yang Harus Dilayani	Orang	31.426	42.958	33.935	30.296	15.195

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2022 maupun tahun 2021. Peningkatan yang signifikan tersebut didukung dengan adanya Program Mobil Perpustakaan Keliling dan Promosi Literasi ke Sekolah Dasar sampai ke Sekolah Menengah Atas.

Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pengadaan buku yang bersumber dari Banprov dan DAK serta adanya hibah buku dari masyarakat. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Pangandaran juga mengalami peningkatan ditahun 2022 yakni menjadi sebanyak 695 perpustakaan di Pangandaran. Hal ini dikarenakan dilaksanakannya penelusuran perpustakaan ke kecamatan, desa, sekolah dan madrasah.

Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pendataan seluruh pustakawan dan tenaga pustaka di seluruh Kabupaten Pangandaran. Sedangkan pada tahun 2018 hingga tahun 2020 belum ada pendataan seluruh Pustakawan dan tenaga pustaka di seluruh Kabupaten Pangandaran.

2.1.3.2.18 Kearsipan

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Era digitalisasi saat ini menuntut upaya strategis yang dilakukan lembaga kearsipan dan lembaga pengelola kearsipan lainnya, untuk memastikan bahwa arsip baik yang bersifat statis maupun dinamis menjadi Informasi yang terkandung di dalamnya merupakan informasi yang nyata dan tidak dapat dibantah. Melalui arsip, generasi saat ini dapat mengetahui apa saja yang pernah terjadi sebelumnya dan generasi yang akan datang dapat mengetahui apa saja yang terjadi saat ini sehingga kita dapat mengetahui apa yang terjadi dari waktu ke waktu untuk dipelajari. Berikut merupakan capaian hasil kinerja urusan kearsipan Kabupaten Pangandaran tahun 2019-2023:

Tabel 2. 63 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	18	18	18	18	18
Persentase arsip yang terjamin keamanannya	%	48,03	48,03	48,03	48,03	48,03
Pengelolaan Kearsipan menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM	Kegiatan	2	2	0	0	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran, 2024

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Pangandaran dari tahun 2019 hingga tahun 2023 tidak mengalami perubahan yakni sebesar 18%. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kearsipan kepada OPD sehingga masih perlu ditingkatkan. Sedangkan persentase arsip yang terjamin keamanannya sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 tidak mengalami perubahan yakni sebesar 48,03%. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kearsipan kepada OPD sehingga masih perlu ditingkatkan. Selain itu, juga perlu ditambahkan terkait kelengkapan dan daya dukung sarana dan prasarana.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri atas: kelautan dan perikanan pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Berikut adalah penjelasan serta data terkait urusan pemerintah pilihan.

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Sumber daya perikanan di Kabupaten Pangandaran meliputi sumber daya perikanan tangkap dan budi daya dan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan di masa depan, namun masih belum secara optimal tergali dan termanfaatkan. Sedangkan untuk kelompok usaha didominasi oleh kelompok nelayan. Produksi ikan sendiri mencakup semua hasil penangkapan/budi

daya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi yang dicatat tidak hanya produksi yang dijual saja tetapi termasuk produksi yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun yang diberikan kepada nelayan/pekerja sebagai upah. Tidak termasuk ikan yang diperoleh dalam rangka olah raga atau rekreasi, juga ikan yang dibuang kembali ke laut setelah ditangkap atau ikan yang dibuang karena terkena racun, pencemaran, atau penyakit. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/budi daya. Berikut merupakan hasil capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2. 64 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Produksi Ikan	Ton	2.755,63	1.522,51	1.948,17	1.738,80	3.246,85
Target Daerah	Ton	2.941	2.947	1.527	1.531,20	1.535,50
Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kapita /Tahun	22,5	23,1	22,1	22,6	21,9
Jumlah Kelompok Nelayan	Kelompok	195	241	243	245	241
Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	Ton	2.498,86	1.282,55	1.624,97	1.414,71	2.920,77
Produksi Benih Ikan	Ekor/Tahun	9.099.620	11.519.000	13.058.000	14.341.000	50.438.000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah produksi ikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami jumlah yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan musim cuaca yang tidak menentu sehingga produksi ikan juga tidak menentu. Sedangkan jumlah konsumsi ikan stabil diangka rata-rata 22,44 kg/perkapita/tahun. Hal ini dikarenakan semakin giatnya sosialisasi gemar makan ikan yang dilakukan sehingga masyarakat sadar akan pentingnya makan ikan.

Jumlah kelompok nelayan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya dorongan dari diri sendiri untuk berkelompok, sehingga mereka bisa terakmodasi kegiatan dan aktifitasnya oleh pemerintah. Sedangkan produksi benih ikan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dikarenakan data penginputan produksi benih ikan sudah melampirkan dari semua produsen benih yaitu BBI dan juga kelompok.

2.1.3.3.2 Pariwisata

Bidang pariwisata akan selalu menghadapi tantangan yang kompleks dalam menunjang peningkatan ekonomi. Manajemen pengelolaan pariwisata akan mempengaruhi tingkat pengelolaan potensi wisata yang dimiliki daerah tersebut terhadap daya tarik masyarakat untuk berwisata di daerah tersebut. Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu daerah yang berpotensi sebagai kawasan wisata andalan. Kunjungan wisata selalu naik di setiap tahun. Perkembangan dalam sektor wisata Kabupaten Pangandaran lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 65 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	Orang	3.775.273	2.842.022	3.127.174	4.112.044	3.544.808
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	117.767	88.484	0	1.177	3.546
Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	Rp	18.472.858.000	13.786.568.250	15.126.468.000	29.383.788.500	28.936.290.000
Jumlah Penerimaan Sektor Pariwisata	Rp	18.472.858.000	13.786.568.250	15.126.468.000	29.383.788.500	28.936.290.000
Jumlah Rumah Makan/Restoran	Unit	203	203	203	211	233
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Milyar	1.060,12	1.091,41	1.162,85	1.325,48	1.449,88
Jumlah Hotel	Unit	378	383	405	434	432

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2024

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisata domestik dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami angka yang fluktuatif dimana penurunan yang signifikan terjadi ditahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan sudah tidak adanya pandemi Covid-19 sehingga kondisi semakin normal. Jumlah penerimaan sektor pariwisata pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan yang signifikan karena sudah tidak adanya pembatasan akibat Covid-19. Selain itu, pada tahun 2019 tinggi karena ini dihitung berdasarkan akhir tahun ketika 2020 dan terjadi hook besar sehingga jumlah kunjugan wisata menurun drastis. Hal ini dapat bisa dilihat dari keselarasan dengan jumlah PAD yang masuk.

Jumlah hotel dan jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Pangandaran dari tahun 2019 hingga tahun 2023 setiap tahunnya mengalami kenaikan dimana pada tahun 2023 terdapat sebanyak 233 rumah makan/restoran dan 432 hotel di Kabupaten Pangandaran. Hal ini dikarenakan adanya penggunaan sistem OSS sehingga mempermudah pembuatan izin membuka usaha Rumah makan dan restoran.

2.1.3.3.3 Pertanian

Sektor pertanian dalam pengembangannya sangat bervariatif mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang saat ini sedang berkembang selain itu juga menjadi potensi dan peluang pasar yang cukup baik, diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, tomat, cabe merah, cabe rawit, manggis, durian, dan pisang. Berikut adalah capaian urusan pertanian Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019-2023.

Tabel 2. 66 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	N/A	N/A	21	17	13
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	N/A	N/A	0,62	0,10	0,42
Produksi sektor pertanian	Ton	238.926,32	234.213,90	236.035,49	227.840,27	224.914,15

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Produksi sektor perkebunan	Ton	87.032,25	86.624,89	86.618,45	87.260,45	87.845,16
Produktivitas Padi	Ton/Ha	6,2	6,3	6,3	6,22	6,23
Luas Lahan Sawah	Ha	16.564	16.564	16.747	16.727	16.727
Produktivitas Jagung	Ton/Ha	5,97	6,01	6,45	6,24	5,68
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya per Hektar	Ton	6,17	6,3	6,2	6,24	6,24
Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	Ton	205.003,38	205.981,12	214.265,66	210.144,68	211.285,68
Jumlah Kontribusi PDRB Konstan dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Milyar Rupiah	1.805,52	1.855.81	1.898,15	1.963,55	1.990,67
Jumlah Kontribusi PDRB Harga Berlaku dan Sektor Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	Milyar Rupiah	3.050,50	3.143,79	3.241,83	3.485,23	3.631,92
Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok	1.202	1.348	1.230	1.448	1.454

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa produksi sektor pertanian pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan perubahan cuaca yang sulit di prediksi sehingga pelaksanaan kegiatan dilapangan terganggu dan harus ikut menyesuaikan sehingga mempengaruhi musim tanam dan panen. Sedangkan produksi sektor perkebunan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penambahan tanaman yang ditahun sebelumnya belum menghasilkan dan ditahun 2023 menjadi tanaman menghasilkan (panen).

Produktivitas padi dan produktivitas jagung sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami angka yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan perubahan cuaca yang sulit diprediksi sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan terganggu dan harus ikut menyesuaikan sehingga mempengaruhi musim tanam dan panen. Sedangkan cakupan bina kelompok tani pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yakni menjadi 1.454 kelompok. Semakin banyak kelompok tani yang dibina akan

memudahkan pemberian bantuan hingga menghitung bagaimana potensi pertanian di Kabupaten Pangandaran.

2.1.3.3.4 Perdagangan

Perdagangan merupakan unsur dalam pelaksanaan dalam mendukung urusan pemerintah untuk peningkatan ekonomi di sektor perdagangan. Bidang perdagangan akan selalu menghadapi tantangan peningkatan dalam mendongkrak peningkatan ekonomi dengan melihat potensi daerah Kabupaten Pangandaran. Capaian kinerja urusan perdagangan dalam waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 67 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Nilai ekspor daerah	Rp	59.833.038.627,00	108.822.663,83	169.354.600.717,78	124.522.765.710,00	124.681.954.172,00
Persentase Pertumbuhan ekspor	%	-34,25	81,88	55,62	-26,47	0,13
Persentase peningkatan nilai ekspor perdagangan	%	-34,25	81,88	55,62	-26,47	0,13
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,17	19,52	19,53	19,79	19,53
Nilai PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	RP (Miliar)	2.281,84	2.243,97	2.368,26	2.605,46	2.792,7

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran, 2024

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai ekspor daerah pada tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan inovasi produk unggulan untuk ekspor. Pertumbuhan ekspor di Kabupaten Pangandaran meskipun ada peningkatan di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 namun peningkatannya tidak signifikan. Hal ini dikarenakan tidak ada permintaan ekspor beberapa komiditi.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2023

menurun dibandingkan tahun 2022 dari 19,79% menjadi sebesar 19,53%. Sementara itu nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami kenaikan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan mulai pulihnya ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat juga semakin membaik.

2.1.3.3.5 Perindustrian

Perindustrian merupakan unsur dalam pelaksanaan urusan pemerintah untuk peningkatan ekonomi. Urusan perindustrian selalu mengalami tantangan yang kompleks dalam upaya peningkatan ekonomi. Capaian kinerja urusan perindustrian dalam waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 68 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah industri baru	Industri	19	13	40	419	29.806
Persentase pertumbuhan industri	%	-0,005	0,004	0,011	11,71	745,34
Cakupan bina kelompok pengrajin	%	0,45	0,52	0	6	16,78
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	4,79	4,78	4,88	5,04	4,88
Nilai PDRB Sektor Industri	RP	542.220.000.000	549.520.000.000	592.380.000.000	663.410.000.000	710.430.000.000

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan industri Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 yakni menjadi sebesar 745,34%. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah industri baru yang mengalami kenaikan

pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni menjadi sebanyak 29.806 industri. Hal ini dikarenakan adanya gerakan migrasi perizinan dari SKU ke NIB melalui OSS, pelatihan dan pembinaan yang merata dan berkelanjutan serta adanya kerjasama yang baik dengan Kementrian dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan berbagai pembinaan industri.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami angka yang fluktuatif dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Hal ini dikarenakan pulihnya aktivitas/kegiatan sektor industri. Sedangkan cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan yang signifikan yakni menjadi sebesar 16,78%. Hal ini dikarenakan adanya pembinaan dan pemberdayaan kelompok pengrajin.

2.1.3.3.6 Transmigrasi

Pelaksanaan sektor transmigrasi melibatkan adanya kerja sama antar pemerintah daerah baik itu melibatkan daerah pengirim maupun daerah yang menerima dengan pemerintah pusat yang menjadi fasilitator. Berikut merupakan hasil capaian kinerja urusan transmigrasi Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2. 69 Hasil Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Transmigrasi Swakarsa	KK	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran, 2024

Sejak tahun 2019 hingga 2023, Kabupaten Pangandaran tidak melaksanakan transmigrasi baik dalam bentuk transmigrasi umum maupun swakarsa.

2.1.3.4 Fokus Layanan Pendukung Urusan Pemerintah Daerah

2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Tabel 2. 70 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC (51,60)	CC (52,05)	CC (53,64)	CC (56,48)	BB (73,72)
Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	166,67	166,67	166,67	166,67	84,11
Persentase pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan SPM	%	Baik (81,18)	Baik (84,49)	Baik (84,92)	Baik (84,46)	N/A
Survey Kepuasan Masyarakat	Predikat	B (82,62)	B (83,52)	B (84,92)	B (86,48)	B (88,04)
Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik	%	95	97,3	91,83	93,12	69,66
Nilai AKIP Pemda	Predikat	B (65,90)	B (66,73)	B (66,86)	B (67,72)	B (67,99)

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, 2024

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pangandaran dari tahun 2019 hingga tahun 2023 secara nilai mengalami peningkatan yakni pada tahun 2023 sebesar 73,72. Sedangkan secara predikat juga meningkat yakni memperoleh predikat BB. Hal ini dikarenakan sosialisasi/implementasi terkait penerapan reformasi birokrasi berjalan maksimal sertra adanya pemahaman dan komitmen seluruh perangkat daerah; Tim RB/Pokja RB berjalan secara maksimal dengan adanya kejelasan mengenai peran dan tanggungjawab setiap komponen, aspek dan indikator RB; adanya Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)/jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi; Tim Asessor PMPRB Unit Organisasi/OPD yang telah mendapatkan pelatihan; adanya pembentukan Agen Perubahan (Agent of Change) dan role model; adanya monitoring dan evaluasi dari Tim RB/Pokja RB secara berkala; terdapat penilaian pada Komponen Pengungkit di Area Hasil Antara Area Perubahan yang dilaksanakan seperti: Sistem Merit, Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks

Pengelolaan Aset, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran; dan adanya reward/perhatian khusus berupa perlakuan khusus dari pimpinan terhadap unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi. Hal ini dapat digunakan sebagai motivasi daerah untuk bisa menjadi lebih baik di tahun-tahun berikutnya.

Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2023 yakni sebesar 88,04%. Hal ini dikarenakan adanya komitmen unit pelayan publik dan adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan publik seluruh unit pelayanan perangkat daerah; semua perangkat daerah mendukung diselenggarakannya Survei Kepuasan Masyarakat meskipun dengan keterbatasan anggaran dan SDM; melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik dan menjadikan bagian dari materi pemeriksaan oleh aparatur pengawas internal; meningkatkan standar pelayanan publik pada perangkat daerah sesuai kententuan yang berlaku; memperluas cakupan zona kepatuhan standar pelayanan publik pada perangkat daerah, kecamatan, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2.1.3.5 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.1.3.5.1 Perencanaan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan diperlukan untuk menentukan target keberhasilan, sehingga dari perencanan terdapat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Berikut ini adalah hasil kinerja perencanaan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2019-2023.

Tabel 2. 71 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Nilai SAKIP Unsur Perencanaan	%	22,09	22,24	22,42	20,10	20,09
Persentase Sinergitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan	%	98,17	97,75	67,03	62,95	66,96
Nilai SAKIP Bappeda	%	A (89,86)	A (89,88)	B (65,8)	B (67,72)	BB (70,90)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran, 2024

Nilai SAKIP unsur perencanaan mengalami penurunan hal ini dikarenakan implementasi AKIP belum sepenuhnya menggunakan aplikasi manajemen kinerja sehingga pencapaian kinerja belum bisa dimonitor dan dievaluasi secara realtime. Sementara itu Nilai SAKIP Bappeda mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 dimana pada tahun 2023 menjadi 70,90%. Meskipun demikian peningkatan tersebut belum mencapai predikat tertinggi hal ini dikarenakan adanya perubahan perhitungan komponen yang dinilai menjadi 4 komponen (Evaluasi Kinerja) sesuai Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021. Sedangkan persentase sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian peningkatan tersebut masih relatif kecil hal ini dikarenakan belum optimalnya pengelolaan daerah yang terintegrasi dari proses perencanaannya, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran berbasis teknologi informasi.

2.1.3.5.2 Keuangan

Bidang urusan keuangan merupakan urusan penunjang dalam pelaksanaan pemerintah untuk mendukung perencanaan, pembangunan dan pelayanan pemerintah daerah di bidang keuangan. Berikut ini adalah Realisasi kinerja Bidang Urusan Keuangan Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2. 72 Hasil Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Nilai SAKIP dan Kinerja Keuangan BPKD	Nilai	B (89,78)	B (89,9)	B (66)	B (67,72)	B (69,25)
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WDP	N/A
Persentase Peningkatan Pengelolaan PAD	%	3,23	-8,31	66,35	50,64	N/A

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran, 2024

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 (Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion: menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia). Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) atau Qualified Opinion: menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Opini Tidak Wajar atau Adversed Opinion: menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer Of Opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Dari tabel di atas terlihat bahwa opini BPK terhadap laporan keuangan daerah selama tahun 2019-2021 adalah WTP sedangkan pada tahun 2022 menjadi WDP. Hal ini dikarenakan adanya kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola entitas.

Ditambah dengan adanya beban target yang harus di penuhi menjelang habis masa kepala daerah menjabat.

2.1.3.5.3 Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan

Sumber daya aparatur dalam suatu pemerintahan harus selalu ditingkatkan pengembangan kapasitasnya agar dapat beradaptasi secara cepat dengan perubahan lingkungan di instansi. Kepegawaian, pendidikan serta pelatihan merupakan penunjang urusan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam memberikan pelayanan publik ke depan, sumber daya aparatur akan selalu menghadapi tantangan yang kompleks dalam mendukung kinerja pemerintah Kabupaten Pangandaran. Peningkatan kemampuan melalui kependidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh Badan Kepegawaian untuk meningkatkan kualitas dari ASN. Berikut ini adalah realisasi kinerja kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan Kabupaten Pangandaran:

Tabel 2. 73 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	14,76	0,57	15,57	41	40,25
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah	%	11,82	3,30	1,49	10	14,21
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Orang	25	28	26	32	31
Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Orang	119	119	104	129	115
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Orang	2.710	2.094	2.047	2.066	3.519
Persentase OPD yang Tidak terdapat Hukuman Disiplin	%	80	80	90	97,22	97
Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)	Skor	58,65	38,92	53,04	55,84	55,89

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami angka yang fluktuatif dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan teranggarkannya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. Indeks Profesionalitas ASN dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dimana pada tahun 2023 menyentuh angka 55,89. Meskipun demikian hal ini masih tergolong rendah dikarenakan adanya perubahan anggaran, pengumpulan data kinerja terhambat, mekanisme pengumpulan data ter-update yang diperlukan untuk perhitungan IP ASN kurang mendapat perhatian dari Perangkat Daerah.

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada instansi pemerintah sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan yang fluktuatif dimana pada tahun 2023 yakni sebanyak 31 orang. Demikian juga dengan jumlah Jabatan Administrasi (JA) pada instansi pemerintah pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan adanya anggaran yang memadai serta penyelenggara mendapatkan assessor yang kompeten dan bersertifikat.

2.1.3.5.4 Penelitian dan Pengembangan

Menurut UU No 11 Tahun 2019, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. Sedangkan pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian dan pengembangan merupakan bentuk garda daerah untuk membuat pemerintahan terus maju dan mampu menciptakan inovasi baru. Berikut adalah capaian urusan penelitian dan pengembangan Kabupaten Pangandaran tahun 2019-2023:

Tabel 2. 74 Hasil Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kelitbangan dalam RKPD	Dokumen	8	8	9	6	6

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD	Dokumen	8	8	9	6	6
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	100	75	44,44	66,67	66,67

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase implementasi rencana kelitbangan sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan meskipun belum mencapai 100%. Untuk memaksimalkan capaian tersebut perlu peningkatan dan dukungan berbagai pihak dalam pengumpulan data informasi yang dibutuhkan.

2.1.3.5.5 Pengawasan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan diperlukan agar tidak terdapat pelanggaran disiplin dan penyelewengan kekuasaan. Pengawasan merupakan penunjang urusan dalam pelaksanaan pemerintahan dalam mendukung Sumber Daya Manusia, Pembangunan dan Pelayanan. Pengawasan menjadi salah satu sektor yang penting dan harus dilakukan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas mengawasi yaitu Inspektorat. Realisasi hasil kinerja di bidang pengawasan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 75 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Kapabilitas APIP (1 s/d 5)	Skor	2	2	2	2	3
Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (1 s/d 5)	Skor	3	3	3	3	3

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Unit Kerja yang melaksanakan RB dan Pembangunan ZI Daerah	%	7,4	7,4	22,22	0	N/A

Sumber: Inspektorat Kabupaten Pangandaran, 2024

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator urusan pengawasan bersifat stagnan. Hal ini dikarenakan dalam penilaian penetapan tujuan kualitas sasaran strategis OPD belum berorientasi hasil; atas komponen penetapan tujuan pada program dan kegiatan yang tidak terkait dengan sasaran, maka perlu segera direvisi, agar tidak menimbulkan ketidakefektivan, ketidakefisienan, dan/atau bahkan kerugian keuangan negara/daerah; dalam penilaian struktur dan proses mengindikasikan bahwa secara umum pengendalian intern belum diimplementasikan secara konsisten oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran walaupun sebagian besar pengendalian pada komponen struktur dan proses telah dilaksanakan; manajemen risiko pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran perlu dilakukan secara konsisten baik pada resiko strategis maupun risiko operasional; pimpinan OPD belum sepenuhnya mendorong penerapan manajemen risiko, melalui penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja; pimpinan OPD belum mengunakan kuasa dan wewenangnya untuk mendorong sikap antikorupsi dalam pengambilan keputusan dan kurang aktif dalam kegiatan-kegiatan edukasi anti korupsi.

Untuk indikator persentase unit kerja yang melaksanakan RB dan pembangunan ZI daerah pada tahun 2023 belum diketahui nilainya. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan peraturan terkait pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yaitu Permenpan RB nomor 90 Tahun 2021, dimana terdapat komponen baru reform dan untuk komponen hasil yaitu hasil nilai Survey Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survey Persepsi Anti Korupsinya masih kurang.

Untuk perbaikan selanjutnya perlu dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam upaya meningkatkan pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK dan WBBM sesuai Permenpan RB nomor 90 Tahun 2021.

2.1.3.5.6 Pemerintahan Umum

Wilayah administratif adalah wilayah kerja perangkat pemerintah pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah. Bakesbangpol memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat. Berikut ini akan disajikan data realisasi kinerja untuk Unsur Pemerintahan Umum dari Tahun 2019-2023:

Tabel 2. 76 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase masyarakat yang memahami Kesatuan Bangsa	%	N/A	N/A	75	80	59,7
Persentase Informasi ATHG yang tersampaikan	%	N/A	N/A	81	83,57	72
Persentase masyarakat yang memahami demokrasi	%	N/A	N/A	78	77	50
Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	N/A	N/A	89,86	62,7	67,95

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator Persentase masyarakat yang memahami Kesatuan Bangsa, Persentase informasi ATHG yang tersampaikan dan Persentase masyarakat yang memahami demokrasi pada tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan penunjang ketiga indikator tersebut yang tidak terlaksana. Sementara untuk Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu senilai 67,95 dengan kategori baik.

2.1.3.5.7 Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Urusan Sekretariat DPRD merupakan hal yang penting dalam menunjang segala bentuk aktivitas anggota legislatif dalam

menjaring aspirasi masyarakat di daerah. Sekretariat DPRD merupakan urusan yang berkaitan dengan hal-hal penunjang anggota legislatif dalam menjalankan seluruh aktivitas kinerjanya. Untuk menunjang pembangunan Daerah supaya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat maka legislatif melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Setiap tahunnya sekretaris dewan mampu untuk menerbitkan rencana tahunan tersebut dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Realisasi kinerja yang berkaitan dengan Sekretariat DPRD di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 77 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Pangandaran	Surat Keputusan	188.4/ Kpts. 01/DPRD/2019	188.4/ Kpts. 01/DPRD/2020	188.4/ Kpts. 34/DPRD/2021	188.4/ Kpts.28 /DPRD /2022	188.4/Kpts.25/ DPRD/2023
Persentase Kenaikan Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	%	81,38	83,54	83,35	85,28	86,73

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, 2024

Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa terdapat kenaikan tingkat kepuasan pelayanan sekretariat DPRD menjadi 86,73% di tahun 2023 yang sebelumnya 85,28% di tahun 2022. Hal ini dikarenakan terfasilitasinya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD.

2.1.3.5.8 Penanggulangan Bencana

Bencana tsunami dan gempa bumi merupakan dua bencana yang cukup sering terjadi dan berdampak kepada minat wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pangandaran. Berikut merupakan realisasi kinerja urusan penanggulangan bencana Kabupaten Pangandaran tahun 2019-2023:

Tabel 2. 78 Hasil Capaian Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase desa/kelurahan/kampung rawan bencana yang mendapat/ memperoleh informasi peringatan dini bencana	%	68,8	68,8	68,8	60,5	100
Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	27	29	22	22	24
Persentase Korban Bencana yang mendapatkan penanganan	%	0,09	2,4	N/A	N/A	99
Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan	%	100	100	100	100	100
Persentase jumlah kerusakan akibat bencana yang direhabilitasi	%	100	100	100	100	100
Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	A (85,65)	A (86,01)	B (60,50)	B (60,55)	B (64,65)
Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	145,44	145,44	129,21	137,36	137,85
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Kali	67	12	26	N/A	N/A
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	Kali	89	30	35	N/A	N/A

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, 2024

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase desa/kelurahan/kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 mencapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, dan sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah akan menjelaskan tentang kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi, sumber daya manusia dan daya saing pariwisata.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

Pengeluaran per kapita dapat diartikan sebagai perbandingan total biaya yang telah dikeluarkan untuk konsumsi seluruh anggota rumah tangga dalam kurun waktu satu bulan yang dibagi dengan banyaknya jumlah anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan kemampuan daya beli (BPS, 2020). Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat dapat dihitung dari angka konsumsi rumah tangga per kapita, dengan kata lain yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran ini dibagi berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran, karena semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Oleh karena itu, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2. 79 Hasil Capaian Kinerja Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi per Kapita	Rp	590.032,00	635.968,00	648.636,00	689.789,00	720.756,00
Persentase Konsumsi	%	N/A	56,2	54,98	57,62	N/A
Pengeluaran Non-makanan per Kapita	Rp	477.336,00	495.710,00	531.095,00	507.252,00	572.884,00
APBD	Rp	1.287.690.789.071	1.395.046.653.495	1.473.090.741.881	1.282.067.392.061,00	983.514.549.013,00
SiLPA	Rp	66.887.105.830	79.728.538.874	20.000.000.000	21.000.000.000,00	26.775.224.160,00

Sumber: Diolah Penyusun, 2024

Terlihat pada di atas, capaian fokus kemampuan ekonomi daerah untuk keuangan suatu daerah diperlihatkan dari jumlah APBD suatu daerah, apabila semakin tinggi jumlah APBD maka akan semakin tinggi pula kemampuan keuangan suatu daerah tersebut. Pada tabel di atas terlihat

bahwa APBD Kabupaten Pangandaran mengalami angka yang fluktuatif dimana terjadi penurunan pada tahun 2023. Hal tersebut disebabkan karena jumlah peningkatan pendapatan di suatu daerah maka akan diiringi dengan peningkatan pembiayaan, karena beban belanja suatu daerah tersebut juga ikut bertambah.

SiLPA mempunyai kepanjangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Dalam perumusan APBD yang ideal, angka SiLPA yang muncul seharusnya sama dengan nol, yang berarti bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang ada. Angka SiLPA di Kabupaten Pangandaran dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 26.775.224.160,00.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas di suatu wilayah atau infrastruktur yang dapat menunjang daya saing daerah dan keterkaitan dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain jumlah orang yang dapat diangkut oleh angkutan umum dan jumlah orang melalui terminal, penataan wilayah, fasilitas bank dan nonbank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, restoran/rumah makan, dan ketersediaan penginapan.

Peran fasilitas di suatu wilayah atau infrastruktur yang dapat menunjang daya saing daerah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 80 Hasil Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
Panjang Jalan	Km	504,31	504,31	504,31	504,31	632,54
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah	65.311	48.150	52.341	50.531	47.189
Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Jumlah	24	12	11	1	13
Rasio izin trayek	Jumlah	0,0057	0,0028	0,0004	0,0002	0,0036
Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	50	45	62	1.347	873
Jumlah Angkutan Darat	Jumlah	2.587	2.405	2.570	2.665	2.405

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penumpang angkutan darat	Jumlah	631.396	474.383	482.441	487.356	453.477
Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	Jumlah	129	132	194	2.665	N/A
Jumlah angkutan umum	Jumlah	165	165	195	133	133
Jumlah pemasangan rambu-rambu	Jumlah	782	835	937	1.168	1.168
Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	Jumlah	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Tabel Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah	458.363	473.231	491.411	483.573	N/A
Jumlah orang/barang melalui dermaga	Jumlah	20.515	33.657	33.656	25.122	29.384
Jumlah orang/barang melalui terminal	Jumlah	435.217	473.231	535.112	483.573	467.587
Jumlah orang/barang melalui bandara	Jumlah	2.631	1.576	2.135	2.574	3.042

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran 2024

Tabel di atas memperlihatkan tentang kemampuan Kabupaten Pangandaran yang berkaitan dengan fasilitas wilayah dan infrastruktur. Jika dilihat dari tabel diatas pada tahun 2023 ada peningkatan panjang jalan yang sebelumnya sampai dengan tahun 2022 diangka 504,31 km pada tahun 2023 bertambah menjadi 632,54 km. Sementara itu untuk jumlah orang/barang melalui terminal yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, terjadi peningkatan tertinggi di tahun 2020 menuju 2021 yaitu peningkatannya sebesar 61.881 orang. Peningkatan serupa juga terjadi pada jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, peningkatan terbesar terdapat pada tahun 2020 menuju 2022 yaitu sebesar 18.180. Berdasarkan data-data tersebut kondisi jalanan di Kabupaten Pangandaran mulai mengalami kepadatan, karena peningkatan jumlah penumpang angkutan darat tidak diselaraskan dengan pengembangan infrastruktur jalan yang memadai.

2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal untuk jangka panjang. Penanaman modal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan dapat menciptakan lapangan kerja yang baru, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat mengurangi angka

kemiskinan. Oleh karena itu investasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan di suatu daerah.

Iklim investasi yang baik juga dapat berpengaruh terhadap daya saing suatu daerah, semakin baik iklim investasi maka akan membuat daya saing daerah juga meningkat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat investasi di suatu daerah antara lain adalah angka kriminalitas, jumlah aksi demo yang terjadi, waktu yang dibutuhkan untuk proses perijinan, jumlah dan jenis pajak retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa yang berstatus swasembada terhadap total desa. Beberapa peran iklim investasi terhadap daya saing daerah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 81 Hasil Capaian Kinerja Urusan Iklim Investasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Investor PMDN	Jumlah	131	2.124	1.050	6.120	67.564
PMA	Rp	0	0	0	31.010.000.000	37.570.000.000
PMDN	Rp	471.716.357.987	349.898.121.679	219.437.739.336	1.750.354.863.491	1.501.638.559.642
Jumlah investasi (PMA/PMDN)	Rp	471,8 M	349,9 M	795,7 M	1.781,4 M	1.539,2 M

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah investasi PMDN mempunyai jumlah yang fluktuatif setiap tahunnya, hal tersebut juga terdapat pada jumlah investor PMDN yang ada di Kabupaten Pangandaran. Pada tahun 2023 jumlah investor PMDN meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi jumlah investasi PMDN pada tahun 2023 tidak lebih tinggi daripada tahun 2022, hal tersebut perlu ditelusuri apakah jumlah investasi dipengaruhi oleh banyaknya jumlah investor yang ada di Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran harus lebih memperhatikan dan menerapkan cara-cara untuk mengoptimalkan capaian iklim investasi yang ada di daerahnya.

Jumlah investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dikarenakan adanya kemudahan perizinan melalu sistem OSS sehingga para investor dapat

dengan mudah menanamkan modalnya untuk melakukan usaha di Kabuapten Pangandaran.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah daerah, karena sumber daya manusia yang baik dapat memberikan sumbangan pikiran dan upaya untuk mencapai tujuan di suatu daerah. Fokus sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari rasio ketergantungan yang terdapat pada tabel 2.82 berikut ini:

Tabel 2. 82 Rasio Kelulusan S1/S2/S3 Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
Lulusan S1	Jumlah	582	9.547	10.136	10.838	11.517
Lulusan S2	Jumlah	61	595	631	666	697
Lulusan S3	Jumlah	0	31	30	31	38

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, 2024

Terlihat pada tabel di atas jumlah lulusan dengan tingkat pendidikan sarjana (S1) menjadi dominasi di Kabupaten Pangandaran. Lulusan magister tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan. Sedangkan untuk lulusan doktoral di Kabupaten Pangandaran masih sedikit jika dibandingkan dengan lulusan S1 dan S2, ke depannya Kabupaten Pangandaran dapat mendorong masyarakatnya agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan cara memberikan beasiswa daerah untuk putra putri daerah yang berprestasi.

2.1.4.5 Fokus Daya Saing Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang dapat diandalkan dalam pengembangan perekonomian di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam pengembangan pariwisata, dilihat dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pada pasal 2 dinyatakan penyelenggaraan kepariwisataan berasaskan manfaat, keseimbangan, kemandirian, partisipatif, kelestarian, dan berkelanjutan. Berdasarkan manfaat-manfaat tersebut maka pengembangan pariwisata yang baik di Kabupaten Pangandaran turut serta dalam meningkatkan daya saing daerah juga. Hal

tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 83 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kunjungan Wisatawan se–Kabupaten (yang dikelola pemda)	Orang	3.775.273	2.261.981	3.127.174	4.113.221	3.548.354
PAD sektor pariwisata	Jumlah	18.472.858.000	13.786.568.250	15.126.468.000	29.383.788.500	28.936.290.000
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	4	N/A	40	14	10
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya Budaya	2	N/A	3	11	4
Jumlah Cagar budaya yang Dikelola Secara Terpadu (yang diduga)	Cagar Budaya	30	30	30	26	40

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2024

Berdasarkan tabel di atas, PAD pada sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran mengalami penurunan mulai tahun 2019 sampai tahun 2020, hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda. Tidak hanya PAD sektor pariwisata yang menurun, jumlah kunjungan wisatawan juga mengalami penurunan, bahkan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta jumlah jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi turut absen di tahun 2020. Tetapi semua indikator mulai mengalami kenaikan pada tahun 2021. Pada tahun 2023, terjadi penurunan pada indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya. Sementara itu adanya pendataan ulang mengenai objek yang diduga cagar budaya membuat indikator tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2023 diangka 40.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Capaian Kinerja Makro, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2023 dilakukan terhadap capaian indikator makro pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penduduk Miskin. Selanjutnya capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Pangandaran disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 84
Capaian Indikator Makro Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1.	**Pertumbuhan Ekonomi**			
	a. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,21-5,50	5,26
	b. PDRB per Kapita (ADHK)	Rp	19.488.412,97	18.761.734
	c. PDRB per Kapita (ADHB)	Rp	30.444.747,68	28.366.213
2.	**Tingkat Pengangguran Terbuka**			
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,90-4,25	1,52
	b. Jumlah Penganggur	Orang	8.315	4.164
3.	**Kemiskinan**			
	a. Persentase Penduduk Miskin	Persen	6,40-7,00	8,98
	b. Jumlah Penduduk Miskin	Orang	30.954	36.70
4.	**Indeks Pembangunan Manusia**			
	a. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,12-69,59	70,57
	b. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,24	74,88
	c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,77	8,04
	d. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,1	12,3
	e. Pengeluaran per Kapita	Rp	9.191.402	9.406.000
5.	**Ketimpangan**			
	a. Rasio Gini	Poin	0,330-0,326	0,294

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2023, 2024

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. Penetapan kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 85
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2023

No	Indikator	Kondisi Awal	2021		2022		2023		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks Profesionalitas ASN	38,92	39,5	53,05	42,42	55,84	45,92	55,89	122%
2	Indeks Risiko Bencana	145,45	144	129,21	143	129,21	141	147,85	95%
3	Indeks Kapasitas Daerah	145,45	144	117,89	143,4	137,36	142	137,85	97%
4	Indeks Pembangunan Manusia	68,06	68,07-68,49	68,28	68,50-69,12	69,03	69,12-69,59	70,57	103%
5	Indeks Pembangunan Gender	89,78	89,72-89,90	89,92	89,91-89,98	90,2	89,99-90,05	90,83	101%
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,05	3,30-4,50	3,67	4,60-5,20	5,03	5,21-5,50	5,26	101%
7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81,51	70	58,048	71		72		0%
8	Indeks Kesehatan	79,08	79,09-79,60	79,38	79,61-80,10	79,83	80,11-80,50	84,43	105%
9	Indeks Desa Membangun	0,7374	0,7251	0,73	0,7689	0,7595	0,7691	0,8413	109%
10	Persentase PPKS yang Mandiri	27	30	39,52	37	40,63	47	112,14	239%
11	Persentase Penduduk Miskin	8,99	8,40-8,70	9,65	7,00-7,55	9,32	6,40-7,00	8,98	78%
12	Indeks Pendidikan	59,33	59,34-59,50	59,72	59,51-59,90	59,72	59,61-60,20	60,97	102%
13	Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapatkan penghargaan	N/A	100	42	100	47	100	50	50%
14	Indeks Konektivitas Wilayah	1,635	1,654	1,635	1,731	1,731	1,788	1,72	96%
15	Indeks SPBE	3,02	2,38	2,38	3,04	2,82	3,05	3,53	116%
16	Rasio Kewirausahaan	2,54	3,62	21,74	3,75	22,69	3,95	24,39	617%
17	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,08	5,07 - 5,01	3,25	5,00-4,5	1,88	4,90-4,25	1,52	322%
18	Persentase pemenuhan indikator GSTC di destinasi pariwisata	N/A	10	0	20	25	30	62	207%

No	Indikator	Kondisi Awal	2021		2022		2023		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
19	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	N/A	600.000	2.215.287	630.000	646.250	660.000	1.998.592	303%
20	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16,37	17,85	18,54	18,56	18,02	19,16	19,62	102%
21	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,55	0,57-0,54	1,24	0,58-0,55	1,17	0,59-0,56	0,67	114%
22	Indeks Pemberdayaan Gender	74,57	74,57	75,98	74,57	76,09	74,58	76,53	103%
23	Indeks Ketahanan Pangan	81,99	82	80,64	82,5	81,12	83	83,57	101%
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,22	65,32	68,84	65,54	69,05	65,76	64,44	98%
25	Persentase Realisasi Nilai Investasi	6,57	6,35	127	6,89	124	7,24	-13,59	-188%
26	Persentase Rumah Layak Huni	73	73	86,54	74	87,12	74	88,26	119%
27	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	77,16	77,63	77,63	78,11	85,5	78,58		0%
28	Persentase cakupan layanan infrastruktur	37,64%	38,95%	38,73%	41,73%	34,75%	44,94%	54,98%	122%
29	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	4,597	4,825	5,513	4,667	5,887	4,923	7,13505	145%
30	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	3	100%
31	Indeks Kesalehan Sosial	N/A	59	59	60		61	81,94	134%
32	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	N/A	77,5	78	80	80,19	82,5	59,7	72%
33	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	N/A	0,225	0,6481	0,2344	0,554	0,2344	0,4975	212%
34	Indeks Reformasi Birokrasi	B	54-58	53,64	59-63	56,48	64-68	73,72	115%
35	Nilai SAKIP	B	66,90-67,15	66,86	67,25-69,00	67,72	69,25-72,00	67,99	98%
36	Indeks Pelayanan Publik	N/A	2,50-2,60	3,14	2,61-2,65	3,42	2,66-2,75	4,07	153%

Evaluasi terhadap realisasi RPJMD sampai tahun 2023 diantaranya dilakukan melalui pengukuran kinerja tujuan terhadap 6 (enam) tujuan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dengan menggunakan sebanyak 13 indikator tujuan pembangunan. Sementara untuk pengukuran kinerja sasaran dilakukan terhadap 15 sasaran strategis dengan menggunakan 23 indikator. Adapun ringkasan pengukuran pencapaian kinerja indikator tujuan dan ringkasan pengukuran pencapaian kinerja indikator sasaran strategis untuk setiap misi RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 86 Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2023

Visi, Misi Tujuan, Sasaran		Indikator	Satuan	2023			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1		2	3	4	5	6	7
VISI: Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa							
Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama							
Tujuan 1.1	Menguatkan Nilai-Nilai Karakter Bangsa Berbasis Nilai Luhur dan Budaya Lokal.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	61,00	81,94	134,33	Sangat Tinggi
Sasaran 1.1.1	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	Angka	0,2344	0,4975	212,24	Sangat Tinggi
		Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	Persentase	82,50	59,70	72,36	Sedang
Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7691	0,8413	109,39	Sangat Tinggi
Misi 2: Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan							
Tujuan 2.1	Terwujudnya Pengelolaan Pariwisata yang Efektif dan	Persentase pemenuhan	Persentase	30,00	62,00	206,67	Sangat Tinggi

Visi, Misi Tujuan, Sasaran		Indikator	Satuan	2023			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1		2	3	4	5	6	7
	Efisien yang Menjunjung Nilai-Nilai Kearifan Lokal	indikator GSTC di destinasi pariwisata					
Sasaran 2.1.1	Peningkatan Akses Dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	660000	1.998.592,23	302,82	Sangat Tinggi
Misi 3: Mengembangkan Aksesbilitas Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi, dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan							
Tujuan 3.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,12-69,59	70,57	102,10	Sangat Tinggi
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89,99-90,05	90,83	100,93	Sangat Tinggi
Sasaran 3.1.1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kependidikan dan Kesehatan Secara Komprehensif	Indeks Kesehatan	Indeks	80,11-80,50	84,43	105,39	Sangat Tinggi
		Indeks Pendidikan	Indeks	59,61-60,20	60,97	102,28	Sangat Tinggi
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	19,16	19,62	102,40	Sangat Tinggi
Sasaran 3.1.2	Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapatkan penghargaan	Jumlah	100,00	60,00	60,00	Rendah
Sasaran 3.1.3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	0,59-0,56	0,67	113,56	Sangat Tinggi
Sasaran 3.1.4	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	74,58	76,53	102,61	Sangat Tinggi
Misi 4: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal							

Visi, Misi Tujuan, Sasaran		Indikator	Satuan	2023			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1		2	3	4	5	6	7
Tujuan 4.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,21-5,50	5,26	100,96	Sangat Tinggi
		Persentase Penduduk Miskin	Persentase	6,40-7,00	8,98	77,95	Tinggi
Sasaran 4.1.1	Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	Rupiah	4,9230	7,1351	144,93	Sangat Tinggi
		Persentase Realisasi Nilai Investasi	Persentase	7,24	-13,59	-187,71	Sangat Rendah
		Rasio Kewirausahaan	Rasio	3,95	24,39	617,47	Sangat Tinggi
		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83,00	83,57	100,69	Sangat Tinggi
Sasaran 4.1.2	Meningkatnya Permukiman Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	Persentase	74,00	88,26	119,27	Sangat Tinggi
Sasaran 4.1.3	Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	4,90-4,25	1,52	322,37	Sangat Tinggi
Sasaran 4.1.4	Meningkatnya Cakupan Penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	Persentase	47,00	112,14	238,60	Sangat Tinggi
Misi 5: Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel							
Tujuan 5.1	Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64-68	73,72 (BB)	115,19	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP	Nilai	69,25-72,00	B (67,99)	97,13	Sangat Tinggi
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	3,00	3,00	100,00	Sangat Tinggi

Visi, Misi Tujuan, Sasaran		Indikator	Satuan	2023			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1		2	3	4	5	6	7
		Indeks SPBE	Indeks	3,05	3,53	115,74	Sangat Tinggi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	72,00	Nilai belum rilis dari Kemendagri	-	-
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	45,92	55,89	121,71	Sangat Tinggi
Sasaran 5.1.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Cepat Dan Responsif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,66-2,75	4,07	153,01	Sangat Tinggi
Misi 6: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi, Dan Berkelanjutan							
Tujuan 6.1	Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	78,58	85,68	109,04	Sangat Tinggi
Sasaran 6.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	1,79	1,72	96,25	Sangat Tinggi
		Persentase cakupan layanan infrastruktur	Persentase	44,94	54,98	122,34	Sangat Tinggi
Sasaran 6.1.2	Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	141,00	147,85	95,37	Sangat Tinggi
		Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	142,00	137,85	97,08	Sangat Tinggi
Sasaran 6.1.3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,76	64,44	97,99	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Triwulan IV, Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas Tingkat pencapaian terhadap 13 (tiga belas) indikator tujuan yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2023, menunjukkan sebanyak 11 (sebelas) indikator atau 84,61% telah mencapai target, yaitu, Indeks Kesalehan Sosial, Persentase pemenuhan indikator GSTC di destinasi pariwisata, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Tingkat Maturitas SPIP, Indeks SPBE, Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur. Sementara itu indikator Persentase Penduduk Miskin belum mencapai target meskipun capaiannya sudah termasuk kategori tinggi yaitu 77,95% dan untuk indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah belum keluar penilaian dari Kemendagri.

Tingkat pencapaian terhadap 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2023, menunjukkan sebanyak 17 (tujuh belas) indikator atau 73,91% telah mencapai target, yaitu, Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani, Indeks Desa Membangun, Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan, Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk, Indeks Pemberdayaan Gender, PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun), Rasio Kewirausahaan, Indeks Ketahanan Pangan, Persentase Rumah Layak Huni, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase PPKS yang Mandiri, Indeks Pelayanan Publik, Persentase cakupan layanan infrastruktur, Indeks Risiko Bencana. Sementara itu sebanyak 6 (enam) indikator atau 26,08% belum mencapai target meskipun untuk beberapa indikator capainnya sudah termasuk kategori sangat tinggi, yaitu, Indeks Konektivitas Wilayah, Indeks Kapasitas Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa dan Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapatkan penghargaan ada dikategori sedang dan rendah. Indikator Persentase Realisasi Nilai Investasi tingkat capaiannya masih sangat rendah.

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai dengan Tahun 2023

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, dilakukan telaahan terhadap hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2023 serta realisasi RPJMD. Keseluruhan rencana program dan kegiatan yang

dilaksanakan pada tahun 2023 diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Dari evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, menunjukkan gambaran sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Realisasi anggaran RPJMD Kabupaten Pangandaran s/d Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 87 Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 Sampai Triwulan IV Tahun 2023

No.	Nama Urusan	Target RPJMD pada Tahun 2023	Realisasi RPJMD (%)*	Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**1.171.004.821.175**	**77,74**	**910.345.422.492**
1	101 PENDIDIKAN	424.766.538.000	81,96	348.156.485.937
2	102 KESEHATAN	510.411.106.583	54,93	280.366.456.890
3	103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	194.640.119.120	128,63	250.355.948.806
4	104 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.658.753.698	2,13	291.279.900
5	105 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17.267.347.568	137,77	23.788.763.299
6	106 SOSIAL	10.260.956.207	71,99	7.386.487.660
	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**127.493.206.769**	**52,52**	**66.954.180.667**
1	207 TENAGA KERJA	5.202.945.049	59,65	3.103.487.667
2	208 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	772.299.730	430,56	3.325.193.550
3	209 PANGAN	14.538.279.752	25,07	3.645.031.329
4	210 PERTANAHAN	249.470.000	30,39	75.813.000
5	211 LINGKUNGAN HIDUP	12.435.963.860	65,08	8.093.595.079
6	212 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.350.854.924	30,00	2.505.223.342
7	213 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.093.523.730	37,24	3.386.837.099

No.	Nama Urusan	Target RPJMD pada Tahun 2023	Realisasi RPJMD (%)*	Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	214 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.374.165.356	73,18	6.128.442.348
9	215 PERHUBUNGAN	18.215.124.208	75,85	13.816.716.327
10	216 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.950.100.000	33,51	2.663.830.768
11	217 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.725.659.771	17,30	471.544.990
12	218 PENANAMAN MODAL	3.273.376.986	141,83	4.642.666.163
13	219 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	26.370.250.000	43,26	11.408.695.682
14	220 STATISTIK	470.000.000	2,68	12.588.506
15	221 PERSANDIAN	205.000.000	5,12	10.500.000
16	222 KEBUDAYAAN	3.136.050.000	19,91	624.313.183
17	223 PERPUSTAKAAN	5.831.200.102	51,58	3.007.987.130
18	224 KEARSIPAN	298.943.301	10,61	31.714.504
	3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**93.239.314.502**	**33,64**	**31.366.335.930**
1	325 KELAUTAN DAN PERIKANAN	30.974.557.906	12,72	3.941.316.052
2	326 PARIWISATA	37.218.302.905	28,92	10.762.094.190
3	327 PERTANIAN	17.458.209.747	77,40	13.512.519.139
4	330 PERDAGANGAN	6.765.688.452	37,57	2.542.169.005
5	331 PERINDUSTRIAN	679.580.928	89,50	608.237.544
6	332 TRANSMIGRASI	142.974.564	0,00	0
	4. PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**98.831.650.473**	**82,86**	**81.889.754.671**
1	401 SEKRETARIAT DAERAH	54.309.741.640	86,44	46.944.607.020
2	402 SEKRETARIAT DPRD	44.521.908.833	78,49	34.945.147.651
	5. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**397.874.792.333**	**29,01**	**115.442.526.620**
1	501 PERENCANAAN	19.117.440.284	45,86	8.767.628.544
2	502 KEUANGAN	364.132.222.000	27,48	100.068.206.764
3	503 KEPEGAWAIAN	9.243.087.124	63,62	5.880.708.067
4	504 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.517.624.000	13,31	601.378.900
5	505 PENELITAN DAN PENGEMBANGAN	864.418.925	14,41	124.604.345
	6. PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**15.627.415.918**	**40,71**	**6.361.174.108**
1	601 INSPEKTORAT DAERAH	15.627.415.918	40,71	6.361.174.108

No.	Nama Urusan	Target RPJMD pada Tahun 2023	Realisasi RPJMD (%)*	Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	7. KEWILAYAHAN	**24.511.858.936**	**45,47**	**11.146.647.520**
1	701 KECAMATAN	24.511.858.936	45,47	11.146.647.520
	8. PEMERINTAHAN UMUM	**15.684.499.708**	**44,43**	**6.968.362.951**
1	801 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15.684.499.708	44,43	6.968.362.951
TOTAL		**1.944.267.559.815**	**63,29**	**1.230.474.404.959**

Sumber : Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Triwulan IV

Realisasi anggaran RPJMD tahun 2023 mencapai 63,29 % dibandingkan dengan pagu indikatif program RPJMD. Hal ini sangat dipengaruhi oleh validnya pagu indikatif program yang dimuat dalam RKPD. Realisasi juga dipengaruhi oleh konsistennya kegiatan dalam RKPD dianggarkan dalam APBD.

Tabel 2. 88 Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 Sampai Triwulan IV Tahun 2023

No.	Nama Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RPJMD S/D Tahun 2023	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	
	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**63,79**	**54,30**
1	101 PENDIDIKAN	66,55	64,40
2	102 KESEHATAN	99,44	36,49
3	103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	75,50	106,69
4	104 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,74	1,29
5	105 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	56,00	77,91
6	106 SOSIAL	83,51	39,04
	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**57,50**	**44,04**
1	207 TENAGA KERJA	58,39	42,95
2	208 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	52,40	59,42

No.	Nama Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RPJMD S/D Tahun 2023	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	
3	209 PANGAN	82,85	52,70
4	210 PERTANAHAN	12,20	76,19
5	211 LINGKUNGAN HIDUP	47,53	79,60
6	212 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	101,23	40,54
7	213 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52,68	17,36
8	214 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	88,82	139,55
9	215 PERHUBUNGAN	64,47	46,52
10	216 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	88,30	35,28
11	217 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	36,95	22,05
12	218 PENANAMAN MODAL	45,16	77,13
13	219 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	58,33	26,55
14	220 STATISTIK	20,00	1,13
15	221 PERSANDIAN	56,25	4,54
16	222 KEBUDAYAAN	69,51	22,68
17	223 PERPUSTAKAAN	76,30	36,38
18	224 KEARSIPAN	23,71	12,07
	3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**86,62**	**43,53**
1	325 KELAUTAN DAN PERIKANAN	101,11	13,02
2	326 PARIWISATA	68,33	42,53
3	327 PERTANIAN	241,39	77,32
4	330 PERDAGANGAN	60,87	58,22
5	331 PERINDUSTRIAN	48,00	67,92
6	332 TRANSMIGRASI	0,00	2,19
	4. PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**44,89**	**63,49**
1	401 SEKRETARIAT DAERAH	43,70	75,54
2	402 SEKRETARIAT DPRD	46,07	51,43
	5. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**97,83**	**42,35**
1	501 PERENCANAAN	98,14	45,65
2	502 KEUANGAN	96,00	19,86
3	503 KEPEGAWAIAN	100,00	78,60
4	504 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	107,53	47,02
5	505 PENELITAN DAN PENGEMBANGAN	87,50	20,64
	6. PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**129,13**	**46,12**
1	601 INSPEKTORAT DAERAH	129,13	46,12
	7. KEWILAYAHAN	**29,00**	**40,88**

No.	Nama Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RPJMD S/D Tahun 2023	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	
1	701 KECAMATAN	29,00	40,88
	8. PEMERINTAHAN UMUM	**73,39**	**48,12**
1	801 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	73,39	48,12
TOTAL		**72,77**	**47,85**

Sumber : Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Triwulan IV

Tingkat capaian program RKPD Tahun 2023 menunjukan secara rata-rata adalah 72,77 % untuk target kinerja, dan 47,85 % untuk target anggaran. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Tabel 2. 89 Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Sampai Triwulan IV Tahun 2023

No.	Nama Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	
	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**77,00**	**62,80**
1	101 PENDIDIKAN	100,00	68,44
2	102 KESEHATAN	98,89	79,26
3	103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	68,09	59,45
4	104 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20,00	38,84
5	105 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	80,00	78,00
6	106 SOSIAL	95,00	52,83
	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**86,31**	**65,27**
1	207 TENAGA KERJA	95,65	79,95
2	208 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	95,83	67,49
3	209 PANGAN	71,35	66,21
4	210 PERTANAHAN	20,83	16,75

No.	Nama Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	
5	211 LINGKUNGAN HIDUP	77,73	61,65
6	212 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100,00	50,58
7	213 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100,00	65,76
8	214 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	79,17	97,56
9	215 PERHUBUNGAN	95,67	72,31
10	216 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	98,96	70,46
11	217 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	144,98	90,41
12	218 PENANAMAN MODAL	75,00	47,79
13	219 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	75,00	56,70
14	220 STATISTIK	100,00	78,75
15	221 PERSANDIAN	80,00	62,50
16	222 KEBUDAYAAN	100,00	45,62
17	223 PERPUSTAKAAN	95,96	77,66
18	224 KEARSIPAN	47,43	66,67
	3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**58,61**	**59,56**
1	325 KELAUTAN DAN PERIKANAN	131,67	47,02
2	326 PARIWISATA	101,52	63,41
3	327 PERTANIAN	-33,43	76,68
4	330 PERDAGANGAN	91,91	71,50
5	331 PERINDUSTRIAN	60,00	98,74
6	332 TRANSMIGRASI	0,00	0,00
	4. PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**77,70**	**76,98**
1	401 SEKRETARIAT DAERAH	71,76	70,42
2	402 SEKRETARIAT DPRD	83,63	83,54
	5. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**99,91**	**62,99**
1	501 PERENCANAAN	101,55	68,66
2	502 KEUANGAN	98,00	66,00
3	503 KEPEGAWAIAN	100,00	69,49
4	504 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	100,00	96,82
5	505 PENELITAN DAN PENGEMBANGAN	100,00	13,96
	6. PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**96,03**	**51,03**
1	601 INSPEKTORAT DAERAH	96,03	51,03
	7. KEWILAYAHAN	**74,00**	**72,00**
1	701 KECAMATAN	74,00	72,00
	8. PEMERINTAHAN UMUM	**73,39**	**73,26**

No.	Nama Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	
1	801 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	73,39	73,26
TOTAL		**80,37**	**65,49**

Sumber : Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Triwulan IV

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023, kendala umum yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Masih belum lengkapnya informasi dalam evaluasi hasil Renja SKPD, terutama yang belum memuat faktor pendorong, faktor penghambat dan rencana tindak lanjut pelaksanaan program/kegiatan ataupun realisasi target kinerja;
2. Evaluasi hasil Renja SKPD yang terlambat dilaporkan ke Bappeda sehingga memperlambat pelaporan kepada Provinsi.

Beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023, antara lain :

1. Perencanaan anggaran dan target kinerja dalam RKPD belum sepenuhnya dapat didanai dalam APBD;
2. Program RKPD yang dijalankan hanya sebagian yang dijalankan dalam APBD/masih terdapat program RKPD yang tidak terakomodir dalam APBD;
3. Keterlambatan penyampaian laporan triwulan capaian kinerja dari SKPD.

Dari evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 tersebut, tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan RKPD pada tahun berikutnya diantaranya :

1. Perlu dilakukannya penyesuaian/reviu rencana anggaran dan target kinerja dalam RKPD dan Renja SKPD yang disesuaikan dengan kondisi riil APBD;
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana secara berjenjang;
3. Verifikasi dokumen rencana untuk mewujudkan keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD) yang kemudian menjadi pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan dalam APBD;

4. Mengimplementasikan dokumen perencanaan daerah dalam kegiatan APBD, agar dapat mengevaluasi secara objektif dan mengendalikan dokumen perencanaan sehingga target kinerja bisa dicapai dengan baik.

2.2.3 Evaluasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program (Outcome)

Evaluasi yang dilakukan terhadap hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah salah satunya dengan melihat indikator kinerja program (outcome). Evaluasi dilakukan agar dapat terlihat ketercapaian program dengan target perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan sudah sesuai atau belum. Dalam hal ini, perangkat daerah telah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja perangkat daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati melalui Bappeda. Tabel berikut menyajikan realisasi indikator kinerja program (outcome) tahun 2019-2023.

Tabel 2. 90 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
2.2	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
2.2.1.1	Pertumbuhan PDRB	3,2	-0,05	3,67	5,03	5,26	>	Kontribusi sektor pada PDRB belum mempengaruhi secara signifikan terhadap perekenomian
2.2.1.2	Indeks Gini	0,310	0,335	0,320	0,294	0,323	>	Semakin pulihnya sektor pariwisata serta tumbuhnya ekonomi kreatif dipangandaran
2.2.1.3	Penduduk Miskin (P0)	7,17	8,99	9,65	9,32	8,98	<	Rendahnya pendapatan masyarakat
2.2.1.4	Laju Inflasi	1,72	1,61	1,17	6,65	2,84	=	Kenaikan harga pada beberapa bahan pangan masih terjadi meskipun angka inflasi rendah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
2.2.1.5	Indeks Pembangunan Manusia	68,21	68,06	68,28	69,03	70,57	>	1. Indeks Pendidikan dan indeks kesehatan semakin meningkat setiap tahunnya. 2. Digitalisasi dan optimalisasi teknologi dalam bidang pendidikan, berupa pendidikan karakter (keagamaan dan budaya (PAHE)). 3. Pembangunan RSUD Pandega dan renovasi puskesmas meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih baik.
2.2.2.1	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,06	12,07	12,08	12,11	12,30	<	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan 2. Tingginya angka kemiskinan 3. Minimnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan
2.2.2.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,08	76,79	74,75	79,92	80,15	>	Rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap TPAK
2.2.2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,48	5,08	3,25	1,56	1,52	>	Banyaknya perusahaan yang menyediakan lowongan pekerjaan dan pencaker

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
								mempunyai kompetensi yang sesuai
2.2.3.1	Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	4	N/A	40	14	10	<	1. belum menjadi prioritas pembangunan daerah 2. Sumber daya yang terbatas
2.2.3.1	Jumlah Klub Olahraga	127	146	146	146	146		Masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya berolahraga
2.3	PELAYANAN UMUM							
2.3.1	Pelayanan Umum Wajib Dasar							
2.3.1.1	Pendidikan							
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	97,03	96	103,54	101,7	99,72	>	Memaksimalkan sinergitas berbagai pihak baik pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam mensosialisasikan pentingnya melanjutkan pendidikan
	Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	99,29	98	94,59	104	102,82	>	Memaksimalkan sinergitas berbagai pihak baik pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam mensosialisasikan pentingnya melanjutkan pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	85,83	83,94	84,79	84,31	76,54		
	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	6,73	N/A	11,05	15,30	N/A		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	95,19	95,76	95,84	99,99	97,87	<	1. Akses ke sekolah masih ada sebagian anak yang cukup kesulitan 2. Pelayanan pendidikan sekolah dasar belum optimal
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	84,72	84,62	84,97	84,63	88,6	>	Memaksimalkan sinergitas berbagai pihak baik pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam mensosialisasikan pentingnya melanjutkan pendidikan
	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	67,92	67,48	67,27	66,78	59,26		
	Angka Partisipasi Murni Perguruan Tinggi	4,84	N/A	7,93	12,54	N/A		
	Jumlah Guru Berijazah S1/DIV	4527	4349	4349	4171	4188		Sebaran sekolah dan bangunan sekolah belum merata
2.3.1.2	Kesehatan							
	Prevalensi Balita Stunting	3,3	3,94	3,94	2,21	1,93	>	Memaksimalkan sinergitas berbagai pihak baik pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam perencanaan,pelaksanaan serta evaluasi kegiatan
	Angka Harapan Hidup	71,12	74,12	74,32	74,60	74,88	>	Dukungan Pemerintah Daerah terhadap peningkatan sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan
	Jumlah Perawat	355	446	446	569	530		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
	Jumlah Bidan	373	377	377	456	437		
	Jumlah Farmasi	48	136	136	108	114		
	Jumlah Ahli Gizi	20	20	20	46	31		
	Jumlah Dokter Spesialis	0	12	16	20	23		
	Jumlah Dokter Gigi	9	12	12	20	23		
	Jumlah Dokter Umum	43	56	56	63	59		
	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	100	100	100	100	100	=	Dukungan Pemerintah Daerah terhadap peningkatan sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan
2.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Panjang Jalan Kondisi Baik	401,2	429,13	445,18	470,44	508,23		Pembangunan dan rekonstruksi jalan untuk akses jalan yang baik menjadi salah satu fokus utama pembangunan, disertai ketersediaan anggaran, serta spesifikasi bahan pembangunan dan rekonstruksi jalan agar jalan bertahan lama untuk digunakan.
	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	63,58	67,57	69,50	72	72,13	>	Bidang infrastruktur (termasuk di dalamnya untuk jaringan irigasi) merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Pangandaran

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
								selain bidang pendidikan, kesehatan dan pariwisata
	Luas Areal Irigasi (Ha)	16.78 5,38	16.78 5,38	16.78 5,38	17.88 9,20	17.88 9,20		Menjadi salah satu program unggulan untuk meningkatkan produksi bidang pertanian melalui program rehabilitasi jaringan irigasi guna menambah target suplai air ke petak sawah.
	Persentase penduduk berakses air minum (%)	65	65,9	61,86	60,32	86,47	>	Memaksimalkan sinergitas berbagai pihak baik pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam perencanaan,pelaksanaan serta evaluasi kegiatan
	Jumlah jembatan yang terbangun (unit)	4	6	1	5	1		
	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	83	85,09	88,28	93,28	80,35	<	1. Memaksimalkan sinergitas berbagai pihak baik pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam perencanaan,pelaksanaan serta evaluasi kegiatan 2. Tersedianya peraturan mengenai penyelenggaraan jalan
2.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	5,71	17,14	17,14	17,14	17,14	<	Peningkatan kinerja disertai dengan peningkatan kebutuhan sarana dan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
								prasarana untuk kelancaran kegiatan dan tingkat keberhasilan mencapai sasaran dan tujuan yang lebih baik
2.3.1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
	Kejadian Kebakaran Kabupaten Pangandaran	53	79	35	37	90		Optimalisasi pelayanan pemadam kebakaran
	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	10	37	28	24	82	<	Optimalisasi pelayanan aduan pelanggaran K3
2.3.1.6	Sosial							
	Jumlah PPKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	50.817	116.458	52.224	53.268	45.167		Kekompakan SDM, Kerjasama antar Stakeholder, Dukungan Anggaran Memaksimalkan sinergitas berbagai pihak baik pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam perencanaan,pelaksanaan serta evaluasi kegiatan
	Jumlah PPKS yang tertangani	45.944	116.458	50.210	39.134	40.729		Kekompakan SDM, Kerjasama antar Stakeholder, Dukungan Anggaran Memaksimalkan sinergitas berbagai pihak baik pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
								perencanaan,pelaksanaan serta evaluasi kegiatan
	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	90,41	100	91	73	90	<	1. Masih terdapat data tidak valid 2. Terdapat penerima yang sudah meninggal dunia, pindah domisili datanya tidak terupdate
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	5,81	6,71	6	6,27	7,1	<	Masih terdapat data tidak valid
	Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina	N/A	1.427	1.531	2.006	1.986	<	Masih terdapat data tidak valid
2.3.2	Layanan Urusan Wajib Non-Dasar							
2.3.2.1	Tenaga Kerja							
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	N/A	N/A	58,96	76,43	9,25	<	Masih terbatasanya lapangan pekerjaan di Kabupaten Pangandaran
2.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,02	89,78	89,92	90,2	90,83	>	1. Memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif; 2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
								publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya; dan 3. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat;
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,56	74,57	75,98	76,09	76,53	>	1. Keterlibatan peremuan di parlemen; 2. Partisipasi perempuan sebagai tenaga propesional; dan 3. Sumbangan pendapatan perempuan.
	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	61,55	63,85	62,18	71,82	70,98	<	1. Masih belum optimalnya kesetaraan upah anatara perempuan dan laki-laki 2. Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal 3. Belum optimalnya peningkatan kompetensi kerja perempuan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
2.3.2.3	Pangan							
	Angka kecukupan Protein per kapita	68,8	70,6	70,6	64,8	68,5	>	Konsumsi pangan masyarakat sudah tercukupi yang didominasi oleh protein nabati menyebabkan tercapainya target angka kecukupan protein
	Jumlah desa rawan pangan	9	8	6	16	1		
	Total desa pangan lestari	3	3	17	21	N/A		
	Ketersediaan pangan utama *(food availability)*	61823,74	38727,46	141806	171.154,06	162.754,03	>	
	Skor PPH Konsumsi	93,2	94,5	93,4	93,3	94,9	>	1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA); 2. Tersedianya pangan yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang cukup dan berkualitas baik serta dapat diakses dan dimanfaatkan secara mudah untuk dikonsumsi.
	Angka ketersediaan Energi	6460	5525,18	5525,18	2100	2151	>	1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA); 2. Tersedianya pangan yang dibutuhkan masyarakat

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
								dalam jumlah yang cukup dan berkualitas baik serta dapat diakses dan dimanfaatkan secara mudah untuk dikonsumsi.
	Angka Ketersediaan Protein	180,89	350,72	350,72	N/A	55,38	<	Kabupaten Pangandaran dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih perlu mendatangkan komoditas pangan dari daerah luar agar ketersediaan pangan tercukupi
	Skor PPH Ketersediaan	93,2	94,5	93,4	93,3	75,11	<	Kabupaten Pangandaran dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih perlu mendatangkan komoditas pangan dari daerah luar agar ketersediaan pangan tercukupi
	Indeks Ketahanan Pangan	82,56	81,99	80,64	81,12	83,57	>	Indikator yang mempengaruhi indeks ketahanan pangan seperti aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan serta pemanfaatan pangan sudah cukup baik
2.3.2.4	Pertanahan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
	Persentase Jumlah Kebijakan umum mengenai pedoman pelaksanaan pengembangan dan penataan batas wilayah yang diterbitkan	100	100	100	100	100	=	Telah terlaksananya koordinasi dengan pihak BPN dan sudah tersertifikasi tanah yang ada di wilayah kabupaten pangandaran sebanyak 40
2.3.2.5	Lingkungan Hidup							
	Volume produksi sampah	181.475,86 m3	183.136,82 m3	184.242,03 m3	188.985,16 m3	192.099,05 m3	>	Volume produksi sampah akan bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk
	Persentase Penanganan sampah	29,18	16,84	19,30	28,66	47,59	>	1. Ketersediaan TPA Sanitary Landfill 2. Ketersediaan Angkutan yang cukup dan memadai 3. Ketersediaan TPST, TPS3R yang berfungsi
	Indeks Kualitas Air	50	51.67	50	50	50	<	1. Belum adanya regulasi terkait RPAM 2. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah disungai 3. Sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi belum optimal
	Indeks Kualitas Udara	85,68	77.79	88,66	88,18	90,96	>	Perawatan pada kendaraan serta implementasi pengendalian pencemaran udara di industri secara rutin

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
	Indeks Kualitas Vegetasi/IKTL	52,28	65,25	65,25	66,4	39,07	<	Terdapat perubahan fungsi lahan akibat pertambahan penduduk,dan peningkatan industri serta pertambangan
2.3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	91,96	97,06	99,17	99,49	99,71	<	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan 2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	17,03	26,78	98,20	93,85	99,61	<	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan 2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas
	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	26,51	45,26	56,26	53,12	57,29	<	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan 2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas
	Persentase validasi *database* kependudukan	30,43	39,13	60,87	100	100		
2.3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Prosentase Desa Kategori Mandiri	4,30	8,60	18,28	38,7	100	=	Kekompakan SDM, Kerjasama antar

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
								Stakeholder, Dukungan Anggaran
	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa kategori baik	44,09	59,14	58,06	65,59	100		Kekompakan SDM, Kerjasama antar Stakeholder, Dukungan Anggaran
	Jumlah PKK aktif	104	104	104	104	104		Kekompakan SDM, Kerjasama antar Stakeholder, Dukungan Anggaran
2.3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
	TFR/*Total Fertility Rate*	2,32	2,29	2,51	2,22	1,7	=	Penggunaan Kontrasepsi selama wanita usia subur
	CPR/*Contraceptive Prevalence Rate* (%)	76,41	60,25	73,37	69,81	71,89	>	Penurunan angka kelahiran, Peningkatan peserta KB aktif
	Unmet Need	14,88	24,84	18,1	19,7	14,69	>	Peningkatan peserta KB Aktif
	LPP/Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,57	0,96	1,24	1,17	0,67	>	Pembentukan kampung KB, Peningkatan peserta KB aktif
	Ratio Akseptor KB (%)	76,43	60,25	73,37	70,31	N/A		Jumlah partisipasi peserta KB Aktif
	ASFR/*Age Specific Fertility Rate*	17,61	18,01	19,81	27	N/A		Penurunan angka kelahiran, Peningkatan peserta KB aktif
2.3.2.9	Perhubungan							
	Rasio sarana prasarana perhubungan yang ada dalam kondisi baik	76,30	76,90	78,00	96	96,5	>	1. Penambahan alokasi anggaran (Bankeu Provinsi) 2. Koordinasi antar Intansi
	Persentase kecamatan yang terlayani angkutan umum	50	60	50	50	80	>	1. Analisis Kebutuhan.

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
								2. Pengembangan Infrastruktur. 3. Tersedianya pusat ekonomi masyarakat
2.3.2.10	Komunikasi dan Informatika							
	Indeks SPBE	2,32	3,02	3,42	2,82	3,53	>	Koordinasi yang baik antar OPD dalam penyusunan bahan Evaluasi SPBE
	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat/Standar Kepuasan Masyarakat)	82,62	83,52	84,92	86,48	88,04	=	a. Adanya komitmen unit pelayan publik dan adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan publik seluruh unit pelayanan Perangkat Daerah; b. Semua perangkat daerah mendukung diselenggarakannya Survei Kepuasan Masyarakat meskipun dengan keterbatasan anggaran dan SDM; c. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik dan menjadikan bagian dari materi pemeriksaan oleh aparatur pengawas internal; d. Meningkatkan standar pelayanan publik pada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
								perangkat daerah sesuai kententuan yang berlaku; e. Memperluas cakupan zona kepatuhan standar pelayanan publik pada perangkat daerah, kecamatan, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
2.3.2.11	Usaha Mikro Kecil Menengah							
	Persentase koperasi aktif	33,96	89,02	89,02	91,56	100	>	1. Keberadaan koperasi ditentukan oleh proses pengembangan pemahaman nilai-nilai koperasi 2. Peran dan manfaat koperasi akan semakin dirasakan bagi anggota dan masyarakat jika terdapat kesadaran anggota 3. Kaderisasi pengurus koperasi 4. Peningkatan kapasitas koperasi 5. Adanya pembinaan dan pengawasan koperasi
	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	100	100	100	100	100	=	1. Peningkatan kapasitas UMKM non BPR/LKM 2. Pendampingan UMKM non BPR/LKM
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	100	100	100	100	100	=	1. Perlu adanya pembaharuan database

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
								2. Mapping sektor usaha
2.3.2.12	Penanaman Modal							
	Jumlah Investor PMDN	131	2.124	1.050	6.120	67.564		1. Perlu adanya pembaharuan database 2. Mapping sektor usaha
2.3.2.13	Kepemudaan dan Olahraga							
	Jumlah Klub Olahraga	127	146	146	146	146		Masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya berolahraga
	Jumlah Gedung Olahraga	117	117	117	117	121		Jumlah GOR yang masih kurang merata
2.3.2.14	Statistik							
	Jumlah Publikasi	1	0	0	2	622	>	Jumlah dataset yang terpublikasi pada portal satu data Pangandaran
2.3.2.15	Persandian							
	Jumlah Sistem Informasi yang menerapkan sistem keamanan informasi	16	20	21	25	59	<	Kesadaran pentingnya pengamanan sistem informasi sudah cukup baik
2.3.2.16	Kebudayaan							
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	12 (Keg. Bidang)	8	40	14	10	<	1. Belum menjadi prioritas pembangunan daerah 2. Sumber daya yang terbatas
	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	6 (Keg. Diluar bidang)	0	3	11	4		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
	Jumlah Cagar budaya yang Dikelola Secara Terpadu	30	30	30	26	40		Adanya pendataan ulang mengenai objek yang diduga cagar budaya
2.3.2.17	Perpustakaan							
	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	12.567	3.931	3.104	14.740	26.425	>	1. Adanya Program Mobil Perpustakaan Keliling 2. Promosi Literasi ke Sekolah Dasar sampai ke Sekolah Menengah Atas
	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	9.636	10.794	12.274	23.036	25.031	>	1. Adanya Pengadaan Buku yang bersumber dari Banprov dan DAK 2. Hibah buku dari masyarakat
	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	1	1	265	364	695	>	Pendataan seluruh Pustakawan dan tenaga pustaka di seluruh Kabupaten Pangandaran
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan	31,43	42,99	87,58	88,92	89,02		1. Memaksimalkan pelayanan kunjungan pustaka 2. Pengisian Quisioner kepada pengunjung
2.3.2.18	Kearsipan							
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	18	18	18	18	18		Sosialisasi Kearsipan ke Perangkat Daerah
	Persentase arsip yang terjamin keamanannya	48,03	48,03	48,03	48,03	48,03		Penginputan dan upload Arsip ke JIKN melalui SIKN
2.3.3	Urusan Pilihan							
2.3.3.1	Kelautan dan Perikanan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
	Jumlah Produksi Ikan (ton)	2.755,63	1.522,51	1.948,17	1.738,80	3.246,85		Musim dan cuaca yang tidak menentu
	Target Daerah (ton)	2.941	2.947	1.527	1.531,20	1.535,50		
	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	22,5	23,1	22,1	22,6	21,9		Karena sosialisasi gemar makan ikan yang tinggi
	Target Daerah (kg/kapita/tahun)	22,04	22,9	21,3	N/A	N/A		
	Jumlah Kelompok Nelayan	195	241	243	245	241		Karena adanya dorongan dari diri sendiri untuk berkelompok, sehingga mereka bisa terakomodir kegiatan dan aktivitasnya oleh dinas
	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	2.498,856	1.282,55	1.624,97	1.414,71	2.920,79		1. Jenis Ikan yang ditangkap bernilai ekonomi tinggi 2. Pencatatan produksi sudah berjalan dengan baik 3. Pengawasan terus menerus dan berkelanjutan terhadap aktifitas Unreported Fishing
	Produksi benih ikan	9.099.620	11.519.000	13.058.000	14.341.000	50.438.000		Penerapan CBIB pada proses produksi benih
2.3.3.2	Pariwisata							
	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	3.886.919	2.929.992	3.604.114	4.286.894	3.894.645		
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	6.121	514	15	1.291	3.930		
	Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	18.472.858.000	13.786.568.250	15.126.468.000	29.383.788.500	28.936.290.000	>	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	1.060.116	1.091.411	1.162.850	1.325.480	1.449.880		Promosi serta Optimalisasi pelayanan dan Koordinasi dari setiap stakeholder terkait
2.3.3.3	Pertanian							
	Produktivitas Padi	6,21	6,3	6,3	6,22	6,23	>	
	Luas Lahan Sawah	16.564	16.564	16.747	16.727	16.727		Belum terdapat CPCL lahan sawah yang termasuk kedalam LP2B
	Produktivitas Jagung	5,97	6,01	6,45	6,24	5,68	<	1. perubahan yang iklim yang tidak menentu 2. persaingan dengan komoditas lain 3. kurangnya upaya peningkatan nilai tambah
	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya	205.003,38	205.981,12	214.265,66	210.144,68	211.285,68	>	
2.3.3.4	Perdagangan							
	Persentase Pertumbuhan ekspor	-34,25	81,88	55,62	-26,47	0,13	<	1. Masih rendahnya produk lokal yang memenuhi kriteria barang ekspor 2. Masih rendahnya SDM untuk ikut terlibat dan mengembangkan produk unggulan Kabupaten Pangandaran
	Persentase peningkatan nilai ekspor perdagangan	-34,25	81,88	55,62	-26,47	0,13	<	1. Masih rendahnya produk lokal yang memenuhi kriteria barang ekspor

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
								2. Masih rendahnya SDM untuk ikut terlibat dan mengembangkan produk unggulan Kabupaten Pangandaran
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	20,17	19,52	19,53	19,79	19,53	>	1. Inovasi Bidang Perdagangan 2. Keberadaan berbagai pusat pembelanjaan, pasar-pasar, serta dibukanya objek-objek wisata di Pangandaran yang berdampak pada aktivitas perdagangan hotel dan restoran 3. Meningkatnya daya beli masyarakat
2.3.3.5	Perindustrian							
	Persentase Pertumbuhan Industri	-0,005	0,004	0,011	11,71	745,34	>	1. Adanya gerakan migrasi perizinan dari SKU ke NIB melalui OSS 2. Pelatihan dan pembinaan yang merata dan berkelanjutan
	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	0,45	0,52	0	6	16,78	>	
2.3.3.6	Transmigrasi							
	Persentase Transmigran Swakarsa	0	0	0	0	0		
2.3.4	Layanan Pendukung, Penunjang, Pengawasan Urusan Pemerintahan							
2.3.4.1	Perencanaan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
	Nilai SAKIP Unsur Perencanaan (%)	22,09	22,24	22,42	20,10	20,09	<	Implementasi AKIP belum sepenuhnya menggunakan aplikasi manajemen kinerja sehingga pencapaian kinerja belum bisa dimonitor dan dievaluasi secara realtime
	Persentase Sinergitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan	98,17	97,75	67,03	62,95	66,96	<	Belum optimalnya Pengelolaan Daerah yang terintegrasi dari proses perencanaannya, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran berbasis teknologi informasi.
	Nilai SAKIP Bappeda	A (89,86)	A (89,88)	B (65,8)	B (67,72)	BB (70,90)	<	Perubahan perhitungan komponen yang dinilai dari 3 komponen menjadi 4 komponen (Evaluasi Kinerja) sesuai Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021.
2.3.4.1	Keuangan							
	Nilai SAKIP dan Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	B (89,78)	B (89,9)	B (66)	B (67,72)	B (69,25)	<	1. Koordinasi Belum Optimal 2. Keterlambatan dalam publikasi Dokumen Perencanaan Kinerja 3. Belum termanfaatkannya teknologi informasi
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran	WTP	WTP	WTP	WDP	N/A		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (%)	3,23	-8,31	66,35	50,64	N/A		
2.3.4.2	Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan							
	Persentase ASN yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Teknis	1,40	10,25	11,73	24	24	>	
	Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Manajerial	11,80	14	20	N/A	N/A		
2.3.4.3	Penelitian dan Pengembangan							
	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	8	8	9	6	6		Berkurangnya kebutuhan akan penyusunan dokumen kajian pada tahun tersebut
	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	8	8	9	6	6		Berkurangnya kebutuhan akan penyusunan dokumen kajian pada tahun tersebut
	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100	75	44,44	66,67	66,67		1. Perlu dioptimalkan dukungan Sumber Daya 2. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang kelitbangan 3. Masih kurangnya pemanfataan teknologi dibidang kelitbangan 4. Perlu peningkatan dan dukungan berbagai pihak dalam pengumpulan data informasi yang dibutuhkan
2.3.4.4	Pengawasan							
	Menurunnya Rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD	100	41,30	99,89	N/A	N/A		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
	Persentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada Level 3	100	85,71	60	N/A	N/A		
	Persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB)	117,63	133,33	110,92	N/A	N/A		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	166,67	119,99	104,27	N/A	N/A		
	Persentase SKPD yang berpredikat ZI/WBK/ WBBM	100	40,00	50,05	N/A	N/A		
2.3.4.5	Pemerintahan Umum							
	Jumlah Kejadian Konflik	1	0	3	N/A	N/A		
	Peningkatan jumlah masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa	0	280	215	N/A	N/A		
	Peningkatan cakupan kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	238	190	91	N/A	N/A		
2.3.4.6	Sekretariat Daerah							
	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (51,60)	CC (52,06)	CC (53,64)	CC (56,48)	BB (73,72)		1. Strategi Jangka Pendek diantaranya membangun pemahaman dan komitmen bersama seluruh pihak yang terlibat didalamnya (Kabupaten dan OPD); 2. Strategi Jangka Menengah diantaranya Penerapan Pengukuran Indeks RB Pada Seluruh OPD/UnitKerja; 3. Perubahan Tim RB/Pokja RB Kabupaten sesuai dengan peran dan tanggung jawab serta kewenangannya

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
								terhadap setiap komponen pada area RB; 4. Membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) / jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi; 5. Pelaksanaan sosialisasi kepada Tim RB / Pokja RB oleh pihak yang berkompeten; 6. adanya monitoring dan evaluasi dari Tim RB / Pokja RB secara berkala serta pembentukan Agen Perubahan (Agent of Change) dan role model; 7. Membuat surat edaran implementasi RB kepada seluruh OPD /Unit Kerja sebagai salah satu aspek penilaian pendukung pada RB Kabupaten; 8. Dukungan Anggaran yang memadai.
	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	166,67	166,67	166,67	166,67	84,11	>	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis penyusunan peraturan perundang-undangan
2.3.4.7	Sekretariat Dewan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
	Persentase Kenaikan Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	81,38	83,54	83,35	85,28	86,73	>	Terfasilitasinya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan Fungsi DPRD.
2.3.4.1	Penanggulangan Bencana							
	Persentase desa/kelura-han/kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana	68,8	68,8	68,8	60,5	100		Pada tahun 2023 ada kegiatan Bunda Belajar Mitigasi (BBM) menggunakan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dilaksanakan di 10 kecamatan, didalamnya mengundang warga ditiap desa yang rawan terhadap Bencana
	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	27	29	22	22	24		1. Pembentukan FKDM 2. Terlatihnya Warga Desa dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana
2.4	DAYA SAING DAERAH							
	Realisasi Pendapatan	1.474.724.169.544,00	1.572.138.480.714,00	1.332.367.811.465,00	1.226.706.157.351,00	1.244.519.260.149,77	<	
	Realisasi Belanja	1.461.491.519.435,00	1.565.838.472.278,00	1.349.232.078.108,00	1.222.318.490.276,00	1.230.664.075.736,00	<	
	SILPA	66.887.105.830	79.728.538.874	20.000.000.000	21.000.000.000	26.775.224.160	<	Penganggaran SiLPA didasarkan pada perhitungan dengan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
								mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
	Panjang Jalan	504,31	504,31	504,31	504,31	632,54	>	Berfokus pada kemampuan aksesibilitas jalan dengan melakukan rehabilitasi jalan kabupaten agar memudahkan masyarakat untuk menggunakan jalan
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	65.311	48.150	52.341	50.531	47.189		Infrastruktur yang memadai. Integrasi antarmoda. Ketepatan Waktu
	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	24	12	11	1	13		Penyediaan insentif untuk mendorong investasi dalam peningkatan fasilitas angkutan umum yang memadai.
2.4.3	Fokus Iklim Investasi							
	Jumlah Investor PMDN	131	2.124	1.050	6.120	67.564	>	Adanya regulasi Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Peta Potensi yang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
								dapat menjadi stimulan dan menarik pelaku usaha untuk berinvestasi
	PMA	0	0	0	31.010.000.000	37.570.000.000		Adanya regulasi Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Peta Potensi yang dapat menjadi stimulan dan menarik pelaku usaha untuk berinvestasi
	PMDN	471.716.357.987	349.898.121.679	219.437.739.336	1.750.354.863.491	1.501.638.559.642		Adanya regulasi Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Peta Potensi yang dapat menjadi stimulan dan menarik pelaku usaha untuk berinvestasi
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia							
	Lulusan S1	582	9.547	10.136	10.838	11.517		
	Lulusan S2	61	595	631	666	697		
2.4.5	Fokus Daya Saing Pariwisata							
	Jumlah Kunjungan Wisatawan se–Kabupaten (yang dikelola pemda)	3.775.273	2.261.981	3.127.174	4.113.221	3.548.354		1. Promosi yang optimal hingga kelas internasional 2. Kemudahan akses menuju pangandaran 3. tersedianya sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang optimal
	Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se–Kabupaten	5.614.481	2.842.022	3.000.000	N/A	N/A		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023		
	PAD sektor pariwisata	18.472.858.000	13.786.568.250	15.126.468.000	29.383.788.500	28.936.290.000		

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 dan SIPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024, 2024

2.2.4 Realisasi Sasaran RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di RKPD mempunyai tujuan untuk melihat capaian tingkat kemajuan progres dan kesesuaian dengan program dan kegiatan di RPJMD. Prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Pangandaran dibuat berdasarkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Realisasi ketercapaian kinerja indikator di kinerja sasaran berdasarkan pelaksanaan RKPD Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target RKPD tahun 2023 nantinya akan menghasilkan kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2023 seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 91 Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	59,76	60,97	Disdikpora
2.	Meningkatnya Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapat penghargaan baik tingkat Provinsi, Nasional atau Internasional	Jumlah pemuda berprestasi yang mendapat penghargaan	Orang	100	60	Disdikpora
3.	Meningkatnya Kinerja Organisasi/SKPD	Nilai LHE AKIP Disdikpora	Nilai	71	64,65	Disdikpora
4.	Meningkatnya Kinerja Organisasi/SKPD	Nilai LHE AKIP Dinas Kesehatan	Nilai	69,25 – 72,00	66,65	Dinkes
5.	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	Persentase Rumah Sehat	%	83	87,3	Dinkes
		Cakupan Desa ODF (Open Defecation Free)	%	80	100	
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	65,57	18,62	Dinkes
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	6,5	7,08	
		Prevalensi *Stunting*	%	4,7	1,93	
		Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,12	0,14	

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	>62,5	88,81	
		Capaian SPM	%	100	94,35	
		Akreditasi Fasyankes	Level	Utama	Paripurna	
7.	Meningkatnya budaya sehat	Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	%	50	67,74	Dinkes
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai LHE AKIP DPUTRPRKP	Nilai	69,25 - 72,00	63,30	DPUTRPRKP
9.	Meningkatnya permukiman layak huni yang disediakan	Persentase Rumah yang Layak Huni	%	74	88,26	DPUTRPRKP
10.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	1,788	1,72	DPUTRPRKP
11.	Meningkatnya Pemahaman Kesatuan Bangsa	Persentase masyarakat yang memahami Kesatuan Bangsa	%	71	59,7	Bakesbangpol
		Persentase Informasi ATHG yang tersampaikan	%	72	72	Bakesbangpol
12.	Meningkatnya Pemahaman Demokratisasi	Persentase masyarakat yang memahami demokrasi	%	63	50	Bakesbangpol
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	70	67,95	Bakesbangpol
14.	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan	%	100	100	Satpol PP
15.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Praja	Nilai LHE AKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai	70,5	56,2	Satpol PP
16.	Meningkatnya Layanan Kebencanaan	Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten dan Non Kebakaran	%	100	94,44	Satpol PP
17.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LHE AKIP BPBD	Nilai	87,35	64,55	BPBD

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18.	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	142	147,85	BPBD
19.	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	%	80	100	Dinsos PMD
20.	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	%	47	112,14	Dinsos PMD
21.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Nilai LHE AKIP Dinsos PMD	Nilai	69,25	63,75	Dinsos PMD
22.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka pengangguran terbuka	Orang	8.315	4.172	Disnaker
23.	Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Dinas Ketenagakerjaan	Nilai	75,5	68,8	Disnaker
24.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Nilai LHE AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Nilai	87,2	66,45	DLHK
25.	Meningkatnya Kualitas Air	Indek Kualitas Air	Indeks	51,8	50	DLHK
26.	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	79	90,96	DLHK
27.	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	65,25	38,73	DLHK
28.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai LHE AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	67,45	65,7	Disdukcapil
29.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	%	100	100	Disdukcapil
30.	Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Persentase SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	Disdukcapil

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
31.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,58 – 0,55	0,67	DKBP3A
32.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	74,57	76,53	DKBP3A
33.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DKBP3A	Nilai LHE AKIP DKBP3A	Nilai	70 - 80	69,85	DKBP3A
34.	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perhubungan	Nilai LHE AKIP Dinas Perhubungan	Nilai	84	66,00	Dishub
35.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Rasio Sarana Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	%	75,08	42	Dishub
		Persentase Kecamatan yang Terlayani Angkutan Umum	%	72,22	50	Dishub
36.	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai LHE AKIP Diskominfo	Nilai	89,76	65,20	Diskominfo
37.	Implementasi Penyelenggaraan E-Government	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	%	82	20,5	Diskominfo
		Persentase pengamanan informasi daerah	%	65	16,5	Diskominfo
38.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik	%	60	15	Diskominfo
		Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	%	30	72,2	Diskominfo
39.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Persentase realisasi nilai investasi	%	7,24	-13,59	DPMPTSP
40.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai LHE AKIP DPMPTSP Kab.Pangandaran	Nilai	69,25 - 72,00	69,55	DPMPTSP
41.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai interval pelayanan publik	Nilai	2,66 - 2,75	3,56	DPMPTSP
42.	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitasnya	%	46,34	55,26	Diskopdagin

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
43.	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	15	7,08	Diskopdagin
44.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan	%	5,59	19,53	Diskopdagin
45.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perindustrian	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perindustrian	%	6,19	4,88	Diskopdagin
46.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Nilai LHE AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Nilai	71	69,65	Diskopdagin
47.	Meningkatkan aksesbilitas dan kualitas layanna pendidikan secara komprehensif	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	19,16	19,62	Dispusip
48.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai LHE AKIP Dispusip	Nilai	77,5	57,75	Dispusip
		Nilai LAKE Kabupaten/Kota	Nilai	3019	400	Dispusip
49.	Meningkatkan produktivitas perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	0,5	0,85	DKPKP
50.	Meningkatkan ketahanan pangan berbasis masyarakat	Skor pola pangan harapan	Skor	80	94,9	DKPKP
51.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP	Nilai LHE AKIP DKPKP	%	89,94	63,55	DKPKP
52.	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	7,5	-9,09	Disparbud
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,42	1,79	Disparbud
		Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	%	20	11,58	Disparbud
		Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan	%	20	26,61	Disparbud

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
53.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan professional	Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	Poin	69,25-72,00	69,65	Disparbud
54.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura	%	1,2	115,26	Distan
		Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	3	-10,87	Distan
		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	1,3	-8,21	Distan
55.	Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Petani	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	%	10	12,65	Distan
56.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	Nilai LHE AKIP Dinas Pertanian	Nilai	69,25 – 72,00	70,3	Distan
57.	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	B	67,90	Setda
58.	Meningkatnya Kualitas Laporan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	72	67,99 (B)	Setda
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai	3	N/A	Setda
59.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Barang/Jasa serta Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui ULP, serta Implementasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	%	97	69,66	Setda
60.	Tertib administrasi Pertanahan Meningkat	Indeks Tertib Administrasi	Indeks	89	60	Setda
61.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	69,5	70	Setwan
62.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,66 - 2,75	4,07	Setwan

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Pangandaran					
63.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	Nilai	71,5	71,05	Inspektorat
		Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal	Nilai	17,33	17,47	Inspektorat
64.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	Inspektorat
65.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	Nilai	70,63	70,9	Bappeda
66.	Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan	Presentase OPD dengan Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan di atas 13	% (OPD)	74,29 (26 OPD)	94,44 (34 OPD)	Bappeda
67.	Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	%	100	100	Bappeda
		Persentase rata-rata capaian realisasi IKU	%	77	164,68	Bappeda
68.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	65 – 85	66,67	Bappeda
69.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	1		BKAD
70.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Nilai	5,5	6,02	BKAD
		Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	Nilai	20	18,45	BKAD
		Indeks Transparasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	5,5	6,21	BKAD

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Indeks Penyerapan Anggaran Daerah	Nilai	20	10	BKAD
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Nilai	6,5	2,38	BKAD
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	N/A	BKAD
71.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan BMD	Penyusunan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) sesuai SAP	%	95		BKAD
		Peningkatan Sertifikasi Tanah BMD	%	80		BKAD
		Peningkatan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	%	70		BKAD
72.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Nilai LHE AKIP BKPSDM	Nilai	67,30	70,00	BKPSDM
73.	Meningkatnya nilai indeks profesionalitas ASN melalui dimensi kompetensi, kualifikasi, disiplin dan kinerja	Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi	Indeks	14,15	21,37	BKPSDM
		Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi	Indeks	9,82	13,09	BKPSDM
		Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja	Indeks	16,96	24,27	BKPSDM
		Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin	Indeks	4,99	5	BKPSDM
74.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapenda	Nilai LHE AKIP Bapenda	Nilai	74	67,45	Bapenda
75.	Meingkatnya Pajak Daerah	Meingkatnya Pajak Daerah	%	1	N/A	Bapenda
76.	Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Padaherang	Indeks/Nilai	84,72	53,50	Kec. Padaherang
		Indeks Pelayanan Publik	Persen	85	85,58	Kec. Padaherang
77.	Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Mangunjaya	Indeks/Nilai	72,5	50,95	Kec. Mangunjaya
		Indeks Pelayanan Publik	Persen	85	61,84	Kec. Mangunjaya

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
78.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Kalipucang	Nilai	85,75	69,85	Kec. Kalipucang
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	80	89,3	Kec. Kalipucang
79.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Pangandaran	Nilai	72,5	55,90	Kec. Pangandaran
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	85	90,28	Kec. Pangandaran
80.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Sidamulih	Nilai	68 - 70	30,00	Kec. Sidamulih
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	85	89,03	Kec. Sidamulih
81.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Parigi	Nilai	82,91	55,80	Kec. Parigi
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	85	93,63	Kec. Parigi
82.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Cijulang	Nilai	89,2	62,05	Kec. Cijulang
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	85	90,68	Kec. Cijulang
83.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Cimerak	Nilai	84,39	42,85	Kec. Cimerak
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	85	88,00	Kec. Cimerak
84.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Cigugur	Nilai	68 - 70	63,50	Kec. Cigugur
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	85	88,13	Kec. Cigugur
85.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Langkaplancar	Nilai	68 - 70	48,15	Kec. Langkaplancar
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	85	83,03	Kec. Langkaplancar

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2023, 2024

Secara lengkap dapat dilihat pada Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2023 Triwulan IV yang disajikan pada **Lampiran I**.

2.2.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.2.5.1 Urusan Pendidikan

Pemenuhan pelayanan dasar di urusan pendidikan terdapat pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM). Berikut merupakan pencapaian indikator SPM pada urusan pendidikan tahun 2023:

Tabel 2. 92 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pendidikan Tahun 2023

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	**Pendidikan Dasar Usia Dini**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	5.488	5.488	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	1. Angka partisipasi sekolah	75.09	75.09	**100%**
	2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	43.69	43.69	**100%**
	3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	60.09	60.09	**100%**
	4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	1.33	1.33	**100%**
	5. Kecukupan formasi guru ASN	3	3	**100%**
	6. Indeks distribusi guru	1	1	**100%**
	7. Proporsi PTK bersertifikat	52.4	52.4	**100%**
	8. Proporsi PTK penggerak	1.9	1.9	**100%**
	9. Pengalaman pelatihan guru	0.96	0.96	**100%**
2.	**Pendidikan Dasar**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	44.193	44.193	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	SD			
	1. Angka partisipasi kasar	100	101.2	**100%**
	2. Angka partisipasi sekolah	99.4	99.4	**100%**
	3. Angka partisipasi murni	96.8	96.8	**100%**
	4. Kemampuan literasi	1.89	1.89	**100%**
	5. Kemampuan numerasi	1.85	1.85	**100%**
	6. Perbedaan Skor Literasi	2.88	2.88	**100%**
	7. Perbedaan Skor numerasi	2.98	2.98	**100%**
	8. Indeks iklim keamanan	2.41	2.41	**100%**
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	24.3	24.3	**100%**
	10. Kecukupan formasi guru ASN	10	10	**100%**
	11. Indeks distribusi guru	15.40	15.40	**100%**
	12. Proporsi PTK bersertifikat	33.9	33.9	**100%**
	13. Proporsi PTK penggerak	22	22	**100%**
	14. Pengalaman pelatihan guru	97.6	97.6	**100%**
	SMP			
	1. Angka partisipasi kasar	100	102.82	**100%**
	2. Angka partisipasi sekolah	97.8	97.8	**100%**
	3. Angka partisipasi murni	84.41	84.41	**100%**
	4. Kemampuan literasi	75.87	75.87	**100%**
	5. Kemampuan numerasi	49.76	49.76	**100%**
	6. Perbedaan Skor Literasi	2.37	2.37	**100%**
	7. Perbedaan Skor numerasi	0.64	0.64	**100%**
	8. Indeks iklim keamanan	74.01	74.01	**100%**

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	69.8	69.8	**100%**
	10. Kecukupan formasi guru ASN	25.5	25.5	**100%**
	11. Indeks distribusi guru	0.32	0.32	**100%**
	12. Proporsi PTK bersertifikat	89.7	89.7	**100%**
	13. Proporsi PTK penggerak	17	17	**100%**
	14. Pengalaman pelatihan guru	80.7	80.7	**100%**
3.	**Pendidikan Kesetaraan**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	548	548	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	1. Angka partisipasi kasar	100	104	
	2. Angka partisipasi sekolah	99.3	99.3	**100%**
	3. Angka partisipasi murni	96	96	**100%**
	4. Kemampuan literasi	67.77	67.77	**100%**
	5. Kemampuan numerasi	58.08	58.08	**100%**
	6. Perbedaan Skor Literasi	2	2	**100%**
	7. Perbedaan Skor numerasi	3	3	**100%**
	8. Indeks iklim keamanan	63.05	63.05	**100%**
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	59.36	59.36	**100%**
	10. Kecukupan formasi guru ASN	3	3	**100%**
	11. Indeks distribusi guru	3	3	**100%**
	12. Proporsi PTK bersertifikat	1	1	**100%**
	13. Proporsi PTK penggerak	1	1	**100%**
	14. Pengalaman pelatihan guru	36	36	**100%**

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2024

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator-indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Pangandaran total pencapaiannya sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa semua anak memiliki akses yang setara ke lembaga pendidikan, kurikulum dan materi pembelajaran disediakan secara memadai, sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi dengan baik, serta evaluasi dan pemantauan dilakukan secara efektif.

Adapun anggaran untuk Pemenuhan SPM di Bidang Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 93 Anggaran SPM pada Urusan Pendidikan Tahun 2023

No.	Pendanaan	Pagu
1	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada PD Teknis	Rp. 83.355.079.170

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

2.2.5.2 Urusan Kesehatan

Pemenuhan pelayanan dasar di urusan kesehatan terdapat pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum. Berikut merupakan pencapaian indikator SPM pada urusan kesehatan tahun 2023:

Tabel 2. 94 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Kesehatan Tahun 2023

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	5,622	5,622	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	5,622	5,622	**100%**
	2. Tablet tambah darah	5,622	5,622	**100%**
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	5,622	5,622	**100%**
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	5,622	5,622	**100%**
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	5,622	5,622	**100%**
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	5,622	5,622	**100%**
	7. Kartu ibu/rekam medis ibu	5,622	5,622	**100%**
	8. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	5,622	5,622	**100%**
	9. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	101	101	**100%**
	10. Tenaga kesehatan : Bidan	605	605	**100%**
	11. Tenaga kesehatan : Perawat	90	90	**100%**
	12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	5,622	5,622	**100%**
2.	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	5,361	5,361	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	1. Formulir Partograf	5,361	5,361	**100%**
	2. Kartu ibu (rekam medis)	5,361	5,361	**100%**
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	5,361	5,361	**100%**
	4. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	67	67	**100%**
	5. Tenaga kesehatan : Bidan	605	605	**100%**
	6. Tenaga kesehatan : Perawat	90	90	**100%**
3.	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	5,342	5,342	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	1. Vaksin Hepatitis B0	1,257	1,257	**100%**
	2. Vitamin K1 injeksi	5,342	5,342	**100%**

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	3. Salep/tetes mata antibiotik	5,342	5,342	**100%**
	4. Formulir bayi baru lahir	5,342	5,342	**100%**
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	5,342	5,342	**100%**
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	5,342	5,342	**100%**
	7. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	73	73	**100%**
	8. Tenaga kesehatan : Bidan	605	605	**100%**
	9. Tenaga kesehatan : Perawat	90	90	**100%**
4.	**Pelayanan Kesehatan Balita**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	25,488	25,488	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	25,488	25,488	**100%**
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	25,488	25,488	**100%**
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	25,488	25,488	**100%**
	4. Vitamin A Biru	2,514	2,514	**100%**
	5. Vitamin A Merah	21,16	21,16	**100%**
	6. Vaksin imunisasi dasar: HBO	8	8	**100%**
	7. Vaksin imunisasi dasar: BCG	8	8	**100%**
	8. Vaksin imunisasi dasar: Polio	6	6	**100%**
	9. Vaksin imunisasi dasar: IPV	4	4	**100%**
	10. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	6	6	**100%**
	11. Vaksin imunisasi dasar: Campak	8	8	**100%**
	12. Vaksin imunisasi dasar: Rubella	8	8	**100%**
	13. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	4	4	**100%**
	14. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	8	8	**100%**
	15. Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	8	8	**100%**
	16. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	10,193	10,193	**100%**
	17. Peralatan Anafilaktik	123	123	**100%**
	18. Tenaga kesehatan : Dokter	75	75	**100%**
	19. Tenaga kesehatan : Bidan	576	576	**100%**
	20. Tenaga kesehatan : Perawat	103	103	**100%**
	21. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	59	59	**100%**
	22. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	6,901	6,901	**100%**
	23. Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	128	128	**100%**
5.	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	55,131	55,131	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	1. Buku raport kesehatanku	1	1	**100%**
	2. Buku pemantauan kesehatan	1	1	**100%**
	3. Kuesioner skrining kesehatan	13,167	13,167	**100%**

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	1,945	1,945	**100%**
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	932	932	**100%**
	6. Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	51	51	**100%**
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	138	138	**100%**
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	138	138	**100%**
	9. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	56	56	**100%**
	10. Tenaga Kesehatan : Masyarakat	74	74	**100%**
	11. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	1,266	1,266	**100%**
	12. Tenaga Non kesehatan : Guru	3,808	3,808	**100%**
6.	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	159,673	159,673	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	74	74	**100%**
	2. Alat ukur berat badan	15	15	**100%**
	3. Alat : Alat ukur tinggi badan	15	15	**100%**
	4. Alat : Alat ukur lingkar perut	15	15	**100%**
	5. Alat : Tensimeter	15	15	**100%**
	6. Alat : Glukometer	15	15	**100%**
	7. Alat : Tes strip gula darah	78,5	78,5	**100%**
	8. Alat : Lancet	78,5	78,5	**100%**
	9. Alat : Kapas alkohol	78,5	78,5	**100%**
	10. Alat : KIT IVA Tes	13	13	**100%**
	11. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	150	150	**100%**
	12. Tenaga kesehatan : Dokter	59	59	**100%**
	13. Tenaga kesehatan : Bidan	152	152	**100%**
	14. Tenaga kesehatan : Perawat	145	145	**100%**
	15. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	44	44	**100%**
	16. Tenaga Kesehatan Masyarakat	65	65	**100%**
	17. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	126	126	**100%**
7.	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	65,45	65,45	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	1. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	65,45	65,45	**100%**
	2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity			

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	65,45	65,45	**100%**
	3. Buku kesehatan lansia	1	1	**100%**
	4. Tenaga kesehatan : Dokter	51	51	**100%**
	5. Tenaga kesehatan : Bidan	122	122	**100%**
	6. Tenaga kesehatan : Perawat	135	135	**100%**
	7. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	45	45	**100%**
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	65	65	**100%**
	9. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	99	99	**100%**
8.	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	30,522	30,522	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	59	59	**100%**
	2. Tensimeter	64	64	**100%**
	3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	121	121	**100%**
	4. Tenaga kesehatan : Dokter	58	58	**100%**
	5. Tenaga kesehatan : Bidan	124	124	**100%**
	6. Tenaga kesehatan : Perawat	144	144	**100%**
	7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	65	65	**100%**
	8. Obat Hipertensi	30,522	30,522	**100%**
9.	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	8,083	8,083	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	1. Alat : Glukometer	47	47	**100%**
	2. Alat : Strip Tes Gula Darah	78,5	78,5	**100%**
	3. Alat : Kapas Alkohol	78,5	78,5	**100%**
	4. Alat : Lancet	78,5	78,5	**100%**
	5. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	113	113	**100%**
	6. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	63	63	**100%**
	7. Tenaga kesehatan : Dokter	54	54	**100%**
	8. Tenaga kesehatan : Bidan	126	126	**100%**
	9. Tenaga kesehatan : Perawat	142	142	**100%**
	10. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	44	44	**100%**
	11. Tenaga Kesehatan Masyarakat	64	64	**100%**
	12. Obat Diabetes Melitus	8,083	8,083	**100%**
10.	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	613	613	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	50	50	**100%**
	2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi	21	21	**100%**
	3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	52	52	**100%**
	4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	33	33	**100%**
	5. Tenaga kesehatan : Dokter	1	1	**100%**
	6. Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	2	2	**100%**
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	1	1	**100%**
11.	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	10,709	10,709	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	141	141	**100%**
	2. Reagen Zn TB	110	110	**100%**
	3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	696	696	**100%**
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen,			
	Ose/Lidi), Rak pengering	5,377	5,377	**100%**
	5. Catridge tes cepat molekuler	1	1	**100%**
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	1,419	1,419	**100%**
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	16	16	**100%**
	8. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	1	1	**100%**
	9. Tenaga kesehatan : Perawat	130	130	**100%**
	10. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	45	45	**100%**
	11. Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	1	1	**100%**
	12. Tenaga kesehatan masyarakat	65	65	**100%**
	13. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	3	3	**100%**
12.	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**			
	A. Jumlah yang harus dilayani	5,498	5,498	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			
	1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	538	538	**100%**
	2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	6,958	6,958	**100%**

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	2,653	2,653	**100%**
	4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	789	789	**100%**
	5. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	40	40	**100%**
	6. Tenaga kesehatan : Perawat	115	115	**100%**
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	111	111	**100%**
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	40	40	**100%**
	9. Tenaga kesehatan masyarakat	65	65	**100%**
	10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	7	7	**100%**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, 2024

Berdasarkan pada tabel di atas masih terdapat beberapa pelayanan kesehatan yang kurang optimal dalam pencapaiannya, hal tersebut disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi standar pemeriksaan kesehatan serta kurangnya beberapa alat kesehatan yang dimiliki Kabupaten Pangandaran. Artinya bila tidak merasakan indikasi adanya gangguan kesehatan, maka jadwal pemeriksaan rutin sering kali tertunda oleh kegiatan lainnya. Pemeriksaan rutin adalah langkah preventif yang dapat membantu mendeteksi dini gangguan kesehatan yang mungkin tidak menunjukkan indikasi awal. Melakukan pemeriksaan rutin secara teratur dapat membantu dalam menjaga kesehatan dan mencegah perkembangan masalah kesehatan yang lebih serius.

Adapun anggaran untuk Pemenuhan SPM di Bidang Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 95 Anggaran SPM pada Urusan Kesehatan Tahun 2023

No.	Pendanaan	Pagu
1	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada PD Teknis	Rp. 4.760.444.330

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

2.2.5.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemenuhan pelayanan dasar di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terdapat pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM). Berikut merupakan pencapaian indikator SPM pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2023:

Tabel 2. 96 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun 2023

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**			**90.54 %**
	A. Jumlah yang harus dilayani	5,537	4,996	**90%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**91.79 %**
	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1,84	1,689	**91.79 %**
	2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	1,84	1,689	**91.79 %**
	3. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	0	0	**0%**
	4. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	0	0	**0%**
2.	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	3,266	3,279	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	1,016	1,049	**103.25 %**
	2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah	1,016	1,049	**103.25 %**

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)			
	3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD- S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	0	0	**0%**
	4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	0	0	**0%**
	5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	0	0	**0%**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Pangandaran, 2023

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa indikator layanan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pencapaiannya masih dibawah 100% yakni penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 90,54%. Hal tersebut dikarenakan kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti saluran pipa air bersih, sumur, atau sistem penyediaan air yang efektif serta faktor geografis atau kondisi lingkungan tertentu, seperti wilayah terpencil dan pegunungan sehingga menyulitkan akses fisik terhadap air bersih. Sedangkan untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah sudah mencapai 100%.

Adapun anggaran untuk Pemenuhan SPM di Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 97 Anggaran SPM pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun 2023

No.	Pendanaan	Pagu
1	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada PD Teknis	Rp. 14.414.956.000

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

2.2.5.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pemenuhan pelayanan dasar di urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM). Berikut merupakan pencapaian indikator SPM pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2023:

Tabel 2. 98 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	92	92	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	**0%**
	2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	92	92	**100%**
	3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	**0%**
	4. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0	0	**0%**
2.	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	0	0	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	**0%**
	2. Subsidi uang sewa	0	0	**0%**
	3. Penyediaan rumah layak huni	0	0	**0%**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Pangandaran, 2023

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota mencapai sebesar 100%. Hal ini dikarenakan semua rumah korban bencana di Kabupaten Pangandaran telah dilakukan rehabilitasi. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah belum adanya data dasar dalam penentuan prioritas pembangunan rumah layak huni dan untuk pelaksanaan penerapan SPM membutuhkan waktu dalam proses pendataan dikarenakan pendataan bukan

hanya dilingkup internal. Hal ini perlu dilakukan koordinasi, sinergi, dan pendataan bersama dengan stake holders terkait.

Adapun anggaran untuk Pemenuhan SPM di Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 99 Anggaran SPM pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

No.	Pendanaan	Pagu
1	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada PD Teknis	Rp. 7.212.948.000

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

2.2.5.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pemenuhan pelayanan dasar di urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdapat pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM). Berikut merupakan pencapaian indikator SPM pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2023:

Tabel 2. 100 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			
1.	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**			**99.72 %**
	A. Jumlah yang harus dilayani	10	10	**100.00 %**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	12	11	**91.67 %**
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat- tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	6	6	**100.00 %**
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	189	189	**100.00 %**

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	1	**100.00 %**
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	1	1	**100.00 %**
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	1	1	**100.00 %**
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			
1.	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**			**100.00 %**
	A. Jumlah yang harus dilayani	3,085	3,085	**100.00 %**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100.00 %**
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	**100.00 %**
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1	1	**100.00 %**
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	3,085	3,085	**100.00 %**
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	52	52	**100.00 %**
2.	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)**			**100.00 %**
	A. Jumlah yang harus dilayani	1,385	1,385	**100.00 %**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100.00 %**
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	132	132	**100.00 %**

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	1,385	1,385	**100.00 %**
3.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)**			**99.96 %**
	A. Jumlah yang harus dilayani	3,67	3,67	**100.00 %**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**99.81 %**
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1	1	**100.00 %**
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	3,67	3,67	**100.00 %**
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	1	1	**100.00 %**
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	1	1	**100.00 %**
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	3,67	3,636	**99.07 %**
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR			
1.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**			**94.35 %**
	A. Jumlah yang harus dilayani	433,091	433,091	**100.00 %**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	1	1	**100.00 %**
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	3	3	**100.00 %**
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil	10	3	**30.00 %**

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)			
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	26	3	**11.54 %**
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	90	85	**94.44 %**
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	90	85	**94.44 %**

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan BPBD Kabupaten Pangandaran, 2024

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian sebagian besar jenis layanan telah mencapai 100%. Ada beberapa indikator yang pencapaiannya masih dibawah 100% yakni Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 99,72%; Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar 99,96%; Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar 94,35%.

Pada jenis layanan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada memang belum dapat dicapai hal ini dikarenakan ketidakjelasan regulasi atau hambatan dalam proses hukum yang menyebabkan keterlambatan atau ketidakpastian dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran tersebut. Sedangkan pada indikator jenis layanan standar operasional prosedur Satpol PP masih belum tercapai 100% dikarenakan kurangnya perencanaan dan pengembangan SOP yang komprehensif.

Adapun anggaran untuk Pemenuhan SPM di Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 101 Anggaran SPM pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No.	Pendanaan	Pagu
1	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada PD Teknis	Rp. 21.696.350.562

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

2.2.5.6 Urusan Sosial

Pemenuhan pelayanan dasar di urusan sosial terdapat pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM). Berikut merupakan pencapaian indikator SPM pada urusan sosial tahun 2023:

Tabel 2. 102 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	90	1447	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	1. Layanan data dan pengaduan	1	1447	**100%**
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	3	4	**100%**
	3. Penyediaan permakanan	20	49	**100%**
	4. Penyediaan sandang	1	1	**100%**
	5. Penyediaan alat bantu	1	5	**100%**
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	147	**100%**
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	5	32	**100%**
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	5	5	**100%**
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu kependudukan	1	1	**100%**
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan	1	145	**100%**

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan			
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	4	**100%**
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	4	**100%**
	13. Layanan rujukan	1	5	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			**80%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	71	128	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	1. Layanan data dan pengaduan	1	128	**100%**
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	1	3	**100%**
	3. Penyediaan permakanan	1	2	**100%**
	4. Penyediaan sandang	1	1	**100%**
	5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	1	6	**100%**
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	24	37	**100%**
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	3	5	**100%**
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	**100%**
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	35	**100%**
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	**100%**
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	**100%**
	12. Layanan rujukan	1	2	**100%**
3.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	100	3444	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	1. Layanan data dan pengaduan	100	3444	**100%**
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2	2	**100%**
	3. Penyediaan permakanan	285	1770	**100%**
	4. Penyediaan sandang	1	1	**100%**
	5. Penyediaan alat bantu	3	7	**100%**
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	56	**100%**
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	5	1770	**100%**
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	15	1770	**100%**
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	1	29	**100%**
	10. Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	1	56	**100%**
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	**100%**
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	**100%**
	13. Layanan rujukan	1	1	**100%**
4.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	10	14	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	1. Layanan data dan pengaduan	10	14	**100%**
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	3	3	**100%**
	3. Penyediaan permakanan	5	6	**100%**
	4. Penyediaan sandang	1	1	**100%**
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	**100%**
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	7	7	**100%**
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga	7	7	**100%**

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	gelandangan dan pengemis			
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	2	2	**100%**
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	**100%**
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	**100%**
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	**100%**
	12. Layanan rujukan	2	2	**100%**
5.	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**			**100%**
	A. Jumlah yang harus dilayani	1	125	**100%**
	B. Jumlah Mutu / Barang / Jasa / SDM			**100%**
	1. Penyediaan permakanan	1	29	**100%**
	2. Penyediaan sandang	1	81	**100%**
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	**100%**
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	1	129	**100%**
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	1	129	**100%**

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, 2024

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian SPM urusan Sosial Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan yakni sebesar 100%. Hal ini dikarenakan tersedianya sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur, dan fasilitas yang memadai serta kapasitas para tenaga profesional yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.

Adapun anggaran untuk Pemenuhan SPM di Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 103 Anggaran SPM pada Urusan Sosial Tahun 2023

No.	Pendanaan	Pagu
1	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada PD Teknis	Rp. 4.061.256.690

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan diperoleh dari hasil analisis gambaran umum daerah dan analisis capaian kinerja daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang sudah direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah biasanya muncul dari keunggulan yang belum dipergunakan secara optimal dan kekurangan yang tidak di atasi untuk mencapai peluang yang muncul dan meminimalisasi hambatan yang terjadi. Pengoptimalan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, akan membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang keunggulan, kekurangan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan juga dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan yang diampu. Hal tersebut mempunyai tujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang agar didapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dapat dipecahkan,. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan menjadi pemicu permasalahan pembangunan daerah. Selain itu kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat juga dapat berpengaruh pada munculnya pembangunan daerah. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory.

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang sudah direncanakan, kemudian permasalahan tersebut dapat dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 104 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya pertumbuhan PDRB	1. Belum optimalnya pengelolaan dan penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Belum optimalnya kemampuan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah 2. Beberapa jenis retribusi belum terbentuk perdanya 3. Belum adanya pelayanan pajak dan retribusi berbasis elektronik 4. Belum optimalnya kemampuan aparatur pelayanan pajak dan retribusi daerah
		2. Aktivitas perekonomian di Kabupaten Pangandaran masih rendah	1. Masih rendahnya produktivitas pendapatan masyarakat 2. Rendahnya Pendapatan masyarakat, menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga keinginan untuk melakukan konsumsi menurun 3. Rendahnya permintaan barang dan jasa dari kabupaten Pangandaran 4. UMKM masih memiliki permasalahan pada permodalan dan pemasaran 5. Kabupaten pangandaran belum memiliki rumah kemasan (sentra UMKM)
		3. Masih rendahnya investor yang berinvestasi di wilayah Kabupaten Pangandaran	1. Belum optimalnya pemberian kemudahan perizinan investasi 2. Kurangnya sinergi antar perangkat daerah 3. Belum optimalnya promosi dan perizinan
		4. Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan belum maksimal	1. Keterampilan Tenaga kerja belum optimal 2. Belum adanya BLK
		5. Kontribusi sektor pertanian sebagai sektor yang menyumbang kontribusi tertinggi terhadap PDRB trend pertumbuhannya cenderung menurun yakni sebesar 21% pada tahun 2021 menjadi sebesar 13% pada tahun 2023	1. Belum optimalnya pengolahan hasil bumi yakni pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan 2. Penurunan luas lahan pada tahun 2023 yakni menjadi sebesar 16.727 Ha dimana pada tahun 2021 sebesar 16.747 Ha. 3. Penurunan produktivitas jagung pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,68 ton/ha, dimana pada tahun 2021 sebesar 6,45 ton/ha 4. Penurunan produksi sub sektor peternakan 5. Penurunan produksivitas padi/bahan pangan utama lainnya per hektar dibandingkan tahun 2020 yakni sebesar 6,3 ton sedangkan pada tahun 2023 sebesar 6,24 ton

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		6. Komposisi PDRB untuk sektor penyedia akomodasi dan makan minum belum menyumbang kontribusi tinggi padahal sektor ini yang di dalamnya ada kegiatan pariwisata merupakan sektor unggulan Kabupaten Pangandaran	1. Pemilik hotel dan restoran didominasi oleh penduduk yang berasal dari luar Kabupaten Pangandaran 2. Belum optimalnya promosi sektor pendukung pariwisata 3. Belum optimalnya pengembangan potensi wisata 4. Belum optimalnya infrastruktur pendukung perekonomian seperti jalan usaha tani, dan infrastruktur menuju destinasi wisata 5. Belum optimalnya aksesibilitas menuju Pangandaran
		7. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pangandaran tiap Tahun cenderung meningkat akan tetapi pertumbuhan rata-rata masih di bawah pertumbuhan PDRB Provinsi	1. Industri pengolahan yang berada di Kabupaten Pangandaran belum memberikan nilai tambah yang tinggi, 2. Belum optimalnya penggunaan produk lokal untuk kegiatan perekonomian di Kabupaten Pangandaran.
2.	Masih rendahnya PDRB per kapita	1. Pendapatan masyarakat yang masih rendah.	1. Standar hidup dari sebagian besar penduduknya cenderung sangat rendah 2. Tingkat pendapatan yang rendah 3. Tingkat kemiskinan penduduk yang tinggi
		2. Kurangnya produk daerah untuk ekspor	1. Masih rendahnya produksi dalam daerah
		3. PDRB per kapita Kabupaten Pangandaran masih rendah jika dibandingkan PDRB Provinsi Jawa Barat maupun PDRB per Kapita Nasional	1. Aktivitas perekonomian di Kabupaten Pangandaran masih rendah 2. Kurang optimalnya peningkatan produktivitas sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
3.	Masih adanya prevalensi balita kurang gizi	Masih ditemukannya kasus *stunting* di Kabupaten Pangandaran	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat, 2. Kurangnya SDM kesehatan, 3. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, 4. Masih rendahnya program-program Promotif dan preventif mengenai perilaku sehat.
4.	Persentase PAD terhadap pendapatan belum signifikan	Belum optimalnya pengelolaan potensi PAD,	1. Belum optimalnya kemampuan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah 2. Beberapa jenis retribusi belum terbentuk perdanya, 3. Belum adanya pelayanan pajak dan retribusi berbasis elektronik 4. Belum optimalnya kemampuan aparatur pelayanan pajak dan retribusi daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			5. Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah 6. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah 7. Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah.
5.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB masih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat/Kabupaten sekitar, seperti Kab. Ciamis	Terjadi proses transformasi perekonomian nasional, yang tadinya lebih didominasi oleh nilai komoditas primer hasil produksi sektor pertanian dalam arti sempit, bergeser ke arah dominasi sektor dan atau sub sektor lainnya.	1. Sulitnya sektor pertanian akses kredit ke perbankan, juga akses ke pasar, dan beberapa masalah internal di sektor pertanian itu sendiri seperti rendahnya kualitas SDM dan teknologi 2. Kurangnya minat pemuda untuk menjadi petani sebagai profesi dan mata pencaharian sehari-hari 3. Berkurangnya lahan persawahan yang diakibatkan adanya pembangunan infrastruktur dan permukiman yang tidak terkendali
6.	RLS masih rendah	RLS masih rendah berdasarkan data tahun 2023 sebesar 8,04.	1. Belum ada intervensi pemerintah daerah untuk program kesetaraan pendidikan untuk penduduk di atas usia 25 tahun/pendidikan non formal 2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan khususnya penduduk yang usianya sudah melampaui usia sekolah 3. Kurangnya sarana prasarana serta lembaga pendidikan non formal
7.	Tidak adanya Nilai Tukar Petani sebagai tolok ukur kesejahteraan Petani	Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan petani	1. Masih rendahnya pendapatan petani 2. Belum adanya fasilitas/pusat pemasaran produk pertanian yang representatif 3. Perlu adanya peningkatan life skills terhadap pelaku usaha dan UMKM
8.	Masih rendahnya Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar	Masih rendahnya jumlah guru yang mengajar pada tingkat SD/MI yakni sebesar 12,60:1 dan SMP/MTs sebesar 11,38:1 pada tahun 2022, sedangkan standar berdasarkan PP No.74 Tahun 2008 tentang guru untuk TK sederajat 15: 1, SD sederajat: 21: 1, MI sederajat 15: 1, SMP sederajat 20: 1, MTS sederajat 1: 1	1. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga pengajar untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs belum optimal 2. Banyaknya tenaga pendidik yang sudah dan akan pensiun 3. Kuota penerimaan tenaga pendidik di Kabupaten Pangandaran sedikit

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
9.	Masih rendahnya Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Masih rendahnya jumlah guru yang memiliki ijazah S1/D-IV baru mencapai 4.171 tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 4.349, sedangkan pada UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan setiap guru wajib memenuhi kualifikasi S1/D-IV	1. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga pengajar belum optimal 2. Banyaknya tenaga pendidik yang sudah dan akan pensiun 3. Kuota penerimaan tenaga pendidik di Kabupaten Pangandaran sedikit
10.	Masih Adanya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1. Jumlah SDM tenaga kesehatan tidak sesuai rasio, dimana, ketersediaan tenaga kesehatan per 100.000 penduduk yang diharapkan berdasarkan dokumen Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025 Kemenkes RI untuk tenaga dokter spesialis 24, dokter umum 96, sedangkan di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 jumlah dokter spesialis sebanyak 20 dan dokter umum sebanyak 63.	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
		2. Masih ada penyandang gizi buruk yang berpotensi menjadi penyebab kematian pada bayi saat lahir.	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat 3. Masih kurangnya program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat
		3. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 mencapai angka 6,25 yang menunjukkan masih tingginya Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	1. Aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan di beberapa daerah masih sangat sulit dijangkau 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat dan bersih
11.	Masih adanya Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (71,42% pada tahun 2022)	1. Jumlah SDM tenaga kesehatan tidak sesuai rasio terutama untuk tenaga dokter spesialis dan dokter umum dimana rasio dokter Kabupaten Pangandaran 19 per 100.000 penduduk	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	
		2. Masih ada penyandang gizi buruk yang berpotensi mengalami komplikasi ketika proses melahirkan	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat 2. Masih kurangnya program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat 3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
		3. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Pangandaran mencapai angka 71,42 pada tahun 2022 yang menunjukkan terjadinya kenaikan dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 49,39 per 100.000 kelahiran hidup	1. Aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan di beberapa daerah masih sangat sulit dijangkau 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat dan bersih
12.	Masih adanya Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (6,25 pada tahun 2022)	1. Jumlah SDM tenaga kesehatan tidak sesuai rasio terutama untuk tenaga dokter spesialis dan dokter umum dimana rasio dokter Kabupaten Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
		2. masih ada penyandang gizi buruk yang berpotensi menjadi penyebab kematian pada bayi saat lahir.	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat 2. Masih kurangnya program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat 3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
		3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat	1. Aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan di beberapa daerah masih sangat sulit dijangkau 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat dan bersih
13.	Masih rendahnya Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	Rasio rumah sakit di Kabupaten Pangandaran hanya tersedia 1: 436.748 pada tahun 2022	1. Ketersediaan sarana prasarana kesehatan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat belum optimal 2.

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			Minimnya lahan 3. Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran
14.	Masih rendahnya Rasio dokter per seratus ribu penduduk	Kurangnya dokter untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
15.	Masih adanya kasus Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Gizi Buruk	1. Kurangnya tenaga dokter untuk mengakomodasi, dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
		2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat	1. Masih kurangnya program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
16.	Masih tingginya angka kesakitan tuberculosis yakni sebesar 683 pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 387	1. Kurangnya tenaga dokter serta minim edukasi untuk mengakomodasi penanganan penderita Tuberkulosis BTA dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
		2. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat	1. Masih kurangnya program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
17.	Masih tingginya tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk).	1. Kurangnya tenaga dokter serta minim edukasi untuk mengakomodasi penanganan penderita prevalensi	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	(Pada tahun 2022 sebanyak 5.902 orang terduga tuberkulosis)	Tuberkulosis dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
		2. Kabupaten Pangandaran masih menjadi salah satu kabupaten penyumbang angka prevalensi TB Nasional, sedangkan penanggulangan TB menjadi salah satu program strategis nasional yang perlu didukung oleh pemerintah tingkat daerah.	1. Masih kurangnya program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
18.	Masih rendahnya Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	1. Kurangnya Jumlah tenaga kesehatan masih belum sesuai rasio dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
		2. Masih ada penyandang gizi buruk yang berpotensi tinggi tertular virus TB	1. Kurangnya sosialisasi tentang penyakit yang berbahaya 2. Kurangnya Fasilitas kesehatan yang khusus untuk Tuberkulosis 3. Kurangnya sarana dan prasarana khusus untuk penanganan Tuberkulosis
19.	Masih rendahnya proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	1. Kurangnya tenaga dokter untuk mengobati Tuberkulosis dalam program DOTS dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
		2. Masih ada penyandang gizi buruk yang berpotensi tinggi tertular virus TB	1. Kurangnya sosialisasi tentang penyakit yang berbahaya 2. Kurangnya Fasilitas kesehatan yang khusus untuk

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			Tuberkulosis 3. Kurangnya sarana dan prasarana khusus untuk penanganan Tuberkulosis
20.	Masih tingginya kasus diare (pada tahun 2022 sebanyak 3698 orang)	1. Kurangnya tenaga serta sarana penunjang untuk dokter dalam menangani diare dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
		2. Masih Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Masih kurangnya program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
21.	Masih adanya prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (0,57% pada tahun 2022)	1. Masyarakat belum memahami tentang prevalensi HIV/AIDS dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
		2. Kabupaten Pangandaran perlu melakukan penanggulangan guna mendorong capaian HIV/AIDS di Tingkat Provinsi maupun Nasional	1. Masih kurangnya program-program Promotif dan preventif mengenai HIV/AIDS 2. Sosialisasi mengenai prevalensi HIV/AIDS kurang optimal 3. Edukasi tidak optimal dilakukan oleh institusi terkait
22.	Masih rendahnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (66,67% pada tahun 2022)	1. Kurangnya tenaga kesehatan serta sarana penunjang untuk dokter dalam menangani kasus neonatus dengan komplikasi dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		2. Rendahnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani akan berpengaruh pada angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1. Masih kurangnya program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
23.	Persentase ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Adanya penurunan Persentase ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil pada tahun 2022 yakni menjadi sebesar 88,6% dibandingkan tahun 2021 dimana sebesar 100%	1. Jumlah tenaga kesehatan yang menangani belum sesuai
24.	SPM Kesehatan	Konsistensi pencapaian perlu tetap dipertahankan	1. Konsistensi pencapaian target 12 indikator SPM kesehatan
25.	Rendahnya Indeks Risiko Sanitasi (pada tahun 2022 masih sebesar 32)	1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah	1. Kurangnya sosialisasi pola hidup bersih
		2. Tingkat kekumuhan perumahan masih tinggi	1. Fasilitas MCK belum menjadi kebutuhan utama 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas MCK
		3. Jaringan air bersih belum menjadi prioritas ke pemukiman kumuh	1. Belum optimalnya penataan kawasan permukiman
		4. Tidak adanya data awal perhitungan	1. Tidak adanya kegiatan untuk melakukan pendataan awal pada jumlah rumah dan rumah tinggal
26.	Masih terjadinya genangan >2 kali dalam 1 tahun	1. Tidak tersedia gorong-gorong yang cukup untuk menampung air hujan	1. Sistem drainase yang kurang baik
		2. Tingkat Kesadaran Masyarakat masih rendah sering membuang sampah, dan terjadi pengendapan	1. Minimnya sosialisasi ramah lingkungan
		3. Tidak adanya data awal perhitungan	1. Tidak adanya kegiatan untuk melakukan pendataan awal pada jumlah rumah dan rumah tinggal
27.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	1. Masih rendahnya luas areal irigasi	1. Sistem operasi dan pemeliharaan irigasi yang kurang baik
28.	Rasio Jaringan Irigasi belum optimal	1. Masih rendahnya rasio jaringan irigasi	1. Terbatasnya lahan

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		2. Masih kurangnya pengertian/pemahaman tentang penghitungan rasio jaringan irigasi	2. Tidak adanya data ideal panjang irigasi yang dibutuhkan untuk mengairi luasan daerah pertanian
29.	Persentase penduduk berakses air minum belum optimal (64% pada tahun 2022)	Masih rendahnya jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum	1. Langkanya air akibat tekanan kebutuhan penduduk 2. Terjadinya degradasi wilayah tangkapan air di bagian hulu 3. Tidak adanya data awal perhitungan
30.	Ketaatan terhadap RTRW belum optimal, berdasarkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 36,19%	Tingkat penindakan hukum/sanksi yang kurang tegas dalam implementasi kebijakan, bagi para pelanggar	1. Koordinasi antar SKPD masih rendah 2. Tingkat sosialisasi belum maksimal kepada masyarakat
31.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (6,27% pada tahun 2022)	1. Kurangnya perhatian dan pembinaan pemerintah kabupaten terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial	1. Minimnya sarana penunjang dan pembinaan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial
		2. Belum tersedianya data yang akurat terkait dengan data penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	1. Terbatasnya Bidang pada SKPD dan SDM yang menangani masalah sosial 2. Masih belum memadainya jumlah SDM serta sarana prasarana yang berhubungan dengan pengelolaan data dan pengarsipan
32.	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial	Konsistensi pencapaian perlu tetap pertahankan	1. Masih diperlukannya pelaksanaan program-program terkait Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan social agar pencapaian pada tahun-tahun berikutnya tetap tercapai.
33.	Masih rendahnya Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (15,13% pada tahun 2022)	1. Masih kurangnya pelatihan berbasis kompetensi	1. Minimnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Pangandaran. 2. Masih rendahnya tingkat keterampilan tenaga kerja.
		2. Pemerintah Daerah belum memiliki Balai Latihan Kerja.	1. Pembangunan Balai Latihan Kerja belum terealisasi
34.	Masih rendahnya Rasio penduduk yang bekerja (pada tahun 2022 sebesar 78,67%)	1. Lapangan pekerjaan Kabupaten Pangandaran masih rendah	1. Sosialisasi mengenai lowongan pekerjaan
		2. Mayoritas masyarakat lebih memilih bekerja setelah lulus SMA/SMK sederajat	1. Upaya untuk meningkatkan motivasi lapangan pekerjaan

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
35.	Masih adanya Pekerja Migran Indonesia Ilegal asal Kab. Pangandaran	1. Pekerja migran ilegal pada umumnya tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah	1. Belum optimalnya pendataan dan pemeriksaan serta deteksi dini terhadap masyarakat yang berencana menjadi pekerja migran ilegal
		2. Sulitnya Proses Pemulangan PMI Ilegal yang mengalami PHK atau meninggal dunia ke tanah air	1. Pendataan pekerja migran ilegal masih sulit dilakukan
		3. Masih ada anggapan dari pencari tenaga kerja bahwa menjadi PMI Ilegal lebih mudah dan murah.	1. Belum optimalnya sosialisasi dari pemerintah mengenai Pekerja Migran Indonesia Ilegal 2. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai risiko menjadi PMI Ilegal
36.	Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (pada tahun 2022 sebesar 76,09)	Rendahnya partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan dari perempuan	1. Masih rendahnya tingkat kesetaraan gender 2. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan sehingga mempengaruhi pada kualitas dan kuantitas perempuan di lembaga pemerintahan
37.	Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan	Masih belum optimalnya kesetaraan upah antara perempuan dan laki-laki	Belum optimalnya pemberdayaan perempuan sehingga mempengaruhi pada kualitas dan kuantitas perempuan
38.	Masih rendahnya angka kecukupan protein per kapita (pada tahun 2022 sebesar 64,8 gram/kap.hari)	1. Tingkat daya beli masyarakat rendah	1. Terbatasnya sumber daya daerah 2. Masih rendahnya pendapatan masyarakat
		2. Target ketersediaan protein masih belum tercapai	1. Konsumsi masyarakat atas bahan pokok pengganti nasi masih belum beragam
39.	Masih rendahnya persentase luas lahan bersertifikat	Masih adanya masyarakat yang belum memiliki kelengkapan administrasi pertanahan	1. Masih rendahnya sosialisasi mengenai pertanahan dari pemerintah 2. Tingkat sosialisasi yang rendah/tidak maksimal mengenai pertanahan
40.	Belum lengkapnya RPPLH kabupaten/kota	Perhatian dinas teknis terhadap penyediaan data untuk dokumen KLHS belum optimal	1. Terbatasnya SDM 2. Penyediaan data untuk dokumen KLHS belum optimal
41.	Penyelenggaraan KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten belum optimal	1. Jumlah SDM di bidang lingkungan hidup masih kurang	1. Terbatasnya SDM
		2. KLHS RDTR dan dokumen yang berkaitan dengan tata ruang kurang maksimal dalam prosesnya	2. Proses penyusunan KLHS RDTR dan dokumen yang berkaitan dengan tata ruang belum optimal
42	Masih Rendahnya Indeks kualitas Air (50 pada tahun 2022)	1. Kawasan yang sangat potensial sebagai tempat cadangan penyimpanan air kurang mendapat perhatian	1. Belum adanya Pengelolaan Kawasan

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		2. Pengelolaan limbah masih rendah	1. Sosialisasi ramah lingkungan masih rendah 2. Belum tersedianya sarana dan prasarana IPLT 3. Belum adanya perda
		3. Belum tersedianya sarana laboratorium lingkungan	1. Belum tersedianya alat/sarana dan prasarana 2. SDM belum tersedia
43.	Masih kecilnya Indeks kualitas Tutupan Lahan (38,21 pada tahun 2022)	Masih banyaknya lahan kritis	1. Rehabilitasi pada kawasan lindung belum optimal 2. Rendahnya perhatian dan kesadaran masyarakat untuk memelihara lahan serta melakukan reboisasi 3. Belum optimalnya sosialisasi
44.	Masih minim penghargaan lingkungan hidup yang didapat	1. Masih rendahnya jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat	1. Minimnya sosialisasi ramah lingkungan pada masyarakat
		2. Rendahnya Rasio RTH	1. Penegakan kebijakan terkait lingkungan belum optimal 2. Pengembangan dan perizinan tidak memperhatikan RTH yang 30% 3. Masih rendahnya pendataan untuk penetapan hutan kota pada tiap kecamatan dan penetapan taman
		3. Perlu peningkatan pada indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan sebagai upaya peningkatan KLH di pemdes	1. Kurangnya SDM dan sarana prasarana untuk melakukan pengujian
		4. Masih rendahnya pendataan program kampung iklim	1. Belum adanya sosialisasi mengenai kampung iklim kepada masyarakat
45.	Masih minimnya timbunan sampah yang ditangani	Masih rendahnya tingkat penanganan sampah (28,66% tahun 2022)	1. Terbatasnya lahan
			2. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan timbunan sampah serta terbatasnya SDM
46.	Masih rendahnya persentase jumlah sampah yang ter kurangi melalui 3R	Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap data dan informasi penanganan sampah	1. Terbatasnya sarana penghimpun data dan informasi
47.	Masih rendahnya volume sampah yang ditangani	Masih rendahnya tingkat penanganan sampah (28,66% tahun 2022)	1. Tidak adanya TPA
			2. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan sampah serta terbatasnya SDM
48.	Sulitnya melaksanakan Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Belum tersedianya TPA/TPST/SPA	1. Terbatasnya lahan 2. Terbatasnya sarana dan prasarana 3. Terbatasnya SDM

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
49.	Menurunnya Cakupan Penerbitan KTP elektronik (pada tahun 2022 sebesar 98,35, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 99,17%	1. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk perekaman e-KTP masih terbatas	1. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan perekaman e-KTP melalui pelayanan *mobile* masih terbatas
		2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya KTP
50.	Masih rendahnya bayi ber-akte kelahiran (pada tahun 2022 sebesar 75,31%)	1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pembuatan akte kelahiran	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya akta kelahiran.
		2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan	1. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan *mobile* masih terbatas 2. Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akte kelahiran masih perlu ditingkatkan
51.	Masih kurangnya pasangan berakte nikah (pada tahun 2022 sebesar 63,86%)	1. Kurang optimal nya dinas terkait dalam sosialisasi teknis karena adanya permasalahan dari faktor eksternal	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya akta nikah/buku nikah.
		2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi masih perlu ditingkatkan	1. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan *mobile* masih terbatas 2. Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akta nikah/buku nikah masih perlu ditingkatkan
52.	Rendahnya penerbitan Kartu Keluarga (pada tahun 2022 sebesar 93,85%, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 98,2%)	1. Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap *database* kependudukan	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya KK 2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi *database*
		2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang menangani pembuatan KK	1. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan *mobile* masih terbatas 2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan
53	Rendahnya penerbitan kartu identitas anak (pada tahun 2022 sebesar 51,97%)	1. Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap *database* kependudukan	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya kartu identitas anak 2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi *database* 3. Pemahaman dan keterampilan petugas pelayanan terhadap penerapan Peraturan Mendagri Nomor 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran belum optimal

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan	1. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan *mobile* masih terbatas 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang menangani pembuatan KIA
54.	Kurangnya kelompok binaan PKK	Masih rendahnya jumlah kelompok binaan PKK (104 tahun 2022)	1. Rendahnya sosialisasi dari pemerintah 2. Rendahnya partisipasi masyarakat
55.	Masih rendahnya Rasio Akseptor KB (70,31% pada tahun 2022)	1. Perhatian dinas teknis terhadap KB belum optimal	1. Sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana kepada masyarakat belum optimal 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM penyuluh KB
		2. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program KB	1. Program Konseling mengenai KB belum optimal
		3. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan	1. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum optimal
56.	Masih rendahnya cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) (19,7% pada tahun 2022)	1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi *database* PUS	1. Sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana kepada masyarakat belum optimal
		2. Program Konseling mengenai KB belum optimal	1. Terbatasnya SDM
		3. Rendahnya keinginan masyarakat untuk menggunakan alat Kontrasepsi	1. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum optimal 2. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan
57.	Kurangnya Rasio izin trayek (0,0002 pada tahun 2022)	1. Rendahnya perhatian dinas teknis	1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi *database* 2. Terbatasnya SDM
		2. Berkurangnya jumlah pengusaha angkutan	1. Jumlah sebaran penduduk di Kabupaten Pangandaran masih belum merata 2. Rendahnya sosialisasi pihak terkait kepada masyarakat 3. Belum adanya dokumen kajian transportasi daerah
58.	Rendahnya Jumlah uji kir angkutan umum	1. Masih rendahnya pengujian kir terhadap angkutan umum	1. Terbatasnya lahan 2. Terbatasnya SDM dan Peralatan 3. Rendahnya sosialisasi pihak terkait
		2. Masih minimnya fasilitas uji kir	1. Belum tersedianya sarana dan prasarana uji kendaraan
59.	Minimnya kualitas Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (3 jumlah	1. Rendahnya perhatian dinas teknis	1. Terbatasnya lahan 2. Terbatasnya SDM
		2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi *database*	1. Rendahnya minat masyarakat terhadap jasa angkutan umum

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	terminal, 1 jumlah pelabuhan, 1 jumlah bandara)	3. Penentuan lokasi strategis untuk terminal tipe A harus berdasarkan kajian	1. Perlu dilakukan pemindahan terminal Pangandaran ke Cijulang
60.	Kurangnya jumlah angkutan darat (pada tahun 2022 sebanyak 2.665)	1. Rendahnya perhatian dinas teknis	1. Dominasi kendaraan pribadi 2. Terbatasnya SDM
		2. Kondisi layanan angkutan yang kurang baik	1. Perlu dilakukan pembukaan angkutan perdesaan ke wilayah-wilayah kecamatan 2. Ruas jalan Kabupaten yang sebagian besar masih kecil 3. Perlu adanya kajian transportasi
61.	Kurangnya pemasangan Rambu-rambu (1.380 pada tahun 2018 – 2022)	Masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas	1. Pemasangan rambu lalu lintas, papan informasi, rambu evakuasi, serta alat-alat sistem informasi peringatan dini belum optimal 2. Kurangnya papan Informasi maupun rambu Evakuasi ataupun alat-alat Early Warning Sistem Informasi
62.	Kurangnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	1. Masih rendahnya pelatihan penggunaan teknologi dan informasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	1. Rendahnya sosialisasi kepada masyarakat 2. Rendahnya minat masyarakat
		2. Penyebarluasan informasi publik belum optimal	1. Rendahnya SDM 2. Sarana prasarana belum memadai
63.	Rendahnya Indeks SPBE (pada tahun 2022 sebesar 2,82)	1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wisata, perekonomian, dan pemerintahan.	1. Terbatasnya peralatan dan SDM
		2. Implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum berjalan secara efektif	1. Sarana prasarana infrastruktur belum memadai 2. Komitmen yang masih rendah dari pihak terkait mengenai implementasi SPBE
64.	Rendahnya persentase koperasi aktif	1. Masih rendahnya kaderisasi generasi muda sebagai pengurus koperasi,	1. Optimalisasi sosialisasi
		2. Masih rendahnya koperasi yg bergerak di sektor riil	2. Adanya persyaratan pembubaran yang belum terpenuhi terkait dengan LPDB
		3. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif	3. Belum terbentuknya tim pembubaran koperasi dan SDM yang mumpuni
65.	Masih perlu peningkatan pada persentase UMKM	1. Potensi UMKM sebagai muatan lokal belum terpetakan	1. Kajian pemetaan UMKM belum tersedia 2. Belum ada formulasi untuk menghitung jumlah peningkatan presentasi kewirausahaan mikro dibagi jumlah penduduk

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			3. Belum ada produk hukum yang memfasilitasi UMKM untuk memasarkan produknya.
		2. Minimnya UMKM yang memiliki hak izin dan edar	1. Belum ada unit kerja khusus untuk memfasilitasi UMKM mendapatkan haki
		3. Terhambatnya promosi produk UMKM	1. Belum optimalnya pemasaran produk UMKM 2. Masih rendahnya pemberdayaan SDM UMKM
		4. Belum tersedianya display/ruang promosi untuk ajang promosi UMKM bagi wisatawan	1. Terbatasnya sarana dan lahan 2. Belum tersedia alat uji laboratorium bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan izin edar di Kabupaten Pangandaran 3. SDM dan sarana prasarana untuk rumah kemasan masih terbatas
66.	Minimnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (pada tahun 2022 data masih NA sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 1.050. pada tahun 2020 sebanyak 2.124)	1. Masih rendahnya jumlah investor	1. Daya tarik Kabupaten Pangandaran sebagai lokasi investasi masih kurang
		2. Belum adanya RUPM dan kajian investasi untuk setiap sektor	2. Masih tertundanya RDTR
67.	Minimnya jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (1.781,4 M pada tahun 2022)	1. Masih rendahnya nilai investasi	1. Masih terbatasnya investor
		2. Belum adanya RUPM dan kajian investasi untuk setiap sektor	2. Masih tertundanya RDTR
68.	Minimnya rasio daya serap tenaga kerja	1. Masih rendahnya rasio daya serap tenaga kerja	1. Masih rendahnya *skill* Masyarakat 2. Masih kurangnya pelatihan kerja
		2. Belum adanya sarana untuk pelatihan (BLK)	1. Tidak adanya sarana penunjang
69.	Minimnya kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)	1. Rendahnya perhatian dinas teknis	1. Minimnya investor
		2. Kurangnya event yang mampu menarik investasi	2. Event pameran dengan tujuan menarik dan mendapatkan investor belum dapat dilaksanakan secara maksimal
70.	Rendahnya tingkat pembangunan terhadap Kepemudaan dan Olah Raga (146 jumlah klub olahraga pada tahun 2022)	1. Masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap kepemudaan	1. Terbatasnya kuantitas SDM pembina dan pengelola bakat, minat pemuda
		2. Rendahnya pembinaan terhadap atlet potensial	1. Bidang Kepemudaan dan Olahraga masih bernaung di bawah SKPD Disdikpora
		3. Minimnya ruang bagi pemuda dan kaum milenial untuk mengekspresikan	1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung 2. Rendahnya akses pemuda dalam kewirausahaan

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		ide-ide dan juga ikut berpartisipasi dalam upaya pembangunan daerah	
71.	Rendahnya kualitas sistem data dan statistik yang terintegrasi	Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi *database*	1. Terbatasnya SDM
			2. Fungsi statistik belum diimplementasikan secara optimal
72.	Data dalam buku kabupaten dalam angka tidak lengkap	1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi *database*	1. Terbatasnya SDM 2. Kurangnya pengetahuan terkait data yang harus dilengkapi oleh masing-masing perangkat daerah
		2. Terbatasnya SDM	1. Implementasi belum optimal
73.	Data dalam buku ”PDRB” tidak lengkap	1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi *database*	1. Terbatasnya SDM
		2. Terbatasnya SDM	1. Implementasi belum optimal
74.	Pengamanan Sistem Informasi	Pengamanan sistem informasi belum tersertifikasi	1. Terbatasnya jumlah SDM
			2. Ketersediaan infrastruktur masih terbatas
			3. Belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang pengamanan informasi di seluruh daerah
75.	Belum maksimalnya intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya (14 festival seni dan budaya pada tahun 2022)	Belum optimalnya pelaksanaan festival seni dan budaya	1. Belum semua festival seni dan budaya terselenggara 2. Terbatasnya SDM 3. Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dimasukan ke dalam *database* adalah festival yang mendapatkan pendanaan dari dinas
76.	Belum optimalnya benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (159 pada tahun 2022)	Kajian tentang penetapan cagar budaya belum ada/belum disusun	1. Terbatasnya SDM yang mampu mengoptimalkan potensi benda peninggalan dan situs budaya
77.	Belum optimalnya jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (11 pada tahun 2022)	Belum tersedianya pusat budaya	1. Terbatasnya SDM 2. Kajian dan landasan hukum tentang inventarisasi karya budaya belum ada/belum disusun 3. Belum adanya ruang khusus untuk menampilkan karya budaya
78.	Belum optimalnya jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (26 pada tahun 2019)	Belum optimalnya perhatian dinas teknis terhadap cagar budaya	1. Terbatasnya SDM 2. Belum adanya pendataan secara spesifik terkait cagar budaya yang ada di Kabupaten Pangandaran
79.		1. Kurangnya minat baca	1. Rendahnya perhatian dinas teknis 2. Terbatasnya SDM

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2. Belum adanya PERBUP atau PERDA terkait bidang perpustakaan	1. Belum adanya payung hukum dari pimpinan daerah yang menangani urusan perpustakaan
80.	Rendahnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Belum adanya payung hukum dari pimpinan daerah yang menangani urusan perpustakaan	1. Rendahnya perhatian dinas teknis 2. Terbatasnya SDM 3. Belum adanya Perbup atau Perda terkait bidang perpustakaa
81.	Minimnya rasio perpustakaan persatuan penduduk	1. Kurangnya minat baca	1. Rendahnya perhatian dinas teknis 2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi *database*
		2. Belum adanya pembinaan terkait bidang perpustakaan	1. Kurangnya jumlah SDM (Pustakawan)
		3. Belum adanya Perbup atau Perda terkait bidang perpustakaan	1. Belum adanya payung hukum dari pimpinan daerah yang menangani urusan perpustakaan
82.	Rendahnya jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (14.740 pada tahun 2022)	1. Rendahnya minat baca masyarakat	1. Kurangnya sosialisasi 2. Rendahnya perhatian dinas teknis 3. Terbatasnya event yang berkaitan dengan perpustakaan
		2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi *database*	1. Adanya sumber informasi dan hiburan lain selain perpustakaan
		3. Belum adanya pembinaan terkait bidang perpustakaan	1. Kurangnya jumlah SDM (Pustakawan)
		4. Belum adanya Perbup atau Perda terkait bidang perpustakaan	1. Belum adanya payung hukum dari pimpinan daerah yang menangani urusan perpustakaan
83.	Rendahnya jumlah koleksi judul buku perpustakaan (23.036 pada tahun 2022)	Rendahnya perhatian dinas teknis	1. Kurangnya jumlah SDM (Pustakawan) 2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi *database* 3. Terhambatnya proses pemilihan dan pengadaan koleksi buku berstandar nasional
84.	Rendahnya jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	1. Rendahnya perhatian dinas teknis	1. Rendahnya tingkat penyelenggaraan pelatihan
		2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi *database*	1. Kebutuhan penerimaan CPNS formasi pustakawan 2. Kebutuhan adanya instansi dan lembaga pendidikan di bidang perpustakaan
85.	Rendahnya persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (18% pada tahun 2022)	Belum Maksimalnya pengelolaan arsip	1. Terbatasnya SDM 2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi *database* 3. Rendahnya perhatian dinas teknis
86.	Kurangnya peningkatan SDM pengelola kearsipan (0 kegiatan pada tahun 2022)	1. Rendahnya perhatian dinas teknis	1. Terbatasnya SDM 2. Kurangnya keahlian SDM dalam mengelola arsip

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi *database*	1. Belum adanya tenaga arsiparis yang berstatus sebagai ASN sehingga pengelolaan arsip masih dikelola oleh tenaga non ASN
87.	Pemerintah tingkat provinsi mengadakan evaluasi atas regulasi dan instrumen bidang kearsipan	Belum adanya implementasi terhadap evaluasi tersebut	1. Belum masuknya evaluasi atas regulasi dan instrumen bidang kearsipan
88.	Penempatan SDM Kearsipan pada setiap SKPD belum optimal	Setiap SKPD belum memiliki SDM yang khusus mengelola kearsipan	1. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penempatan SDM pengelola kearsipan untuk ditempatkan di setiap SKPD
89.	Sarana dan Prasarana penyimpanan arsip pada setiap SKPD belum optimal	Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk penyimpanan arsip di setiap SKPD	1. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan kearsipan di setiap SKPD
90.	Menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara (pada tahun 2022 sebanyak 1.177 sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 88.484. pada tahun 2021 sebanyak 0 karena adanya Covid-19)	1. Kurangnya promosi pariwisata	1. Terbatasnya SDM Pariwisata 2. Kurangnya event pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung 3. Masih terbatasnya media promosi yang digunakan 4. Belum dibentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah
		2. Belum optimalnya pengembangan kearifan lokal sebagai daya tarik, baik dari arsitektur maupun budaya lokal	1. Pemahaman kepariwisataan belum menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah 2. Perlunya Pengembangan daya tarik wisata alternatif selain wisata bahari
		3. Pengembangan destinasi wisata tidak diimbangi dengan infrastruktur jalan dan lokasi yang memadai	1. Belum optimalnya lahan Parkir
		4. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif sebagai pendukung daya tarik wisata dan pengelolaan daya tarik dan usaha pariwisata lainnya belum lengkap	1. Belum tersedianya Creative Center 2. Minimnya pelatihan peningkatan kapasitas SDM pariwisata
91.	Rendahnya PAD sektor pariwisata (29.383.788.500 pada tahun 2022)	1. Belum optimalnya pengelolaan daya tarik wisata yang kewenangannya di bawah Pemda	1. Belum optimalnya peran pemerintah dalam merintis pembangunan pariwisata potensial 2. Terbatasnya SDM Pariwisata
		2. Pengembangan dan persediaan daya tarik wisata potensial belum optimal	1. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah kabupaten, desa, dan kelompok penggerak pariwisata

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			dalam membangun daya tarik wisata 2. Kebijakan/landasan hukum kepariwisataan dalam pengembangan
		3. Pemantauan dan pelaporan retribusi wisata di daya tarik wisata yang belum optimal	1. Belum diterapkannya pengelolaan restribusi wisata menggunakan teknologi informasi
		4. Masih ada beberapa kriteria GSTC-D yang belum masuk kategori hijau	1. Pemenuhan kriteria GSTC-D belum optimal 2. Perangkat Daerah terkait belum memprioritaskan kegiatan yang mendukung pemenuhan kriteria GSTC-D
92.	Cakupan bina kelompok petani masih rendah (1.448 kelompok pada tahun 2022)	Masih rendahnya jumlah kelompok peternak yang mendapat bantuan PEMDA	1. Sosialisasi yang masih rendah
93.	Belum adanya petunjuk teknis mengenai LP2B	Belum disusun nya Perbup dan juknis LP2B	1. Belum adanya Sosialisasi Perda tentang LP2B
94.	Pengembangan Komoditas lokal masing-masing daerah belum optimal	Tidak ada program kegiatan mengarah ke komoditas lokal	1. Masih kurangnya pasar yang menampung produk lokal
95.	Komoditas pertanian sebagai penunjang sektor UMKM belum optimal	Pemasaran produk pertanian belum optimal	1. Belum ada koperasi khusus pertanian 2. Belum adanya pola pasar pertanian
96.	Penggunaan teknologi di sektor pertanian belum optimal	Masih rendahnya pembinaan teknologi di sektor pertanian	1. Belum adanya balai pelatihan pertanian
97.	Sertifikasi Pohon Induk Pilihan belum optimal	1. Belum terselenggaranya pelaksanaan balai benih pertanian	1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung benih pertanian
		2. Belum ada tenaga ahli dalam pembibitan	1. Kurangnya sumber daya tenaga ahli pembibitan
98.	Pengembangan Agrowisata belum optimal	Masih rendahnya koordinasi antara pihak Desa, Dinas Pariwisata dengan Dinas Pertanian	1. Tingginya ego sektoral
99.	Peningkatan sektor ternak belum optimal	Minimnya sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas ternak	1. Belum adanya pola pasar tradisional 2. Belum tersedianya pasar ternak 3. Belum tersedianya puskeswan
100.	Peningkatan kelompok tani muda belum optimal	Masih rendahnya minat pemuda dalam sektor pertanian	1. Kurang menariknya sektor pertanian bagi pemuda

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
101.	Persentase rumah tangga pengguna listrik masih rendah	Jumlah rumah tangga pengguna listrik masih berada di bawah standar Provinsi Jawa Barat	1. Masih ada wilayah yang belum teraliri listrik 2. Terbatasnya jarak jangkauan tiang listrik ke rumah penduduk 3. Jangkauan PLN masih terbatas, sehingga belum menjangkau wilayah permukiman yang berada di pedalaman
102.	Rendahnya Ekspor Bersih Perdagangan (Rp. 124.522.765.710 pada tahun 2022)	1. Masih rendahnya produksi produk UMKM yang belum memenuhi kriteria barang ekspor	1. Masih rendahnya wawasan tentang ekspor impor. 2. Minimnya pelatihan yang dilaksanakan kepada UMKM
		2. Masih rendahnya SDM untuk ikut terlibat dan mengembangkan produk unggulan Kabupaten Pangandaran	1. Belum adanya lembaga khusus yang dapat memfasilitasi pengembangan produk unggulan daerah
103.	Cakupan bina kelompok nelayan masih rendah	1. Masih rendahnya jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan pemerintah daerah	1. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah
		2. Belum optimalnya pemanfaatan Potensi laut/perikanan yang tinggi	1. Kurangnya kompetensi SDM nelayan 2. Kurangnya sarana penunjang
		3. Masih rendahnya armada nelayan	1. Terbatasnya modal yang dimiliki oleh nelayan untuk bisa memiliki dan menggunakan teknologi terbaru di bidang pengolahan ikan
		4. Perkembangan teknologi pengolahan ikan belum dapat digunakan secara maksimal oleh kelompok nelayan	1. Kapabilitas nelayan masih minim sehingga sulit untuk menggunakan teknologi pengolahan ikan 2. Belum optimalnya sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan
104.	Nilai tukar nelayan	1. Belum adanya Nilai Tukar Nelayan sebagai tolok ukur kesejahteraan nelayan	1. Belum optimal perhatian pemerintah dalam meningkatkan pembudi dayaan ikan kecil dan menurunkan biaya produksi
		2. Masih rendahnya pendapatan nelayan/pembudi daya ikan dan belum adanya fasilitas/pusat pemasaran produk perikanan/kelautan yang representatif	1. Daya beli masyarakat masih rendah 2. Belum ada teknologi pengolahan ikan karena dengan adanya pengolahan ikan, nilai jual ikan akan meningkat 3. Belum adanya standar jual untuk setiap jenis ikan dimana dengan adanya standar jual, hal tersebut dapat mencegah fluktuasi harga jual ikan
		3. Perlu adanya peningkatan life skills terhadap pelaku usaha dan UMKM	1. Pelatihan yang dilaksanakan belum optimal 2. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
105.	Kecilnya persentase bagi hasil kabupaten/kota dan desa	1. Nilai bagi hasil kabupaten masih rendah, berdasarkan peraturan gubernur minimal 10%	1. Masih rendahnya pendapatan daerah Kabupaten Pangandaran
		2. Proses pencairan masih belum terlaksana	1. Proses pencairan masih mempertimbangkan skala prioritas
106.	Rendahnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (24% pada tahun 2022)	1. Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1. Terbatasnya sarana penunjang 2. Rendahnya motivasi 3. Pendidikan struktural masih belum menjadi prioritas
		2. Penyelenggaraan diklat aparatur dan diklat fungsional masih minim	1. Pelaksanaan diklat masih terbatas 2. Kuota diklat terbatas karena keterbatasan anggaran
		3. Belum optimalnya penguatan sumber daya manusia pada dunia pariwisata agar bisa lebih bersinergi dalam pengembangan pariwisata	1. Kemampuan ASN untuk menunjang pariwisata seperti kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing belum menjadi kemampuan komunikasi tambahan yang perlu dimiliki oleh ASN
107.	Rendahnya persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (10% pada tahun 2022)	Masih rendahnya jumlah Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, maupun fungsional	1. Terbatasnya sarana penunjang 2. Rendahnya motivasi 3. Pelaksanaan Diklat masih terbatas
108.	Masih rendahnya jumlah pegawai	Jumlah pegawai yang ada belum memenuhi kebutuhan yang ada	1. Kuota pegawai ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga jumlah pegawai yang ada belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan
109.	Rendahnya persentase implementasi rencana kelitbangan (66,67% pada tahun 2022)	1. Pengelolaan SDM aparatur belum optimal	1. Belum tersusunnya dokumen pendukung rencana Kelitbangan, diantaranya RIK dan Road Map 2. Masih terbatasnya jumlah SDM pendukung di Kelitbangan
		2. Masih perlunya pembenahan OPD diselaraskan dengan urusan	1. Kewenangan maupun fungsi Kelitbangan belum optimal yaitu masih berada pada tingkat Eselon IV dan baru dilaksanakan pada tahun 2019
110.	Rendahnya Tingkat kapabilitas APIP (level 2 pada tahun 2022	1. Masih rendahnya tingkat kapabilitas APIP	1. Kurangnya peningkatan kapabilitas APIP 2. Kurangnya koordinasi di antara para pihak
111.	Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai PEMDA (0,31% pada tahun 2019)	Masih rendahnya kemampuan aparatur	1. Rendahnya kedisiplinan ASN 2. Masih rendahnya tingkat profesionalisme ASN atau masih sedikit jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional maupun struktural

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
112.	Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi	Masih kurangnya pemahaman terkait reformasi birokrasi	1. Kurangnya sosialisasi penerapan reformasi birokrasi 2. Kurangnya komitmen seluruh perangkat daerah
113.	Masih adanya perangkat daerah yang terlambat dalam menyampaikan laporan barang milik daerah	Belum optimalnya pengelolaan aset barang milik daerah	1. Kurangnya SDM pengelola aset 2. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan aset 3. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan aset

Sumber: Data Diolah Penyusun, 2024

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun hasil identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. 105 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran

No	Urusan	Bidang	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	1) Minimnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak ke PAUD; 2) Kualitas dan Kuantitas layanan PAUD masih rendah; 2) Belum optimalnya pendidikan kesetaraan; 3) Angka Harapan lama Sekolah masih rendah; 4)Angka Rata-rata lama Sekolah masih rendah; 5) Tingginya Angka Putus Sekolah (APS).	1) Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan; 2) Peningkatan serta pemerataan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan; 3) Bantuan Operasional bagi sekolah non formal.
2.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	1) Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat; 2) Masih rendahnya program program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat; 3) Kurangnya SDM kesehatan; 4) Masih kurangnya program program promotif dan preventif dan preventif mengenai HIV/ AIDS; 5) Cakupan pelayanan balita masih fluktuatif; 6) Kurangnya sumber makanan bergizi untuk ibu; 7) Kurangnya dokter spesialis; 8) Masih kurangnya sarana dan	1) Akses sanitasi dan air minum aman (PHBS); 2) Perbaikan layanan kesehatan; 3) Sosialisasi kepada masyarakat mulai dari pra pernikahan sampai anak balita; 4) Terwujudnya ketahanan pangan; 5) Pemberian MPASI berprotein hewani.

No	Urusan	Bidang	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			prasarana kesehatan baik dasar maupun rujukan.	
3.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1) Masih terdapat jalan dalam kondisi rusak/belum dibangun; 2) Terdapat jalan dengan kualitas yang tidak sesuai dengan ketentuan; 3) Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi teknis mencapai kondisi baik; 4) Belum optimalnya Sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi.	1) Pemerataan akses jalan dalam kondisi baik 2) Peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik 3) Jaringan irigasi yang baik 4) Pembangunan sarana prasarana perkantoran pusat pemerintahan yang baik
4.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1) Belum optimalnya pengelolaan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum; 2) Belum optimalnya pengelolaan sanitasi.	1) Pembangunan IPAL dan IPLT; 2) Pembentukkan UPTD yang mengurusi tentang sanitasi; 3) Peningkatan sarana prasarana pendukung (Armada, SDM dll).
5.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1) Kurangnya Komunikasi informasi dan edukasi penanggulangan bencana; 2) Kurangnya minat masyarakat menjadi petugas Linmas; 3) Keterbatasan SDM dalam penanganan pelanggaran PERDA.	1) Penyusunan kajian terkait permukiman yang ada pada wilayah rawan bencana; 2) Penyiapan lahan untuk relokasi permukiman yang berada pada wilayah rawan bencana; 3) Optimalisasi kelembagaan terkait penanggulangan bencana.
6.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	1) Belum tersedia data PMKS yang valid; 2) Masih ditemukannya data penerima yang ganda/*double*/ tidak valid; 3) Kurangnya koordinasi *stakeholder* terkait; 4) Keterbatasan penerima manfaat; 5) Minimnya SDM profesional dan fasilitas yang dimiliki.	1) Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan terintegrasi; 2) Akurasi data kemiskinan untuk upaya pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran (sinkronisasi data antar stakeholder pengampu).

No	Urusan	Bidang	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
7.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Tenaga Kerja	1) masih terbatasanya lapangan pekerjaan di Kabupaten Pangandaran; 2) Belum optimalnya link and match antara dunia pelatihan dengan dunia industri; 3) Belum optimalnya pengadministrasian tenaga kerja; 4) Pemda Pangandaran belum memiliki BLK (Balai Latihan Kerja).	1) Peningkatan kualitas pendidikan; 2) Workshop/Pelatihan sebelum menjadi pencari kerja; 3) Link and Match yang sesuai antara Dunia pelatihan dan Perindustrian; 4) Optimalisasi pengadministrasian tenaga kerja; 5) Pembangunan BLK (Balai Latihan Kerja).
8.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1) Belum optimalnya kesetaraan upah anatara perempuan dan laki-laki; 2) Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal.	Pelibatan dan pemberdayaan perempuan pada sektor-sektor perekonomian.
9.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Pangan	1) Target ketersediaan energi dan protein belum optimal; 2) Peningkatan produksi pangan berprotein tinggi; 3) Tingkat daya beli masyarakat rendah; 4) Keterbatasan alat yang ada di dinas; 5) Kurang heterogennya makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.	1) Pemenuhan ketersediaan dan cadangan pangan; 2) Peningkatan kualitas pangan yang dikonsumsi; 3) Optimalisasi peran masyarakat dalam ketahanan pangan; 4) Penjagaan stabilitas harga pangan.
10.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Pertanahan	Masih adanya kasus sengketa batas wilayah.	1) Peningkatan penanganan kasus sengketa batas wilayah; 2) Pembuatan peta batas wilayah.
11.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Lingkungan Hidup	1) Belum optimalnya pengelolaan SDM serta sarana dan prasarana; 2) Belum tersedianya sarana prasarana pengelolaan limbah secara terpadu; 3) Masih rendahnya cakupan area penanganan sampah;	1) Perbaikan ekosistem dan lingkungan hidup; 2) Penegakan hukum lingkungan; 3) Peningkatan pengelolaan limbah; 4) Pembangunan TPST Bojongsari;

No	Urusan	Bidang	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			4) Belum optimalnya pengelolaan sampah melalui 3R; 5) Masih terdapat lahan kritis.	5) Pembangunan dan Optimalisasi TPS3R; 6) Pengoptimalan pengelolaan sampah guna untuk meningkatkan pengolahan sampah pada setiap TPS3R yang dibantu dengan pembentukkan serta optimalisasi Bank Sampah pada setiap Desa; 7) Memfasilitasi dan mendukung Bank Sampah untuk bekerjasama dengan BRIN serta akademisi guna mengolah sampah organik; 8) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung; 9) Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu sampai hilir.
12.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Regulasi terkait pernikahan (>19 tahun boleh menikah); 2) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan (kematian); 3) Jaringan pemanfaatan data difasilitasi oleh masing-masing OPD (sehingga tidak terintegrasi di Diskominfo).	1) Sosialisasi dan pendampingan terkait regulasi pernikahan 2) Kesadaran masyarakat mengenai tertib dministrasi kependudukan 3) Pemanfaatan Data dan Sitem Informasi yang terintegrasi
13.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1) Persediaan bantuan yang terbatas; 2) Belum tersedianya data yang valid; 3) Penyandang disabilitas binaan LKS mendapatkan bantuan kebutuhan dasar dari lembaga yang bersangkutan; 4) Terbatasnya jumlah persediaan bantuan APBD Kabupaten;	1) Pemanfaatan data sosial ekonomi penduduk melalui satu sistem regsosek; 2) Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat;

No	Urusan	Bidang	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			5) Terbatasnya jumlah persediaan bantuan; 6) Lambatnya proses pelayanan masyarakat di desa; 7) Belum optimalnya akses pelayanan desa kepada masyarakat; 8) Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).	3) Penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan; 4) Pemberdayaan masyarakat miskin untuk entas dari jaring kemiskinan.
14.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1) Belum optimalnya swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat; 2) Belum Optimalnya Program Pemberdayaan Masyarakat; 3) Belum optimalnya pendataan anak per keluarga.	1) Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat 2) Monitoring evaluasi terhadap masyarakat pasca pemberdayaan 3) Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan
15.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Perhubungan	1) Bencana alam, jembatan runtuh; 2) Peningkatan kualitas jalan dari kelas 3 ke 2; 3) Peningkatan kualitas jasa layanan angkutan; 4) Belum optimalnya pengelolaan izin trayek; 5) Belum optimalnya pengelolaan uji kir angkutan umum; 6) Belum optimalnya pengelolaan angkutan umum yang tidak memiliki KIR; 7) Belum optimalnya pemasangan rambu–rambu; 8) Belum optimalnya pengelolaan kendaraan di Kabupaten; 9) Belum optimalnya pengelolaan orang/barang yang terangkut angkutan umum; 10) Belum optimalnya pengelolaan orang/barang melalui dermaga;	1) Peningkatan sarana prasarana transportasi; 2) Pengesahan Perbup Penyelenggaraan jalan; 3) Pembiayaan alternatif seperti KPBU untuk pengelolaan; 4) Penyusunan kajian terkait transportasi Publik; 5) Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi pada wilayah perkotaan dan pariwisata (Peningkatan retribusi parkir guna mendorong masyarakat untuk enggan menggunakan kendaraan pribadi); 6) Pembangunan terminal feeder; 7) Mendorong pengusaha untuk menambah trayek angkutan umum;

No	Urusan	Bidang	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			11) Belum optimalnya pengelolaan orang/barang melalui terminal.	8) Pemberlakuan subsidi bagi pengguna transportasi publik; 9) Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana transportasi publik.
16.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Komunikasi dan Informasi	1) Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya penerapan pemerintahan berbasis elektronik; 2) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik.	1) Peningkatan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik atau SPBE 2) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang SPBE
17.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Koperasi dan UMKM	1) Masih rendahnya kaderisasi generasi muda sebagai pengurus koperasi; 2) Masih rendahnya koperasi yang bergerak di sektor riil; 3) Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif; 4) Masih rendahnya kaderisasi generasi muda sebagai pengurus koperasi; 5) Masih rendahnya koperasi yang bergerak di sektor riil; 6) Potensi usaha mikro dan kecil sebagai muatan lokal belum terpetakan; 7) Minimnya usaha mikro dan kecil yang memiliki hak izin dan edar; 8) Terhambatnya promosi produk usaha mikro & kecil; 9) Belum ada formulasi untuk menghitung jumlah peningkatan presentasi kewirausahaan mikro dibagi jumlah penduduk;	1) Peningkatan nilai tambah, dan ekspor produk UMKM; 2) Peningkatan kapasitas UMKM melalui penerapan teknologi, inkubasi usaha, akses pembiayaan, dan kemitraan usaha; 3) Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual.

No	Urusan	Bidang	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			10) Belum tersedianya display/ruang promosi untuk ajang promosi usaha mikro dan kecil bagi wisatawan; 11) Masih rendahnya pemberdayaan SDM usaha mikro dan kecil; 12) Belum optimalnya pemasaran produk usaha mikro dan kecil; 13) Masih rendahnya produksi produk UMKM yang belum memenuhi kriteria barang ekspor.	
18.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Penanaman Modal	1) Belum adanya kajian investasi sektoral; 2) Tidak melaporkan kegiatan penanaman modal; 3) Sedikitnya investor yang masuk ke Kab. Pangandaran; 4) Kurangnya SDM yang berkompeten.	1) Regulasi investasi yang mengatur mengenai izin perusahaan 2) Penegakan regulasi izin usaha 3) Keterlibatan masyarakat dalam UMKM dan ekonomi kreatif 4) Strategi promosi investasi
19.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Kepemudaan dan Olahraga	1) Rendahnya tingkat pembangunan terhadap Kepemudaan dan Olah Raga; 2) Belum optimalnya sistem kesehatan daerah, kualitas pelayanan pendidikan, dan peningkatan peran kepemudaan.	1) Ketersediaan fasilitas untuk mengembangkan minta bakat pemuda dan olahraga 2) Peningkatan kapasitas SDM
20.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Statistik	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi terkait pembagian tupoksi kerja antar *stakeholder*s bidang statistik.	1) Sistem data dan statistik yang terintegrasi
21.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Persandian	Belum optimalnya pengelolaan bidang persandian.	1) Peningkatan pengelolaan bidang pesandian
22.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Kebudayaan	1) Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah; 2) Kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan festival seni dan budaya;	1) Pelaksanaan festival seni dan budaya secara rutin 2) Promosi festival seni dan budaya 3) Kajian tentang penetapan cagar budaya

No	Urusan	Bidang	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			3) Belum optimalnya pelaksanaan festival seni dan budaya; 4) Belum ditetapkannya situs dan kawasan cagar budaya di kabupaten Pangandaran; 5) Belum optimalnya perhatian dinas teknis terhadap cagar budaya; 6) Belum optimalnya pengembangan kearifan lokal sebagai daya tarik, baik dari arsitektur maupun budaya lokal; 7) Kajian tentang penetapan cagar budaya belum ada/belum disusun.	4) Pengembangan kearifan lokal Promosi pariwisata budaya
23.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Perpustakaan	1) Rendahnya kesadaran membaca masyarakat; 2) Belum optimalnya fasilitas perpustakaan; 4) Belum adanya regulasi daerah berupa perda tentang pengelolaan perpustakaan; 5) Terbatasnya jumlah pustakawan daerah yang bersertifikat; 6) Kurangnya kuantitas tenaga ahli profesional; 7) Terbatasnya jumlah pengelola perpustakaan.	1) Sosialisasi gemar membaca 2) Ketersediaan perpustakaan digital 3) Ketersediaan jumlah koleksi buku Perpustakaan 4) Jumlah perpustakaan yang memadai 5) Ketersediaan SDM pustakawan
24.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Kearsipan	1) Belum adanya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten; 2) Kurangnya sumber daya kearsipan; 3) Rendahnya kualitas unit pengelola arsip; 4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan meliputi digital dan non-digital; 5) Rendahnya Kesadaran tentang pengelolaan arsip secara primer; 6) Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan kearsipan secara khusus;	1) Optimalisasi pengelolaan arsip secara baku 2) SOP pengelolaan arsip 3) Optimalisasi pengelolaan arsip secara baku 4) SOP pengelolaan arsip

No	Urusan	Bidang	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			7) Kurangnya tenaga profesional pengelola kearsipan; 8) Belum Adanya Regulasi Kearsipan Berupa Perda; 9) Belum tersedianya salinan otentik arsip terjaga.	
25.	Unsur Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik	Partisipasi Pemilih/Masyarakat belum maksimal dalam menyalurkan hak pilihnya.	1) Sosialisasi terkait hak pilih kepada masyarakat 2) Peningkatan minat masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi
26.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	1) Ekspor ikan turun bahkan ditutup; 2) Belum optimalnya pengelolaan distribusi ikan; 3) kualitas nelayan yang ada masih belum mumpuni untuk memanfaatkan teknologi; 4) Belum optimalnya pendataan nelayan.	1) Pengembangan Sektor Perikanan yang Modern, Terintegrasi, dan Berkelanjutan; 2) Peningkatan pemanfaatan sumber daya bahari sebagai daya tarik wisata yang ramah lingkungan; 3) Pengembangan korporasi petani/nelayan.
27.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Pariwisata	1) Masih rendahnya kompetensi SDM di bidang pariwisata; 2) Kurangnya promosi pariwisata; 3) Kurangnya event pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung; 4) Kurangnya promosi pariwisata; 5) Kurangnya *event* pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung; 6) Belum optimalnya pengembangan kearifan lokal sebagai daya tarik, baik dari arsitektur maupun budaya lokal;	1) Pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata; 2) Penerapan kurikulum berbasis pariwisata pada pendidikan dasar dan menengah pertama; 3) Promosi pada berbagai platform dari level regional hingga internasional; 4) Kerjasama dengan berbagai pihak (bandara, terminal, travel agent, dsb) untuk promosi destinasi wisata; 5) Penguatan tata kelola kelembagaan pengelolaan destinasi wisata;

No	Urusan	Bidang	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			7) Pengembangan destinasi wisata tidak diimbangi dengan infrastruktur jalan dan lokasi yang memadai; 8) Belum optimalnya lahan Parkir; 9) Belum dibentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; 10) Belum optimalnya promosi daya tarik wisata; 11) Perlunya pengembangan daya tarik wisata alternatif selain wisata bahari; 12) Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif sebagai pendukung daya tarik wisata.	6) Pembangunan Destinasi Pariwisata yang Berkualitas dan Berkelanjutan; 7) Klastering destinasi wisata; 8) Pengembangan desa wisata; 9) Pengembangan kebudayaan sebagai daya tarik wisata.
28.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Pertanian	1) Masih kurangnya sumber daya penyuluh pertanian; 2) Belum optimalnya pendampingan kelompok tani baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; 3) Kurangnya wawasan dalam pengembangan ternak kecil; 4) Kurangnya kemandirian petani dan kelompok tani dalam membangun agrowisata baik komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan; 5) Kurang Berkembangnya Kelompok peternakan besar, kecil dan unggas; 6) Belum meningkatnya kelembagaan ekonomi petani; 7) Sistem pertanian yang digunakan sebagian besar petani masih bersifat konvensional;	1) Peningkatan kuantitas sumber daya penyuluh pertanian; 2) Optimalisasi pendampingan terhadap kelompok tani; 3) Optimalisasi tata kelola pengairan untuk meningkatkan produktivitas pertanian; 4) Penguatan tata kelola pupuk yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, dan efisien; 5) Pemanfaatan teknologi tepat guna dan penerapan inovasi dalam sektor pertanian.

No	Urusan	Bidang	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			8) Kurangnya Subsidi Pemerintah khususnya sarana dan prasarana untuk gabungan kelompok tani (GAPOKTAN); 9) Belum optimalnya penggunaan kartu tani dan ERDKK.	
29.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Perdagangan	1) Masih rendahnya SDM untuk ikut terlibat dan mengembangkan produk unggulan Kabupaten Pangandaran; 2) Masih rendahnya daya beli masyarakat.	1) Memaksimalkan penggunaan barang/jasa dan penyedia dalam negeri, serta penyediaan paket pekerjaan untuk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi; 2) Mengoptimalkan penggunaan produk lokal dalam kegiatan pemerintahan daerah; 3) Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual.
30.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Perindustrian	Industri pengolahan yang berada di Kabupaten Pangandaran belum memberikan nilai tambah yang tinggi.	1) Optimalisasi industri pengolahan
31.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Transmigrasi	1) Tidak Memiliki lahan dan kurangnya keterampilan SDM; 2) SDM yang memerlukan adaptasi budaya.	1) Pembangunan Kawasan transmigrasi 2) Peningkatan kemandirian transmigran
32.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Perkebunan	1) Banyak tanaman komoditas perkebunan yang sudah tidak produktif; 2) Belum punya hak paten varietas lokal tembakau di Kab. Pangandaran; 3) Bibit yang dihibahkan ke kelompok tani atau pihak ketiga selalu mengambil dari luar kab. Pangandaran;	1) Optimalisasi tata kelola pengairan untuk meningkatkan produktivitas pertanian; 2) Penguatan tata kelola pupuk yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, dan efisien;

No	Urusan	Bidang	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			4) Belum optimalnya sarana dan prasarana.	3) Pemanfaatan teknologi tepat guna dan penerapan inovasi dalam sektor pertanian.
33.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Peternakan	1) Pembibitan Sapi yang Belum Bisa Dipertahankan Populasi nya; 2) Keberadaan Pakan yang belum mampu menutupi biaya operasional budi daya; 3) Untuk Unggas Kondisi Kebutuhan Pakan yang belum optimal yang diselenggarakan secara mandiri; 4) Pemotongan hewan betina produktif; 5) Rendahnya jaminan daging yang ASUH; 6) Pengeluaran bibit ternak; 7) Resiko penyebaran penyakit hewan; 8) Cekaman stress di pasar hewan; 9) Penyedian obat-obatan belum optimal; 10) Rendahnya Pengawasan Kesehatan Hewan; 11) Cekaman stres di pasar hewan; 12) Penyedian obat-obatan belum optimal; 13) Rendahnya Pengawasan Kesehatan Hewan; 14) Penjualan hewan kurban yang tidak memenuhi syarat kurban; 15) Pemeriksaan hewan kurban pada saat *ante mortem* dan *post mortem* yang masih rendah; 16) Pemalsuan/pencampuran pangan asal hewan; 17) Rendahnya sanitasi dan higienis/cemaran mikroba; 18) Penggunaan bahan kimia;	1) Pembangunan rumah potong hewan; 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pada sektor peternakan (susu kambing, sapi pasundan); 3) Optimalisasi penyediaan obat untuk hewan; 4) Optimalisasi penanganan kesehatan hewan.

No	Urusan	Bidang	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			19) Penjualan hewan kurban yang tidak memenuhi syarat kurban; 20) Pemeriksaan hewan kurban pada saat *ante mortem* dan *post mortem* yang masih rendah. 21) Belum adanya Fasilitas Rumah Potong Hewan; 22) Cekaman stres pada ternak (a) bebas dari rasa lapar dan haus ;b) bebas dari rasa tidak nyaman; c) bebas dari rasa takut dan tertekan; d) bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami); 23) Sebagai daerah pariwisata, Kabupaten Pangandaran perlu menjaga dan menjamin wilayahnya terbebas dari penyakit hewan menular strategis yang bersifat zoonosis seperti Rabies, Brucelosis, Antraks dan Avian Influenza; 24) Mulai meningkatnya jumlah *pet shop* dan *poultry shop* di wilayah Pangandaran.	
34.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Pertanahan	Masih adanya kasus sengketa batas wilayah.	1) Peningkatan penanganan kasus sengketa batas wilayah; 2) Pembuatan peta batas wilayah.
35.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	1) Penetapan anggaran kesulitan karena sesuai dengan DPA; Dinamika politik; *refocusing* anggaran; 2) Dampak demokratisasi tidak didasari dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila, sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mengutamakan semangat gotong royong, saling menghormati, kesamaan tata nilai dan tata laku bangsa;	

No	Urusan	Bidang	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			3) Keterbatasan kemampuan cakupan kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan; 4) Rendahnya Nilai Indeks Reformasi Birokrasi.	
36.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Masih rendahnya tingkat kesetaraan gender anggota DPRD Kabupaten Pangandaran.	
37.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan	Belum optimalnya pencapaian Nilai SAKIP Bappeda yang baik.	
38.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Keuangan	Belum optimalnya kemampuan fiskal daerah.	1) Tercapainya kemandirian fiskal; 2) Optimalisasi sumber-sumber PAD; 3) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak.
39.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	1) Belum optimalnya pengendalian rekomendasi yang diterbitkan serta yang ditindaklanjuti; 2) Belum optimalnya Rancangan Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi; 3) Keterlambatan penyampaian data dari SKPD terkait; 4) Jadwal kegiatan keagaman yang belum pasti dan perubahan jadwal; 5) Belum optimalnya produktivitas kelembagaan; 6) Terlambatnya pengumpulan data; 7) Adanya kurang kesesuaian data yang diterima; 8) Kualitas dan kuantitas SDM; 9) Adanya kelambatan pengimportan data; 10) Adanya pengalihan versi aplikasi SPSE; 11) Belum optimalnya perawatan jaringan; 12) Belum optimalnya koordinasi SKPD urusan wajib pelayanan dasar dalam pelaporan; 13) Terlambatnya pengumpulan data;	Transformasi manajemen ASN (penataan kelembagaan, manajemen talenta, pengembangan kompetensi, sistem penggajian dan penerapan sistem GRC/ Governance, Risk and Compliance).

No	Urusan	Bidang	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			14) Adanya kurang kesesuaian data yang diterima; 15) Kualitas dan kuantitas SDM; 16) Kurangnya sistem informasi IT Sakip. 17) Belum optimalnya kuantitas SDM dalam Pelaksanaan Kebijakan KDH yang telah di Evaluasi; 18) Belum Optimalnya penerapan SPM dalam pengendalian; 19) Belum optimalnya fasilitasi pelayanan KDH/WKDH; 20) Belum lengkapnya data base di SKPD terkait; 21) Belum optimalnya sosialisasi terkait pembinaan hukum; 22) Jadwal kegiatan keagaman yang belum pasti dan perubahan jadwal; 23) Belum adanya sistem evaluasi fisik realisasi anggaran.	
40.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan dan Pelatihan	1) Rendahnya rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Diklat Formal; 2) Semakin menurunnya jumlah Total ASN.	1) Optimalisasi kualitas SDM pegawai; 2) Pengadaan ASN.
41.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Penelitian dan Pengembangan	1) Belum optimalnya penyusunan kelitbangan dalam RKPD; 2) Belum optimalnya penyusunan kelitbangan dalam RPJMD; 3) Belum optimalnya pengelolaan Indeks Inovasi Daerah.	1) Kajian kelitbangan 2) Implementasi kajian kelitbangan 3) Peningkatan inovasi daerah
42.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengelolaan Perbatasan	1) Permasalahan terkait ODGJ belum sepenuhnya tertangani;	1) Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan

No	Urusan	Bidang	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			2) Belum adanya sarana dan prasarana untuk mengatasi permasalahan PMKS; 3) Ketimpangan sarana dan prasarana kesehatan; 4) Penanganan dampak eksploitasi lingkungan di sekitar pantai dan laut; 5) Antisipasi akan adanya gangguan keamanan di wilayah pesisir seperti *illegal fishing, transhipment, drug smuggling, human trafficking.*	2) Pemerataan tenaga medis dan dokter 3) Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditindaklanjuti 4) Kepatuhan perusahaan atau pelaku usaha terhadap komitmen izin
43.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Inspektorat Daerah	1) Terjadi temuan berulang di bidang fisik dan non fisik sarana prasarana terkait nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD; 2) Evaluasi implementasi SPIP belum dilaksanakan secara menyeluruh; 3) Belum adanya komitmen dari tiap OPD terkait SPIP; 4) Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dalam mencapai nilai yang sangat baik; 5) Belum adanya komitmen dan kurangnya integritas SDM dalam meningkatkan Nilai SAKIP OPD.	1) Tindak lanjut temuan 2) Profesionalisme ASN 3) Melakukan Bimtek kepada PPK, PPTK dan PHO untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 4) Melaksanakan Sosialisai dan Bimtek bagi SKPD 5) Adanya asistensi atau pendampingan dalam penyusunan dokumen SAKIP 6). Melakukan monitoring SAKIP terhadap OPD 7). Pemberian reward and punishment kepada OPD yang terlambat melakukan pengumpulan laporan 8) Melakukan Studi Banding, Konsultasi dengan BPKP
44.	Unsur Kewilayahan	Kecamatan	1) Kurangnya koordinasi antar desa di wilayah kecamatan maupun di wilayah perbatasan;	1) Kegiatan koordinasi yang efektif

No	Urusan	Bidang	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			2) Pengembangan dan pemanfaatan potensi di tiap kecamatan masih kurang; 3) Masih kurangnya SDM dan sarpras penunjang di kecamatan.	2) Optimalisasi pembinaan dan pelatihan sumberdaya potensial 3) Peningkatan sarana dan Prasarana penunjang di Kecamatan

Sumber: Data Diolah oleh Penyusun, 2024

2.4 Inovasi Daerah

Guna meningkatkan hasil pembangunan, perlu didukung oleh berbagai inovasi, baik dalam bentuk peningkataan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyaratat, maupun peningkatan daya saing daerah. Inovasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Ukuran seberapa kemajuan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari inovasi-inovasi yang dihasilkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran telah melakukan berbagai inovasi sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan, inovasi tersebut antara lain:

Tabel 2. 106 Inovasi Daerah Kabupaten Pangandaran

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	JENIS	URUSAN PEMERINTAH
1.	Batukaras International Night Surfing	DISPARBUD	Non Digital	Bidang Pariwisata
2.	Pariwisata Berbasis Hak Asasi Manusia di Destinasi Pariwisata Cukang Taneuh (Green Canyon)	DISPARBUD	Non Digital	Bidang Pariwisata
3.	BULE KERITING (Budidaya Ikan Lele untuk Keluarga Berisiko Stunting)	DKPKP	Non Digital	Bidang Kelautan dan Perikanan
4.	SIGINA PERAWAN (Aplikasi Teknologi Tepat Guna Untuk Pengairan Sawah Tadah Hujan)	DISTAN	Non Digital	Bidang Pertanian
5.	Gerakan Masyarakat Nelayan Mandiri (GEMAR LARI) dengan SITERI (Sistem Tempat Pelelangan Ikan Terintegrasi)	DKPKP	Digital dan Non Digital	Bidang Kelautan dan Perikanan
6.	Hotel Maggot PAZERO (Pangandaran Zero Waste)	DLHK	Non Digital	Bidang Lingkungan Hidup

2.4.1 Batukaras International Night Surfing

Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran yang memiliki potensi untuk didatangi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara yaitu Pantai Batukaras. Secara umum kawasan Pantai Batukaras memiliki panorama yang indah serta karakteristik pantai yang landai sehingga cocok digunakan untuk berbagi aktivitas wisata seperti berselancar (surfing), berenang, water sport, snorkeling dan suasana pantai yang cocok untuk digunakan rekreasi serta menikmati panorama alam disekitar pantai. Pantai Batukaras memiliki spot surfing bagi pecinta olahraga surfing. Berikut jumlah kunjungan wisatawan Destinasi Pariwisata Pantai Batukaras tahun 2018 hingga 2022:

Tabel 2. 107 Jumlah Kunjungan Wisatawan

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kunjungan Wisatawan	595.245	520.924	351.175	379.823	449.629

Sumber: Disparbud Kabupaten Pangandaran, 2023

Peminatan terhadap night surfing di Pantai Batukaras telah di sampaikan oleh Batukaras Surf Club dan Persatuan Selancar Ombak Indonesia. Konsep night surfing telah dilaksanakan di Pantai Keramas, Bali. Night surfing di Pantai Keramas biasanya dilakukan pada rentang antara bulan Juni sampai Oktober. Aktifitas ini dilakukan selama 4 hari sebelum serta sesudah bulan purnama. Selain itu, Kabupaten Malang telah menyelenggarakan event night surfing di pantai Wedi Awu Desa purwodadi Kec. Tirtoyudo Kabupaten Malang pada tahun 2019. Melihat potensi yang ada di Pantai Batukaras, kegiatan night surfing dapat untuk dilaksanakan di Pantai Batukaras.

Keterbatasan bagi wisatawan yang memiliki minat terhadap atraksi wisata surfing yaitu night surfing yang belum dapat diakomodir dengan sarana dan prasarana yang ada di Pantai Batukaras. Ketersediaan sarana dan prasana penunjang pariwisata seperti skate park juga diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan wisatawan. Dengan adanya pembangunan skate park, wisatawan dari semua kalangan dapat merasakan sensasi surfing di daratan Ketika ombak tidak memungkinkan. Adanya pembangunan jalur lintas pesisir sepanjang ±35 km merupakan suatu nilai tambah bagi wisatawan karena mempermudah akses menuju Pantai Batukaras. Selain itu, penambahan rute jalan baru Batukaras – Madasari dapat menambah daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Batukaras. Berikut merupakan kondisi eksisting Destinasi Pariwisata Pantai Batukaras :

Gambar 2. 25 Peselancar di Pantai Batukaras

Sumber: Disparbud Kabupaten Pangandaran, 2023

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah menyusun dokumen perencanaan Masterplan dan DED Destinasi Wisata Pantai Batukaras. Perlu dilakukan tindak lanjut berupa realisasi terhadap dokumen perencanaan tersebut agar kebutuhan wisatawan dan pelaku usaha pariwisata serta masyarakat sekitar dapat terakomodir. Dengan adanya penambahan atraksi wisata serta pembangunan sarana dan prasarana di Destinasi Wisata Pantai Batukaras diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Kabupaten Pangandaran dan mencetak bibit atlet surfing yang ada di Kabupaten Pangandaran.

Kegiatan night surfing ini mendukung pemerataan pusat aktivitas masyarakat dengan menerapkan pariwisata keberlanjutan, sektor pengelolaan keberlanjutan, keberlanjutan sosial dan ekonomi, keberlanjutan budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Night surfing ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup karena dapat melakukan kegiatan wisata sambal berolahraga sehingga tidak hanya mendapatkan kesenangan berwisata tetapi juga kebugaran badan dapat terjaga.

Sarana dan prasarana penunjang pariwisata yaitu skate park juga diperlukan untuk meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Destinasi Wisata Pantai Batukaras. Wisatawan dari segala kalangan dapat menikmati pengalaman surfing di daratan dengan adanya pembangunan skate park di Pantai Batukaras. Hal ini sejalan dengan konsep dasar pembangunan Destinasi Wisata Pantai Batukaras dalam dokumen perencanaan yaitu Pembangunan Destinasi Wisata Pantai Batukaras Berkelanjutan dengan Pendekatan Sport Tourism dan Edukasi berbasis Ekowisata Bahari menuju Desa Batukaras yang Berbudaya dan Asri.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Pangandaran pada tahun 2018 – 2019 mengalami pertumbuhan yang lumayan besar yaitu 0,64% salah satu faktor pendorongnya yaitu pengaruh sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor unggulan di Kabupaten Pangandaran. Maka dari itu, adanya tambahan atraksi wisata ini diharapkan dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan maupun atlet selancar yang ingin menikmati pengalaman baru dalam menikmati wisata di Pantai Batukaras. Selain itu, dengan adanya pembangunan di Destinasi Wisata Pantai Batukaras diharapkan akan berdampak pada meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Kegiatan ini juga memperhatikan kriteria

keberlanjutan yang tertera dalam Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Bekelanjutan. Tujuan inovasi Batukaras International Night Surfing antara lain:

1. Menambah atraksi wisata di Destinasi Wisata Batukaras;
2. Peningkatan kunjungan dan lama tinggal wisatawan domestik dan mancanegara;
3. Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi wisatawan dan meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara dengan adanya penambahan segmentasi pasar wisatawan.

2.4.2 Pariwisata Berbasis Hak Asasi Manusia di Destinasi Pariwisata Cukang Taneuh (Green Canyon)

Setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata termasuk wisatawan kelompok rentan. Motivasi wisatawan kelompok rentan dalam menikmati perjalanan wisata salah satunya adalah munculnya perasaan bahwa mereka dilibatkan dan mampu. Pembangunan kepariwisataan hendaknya berbasis hak asasi manusia agar dapat dinikmati oleh setiap wisatawan. Kesempatan dan hak menikmati sarana dan prasarana pariwisata harus diberikan kepada wisatawan disabilitas sama halnya dengan wisatawan umum. Hal ini tentunya harus berkesinambungan dengan konsep pariwisata berkelanjutan agar lingkungan di sekitar tempat wisata tetap terjaga.

Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran yang memiliki potensi untuk didatangi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara yaitu Destinasi Pariwisata Cukang Taneuh (Green Canyon). Panjang aliran sungai Cukang Taneuh ±15 km. Cukang Taneuh (Green Canyon) memiliki atraksi wisata diantaranya Gua Cukang Taneuh, Batu Tengah, Batu Payung dan Pemandian Putri. Green Canyon menawarkan aktivitas wisata mulai dari berperahu untuk wisatawan yang hanya ingin sekedar menikmati pemandangan alam, berenang, body rafting, terjun ke dalam air dan menjelajahi tebing bagi wisatawan yang menyukai tantangan yang memacu adrenalin. Berikut jumlah kunjungan wisatawan Destinasi Pariwisata Cukang Taneuh (Green Canyon) tahun 2018 hingga 2022 :

Tabel 2. 108 Jumlah Kunjungan Wisatawan

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kunjungan Wisatawan	165.896	139.630	64.230	56.770	69.519

Sumber: Disparbud Kabupaten Pangandaran, 2023

Potensi alam yang besar di Destinasi Pariwisata Cukang Taneuh (Green Canyon) perlu untuk dikembangan salah satunya dari segi sarana dan prasarana penunjang pariwisata agar dapat dinikmati semua kalangan wisatawan, baik wisatawan umum maupun wisatawan berkebutuhan khusus. Jumlah penduduk disabilitas Kabupaten Pangandaran sampai dengan tahun 2022 berjumlah 1688 jiwa dengan persentase 0,39% jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran. Saat ini destinasi Pariwisata Cukang Taneuh (Green Canyon) belum maksimal dalam menyediakan sarana dan prasarana penunjang pariwisata ramah disabilitas dan ramah anak. Hal ini merupakan suatu keharusan untuk dipenuhi sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang berbunyi "wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya". Maka dari itu, pembangunan sarana dan prasarana tersebut diperlukan agar wisatawan umum maupun wisatawan berkebutuhan khusus dapat dengan mudah melakukan aktivitas berwisata.

Pembangunan sarana dan prasarana yang mengusung konsep Pariwisata Berbasis Hak Asasi Manusia tepat dilakukan di Destinasi Wisata Cukang Taneuh (Green Canyon) dikarenakan destinasi pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yang memiliki keunikan dan berbeda dengan destinasi pariwisata yang lain adalah Cukang Taneuh (Green Canyon). Destinasi pariwisata ini memiliki atraksi wisata yang dapat dinikmati semua kalangan wisatawan, seperti menikmati suasana alam dan keindahan sungai melalui akses menaiki perahu dengan perlengkapan keamanan yang dipandu oleh pemandu yang berpengalaman. Selain itu, atraksi wisata body rafting juga dapat dinikmati oleh wisatawan muda. Akses untuk menikmati destinasi pariwisata ini tentunya harus dibarengi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh semua kalangan wisatawan. Tujuan inovasi Pariwisata Berbasis Hak Asasi Manusia di Destinasi Pariwisata Cukang Taneuh (Green Canyon) antara lain:

1. Menambah aktivitas wisata di Destinasi Pariwisata Cukang Taneuh (Green Canyon);
2. Peningkatan kunjungan dan lama tinggal wisatawan domestik dan mancanegara;
3. Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi wisatawan khususnya bagi wisatawan disabilitas;
4. Mewujudkan destinasi pariwisata ramah anak;
5. Meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara dengan adanya penambahan segmentasi pasar wisatawan.

2.4.3 BULE KERITING (Budidaya Ikan Lele untuk Keluarga Berisiko Stunting)

Penurunan angka stunting menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang merupakan bagian dari upaya mencapai misi Indonesia Maju dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul. Stunting sebagai masalah yang kompleks dengan banyak aspek, memerlukan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak. Hal ini tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yang menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya menurunkan angka stunting. Selain itu, landasan hukum lainnya adalah Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 72 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Di Kabupaten Pangandaran, upaya serius untuk mengatasi stunting telah menghasilkan penurunan prevalensi menjadi 1,88% pada Agustus 2023, dari 2,21% pada tahun sebelumnya. Langkah konkret diambil melalui program inovatif "BULE KERITING" yang dikelola oleh Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran. Program ini fokus pada budidaya ikan lele dalam kolam terpal sebagai upaya memenuhi kebutuhan protein hewani keluarga berisiko stunting, dengan tujuan mengurangi potensi kasus baru. Dengan dukungan dana APBD, pada tahun 2023, sebanyak sepuluh unit kolam terpal telah dibangun di sepuluh desa dengan insiden stunting, memastikan bahwa ikan yang dipanen dapat langsung meningkatkan asupan nutrisi bagi anak-anak dan balita terdampak.

Memilih ikan lele sebagai komoditas utama dalam program "BULE KERITING" bukan tanpa alasan. Pertama, ikan lele memiliki kandungan gizi yang tinggi. Sebagai perbandingan, ikan lele mengandung 16,2 protein di setiap 100 gramnya. Sementara per 100 gram telur ayam mengandung 12,4

gram protein. Selain protein, ikan lele juga mengandung omega-3, vitamin, dan mineral esensial yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak serta mencegah stunting. Kedua, budidaya ikan lele terkenal dengan efisiensi dan ketahanannya; lele dapat tumbuh cepat dan dibesarkan dalam berbagai kondisi lingkungan, termasuk dengan kolam terpal bahkan ember, yang membuatnya menjadi pilihan ideal untuk program "BULE KERITING".

Pelaksanaan "BULE KERITING" diharapkan tidak hanya akan berkontribusi pada penurunan signifikan angka stunting di Kabupaten Pangandaran tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan ketahanan pangan keluarga. Program ini dirancang berdasarkan analisis data empiris tentang kondisi stunting dan kebutuhan nutrisi, serta potensi sumber daya lokal yang belum dimaksimalkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan terarah, "BULE KERITING" bertujuan untuk memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, mempromosikan konsumsi ikan, dan secara umum, memerangi stunting di Kabupaten Pangandaran.

Inovasi BULE KERITING ini bertujuan untuk meningkatkan Konsumsi Protein Hewani (Ikan) di Kabupaten Pangandaran, sesuai tema. Adapun Tujuan spesifik dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Angka Konsumi Ikan (AKI);
2. Mempercepat penurunan angka prevalensi Stunting di Kabupaten Pangandaran;
3. Meningkatkan jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Pangandaran;
4. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi keluarga berisiko stunting.

2.4.4 SIGINA PERAWAN (Aplikasi Teknologi Tepat Guna Untuk Pengairan Sawah Tadah Hujan)

Desa Kondangjajar merupakan salah satu desa di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran memiliki luas wilayah 654.505 Ha yang terbagi dalam 4 (empat) dusun dan memiliki lahan sawah seluas 223,01 Ha. Lahan Sawah tersebut tersebar di seluruh dusun namun terluas ada di wilayah Dusun Binangun dan Dusun Cikaler dan paling sedikit di wilayah Dusun Kalensari. Diantara hamparan sawah tersebut, terdapat sawah yang hanya dapat diolah apabila terdapat hujan (sawah tadah hujan) yaitu di sebagian

kecil wilayah Dusun Kalensari dan di Dusun Garunggang atau tepatnya di blok 6 Karang Ampel Desa Kondangjajar dengan luas areal sawah + 20 Ha. Produksi padi yang dihasilkan dari lahan sawah di blok 6 Karang Ampel per tahun sekitar 80-95 ton. Hasil tersebut diperoleh dari satu kali masa tanam dalam setahun. Itupun apabila terdapat curah hujan yang lumayan besar.

Sekitar 5 (lima) tahun yang lalu pernah dibangun saluran cacing guna mengalirkan air dari saluran irigasi yang sumber airnya dari bendungan Merjan di Desa Kertayasa (Desa tetangga). Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena terjadi longsor di beberapa titik irigasi yang mengakibatkan saluran irigasi rusak parah sebelum mencapai hamparan sawah di blok 6 Karang Ampel Desa Kondangjajar.

Di sisi lain terdapat saluran irigasi terdekat yang dapat dijadikan sumber air, namun posisinya terhalang oleh bukit dan elevasinya berada di bawah permukaan hamparan sawah blok 6 Karang Ampel. Selain itu aliran airnya tidak stabil, kadang besar di musim hujan dan sebaliknya sedikit bahkan kering di musim kemarau.

Dengan demikian perlu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mencari sumber air yang tersedia secara terus menerus dan sebuah teknologi yang dapat mendorong air agar mencapai ketinggian tertentu guna melewati bukit. Tujuan inovasi SIGINA PERAWAN (Aplikasi Teknologi Tepat Guna Untuk Pengairan Sawah Tadah Hujan) antara lain:

1. Sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam rangka ikut berkontribusi dalam menekan laju inflasi;
2. Sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat;
3. Sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Pangandaran guna mendukung Pembangunan Sarana Prasarana Pertanian Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan.

2.4.5 Gerakan Masyarakat Nelayan Mandiri (GEMAR LARI) dengan SITERI (Sistem Tempat Pelelangan Ikan Terintegrasi)

Terwujudnya pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan merupakan program kegiatan dari KKP yang memiliki beberapa indikator, salah satunya jumlah Produksi Perikanan. Untuk mendukung program kegiatan dimaksud, salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Pangandaran adalah peningkatan produksi perikanan. Hal ini sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten dalam bidang perikanan tangkap berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pemberdayaan nelayan kecil.

Kabupaten Pangandaran memiliki 13 TPI yang diselenggarakan oleh 9 Koperasi Perikanan. TPI di Kabupaten Pangandaran masih secara aktif melakukan kegiatan pelelangan ikan. Ketertarikan nelayan untuk melakukan lelang di TPI harus tetap terjaga agar produksi perikanan tangkap dapat tercatat. Pelayanan Penyelenggaraan di TPI saat ini dalam kondisi semi-digital, yang dalam proses pelelangan ikan hasil tangkapan masih dilakukan dengan cara konvensional sedangkan pendataan produksi sudah menggunakan aplikasi secara offline. Keadaan ini memiliki kelemahan-kelemahan yaitu resiko human error dan data produksi yang belum bisa diakses secara real-time.

Dilain sisi, sarana usaha perikanan tangkap di Kabupaten Pangandaran masih kurang memadai. Masyarakat nelayan di Kabupaten Pangandaran masih memerlukan uluran tangan Pemerintah untuk membantu usahanya sehingga dapat meningkatkan produktifitas perikanan tangkap. Data produksi perikanan tangkap Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2. 26
Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Pangandaran

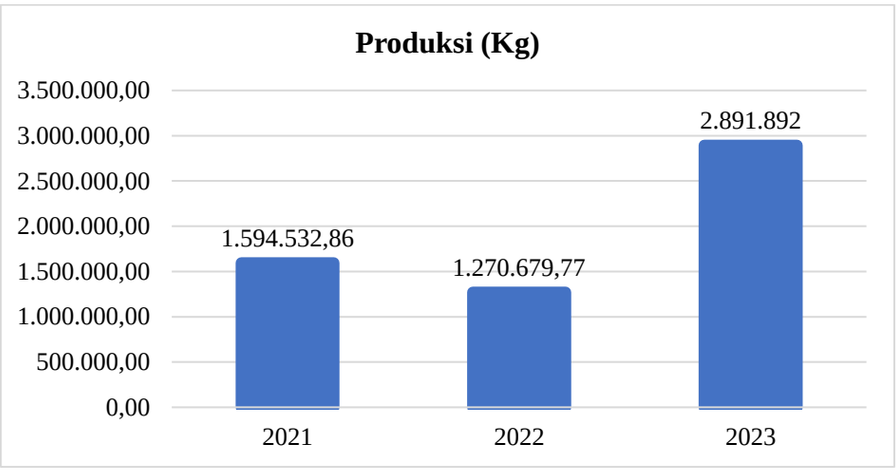

Sumber : DKPKP Kabupaten Pangandaran, 2024

Gambar 2. 27
Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi TPI Pangandaran

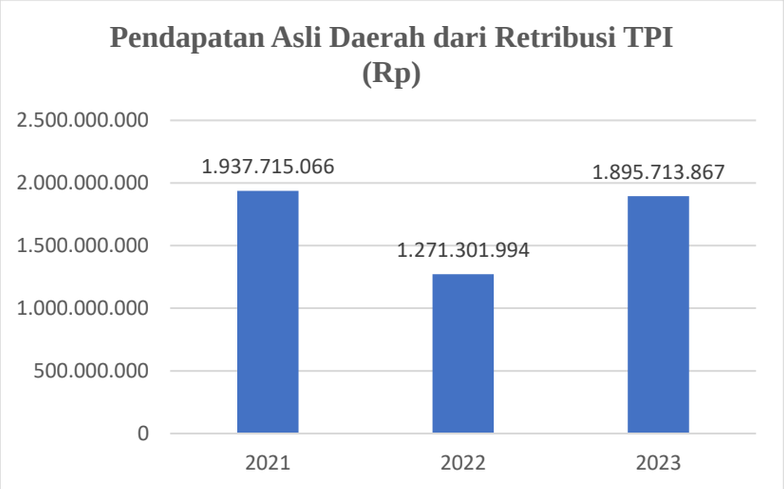

Sumber : DKPKP Kabupaten Pangandaran, 2024

Pemerintah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan tugas fungsi yang dimiliki selalu berupaya memberikan program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan produksi perikanan tangkap. Salah satu upaya yang secara terus menerus dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan produksi melalui pemberian Sarana dan Prasarana Usaha Penangkapan Ikan.

Tabel 2. 109
Data Bantuan Kabupaten PangandaranTahun 2021-2023

No	Tahun	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan	Penerima Bantuan
1.	2021	Coolbox	100 Unit	Masyarakat Nelayan Melalui Koperasi Perikanan
		Alat Penangkapan Ikan	42 Paket	
2.	2022	GPS	38 Unit	
		Mesin Kapal Perikanan	118 Unit	
3.	2023	Timbangan	13 Unit	
		Mesin Kapal	98 Unit	
		Rehabilitasi TPI Legokjawa	1 Unit	Aset Dinas

Sumber : DKPKP Kabupaten Pangandaran, 2024

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memecahkan permasalahan sebagaimana di atas yaitu dengan menyediakan Aplikasi pencatatan produksi (SITERI) (Sistem Tempat Pelelangan Ikan Terintegrasi) dan menyediakan sarana usaha perikanan tangkap untuk mewujudkan nelayan mandiri (GEMARLARI) (Gerakan Masyarakat Nelayan Mandiri). Tujuan spesifik dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan di TPI melalui aplikasi SITERI, salah satunya dalam hal pencatatan hasil produksi, sehingga kepercayaan nelayan dan pemasar hasil perikanan untuk bertransaksi di TPI meningkat juga;
2. Peningkatan kapasitas usaha kelompok nelayan melalui pemberian sarana penangkapan ikan dan pendampingan menuju masyarakat nelayan mandiri (GEMARLARI).

2.4.6 Hotel Maggot PAZERO (Pangandaran Zero Waste)

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Pangandaran. Sebagai salah satu destinasi wisata utama, peningkatan aktivitas di sektor pariwisata, khususnya dari hotel dan restoran, telah menyumbang secara signifikan terhadap volume sampah yang dihasilkan. Berdasarkan laporan JAKSTRADA tahun 2023, efektivitas penanganan sampah di Kabupaten Pangandaran baru mencapai 49,25%, jauh di bawah target nasional sebesar 72%. Lebih mengkhawatirkan lagi, hanya sebagian kecil dari sampah tersebut, yakni 3,26%, yang berhasil diolah melalui inisiatif Bank Sampah dan TPS3R.

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan strategi dan solusi inovatif dalam pengelolaan sampah. Proposal kegiatan Hotel Maggot PAZERO (Pangandaran Zero Waste) muncul sebagai respons strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan usulan anggaran Rp. 2.700.000.000,-, kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran tetapi juga mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular dalam pengolahan sampah organik.

Permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan sampah meliputi rendahnya persentase pengelolaan sampah yang berhasil diatasi yang hanya mencapai 49,25% dari target nasional, kapasitas pengolahan sampah, terutama sampah organik, yang sangat terbatas, dengan hanya 3,26% yang berhasil diolah melalui inisiatif existing, sarana dan prasarana untuk pengolahan sampah yang belum memadai, sehingga pengelolaan sampah organik dari hotel dan restoran masih jauh dari optimal, kurangnya inovasi dalam pengelolaan sampah yang tidak hanya

fokus pada pengurangan volume sampah, tapi juga pemanfaatan sampah sebagai sumber nilai ekonomi.

Kegiatan Hotel Maggot PAZERO bertujuan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah organik di Kabupaten Pangandaran dengan meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengolahan sampah, menerapkan prinsip ekonomi sirkular dalam pengolahan sampah organik, dengan mengubah sampah menjadi produk bernilai ekonomi seperti magot fresh, magot kering, pelet, pupuk organik kasgot, serta ikan dan unggas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penciptaan peluang usaha baru dan peningkatan kesejahteraan dan juga mendukung pencapaian target pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran dan mewujudkan visi Pangandaran Bebas Sampah. Tujuan inovasi Hotel Maggot PAZERO (Pangandaran Zero Waste):

1. Mengurangi volume sampah organik, peningkatan kapasitas pengolahan sampah;
2. Pengembangan kemitraan;
3. Pendidikan dan kesadaran lingkungan;
4. Keberlanjutan lingkungan pengembangan ekonomi lokal;
5. Model pengelolaan sampah berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah
Kabupaten Pangandaran

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran
2025

@pangandaranbappeda
https://bappeda.pangandarankab.go.id

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah memuat tentang kondisi perekonomian dan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran tahun 2025. Kerangka keuangan/pendanaan daerah memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi sumber pendapatan dan besaran pendapatan daerah, perkiraan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2025. Lebih jelasnya, dua informasi ini menggambarkan seperti apa kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan daerah, pelaksanaan program-program pembangunan tahun 2025 dan dampak program-program tersebut pada kesejahteraan masyarakat. Gambaran tersebut terefleksikan dari target/proyeksi kerangka ekonomi makro daerah Kabupaten Pangandaran.

Kerangka ekonomi daerah dan proyeksi perekonomian daerah dapat menjadi landasan untuk menentukan arah kebijakan alokasi keuangan daerah secara optimal. Hal tersebut dilakukan melalui suatu pendekatan, *money follow program*, yang bermuara pada alokasi anggaran daerah yang efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2025 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2023 dan kondisi perkembangan ekonomi pada semester I tahun 2024, target tahun 2025 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2024 dan 2025. Selain itu, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran mempertimbangkan hasil analisis dan proyeksi perkembangan ekonomi global, nasional dan provinsi serta arah kebijakan dan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran.

3.1.1 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Arah pembangunan ekonomi daerah

berarti melaksanakan pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan arah kebijakan daerah sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman pada perekonomian global, ekonomi nasional, ekonomi provinsi dan berlandaskan pada kondisi perekonomian di Kabupaten Pangandaran.

Pada tahun 2023 kondisi kesehatan masyarakat akibat Covid-19 sudah sepenuhnya membaik, sehingga perekonomian Kabupaten Pangandaran berada di fase penormala, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin mendekati kondisi sebelum pandemic Covid-19 di berbagai sektor lapangan usaha. Sementara pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Pangandaran diharapkan telah memasuki percepatan pertumbuhan dan pemerataan, yang didorong oleh peningkatan ekosistem investasi, pemberdayaan UMKM, kemudahan untuk berusaha, dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan terus diimplementasikan hingga tahun 2025.

Tujuan pembangunan ekonomi adalah mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Kondisi perekonomian dan kinerja perekonomian di Kabupaten Pangandaran dapat tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Indikator yang dapat digunakan dalam menjelaskan kinerja ekonomi yakni Laju Pertumbuhan Ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, dan Indeks Gini.

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan digunakan sebagai tolak ukur laju pertumbuhan ekonomi. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangandaran tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran 2016-2023 dapat dilihat dalam Gambar berikut:

Gambar 3. 1
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2023 (%)

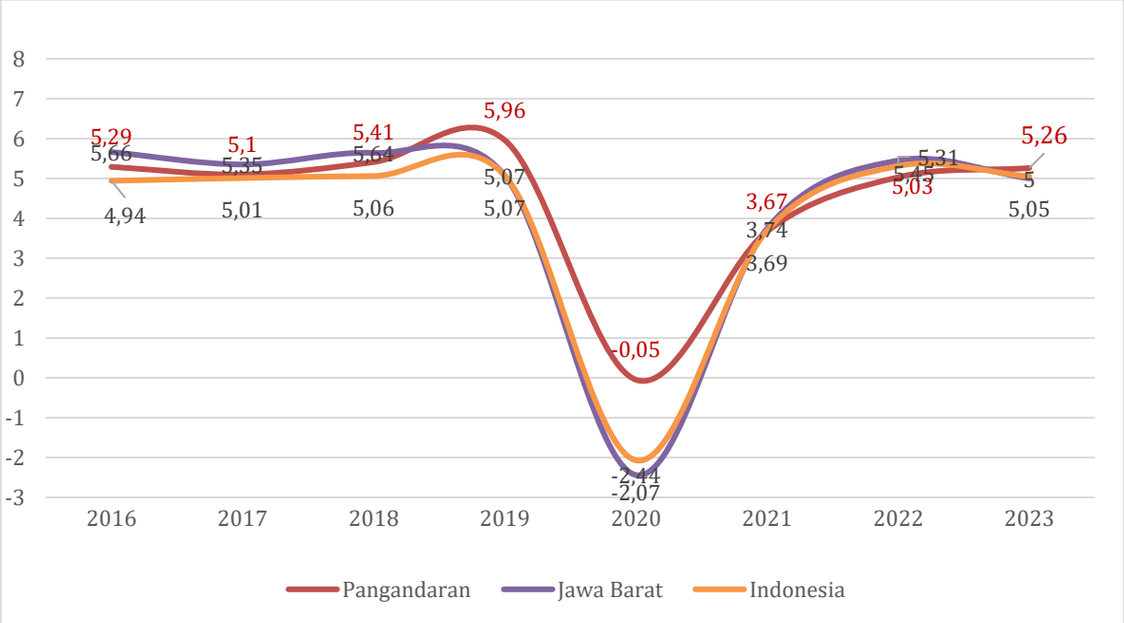

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024, Diolah

Gambar 3. 2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2023

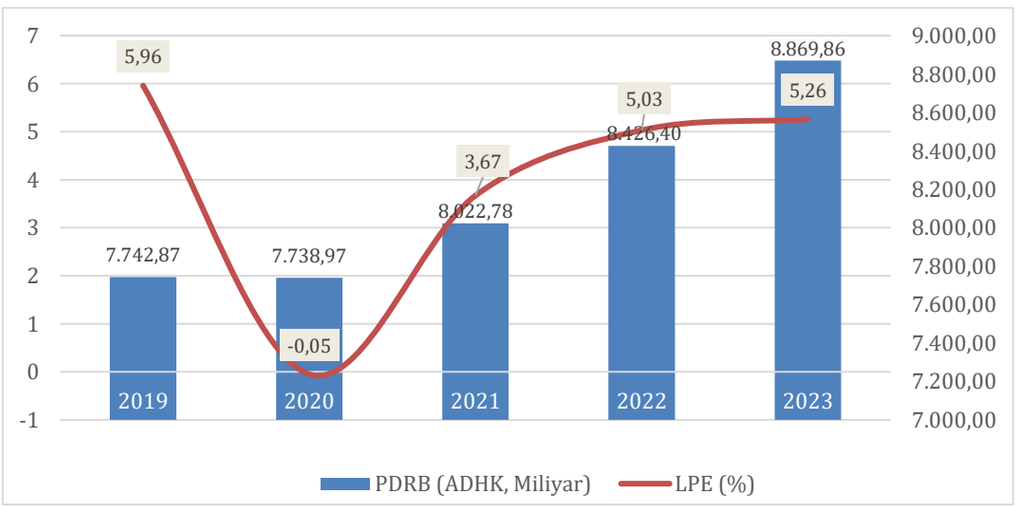

Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran, 2024, Diolah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran periode tahun 2019-2023 berfluktuatif, yakni sebesar 5,94 persen tahun 2019. Pada tahun 2020, saat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 0,05 persen (negatif 0,05 persen). Pada tahun 2021 mulai bangkit

dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,67 persen, dilanjutkan pada tahun 2022 dengan nilai pertumbuhan sebesar 5,03 persen. Serta tumbuh kembali menjadi 5,26 persen pada tahun 2023.

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Tabel 3. 1
PDRB ADHB Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran
Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.143,79	3.241,83	3.485,23	3.631,92
B	Pertambangan dan Penggalian	64,07	72,32	75,09	77,82
C	Industri Pengolahan	549,52	592,38	663,41	710,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,16	9,03	9,70	9,97
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,84	2,07	2,13	2,14
F	Konstruksi	928,67	1.023,09	1.019,50	1.101,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.243,97	2.368,36	2.605,46	2.792,70
H	Transportasi dan Pergudangan	1.330,79	1.403,19	1.574,37	1.934,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.091,41	1.162,85	1.325,48	1.449,88
J	Informasi dan Komunikasi	229,65	242,55	249,04	261,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	214,09	237,91	267,33	276,11
L	Real Estate	328,40	361,77	395,47	412,92
M,N	Jasa Perusahaan	112,47	122,79	137,30	143,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	318,26	312,33	311,59	320,93
P	Jasa Pendidikan	728,21	767,95	793,54	848,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25,14	27,49	29,77	31,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	179,78	181,78	219,30	251,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		11.498,23	12.129,69	13.163,70	14.256,42

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2024

Tabel 3. 2
PDRB ADHK Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran
Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.855,81	1.898,15	1.963,55	1.990,67
B	Pertambangan dan Penggalian	48,29	52,63	53,10	53,66
C	Industri Pengolahan	382,61	403,46	437,93	455,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,54	6,09	6,51	6,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,12	1,24	1,28	1,27
F	Konstruksi	688,58	729,18	712,27	754,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.698,73	1.759,30	1.861,28	1.944,78
H	Transportasi dan Pergudangan	843,37	871,80	938,53	1.091,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	689,69	711,21	785,69	834,47
J	Informasi dan Komunikasi	222,49	238,55	248,14	260,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	152,08	161,19	168,19	170,67
L	Real Estate	260,40	286,18	308,27	318,27
M,N	Jasa Perusahaan	71,70	77,82	85,14	86,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	231,60	224,90	224,97	229,31
P	Jasa Pendidikan	426,00	437,07	446,80	468,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,52	19,86	21,14	22,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	142,43	144,15	163,61	180,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		7.738,97	8.022,78	8.426,40	8.869,86

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2024

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 Kabupaten Pangandaran didorong oleh peningkatan produksi pada beberapa lapangan usaha. Percepatan pertumbuhan ekonomi Pangandaran pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 disebabkan karena hampir sebagian besar kategori lapangan usaha mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan oleh ada percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang berdampak pada kembalinya pergerakan roda perekonomian khususnya sektor pariwisata. Angka tersebut terus meningkat sampai dengan tahun 2023 dengan angka capaian pertumbuhan mencapai 5,26%.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Pangandaran didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Pangandaran.

Selama periode 2018-2023, diantara kelima kategori lapangan usaha tersebut, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah kategori yang peranannya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini wajar, Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu destinasi wisata yang sudah cukup terkenal baik pada level nasional maupun internasional. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran terus menata sarana dan prasarana pendukung pariwisata. Pantai Pangandaran direncanakan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menjadikan wisata kelas dunia sebagai salah satu program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3. 3
Perkembangan PDRB Kabupaten Pangandaran
Tahun 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,05	3,67	5,03	5,26
PDRB ADHB (miliar Rp.)	11.498,28	12.129,79	13.163,70	14.256,42
PDRB ADHK (miliar Rp.)	7.738,968	8.022,780	8.426,400	8.869,86
PDRB per Kapita ADHB (juta Rp.)	27,195	28,366	30,444	32,616
PDRB per Kapita ADHK (juta Rp.)	18,303	18,761	19,488	20,293

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. PDRB Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 atas dasar harga berlaku sebesar 14.256,42 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2023 sebesar 8.869,86 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2022, PDRB tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,093 triliun rupiah atau 8,30 persen. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2023 yaitu sebesar 5,26 persen.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. Indikator ini merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Pangandaran tahun 2020 sampai dengan 2022 terus mengalami kenaikan. PDRB perkapita tiga tahun terakhir secara berturut-turut sebesar 28,366 juta rupiah pada tahun 2021, 30,444 juta rupiah pada tahun 2022 dan 32,616 juta rupiah pada tahun 2023.

3.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Jenis Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran tahun 2019-2023 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Pangandaran pada periode bersangkutan. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.

Tabel 3. 4
Perbandingan Indikator Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

Uraian	PDRB ADHB (Milyar)	Distribusi Persentase PDRB ADHB (%)	PDRB ADHK (Milyar)	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.990,94	56,05	4.996,20	3,86
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	113,37	0,80	70,93	8,46
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.123,80	7,88	638,41	-0,09
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.124,48	21,92	1.852,05	4,96
Pembentukan Inventori	16,41	0,12	12,78	NA
Net Ekspor Barang dan Jasa	1.887,41	13,24	1.299,49	NA
PDRB	**14.256,42**	**100,00**	**8.869,86**	**5,26**

Pada tahun 2023, distribusi persentase masing-masing komponen PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Pangandaran sebagai berikut konsumsi rumah tangga sebesar 56,05 persen, konsumsi LNPRT sebesar

0,80 persen, konsumsi pemerintah sebesar 7,88 persen, pembentukan modal tetap bruto sebesar 21,92 persen, perubahan inventori sebesar 0,12 persen dan Net Ekspor Impor antar daerah sebesar 13,24 persen.

3.1.2 Inflasi

Perhitungan inflasi Kabupaten Pangandaran berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya. Pada Desember 2023, Kota Tasikmalaya mengalami inflasi karena secara umum perkembangan harga berbagai komoditas barang/jasa menunjukan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Tasikmalaya, pada Desember 2023 terjadi inflasi sebesar 0,27%, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 114,65 pada November 2023 menjadi 114,96 pada Desember 2023. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2023 sebesar 2,84% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 2,84%.

Gambar 3. 3
Perbandingan Inflasi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2023 (%)

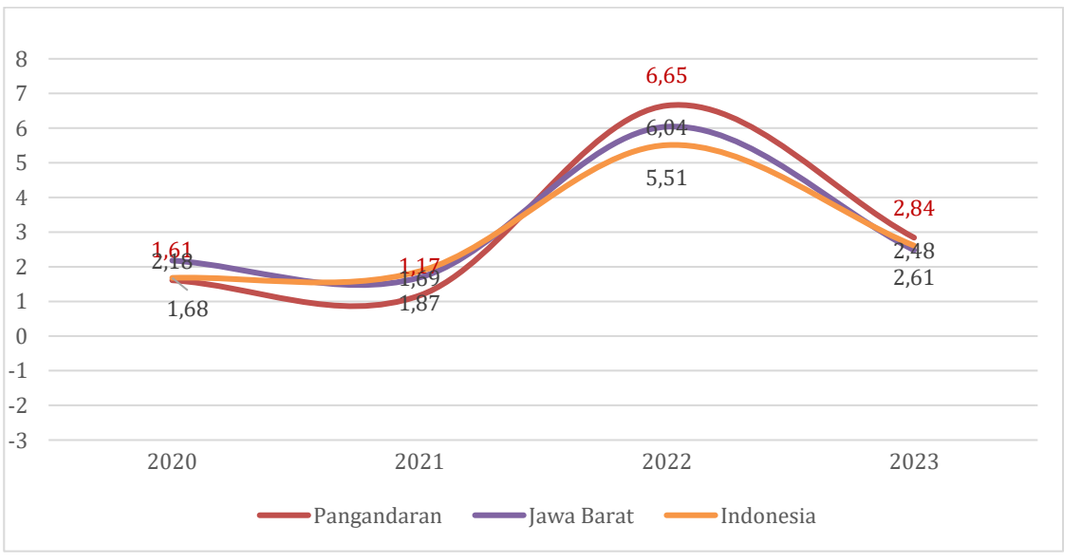

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024, Diolah

3.1.3 Ketenagakerjaan

Pada tahun 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pangandaran sebesar 80,15 persen, meningkat dari tahun 2022 sebesar 79,92 persen. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten

Pangandaran menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 1,56 persen pada tahun 2022 menjadi 1,52 persen pada tahun 2023. Tingkat pengangguran perempuan lebih kecil dibandingkan laki-laki. Sejalan dengan TPT yang menurun, maka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

TPT yang kecil ini diharapkan berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu perlu diiringi dengan kecukupan upah/gaji/pendapatan penduduk yang bekerja. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Pada tahun 2022, UMK di Kabupaten Pangandaran tercatat sebesar Rp 2.070.192, atau naik sebesar Rp 67 ribu dari tahun sebelumnya.

Gambar 3. 4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016-2023 (%)

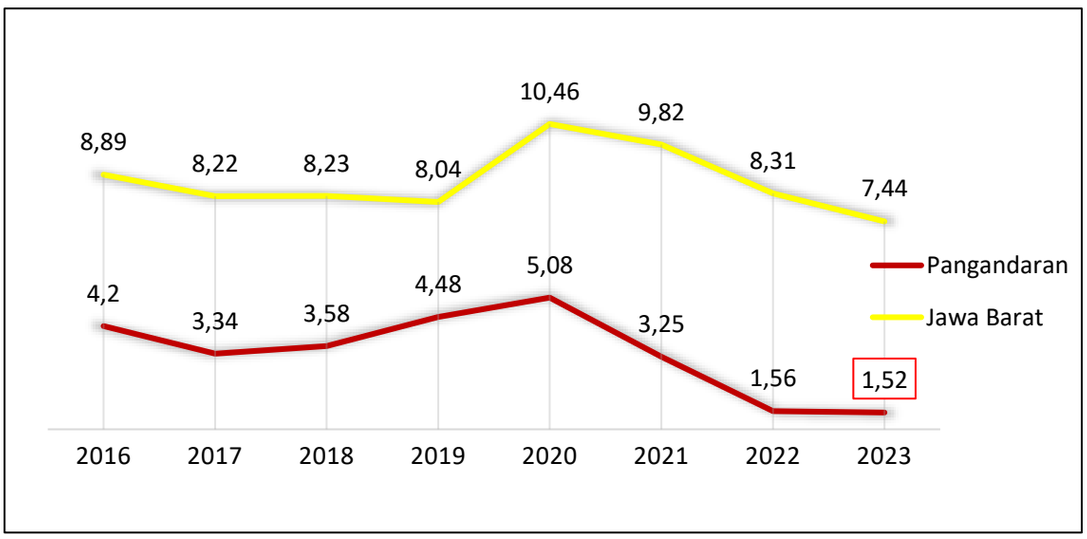

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024, Diolah

3.1.4 Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pergeseran garis kemiskinan Kabupaten Pangandaran berpengaruh terhadap jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin sekitar 8,12 persen dan pada tahun 2019 sekitar 7,71 persen. Namun pada tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19,

sehingga persentase penduduk miskin meningkat menjadi 8,99 persen. Selanjutnya pada tahun 2021, ekonomi belum mampu melepaskan penduduk dari kemiskinan, persentase penduduk miskin naik menjadi sebesar 9,65 persen dan di tahun 2023 saat ekonomi semakin membaik maka persentase penduduk miskin turun menjadi 8,98 persen.

Gambar 3. 5
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2023

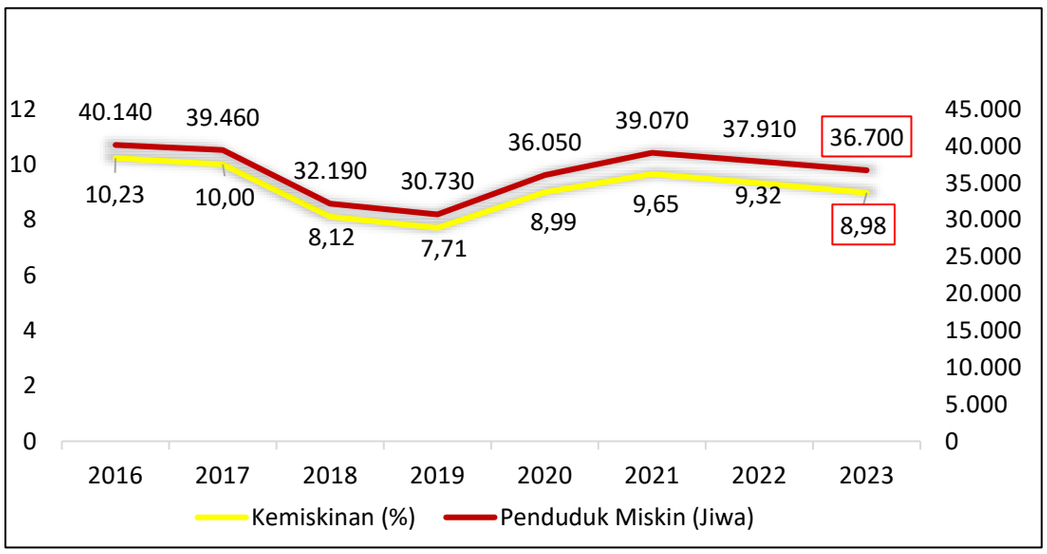

Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran, 2024, Diolah

3.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan/ketidakmerataan pendapatan di suatu wilayah secara keseluruhan dengan melihat perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga atau individu dengan total pendapatan. Indeks gini Kabupaten Pangandaran tahun 2023 sebesar 0,323 naik dari tahun 2022 akan tetapi masih masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa pendapatan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran hampir merata karena didukung oleh kebijakan pembangunan infrastruktur di semua wilayah untuk menunjang perekonomian masyarakat.

Gambar 3. 6
Indeks Gini Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016-2023 (Poin)

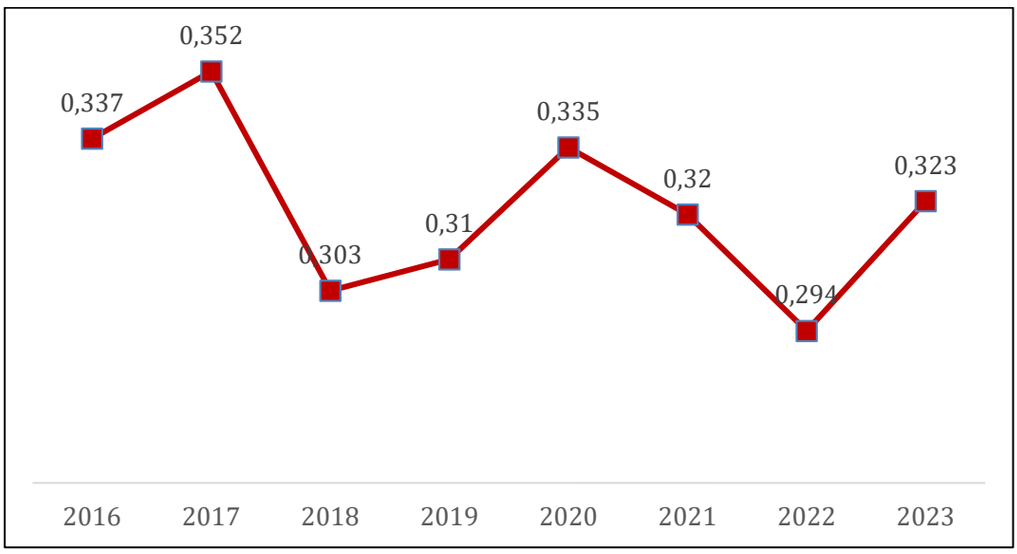

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024, Diolah

3.1.6 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

1. Tantangan dan Prospek Ekonomi Global

Kondisi perekonomian global pada tahun 2024 masih diwarnai oleh risiko dan ketidakpastian keuangan global yang disebabkan oleh kebijakan moneter AS dan eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Aktivitas perekonomian dunia mengalami perlambatan di tahun 2023 seiring dengan menurunnya aktivitas perdagangan dan manufaktur, harga komoditas, serta upaya bank sentral berbagai negara untuk menurunkan inflasi. Namun, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 diperkirakan lebih baik dibandingkan capaian tahun 2023 dan Outlook 2024. Dalam menyikapi megatrend global tersebut, tentunya perlu adanya perubahan paradigma implementasi pembangunan dimana perlu didorong kebijakan pembangunan yang mendukung lingkungan, menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang lebih berkelanjutan, serta meningkatkan sistem finansial digital.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memprediksi pertumbuhan PDB global sebesar 2,9% pada 2024 dan sedikit peningkatan menjadi 3,0% pada 2025. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 3,1%, relatif sama dengan pertumbuhan

tahun 2023. Sementara itu, dalam World Economic Outlook (WEO) April 2024, IMF lebih optimis dan memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 pada 3,2%. Terjaganya pertumbuhan ekonomi global, meski laju pertumbuhannya tidak merata di seluruh negara dan wilayah dan inflasi masih di atas target. Sementara itu, Asia diperkirakan akan terus menyumbang sebagian besar pertumbuhan global pada 2024-2025 mendatang, seperti yang terjadi pada 2023. Di sisi lain, inflasi diperkirakan akan terus menurun secara bertahap seiring dengan meredanya tekanan biaya. Selain itu, Outlook OECD juga menyoroti sejumlah tantangan. Organisasi tersebut menyebut ketegangan geopolitik masih menjadi sumber utama ketidakpastian dan semakin meningkat akibat dari berkembangnya konflik di Timur Tengah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mengalami sedikit perlambatan menjadi 5,05 persen, tetapi tetap menunjukkan ketahanan yang signifikan dalam konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti inflasi yang tinggi dan perlambatan ekonomi global, kestabilan politik dan ekonomi, didukung oleh kebijakan pemerintah yang proaktif, berkontribusi pada ketahanan yang terjaga dalam menghadapi terpaan eksternal dan internal.

2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mengalami sedikit perlambatan menjadi 5,05 persen, tetapi tetap menunjukkan ketahanan yang signifikan dalam konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti inflasi yang tinggi dan perlambatan ekonomi global, kestabilan politik dan ekonomi, didukung oleh kebijakan pemerintah yang proaktif, berkontribusi pada ketahanan yang terjaga dalam menghadapi terpaan eksternal dan internal.

Proses perkembangan ekonomi Indonesia juga terus berlanjut, mencerminkan keseimbangan dalam ketidakpastian yang inheren dalam konteks panggung ekonomi global. Sementara tantangan global seperti perang di Ukraina dan kenaikan suku bunga tetap di depan, langkah-langkah kebijakan yang bijak dan kehati-hatian di tingkat domestik akan dapat memitigasi dampaknya. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,0 persen pada tahun 2024, Indonesia perlu menjaga momentum positif melalui stabilitas, pertumbuhan berkelanjutan, perlindungan terhadap masyarakat rentan, dan percepatan reformasi struktural. Meskipun tantangan tetap ada,

perekonomian Indonesia siap menghadapi dinamika global dengan langkah-langkah yang tepat dan terukur.

Secara keseluruhan tahun 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam kisaran 4,7-5,5%. Berdasarkan Lapangan Usaha, sektor industri pengolahan, sektor informasi dan komunikasi, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor konstruksi diperkirakan tumbuh kuat. Dengan strategi yang tepat guna serta kebijakan tangguh dan lincah, perekonomian Indonesia diharapkan mampu mengarungi badai tantangan global dan domestik di 2024, serta menjaga laju pertumbuhan ekonomi tetap kokoh berakar pada stabilitas, kualitas, dan keberlanjutan

3. Tantangan dan Prospek Ekonomi Jawa Barat

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2024 tumbuh positif sebesar 4,93%, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 5,15%. Pertumbuhan positif tersebut utamanya ditopang oleh permintaan domestik seiring peningkatan mobilitas masyarakat, kenaikan investasi, dan konsumsi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh positif dalam kisaran 4,6%-5,4%. Optimisme tersebut didasarkan pada permintaan domestik yang tetap kuat seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat seiring semakin kondusifnya situasi perekonomian di tengah pemerintahan baru. Di sisi lain, dinamika ketidakpastian global dan menguatkan tensi geopolitik masih akan mewarnai pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2024 karena berpotensi mempengaruhi investasi yang bersifat wait & see terhadap pemerintahan baru terpilih dan sektor industri pengolahan.

Realisasi inflasi gabungan 7 kota IHK Provinsi Jawa Barat periode laporan tercatat sebesar 3,48%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,48%. Pada triwulan II tahun 2024 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2024.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tumbuh positif, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan tumbuh positif sebagaimana tercermin dari penurunan jumlah pengangguran (TPT), peningkatan lapangan pekerjaan, (TPAK) turunnya angka kemiskinan dan ketimpangan di Jawa Barat serta peningkatan kesejahteraan petani (NTP) yang semakin memperkuat optimisme kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Persentase penduduk miskin pada periode Maret 2023 tercatat sebesar 7,62%, turun sebanyak 165,02 ribu orang dibandingkan periode September 2022

(7,98%). Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024 tercatat sebesar 6,91% turun 0,98 poin dibandingkan angka pada Februari 2023 (7,89%). Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Barat yang terus meningkat seiring dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang khususnya pada sektor industri pengolahan. TPAK Jawa Barat pada periode Februari 2024 mencapai 67,34% meningkat dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 66,75%.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh positif dalam kisaran 4,6 - 5,4%. Optimisme didasarkan pada permintaan domestik yang tetap kuat seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan potensi penguatan investasi. Kinerja beberapa sektor lapangan usaha diperkirakan lebih baik dari tahun 2023, seperti sektor pertanian karena berakhirnya fenomena el nino tahun 2023, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum karena peningkatan mobilitas masyarakat, sektor konstruksi seiring berlanjutnya aktivitas Proyek Strategis Nasional (PSN). Bank Indonesia memperkirakan inflasi gabungan kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 tetap berada dalam rentang sasaran nasional 2,5±1%. Oleh karena itu sinergitas dan eksplorasi serta optimalisasi sumber pertumbuhan ekonomi baru (keuangan hijau, keuangan syariah, hilirisasi industri, dan sektor pariwisata) perlu dilakukan guna menjaga ketahanan ekonomi Jawa Barat.

Tantangan perekonomian Jawa Barat bersumber dari belum meratanya investasi yang masuk ke Jawa Barat, tekanan inflasi di negara maju dan kebijakan moneter yang ketat, sertu perubahan iklim bagi sektor pertanian. Tantangan perekonomian Jawa Barat pada tahun 2025 meliputi:

1) Memelihara stabilitas kinerja perekonomian di tengah ketidakpastian perekonomian global;
2) Akselerasi produktivitas sector kunci PDRB Jawa Barat melalui percepatan realisasi investasi;
3) Optimalisasi ekonomi digital dan industri yang berbasis high tech;
4) Penguatan konektivitas dan inklusivitas ekonomi Jawa Barat, diversifikasi ekonomi khususnya UMKM, IKM serta pariwisata;
5) Pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan di tengah perubahan iklim;
6) Tenaga kerja yang terampil sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, dan nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2024. Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan provinsi Jawa Barat.

4. Tantangan dan Prospek Ekonomi Pangandaran

Perkiraan kondisi perekonomian daerah pada tahun 2024 tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Faktor internal terkait dengan arah kebijakan pengembangan ekonomi ke depan guna merespon tantangan yang dihadapi serta faktor eksternal yang mencakup perkembangan ekonomi regional dan nasional yang dipengaruhi arah kebijakan ekonomi di tingkat provinsi dan nasional. Tantangan yang dihadapi pada tahun 2024 yaitu upaya pemulihan ekonomi baik di tingkat global maupun domestik, kondisi sektor keuangan yang belum stabil, kondisi geopolitik yang memanas serta tingkat inflasi yang masih relatif tinggi.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan ekonomi daerah pada tahun 2025 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Intensitas alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang diperkirakan akan semakin tinggi, sehingga dapat menggerus kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB;
b. Di sektor pariwisata, memberikan tantangan untuk menciptakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih resilien, adaptif dan berdaya saing dengan mengedepankan kearifan lokal. Perubahan model bisnis dari traditional tourism management menjadi digital tourism management serta perubahan orientasi segmen pasar dari wisatawan mancanegara menjadi wisatawan nusantara merupakan tantangan yang dihadapi dalam upaya pemulihan sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif berbasis digital untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di masa depan.
c. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas harus menjadi pengarusutamaan strategi pembangunan daerah kedepan guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Urgensi pembangunan sumber

daya manusia menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing daerah mengingat penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja.

Perkembangan terkini perekonomian Kabupaten Pangandaran sampai dengan tahun 2023 memberikan gambaran prospek kinerja ekonomi ke depan. Prospek perekonomian tergambarkan dari proyeksi kerangka ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin. Perkiraan kondisi perekonomian. Maka arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 difokuskan untuk mendukung pencapaian kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) terkait pelayanan dasar.

Tabel 3. 5
Target dan Capaian Indikator Makro daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021-2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
		Capaian	Capaian	Capaian	Target	Target
1.	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**	3,67	5,03	5,26	5,55	5,26-5,55
	PDRB ADHK (Milyar Rp.)	8,023	8,426	8,869	9,261	9,853
2.	**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**	3,25	1,56	1,52	1,50	1,31-1,43
	Jumlah Pengangguran Terbuka (Orang)	7.839	4.077	4.164	4.050	3.861
3.	**Indeks Pembangunan Manusia (Poin)**	69,46	70,21	70,57	70,70	71,03
	HLS (Tahun)	12,08	12,11	12,3	12,32	12,36
	RLS (Tahun)	7,85	8,03	8,04	8,06	8,12
	UHH (Tahun)	74,32	74,32	74,88	74,98	75,28
	Pengeluaran per Kapita (Juta Rp.)	9,065	9,389	9,406	9,948	9,515
4.	**Tingkat Kemiskinan (%)**	9,65	9,32	8,98	8,50	7,43-8,2
	Penduduk Miskin (Orang)	39.070	37.910	36.700	36.116	35.523
5.	**Indeks Gini (Poin)**	0,320	0,294	0,323	0,315	0,318-0,331

Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran dan RPJMD Kabupaten Pangandaran, 2024, DIolah

Berdasarkan capaian ekonomi makro dibeberapa indikator terlihat bahwa pangandaran mengalami peningkatan ke arah yang positif. Pertumbuhan Ekonomi Pangandaran mengalami peningkatan dalam tiga

tahun terakhir, hal ini membawa optimisme bahwa pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi ditargetkan mengalami peningkatan. Angka pengangguran menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat Pangandaran telah memiliki pekerjaan sehingga angka pengangguran di Kabupaten Pangandaran termasuk dalam kategori rendah. Indeks Pembangunan Manusia juga menunjukkan tren yang positif, bahkan capaian pada tahun 2023 telah melampaui target. Angka kemiskinan mengalami penurunan pada tahun 2023, walaupun belum melampaui angka yang ditargetkan. Indeks gini Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan dan diproyeksikan akan kembali menurun di tahun 2024.

Prospek membaiknya pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diperkirakan juga memberikan dampak besar bagi perekonomian tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia diperkirakan meningkat, tingkat kesenjangan menyempit, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat kemiskinan menurun. Dalam rangka mengejar target kinerja dalam RPJMD, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan sektor-sektor unggulan penggerak ekonomi daerah, diantaranya pariwisata, pertanian, perdagangan, industri pengolahan dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Berikut perkiraan kondisi perekonomian:

Tabel 3. 6
Target Indikator Makro Nasional-Provinsi-Pangandaran Tahun 2025

No.	Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Target Pangandaran	
		2025	2025	2024	2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,6	4,96-5,37	5,55	5,26-5,55
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5-5,0	6,42-6,99	1,50	1,31-1,43
3.	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	0,56	0,55	70,70	71,03
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	5,85-6,46	8,50	7,43-8,2
5.	Indeks Gini (Poin)	0,379-0,382	0,383-0,390	0,315	0,318-0,331

Sumber: RKP 2025, RKPD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kab. Pangandaran

3.1.7 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

3.1.7.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Arah kebijakan tahun 2024 dan 2025 difokuskan

pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (5,3-5,6 %), Indeks Modal Manusia (0,56 poin), Nilai Tukar Petani (113-115 kumulatif), Nilai Tukar Nelayan (104-104 kumulatif), dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (4,5-5,0 %), Rasio Gini (0,379-0,382 poin), Tingkat Kemiskinan (7,0-8,0 %), serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (38,6%).

A. Fokus Kebijakan Makro Tahun 2025

1. Percepatan Transformasi Ekonomi

   Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.

2. Pembangunan Inklusif

   Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

3. Pembangunan Berkelanjutan

   Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.

4. Mewujudkan Stabilitas Ekonomi

Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2025, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian. Upaya mewujudkan stabilitas ekonomi diarahkan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2025 yang aman dan kondusif.

B. Prioritas Nasional

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

C. Mencapai Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata

Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan dilaksanakan melalui strategi (1) peningkatan daya saing dan daya dukung kepariwisataan Indonesia di tingkat dunia; (2) peningkatan tenaga kerja terampil melalui reskilling dan upskilling serta sertifikasi kompetensi; (3) penguatan desa wisata melalui penguatan narasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan diversifikasi produk dan layanan; (4) peningkatan ragam dan kualitas usaha industri dan rantai pasok destinasi pariwisata; (5) integrasi pola perjalanan di destinasi yang terintegrasi dengan standar Layanan pariwisata yang baik; (6) penguatan pemasaran Wonderful Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia, dan Bangga Buatan Indonesia; (7) *lill refoatsing* pasar wisatawan mancanegara berkualitas yang didukung oleh aturan visa dan kemudahan berwisata; (8) penguatan pembiayaan, investasi, infrastruktur, dan penerapan hak kekayaan intelektual ekonomi kreatif dan digital; (9) penguatan industri kreatif berbasis konten; serta (10) penguatan ekspor gastronomi melalui "*Indonesia Spice Up The World*".

3.1.7.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi

Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2025 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan.

Arah pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2025 tersebut dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan diferensiasi produk di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan :
   a. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian serta kelautan dan perikanan;
   b. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
   c. Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan intensifikasi pertanian;
   d. Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan petani;

e. Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
f. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
g. Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas;
h. Penerapan prinsip UMKM hijau terutama yang mengembangkan potensi unggulan daerah;
i. Peningkatan perhutanan sosial;

2. Pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
   a. Perbaikan tata kelola pangan, dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan;
   b. Integrasi Kultur (Budaya) dalam Peningkatan Daya Saing Pangan Lokal;
   c. Pengembangan Smart Fishing dan Sustainable Aquaculture.
3. Peningkatan Daya Saing Produk Industri dan Perdagangan, dengan arah kebijakan :
   a. Penerapan link and match industri kecil-industri besar;
   b. Pengembangan IKM dan industri hijau;
   c. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta pengembangan sentra industri terpadu;
   d. Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta perdagangan digital;
   e. Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan ekspor;
   f. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok.
4. Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal, transformasi perluasan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan :
   a. Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi;
   b. Promosi dan peningkatan layanan investasi;
   c. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas
   d. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global;
   e. Peningkatan keterampilan angkatan kerja;

f. Pengembangan pendidikan vokasional sesuai dengan kebutuhan kerja;
g. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan;
h. pembentukan wirausaha baru;
i. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha kecil.

5. Peningkatan daya saing pariwisata, dengan arah kebijakan:
   a. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing;
   b. Peningkatan dan perluasan promosi dan pemasaran pariwisata dan produk ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis;
   c. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
   d. Pengembangan budaya lokal yang mendukung pengembangan pariwisata.

3.1.7.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Pangandaran

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, dengan mempertimbangkan arah kebijakan ekonomi provinsi dan nasional yang didukung dengan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kinerja sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan kelautan berbasis Kawasan, komoditi unggulan dan korporasi;
b. Perluasan fasilitas inkubasi bagi pelaku ekonomi kreatif;
c. Peningkatan utilitas aktor ekonomi kreatif melalui kualitas sarana dan prasarana yang bermutu;
d. Penguatan SDM dan daya saing produk ekonomi kreatif;
e. Peningkatan kualitas Sumber Daya Potensial di berbagai sektor; dan
f. Pengawalan percepatan realisasi proyek strategis yang sudah memiliki perizinan.

Gambar 3. 7
Arah Kebijakan Ekonomi 2025 Pangandaran

Sumber: Diolah Penyusun, 2024

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan menjadi pedoman selama 1 (satu) tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Pangandaran tahun 2025 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (4) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa konsekuensi terjadinya perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal ditandai dengan pemberian wewenang bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan daerah serta menciptakan kemandirian fiskal agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi terkait erat dengan peran anggaran untuk memperbaiki efisiensi ekonomi dan bekerjanya mekanisme pasar secara baik. Fungsi distribusi dibutuhkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan baik dalam proses maupun hasil pembangunan, baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah. Fungsi stabilisasi harus terus diperkuat sebagai shock absorber untuk meredam berbagai gejolak, khususnya gejolak dari eksternal, sehingga dampak pada perekonomian domestik serta masyarakat miskin dan rentan relatif minimal.

Strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka menengah panjang dan strategi jangka pendek. Strategi jangka menengah-panjang dengan fokus untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan berkelanjutan, penguatan inklusivitas, serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Sementara itu, strategi jangka pendek difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*well-being*), serta penguatan konvergensi antardaerah. Pencapaian tiga tujuan jangka pendek tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas fiskal melalui kebijakan transfer ke daerah yang asimetris, penguatan optimalisasi PAD (*collecting more*), dan penguatan pembiayaan (*innovative financing*) serta mendorong penguatan kualitas belanja daerah (*spending better*) melalui perbaikan belanja yang produktif baik kualitas maupun kuantitas dalam rangka penguatan investasi di daerah maupun perbaikan kualitas layanan publik di daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) yang merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *public private partnership* (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

3.2.1 Kondisi, Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Untuk itu, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang

kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Sebab kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek pendapatan, aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Aspek belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Aspek pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Potensi peningkatan PAD yang dianalisis berdasarkan realisasi pendapatan daerah digunakan sebagai dasar penentuan arah kebijakan pendapatan Kabupaten Pangandaran.

Adapun arah kebijakan pendapatan Kabupaten Pangandaran tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan pajak yang berasal dari pajak hotel dan pajak restoran, agar sesuai dengan proyeksi pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pungutan baru yang memenuhi kriteria dan mengurangi wajib pajak yang tidak bayar pajak;
2. Meningkatkan penerimaan retribusi yang berasal retribusi jasa usaha dengan menyesuaikan tarif retribusi dan sumber retribusi baru;
3. Meningkatkan pajak dan retribusi daerah yang berasal dari opsen PKB dan Opsen BBNKB seiring dengan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023;

4. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dengan strategi intensifikasi yakni pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam antisipasi penyimpangan pelaksanaan pajak, tertib penetapan pajak, tertib pemungutan pajak, tertib administrasi pajak, dan tertib penyetoran pajak; dan
5. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dengan strategi ekstensifikasi yakni optimalisasi ketentuan tarif dan pengembangan penerimaan pajak dan retribusi lain.

Sementara itu Pendapatan Transfer Pusat pada tahun 2025 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan yang merupakan bagian dari transfer pusat bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Adapun kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengelolaan dan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
2. Peningkatan pengelolaan dan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);

Adapun kebijakan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Tabel 3. 7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pangandaran

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi/Target pada Tahun 2025	Proyeksi/Target pada Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
1	**PENDAPATAN**	**1.486.480.557.856,50**	**1.334.214.286.772,19**	**1.405.566.283.368,00**	**1.777.682.052.901,00**	**729.999.889.963,06**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**256.747.781.795,00**	**242.766.077.875,19**	**240.459.023.439,00**	**297.037.515.631,00**	**102.964.209.110,06**
1.1.1	Pajak Daerah	75.365.829.369,00	76.347.564.838,00	101.018.267.539,00	108.575.287.603,00	63.761.515.995,09
1.1.2	Retribusi Daerah	38.650.002.713,00	37.950.037.757,00	37.575.755.900,00	36.645.022.600,00	34.579.065.704,69
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	996.924.550,00	602.205.428,00	830.000.000,00	782.205.428,00	889.116.750,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	141.735.025.163,00	127.866.269.852,19	101.035.000.000,00	151.035.000.000,00	3.734.510.660,28
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.229.732.776.061,50**	**1.091.448.208.897,00**	**1.165.107.259.929,00**	**1.480.644.537.270,00**	**627.035.680.853,00**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	876.779.203.307,50	897.499.391.699,00	922.094.515.000,00	1.101.802.335.063,80	627.035.680.853,00
1.2.2	Transfer antar - daerah	352.953.572.754,00	193.948.817.198,00	243.012.744.929,00	378.842.202.206,20	0
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BKAD Kabupaten Pangandaran, diolah 2024
[1] Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (audited BPK)
[2] Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (audited BPK)
[3] Perbup APBD Penjabaran 4 Tahun 2024
[4] Proyeksi TAPD Kabupaten Pangandaran, 2024
[5] Dokumen Portofolio Pinjaman Daerah Kabupaten Pangandaran, 2024

Sumber dana pembangunan APBD Kabupaten Pangandaran secara umum masih didominasi oleh pendapatan transfer, sementara kemampuan PAD belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan. Realisasi pendapatan tahun 2023 mencapai RP. 1.334.214.286.772,19. Jika ditinjau dari realisasi pendapatan tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2022, namun pada tahun 2024 dan 2025 pendapatan ditargetkan mengalami peningkatan. Untuk tahun 2025, pendapatan ditargetkan mencapai Rp.1.777.682.052.901,00 meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.297.037.515.631,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.480.644.537.270,00. Sedangkan pada tahun 2026 proyeksi tersebut mengacu pada portofolio pinjaman daerah dan belum dilakukan penyesuaian target.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, peningkatan pendapatan diarahkan pada penambahan yang signifikan pada komponen pendapatan asli daerah (PAD). Potensi peningkatan PAD yang dianalisis berdasarkan realisasi pendapatan daerah digunakan sebagai dasar penentuan arah kebijakan pendapatan Kabupaten Pangandaran. Adapun sumber PAD diperoleh dari pajak dan retribusi daerah. Pendapatan Transfer juga diprediksi akan mengalami peningkatan pada tahun 2025 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan untuk lain-lain pendapatan yang sah diperoleh dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pendapatan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi, potensi sumber-sumber pendapatan daerah, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang akan dilakukan oleh perangkat daerah penghasil. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan upaya memperkuat reformasi perpajakan dan retribusi daerah. Pemerintah memangkas jumlah jenis pajak dan retribusi daerah untuk mengurangi biaya administrasi pemungutan.

Sesuai UU HKPD, ada jenis pajak yang tidak lagi dipungut. Pengurangan jenis pajak maupun penurunan tarif diproyeksi akan

mengurangi pendapatan daerah. Namun, meskipun ada pengurangan pajak, tetapi ada penerimaan baru yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah. Namun sifatnya hanya mengalihkan penerimaan dari pendapatan bagi hasil. Pelaksanaan pemungutan opsen baru dijalankan pada tahun 2025, sehingga pada tahun 2024 kemungkinan besar akan terjadi penurunan potensi pajak. Oleh sebab itu perlu optimalisasi pendapatan daerah.

Mengacu pada tabel di atas, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada:

1. Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, BLUD, dan UPTD dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah Penghasil, Kabupaten/Kota lainnya, serta instansi terkait lainnya;
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
5. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
6. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
7. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
8. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
9. Melaksanakan pengawasan perizinan usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;

11. Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan;
12. Melaksanakan kerjasama dengan Kantor BPN/ATR dalam hal intensifikasi pendapatan dari BPHTB;
13. Melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Pangandaran dalam hal pembinaan kepada wajib pajak daerah;
14. Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
15. Melaksanakan pemutakhiran basis data PPB P2 melalui pendataan subyek dan obyek pajak;
16. Melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal intensifikasi pendapatan Pajak Daerah;
17. Pengadaan kendaraan pelayanan keliling pajak daerah secara mobile;
18. Penguatan/peningkatan sistem secara online;
19. Mengadakan sensus pajak daerah;
20. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
21. Peningkatan koordinasi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah terdiri atas empat jenis, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk

keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Potensi peningkatan belanja modal yang dianalisis berdasarkan realisasi belanja dan proyeksi pendapatan daerah digunakan sebagai dasar penentuan arah kebijakan belanja Kabupaten Pangandaran. Adapun kebijakan belanja Kabupaten Pangandaran tahun 2025 diarahkan pada pengaturan belanja yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut diantaranya:

1. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat;
2. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan operasional;
3. Memenuhi pelaksanaan Program Prioritas yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan;
4. Memenuhi pelaksanaan program daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
5. Optimalisasi belanja pada fungsi ekonomi khususnya yang berkaitan dengan sub fungsi pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan sesuai dengan PMK/102/2018 termasuk di dalamnya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya potensial di Kabupaten Pangandaran;
6. Penguatan alokasi belanja khususnya untuk subfungsi penelitian, pengembangan, dan pembinaan pariwisata;
7. Penguatan sinergi pemungutan opsen PKB dan BBNKB antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota seiring dengan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023.

Tabel 3. 8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi/Target pada Tahun 2025	Proyeksi/Target pada Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
2	**BELANJA**	**1.425.263.205.564,00**	**1.343.490.829.836,00**	**1.785.566.283.368,00**	**2.126.465.652.901,00**	**706.402.006.978,06**
2.1	**Belanja Operasi**	**930.315.626.470,00**	**918.086.702.127,00**	**1.185.279.751.582,00**	**1.329.977.992.522,00**	**615.063.178.978,06**
2.1.1	Belanja Pegawai	427.927.654.639,00	428.078.544.757,00	554.232.766.511,00	552.966.092.953,00	411.984.477.760,46
2.1.2	Belanja barang dan jasa	460.971.587.559,00	456.135.369.459,00	569.545.460.490,00	665.374.742.769,00	174.911.201.217,60
2.1.3	Belanja bunga	10.171.701.391,00	12.138.715.286,00	10.029.885.883,00	37.000.000.000,00	26.167.500.000,00
2.1.4	Belanja subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	22.664.282.881,00	18.677.822.625,00	46.652.086.698,00	73.437.156.800,00	0,00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	8.580.400.000,00	3.056.250.000,00	4.819.552.000,00	1.200.000.000,00	2.000.000.000,00
2.2	**Belanja Modal**	**313.558.631.466,00**	**263.582.863.366,00**	**402.980.677.658,00**	**705.148.832.379,00**	**0**
2.2.1	Belanja Tanah	8,000,000,000,00	383.749.500,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	129.646.695.039,00	61.492.156.687,00	138.047.175.191,00	290.643.352.758	0,00
2.2.3	Belanja bangunan dan gedung	55.649.050.107,00	38.543.753.609,00	140.111.306.167,00	193.154.155.648,00	0,00
2.2.4	Belanja Jalan, irigasi dan jalanan	126.344.728.468,00	162.266.209.570,00	117.048.587.100,00	221.351.323.973,00	0,00
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	1.748.186.160,00	851.474.000,00	2.773.609.200,00	0,00	0,00
2.2.6	Belanja aset lainnya	89.971.692,00	45.520.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**0,00**	**2.587.406.924,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
2.4	**Belanja transfer**	**181.388.947.628,00**	**159.233.857.419,00**	**192.305.854.128,00**	**86.338.828.000,00**	**86.338.828.000,00**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.070.784.586,00	1.494.292.217,00	14.562.038.928,00	29.303.164.500,00	29.303.164.500,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	177.318.163.042,00	157.739.565.202,00	177.743.815.200,00	57.035.663.500,00	57.035.663.500,00
			Surplus/(Defisit)	**-380.000.000.000,00**	**-348.783.600.000,00**	**37.000.000.000,00**

Sumber: BKAD Kabupaten Pangandaran, diolah 2024
[1] Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (audited BPK)
[2] Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (audited BPK)
[3] Perbup APBD Penjabaran 4 Tahun 2024
[4] Proyeksi TAPD Kabupaten Pangandaran, 2024
[5] Dokumen Portofolio Pinjaman Daerah Kabupaten Pangandaran, 2024

Realisasi belanja tahun 2023 mencapai Rp. 1.343.490.829.836,00. Jika ditinjau dari realisasi belanja tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun 2022, namun pada tahun 2024 dan 2025 belanja ditargetkan mengalami peningkatan, Belanja pada tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp.2.126.465.652.901,00 meliputi komponen Belanja Operasi sebesar Rp.1.329.977.992.522,00 Belanja Modal sebesar Rp.705.148.832.379,00 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.5.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 86.338.828.000,00. Sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 348.783.600.000,00.

Kebijakan belanja daerah tahun 2025 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari:
    a. Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
    b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025;
    c. Penerapan SPM dan SDG's kewenangan Kabupaten;
    d. Dukungan terhadap ketentuan pada Perpres 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan; dan

4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji dan tunjangan PNS maupun P3K, belanja bagi hasil kepada desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
5. Mengalokasikan belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana alam (kejadian luar biasa) yang pencairannya melalui penetapan Surat Keputusan oleh Kepala Daerah.
6. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
7. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Jawa Barat secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
8. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun periode tahun berikutnya. Komposisi pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Guna mengatasi keterbatasan sumber pembiayaan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dalam pembangunan daerah, maka pendanaan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025, dilakukan sinergi dan kolaborasi pembiayaan pembangunan antara APBD Kabupaten Pangandaran, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan

pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Adapun Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2025 meliputi:

1. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SilPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. SiLPA anggaran tahun sebelumnya berasal dari BLUD Puskesmas dan RSUD Kabupaten Pangandaran. Rencananya SiLPA ini akan digunakan untuk BLUD di tahun berkenaan.

   Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Sementara perencanaan pembiayaan daerah melalui skema pinjaman daerah didasarkan kepada estimasi defisit APBD dan kemampuan fiskal daerah. Dimana analisis kemampuan fiskal daerah harus memperoleh rekomendasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
2. Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang).

   Mencermati proyeksi defisit yang disebabkan prakiraan perubahan APBD 2024, yang disebabkan utang belanja akhir tahun 2023 dan harus diselesaikan pada APBD 2024 adalah sebesar Rp. 300 Milyar. Dengan pergeseran penghitungan Bunga dan Pokok Pinjaman pada tahap pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD, kebutuhan pembiayaan yang diperlukan dalam pinjaman daerah jangka Panjang

(10 tahun) untuk menutupi utang daerah disepakati menjadi Rp. 350 Milyar.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2024 yaitu:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo. Cicilan pokok hutang dihitung berdasarkan Portofolio DSCR Pinjaman Daerah Kabupaten Pangandaran.

Rencana pembiayaan pada tahun 2025 terdepat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 16 Milyar untuk angsuran pokok utang dengan asumsi adanya penerimaan pembiayaan berupa utang jangka panjang dari Lembaga keuangan Bank sebesar Rp. 350 Milyar pada tahun 2024. Jika penerimaan pembiayaan jangka panjang tidak terealisasi pada tahun 2024, maka akan menimbulkan defisit belanja diakhir tahun 2024. Sebagai antisipasi hal dimaksud, pemerintah daerah merencanakan mengajukan kembali pinjaman jangka panjang atau menengah selama lima tahun sebesar Rp. 350 milyar pada tahun 2025. Dengan demikian struktur pembiayaan mengalami penyesuaian sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pangandaran

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi/Target pada Tahun 2025	Proyeksi/Target pada Tahun 2026
1	2	4	5	6	7	8
3	**Pembiayaan**	**1.770.241.393,05**	**41.019.363.535,55**	**380.000.000.000,00**	**348.783.600.000,00**	**-37.000.000.000,00**
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**169.370.240.623,05**	**200.019.363.535,55**	**530.000.000.000,00**	**364.783.600.000,00**	**0,00**
3.1.1	SiLPA Tahun Sebelumnya	5.370.240.623,05	41.019.363.535,55	30.000.000.000,00	14.783.600.000,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	500.000.000.000,00	350.000.000.000,00	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	14.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**167.599.999.230,00**	**159.000.000.000,00**	**150.000.000.000,00**	**16.000.000.000,00**	**37.000.000.000,00**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00		0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan modal daerah	3.599.999.230,00	0,00		0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	16.000.000.000,00	37.000.000.000,00
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	14.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BKAD Kabupaten Pangandaran, diolah 2024
[1] Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (audited BPK)
[2] Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (audited BPK)
[3] Perbup APBD Penjabaran 4 Tahun 2024
[4] Proyeksi TAPD Kabupaten Pangandaran, 2024
[5] Dokumen Portofolio Pinjaman Daerah Kabupaten Pangandaran, 2024

3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kabupaten Pangandaran dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Pangandaran. Hal ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi fiscal sejak diterapkannya otonomi daerah, dimana pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengembangkan wilayah otonominya sesuai dengan potensi serta sumber daya yang dimiliki. Kebijakan desentralisasi fiscal memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Sumber-sumber pendanaan pembangunan yang dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan Pinjaman Daerah. Adapun penjelasan alternatif pembiayaan pembangunan adalah sebagai berikut:

3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi kunci dalam menghadapi keterbatasan fiskal dalam APBD. APBN sebagai suatu rencana keuangan, mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintahan. APBN digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, prioritas provinsi maupun prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 4 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

4) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Tabel 3. 10
Alokasi APBN untuk Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2024

NO	Jenis APBN	2022	2023	2024
Dana Transfer				
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	75.706.706.510	61.127.785.502	60.332.348.247
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	501.903.660.000	527.477.779.980	624.867.865.397
3	Dana Alokasi Khusu (DAK) Fisik	74.459.155.645	33.845.756.074	64.756.443.000
4	Dana Alokasi Khusu (DAK) Non Fisik	138.234.551.253	142.930.040.493	152.768.370.000
5	Dana Insentif Daerah (DID)	-	34.866.264.000	5.835.382.000
6	Hibah ke Daerah	-	-	-
7	Insentif Fiskal	-	-	-

Sumber: BKAD Kabupaten Pangandaran, 2024

3.3.2 APBD Provinsi Jawa Barat

Alternatif pembiayaan yang bersumber dari APBD Provinsi diantaranya adalah bantuan keuangan. Bantuan keuangan provinsi merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemerintah kabupaten Pangandaran memiliki alternatif pendanaan Pembangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3. 11
Alokasi APBD Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022-2024

NO	Jenis APBD Provinsi	2022	2023	2024
1	Bankeu Provinsi	296.707.806.225	137.013.167.122	185.548.434.381

Sumber: BKAD Kabupaten Pangandaran, 2024

3.3.3 Alternatif Pembiayaan Lainnya

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu sumber pendanaan Pemerintah oleh perusahaan atau pihak swasta sebagai upaya memberikan kontribusi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu pendanaan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang bersumber dari CSR Lembaga Keuangan adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Peningkatan kinerja program CSR dalam pembangunan Kabupaten Pangandaran ditempuh melalui perluasan keikutsertaan perusahaan dalam agenda program pembangunan Kabupaten Pangandaran serta penyelarasan program-program CSR perusahaan dengan agenda program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran.

2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Kabupaten Pangandaran sedang berupaya menerapkan kolaborasi pendanaan penyediaan infrastruktur penyediaan air minum (PDAM) dan alat penerangan jalan (APBJ) melalui skema KPBU.

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah merupakan alternatif instrumen pendanaan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan

dan menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah serta untuk percepatan pencapaian target program pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Pangandaran melakukan Pinjaman Daerah bertujuan untuk stabilitas fiskal daerah. Salah satu upaya yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk memperoleh pinjaman daerah adalah melalui Lembaga Keuangan atau Bank. Dalam pengajuaan portofolio pinjaman daerah harus melalui pertimbangan dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Pemerintah
Kabupaten Pangandaran

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran
2025

@pangandaranbappeda
https://bappeda.pangandarankab.go.id

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan sering kali dihadapi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Setiap permasalahan harus dapat ditangani dan diantisipasi oleh Pemerintah. Adapun sumber permasalahan pembangunan dapat berasal dari internal Pemerintah maupun berasal dari permasalahan eksternal.

Demikian pula dengan berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran dalam beberapa kurun waktu yang lalu dapat diselesaikan. Hal tersebut menunjukkan adanya respon positif dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk dapat mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pembangunan. Setiap permasalahan pembangunan yang terjadi di Pemerintah Daerah pasti membawa implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, prioritas pembangunan dibutuhkan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan pembangunan tersebut.

Tujuan penyusunan prioritas pembangunan lebih diarahkan untuk mengetahui permasalahan pembangunan yang memiliki pengaruh lebih terhadap proses pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat berfungsi untuk dapat mengoptimalkan pendanaan yang bersifat terbatas agar tepat sasaran. Prioritas pembangunan merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang akan diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

Dalam menentukan prioritas pembangunan terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah. Kemudian, akan diketahui semua faktor penyebab permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah itu, dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta dengan program prioritas. Perlu dipahami bahwa tidak keseluruhan program prioritas dapat menjadi prioritas

pembangunan daerah dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, dan demikian juga dengan prioritas pembangunan yang telah tercapai di masa lalu, tidak perlu diprioritaskan kembali dimasa selanjutnya meskipun harus tetap dijaga kesinambungannya.

Secara ideal perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui korelasi antara dokumen perencanaan di Pemerintah Daerah dengan perencanaan di tingkat provinsi maupun pusat yang terkait dengan agenda-agenda prioritas. Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah, maka berikut ini disajikan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan pada tahun keempat RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

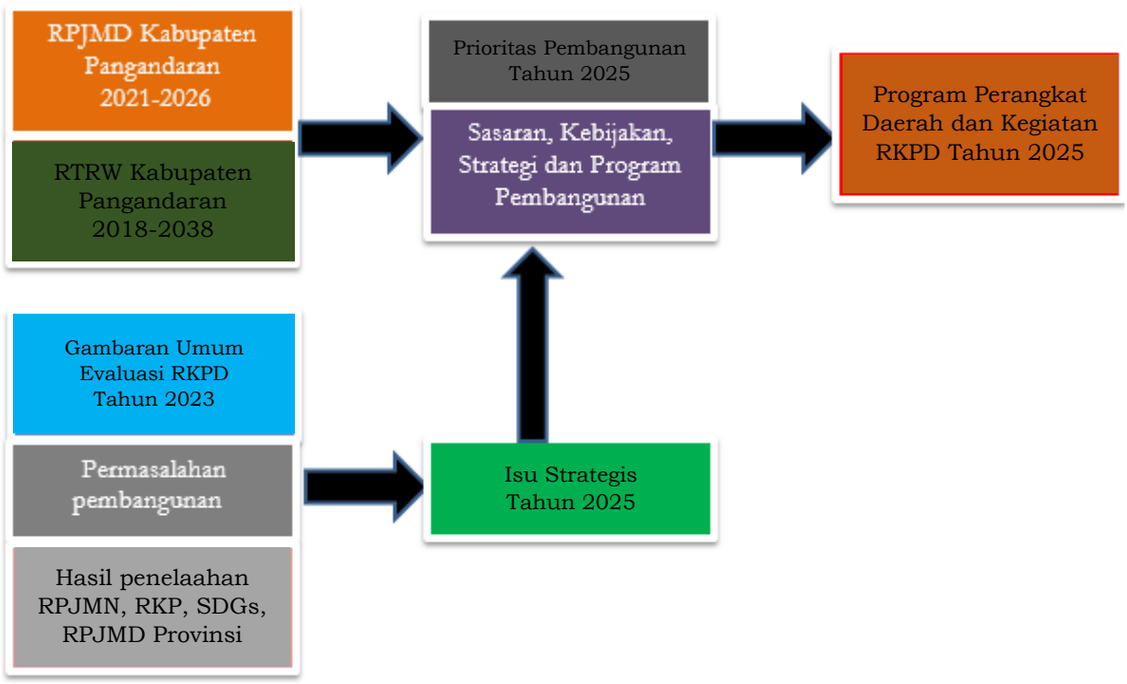

Gambar 4.1 Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Sumber: Hasil Analisa Bappeda Kabupaten Pangandaran, diolah 2024

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2025 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; (6) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah. Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pangandaran turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, serta mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2025 pada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

RKP 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029, dan merupakan tahap pertama pembangunan dari pelaksanaan RPJPN 2025-2045. RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029 ini menjadi fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045, menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Berdasarkan dari visi diatas, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; dan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan.

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi social untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif;
4. Memantapkan supermasi hokum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tatakelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan

8. Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

4.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mewujudkan Visi RPJPD 2005-2025, yaitu "**Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia**". Adapun tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat;
4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda;
5. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.

Tujuan 2

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan;
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum;
4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.

Tujuan 3

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur;
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur;
3. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana;
6. Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan.

Tujuan 4

Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi;
2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah;
3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 disertai dengan target indikator sebagai tolak ukur dari keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Penjabaran tujuan dan saaran pembangunan daerah Provinsi sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

NO	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KET
				2023	2024	2025	2026	
1	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Poin**	**73,74**	**74,14**	**74,39**	**74,71**	
1.1	Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,83	9,03	9,16	9,29	
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,68	12,75	12,82	12,88	
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,80	73,90	74,10	74,29	
		Prevalensi Stunting	Persen	21,7	15,52	12,93	10,34	
1.3	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.695	11.504	11.619	11.735	
		Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,62	7,34	7,13	7,00	
1.4	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	71,74	71,37	71,75	72,13	
		Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,482	‘	0,46	0,44	Menggantikan IDG
		Indeks Perlindungan Anak	Angka	65,74*	64,50	65,50	66,50	
		Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	49,67*	49,26	49,90	50,14	
1.5	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,12	1,42	1,42	1,42	
2	**Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**5,00**	**5,67**	**5,81**	**5,97**	
		Gini Ratio (poin)	**Poin**	**0,425**	**0,394**	**0,383**	**0,370**	
2.1		Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	4,74	5,76	5,84	5,93	

NO	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KET
				2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,36	4,53	4,85	5,23	
2.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	0,11	4,5	4,54	4,59	
		Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	107,45	101,67	102,64	103,61	
		Skor Pola Pangan Harapan	Poin	93,80	93,30	93,80	94,30	
2.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	8,72	12,30	12,85	13,43	
2.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	644,38	532,22	542,86	553,72	
		Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persen	28,84	23,34	23,92	24,52	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,44	8,01	7,88	7,76	
3	**Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan**	**Indeks Williamson**	**Poin**	**0,696**	**0,667**	**0,666**	**0,664**	
3.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	Tingkat Konektivitas	Persen	59,62	57,00	60,00	63,00	
3.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	N/A	75,91	76,57	77,28	
3.3	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Persen	54,17	54,47	55,24	55,91	
3.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	64,77	66,13	67,00	67,78	

NO	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KET
				2023	2024	2025	2026	
3.5	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (poin)	Persen	5,49	7,11	7,72	7,98	
		Indeks Risiko Bencana	Poin	123,16	129,00	128,00	127,00	
3.6	Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah Pedesaan	Indeks Desa Membangun	Poin	0,77	0,77	0,78	0,79	
4	**Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang didukung oleh inovasi daerah**	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat**	**Poin**	**83,34***	**82,14**	**82,96**	**83,79**	
		Indeks Reformasi Birokrasi	**Poin**	**A (93,08)**	**A***	**A**	**A**	
4.1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas Lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	83,34*	82,14	82,96	83,79	
4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A (93,08)	A	A	A	
4.3	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Poin	74,77 (Sangat Inovatif)	69,65 (Sangat Inovatif)	70,15 (Sangat Inovatif)	70,65 (Sangat Inovatif)	

Sumber: RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, 2024

*) menggunakan data capaian tahun 2022

**) menggunakan data capaian triwulan III 2023/Maret 2023

***) menggunakan data Desember 2023 (data tahunan belum ada)

****) mulai tahun 2023 menggunakan data yang bersumber dari OJK

Seluruh sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 sesuai tabel di atas dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPD Provinsi Jawa Barat.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Seperti yang tercantum didalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dijelaskan secara terperinci dalam tabel mengenai visi dan misi Kabupaten Pangandaran dibawah ini.

Tabel 4.2 Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

Visi	Misi
Pangandaran juara menuju wisata berkelas dunia yang berpijak pada nilai karakter bangsa	**Misi 1**: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.
	Misi 2: Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan.
	Misi 3: Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.
	Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal.
	Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel.
	Misi 6: Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, 2024

Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 seperti yang tercantum didalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dijelaskan secara terperinci dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.3 Hubungan Visi – Misi – Tujuan – Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		Target		Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama	Menguatkan nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan budaya lokal		Indeks Kesalehan Sosial	N/A	81,94	62,00	63,00	64
			Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	0,554	N/A	0,2579	0,2814	0,3048
				Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	80,19	59,7	85	87,5	90
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Desa Membangun	0,7595	N/A	0,7693	0,7696	0,777
2	Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan	Terwujudnya pengelolaan pariwisata yang efektif dan efisien yang menjunjung nilai-nilai kearifan lokal		Persentase pemenuhan kriteria GSTC di destinasi pariwisata	25	N/A	40	50	60
			Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	646.250	N/A	690.000	720.000	750.000
3	Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	70,21	70,57	69,59-70,06	70,06-70,53	70,53-71,00
				Indeks Pembangunan Gender	90,20	90,83	90,06-90,09	90,10-90,15	90,16-90,20
			Meningkatkan aksesibilitas dan	Indeks Kesehatan	84,43	83,26	80,51-81,00	81,01-81,40	81,40-81,50

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		Target		Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026
	kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan		kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Pendidikan	60,41	60,97	60,21-60,50	60,51-60,70	60,71-61,00
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,02	N/A	19,61	19,95	20,24
			Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi	Jumlah pemuda berprestasi yang mendapatkan penghargaan	47	50	110	120	130
			Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,17	N/A	0,60-0,57	0,61-0,58	0,62-0,59
			Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	76,09	76,53	74,59	74,60	74,61
4	Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,03	5,03	5,51-5,90	5,91-6,20	6,21-6,60
				Persentase Penduduk Miskin	9,32	8,98	5,90-6,40	5,18-5,90	4,50-5,57
			Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	5,457	N/A	5,109	5,310	5,520
				Persentase Realisasi Nilai Investasi	12,4	19,31	7,6	7,98	8,38
				Rasio Kewirausahaan	22,69	N/A	4,15	4,30	4,5
				Indeks Ketahanan Pangan	81,12	83,57	83,5	84,0	84,5

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		Target		Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026
			Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	87,12	N/A	74	74	75
			Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,56	1,52	4,80-4,00	4,70-3,75	4,60-3,50
			Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	3,63	7,15	57	67	77
5	Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima		Indeks Reformasi Birokrasi	56,48 (CC)	73,72 (BB)	69-73	74-78	79-84
			Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Nilai SAKIP	67,72 (B)	67,99 (B)	72,25-76,00	76,25-81,00	81,25-85,00
				Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	3	3
				Indeks SPBE	2,82	3,53	3,1	3,2	3,25
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	N/A	73	74	75
				Indeks Profesionalitas ASN	55,84	55,89	49,42	52,92	56,42
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Indeks Pelayanan Publik	3,42	4,07	2,86-2,95	2,96-3,05	3,06-3,15
6	Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi	Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	85,50	N/A	79,05	79,53	80,00
			Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks Konektivitas Wilayah	1,692	N/A	1,808	1,846	1,865

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		Target		Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026
	bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan		daerah dan konektivitas wilayah	Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur	38,97	N/A	48,28	51,47	54,64
			Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	137,36	147,85	139	137	135
				Indeks Kapasitas Daerah	N/A	N/A	139,2	137,84	136,44
			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,87	64,12	65,98	66,20	66,43
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,16	90,96	79,50	80,00	80,50
				Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	50,00	51,85	51,90	51,95
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	38,21	39,07	65,25	65,25	65,25

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, 2024

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Pangandaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional, sehingga perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 maupun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengusung tema pembangunan "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan RPJMN Tahun 2025-2029, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, ditetapkan 3 (tiga) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagai berikut:

1. SDM Berdaya Saing dan Produktif, dilaksanakan melalui strategi:
    a) Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun;
    b) Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan;
    c) Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting;
    d) Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif;
    e) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas;
    f) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system;
    g) Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa.
2. Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas, dilaksanakan melalui strategi:
    a) Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
    b) Penguatan infrastruktur digital;
    c) Pengembangan infrastruktur transisi energi;

d) Percepatan infrastruktur IKN;
e) Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan, dilaksanakan melalui strategi:
   a) Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
   b) Pengembangan skema graduasi bansos;
   c) Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
   d) Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
   e) Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
   f) Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
   g) Peningkatan produksi industri pengolahan;
   h) Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif;
   i) Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

Prioritas Pembangunan Nasional (PN) merupakan Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan ditetapkan dipertahankan pada RKP Tahun 2025 sebagai pelaksanaan kerangka tema dan arah kebijakan pembangunan. Prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

1. Prioritas Nasional/PN 1, yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, dengan Sasaran PN 1 sebagai berikut:
   a. Indeks Demokrasi Indonesia
2. Prioritas Nasional/PN 2, yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan Sasaran PN 2 sebagai berikut:
   a. Asia Power Index (Military Capability);
   b. Asia Power Index (Diplomatic Influence)[a)];
   c. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya;
   d. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU);
   e. Indeks Ketahanan Energi;
   f. Kapasitas tampungan air (m3/kapita);

g. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%);
h. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%);
i. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global;
j. Indeks Ekonomi Hijau;
k. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer;
l. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%);
m. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
n. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
o. Persentase Penurunan Emisi GRK.
   - Tahunan (%)
   - Kumulatif (%)

3. Prioritas Nasional/PN 3, yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, dengan Sasaran PN 3 sebagai berikut:
   a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%);
   b. Rasio Kewirausahaan (%);
   c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%);
   d. Rasio PDB Pariwisata (%);
   e. Devisa Pariwisata (miliar USD);
   f. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%);
   g. Aset Perbankan/PDB (%);
   h. Aset Dana Pensiun/PDB (%);
   i. Aset Asuransi/PDB (%);
   j. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%);
   k. Total Kredit/PDB (%);
   l. Inklusi Keuangan (%).
4. Prioritas Nasional/PN 4, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan Sasaran PN 4 sebagai berikut:
   a. Hasil Pembelajaran
      1. Rata-rata nilai PISA
         i. Membaca

ii. Matematika
iii. Sains
2. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)
3. Harapan lama sekolah (tahun)

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%);
c. Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%);
d. Tingkat Penguasaan Iptek
1. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)
2. Peringkat Indeks Inovasi Global
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (%);
f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%);
g. Usia Harapan Hidup (tahun);
h. Kesehatan Ibu dan Anak
1. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
i. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk);
j. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
k. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK);
l. Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

5. Prioritas Nasional/PN 5, yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan Sasaran PN 5 sebagai berikut:
a. Rasio PDB Industri Pengolahan (%);
b. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB);
c. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB);
d. Biaya Logistik (% PDB).
6. Prioritas Nasional/PN 6, yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan Sasaran PN 6 sebagai berikut:
a. Terbangunnya sistem perlindungan social yang adaptif bagi seluruh penduduk (%);
b. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%);
c. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%);
d. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%);
e. Persentase desa mandiri (%);

f. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%).

7. Prioritas Nasional/PN 7, yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dengan Sasaran PN 7 sebagai berikut:
   a. Return on Asset (ROA) BUMN (%);
   b. Indeks Integritas Nasional;
   c. Indeks Materi Hukum;
   d. Indeks Pelayanan Publik;
   e. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
   f. Indeks Persepsi Korupsi;
   g. Indeks Pembangunan Hukum;
   h. Rasio Perpajakan terhadap PDB (%);
   i. Tingkat Inflasi (%).
8. Prioritas Nasional/PN 8, yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan Sasaran PN 8 sebagai berikut:
   a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK);
   b. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB);
   c. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%).

4.2.2 Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 disusun untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional, isu strategis daerah, prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, serta pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2025.

Dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan, serta merujuk pada Tema RPJPD I (2025-2029), yaitu Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola serta Tema RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, yaitu “Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”, maka Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah:

“PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENDUKUNG AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT JAWA BARAT”

Tema tersebut memiliki makna bahwa pemerataan pembangunan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Barat diarahkan pada keberlanjutan fokus pembangunan pada tahun sebelumnya dengan lebih meningkatkan intensitas dan memperluas cakupan khususnya pada daerah-daerah yang belum optimal dalam mendapatkan pelayanan namun memiliki nilai strategis yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan ekonomi dan peningkatan keunggulan serta kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 meliputi:

1. **Prioritas 1**, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya;
2. **Prioritas 2**, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama;
3. **Prioritas 3**, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
4. **Prioritas 4**, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanganan Risiko Bencana;
5. **Prioritas 5**, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Gerakan Membangun Desa;
6. **Prioritas 6**, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

4.2.3 Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Untuk mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Pangandaran, Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

Tabel 4.4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Pokok -Pokok Pikiran DPRD
1.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat Melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai Lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	1. Penyelenggaraan event tahunan seperti festival, karnaval, kirab, pentas, dan tradisi; 2. Pengembangan dan penguatan Desa Wisata; 3. Pengembangan agrowisata; 4. Penguatan kelembagaan dan program Dekranasda;

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Pokok -Pokok Pikiran DPRD
		5. Pengembangan keterampilan SDM pariwisata; 6. Promosi investasi dan potensi daerah dengan membentuk website promosi investasi, membuat regional branding yang sesuai potensi daerah, mengukur efektivitas regional branding, dan mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak; 7. Memfasilitasi percepatan realisasi investasi dan melakukan penanganan permasalahan investasi; 8. Pemberian insentif dan kemudahan investasi; 9. Pemberdayaan petani, nelayan, dan pembudidaya melalui pelatihan kewirausahaan; 10. Pemberdayaan petani, nelayan, dan pembudidaya melalui permodalan; 11. Pemberdayaan petani, nelayan, dan pembudidaya melalui penyediaan sarana produksi.
2.	Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	1. Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah non formal/kesetaraan melalui optimalisasi pembangunan PAUD dan TPA; 2. Publikasi atau penyuluhan terkait pendidikan kesetaraan kejar paket kepada masyarakat; 3. Pelatihan wirausaha bagi lulusan kesetaraan; 4. Penyediaan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan; 5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah; 6. Penyiapan sistem pengelolaan kelas yang mampu mengakomodasi heterogenitas kebutuhan khusus peserta didik; 7. Peningkatan kompetensi guru terkait pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus; 8. Peningkatan peran orang tua, tenaga profesional, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komite sekolah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di sekolah.
3.	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	1. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan; 2. Peningkatan sistem manajemen pelayanan kesehatan; 3. Peningkatan profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan; 4. Penurunan angka kesakitan dan angka kematian pada kelompok rentan; 5. Peningkatan pelayanan kesehatan digital;

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Pokok -Pokok Pikiran DPRD
		6. Perluasan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan primer; 7. Peningkatan partisipasi publik dan swasta pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer.
4.	Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	1. Pelaksanaan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat; 2. Pemberian pendidikan kebencanaan bagi masyarakat; 3. Penyediaan informasi risiko dan pilihan perlindungan bencana; 4. Memasukkan unsur pengetahuan pengurangan risiko bencana pada kurikulum sekolah yang relevan; 5. Mempelopori penerapan program dan kegiatan minimalisasi dampak bencana.
5.	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	1. Program pembinaan, pengawasan sumber daya air dalam rangka pengawasan lingkungan; 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, UKL/UPL dan RPL; 3. Pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk peduli lingkungan hidup; 4. Optimalisasi penanggulangan atau penanganan sampah di Kabupaten Pangandaran melalui peningkatan sarana dan prasarana (beach clean machine, road sweeper); 5. Peningkatan jalan dan jembatan yang merupakan akses menuju destinasi wisata, menuju wilayah pertanian, pendidikan, pusat peribadatan, jalan lingkungan; 6. Pembangunan jalan dan jembatan penghubung antar kabupaen/kota dan atau provinsi; 7. Pembangunan infrastruktur penghubung antar kawasan destinasi.
6.	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusivitas Daerah dan Stabilitas Politik	1. Penataan struktur organisasi; 2. Penataan dan penguatan organisasi; 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; 4. Peningkatan kualitas layanan public; 5. Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan upaya mewujudkan transformasi pemerintahan; 6. Pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan; 7. Pengembangan inovasi pelayanan public; 8. Penguatan desa berbasis data elektonik melalui penguatan data desa presisi.

Sumber: Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, 2024

4.2.4 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Kabupaten Pangandaran

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum dikelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang pengaruhnya signifikan bagi daerah sehingga harus mendapatkan prioritas perhatian dalam perencanaan program dan kegiatan. Jika isu tersebut berupa kelemahan/ancaman harus diantisipasi, dan jika isu tersebut berupa peluang/kekuatan dapat dimanfaatkan karena isu tersebut dapat meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka panjang (20 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka isu strategis itu dapat dimasukkan. Namun jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam (lebih dari) kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka sebaiknya tidak usah dimasukkan ke dalam dokumen.

Kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Berikut adalah identifikasi isu strategis yang ada di Kabupaten Pangandaran.

1. Antisipasi bergejolaknya kondusifitas daerah dan politik pasca Pemilu Serentak 2024;
2. Sektor unggulan belum memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah;

3. Belum optimalnya promosi dan iklim investasi serta pelaksanaan penanaman modal inklusif menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;
4. Masih tingginya angka kemiskinan dan belum optimalnya pencegahan serta penanganan stunting;
5. Masih adanya kesenjangan cakupan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah;
6. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum menyeluruh;
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan kesetaraan, informal, dan inklusi;
8. Belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan fasilitas kesehatan;
9. Masih adanya ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang wilayah;
10. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi, dan adaptasi bencana serta upaya penanggulangan perubahan iklim;
11. Masih rendahnya cakupan area penanganan sampah;
12. Belum optimalnya pengelolaan sampah melalui 3R;
13. Ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja;
14. Keterbatasan lembaga pengembangan kompetensi;
15. Reformasi birokrasi belum sepenuhnya diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada publik;
16. Rendahnya implementasi kelitbangan, inovasi daerah, dan pengembangan teknologi terapan;
17. Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam manajemen kinerja ASN.

Tabel 4. 5 Arah Kebijakan RKP 2025, Isu Strategis RPJMD, Permasalahan Pembangunan, Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026, dan Isu Strategis RKPD 2025

Arah Kebijakan RKP 2025	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembanguan RKPD 2025 berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2023	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Isu Strategis RKPD 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
SDM Berdaya Saing dan Produktif	Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan	1. Rendahnya Perlindungan Terhadap Petani Produsen 2 Aksesibilitas Petani Terhadap Sarana Produksi, Pemasaran dan Permodalan Terbatas	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektifitas Wilayah	Masih adanya kesenjangan cakupan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
	Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, IKM, dan Koperasi	1. Kurangnya produk UMKM yang memenuhi standar pasar dan legalitas 2. Belum optimalnya data yang lengkap dan akurat mengenai perkembangan UMKM untuk dilakukan pemetaan jenis usaha dan potensi unggulan di tiap desa 3. Kurang terpetakannya sentra-sentra UMKM 4. kurang inovatif dan belum mengedepankan riset dalam pengembangan produk UMKM 5. Masih rendahnya SDM koperasi 6. Koperasi masih model lama 7. Masih rendahnya Digitalisasi Koperasi 8. Masih sedikitnya koperasi yang bergerak dibidang industri pengolahan	Pemantapan Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Berbasis Kearifan Lokal	Belum optimalnya promosi dan iklim investasi serta pelaksanaan penanaman modal inklusif menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
	Peningkatan kapasitas Ketenagakerjaan	1. Rendahnya kesadaran pekerja formal dan informal untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Elektronik yang terintegrasi	Reformasi birokrasi belum sepenuhnya diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan

Arah Kebijakan RKP 2025	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembanguan RKPD 2025 berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2023	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Isu Strategis RKPD 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		2. Belum tersedianya data ketenagakerjaan yang lengkap		dan pelayanan kepada publik
Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan	Penanganan kemiskinan ekstrim nasional dan PPKS	Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan	Pemantapan Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Berbasis Kearifan Lokal	Sektor unggulan belum memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah
	Peningkatan sistem perlindungan sosial	1. Peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal 2. Kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial belum optimal 3. Jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial masih terbatas 4. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	Masih adanya kesenjangan cakupan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
	Belum optimalnya kemampuan fiskal daerah	1. Kurangnya kesadaran wajib pajak 2. Belum optimalnya pengelolaan potensi pajak daerah (lost potensi pajak)	Pemantapan Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Berbasis Kearifan Lokal	Belum optimalnya promosi dan iklim investasi serta pelaksanaan penanaman modal inklusif menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
	Digitalisasi ekonomi	1. Masih rendahnya Digitalisasi Koperasi	Peningkatan Daya Saing Daerah	Belum optimalnya promosi dan iklim investasi serta pelaksanaan

Arah Kebijakan RKP 2025	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembanguan RKPD 2025 berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2023	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Isu Strategis RKPD 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		2. Belum optimalnya Revitalisasi dan Digitalisasi Pasar Rakyat		penanaman modal inklusif menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas	Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pedesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi	1. Mayoritas jalan kabupaten kekurangan ruang milik jalan (ketersediaan lahan) 2. Ketidaktersediaan data terkait trotoar dan drainase 3. Pembangunan drainase dan trotoar belum menjadi prioritas sedangkan hal tersebut merupakan kebutuhan dasar infrastruktur	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektifitas Wilayah	Masih adanya kesenjangan cakupan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
			Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	Masih adanya kesenjangan cakupan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah

Sumber: Olahan Penyusun, 2024

4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan pada tahun keempat RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Maka tema pembangunan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 adalah:

"**Peningkatan Daya Saing Daerah**"

Berdasarkan tema tersebut maka dapat dikelompokkan menjadi prioritas pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya;
2. Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya;
3. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan;
4. Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana;
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis;
6. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik.

Keterkaitan isu strategis dengan rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan 2025 dan Isu Strategis

No.	Prioritas Pembangunan 2025	Isu Strategis	
1	*2*	*3*	
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	a	Sektor unggulan belum memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah
		b	Belum optimalnya promosi dan iklim investasi serta pelaksanaan penanaman modal inklusif menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

No.	Prioritas Pembangunan 2025	Isu Strategis	
1	*2*	*3*	
		c	Ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja
2	Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	a	Belum optimalnya kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan kesetaraan, informal, dan inklusi
		b	Keterbatasan lembaga pengembangan kompetensi
3	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	a	Belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan fasilitas kesehatan
		b	Masih tingginya angka kemiskinan dan belum optimalnya pencegahan serta penanganan stunting
4	Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	a	Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi, dan adaptasi bencana serta upaya penanggulangan perubahan iklim
5	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	a	Masih adanya kesenjangan cakupan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
		b	Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi, dan adaptasi bencana serta upaya penanggulangan perubahan iklim
		c	Masih adanya ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang wilayah
6	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	a	Reformasi birokrasi belum sepenuhnya diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada publik
		b	Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam manajemen kinerja ASN
		c	Rendahnya implementasi kelitbangan, inovasi daerah, dan pengembangan teknologi terapan
		d	Antisipasi bergejolaknya kondusifitas daerah dan politik pasca Pemilu Serentak 2024

Sumber: Diolah Penyusun, 2024

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 diimplementasikan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan pada RKP Tahun 2025 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab dapat dilihat pada Tabel 4.7 sampai Tabel 4.12 dengan total pagu anggaran yang mendukung program pembangunan daerah sebesar Rp. 1.137.551.387.711,00.

Tabel 4. 7 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 1 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
PPD1, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Peningkatan Akses Dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan	720.000	Peningkatan pelayanan pariwisata	Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi keratif yang berdaya saing	30%	297.161.880	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Mengoptimalkan destinasi pariwisata yang sudah ada	Pemasaran Produk Unggulan Daerah Terintegrasi dengan Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan	40%	416.999.793	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Pembentukan dan pengelolaan desa wisata mandiri (awal dari desa presisi)	Penguatan BUMDES	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Kemasyarakat Desa yang aktif	100%	3.191.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
					Pengembangan UMKM	Program Pengembangan Umkm	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	0,10%	53.192.250	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	5,31	Meningkatkan konektivitas antar pusat kegiatan, tempat-tempat wisata, dan lokasi-lokasi yang memiliki potensi tinggi bagi pengembangan ekonomi masyarakat	Pengembangan Industri Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi	16%	3.199.950	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
					Peningkatan Produksi Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase Peningkatan Produksi Peternakan 2. Indeks Pertanaman 3. Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	2,0 % 200 Indeks 3 %	650.000.000	Dinas Pertanian
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	2%	2.327.700.400	Dinas Pertanian
					Peningkatan Produksi Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0,20%	7.771.277.000	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
								TOTAL ANGGARAN	Rp. 14.710.531.273,00	

Sumber: Diolah Penyusun, 2024

Tabel 4. 8 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 2 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
PPD2, Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Pendidikan	60,51 - 60,70	Penyelenggaraaan pendidikan yang berkualitas	Penguatan Pendidikan Informal dan Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan 2. Persentase Layanan Pendidikan Non Formal Dan Informal 3. Persentase Tingkat Budi Pekerti Peserta Didik 4. Persentase Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Pandemi	100 % 86 % 93 % 96 %	256.223.758.844	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
					Penguatan Pendidikan Keagamaan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Pelayanan Administrasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat 2. Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan Kerjasama yang dirumuskan	90 % 95 %	9.240.000.000	Sekretariat Daerah

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
	Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi	Jumlah Pemuda Berprestasi yang Mendapat Penghargaan	120	Optimalisasi kualitas pelayanan, sarana dan Prasarana Pendidikan serta peningkatan peran, pelatihan kepemudaan dalam bidang keolahragaan	Pengembangan Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	80 %	62.167.100.000	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
					Peningkatan Kapasitas Wirausaha Muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase pembinaan wirausaha muda dan Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan	80 %	15.888.100.000	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
								TOTAL ANGGARAN	Rp. 343.518.958.844,00	

Sumber: Diolah Penyusun, 2024

Tabel 4. 9 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 3 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
PPD3, Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan	81,01 - 81,40	Pemberian bantuan ambulance bagi desa yang jauh dari puskesmas	Peningkatan Layanan Kesehatan Pedesaan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan masyarakat yang terpenuhi	90 %	110.892.991.670	Dinas Kesehatan
								TOTAL ANGGARAN	Rp. 110.892.991.670,00	

Sumber: Diolah Penyusun, 2024

Tabel 4. 10 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 4 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
PPD4, Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	137	Menyelenggarakan pelatihan	Masyarakat Tangguh Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	100%	1.904.004.994	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

				Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Peningkatan Pelayanan Sosial Pedesaan	Program Rehabilitasi Sosial	Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	8%	4.370.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
TOTAL ANGGARAN									Rp. 6.274.004.994,00	

Sumber: Diolah Penyusun, 2024

Tabel 4. 11 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 5 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
PPD5, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,20	Meningkatkan cakupan layanan persampahan	Pengelolaan TPS3R	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan layanan persampahan	29,50%	35.095.284.717,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Persentase cakupan layanan infrastruktur	51,47	Meningkatkan akses air minum dan sanitasi	Pembangunan Sanitasi Komunal	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan ketersediaan layanan air limbah	61%	254.980.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
					Pengembangan Drainase dan Irigasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dan Gorong - Gorong Kabupaten Dalam Kondisi Baik	62 %	14.700.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
				Melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni	Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik	65%	69.950.979.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
				Memenuhi kebutuhan ruang untuk pelaksanaan pembangunan	Peningkatan Jalan Akses ke Pusat Kegiatan Strategis	Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase Jalan Dalam Kondisi Mantap Persentase Jalan Baru Yang Terbangun	89,50 % 91,58 %	257.721.979.492,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
					Penyediaan Pelengkap Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Pelayanan Izin Trayek Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	15 % 25 % 70 %	121.917.957.450,00	Dinas Perhubungan
								TOTAL ANGGARAN	Rp. 484.955.880.659,00	

Sumber: Diolah Penyusun, 2024

Tabel 4. 12 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 6 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
PPD6, Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	76,25 - 81,00	Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya urusan kearsipan	Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 2. Persentase Penataan Kelembagaan Organisasi, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik Tatalaksanaan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Daerah	100 % 90 %	35.635.422.000	Sekretariat Daerah
		Indeks SPBE	3,2	Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya urusan kearsipan	Implementasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat kematangan tata kelola SPBE	3,4 Indeks	262.240.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daera	74	Peningkatan kualitas APBD	Sinergitas perencanaan dan penganggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan	100%	137.484.103.126	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

						Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah 2. Persentase realisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	100 % 61 %	3.817.255.145	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
TOTAL ANGGARAN									Rp. 177.199.020.271,00	

Sumber: Diolah Penyusun, 2024

4.2.5.1 Dukungan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 terhadap Pelaksanaan Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), Kemiskinan Ekstrem, dan Stunting.

Dukungan program pembangunan daerah RKPD Tahun 2025 terhadap arah kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 13 Keterkaitan Program Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's)

Target	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
Goal 1 Tanpa Kemiskinan • Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi. • Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan social yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. • Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. • Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Rehabilitasi Sosial 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 6. Program Pengembangan UMKM 7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 8. Program Penempatan Tenaga Kerja 9. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 12. Program Perlindungan Khusus Anak 13. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 14. Program Penanganan Bencana 15. Program Penanggulangan Bencana 16. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Goal 2 Tanpa Kelaparan • Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. • Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. • Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses	1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan 3. Program Pengawasan Keamanan Pangan 4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertania 5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 8. Program Penyuluhan Pertanian 9. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 10. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 11. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Target	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian. • Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin system produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. • Target 2.5 Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian	12. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Goal 3 Kehidupan Sehat & Sejahtera • Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. • Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh Negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. • Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. • Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. • Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. • Target 3.8 Pada tahun 2030, Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obatobatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. • Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. • Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Program Rehabilitasi Sosial 5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Target	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak Negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	
Goal 4 Pendidikan Berkualitas • Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. • Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. • Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. • Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anakanak dalam kondisi rentan. • Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Goal 5 Kesetaraan Gender • Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. • Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. • Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. • Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 5. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Target	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
Goal 6 Air Bersih & Sanitasi Layak • Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua • Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan • Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. • Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Perekonomian dan Pembangunan 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Goal 7 Energi Bersih & Terjangkau • Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. • Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energy terbarukan dalam bauran energi global. • Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	1. Program Perekonomian dan Pembangunan 2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Goal 8 Pekerjaan Layak & • Pertumbuhan Ekonomi Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. • Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. • Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan • Target 8.6 Pada tahun 2021, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. • Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	1. Program Pengembangan UMKM 2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 5. Program Penempatan Tenaga Kerja 6. Program Pengembangan Kebudayaan 7. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 9. Program Pemasaran Pariwisata 10. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 11. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 12. Program Perekonomian dan Pembangunan

Target	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
• Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	
Goal 9 Industri, Inovasi & Infrastruktur • Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. • Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. • Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. • Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2021.	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan • Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. • Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Program Hubungan Industrial 5. Program Penanganan Bencana 6. Program Pengembangan UMKM
Goal 11 Kota & Permukiman yang Berkelanjutan • Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. • Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. • Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan focus melindungi orang miskin dan orangorang dalam situasi rentan. • Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 3. Program Pengembangan Perumahan 4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 5. Program Penanggulangan Bencana 6. Program Pencegahan, Penganggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 7. Program Penanganan Bencana 8. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 9. Program Pengelolaan Persampahan 10. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Target	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
Goal 12 Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab • Target 12.4 Pada tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. • Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. • Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	1. Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Program Pengendalian Bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Goal 13 Penanganan Perubahan Iklim • Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. • Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	1. Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 3. Program Penanganan Bencana
Goal 14 Ekosistem Lautan • Target 14.2 Pada tahun 2021, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. • Target 14.5 Pada tahun 2021, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. • Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 4. Program Perencanaan Lingkungan hidup
Goal 15 Ekosistem Daratan • Target 15.1 Pada tahun 2021, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. • Target 15.3 Pada tahun 2021, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. • Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Target	Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
penting bagi pembangunan berkelanjutan. • Target 15.9 Pada tahun 2021, mengitegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. • Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.	
Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh • Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. • Target 16.3 Menggalakkan Negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. • Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. • Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Perlindungan Khusus Anak 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Goal 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan • Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber: Olahan Penyusun, 2024

Tercatat oleh BPS Provinsi Jawa Barat tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 mencapai 1,37%. Sedangkan angka kemiskinan hasil pendataan BNBA tahun 2023 mencapai 4.007 jiwa. Seiring dengan hal tersebut upaya Kabupaten Pangandaran dalam percepatan penurunan kemiskinan ekstrem diantaranya telah dibuat beberapa regulasi terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstrem sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
2. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor SS.03/Kpts.145-Huk/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
3. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor SS.03/Kpts.266-Huk/2023 tentang Penetapan Data Fakir Miskin Ekstrem Tahun 2023-2024.

Selain itu Kabupaten Pangandaran juga telah melakukan intervensi dengan pelaksanaan program kegiatan di Perangkat Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Dukungan program pembangunan daerah RKPD Tahun 2025 terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 14 Program Pendukung Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Perangkat Daerah Penanggungjawab

Strategi	Program	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penganggungjawab
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatkan Pendapatan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (Sekolah Dasar)	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Strategi	Program	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penganggungjawab
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (Sekolah Menengah Pertama)	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan

Strategi	Program	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penganggungjawab
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Pendapatan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pertanian
Meningkatkan Pendapatan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Meningkatkan Pendapatan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Meningkatkan Pendapatan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Meningkatkan Pendapatan	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Hubungan Industrial	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dinas Ketenagakerjaan
Meningkatkan Pendapatan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Sumber: Olahan Penyusun, 2024

Percepatan penurunan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional mulai dari tingkat pusat hingga desa atau kelurahan. Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan berbagai akselerasi pembangunan dalam upaya menyelesaikan persoalan kesehatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya yaitu permasalahan stunting. Seiring dengan hal tersebut upaya Kabupaten Pangandaran dalam menurunkan angka prevalensi stunting diantaranya telah dibuat beberapa regulasi terkait percepatan penurunan stunting sebagai berikut:

1. SE Bupati Pangandaran Nomor 067/2898-Org/2020 tentang Replikasi Inovasi MENYETING GIGI EMAS (Mencegah Stunting dengan Gerakan Makan Telur, Instruktur Asi Eksklusif, Lumbung Gizi Desa, Kelompok Masyarakat Peduli Jamban dan Alarm Kelahiran)Masyarakat Peduli Jamban dan Alarm Kelahiran);
2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif;
3. SE Bupati Pangandaran Nomor 800/1967/Dinkes/2021 tentang Dukungan Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada Remaja Putri di Sekolah;
4. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Selain itu Kabupaten Pangandaran juga telah membentuk tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Kemudian melaksanakan intervensi spesifik dan sensitif bersama dengan SKPD terkait. Spesifik misalnya pemberian makanan tambahan pada balita stunting, dan untuk sensitifnya terkait sanitasi dan air bersih. Dengan berbagai upaya diatas diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Pangandaran.

Dukungan program pembangunan daerah RKPD Tahun 2025 terhadap percepatan penurunan *stunting* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 15 Program Pendukung Percepatan Penurunan *Stunting* dan Perangkat Daerah Penanggungjawab

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penganggungjawab
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Gebyar Remaja Patuh Minum Fe dan bazar	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemeriksaan skrining anemia pada seluruh remaja putri	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal Ibu Hamil KEK	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Kurang Gizi	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Kurang Gizi.	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kesehatan Reproduksi Catin dan KB bagi LP/LS, Organisasi Profesi dan LSM	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Triple E untuk Ibu Hamil dan Calon Pengantin dan Sosialisasi Ekohort Kespro dan Catin	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	OJT MTBS dan Tatalaksana Gizi Buruk di Puskesmas	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orientasi Pertumbuhan dan Perkembangan	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pemicuan Pilar Kesatu Sanitasi Total Berbasis Masyarakat lalu lalu pembongkaran helikopter di atas balong, kolam dan sungai, kemudian monitoring tindak lanjut kepada masyarakat yang menjadi temuan BABS	Dinas Kesehatan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penganggungjawab
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan petugas Promkes Puskesmas	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUSIbu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pelayanan MKJP	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pelayanan MKJP	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya	Pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan dan Minilokarya Tingkat Kecamatan	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	Penyelenggaraan Audit Kasus Stunting Catin, Bumil, Bufas, Baduta2	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pertemuan Kelompok Kegiatan PIKR dan BKR	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penganggungjawab
	Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pertemuan Kelompok Kegiatan BKB	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Menyalurkan bantuan sosial PKH berupa uang tunai setiap tahapnya yang harus digunakan untuk kebutuhan anak usia dini/ anak sekolah/ ibu hamil/ lansia/ disabilitas dan melakukan pertamuan peningkatan kemampuan keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga membahas modul kesehatan dan gizi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Pembinaan dan Pendampingan teknis pelaksanaan imunisasi dalam rangka pelaksanaan imunisasi posyandu (sweeping) dan sosialisasi introduksi vaksin baru	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	menyalurkan program sembako berupa bantuan tunai setiap bulannya yang harus dibelanjakan ke bahan-bahan pokok sesuai ketentuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pembinaan kader pembangunan manusia	Terlaksananya Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penganggungjawab
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Sosialisasi dan promosi gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) kepada masyarakat dengan risiko stunting di Desa lokus	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan B2SA dan Pemberian Paket Makanan Menu B2SA	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan kepada Pelaku Usaha PSAT di Kabupaten Pangandaran	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Pemberian Paket Sembako dalam rangka Intervensi Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan (PDRP)	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Dinas Pertanian
Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah KK yang mendapat bantuan Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan standar	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penganggungjawab
				Dan Kawasan Permukiman
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber: Olahan Penyusun, 2024

4.2.5.2 Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi komitmen bersama baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah untuk menahan laju pemanasan global. Dalam upaya mencapai target penurunan emisi, Indonesia telah menetapkan komitmen melalui Nationally Determined Contribution (NDC), dengan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41% bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030. Target penurunan emisi gas rumah kaca merupakan target imperatif yang diturunkan ke Kabupaten/Kota. Target untuk Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 16 Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Pangandaran

Indikator	Satuan	Target
Penurunan emisi gas rumah kaca kumulatif	Ton CO2eq	253.223,76
Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca tahunan	Ton CO2eq/Milyar Rupiah	2,31

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Penurunan Wilayah 1 Kabupaten Pangandaran secara total sebesar 429.421,87 Ton CO2eq, terdiri dari Kabupaten sebesar 253.223,76 Ton CO2eq dan penambahan Pusat dan Provinsi sebesar 176.198,12 Ton CO2eq. Untuk target Kabupaten Pangandaran diperoleh dari beberapa unsur seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 17 Unsur Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Pangandaran

Unsur	Satuan	Target
Penggunahan Lahan	Ton CO2eq	257,52
Peternakan	Ton CO2eq	236.867,90
Pertanian	Ton CO2eq	10.614,47
Transportasi	Ton CO2eq	597,90
Persampahan	Ton CO2eq	4.694,38
Limbah Domestik	Ton CO2eq	191,59

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan bebera kegiatan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4. 18 Dukungan Kegiatan dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Pangandaran

Jenis Kegiatan	Kategori	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Pengelolaan Sarana dan Pra Sarana Keanekaragaman Hayati	Peningkatan Cadangan Karbon	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Operasional TPS3R	Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu TPST / TPS3R	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Project of Action Restoration of Mangrove Forest	Penanaman Mangrove	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penanaman Hutan Mangrove	Penanaman Mangrove	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Sosialisasi Sampah Rumah Tangga	Pendukung	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Bantuan UPPO	Pendukung	Dinas Pertanian

Sumber: Olahan Penyusun, 2024

4.2.5.3 Dukungan Program-Program terhadap Peningkatan Sektor Periwisata di Kabupaten Pangandaran

Kabupaten Pangandaran merupakan daerah wisata yang sekarang ini terus berbenah, berbagai terobosan terus dilakukan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata. Namun dalam pengembangan pariwisata tersebut tentu memerlukan Sumber Daya Manusia masyarakat Kabupaten Pangandaran yang handal dan mempuni dalam menangkap peluang wisata ini.

Untuk menyiapkan hal tersebut pemerintah kabupaten pangandaran menjajaki kerjasama dengan Politeknik Pariwisata National Hotel Institute (NHI) Bandung yang merupakan satu perguruan tinggai dibidang pariwisata untuk mendirikan sekolahnya di Pangandaran. Sebelumnya beberapa perguruan tinggi juga telah didirikan di Kabupaten Pangandaran seperti PSDKU UNPAD, IAIN dan lain-lain.

Demi membawa pariwisata Pangandaran naik kelas ke tingkat dunia, beragam upaya perlu dilakukan. Langkah demi langkah dalakukan berbagai pihak untuk mewujudkan mimpi tersebut. Salah satunya dilakukan BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Pangandaran.

Untuk mengembangkan pariwisata Pangandaran agar bisa berbicara banyak di tingkat dunia, HIPMI Pangandaran menjalin kerjasama dengan lembaga dunia Programme Uitzending Managers (PUM) Netherland Senior Experts. Pariwisata hingga UMKM mendapatkan pelatihan langsung dari ahli di berbagai bidang.

Peningkatan sektor pariwisata juga didukung dengan perluasan untuk kolaborasi di berbagai sektor seperti seni dan budaya. Berbagai event festival dan pagelaran seni budaya bisa di laksanakan sebagai ajang promosi pariwisata.

4.2.5.4 Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam Upaya Percepatan Pembangunan Jabar Selatan

Pengembangan daerah Pangandaran didukung dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, yang merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di kawasan Jabar bagian selatan, khususnya Pangandaran.

Dalam upaya pengendalian atas implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) sedang melakukan revisi terhadap Perpres 87/2021. Beberapa proyek eksisting dalam Perpres 87/2021 akan disesuaikan dengan dikeluarkan dari list, diantaranya adalah Pembangunan Terminal Tipe A Pangandaran. Di sisi lain ada juga proyek eksisting yang perlu ditinjau kembali dan diperbarui dari aspek nomeklaturnya, seperti semula Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Bojongsari menjadi Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Bojongsari. Dan ada juga proyek usulan baru yang diajukan oleh masing-masing daerah.

Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Pangandaran dalam usulan perubahan Perpres 87/2021 dapat dilihat dalam tabel beriktu:

Tabel 4. 19 Proyek Strategis Nasional Kabupaten Pangandaran dalam Usulan Perubahan Perpres 87/2021

Eksisting Perpres Nomor 87 Tahun 2021		Usulan Perubahan Perpres Nomor 87 Tahun 2021		
Program	**Anggaran (Juta Rupiah)**	**Penyesuaian**	**Program**	**Anggaran (Juta Rupiah)**
Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Segmen 2 (Tasikmalaya-Cilacap)	30.240.000,00	Tetap	Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Segmen 2 (Tasikmalaya-Cilacap)	30.240.000,00
Pembangunan dan Peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat	1.740.000,00	Tetap	Pembangunan dan Peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat	1.740.000,00
Pelebaran Jalan Lingkar Tengah Pangandaran	240.000,00	Tetap	Pelebaran Jalan Lingkar Tengah Pangandaran	240.000,00
Pelebaran Jalan Akses Pelabuhan Pangandaran	85.000,00	Tetap	Pelebaran Jalan Akses Pelabuhan Pangandaran	85.000,00
Reaktivasi Rel KA Banjar-Cijulang	3.000.000,00	Tetap	Reaktivasi Rel KA Banjar-Cijulang	3.000.000,00
Pembangunan Terminal Tipe A Pangandaran	75.000,00	Dikeluarkan dari list	-	-
Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Majingklak	35.000,00	Tetap	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Majingklak	35.000,00
Pengembangan Bandar Udara Nusawiru	500.000,00	Tetap	Pengembangan Bandar Udara Nusawiru	500.000,00
Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Bojongsari	30.000,00	Perubahan Nomenklatur	Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Bojongsari	30.000,00
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan Pangandaran	50.000,00	Tetap	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan Pangandaran	50.000,00
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Purbahayu	30.000,00	Tetap	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Purbahayu	30.000,00
Penataan Kawasan Kumuh	30.000,00	Dikeluarkan dari list	-	-
Penanganan Banjir di Kabupaten Pangandaran	475.000,00	Tetap	Penanganan Banjir di Kabupaten Pangandaran	475.000,00
Pembangunan Breakwater Pantai Timur Pangandaran	180.000,00	Perubahan Nomenklatur	Pembangunan Breakwater Pangandaran	180.000,00
Pembangunan Daerah Irigasi Baru DI Parigi	176.000,00	Tetap	Pembangunan Daerah Irigasi Baru DI Parigi	176.000,00
Pembangunan Desa Digital	33.333,00	Tetap	Pembangunan Desa Digital	33.333,00
Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	101.667,00	Tetap	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	101.667,00

Eksisting Perpres Nomor 87 Tahun 2021		Usulan Perubahan Perpres Nomor 87 Tahun 2021		
Program	**Anggaran (Juta Rupiah)**	**Penyesuaian**	**Program**	**Anggaran (Juta Rupiah)**
Pengembangan Kawasan Tambak Udang	160.000,00	Tetap	Pengembangan Kawasan Tambak Udang	160.000,00
Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	60.000,00	Tetap	Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	60.000,00
Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Pangandaran	103.000,00	Tetap	Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Pangandaran	103.000,00
Pengembangan Desa Wisata	41.670,00	Tetap	Pengembangan Desa Wisata	41.670,00
Pembangunan Creative Center	21.000,00	Tetap	Pembangunan Creative Center	21.000,00
-	-	Usulan Baru	Revitalisasi Pasar Pananjung	85.000,00
-	-	Usulan Baru	Pengembangan Kawasan Tambak Udang	8.237,50
-	-	Usulan Baru	Pengembangan Sapi Pasundan melalui sistem budidaya pemeliharaan umbaran	5.000,00
-	-	Usulan Baru	Pengembangan klaster agribisnis peternakan kambing perah	4.000,00
-	-	Usulan Baru	Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu	4.995,00
-	-	Usulan Baru	Penguatan Lumbung Pangan Daerah	6.912,50
-	-	Usulan Baru	Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	269,90

Sumber: Olahan Penyusun, 2024

4.2.6 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2025

Keterkaitan Prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran, dengan Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2025 disandingkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 20 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional-Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran
PN 1, Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PP6, Inovasi Pelayanan Publik, Penataan Daerah dan Stabilitasi Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan	PD6, Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik
PN 2, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PP1, Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	PD1, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya
	PP5, Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	PD5, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis
	PP6, Inovasi Pelayanan Publik, Penataan Daerah dan Stabilitasi Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan	PD6, Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik
PN 3, Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PP1, Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	PD1, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya
PN 4, Memperkuat Pembangunan Sumber	PP2, Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan	PD2, Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan,

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran
Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya
	PP3 Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	PD3 Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan
	PP4 Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PD4 Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana
PN 5, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PP1, Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	PD1, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya
PN 6, Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PP5, Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	PD5, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis
PN 7, Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PP6, Inovasi Pelayanan Publik, Penataan Daerah dan Stabilitasi Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan	PD6, Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik
PN 8, Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PP2, Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	PD2, Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya
	PP4 Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PD4 Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana

Sumber: Olahan Penyusun, 2024

Keterkaitan sasaran pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2025 dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 disajikan pada table di bawah ini:

Tabel 4. 21 Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dengan Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dan Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
PN1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		PP6: Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah		PPD6: Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	
S1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru.		PP1: Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya		PPD1: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	
		PP5: Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa		PPD5: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	
		PP6: Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah		PPD6: Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	
S2. Pemantapan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru.	1. Asia Power Index (Military Capability)	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	2. Asia Power Index (Diplomatic Influence)	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP
	3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP
	4. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	S2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
	5. Indeks Ketahanan Energi	S11. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	S16. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	6. Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	S11. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	S16. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	7. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	S14. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (%)	S14. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Persentase cakupan layanan infrastruktur
	8. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	S14. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (%)	S14. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Persentase cakupan layanan infrastruktur
	9. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	S3. Peningkatan Akses Dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
		penempatan tenaga kerja			
	10. Indeks Ekonomi Hijau	S2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
			Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
	11. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	S11. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	S16. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	12. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	S15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	S16. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	13. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	S15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	S16. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	S15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	S16. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	15. Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)	S11. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	S16. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		PP1: Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya		PPD1: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
S3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%)	S3. Peningkatan Akses Dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan
	2. Rasio Kewirausahaan (%)	S10. Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)	S3. Peningkatan Akses Dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan
	3. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%)	S3. Peningkatan Akses Dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan
	4. Rasio PDB Pariwisata (%)	S3. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
	5. Devisa Pariwisata (miliar USD)	S3. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
	6. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	S3. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
	7. Aset Perbankan/PDB (%)				
	8. Aset Dana Pensiun/PDB (%)				
	9. Aset Asuransi/PDB (%)				

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	10. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)				
	11. Total Kredit/PDB (%)				
	12. Inklusi Keuangan (%)				
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		PP2: Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama		PPD2: Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	
		PP3: Penguatan Sistem Kesehatan Daerah		PPD3: Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	
		PP4: Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana		PPD4: Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	
S4. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1. Hasil Pembelajaran: a. Rata-rata nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains	S5. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat		S4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	
	b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	S5. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	S4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Pendidikan
	c. Harapan lama sekolah (tahun)	S5. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	S4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Pendidikan

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	S5. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	S4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Pendidikan
	3. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	S5. Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Jumlah Pemuda Berprestasi yang Mendapat Penghargaan
	4. Tingkat Penguasaan Iptek: a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b. Peringkat Indeks Inovasi Global	S18. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	S15. Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana
	5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	S5. Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Jumlah Pemuda Berprestasi yang Mendapat Penghargaan
	6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	S6. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	S5. Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Jumlah Pemuda Berprestasi yang Mendapat Penghargaan
	7. Usia Harapan Hidup (tahun)	S8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	S4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	8. Kesehatan Ibu dan Anak: a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	S9. Meningkatnya upaya percepatan penurunan stunting	Prevalensi Stunting (%)	S4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan
	9. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	S8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	S4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan
	10. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	S8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	S4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan
	11. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	S6. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	S5. Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Jumlah Pemuda Berprestasi yang Mendapat Penghargaan
	12. Indeks Ketimpangan Gender (IKG	S6. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	S5. Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Jumlah Pemuda Berprestasi yang Mendapat Penghargaan
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		PP1: Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya		PPD1: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
S5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	S1. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Industri (%)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
	2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah)	S3. Peningkatan Akses Dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan
	3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	S12. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	Tingkat Konektivitas (%)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
	4. Biaya Logistik (% PDB)	S12. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	Tingkat Konektivitas (%)	S8. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		PP5: Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa		PPD5: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	
S6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	S7. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		
	2. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	S7. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	3. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	S4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
	4. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	S13.Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur (Poin)	S14. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Persentase cakupan layanan infrastruktur
	5. Persentase desa mandiri (%)	S16. Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah Pedesaan	Indeks Desa Membangun (Poin)	S14. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Persentase cakupan layanan infrastruktur
	6. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	S14. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (%)	S14. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Persentase cakupan layanan infrastruktur
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		PP6: Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah		PPD6: Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	
S7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	1. Return on Asset (ROA) BUMN (%)	Tidak relevan dengan Provinsi Jawa Barat	Tidak relevan dengan Provinsi Jawa Barat	Tidak relevan dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak relevan dengan Kabupaten Pangandaran

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	2. Indeks Integritas Nasional	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP
	3. Indeks Materi Hukum	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP
	4. Indeks Pelayanan Publik	S18. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Indeks SPBE
	5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	S18. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Indeks SPBE
	6. Indeks Persepsi Korupsi	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP
	7. Indeks Pembangunan Hukum	S17. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	S12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP
	8. Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)				
	9. Tingkat Inflasi (%)				

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		PP2: Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama		PPD2: Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	
		PP4: Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana		PPD4: Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	
S8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	S5. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	S4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Pendidikan
	2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)				
	3. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	S11. Meningkatnya pembangunan rendah Karbon dan menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (Poin)	S15. Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana

Sumber: Olahan Penyusun, 2024

Dukungan Program Prioritas Daerah Kabupaten Pangandaran terhadap dukungan pada Program Prioritas Nasional dalam dokumen RKP 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 22 Tingkat Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2025 terhadap Program Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2025

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
PN.01 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia						
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Penguatan Demokrasi, Dan Penegakan Hak Asasi Manusia	1. Penguatan Kebebasan Masyarakat Sipil Untuk Berkumpul, Berekspresi, Berserikat, Dan Berpendapat	PPD6. Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintah Dan Pelayanan Publik Berbasis Digital Serta Penguatan Kondusifitas Daerah Dan Stabilitas Politik	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Masyarakat Yang Memahami Tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		2. Penguatan Kesetaraan Masyarakat Atas Informasi Publik		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat Yang Memahami Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
PN.02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru						
1	Keamanan Siber, Sandi, Dan Sinyal	Penguatan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, Terutama Pada Ranah Siber Dan Area Rentan	PPD6. Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintah Dan Pelayanan Publik Berbasis Digital Serta Penguatan Kondusifitas Daerah Dan Stabilitas Politik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem Informasi Dan Data Elektronik Yang Aman	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
		Lanjutan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Pumped Storage Upper Cisokan	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Fasilitasi Business Matchmaking Startup Digital	PPD6. Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintah Dan Pelayanan Publik Berbasis Digital Serta Penguatan Kondusifitas Daerah Dan Stabilitas Politik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Tata Kelola Spbe	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
			PPD1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat Melalui Penguatan Industri Pariwisata Sebagai Lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, Dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Serta Pembudidaya	Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Omsetnya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
		Fasilitasi Digital Technopreneur	PPD6. Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintah Dan Pelayanan Publik Berbasis Digital Serta Penguatan Kondusifitas Daerah Dan Stabilitas Politik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Tata Kelola Spbe	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
			PPD1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat Melalui Penguatan Industri Pariwisata Sebagai Lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, Dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Serta Pembudidaya	Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Omsetnya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
		Pemanfaatan Teknologi Digital Di Sektor Pertanian	PPD6. Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintah Dan Pelayanan Publik Berbasis Digital Serta Penguatan Kondusifitas Daerah Dan Stabilitas Politik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Tata Kelola Spbe	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
			PPD1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat Melalui Penguatan Industri Pariwisata Sebagai Lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, Dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Serta Pembudidaya	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
2	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle, Atau Fasilitas Pengolahan Sampah Lainnya Di Kota Depok, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Dan Kabupaten Cirebon	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Tempat Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka Di Kab. Bandung	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota Berupa Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Ciminyak Di Kabupaten Ciamis	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
3	Swasembada Pangan, Energi, Dan Air	Peningkatan Produktivitas Hortikultura Dan Peternakan Yang Berkelanjutan	PPD1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat Melalui Penguatan Industri Pariwisata Sebagai Lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, Dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Serta Pembudidaya	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Indeks Pertanaman Persentase Peningkatan Produksi Peternakan Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura	Dinas Pertanian

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	
		Prasarana Irigasi Air Tanah Atau Irigasi Lainnya Yang Dibangun Pada Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan Majalengka	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Bendungan Yang Direhabilitasi /Ditingkatkan Kapasitasnya Pada Sistem Penyediaan Air Minum Kota Cimahi	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Prasarana Air Baku Yang Dibangun Pada Sistem Penyediaan Air Minum Palabuhanratu	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Bendungan Yang Direhabilitasi /Ditingkatkan Kapasitasnya Pada Bendung Cariang Di Kabupaten Sumedang	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Prasarana Air Baku Yang Dibangun Pada Sistem Penyediaan Air Minum Patimban	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota Berupa Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Pada Tempat Pemrosesan Akhir Eksisting Di Provinsi Jawa Barat	PPD5. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pemerataan Wilayah Melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas Serta Konektivitas Menuju Pusat Kegiatan Strategis	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan Layanan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
		Sertifikat Benih Hortikultura Di Kabupaten Kuningan	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Pengembangan Sentra Hortikultura Berbasis Ekspor Untuk Kawasan Manggis Di Kabupaten Tasikmalaya Dan Kabupaten Ciamis	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Pengembangan Sentra Cabai Pada Kawasan Aneka Cabai Di Kabupaten Bandung	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Pengembangan Sentra Hortikultura Berbasis Ekspor Untuk Kawasan Manggis Di Kabupaten Sukabumi	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
PN.03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi						
1	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan Kertajati Aerocity	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Penguatan Produktivitas Industri Makanan Dan Minuman	PPD1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat Melalui Penguatan Industri Pariwisata Sebagai Lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, Dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Serta Pembudidaya	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Lokal Yang Meningkat Omsetnya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
		Penguatan Produktivitas Industri Tekstil Dan Produk Tekstil, Serta Alas Kaki	PPD1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat Melalui Penguatan Industri Pariwisata Sebagai Lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, Dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Serta Pembudidaya	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Lokal Yang Meningkat Omsetnya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
		Penguatan Ekosistem Film, Animasi, Visual Arts, Seni, Budaya, Kerajinan, Kuliner, Dan Pemampu Ekonomi Kreatif	PPD1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat Melalui Penguatan Industri Pariwisata Sebagai Lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, Dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Serta Pembudidaya	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Keratif Yang Berdaya Saing	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Penguatan Ekosistem Pengembangan Aplikasi Dan Gim	PPD6. Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintah Dan Pelayanan Publik Berbasis Digital Serta Penguatan Kondusifitas Daerah Dan Stabilitas Politik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Tata Kelola Spbe	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Tahap II Sistem Penyediaan Air Minum Regional Bandung Raya	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Penuntasan Pembangunan Bendungan Cibeet Dan Cijurey	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Modernisasi Daerah Irigasi Rentang	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Penuntasan Dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Teknologi, Informasi, Dan Komunikasi	PPD6. Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintah Dan Pelayanan Publik Berbasis Digital Serta Penguatan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Tata Kelola Spbe	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
			Kondusifitas Daerah Dan Stabilitas Politik			
		Bendungan Yang Direhabilitasi /Ditingkatkan Kapasitasnya Berupa Pembangunan Embung Ranca Hilir Di Kabupaten Subang	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Layanan Perencanaan Dan Pengawasan Teknik Berupa Pembangunan Fly Over Di Lemah Abang Kabupaten Bekasi	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Pembangunan Jalan Strategis Di Jalan Lingkar Timur Selatan	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian Pada Kereta Api Cipatat-Togog Apu Padalarang Di Kabupaten Bandung Barat	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Pembangunan Jalan Strategis (Padat Karya) Berupa Perbaikan Pedestrian Dan Drainase Pada Jalan Nasional Di Kota Bogor	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Prasarana Pengendali Daya Rusak Air Yang Dibangun Berupa Penanganan Tanggul Kritis Sungai Citarum Di Kabupaten Bekasi	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
		Bendungan Yang Direhabilitasi /Ditingkatkan Kapasitasnya Berupa Pembangunan Transmisi Air Baku	PPD1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat Melalui Penguatan Industri Pariwisata Sebagai Lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, Dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Serta Pembudidaya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
PN 04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas						
1	Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penurunan Kematian Ibu Dan Bayi	PPD3. Peningkatan Kualitas Dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Terpenuhi Persentase Sistem Informasi Yang Terkelola Persentase Sarana Dan Prasarana Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Dan Layak Fungsi	Dinas Kesehatan
		Pembangunan Kualitas Keluarga	PPD2. Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, Dan Berbudaya	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Laporan Pengendalian Lapangan Tingkat Kecamatan Sistem Informasi Kependudukan Dan Keluarga (Siga) Validitas Data Keluarga Beresiko Stunting	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Prevalensi Peserta Kb Aktif Persentase Peningkatan Pemahaman Tentang Stunting	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Peningkatan Pemahaman Tentang Stunting Bagi Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil Dan Ibu Pasca Persalinan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun Yang Berfokus Pada Percepatan Peningkatan Layanan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanakkanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal) Dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Sederajat	PPD2. Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, Dan Berbudaya	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pemenuhan Spm Pendidikan Persentase Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Pandemi Persentase Layanan Pendidikan Non Formal Dan Informal Persentase Tingkat Budi Pekerti Peserta Didik	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Pengembangan Bidang Keahlian Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Difokuskan Untuk Mendorong Potensi Daerah Setempat Pada Sektor Industri Pengolahan	PPD2. Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, Dan Berbudaya			

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
		Percepatan Penurunan Ketimpangan Gender, Khususnya Melalui Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan; Pencegahan Perkawinan Anak, Khususnya Di Kabupaten Garut, Ciamis, Indramayu, Dan Cirebon; Dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Utamanya Pada Wilayah Kantong Pekerja Migra	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Peningkatan Kualitas Dan Pengembangan Perguruan Tinggi Riset Sains (Science), Teknologi (Technology), Teknik (Engineering), Seni (Art), Dan Matematika (Mathematics) Unggulan Bertaraf Internasional Pada Institut Teknologi Bandung Dan Institut Pertanian Bogor Melalui Proyek Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) "Promoting Research And Innovation Though Modern And Efficient STP Project" (PRIME Step)	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
		Peningkatan Kualitas Dan Pengembangan Perguruan Tinggi Sains (Science), Teknologi (Technology), Teknik (Engineering), Seni (Art), Dan Matematika (Mathematics) Unggulan Di Tingkat Regional Pada Universitas Singaperbangsa Karawang	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Peningkatan Kapasitas Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Serta Kesehatan Ibu Dan Anak Di RS Di Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota	PPD3. Peningkatan Kualitas Dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Terpenuhi Persentase Sistem Informasi Yang Terkelola Persentase Sarana Dan Prasarana Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Dan Layak Fungsi	Dinas Kesehatan
		Fasilitasi Literasi Digital	PPD6. Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintah Dan Pelayanan Publik Berbasis Digital Serta Penguatan Kondusifitas Daerah Dan Stabilitas Politik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Tata Kelola Spbe	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
		Digital Pembangunan Kampus II Politeknik Manufaktur (POLMAN) Di Kota Depok	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi Berupa Pengembangan Kampus ITB Cirebon	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
PN 05. Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri						
1	Pengembangan Hilirisasi Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	Penguatan Industri Kimia Dasar Dan Logam Dasar	PPD1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat Melalui Penguatan Industri Pariwisata Sebagai Lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, Dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Serta Pembudidaya	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pengembangan Industri Yang Ditangani	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
		Hilirisasi Industri Tembaga Dan Bauksit		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Lokal Yang Meningkat Omsetnya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
		Hilirisasi Industri Kelapa Dan Karet		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Lokal Yang Meningkat Omsetnya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
2	Penguatan Industri Padat Karya Berkelanjutan, Industri Dasar, Dan Industri Strategis Nasional	Pengembangan Industri Kimia Hilir Dan Farmasi	PPD1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat Melalui Penguatan Industri Pariwisata Sebagai Lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, Dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Serta Pembudidaya	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pengembangan Industri Yang Ditangani	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
		Pengembangan Industri Alat Angkut Termasuk Electric Vehicle Dan Kedirgantaraan		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pengembangan Industri Yang Ditangani	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
		Pengembangan Industri Elektronik Dan Digital		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pengembangan Industri Yang Ditangani	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
		Pemanfaatan Teknologi Digital Di Sektor Logistik				

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
3	Pengembangan Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
PN 06. Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan						
1	Pemerataan Ekonomi	Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Purwakarta	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Di Wilayah Metropolitan Bandung (Bus Rapid Transit Bandung Raya, Elektrifikasi Kereta Api Komuter Bandung)	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Pengembangan Sistem Perumahan Publik Yang Terpadu Dengan Layanan Infrastruktur Dasar Perkotaan Dan Disertai Dengan Penguatan Tata Kelola	PPD5. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pemerataan Wilayah Melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas Serta Konektivitas Menuju Pusat Kegiatan Strategis	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Ditangani	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Peremajaan Kota (Urban Renewal) Secara Inklusif Dan Terpadu Dalam Rangka Mewujudkan Kota Tanpa Permukiman Kumuh		Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
		Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Berupa Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Fly Over Kiaracondong-Buahbatu Di Kota Bandung	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Control System/Intelligent Transportation System Berupa Penyediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bus Rapid Transit Di Bandung Raya	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Pembangunan Baru Kawasan Permukiman Berupa Rumah Susun Khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Purwakarta	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Penyusunan Panduan Dan Rencana Pengembangan Untuk Kota Dan Kawasan Perkotaan Wilayah Metropolitan Bandung	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
PN 07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan						
1	Membangun Single Identity Number Dan Sistem Informasi Administrasi Dan Data Base Kependudukan Untuk Mencegah Identitas Ganda, Mencegah Penyalahgunaanny a, Dan Memudahkan Pelacakan Aset, Pajak, Maupun Persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda Pada Daftar Pemilih Tetap Di Dalam Pemilu	Reviu Dan Penyusunan Pengaturan/Regulasi Yang Relevan Dengan Pengembangan Kawasan Perkotaan Wilayah Metropolitan Bandung	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
		Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Berbasis Online Single Submission Dan Mal Pelayanan Publik Digital	PPD6. Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintah Dan Pelayanan Publik Berbasis Digital Serta Penguatan Kondusifitas Daerah Dan Stabilitas Politik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Tata Kelola Spbe	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
PN 08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur						
1	Melestarikan Budaya	Pengembangan Ekonomi Berbasis Kebudayaan Di Cagar Budaya Batu Jaya Dan Keraton Cirebon	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
2	Penanganan Bencana	Peningkatan Pengelolaan Kualitas Udara Melalui Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Metropolitan Bandung	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	

No.	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penganggung Jawab
		Pengamanan Pantai Eretan Dan Kabupaten Cirebon	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	Tidak Relevan Dengan Kabupaten Pangandaran	
3	Masyarakat Adil, Makmur, Dan Harmonis	Penyediaan Sumber Daya Manusia Berkompeten, Sarana, Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan	PPD4. Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat Yang Tanggap Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber: Olahan Penyusun, 2024

Pemerintah
Kabupaten Pangandaran

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran
2025

@pangandaranbappeda

https://bappeda.pangandarankab.go.id

Objek Wisata Cikumang

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 untuk RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025. Musrenbang menjadi media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Proses penyusunan program prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, bawah-atas *(bottom up)*, atas-bawa *(top-down)*, dan politis serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pencapaian pembangunan tahun sebelumnya maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Kabupaten Pangandaran tahun 2025 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya mewujudkan tema yaitu "*Peningkatan Daya Saing Daerah*", dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yaitu:

1. PD1, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya
2. PD2, Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya
3. PD3, Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan
4. PD4, Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana
5. PD5, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis
6. PD6, Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik

Prioritas dimaksud akan dijabarkan pada rencana program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi dan janji politik kepala daerah sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 serta daya dukung terhadap kebijakan pembangunan pemerintah yang tertuang pada RPJMN serta kebijakan teknis terbaru yaitu Peraturan Presiden RI nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rabana dan Jawa Barat Bagian Selatan serta kebijakan pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2025

Belanja daerah tahun 2025 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah. Selain itu, belanja daerah juga digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2025. Rencana pendanaan dan belanja pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2025 tertuang dalam tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5. 1
Proyeksi Belanja Daerah

No	Uraian	2025
5	**Belanja Daerah**	**2.126.465.652.901**
5.1	**Belanja Operasi**	**1.329.977.992.522**
5.1.01	Belanja Pegawai	552.966.092.953
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	665.374.742.769
5.1.03	Belanja Bunga	37.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	73.437.156.800
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.200.000.000
5.2	**Belanja Modal**	**705.148.832.379**
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	290.643.352.758
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	193.154.155.648
5.2.04	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	221.351.323.973
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**5.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
5.4	**Belanja Transfer**	**86.338.828.000**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	29.303.164.500
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	57.035.663.500

Sumber: SIPD Kabupaten Pangandaran, 2024

Proyeksi belanja daerah selanjutnya dijabarkan dalam rencana program/kegiatan prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

5.1.1. Rencana Pendanaan Pembangunan yang Bersumber dari APBN Tahun 2025

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam mendukung prioritas pembangunan nasional, prioritas provinsi jawa barat dan prioritas pembangunan daerah, telah menyusun rencana kegiatan yang didanai dari APBN seperti DAK yang merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adapun Pagu Anggaran Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Tahun 2025 untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025 tersebut, disajikan pada (Tabel 5.2). berikut:

Tabel 5.2
Daftar Usulan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik
Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

No.	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN	Nilai Usulan
DAK FISIK				
1	Pendidikan	PAUD	Revitalisasi PAUD	7,583,952,000.00
		SD	Revitalisasi SD	32,900,737,000.00
		SMP	Revitalisasi SMP	11,538,224,000.00
2	Kesehatan dan KB	Penguatasn Sistem Dan Pelayanan Kesehatan	Penguatan Puskesmas	1,008,000,000
			Penguatan Layanan Unggul KJSU-KIA	1,352,242,000.00
			Penguatan RS daerah	10,216,971,000.00
3	Air Minum	Air Minum	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	3,450,000,000
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	1,400,000,000
			Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	1,566,900,000
			JUMLAH	**71,017,026,000**
DAK NON FISIK				
1	Kesehatan dan KB	Bantuan Operasional Kesehatan	BOK Dinas Kesehatan	10,618,589,959

			BOK Puskesmas	14,751,419,145
			BOK Pengawas Obat dan Makanan	249,738,000
		Bantuan Operasional Keluarga Berencana	BOK BERENCANA	4,859,792,000
	Pendidikan	Tunjangan Profesi Guru	Tunjangan Profesi Guru	101,611,169,320
		SD	BOS SD	28,490,465,000
		SMP	BOS SMP	14,908,781,000
		PAUD	BOS PAUD	4,978,592,000
		Sekolah Non Formal	BOS Sekolah Non Formal	2,151,287,000
			JUMLAH	**182,619,833,424**
TOTAL				**253,636,859,424**

Sumber: Bappeda Kabupaten Pangandaran diolah oleh Penyusun, 2024

5.1.2. Rencana Pendukungan Alternatif Pendanaan Pembangunan yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Pemerintah kabupaten Pangandaran memiliki alternatif pendanaan Pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa barat yaitu Bantuan Keuanagan Provinsi Jawa Barat. Berikut usulan kabupaten Pangandaran untuk perencanaan pembangunan pada tahun 2025, disajikan pada (Tabel 5.3), berikut:

Tabel 5.3
Daftar Usulan Kegiatan Prioritas yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

NO.	USULAN	ALAMAT LOKASI	USULAN ANGGARAN
1	#BKK Kompetitif - Peningkatan Konsumsi Protein Hewani (Ikan)	5 Kecamatan di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	2,110,000,000
2	#BKK Kompetitif - Peningkatan Sarana Prasarana dan Teknologi Produksi Perikanan	Kab.Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	1,712,000,000
3	#BKK Kompetitif - Pembangunan Ekoriparian	Tarian Nyalindung (Taman Ekoriparian Nyalindung) Dusun Karangkamulyan, RT/RW 002/002, Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	10,000,000,000

NO.	USULAN	ALAMAT LOKASI	USULAN ANGGARAN
4	#BKK Kompetitif - Peningkatan Sarana Prasarana dan Teknologi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang, Provinsi Jawa Barat	1,200,000,000
5	#BKK Kompetitif - Inovasi Peningkatan Konsumsi Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri	Dinkes Kabupaten Pangandaran, SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	2,345,150,000
6	#BKK Kompetitif - Circular Ekonomi terkait Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah Pertanian, Perikanan dan Peternakan (Maggot)	Hotel Maggot PAZERO (Pangandaran Zero Waste) Dusun Japuh RT 04 RW 02, Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	2,700,000,000
7	#BK Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)	Dusun Cikarang Desa Karangmulya Kecamatan Padaherang, Provinsi Jawa Barat	500,000,000
8	#BK Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	93 Desa di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	500,000,000
9	#BK Dana Operasional Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU)	Lembaga Posyandu se-Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	110,000,000
10	#BK TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Desa Jadikarya, Desa Bungur Raya & Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	1,200,000,000
11	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	55 SMP se Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	11,054,065,000
12	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	11 SMP se Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	16,666,800,000
13	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	43 SMP se Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	9,999,865,000
14	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	55 SMP se Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	11,054,065,000

NO.	USULAN	ALAMAT LOKASI	USULAN ANGGARAN
15	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	3 SMP di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	10,773,000,000
16	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	37 SMP di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	10,000,000,000
17	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	30 SMP di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	4,999,950,000
18	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	8 SMP di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	5,040,000,000
19	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	6 SMP di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	3,780,000,000
20	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	11 SMP di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	6,930,000,000
21	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	11 SMP di Kab.Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	14,035,200,000
22	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	7 SMP di Kab.Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	7,894,800,000
23	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	3 SMP di Kab.Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	9,356,800,000
24	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	37 SMP di Kab.Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	9,999,990,000
25	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	18 SMP di Kab.Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	9,999,990,000

NO.	USULAN	ALAMAT LOKASI	USULAN ANGGARAN
26	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	5 SMP di Kab.Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	10,526,400,000
27	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	55 SMP di Kab.Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	11,907,500,000
28	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	56 SMP di Kab.Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	9,999,920,000
29	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	Pengadaan Papan Interaktif Penunjang Pembelajaran Bahasa Inggris untuk 55 SMP di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	12,100,000,000
30	#BK Pembangunan Rumah Singgah di Wilayah Perbatasan untuk Penanganan PMKS Wilayah Perbatasan	Pembangunan Rumah Singgah di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	3,000,000,000
31	#BK Bantuan Keuangan Khusus Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Bantuan Keuangan Khusus Desa) untuk 93 Desa di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	18,600,000,000
32	#BK Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan	Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Jl. Raya Parigi, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Provinsi Jawa Barat	15,860,000,000
33	#BK Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Pembangunan TPST Bojongsari Desa Bojongsari, Kecamatan Padaherang, Provinsi Jawa Barat	13,250,000,000
34	#BK Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	16,329,600,000
35	#BK Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - SL pada Lokasi Kawasan Kumuh di Luar Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni pada Lokasi Kawasan Kumuh di 5 Desa di	2,000,000,000

NO.	USULAN	ALAMAT LOKASI	USULAN ANGGARAN
		Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	
36	#BK Intervensi Balita Weight Faltering, BGM, dan Undeweight	Intervensi Balita Weight Faltering, BGM dan Underweight di 10 Kecamatan di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	1,261,421,000
37	#BK Pengembangan SPAM	Pengembangan SPAM (Perluasan Jaringan Distribusi SPAM Putrapinggan, Sucen, Parigi) di 3 Lokasi di Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	49,991,502,000
38	#BK Pengembangan SPAM	Pengembangan SPAM (Uprating IPA Parigi Kapasitas 10 L/S) di Desa Karangbenda Kec.Parigi, Provinsi Jawa Barat	8,320,696,000
39	#BK Pengembangan SPAM	Pengembangan SPAM (Uprating IPA Putrapinggan) di Desa Putrapinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	8,061,800,000
40	#BK Pengembangan SPAM	Pengembangan SPAM (Uprating IPA Sucen Kapasitas 20 L/S) di Desa Cibenda Kec.Parigi, Provinsi Jawa Barat	3,576,981,000
41	#BK Peningkatan Sarana Prasarana TIK Pendidikan untuk KBM Siswa SMP (Lab dan Digital Study Center)	Pengadaan Digital Flip Chart untuk 25 SMP di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	5,000,000,000
42	#BK Penyediaan Perlengkapan Jalan	Pagar Pengaman Jalan di 4 ruas jalan di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	8,979,100,000
43	#BK Penyediaan Perlengkapan Jalan	Pengadaan Rambu Lalu Lintas di ruas jalan di 10 Kecamatan di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	2,989,760,000
44	#BK Penyediaan Perlengkapan Jalan	Penerangan Jalan Umum Konvensional di ruas jalan di 10 Kecamatan di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	20,030,000,000

NO.	USULAN	ALAMAT LOKASI	USULAN ANGGARAN
45	#BK Penyediaan Perlengkapan Jalan	Penerangan Jalan Umum Tiang Ornamen di ruas jalan di 10 Kecamatan di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	29,915,000,000
46	#BK Penyediaan Perlengkapan Jalan	Penerangan Jalan Umum Solar Cell di ruas jalan pesisir pantai di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	47,115,000,000
47	#BK Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor di Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	12,200,000,000
48	#BK Pembangunan Gedung Pemerintahan	Pembangunan Gedung Workshop Peralatan dan Laboratorium Pekerjaan Umum Kabupaten Pangandaran di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	2,424,979,000
50	#BK Pembangunan Gedung Pemerintahan	Pembangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	16,152,189,000
52	#BK Sarana TPI	Bantuan Sarana TPI untuk 9 Koperasi Pengelola TPI di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	931,650,000
52	#BK Penataan Kawasan Permukiman Tematik	Peningkatan Jalan Kawasan Perbatasan Desa Pamotan di Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	1,000,000,000
53	#BK Penataan Kawasan Permukiman Tematik	Penataan Halaman Parkir Ciwayang Bodyrafting (Hilir) Desa Wisata Cimindi di Desa Cimindi, Kecamatan Cigugur, Kabupaten pangandaran, Provinsi Jawa Barat	1,000,000,000
54	#BK Pembaharuan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan	Pengadaan Mobil Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling di Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, Jl. Merdeka	1,000,000,000

NO.	USULAN	ALAMAT LOKASI	USULAN ANGGARAN
		No. 185, Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	
55	#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Jangraga Desa Mangunjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	1,000,000,000
56	#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Harumandala Desa Harumandala, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	2,000,000,000
57	#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Proteksi Tebing Saluran Pembuang Ciawitali Tengah Desa Pamotan Kec.kalipucang, Provinsi Jawa Barat	3,000,000,000
58	#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Proteksi Saluran Pembuang Ciloji D.I Ciloji (Lanjutan) Desa Pamotan Kec. Kalipucang, Provinsi Jawa Barat	2,000,000,000
59	#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saluran Sub Sekunder Pajaten D.I Cikembulan (Lanjutan) Desa Pajaten Kec. Sidamulih, Provinsi Jawa Barat	1,000,000,000
60	#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi,Normalisasi Dan Proteksi Tebing Saluran Pembuang Kanca Kuning D.I Cikembulan desa wonoharjo ekc pangandaran, Provinsi Jawa Barat	1,500,000,000
61	#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Proteksi Saluran Pembuang Cipicung (Lanjutan) D.I Lakbok Selatan, Provinsi Jawa Barat	3,000,000,000
62	#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tanggul Pengaman Banjir D.I Jangraga desa jangraga kec mangunjaya, Provinsi Jawa Barat	2,000,000,000

NO.	USULAN	ALAMAT LOKASI	USULAN ANGGARAN
63	#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saluaran Pembuang Parungpaok desa legokjawa kec cimerak, Provinsi Jawa Barat	1,000,000,000
64	#BK Pembangunan Depo Arsip	Pembangunan Depot Arsip di Jln.Raya Cijulang Dusun Ciheras Desa Sukaresik Kec.Sidamulih, Provinsi Jawa Barat	10,000,000,000
65	#BK Kendaraan Perpustakaan Keliling	Pengadaan Perpustakaan Keliling di Kab.Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	750,000,000
66	#BK Penataan Kawasan Permukiman Tematik	Peningkatan Jalan Kawasan Perbatasan Desa Banjarharja Kec.kalipucang, Provinsi Jawa Barat	6,000,000,000
67	#BK Penataan Kawasan Permukiman Tematik	Peningkatan Jalan Kawasan Perbatasan Desa Cibuluh Kec.Kalipucang, Provinsi Jawa Barat	6,000,000,000
68	#BK Penataan Kawasan Permukiman Tematik	Peningkatan Jalan Kawasan Perbatasan Desa Ciganjeng Kec.Padaherang, Provinsi Jawa Barat	6,000,000,000
69	#BK Penataan Kawasan Permukiman Tematik	Peningkatan Jalan Kawasan Perbatasan Desa Kalipucang Kec.kalipucang, Provinsi Jawa Barat	6,000,000,000
70	#BK Penataan Kawasan Permukiman Tematik	Peningkatan Jalan Kawasan Perbatasan Desa Sukanagara Kec.padaherang, Provinsi Jawa Barat	6,000,000,000
71	#BK Penataan Kawasan Permukiman Tematik	Peningkatan Jalan Kawasan Perbatasan Desa Tunggilis Kec.Kalipucang, Provinsi Jawa Barat	6,000,000,000

Sumber: Bappeda Kabupaten Pangandaran diolah oleh Penyusun, 2024

5.1.3. Rencana Pendukungan Alternatif Pendanaan Pembangunan yang Bersumber selain dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Selain itu Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber selain dari APBD atau APBN diantaranya:

1) CSR (Corporate Social Responsibility)

   Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu sumber pendanaan Pemerintah Daerah kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu pendanaan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang bersumber dari CSR Lembaga Keuangan adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

2) Pinjaman Daerah (Portofolio)

   Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Kabupaten Pangandaran melakukan Pinjaman Daerah bertujuan untuk stabilitas fiskal daerah. Dalam pengajuaan portofolio pinjaman daerah harus melalui pertimbangan dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Salah satu pendanaan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang bersumber dari portofolio adalah lembaga keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

3) KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan

   KPBU atau Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Kabupaten Pangandaran menerapkkan kolaborasi pendanaan dengan PDAM Kabupaten Pangandaran, PT Sarana Multi Infrastruktur.

5.2 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Kegiatan pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 4
Rencana Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	Program
1. SPM PENDIDIKAN					
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3.	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan
2. SPM KESEHATAN					
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	Program
		mendapatkan layanan kesehatan			Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	Program
					Upaya Kesehatan Masyarakat
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. SPM PEKERJAAN UMUM					
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	86%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. SPM PERUMAHAN RAKYAT					
1.	Penyediaan dan rehabiitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
5. SPM TRANTIBUMLINMAS					
1.	Pelayanan ketentraman dan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	Program
	ketertiban Umum	layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada			Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
6. SPM SOSIAL					
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Sosial
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	Program
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sumber: Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan berserta target kinerja dan anggaran pendukung capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.5 Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	SUMBER DANA
1	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	850,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen	399,999,672	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
5	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	SUMBER DANA
6	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	282 Satuan Pendidikan	5,305,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	6,700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	15998 Orang	7,246,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
9	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	42,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
10	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	6,480,369,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
11	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
12	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	54 Dokumen	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	SUMBER DANA
							Layanan di Bidang Pendidikan			
13	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
14	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	226,128,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
15	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	54 Satuan Pendidikan	5,292,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
16	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14200 Paket	111,258,687,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
17	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	9859 Orang	6,226,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
18	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	42,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	SUMBER DANA
										BIDANG PENDIDIKAN
19	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13545 Peserta Didik	2,600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
20	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	250,090,356	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
21	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
22	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	299,499,774	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
23	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
24	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	262 Satuan Pendidikan	279,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
25	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	8375 Paket	2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	SUMBER DANA
26	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	12499 Orang	3,309,479,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
27	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	42,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
28	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8230 Peserta Didik	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
29	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN
30	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20 Dokumen	642,609,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
31	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	910 Peserta Didik	535,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	SUMBER DANA
32	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48956 Orang	2,500,000,000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
33	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	255954 Orang	100,000,000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
34	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78323 Orang	100,000,000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
35	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	116510 Orang	100,000,000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	SUMBER DANA
36	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4146 Orang	100,000,000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
37	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	578 Orang	100,000,000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
38	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4627 Orang	100,000,000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
39	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7625 Orang	100,000,000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	SUMBER DANA
40	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5728 Orang	100,000,000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
41	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5467 Orang	100,000,000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
42	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5085 Orang	100,000,000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
43	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25214 Orang	100,000,000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN
44	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	160 Liter/Detik	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	SUMBER DANA
45	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	6 Dokumen	6,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
46	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	280 M^3/Hari	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
47	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	260 Rumah Tangga	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
48	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	4,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
49	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Unit Rumah	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	SUMBER DANA
50	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	50 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
51	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	70 Orang	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
52	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	70 Orang	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
53	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	SUMBER DANA
54	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
55	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	2 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
56	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	100 laporan	5,197,606,494	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
57	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	272 Unit	660,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
58	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	161 Orang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	SUMBER DANA
59	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	4 Orang	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
60	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
61	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
62	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5 Orang	115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
63	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5 Orang	278,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	SUMBER DANA
64	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
65	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
66	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	59,885,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
67	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	9 Orang	94,991,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
68	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	126,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	SUMBER DANA
69	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI
70	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	3,040,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI
71	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
72	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	SUMBER DANA
73	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	3,040,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI
74	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
75	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI
76	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	3,040,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI
77	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	SUMBER DANA
78	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI
79	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	3,040,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI
80	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
81	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU	SUMBER DANA
82	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sumber: SIPD Kabupaten Pangandaran diolah, 2024

5.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, selanjutnya dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2025 yang diharapkan juga untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026. Rencana program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2025, dapat dilihat pada **lampiran II**. Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Tabel 5.6 Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Prioritas Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya;	106	171,984,244,402
2	Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya;	217	1,367,221,073,324
3	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan;	70	234,528,061,444
4	Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana;	52	16,870,204,252
5	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis;	92	1,086,208,020,952
6	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	301	260,621,103,211

Sumber: SIPD Kabupaten Pangandaran diolah, 2024

Tabel 5.7
Program Dan Kegiatan Prioritas Stunting, Penanganan Kemiskinan, Pengendalian Inflasi, Ketahanan Pangan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
PRIORITAS STUNTING				**46,806,610,000**	
1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12,700,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	52,889,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100,000,000	DINAS KESEHATAN
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2,500,000,000	DINAS KESEHATAN
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100,000,000	DINAS KESEHATAN
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2,261,421,000	DINAS KESEHATAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	500,000,000	DINAS KESEHATAN
8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	150,000,000	DINAS KESEHATAN
9	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	400,000,000	DINAS KESEHATAN
10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100,000,000	DINAS KESEHATAN
11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	40,329,600,000	DINAS KESEHATAN
12	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100,000,000	DINAS KESEHATAN
13	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,000,000	DINAS KESEHATAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,000,000	DINAS KESEHATAN
PRIORITAS PENANGANAN KEMISKINAN				**254,692,845,803**	
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	200,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	130,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	408,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	100,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	180,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
7	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	100,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	500,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	366,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	40,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
11	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	70,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	15,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	55,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
14	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	50,000,000	DINAS PERTANIAN
15	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100,000,000	DINAS PERTANIAN
16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	117,958,687,800	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
17	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5,090,400,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
18	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2,199,600,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
19	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	29,130,300,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
20	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15,243,600,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	535,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
22	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2,600,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
24	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	370,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
25	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	226,428,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
26	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	574,399,997	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
27	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6,730,460,256	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
28	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	324,500,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
29	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
30	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
31	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	7,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
32	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	110,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	4,980,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
34	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	4,800,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
35	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
36	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	10,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
37	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	14,510,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
38	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	53,192,250	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
39	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	196,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
40	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	421,379,500	DINAS KETENAGAKERJAAN
41	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100,000,000	DINAS KESEHATAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
42	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	40,329,600,000	DINAS KESEHATAN
43	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100,000,000	DINAS KESEHATAN
44	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,000,000	DINAS KESEHATAN
45	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,000,000	DINAS KESEHATAN
46	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,000,000	DINAS KESEHATAN
47	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	500,000,000	DINAS KESEHATAN
48	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100,000,000	DINAS KESEHATAN
49	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100,000,000	DINAS KESEHATAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
50	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,000,000	DINAS KESEHATAN
51	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100,000,000	DINAS KESEHATAN
52	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2,500,000,000	DINAS KESEHATAN
53	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100,000,000	DINAS KESEHATAN
54	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,000,000	DINAS KESEHATAN
55	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,000,000	DINAS KESEHATAN
56	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	23,715,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
57	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	49,400,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
58	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	61,526,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
59	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1,079,100,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
60	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	500,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
61	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1,850,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
62	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
63	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	600,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
64	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	30,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
65	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
66	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,741,277,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
67	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	115,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
68	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	278,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PRIORITAS PENGENDALIAN INFLASI				**133,894,265,500**	
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	25,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	500,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	199,999,908	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
7	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	44,999,978	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	44,999,970	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	609,686,736	BADAN PENDAPATAN DAERAH
10	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	129,358,830	BADAN PENDAPATAN DAERAH
11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	164,843,760	BADAN PENDAPATAN DAERAH
12	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	688,501,760	BADAN PENDAPATAN DAERAH
13	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	563,593,410	BADAN PENDAPATAN DAERAH
14	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	142,009,438	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
15	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	174,279,800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	298,480,800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
17	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50,000,070	BADAN PENDAPATAN DAERAH
18	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	50,889,800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
19	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah	600,171,654	BADAN PENDAPATAN DAERAH
20	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	133,650,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	495,922,450	BADAN PENDAPATAN DAERAH
22	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	99,200,936	BADAN PENDAPATAN DAERAH
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
24	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
25	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	37,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
26	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	57,035,663,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
27	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
28	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	29,303,164,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
29	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	129,348,200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PRIORITAS KETAHANAN PANGAN				**3,002,999,870**	
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	25,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	500,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	50,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	18,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	650,000,000	DINAS PERTANIAN
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1,300,000,000	DINAS PERTANIAN
10	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	50,000,000	DINAS PERTANIAN
11	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	120,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
12	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99,999,930	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
13	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	39,999,970	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
14	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	39,999,970	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PRIORITAS PENGENDALIAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA					
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	50,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	20,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	421,379,500	DINAS KETENAGAKERJAAN
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	10,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
5	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	20,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
6	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	50,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
7	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	196,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
8	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
9	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
10	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	53,192,250	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1,550,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
12	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	15,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN

Sumber : SIPD Kabupaten Pangandaran diolah, 2024

Demi Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah dengan provinsi terdapat Beberapa Program Pembangungan Kabupaten Pangandaran yang mendukung terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025, diantaranya :

Tabel 5.8

Sinkronisasi Program Pembangunan Kabupaten Pangandaran terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
PP 1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	53,192,250	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, dan Perindustrian
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3,199,950	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.	247,161,900	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	49,999,980	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	650,000,000	Dinas Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	1,027,700,400	Dinas Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian	1,300,000,000	Dinas Pertanian
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1,850,000,000	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	5,921,277,000	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,191,000,000	Dinas Sosial, Peberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	416,999,793	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PP 2 : Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	73,759,615,665	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	153,444,722,355	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	14,380,791,224	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	14,638,629,600	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5,300,000,000	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	53,570,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	14,816,100,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
PP 3 : Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	47,706,970,670	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62,936,021,000	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250,000,000	Dinas Kesehatan
PP 4 : Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	378,400,000	Badan Penanggulan Bencana Daerah
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	757,105,000	Badan Penanggulan Bencana Daerah
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	518,500,000	Badan Penanggulan Bencana Daerah
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	249,999,994	Badan Penanggulan Bencana Daerah
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3,350,000,000	Dinas Sosial, Peberdayaan Masyarakat dan Desa
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1,020,000,000	Dinas Sosial, Peberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	648,000,000	Dinas Sosial, Peberdayaan Masyarakat dan Desa

PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
PP 5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	254,980,000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	14,700,000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	69,950,979,000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	35,095,284,717	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	257,721,979,492	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	109,628,857,450	Dinas Perhubungan
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	89,100,000	Dinas Perhubungan
PP 6 : Inovasi Pelayanan Publik, Penataan Daerah dan Stabilitas Politik, Hukum, HAM dan Keamanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	300,000,000	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2,000,000,000	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	102,142,400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	31,650,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	26,051,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	10,121,831,447	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	647,851,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59,031,409	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	10,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, dan Perindustrian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	5,000,000,000	Puskesmas Padaherang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	2,200,000,000	Puskesmas Sidangwangi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	3,750,000,000	Puskesmas Mangunjaya
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	4,500,000,000	Puskesmas Kalipucang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	7,400,000,000	Puskesmas Pangandaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,233,600,000	Puskesmas Sidamulih

PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	2,721,800,000	Puskesmas Cikembulan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	4,800,000,000	Puskesmas Parigi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,165,200,000	Puskesmas Selasari
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	4,500,000,000	Puskesmas Cijulang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	2,448,000,000	Puskesmas Cimerak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	2,400,000,000	Puskesmas Legokjawa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	2,650,000,000	Puskesmas Cigugur
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	3,250,000,000	Puskesmas Langkaplancar
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	2,150,000,000	Puskesmas Jadikarya
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5,000,000,000	RSUD PANDEGA

Sumber: Bappeda Kabupaten Pangandaran diolah oleh Penyusun, 2024

5.3.1. Proyek Strategis Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

Beberapa Rencana Proyek Strategis Kabupaten Pangandaran yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 beserta permasalahan, Sumber Dana dan anggaran yang dibutuhkan disusun sebagai salah satu daftar proyekprioritas pembangunan daerah. Adapun beberapa proyek strategis Kabupaten Pangandaran tersebut, disajikan pada (Tabel 5.8), berikut:

Tabel 5.9
Proyek Strategis Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

NO	SUMBER DANA	BIDANG	KEGIATAN	PERMASALAHAN	ANGGARAN	PENGUSUL
1	BANKEU PROVINSI	INFRASTRUKTUR	Pembangunan infrastruktur desa melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintahan, dan TNI	Kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat, pemerintahan dan TNI. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari BBGRM, TMMD, dan BSMSS.	2,200,000,000	DINSOS PMD
2	BANKEU PROVINSI	INFRASTRUKTUR	Pengembangan SPAM melalui Perluasan Jaringan Distribusi dan Uprating IPA di Kecamatan Parigi, Kalipucang, dan Pangandaran	Cakupan SPAM di Kabupaten Pangandaran saat ini masih tergolong rendah,dimana perlu adanya langkah konkret untuk peningkatan cakupan pelayanan air minum di pangandaran.	69,950,979,000	DPUTRPRKP
3	BANKEU PROVINSI	INFRASTRUKTUR	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan di wilayah Kabupaten Pangandaran	Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas lalu lintas dan meminimalisir terjadinya kecelakaan, maka setiap ruas jalan perlu dilengkapi dengan fasilitas LLAJ	121,228,860,000	DISHUB

NO	SUMBER DANA	BIDANG	KEGIATAN	PERMASALAHAN	ANGGARAN	PENGUSUL
				salah satunya berupa Pagar Pengaman Jalan, Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Penerangan Jalan Umum, dan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas khususnya di jalur wisata dan umumnya diruas jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Pangandaran.		
4	BANKEU PROVINSI	INFRASTRUKTUR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi di 9 Daerah Irigasi di Kabupaten Pangandaran	Dalam upaya meningkatkan potensi Kabupaten Pangandaran sebagai daerah pariwisata dan daerah dengan produksi bidang pertanian yang tinggi, terutama dalam meningkatkan daya dukung dan daya gerak bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial, perlu didukung oleh penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas dan memadai tertutama di bidang pengairan.	16,500,000,000	DPUTRPRKP
5	BANKEU PROVINSI	INFRASTRUKTUR	Peningkatan Jalan Kawasan Perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah	Dalam upaya peningkatan potensi utama Kabupaten Pangandaran pada sektor pertanian dan pariwisata diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang memadai khususnya di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.	37,000,000,000	DPUTRPRKP

NO	SUMBER DANA	BIDANG	KEGIATAN	PERMASALAHAN	ANGGARAN	PENGUSUL
6	DAK	INFRASTRUKTUR	Pembangunan, Peningkatan, dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Masih minimnya akses masyarakat terhadap air bersih di Kabupaten Pangandaran.	6,416,900,000	DPUTRPRKP
7	KPBU	INFRASTRUKTUR	Pembangunan, Peningkatan, dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan			DPUTRPRKP
8	KPBU	INFRASTRUKTUR	Pembangunan Alat Penerangan Jalan			DISHUB
9	BANKEU PROVINSI	KESEHATAN	Jaminan kesehatan bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi setiap penduduk terutama bagi masyarakat miskin melalui pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan masyarakat.	16,329,600,000	DINKES
10	DAK	KESEHATAN	Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, RSUD, Layanan KJSU-KIA)	Optimalisasi layanan kesehatan kepada masyarakat.	43,477,018,000	DINKES
11	BANKEU PROVINSI	LINGKUNGAN HIDUP	Pembangunan TPST Bojongsari Desa Bojongsari, Kecamatan Padaherang, Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Pangandaran merupakan daerah pariwisata, sampah yang dihasilkan pun melebihi jumlah timbunan sampah penduduk dan kondisi saat ini sarana prasarana persampahan masih sangat terbatas terutama dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah yang saat ini masih menerapkan mekanisme open	13,250,000,000	DLHK

NO	SUMBER DANA	BIDANG	KEGIATAN	PERMASALAHAN	ANGGARAN	PENGUSUL
				dumping. Oleh karena itu diperlukan adanya tempat untuk pengolahan sampah secara terpadu melalui Pembangunan TPST Bojongsari.		
12	BANKEU PROVINSI	LINGKUNGAN HIDUP	Tarian Nyalindung (Taman Ekoriparian Nyalindung) Dusun Karangkamulyan, RT/RW 002/002, Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	Pengembangan Kawasan perkantoran yang disertai dengan kawasan pemukiman di daerah Desa Cintakarya, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran menyebabkan beberapa dampak menonjol seperti banjir ketika musim hujan, penambahan timbulan sampah, dan pencemaran air limbah domestik pada aliran sungai Nyalindung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilaksanakannya pembangunan ekoriparian dikawasan tersebut melalui kegiatan Tarian Nyalindung (Taman Ekoriparian Nyalindung).	10,000,000,000	DLHK
13	BANKEU PROVINSI	LINGKUNGAN HIDUP	Hotel Maggot PAZERO (Pangandaran Zero Waste) Dusun Japuh RT 04 RW 02, Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	Penanganan sampah di Kab. Pangandaran berdasarkan laporan JAKSTRADA tahun 2023 baru mencapai 49,25 % dari target 72%. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan strategi dan solusi inovatif dalam pengelolaan sampah diantaranya melalui	2,700,000,000	DLHK

NO	SUMBER DANA	BIDANG	KEGIATAN	PERMASALAHAN	ANGGARAN	PENGUSUL
				Hotel Maggot PAZERO (Pangandaran Zero Waste).		
14	BANKEU PROVINSI	LINGKUNGAN HIDUP/ PERSAMPAHAN	Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Jl. Raya Parigi, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Pangandaran merupakan daerah pariwisata, sampah yang dihasilkan pun melebihi jumlah timbunan sampah penduduk, sehingga diperlukannya peningkatan layanan kepada masyarakat maupun para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pangandaran. Upaya tersebut salah satunya adalah melalui Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan (Dumptruck, Kontainer, Beachclean) untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan pengunjung wisata ke Kabupaten Pangandaran.	15,860,000,000	DLHK
15	BANKEU PROVINSI	PEMERINTAHAN	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Bantuan Keuangan Khusus Desa) untuk 93 Desa di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	Desa adalah unsur pemerintahan yang berada paling bawah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat yang ada di wilayahnya. Berdasarkan peran pokok tersebut maka desa memerlukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.	18,600,000,000	DINSOS PMD

NO	SUMBER DANA	BIDANG	KEGIATAN	PERMASALAHAN	ANGGARAN	PENGUSUL
16	BANKEU PROVINSI	PEMERINTAHAN	Pembangunan Depot Arsip di Jln.Raya Cijulang Dusun Ciheras Desa Sukaresik Kec.Sidamulih, Provinsi Jawa Barat	Melihat kondisi faktual dinas dan instansi di Kabupaten Pangandaran yang bekum memiliki gedung/kantor yang permanen yang terindikasi rusak,hilang dan tercecernya arsip juga tidak adanya tenaga ahli/arsparis untuk pengelolaan arsip maka diperlukannya Pembangunan Depot Arsip sebagai tempat penyimpanan arsip	10,000,000,000	DISPUSIP
17	BANKEU PROVINSI	PEMERINTAHAN	Pembangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran dan Gedung Workshop Peralatan dan Laboratorium Pekerjaan Umum di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	Peningkatan kualitas infrastruktur bangunan gedung di wilayah kabupaten pangandaran sampai saat ini masih menghadapi permasalahan diantaranya belum tersedianya bangunan pemerintahan yang layak guna. Saat ini mayoritas gedung kantor pemerintahan belum milik sendiri, masih mengontrak kepada pihak lain.	18,577,168,000	DPUTRPRKP
18	BANKEU PROVINSI	PENDIDIKAN	Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Pengadaan Sarana Sekolah dan Peralatan Digital untuk SMP	Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan sumber daya manusia. untuk mencapai tujuan tersebut sekolah perlu dilengkapi dengan sarana	191,118,345,000	DISDIKPORA

NO	SUMBER DANA	BIDANG	KEGIATAN	PERMASALAHAN	ANGGARAN	PENGUSUL
				prasarana sekolah yang memadai.		
19	DAK	PENDIDIKAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sekolah (PAUD, SD, SMP)	Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan non formal, dasar dan menengah di Kabupaten Pangandaran.	190,969,067,803	DISDIKPORA
20	BANKEU PROVINSI	SOSIAL	Pembangunan Rumah Singgah di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	Untuk memaksimalkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Pangandaran sebagai daerah di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Tengah dimana saat ini banyak ditemukan kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	3,000,000,000	DINSOS PMD
21	BANKEU PROVINSI	SOSIAL	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni pada Lokasi Kawasan Kumuh di 5 Desa di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	Untuk meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin di Kabupaten Pangandaran maka diperlukannya Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni pada Lokasi Kawasan Kumuh.	2,000,000,000	DPUTRPRKP
22	BANKEU PROVINSI	SOSIAL	Inovasi Penanganan Stunting dan Kemiskinan melalui kegiatan GUMBIRA (Generasi Unggul, Melesat, Bebas Anemia Remaja), BULE KERITING (Budidaya Lele untuk Keluarga Beresiko	Penurunan angka stunting menjadi salah satu fokus utama dalam RPJMN 2020-2024. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Untuk	5,716,571,000	DINKES

NO	SUMBER DANA	BIDANG	KEGIATAN	PERMASALAHAN	ANGGARAN	PENGUSUL
			Stunting), dan Intervensi Balita Weight Faltering, BGM, dan Underweight di Kabupaten Pangandaran	menangani permasalahan stunting dan meningkatkan konsumsi protein hewani (ikan). Selain itu penyebab stunting adalah ditemukannya kasus anemia pada wanita sebagai calon ibu khususnya pada remaja putri. Anemia rematri (remaja putri) di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 dari 5.674 orang rematri yang diperiksa hemoglobin, yang mengalami anemia berat 0.5% (30 orang), anemia sedang 10,8 % (615 orang), anemia ringan 16,6 % (944 orang) dan sisanya normal.		

Sumber: Bappeda Kabupaten Pangandaran diolah oleh Penyusun, 2024

5.4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

Rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun anggaran 2025 yang telah dirumuskan dan prakiraan akan maju pada tahun 2026 yang telah disesuaikan dengan urusan pemerintahan masing-masing dapat dilihat pada matriks yang tersaji pada **lampiran II.**

Pemerintah
Kabupaten Pangandaran

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran
2025

@pangandaranbappeda

https://bappeda.pangandarankab.go.id

Objek Wisata Citumang

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil atas penyelenggaraan pemerintah yang dihubungkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diimbangi suatu penyelenggara pemerintahan yang baik. Ukuran-ukuran keberhasilan inilah selanjutnya didefinisikan menjadi sebuah indikator yang mampu menggambarkan ketercapaian suatu kinerja yang telah dilaksanakan. Dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk mengetahui tingkat keberhasilannya diperlukan suatu indikator kinerja daerah yang mampu menggambarkan secara utuh terhadap pencapaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan setiap tahunnya. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator pencapaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja sasaran organisasi perangkat daerah serta program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenan.

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Pangandaran dibagi menjadi dua kelompok yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan indikator makro rencana capaian kinerja Kepala Daerah, serta Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator yang menggambarkan rencana capaian indikator kinerja masing-masing urusan pemerintahan termasuk didalamnya program-program pembangunan prioritas. Rencana capaian masing-masing indikator kinerja tahun 2025 yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang ditetapkan.

Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Laju Pertumbuhan

Penduduk (LPP), dan Indeks Gini. Target Indikator Kinerja Makro tahun 2025 tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. 1 Indikator Makro Daerah

No	Indikator Kinerja Makro	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target	
						2024	2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	68,50-69,12	70,21	69,12-69,59	70,57	70,70	71,03
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,00-7,55	9,32	6,40-7,00	8,98	8,50	7,43-8,20
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,00-4,50	1,56	4,90-4,25	1,52	1,50	1,31-1,43
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,60-5,20	5,03	5,21-5,50	5,26	5,55	5,26-5,55
5	Indeks Gini (Poin)	0,338-0,330	0,294	0,330-0,326	0,323	0,315	0,318-0,331

Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran dan RPJMD Kabupaten Pangandaran, 2024, DIolah

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Pangandaran memiliki potensi untuk mencapai pembangunan daerah yang positif dengan mempertimbangkan hasil realisasi capaian pada Bab II. Pemerintah Kabupaten Pangandaran memproyeksikan indikator makro tahun 2025 dengan memperhatikan capaian tahun 2023 untuk mencapai target-target tersebut.

Kenaikan IPM tahun 2023 ke tahun 2024 diproyeksikan tidak terlalu tinggi karena masih dalam tahap pemulihan perekonomian menuju kondisi normal. Pada tahun 2024 diperkirakan aktivitas perekonomian sudah mulai normal, sehingga daya beli atau indeks pengeluaran yang merupakan komponen penyusun IPM diperkirakan sudah meningkat dan dapat tumbuh siginifikan. Dari tabel diatas nilai IPM tahun 2023 (70,57) sudah melampaui target pada tahun 2023 (69,12-69,59) hal ini menunjukan dengan meningkatnya IPM, diindikasikan kualitas pendidikan meningkat, kesehtan yang lebih baik, usia yang lebih panjang sehingga dapat mendorong kesuksesan program pengendalian penduduk.

Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, maka diperkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran akan tetap tumbuh positif. Selain itu, keberhasilan penanganan pasca pandemi Covid-19 akan meningkatkan mobilitas masyarakat ke tempat kerja sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran khususnya sektor pariwisata.

Realisasi TPT tahun 2023 sebesar (1,52) sudah jauh lebih rendah dari target pada dokumen perencanaan sebesar (4,90-4,25), hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Pangandaran cukup banyak angkatan tenagakerja yang terserap pada pasar kerja. Realisasi diperkirakan akan terus menurun sejalan dengan meningkatnya perekonomian dan kepercayaan investor untuk berinventasi di Kabupaten Pangandaran. Hal ini akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja yang akan berpengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pangandaran. Penurunan TPT akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pengeluaran yang merupakan komponen garis kemiskinan. Hal ini akan mendorong penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Pangandaran.

6.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus dipantau dalam rangka memenuhi penilaian kinerja Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator kinerja tersebut dicapai dengan upaya dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Pangandaran baik yang dapat dihitung secara langsung maupun tidak langsung. Masing-masing perangkat daerah memiliki peran yang berbeda terhadap capaian indikator kinerja dari setiap misi pembangunan Kabupaten Pangandaran.

Capaian target Indikator Kinerja Utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Peningkatan upaya pemulihan ekonomi pasca penanganan pandemi Covid-19, mempengaruhi kinerja pembangunan di Kabupaten Pangandaran, sehingga Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangandaran tahun 2024 dan 2025 mengalami penyesuaian dengan merujuk pada RPJMD Tahun 2021-2026, yang dirangkum pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. 2 Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	63,00
2	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	Angka	0,2814
3	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	%	87,5

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
4	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7696
5	Persentase pemenuhan kriteria GSTC di destinasi pariwisata (Persen)	%	50
6	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rp.	720.000
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,06-70,53
8	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,10-90,15
9	Indeks Kesehatan	Indeks	81,01-81,40
10	Indeks Pendidikan	Indeks	60,51-60,70
11	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	19,95
12	Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapat penghargaan	Jumlah	120
13	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	%	0,61-0,58
14	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	74,60
15	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,91-6,20
16	Persentase Penduduk Miskin	%	5,18-5,90
17	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	Rupiah	5.310
18	Persentase Realisasi Nilai Investasi	%	7,98
19	Rasio Kewirausahaan	Rasio	4,30
20	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84,0
21	Persentase Rumah Layak Huni	%	74
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	4,70-3,75
23	Persentase PPKS yang Mandiri	%	67
24	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74-78
25	Nilai SAKIP	Nilai	76,25-81,00
26	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
27	Indeks SPBE	Indeks	3,2
28	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	74
29	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	52,92
30	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,96-3,05
31	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	79,53
32	Indeks Konektivitas Wilayah	%	1.846
33	Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur	%	51,47
34	Indeks Risiko Bencana	Indeks	137
35	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	137,84
36	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,20

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

6.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK)

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dan wakil bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program *(outcomes)* terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Untuk mencapai indikator utama bupati tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat *outcomes* yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran *(outputs)* yang dilaksanakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output),* hasil (*outcome),* dan dampak (*impact).* Dampak (*impact)* adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* beberapa program. IKK Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2024 merupakan bagian dari capaian pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026.

Tabel 6. 3 Target Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024-2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target	
				2024	2025
2.2	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
	Pertumbuhan PDRB	%	5,26	5,51-5,90	5,91-6,20
	Indeks Gini	Nilai	0,323	0,326-0,318	0,318-0,310
	Tingkat Kemiskinan	%	8,98	5,90-6,40	5,18-5,90
	Laju Inflasi	%	2,84	0,69	0,56
	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	70,57	69,59-70,06	70,06-70,53
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	80,15	65,60	66,45
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,52	4,80-4,00	4,70-3,75
	Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	Event	10	8	8
2.3	PELAYANAN UMUM				
2.3.1	Pelayanan Umum Wajib Dasar				
2.3.1.1	Pendidikan				
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	Angka	99,72	98,00	98,50
	Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	Angka	102,82	98,70	98,82
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Angka	97,87	94,00	95,00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Angka	88,6	70,50	71,00
	Jumlah Guru Berijazah S1/DIV	Orang	4.188	3,91	3,975

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target	
				2024	2025
2.3.1.2	Kesehatan				
	Prevalensi Balita Stunting	%	1,93	4,4%	4,1%
	Angka Harapan Hidup	Angka	72,17	72,52	72,80
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi	%	100*	100%	100%
	Dokter Umum	Orang	89	75	82
	Dokter Gigi	Orang	23	17	19
	Bidan	Orang	437	527	580
	Ners	Orang	569	284	312
	Tenaga Gizi	Orang	31	20	22
	Apoteker	Orang	27	45	50
	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	%	100%	100%	100%
2.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	72,13%	71,57%	72,57
	Persentase penduduk berakses air minum	%	86,47%	74%	75%
	Persentase Jalan Baru yang Terbangun	%	12,09%	84,69%	91,58
	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	80,35%	87.5	89.5
	Persentase Sarana Pemerintahan yang Terbangun	%	27,82%	57%	71%
	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	%	42,52%	45,04%	47,54%
2.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target	
				2024	2025
	Persentase Infrastruktur Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik	%	57,50%	62%	65%
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%		25,89%	25,64%
2.3.1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
	Kejadian Kebakaran Kabupaten Pangandaran	Kali	90	9	8
	Jumlah Pelanggaran K3 yang Dilaporkan Masyarakat dan Teridentifikasi oleh Satpol PP	Kali	82	11	12
2.3.1.6	Sosial				
	Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	%	8%	8%	8%
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	87,41%	100%	100%
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100%	99%	99,50%
2.3.2	Layanan Urusan Wajib Non-Dasar				
2.3.2.1	Tenaga Kerja				
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	9,25	75	80
	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	73,38	80	85
	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	50	25,89	26,29

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target	
				2024	2025
2.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	90,04	90,07	90,12
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	76,53	74,59	74,60
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	24,89*	25,89	26,29
2.3.2.3	Pangan				
	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	83,57	74,59	74,60
	Skor PPH Konsumsi	Skor	94,99	25,89	26,29
2.3.2.4	Pertanahan				
	Persentase Izin Lokasi dan/atau izin Penetapan Lokasi yang diterbitkan	%	0	100	100
	Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah hak dan/atau tanah Garapan Yang Diselesaikan	%	100	100	100
	Persentase Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan	%	0	100	100
	Cakupan Penggunaan Tanah Dalam Satu Daerah Kabupaten Pangandaran	%	5%	100	100
2.3.2.5	Lingkungan Hidup				
	Volume sampah yang terkelola	M^3	59.155	17.082,265	17.423,91
	Persentase Penanganan sampah	%	30,79%	27,90%	29,50%
	Indeks Kualitas Air	Nilai	50	51,85	51,9
	Indeks Kualitas Udara	Nilai	90,96	79,5	80

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target	
				2024	2025
	Indeks Kualitas Vegetasi/IKTL	Nilai	39,069	65,25	65,25
2.3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	%	99,71	100	100
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	99,61	100	100
	Cakupan Perekaman KTP Elektronik	%	98,58	100	100
	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	57,29	100	100
	Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	%	71,83	82	84
	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	%	68,03	100	100
	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	%	99,68*	100	100
	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	100	57	78
2.3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	%	100%	100%	100%
2.3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	TFR /Total Fertility Rate	%	1,7	2,18	2,16
	CPR /Contaceptive Prevalenci Rate	%	71,89	62,43	62,86
	Unmet Need	%	14,69	14,93	14,52
	LPP /Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,67	0,60-0,57	0,61-0,58
	Ratio Akseptor KB	%	72,74	62,43	62,86
	ASFR /Age Spesific Fertility Rate	%	9	31	30

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target	
				2024	2025
2.3.2.9	Perhubungan				
	Rasio Sarana Prasarana Perhubungan Yang Ada Dalam Kondisi Baik	%	96,54	93,31	100
	Persentase kecamatan yang terlayani angkutan umum	%	80	88,89	100
2.3.2.10	Komunikasi dan Informatika				
	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	%	50	85	88
	Persentase Penyebaran Informasi Publik	%	40	65	70
2.3.2.11	Usaha Mikro Kecil Menengah				
	Persentase koperasi aktif	%	100	89,41	89,53
	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	100	100	100
	Persentase pertumbuhan usaha mikro	%	100	15	15
2.3.2.12	Penanaman Modal				
	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	67.564	201	221
2.3.2.14	Statistik				
	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	%	20*	35	40
2.3.2.15	Persandian				
	Persentase Pengamanan Informasi Daerah	%	59	70	75
2.3.2.16	Kebudayaan				
	Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	Event	10	8	8
	Jumlah Objek diduga Cagar budaya yang dilestarikan	Objek	40	3	3

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target	
				2024	2025
2.3.2.17	Perpustakaan				
	Persentase Pengingkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan	%	N/A*	10	10
	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	Orang	26.425	27.720	33.84
	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Eksemplar	25.031	12.184	12.879
	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	Orang	695	386	427
	Jumlah masyarakat terlibat dalam kegiatan sosialisasi/promosi per tahun	Orang	11.263	9.278	10.778
	Jumlah total perpustakaan	Perpus	695	648	654
	Jumlah Perpustakaan yang telah memiliki SNP di suatu wilayah	Perpus	402	288	318
	Jumlah Anggota Perpustakaan	Orang	8,082	4.533	5.193
2.3.2.18	Kearsipan				
	Kebijakan Kearsipan	%	N/A*	5,73	5.734
	Pembinaan Kearsipan	%	N/A*	13,16	13.166
	Pengolahan Arsip Inaktif Dengan Retensi Sekurang-Kurangnya 10 Tahun	%	4*	4	4
	Pengelolaan Arsip Statis	%	14,80*	14,88	14,88
	SDM Kearsipan	%	13,74*	13,74	13,74
	Persentase LAKE Kabupaten/Kota	%	66,13*	80,22	89,29

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target	
				2024	2025
2.3.3	Urusan Pilihan				
2.3.3.1	Kelautan dan Perikanan				
	Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	0,54	0,7	0,8
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	0,85	0,5	0,5
2.3.3.2	Pariwisata				
	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	-9,09	7,5	7,5
	Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	Rp.	28.936.290.000	22.000.000.000	25.000.000.000
	Persentase Tingkat hunian Akomodasi	%	12,41	9	10
	Pesentase Pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	%	11,58	30	35
2.3.3.3	Pertanian				
	PDRB sektor Pertanian	Rp.	3.123.014.436.522	1.833.461.950.000	1.872.619.630.000
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	21,9	15	15
	Jumlah kontribusi PDRB konstan dari sektor Pertanian. Kehutanan dan Perikanan	%	22,44	20	20
	Jumlah kontribusi PDRB harga berlaku dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	26,73	25	25
2.3.3.4	Perdagangan				
	Nilai ekspor daerah	Milyar	124,68	127,20	137,19
	Persentase peningkatan nilai ekspor perdagangan	%	0,13	7,29	7,86

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target	
				2024	2025
	Nilai PDRB sektor perdagangan	Milyar	2.792,7	2.585,97	2.717,57
2.3.3.5	Perindustrian				
	Jumlah Industri Baru	Industri	29.806	25	25
	Persentase Pertumbuhan Industri	%	745,34	0,007	0,007
	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	16,78	0,064	0,067
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	4,88	4,85	4,90
	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp.	710.43 Milyar	617.201.920.102	647.462.862.646
2.3.3.6	Transmigrasi				
	Persentase Transmigran Swakarsa	%	-	5	5
2.3.4	Layanan Pendukung, Penunjang, Pengawasan Urusan Pemerintahan				
2.3.4.1	Perencanaan				
	Nilai SAKIP Unsur Perencanaan	%	20,09	22,85	23,00
	Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Daerah yang Berkualitas	%	100%	98,00	99,00
	Nilai SAKIP Bappeda	%	BB (70,90)	AA (90,05)	AA (90,01)
	Persentase Nilai SAKIP PD Unsur Perencanaan di atas 26%	%	94,44%	74,29	71,14
2.3.4.1	Keuangan				
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WDP*	WTP	WTP
	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	2,14	1,55	1,46

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target	
				2024	2025
	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	25,90*	21,55	21,75
	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	12,24*	11,74	11,82
	Perbandingan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (BL)	Rasio	70:30*	60:40	60:40:00
	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Rasio	12,55	12,5	13,7
2.3.4.2	Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan				
	Persentase ASN yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Teknis	%	24*	20	27%
	Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Manajerial	%	20%	40%	48%
2.3.4.3	Penelitian dan Pengembangan				
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	66,67	65-85	65-85%
2.3.4.4	Pengawasan				
	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal	Nilai	17,47	18,25	19,25
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	Nilai	71,05	74,50	78,50
	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level	3	3	3
2.3.4.5	Pemerintahan Umum				
	Persentase masyarakat yang memahami Kesatuan Bangsa	%	74*	82	83
	Persentase masyarakat yang memahami demokrasi	%	50	92	93
	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	B	A	A

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target	
				2024	2025
2.3.4.6	Sekretariat Daerah				
	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	BB (73,72)	BB	BB
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,07	2,86 – 2,95	2,96 – 3,05
	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dengan Peraturan Perundang-undangan	%	84,11	90	95
2.3.4.7	Sekretariat Dewan				
	Persentase Kenaikan Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	%	86,73	66	70
2.3.4.1	Penanggulangan Bencana				
	Persentase/Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	%	100	71,6	72,8
	Persentase/Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	23*	35	40%
	Persentase/Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100*	100	100
2.4	DAYA SAING DAERAH				
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah				
	Pengeluaran Konsumsi per Kapita	Rp.	720.756	9.931,14	10.104.095
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur				
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Arus	47.189	40	45
	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Izin	13	20	25

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target	
				2024	2025
2.4.3	Fokus Iklim Investasi				
	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	67.564	201	221
	PMDN/PMA (Nilai Investasi)	Milyar Rp.	1.539,2	428,71	471,58
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia				
	Lulusan S1	Orang	11.517	370	420
	Lulusan S2	Orang	697	25	30
2.4.5	Fokus Daya Saing Pariwisata				
	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	3.548.354	4.628.571	5.154.286
	PAD sektor pariwisata	Milyar	28,936	22,5	25 M

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

Tabel 6. 4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kabupaten Pangandaran Tahun 2023, 2024, 2025

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
		2023	2024	2025		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1	Persentase Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Pandemi Persentase Layanan Pendidikan Non Formal Dan Informal Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Persentase Tingkat Budi Pekerti Peserta Didik	90% 82% 100% 84%	93 % 84 % 100 % 90 %	96% 86% 100% 93%	Disdikpora	
2	Persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Standar Isi	52%	54%	56%	Disdikpora	
3	Persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	54%	56%	55%	Disdikpora	
4	Persentase Layanan Literasi Siswa	62%	63%	64%	Disdikpora	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1	Persentase pembinaan wirausaha muda dan Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan	60%	80%	80%	Disdikpora	
2	Persentase Prestasi Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	60%	80%	80%	Disdikpora	
3	Persentase Pemuda Yang aktif dalam Kepramukaan	-	80%	80%	Disdikpora	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi	90%	90 %	90%	Dinas Kesehatan	
2	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	
3	Persentase farmasi, alat kesehatan yang terpenuhi	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	
4	Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan (Puskesmas Padaherang)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan (Puskesmas Sindangwangi)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan (Puskesmas Mangunjaya)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan (Puskesmas Kalipucang)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan (Puskesmas Pangandaran)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan (Puskesmas Sidamulih)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan (Puskesmas Cikembulan)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan (Puskesmas Parigi)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan (Puskesmas Selasari)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan (Puskesmas Cijulang)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan (Puskesmas Cimerak)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan (Puskesmas Legokjawa)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan (Puskesmas Cigugur)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan (Puskesmas Langkaplancar)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan (Puskesmas Jadikarya)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan (RSUD Pandega)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	70,57%	71,57%	72,57%	DPUTRPRKP
2	Cakupan Layanan Teknis Air Minum Dan Air Bersih	73%	74%	75%	DPUTRPRKP
3	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Persampahan	-	85%	100%	DPUTRPRKP
4	Cakupan ketersediaan layanan air limbah	60%	60,50%	61,00%	DPUTRPRKP
5	Persentase Drainase Dan Gorong - Gorong Kabupaten Dalam Kondisi Baik	-	59%	62%	DPUTRPRKP
6	Persentase Sarana Pemerintahan Yang Terbangun	27,82%	57,10%	71,40%	DPUTRPRKP
7	Persentase Infrastruktur Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik	59%	62%	65%	
8	Persentase Jalan Baru Yang Terbangun Presentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	12,09% 80,35%	84,69 % 87,50 %	91,58% 89,50%	DPUTRPRKP
9	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	42,52%	45,04%	47,54%	DPUTRPRKP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
1	Jumlah Rumah Korban Bencana yang ditangani	0	50 Rumah	50 Rumah	DPUTRPRKP	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	5,23%	25,89%	25,64%	DPUTRPRKP	
3	persentase PSU yang ditingkatkan	0	12%	15%	DPUTRPRKP	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Persentase capaian SPM trantibum	100 % 58 %	100 % 58 %	100% 61%	Satpol PP	
2	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran	100%	100%	100%	Satpol PP	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Persentase Penanggulangan Bencana	25%	100%	100%	BPBD	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
1	Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	60% 45%	90 % 70 %	95% 75%	Dinsos PMD	
2	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkat Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	10%	10%	10%	Dinsos PMD	
3	Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	100% 8%	100 % 8 %	100% 8 %	Dinsos PMD	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
4	Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	100%	100%	100%	Dinsos PMD	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1	Presentase penataan desa	0	60%	65%	Dinsos PMD	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
2	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	0	12%	16%	Dinsos PMD	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
3	Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	55%	60%	70%	Dinsos PMD	
4	Presentase Lembaga Kemasyarakat Desa yang aktif	100%	100%	100%	Dinsos PMD	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
1	Persentase Dokumen RTK yang Diselesaikan	69,91%	80%	90%	Disnaker	
2	Persentase Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja Meningkat	56,86%	70%	80%	Disnaker	
3	Persentase Tenaga Kerja yang diserap	60,00%	70%	75%	Disnaker	
4	Persentase Kasus Ketenagakerjaan pada Perusahaan Menurun	60,00%	90%	90%	Disnaker	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
1	Persentase Rencana Kawasan Transmigrasi baru	0	50%	75%	Disnaker	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
2	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibangun	0	1 Lokasi	1 Lokasi	Disnaker	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
3	Persentase Laju Kemandirian Transmigran	0	50%	60%	Disnaker	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Persentase kelembagaan PUG aktif Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	93,85% 13,14%	94,62 % 14,98 %	95,38% 16,79%	DKBP3A	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
2	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	84%	85%	88%	DKBP3A	
3	Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)	40%	60%	80%	DKBP3A	
4	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid	0	70%	75%	DKBP3A	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
5	Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak Persentase pemenuhan kelompok hak anak	Madya (600-700) Nilai 51,16%	Madya (600-700) Nilai 100 %	Nindya (700-800) Nilai 100%	DKBP3A	
6	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	12%	14%	12%	DKBP3A	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA) Validitas data keluarga beresiko stunting	100 % 100 %	100 % 100 %	100% 100%	DKBP3A	
2	Prevalensi peserta KB aktif Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting	56,77% 75%	75,74 % 75 %	75,79 % 75%	DKBP3A	
3	Persentase peningkatan pemberdayaan Keluarga Sejahtera Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting bagi calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil dan Ibu pasca persalinan	77,02% 75%	78,02 % 75 %	79,02% 75%	DKBP3A	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
1	Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2,35%	20%	25%	DLHK	
2	Persentase Kualitas Air dan Udara yang memenuhi Baku Mutu	26,45%	29,50%	30,50%	DLHK	
3	Persentase Tutupan Lahan yang dikelola	0,70%	0,80%	0,90%	DLHK	
4	Persentase Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dibina	36,75%	47%	49%	DLHK	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
5	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan PPLH PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemda	72,73%	72%	71%	DLHK	
6	Persentase MHA yang Terdaftar dan terdata	0	25%	30%	DLHK	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
7	Indeks Perilaku Peduli Lingkungan	-	36%	40%	DLHK	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
8	Persentase Penerapan Adiwiyata Di Lingkungan Pemerintah Daerah	0	20%	23%	DLHK	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
9	Persentase Kasus Yang Ditangani Pemda	10%	70%	73,33%	DLHK	
10	Cakupan layanan persampahan	30,79%	27,90%	29,50%	DLHK	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	100%	100%	100%	Disdukcapil	
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	Disdukcapil	
3	Persentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik	100%	100%	100%	Disdukcapil	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
1	Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	14% 10,20% 3,5% 60%	25 % 15 % 10 % 65 %	25% 15% 15% 70%	Dinas Perhubungan	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	60% 64%	65 % 65 %	70% 70%	Diskominfo	
2	Tingkat kematangan tata kelola SPBE	3,1 Indeks	3,3 Indeks	3.4 Indeks	Diskominfo	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
1	Persentase publikasi data statistik sektoral	60%	65%	70%	Diskominfo	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
1	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	20%	30%	35%	Diskominfo	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
1	Persentase Koperasi yang patuh	50,29%	51,35%	52,00%	Diskopdagin	
2	Persentase Koperasi yang meningkat status kesehatannya	0	60%	65%	Diskopdagin	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
3	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Koperasi bersertifikat	100%	40%	45%	Diskopdagin	
4	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha	0	5%	5%	Diskopdagin	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
5	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya Persentase pertumbuhan wirausaha baru	0	0,1 % 15 %	0,1% 15%	Diskopdagin	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
1	Persentase Peningkatan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	0	1,40%	1,50%	Diskopdagin	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
2	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	25%	30,77%	34,62%	Diskopdagin	
3	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	66,67%	72,22%	77,80%	Diskopdagin	
4	Persentase peningkatan nilai ekspor	0	15%	17%	Diskopdagin	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
5	Persentase UTTP yang tertib ukur	52,56%	53,85%	55,12%	Diskopdagin	
6	Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	1%	2%	2,50%	Diskopdagin	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
1	Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	60%	75%	85%	Diskopdagin	
2	Persentase Industri Kecil dan menengah yang berizin	0	100%	100%	Diskopdagin	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
3	Persentase Jumlah Data Informasi Industri Kabupaten Pangandaran yang diiformasikan	4%	30%	40%	Diskopdagin	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
1	Cakupan Pertumbuhan Jumlah Investor	0	201 Investor	221 Investor	DPMPTSP	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
2	Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Terpublikasi	0	10%	10%	DPMPTSP	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
3	Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	80%	85%	90%	DPMPTSP	
4	Cakupan Kepatuhan Pendataan Nilai Investasi PMDN & PMA Terhadap Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	1781 Milyar Rupiah*	428,71 Milyar Rupiah	471,58 Milyar Rupiah	DPMPTSP	
5	Cakupan Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0	10%	10%	DPMPTSP	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	19,16 Indeks	19,61 Indeks	19,95 Indeks	Dispusip	
2	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan	10 %	10%	10%	Dispusip	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
1	Nilai LAKE Kabupaten/Kota	1.423 Nilai	(A) 3353 Nilai	(A) 3732 Nilai	Dispusip	
2	Persentase LAKE Kabupaten/Kota	0	80,22%	89,29%	Dispusip	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
1	Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	-	8%	8%	DKPKP	
2	Angka Kecukupan Energi Angka Kecukupan Protein	2259 Angka 67,4 Angka	2100 Angka 57 Angka	2100 Angka 57 Angka	DKPKP	
3	Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)	1,10%	3%	2%	DKPKP	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
4	Persentase pangan segar aman	69.80%	65%	70%	DKPKP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,02%	0,30%	0,30%	DKPKP
2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0,10%	0,20%	0,20%	DKPKP
3	Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan	5%	5%	5%	DKPKP
4	Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil perikanan	33,00%	90%	90%	DKPKP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
1	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	14%	16%	18%	Disparbud
2	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	7%	9%	11%	Disparbud
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
1	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	13,62%	14%	16%	Disparbud
2	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan	28,81%	35%	40%	Disparbud
3	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi	17,65%	14%	16%	Disparbud
4	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi keratif yang berdaya saing	11,58%	25%	30%	Disparbud
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Persentase Peningkatan Produksi Peternakan Indeks Pertanaman	115,26% -10,87% -8,21% 117,13 Indeks	1,5 % 3 % 1,6 % 200 Indeks	2,0% 3% 2% 200 Indeks	Dinas Pertanian
2	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	-33,87%	1,50%	2%	Dinas Pertanian
3	Persentase Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan Yang ASUH & Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	20,11%	10%	10%	Dinas Pertanian
4	Persentase Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	17,54%	70%	72%	Dinas Pertanian

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
5	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	0	100%	100%	Dinas Pertanian	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
6	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	12,65%	10%	10%	Dinas Pertanian	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
1	Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Diselesaikan	0	100%	100%	Sekretariat Daerah	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
2	Persentase Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan	0	100%	100%	Sekretariat Daerah	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
3	Cakupan Penggunaan Tanah Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	5%	100%	100%	Sekretariat Daerah	
	SEKRETARIAT DAERAH					
1	Persentase Pelayanan Administrasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan Kerjasama yang dirumuskan Persentase Produk Hukum Daerah yang Diharmonisasi	59,58% 59,58% 59,58%	90 % 90 % 92 %	90% 95% 95%	Sekretariat Daerah	
2	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Pengendalian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	62,37% 76,73%	100 % 100%	100% 100%	Sekretariat Daerah	
	SEKRETARIAT DPRD					
1	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang telaksana dengan baik	42,38%	66%	70%	Sekretariat DPRD	
	PERENCANAAN					
1	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase realisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	100% 87,79%	100 % 60 %	100% 61%	Bappeda	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	Prosentase perangkat daerah yang memiliki keselarasan program RPJMD dan RKPD Prosentase perangkat daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran	95% 100%	96 % 100 %	97% 100%	Bappeda
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1	Persentase Hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	45%	50%	55%	Bappeda
	KEUANGAN				
1	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan	100% 100%	100 % 100 %	100% 100%	BKAD
2	Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel oleh Perangkat Daerah	88,75%	100%	100%	BKAD
	KEUANGAN				
1	Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainya Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	90,88% 82,40% 90,12%	100 % 100 % 100 %	100% 100% 100%	Bapenda
	KEPEGAWAIAN				
1	Persentase kegiatan layanan kepegawaian ASN yang terlaksana	100%	100%	100%	BKPSDM
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
1	Persentase Aparatur Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	89%	100%	BKPSDM
	INSPEKTORAT DAERAH				
1	Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	64,82 Nilai 3,36% Nilai	72,25 Nilai 3,15 Nilai	76,25Nilai 3,25 Nilai	Inspektorat
2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas	56,48 Nilai 4 Unit Kerja	72,00 Nilai 4 Unit Kerja	75,00Nilai 4Unit Kerja	Inspektorat

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
	KECAMATAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	100%	100%	Kec. Parigi	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	100%	100%	Kec. Parigi	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
3	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	-	100%	100%	Kec. Parigi	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100%	100%	Kec. Parigi	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	99%	100%	100%	Kec. Parigi	
	KECAMATAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	Kec. Cijulang	
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	100%	100%	Kec. Cijulang	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
3	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	100%	100%	Kec. Cijulang	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100%	100%	Kec. Cijulang	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	Kec. Cijulang	
	KECAMATAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	100%	100%	Kec. Pangandaran	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	100%	100%	Kec. Pangandaran	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
3	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	-	100%	100%	Kec. Pangandaran	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100%	100%	Kec. Pangandaran	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	Kec. Pangandaran	
	KECAMATAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	100%	100%	Kec. Mangunjaya	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	100%	100%	Kec. Mangunjaya	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
3	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	-	100%	100%	Kec. Mangunjaya	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100%	100%	Kec. Mangunjaya	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	Kec. Mangunjaya	
	KECAMATAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	100%	100%	Kec. Padaherang	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	100%	100%	Kec. Padaherang	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
3	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	-	100%	100%	Kec. Padaherang	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100%	100%	Kec. Padaherang	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	Kec. Padaherang	
	KECAMATAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	100%	100%	Kec. Cigugur	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	100%	100%	Kec. Cigugur	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
3	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	-	100%	100%	Kec. Cigugur	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100%	100%	Kec. Cigugur	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19,55%	100%	100%	Kec. Cigugur	
	KECAMATAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	100%	100%	Kec. Sidamulih	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	100%	100%	Kec. Sidamulih	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
3	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	-	100%	100%	Kec. Sidamulih	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100%	100%	Kec. Sidamulih	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	Kec. Sidamulih	
	KECAMATAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	100%	100%	Kec. Langkaplancar	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	100%	100%	Kec. Langkaplancar	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
3	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	-	100%	100%	Kec. Langkaplancar	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100%	100%	Kec. Langkaplancar	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	Kec. Langkaplancar	
	KECAMATAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2%	100%	100%	Kec. Kalipucang	
2	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	100%	100%	Kec. Kalipucang	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
3	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	-	100%	100%	Kec. Kalipucang	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100%	100%	Kec. Kalipucang	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	87,69%	100%	100%	Kec. Kalipucang	
	KECAMATAN					

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	100%	100%	Kec. Cimerak	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	100%	100%	Kec. Cimerak	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
3	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	-	100%	100%	Kec. Cimerak	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100%	100%	Kec. Cimerak	Program/Kegiatan tidak dilaksanakan pada Tahun 2023
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95,18%	100%	100%	Kec. Cimerak	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1	Persentase Masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan	59,70%	73%	75%	Bakesbangpol	
2	Presentase Masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri	50%	66%	68%	Bakesbangpol	
3	Persentase Masyarakat yang memahami tentang pemberdayaan dan pengawasan ormas	50%	66%	68%	Bakesbangpol	
4	Persentase masyarakat yang memahami tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	59,70%	81%	84%	Bakesbangpol	
5	Persentase pelaksanaan koordinasi kewaspadaan daerah	72%	80%	85%	Bakesbangpol	

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 & Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2023 TW IV

BAB VII
PENUTUP

RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran
2025

@pangandaranbappeda
https://bappeda.pangandarankab.go.id

Objek Wisata Citumang

BAB VII
PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai implementasi pelaksanaan tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045. Selanjutnya, dokumen RKPD dipergunakan sebagai pedoman:

a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025;
b. Penyusunan kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025;
c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025;
d. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
e. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkatan pemerintah.

RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 diharapkan mampu mewujudkan akselarasi pencapaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 dijabarkan melalui tema pembangunan daerah **“Peningkatan Daya Saing Daerah”** yang ditetapkan sebagai upaya untuk meningkatkan eksistensi, kemandirian, dan persaingan Pemerintah Kabupaten Pangandaran di tingkat provinsi dan nasional dalam berbagai bidang khususnya pada aspek daya saing daerah. Kebijakan tersebut didukung dari beberapa potensi dan capaian kinerja pembangunan daerah dibeberapa tahun terakhir.

RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 disusun selain untuk menjamin konsistensi dan keselarasan dengan kebijakan perencanaan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, juga menyelaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Pangandaran di tahun 2025, apabila terjadi adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RKPD perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana.

BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA

Pemerintah
Kabupaten Pangandaran

LAMPIRAN I

EVALUASI HASIL TERHADAP RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023

RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran
2025

@pangandaranbappeda

https://bappeda.pangandarankab.go.id

LAMPIRAN I

EVALUASI HASIL TERHADAP RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
1	2		3		4		5		6		7 = 6/5*100		8 = 4+6		9 = 8/3*100		10	11
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				2.582.041.722.016		397.558.143.467		455.717.417.224		359.565.181.619		78,90		757.123.325.086		29,32		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				2.424.776.539.149		389.064.011.217		433.860.313.725		348.156.485.937		80,25		737.220.497.154		30,40	Disdikpora	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Persen	92,00	1.773.382.751.257	92,00	268.416.858.442	92,00	294.970.229.064	92,00	251.855.714.741	100,00	85,38	92,00	520.272.573.183	100,00	29,34	Disdikpora	
	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persen	92,00		92,00		92,00		92,00		100,00							
	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	93,00		93,00		93,00		93,00		100,00							
	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	82,00		82,00		82,00		82,00		100,00							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10,00	6.911.146.910	91,00	431.999.000	91,00	706.528.091	91,00	187.692.190	100,00	26,57	91,00	619.691.190	910,00	8,97	Disdikpora	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10,00				10,00		8,00		80,00							
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3,00				3,00		3,00		100,00							
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00				1,00		-		-							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6,00				6,00		6,00		100,00							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	36,00	2.533.795.410	2,00	36.900.000	6,00	52.997.451	6,00	44.962.590	100,00	84,84	8,00	81.862.590	22,22	3,23	Disdikpora	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	50,00	80.000.000	5,00	5.848.000	10,00	1.306.760	2,00	1.306.600	20,00	99,99	7,00	7.154.600	14,00	8,94	Disdikpora	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	50,00	80.000.000	4,00	3.273.000	10,00	1.223.880	2,00	1.223.000	20,00	99,93	6,00	4.496.000	12,00	5,62	Disdikpora	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18,00	4.196.013.000	3,00	379.438.000	3,00	651.000.000	3,00	140.200.000	100,00	21,54	6,00	519.638.000	33,33	12,38	Disdikpora	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6,00	21.338.500	1,00	6.540.000	-	-	-	-			1,00	6.540.000	16,67	30,65	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	60,00	76,57						
										Predikat Kinerja	(R)	(T)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Persen	100,00	1.583.436.856.121	100,00	248.217.376.552	100,00	279.689.373.332	100,00	237.671.949.993	100,00	84,98	100,00	485.889.326.545	100,00	30,69	Disdikpora	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	16.584,00	1.582.673.256.121	2.692,00	248.171.772.552	2.800,00	279.646.373.332	2.692,00	237.636.949.993	96,14	84,98	5.384,00	485.808.722.545	32,47	30,70	Disdikpora	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	25,00	136.900.000	-	-	-	-	-	-			-	#VALUE!	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	18,00	454.200.000	2,00	31.800.000	3,00	42.000.000	2,00	34.000.000	66,67	80,95	4,00	65.800.000	22,22	14,49	Disdikpora	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanan Akuntansi SKPD	Dokumen	15,00	78.000.000	1,00	4.700.000	-	-	-	-			1,00	4.700.000	6,67	6,03	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5,00	28.000.000	1,00	4.554.000	1,00	1.000.000	1,00	1.000.000	100,00	100,00	2,00	5.554.000	40,00	19,84	Disdikpora	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	Dokumen	5,00	33.000.000	1,00	2.050.000	-	-	-	-			1,00	2.050.000	20,00	6,21	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	15,00	25.500.000	3,00	2.500.000	-	-	-	-			3,00	2.500.000	20,00	9,80	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5,00	8.000.000	-	-	-	-	-	-			-	#VALUE!	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	87,60	88,64						
										Predikat Kinerja	(T)	(T)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**Jenis**	**1.932,00**	**2.859.400.000**	**322,00**	**256.114.720**	**322,00**	**229.612.800**	**322,00**	**169.000.000**	**100,00**	**73,60**	**644,00**	**425.114.720**	**33,33**	**14,87**	Disdikpora	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	Dokumen	15,00	380.000.000	2,00	52.511.720	-	-	-	-			2,00	52.511.720	13,33	13,82	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	Dokumen	5,00	463.400.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	70,00	55.000.000	12,00	1.403.000	-	-	-	-			12,00	1.403.000	17,14	2,55	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	5,00	11.000.000	1,00	800.000	-	-	-	-			1,00	800.000	20,00	7,27	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	Laporan	220,00	15.000.000	12,00	1.000.000	-	-	-	-			12,00	1.000.000	5,45	6,67	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	36,00	1.805.000.000	1,00	200.400.000	1,00	229.612.800	1,00	169.000.000	100,00	73,60	2,00	369.400.000	5,56	20,47	Disdikpora	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1.600,00	130.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	73,60						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**Persen**	**96,00**	**3.688.120.500**	**96,00**	**177.177.742**	**96,00**	**214.522.120**	**96,00**	**198.187.120**	**100,00**	**92,39**	**96,00**	**375.364.862**	**100,00**	**10,18**	Disdikpora	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	10,00	40.000.000	1,00	1.956.042	-	-	-	-			1,00	1.956.042	10,00	4,89	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stel	388,00	566.000.000	-	-	3,00	31.320.000	3,00	31.240.000	100,00	99,74	3,00	31.240.000	0,77	5,52	Disdikpora	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	14,00	255.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	84,00	809.680.000	3,00	61.200.000	3,00	69.600.000	3,00	56.000.000	100,00	80,46	6,00	117.200.000	7,14	14,47	Disdikpora	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	15,00	705.000.000	3,00	97.491.750	-	-	-	-			3,00	97.491.750	20,00	13,83	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Kegiatan Pegawai Pensiun yang dipulangkan	Pegawai	800,00	105.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	500,00	235.140.000	-	-	100,00	113.602.120	100,00	110.947.120	100,00	97,66	100,00	110.947.120	20,00	47,18	Disdikpora	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	500,00	339.734.250	100,00	279.750	-	-	-	-			100,00	279.750	20,00	0,08	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	500,00	632.566.250	100,00	16.250.200	-	-	-	-			100,00	16.250.200	20,00	2,57	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	92,62						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**Persen**	**96,00**	**6.009.043.390**	**96,00**	**416.213.768**	**97,00**	**705.804.814**	**97,00**	**654.579.349**	**100,00**	**92,74**	**96,50**	**1.070.793.117**	**100,52**	**17,82**	Disdikpora	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	60,00	119.627.000	10,00	12.645.340	10,00	19.999.854	10,00	19.985.000	100,00	99,93	20,00	32.630.340	33,33	27,28	Disdikpora	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10,00	1.240.085.027	2,00	124.218.630	2,00	209.739.740	2,00	191.665.520	100,00	91,38	4,00	315.884.150	40,00	25,47	Disdikpora	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20,00	164.824.292	4,00	10.636.057	4,00	12.105.420	2,00	5.799.000	50,00	47,90	6,00	16.435.057	30,00	9,97	Disdikpora	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8,00	834.845.321	2,00	121.886.000	2,00	98.676.600	2,00	89.477.000	100,00	90,68	4,00	211.363.000	50,00	25,32	Disdikpora	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	150,00	209.080.000	-	-	2,00	11.413.800	2,00	11.760.000	100,00	103,03	2,00	11.760.000	1,33	5,62	Disdikpora	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Paket	25,00	14.875.000	1,00	2.580.000	-	-	-	-			1,00	2.580.000	4,00	17,34	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5,00	254.265.750	1,00	24.331.000	1,00	30.635.000	1,00	30.978.500	100,00	101,12	2,00	55.309.500	40,00	21,75	Disdikpora	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Laporan	2.250,00	2.576.641.000	154,00	119.916.741	375,00	308.500.000	211,00	304.914.329	56,27	98,84	365,00	424.831.070	16,22	16,49	Disdikpora	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola	Dokumen	25,00	459.400.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5,00	135.400.000	-	-	1,00	14.734.400	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Kegiatan ini tidak terakomodir di DPA
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	75,78	79,11						
										Predikat Kinerja	(T)	(T)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**Persen**	**96,00**	**5.817.947.491**	**96,00**	**4.641.794.432**	**97,00**	**10.434.889.539**	**72,00**	**10.434.758.655**	**74,23**	**100,00**	**84,00**	**15.076.553.087**	**87,50**	**259,14**	Disdikpora	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	6,00	1.736.835.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang diadakan	Buah	1.015,00	907.750.000	-	28.145.250	-	-	-	-			-	28.145.250	-	3,10	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang diadakan	Buah	84,00	2.284.612.491	55,00	69.929.182	-	-	-	-			55,00	69.929.182	65,48	3,06	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	833.750.000	1,00	4.535.793.750	25,00	10.432.389.655	1,00	10.432.389.655	4,00	100,00	2,00	14.968.183.405	20,00	1.795,28	Disdikpora	Anggaran RKPD lebih besar dari anggaran Renstra dikarenakan renstra bersumber dari APBD sedangkan RKPD ada yang bersumber dari Banprov yang kemunculannya setelah renstra ditetapkan
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	55.000.000	2,00	7.926.250	2,00	2.499.884	2,00	2.369.000	100,00	94,76	4,00	10.295.250	40,00	18,72	Disdikpora	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	52,00	97,38						
										Predikat Kinerja	(R)	(ST)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**Persen**	**96,00**	**159.606.426.709**	**96,00**	**13.873.308.513**	**97,00**	**2.870.327.240**	**97,00**	**2.432.761.807**	**100,00**	**84,76**	**96,50**	**16.306.070.320**	**100,52**	**10,22**	Disdikpora	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5,00	88.750.000	1,00	4.679.750	1,00	2.440.000	1,00	4.320.000	100,00	177,05	2,00	8.999.750	40,00	10,14	Disdikpora	Anggaran DPA lebih besar dari RKPD karena kebutuhan anggaran DPA melebihi anggaran RKPD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	18,00	152.164.516.709	3,00	13.290.332.913	3,00	2.226.014.440	3,00	1.895.941.807	100,00	85,17	6,00	15.186.274.720	33,33	9,98	Disdikpora	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	10,00	221.960.000	2,00	7.778.350	-	-	-	-			2,00	7.778.350	20,00	3,50	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	7.131.200.000	1,00	570.517.500	1,00	641.872.800	1,00	532.500.000	100,00	82,96	2,00	1.103.017.500	40,00	15,47	Disdikpora	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	115,06						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**Persen**	**96,00**	**5.053.810.136**	**96,00**	**402.873.715**	**97,00**	**119.171.128**	**97,00**	**106.785.627**	**100,00**	**89,61**	**96,50**	**509.659.342**	**100,52**	**10,08**	Disdikpora	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	204,00	592.103.386	28,00	89.347.061	34,00	35.778.870	34,00	5.000.000	100,00	13,97	62,00	94.347.061	30,39	15,93	Disdikpora	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	170,00	264.500.000	27,00	45.653.790	34,00	6.199.050	30,00	25.418.419	88,24	410,04	57,00	71.072.209	33,53	26,87	Disdikpora	Anggaran DPA lebih besar dari RKPD karena kebutuhan anggaran DPA melebihi anggaran RKPD
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dikelola	Unit	40,00	26.000.000	3,00	4.500.000	-	-	-	-			3,00	4.500.000	7,50	17,31	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	Unit	120,00	432.743.750	-	-	20,00	5.250.000	7,00	4.950.000	35,00	94,29	7,00	4.950.000	5,83	1,14	Disdikpora	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Buah	1.600,00	2.502.000.000	-	-	320,00	8.100.000	3,00	7.690.000	0,94	94,94	3,00	7.690.000	0,19	0,31	Disdikpora	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	1.600,00	227.000.000	320,00	44.250.000	320,00	37.120.000	3,00	37.004.000	0,94	99,69	323,00	81.254.000	20,19	35,79	Disdikpora	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	24,00	612.963.000	1,00	199.312.000	4,00	6.850.000	1,00	6.850.000	25,00	100,00	2,00	206.162.000	8,33	33,63	Disdikpora	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Jenis	100,00	54.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Jenis	50,00	77.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas lokasi tanah yang dipelihara	ha	5,00	265.000.000	1,00	19.810.864	1,00	19.873.208	1,00	19.873.208	100,00	100,00	2,00	39.684.072	40,00	14,98	Disdikpora	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	50,02	130,42						
										Predikat Kinerja	(R)	(ST)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**96,78**	**80,58**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(T)**						
Program Pengelolaan Pendidikan	**Persentase Layanan Pendidikan Non Formal Dan Informal**	**Persen**	**80,00**	**575.849.787.892**	**80,00**	**109.523.027.775**	**82,00**	**130.943.168.473**	**82,00**	**91.810.011.808**	**100,00**	**70,11**	**81,00**	**201.333.039.583**	**101,25**	**34,96**	Disdikpora	
	Persentase Pemenuhan Spm Pendidikan	**Persen**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**	-			-	-	Disdikpora	
	Persentase Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Pandemi	**Persen**	**86,00**		**86,00**		**90,00**		**90,00**		**100,00**	-			-	-	Disdikpora	
	Persentase Pelaksanaan Sistem Pencapaian Mutu Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Pandemi	**Persen**	**84,00**		**84,00**		**87,00**		**87,00**		**100,00**	-			-	-	Disdikpora	
	Persentase Penerapan Pendidikan Berbasis Pariwisata	**Persen**	**86,00**		**86,00**		**90,00**		**90,00**		**100,00**	-			-	-	Disdikpora	
	Persentase Tingkat Budi Pekerti Peserta Didik	**Persen**	**84,00**		**84,00**		**87,00**		**84,00**		**96,55**	-			-	-	Disdikpora	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah satuan pendidikan SD yang terkelola**	**Sekolah**	**1.692,00**	**251.580.411.866**	**282,00**	**68.818.914.242**	**282,00**	**76.509.028.901**	**282,00**	**58.105.905.997**	**100,00**	**75,95**	**564,00**	**126.924.820.239**	**33,33**	**50,45**	Disdikpora	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruanagn Yang di Bangun	Ruang	5,00	940.000.000	1,00	168.662.500	-	-	-	-			1,00	168.662.500	20,00	17,94	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	5,00	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-								Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang di rehab	Ruang	5,00	420.000.000	2,00	799.460.214	1,00	75.833.000	1,00	75.475.000	100,00	99,53	3,00	874.935.214	60,00	208,32	Disdikpora	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah bangunan perpustakaan sekolah	Ruang	5,00	940.000.000	6,00	1.014.767.700	1,00	190.000.000	1,00	187.909.000	100,00	98,90	7,00	1.202.676.700	140,00	127,94	Disdikpora	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Bangunan/Sarana dan Prasarana Sekolah yang di Bangun	Ruang	5,00	690.000.000	1,00	967.114.784	2,00	534.986.640	3,00	466.309.005	150,00	87,16	4,00	1.433.423.789	80,00	207,74	Disdikpora	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang di rehab	Satuan Pendidikan	10,00	1.000.000.000	282,00	11.518.195.557	24,00	7.030.066.240	24,00	4.849.810.670	100,00	68,99	306,00	16.368.006.227	3.060,00	1.636,80	Disdikpora	Anggaran RKPD lebih besar dari anggaran Renstra dikarenakan renstra bersumber dari APBD sedangkan RKPD ada yang bersumber dari Banprov yang kemunculannya setelah renstra ditetapkan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepsek yang di rehab	Ruang	10,00	970.000.000	8,00	716.876.551	3,00	318.000.000	3,00	314.277.111	100,00	98,83	11,00	1.031.153.662	110,00	106,30	Disdikpora	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	10,00	970.000.000	-	-	-	-	-	-								Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang di rehab	Ruang	10,00	970.000.000	3,00	457.908.541	-	-	-	-			3,00	457.908.541	30,00	47,21	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa SD	Paket	10,00	170.000.000	8,00	250.007.708	3,00	267.221.000	3,00	264.986.100	100,00	99,16	11,00	514.993.808	110,00	302,94	Disdikpora	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah yang menerima perlengkapan alat bantu belajar	Sekolah	282,00	750.000.000	282,00	14.473.966.200	41,00	8.998.844.000	41,00	8.998.844.000	100,00	100,00	161,50	23.472.810.200	57,27	3.129,71	Disdikpora	
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	188.308,00	39.766.466.100	31.137,00	1.212.346.000	########	6.599.995.000	31.137,00	1.332.729.000	100,00	20,19	62.274,00	2.545.075.000	33,07	6,40	Disdikpora	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah yang memiliki Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	5,00	750.000.000	10,00	7.006.850.264	4,00	4.500.000.000	4,00	4.488.000.000	100,00	99,73	14,00	11.494.850.264	280,00	1.532,65	Disdikpora	Anggaran RKPD lebih besar dari anggaran Renstra dikarenakan renstra bersumber dari APBD sedangkan RKPD ada yang bersumber dari Banprov yang kemunculannya setelah renstra ditetapkan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Jumlah Peserta didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Dididk	158.974,00	17.700.000.000	-	-	-	-	-									Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1.420,00	1.229.481.668	284,00	191.206.000	284,00	88.044.475	284,00	74.815.000	100,00	84,97	568,00	266.021.000	40,00	21,64	Disdikpora	
Penyiapan dan Tidak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	1.420,00	1.935.462.000	284,00	65.190.000	284,00	299.947.080	284,00	99.673.335	100,00	33,23	568,00	164.863.335	40,00	8,52	Disdikpora	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Dididk	11.250,00	63.761.214.822	2.160,00	1.514.251.000	2.250,00	1.846.058.391	1.935,00	880.974.001	86,00	47,72	4.095,00	2.395.225.001	36,40	3,76	Disdikpora	
Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	11.947,00	70.662.435.876	556,00	114.266.000	2.780,00	1.749.985.880	-	228.351.520	-	13,05	556,00	342.617.520	4,65	0,48	Disdikpora	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	2.070,00	46.380.351.400	284,00	815.150.000	284,00	3.848.827.195	284,00	650.727.740	100,00	16,91	568,00	1.465.877.740	27,44	3,16	Disdikpora	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1.420,00	575.000.000	284,00	27.532.695.223	284,00	29.410.200.000	284,00	29.371.712.515	100,00	99,87	568,00	56.904.407.738	40,00	9.896,42	Disdikpora	
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	-	-	-	-	1,00	200.000.000	1,00	195.781.000	100,00	97,89	1,00	195.781.000	-	-	Disdikpora	Awalnya anggaran tersebut berada di sekretariat,kemudian di pindahkan ke bidang pengelolaan pendidikan SD dan SMP dengan tujuan untuk penyesuaian antara peruntukan anggaran dan sub kegiatannya mengingat kegiatan ini berhubungan dengan peserta didik.Belum terakomodir pada renstra perubahan sehingga target dan realisasi renstra masih kosong
Pembinaan Penggunaan Teknologi,Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	-	-	-	-	########	10.551.020.000	30.840,00	5.625.531.000	96,49	53,32	30.840,00	5.625.531.000	-	-	Disdikpora	Awalnya anggaran tersebut berada di sekretariat,kemudian di pindahkan ke bidang pengelolaan pendidikan SD dan SMP dengan tujuan untuk penyesuaian antara peruntukan anggaran dan sub kegiatannya mengingat kegiatan ini berhubungan dengan peserta didik.Belum terakomodir pada renstra perubahan sehingga target dan realisasi renstra masih kosong
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	96,03	71,73						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Jumlah pendidikan SMP yang terkelola**	**Sekolah**	**318,00**	**209.562.805.130**	**53,00**	**36.698.926.680**	**53,00**	**36.994.206.940**	**53,00**	**24.489.256.365**	**100,00**	**66,20**	**106,00**	**61.188.183.045**	**33,33**	**29,20**	Disdikpora	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang bangun	Ruang	5,00	1.870.000.000	1,00	353.012.500	-	-	-	-			1,00	353.012.500	20,00	18,88	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	5,00	1.870.000.000			-	-	-									Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Bangunan yang di Bangun	Ruang	5,00	870.000.000	1,00	155.492.000	1,00	172.000.000	1,00	171.667.000	100,00	99,81	2,00	327.159.000	40,00	37,60	Disdikpora	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah bangunan perpustakaan sekolah	Ruang	5,00	1.870.000.000	2,00	684.222.700	1,00	400.000.000	1,00	389.445.000	100,00	97,36	3,00	1.073.667.700	60,00	57,42	Disdikpora	
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Yang di Bangunan	Ruang	5,00	2.120.000.000	2,00	787.850.000	2,00	880.000.000	2,00	861.855.000	100,00	97,94	4,00	1.649.705.000	80,00	77,82	Disdikpora	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendaptkan Sarana	Satuan Pendidikan	10,00	1.720.000.000	54,00	644.497.000	6,00	4.425.818.730	6,00	1.773.623.559	100,00	40,07	60,00	2.418.120.559	600,00	140,59	Disdikpora	Anggaran RKPD lebih besar dari anggaran Renstra dikarenakan renstra bersumber dari APBD sedangkan RKPD ada yang bersumber dari Banprov yang kemunculannya setelah renstra ditetapkan
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang di rehab	Ruang	5,00	1.220.000.000	54,00	3.709.548.107	7,00	1.233.386.640	54,00	1.209.953.760	771,43	98,10	108,00	4.919.501.867	2.160,00	403,24	Disdikpora	Anggaran RKPD lebih besar dari anggaran Renstra dikarenakan renstra bersumber dari APBD sedangkan RKPD ada yang bersumber dari Banprov yang kemunculannya setelah renstra ditetapkan
Rehabiltasi Sedang/Berat Ruang Guru	Jumlah rehabilitasi ruang guru SMP	Ruang	5,00	1.220.000.000	1,00	973.931.433	-	-	-	-			1,00	973.931.433	20,00	79,83	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5,00	330.000.000	-	-	-	-	-									Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah rehabilitasi ruang perpustakaan SMP	Ruang	5,00	790.000.000	1,00	142.261.310	-	-	-	-			1,00	142.261.310	20,00	18,01	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah laboratorium yang direhabilitasi	Ruang	5,00	1.420.000.000	10,00	1.858.458.445	-	-	-	-			10,00	1.858.458.445	200,00	130,88	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Rehablitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa SMP	Ruang	5,00	455.000.000	2,00	418.927.430	1,00	89.000.000	1,00	79.575.000	100,00	89,41	3,00	498.502.430	60,00	109,56	Disdikpora	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendaptkan perlengkapan	Satuan Pendidikan	5,00	940.000.000	54,00	7.688.286.430	-	-	-	-			54,00	7.688.286.430	1.080,00	817,90	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Siswa yang mendapatkan SPM	Orang	69.910,00	25.500.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Dididk	67.725,00	18.785.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	5,00	940.000.000	1,00	2.051.497.500	-	-	-	-			1,00	2.051.497.500	20,00	218,24	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Dididk	67.725,00	3.790.110.583	13.545,00	69.969.000	########	82.448.980	13.545,00	82.448.980	100,00	100,00	27.090,00	152.417.980	40,00	4,02	Disdikpora	
Penyiapan dan Tidak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	270,00	706.440.250	54,00	28.512.000	54,00	99.999.750	54,00	57.297.000	100,00	57,30	108,00	85.809.000	40,00	12,15	Disdikpora	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Dididk	6.250,00	48.788.136.057	1.250,00	454.276.000	1.250,00	7.608.466.040	1.110,00	1.020.162.800	88,80	13,41	2.360,00	1.474.438.800	37,76	3,02	Disdikpora	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	4.769,00	45.785.084.040	383,00	60.945.000	779,00	1.374.857.800	-	274.088.000	-	19,94	383,00	335.033.000	8,03	0,73	Disdikpora	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	270,00	34.969.588.200	54,00	1.096.370.000	54,00	794.749.000	54,00	444.124.000	100,00	55,88	108,00	1.540.494.000	40,00	4,41	Disdikpora	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	270,00	13.603.446.000	54,00	15.054.789.505	54,00	15.484.500.000	54,00	15.474.476.266	100,00	99,94	108,00	30.529.265.771	40,00	224,42	Disdikpora	
Rehabiltasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah ruang TU yang di rehab	Paket	-	-	1,00	417.059.720	-	-	-	-			1,00	417.059.720	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah ruang kepala sekolah yang di rehab	Ruang	-	-	1,00	49.020.600	-	-	-	-			1,00	49.020.600	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, dan Komunikasi (TIK)Informasi untuk Pendidikan	Orang	-	-	-	-	########	4.348.980.000	14.131,00	2.650.540.000	99,03	60,95	14.131,00	2.650.540.000	-	-	Disdikpora	Awalnya anggaran tersebut berada di sekretariat,kemudian di pindahkan ke bidang pengelolaan pendidikan SD dan SMP dengan tujuan untuk penyesuaian antara peruntukan anggaran dan sub kegiatannya mengingat kegiatan ini berhubungan dengan peserta didik.Belum terakomodir pada renstra perubahan sehingga target dan realisasi renstra masih kosong
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	143,02	71,55						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	**Jumlah pendidikan PAUD yang terkelola**	**Lembaga**	**1.548,00**	**53.595.953.176**	**258,00**	**3.371.073.853**	**258,00**	**7.691.632.900**	**258,00**	**7.266.505.014**	**100,00**	**94,47**	**516,00**	**10.637.578.867**	**33,33**	**19,85**	Disdikpora	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				3.000.000.000			-	-	-									Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Raung Kelas yang di bangun	Ruang	-	-	-	-	3,00	830.000.080	3,00	568.068.321	100,00	68,44	3,00	568.068.321	-	-	Disdikpora	Kegiatan ini muncul di luar renstra yang di tetapkan sebelumnya karena termasuk salahsatu program mandatori pemerintah
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Bangunan yang di rehab	Ruang	-	-	5,00	194.753.953	-	-	-	-			5,00	194.753.953	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pembangunan sarana,prasarana dan utilitas paud							6,00	1.130.021.820	6,00	887.267.993	100,00	78,52						
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Gedung Yang di Pelihara	Satuan Pendidikan	-	-	75,00	15.000.000	-	-	-	-			75,00	15.000.000	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	40.375,00	12.291.865.000	8.075,00	581.719.900	8.075,00	274.476.300	8.075,00	268.234.000	100,00	97,73	16.150,00	849.953.900	40,00	6,91	Disdikpora	
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Orang	6,00	1.194.785.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	375,00	410.795.250	-	-	75,00	120.999.920	75,00	119.999.920	100,00	99,17	75,00	119.999.920	20,00	29,21	Disdikpora	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	275,00	34.728.545.726	55,00	75.000.000	55,00	279.999.920	55,00	229.999.920	100,00	82,14	110,00	304.999.920	40,00	0,88	Disdikpora	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	1.300,00	1.419.962.200	260,00	2.504.600.000	260,00	5.056.134.860	260,00	5.192.934.860	100,00	102,71	520,00	7.697.534.860	40,00	542,09	Disdikpora	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	5,00	550.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	88,12						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Jumlah pendidikan non formal/kesetaraan yang terkelola**	**Lembaga**	**72,00**	**61.110.617.720**	**12,00**	**634.113.000**	**12,00**	**9.748.299.732**	**12,00**	**1.948.344.432**	**100,00**	**19,99**	**24,00**	**2.582.457.432**	**33,33**	**4,23**	Disdikpora	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang menerima biaya Pendidikan Gratis	Peserta	1.610,00	2.650.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Peserta Paket B dan Paket C	Peserta Didik	10.000,00	1.720.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	65,00	3.044.538.728	12,00	59.613.000	13,00	149.999.952	13,00	14.444.652	100,00	9,63	25,00	74.057.652	38,46	2,43	Disdikpora	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang	36.050,00	46.479.500.000	-	-	7.210,00	7.664.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Kegiatan dibayarkan di tahun 2024
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1.565,00	3.064.308.122	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	65,00	3.602.270.870	13,00	574.500.000	13,00	1.933.899.780	13,00	1.933.899.780	100,00	100,00	26,00	2.508.399.780	40,00	69,63	Disdikpora	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP sekolah Nonformal/kesetaraan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Orang	1.300,00	550.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	66,67	36,54						
										Predikat Kinerja	(S)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**64,15**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(R)**						
Program Pengembangan Kurikulum	**Persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Standar Isi**	**Persen**	**58,00**	**9.815.000.000**	**-**	**-**	**52,00**	**369.999.748**	**52,00**	**369.999.748**	**100,00**	**100,00**	**26,00**	**369.999.748**	**44,83**	**3,77**	Disdikpora	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**persentase dokumen kurkulum yang dibuat**	**Persen**	**58,00**	**5.000.000.000**	**-**	**-**	**54,00**	**350.000.000**	**54,00**	**350.000.000**	**100,00**	**100,00**	**27,00**	**350.000.000**	**46,55**	**7,00**	Disdikpora	
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	5,00	550.000.000	-	-	1,00	60.000.000	1,00	60.000.000	100,00	100,00	1,00	60.000.000	20,00	10,91	Disdikpora	
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun	Dokumen	5,00	850.000.000	-	-	1,00	60.000.000	1,00	60.000.000	100,00	100,00	1,00	60.000.000	20,00	7,06	Disdikpora	
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buah	5.000,00	2.550.000.000	-	-	1.000,00	150.000.000	1.000,00	150.000.000	100,00	100,00	1.000,00	150.000.000	20,00	5,88	Disdikpora	
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang meningkat kompetensinya	Orang	500,00	1.050.000.000	-	-	100,00	80.000.000	100,00	80.000.000	100,00	100,00	100,00	80.000.000	20,00	7,62	Disdikpora	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	100,00						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	**persentase dokumen kurkulum yang dibuat**	**Persen**	**58,00**	**4.815.000.000**	**-**	**-**	**54,00**	**19.999.748**	**54,00**	**19.999.748**	**100,00**	**100,00**	**27,00**	**19.999.748**	**46,55**	**0,42**	Disdikpora	
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	30,00	850.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	45,00	990.000.000	-	-	9,00	19.999.748	9,00	19.999.748	100,00	100,00	9,00	19.999.748	20,00	2,02	Disdikpora	
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	Buku	50.740,00	2.975.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	100,00						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**100,00**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(ST)**						
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	**persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**	**Persen**	**60,00**	**63.204.000.000**	**52,00**	**10.805.675.000**	**54,00**	**7.087.674.800**	**54,00**	**3.970.768.000**	**100,00**	**56,02**	**53,00**	**14.776.443.000**	**88,33**	**23,38**	Disdikpora	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**persentase PTK berkompeten**	**Persen**	**50,00**	**63.204.000.000**	**47,00**	**10.805.675.000**	**54,00**	**7.087.674.800**	**54,00**	**3.970.768.000**	**100,00**	**56,02**	**50,50**	**14.776.443.000**	**101,00**	**23,38**	Disdikpora	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	235,00	63.204.000.000	47,00	10.805.675.000	47,00	7.087.674.800	47,00	3.970.768.000	100,00	56,02	94,00	14.776.443.000	40,00	23,38	Disdikpora	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											100,00	56,02						
Predikat Kinerja											(ST)	(R)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)											**100,00**	**56,02**						
Predikat Kinerja											**(ST)**	**(R)**						
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	**persentase Layanan Literasi Sswa**	**Persen**	**65,00**	**2.525.000.000**	**33,33**	**318.450.000**	**62,00**	**489.241.640**	**62,00**	**149.991.640**	**100,00**	**30,66**	**47,67**	**468.441.640**	**73,33**	**18,55**	Disdikpora	
Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan	**persentase layanan yang dilakukan**	**Persen**	**61,00**	**2.525.000.000**	**33,33**	**318.450.000**	**62,00**	**489.241.640**	**62,00**	**149.991.640**	**100,00**	**30,66**	**47,67**	**468.441.640**	**78,14**	**18,55**	Disdikpora	
Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Jumlah Cerita	Judul	25,00	1.050.000.000	-	-	5,00	204.549.640	5,00	69.999.640	100,00	34,22	5,00	69.999.640	20,00	6,67	Disdikpora	
Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peserta Didik	500,00	1.050.000.000	100,00	318.450.000	8.200,00	204.900.000	8.200,00	60.000.000	100,00	29,28	8.300,00	378.450.000	1.660,00	36,04	Disdikpora	
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar	Dokumen	5,00	425.000.000	-	-	1,00	79.792.000	1,00	19.992.000	100,00	25,06	1,00	19.992.000	20,00	4,70	Disdikpora	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											100,00	29,52						
Predikat Kinerja											(ST)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)											**100,00**	**30,66**						
Predikat Kinerja											**(ST)**	**(SR)**						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)											**100,00**	**68,44**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											**(ST)**	**(S)**						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA				**157.265.182.867**		**8.494.132.250**		**21.857.103.499**		**11.408.695.682**		**52,20**		**19.902.827.932**		**12,66**	Disdikpora	
Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	**persentase pembinaan wirausaha muda dan Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan**	**Persen**	**80,00**	**103.242.219.155**	**80,00**	**2.308.431.000**	**80,00**	**2.900.000.000**	**60,00**	**1.821.968.700**	**75,00**	**62,83**	**70,00**	**4.130.399.700**	**87,50**	**4,00**	Disdikpora	
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**persentase pembinaan wirausaha muda dan Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan**	**Persen**	**80,00**	**92.193.050.000**	**80,00**	**1.205.281.000**	**80,00**	**2.800.000.000**	**60,00**	**1.821.968.700**	**75,00**	**65,07**	**70,00**	**3.027.249.700**	**87,50**	**3,28**	Disdikpora	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	750,00	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	160,00	82.764.300.000	32,00	600.000.000	32,00	600.000.000	32,00	200.000.000	100,00	33,33	64,00	800.000.000	40,00	0,97	Disdikpora	
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Dokumen	50,00	300.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	20,00	2.123.750.000	4,00	89.463.000	4,00	2.200.000.000	4,00	1.621.968.700	100,00	73,73	8,00	1.711.431.700	40,00	80,59	Disdikpora	
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang	300,00	550.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang	750,00	4.955.000.000	150,00	515.818.000	-	-	-	-			150,00	515.818.000	20,00	10,41	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											100,00	53,53						
Predikat Kinerja											(ST)	(R)						
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**persentasi peserta yang mengikuti kegiatan**	**Persen**	**80,00**	**11.049.169.155**	**80,00**	**1.103.150.000**	**80,00**	**100.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40,00**	**1.103.150.000**	**50,00**	**9,98**	Disdikpora	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	25,00	11.049.169.155	5,00	1.103.150.000	5,00	100.000.000	-	-	-	-	5,00	1.103.150.000	20,00	9,98	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**37,50**	**32,54**						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	**persentase Prestasi Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional**	**Persen**	**80,00**	**53.422.963.712**	**80,00**	**6.185.701.250**	**80,00**	**18.957.103.499**	**60,00**	**9.586.726.982**	**75,00**	**50,57**	**70,00**	**15.772.428.232**	**87,50**	**29,52**	Disdikpora	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**persentase peralatan yang disediakan**	**Persen**	**80,00**	**4.975.000.000**	-	-	**80,00**	**16.551.300.000**	**80,00**	**6.832.642.782**	**100,00**	**41,28**	**40,00**	**6.832.642.782**	**50,00**	**137,34**	Disdikpora	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	25,00	4.975.000.000	-	-	5,00	16.551.300.000	5,00	6.832.642.782	100,00	41,28	5,00	6.832.642.782	20,00	137,34	Disdikpora	Anggaran RKPD lebih besar dari anggaran Renstra dikarenakan renstra bersumber dari APBD sedangkan RKPD ada yang bersumber dari Banprov yang kemunculannya setelah renstra ditetapkan
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	41,28						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**persentase jumlah peserta yang mengikuti partisipasi dalam penyelenggaraan**	**Persen**	**80,00**	**20.027.963.712**	**80,00**	**1.981.214.000**	**80,00**	**1.603.612.000**	**60,00**	**1.471.900.500**	**75,00**	**91,79**	**70,00**	**3.453.114.500**	**87,50**	**17,24**	Disdikpora	
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	35,00	5.340.000.000	7,00	97.700.000	7,00	277.909.500	4,00	277.908.000	57,14	100,00	11,00	375.608.000	31,43	7,03	Disdikpora	
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	2.000,00	14.687.963.712	400,00	1.883.514.000	400,00	1.325.702.500	400,00	1.193.992.500	100,00	90,06	800,00	3.077.506.500	40,00	20,95	Disdikpora	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	78,57	95,03						
										Predikat Kinerja	(T)	(ST)						
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**persentase juara yang diraih**	**Persen**	**80,00**	**11.020.000.000**	**1,00**	**129.487.250**	**80,00**	**352.191.499**	**-**	**352.183.700**	**-**	**100,00**	**1,00**	**481.670.950**	**1,25**	**4,37**	Disdikpora	
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	20,00	4.200.000.000	4,00	54.487.250	4,00	52.191.499	1,00	52.183.700	25,00	99,99	5,00	106.670.950	25,00	2,54	Disdikpora	
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi KabKota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	24,00	995.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkann	Dokumen	5,00	325.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	30,00	5.500.000.000	-	75.000.000	5,00	300.000.000	5,00	300.000.000	100,00	100,00	5,00	375.000.000	16,67	6,82	Disdikpora	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	62,50	99,99						
										Predikat Kinerja	(R)	(ST)						
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**persentase Organisasi yang di Bina**	**Persen**	**80,00**	**16.100.000.000**	**80,00**	**4.075.000.000**	**80,00**	**450.000.000**	**60,00**	**930.000.000**	**75,00**	**206,67**	**70,00**	**5.005.000.000**	**87,50**	**31,09**	Disdikpora	
Standarisasi Organisasi Keolahragaan (Pembinaan Manajemen Olahraga)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Dokumen	5,00	650.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi yang di Bina	Organisasi	10,00	15.450.000.000	2,00	4.075.000.000	2,00	450.000.000	2,00	930.000.000	100,00	206,67	4,00	5.005.000.000	40,00	32,39	Disdikpora	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	206,67						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**persentase peserta yang mengikuti Festival Senam**	**Persen**	**80,00**	**1.300.000.000**	**-**	-	-	-	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	Disdikpora	
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Festival Senam Jabar Juara)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	5,00	650.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi (Pengadaan Peralatan Body rafting)	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Unit	5,00	650.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**62,50**	**109,93**						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Predikat Kinerja	(R)	(ST)						
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	**persentase Pemuda Yang aktif dalam Kepramukaan**	**Persen**	**80,00**	**600.000.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**persentase peserta yang mengikuti jambore**	**Orang**	**550,00**	**600.000.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	5,00	600.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Karena tidak dianggarkan pada Dokumen Renja 2023
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**75,00**	**56,70**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(S)**	**(R)**						
DINAS KESEHATAN				**2.700.481.119.464**		**251.363.446.329**		**341.889.913.503**		**280.366.456.890**		**82,00**		**531.729.903.219**		**19,69**		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**2.700.481.119.464**		**251.363.446.329**		**341.889.913.503**		**280.366.456.890**		**82,00**		**531.729.903.219**		**19,69**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi**	**%**	**90,00**	**1.062.316.317.483**	**90,00**	**53.545.182.194**	**90,00**	**210.643.967.371**	**85,00**	**194.145.080.437**	**94,44**	**92,17**	**87,50**	**247.690.262.631**	**97,22**	**23,32**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100,00**	**1.995.784.000**	**100,00**	**52.584.000**	**100,00**	**66.342.000**	**100,00**	**47.749.380**	**100,00**	**71,97**	**100,00**	**63.049.452**	**100,00**	3,16		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24,00	1.995.784.000	4,00	52.584.000	4,00	66.342.000	4,00	47.749.380	100,00	71,97	8,00	100.333.380	33,33	5,03	Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	71,97						
										Predikat kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100,00**	**418.772.137.821**	**100,00**	**48.400.082.035**	**100,00**	**73.863.687.625**	**100,00**	**66.381.615.110**	**100,00**	**89,87**	**100,00**	**94.641.129.912**	**100,00**	**22,60**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	6.782,00	415.706.137.821	1.050,00	47.859.182.035	1.100,00	73.700.487.625	1.100,00	66.280.465.110	100,00	89,93	2.150,00	114.139.647.145	31,70	27,46	Dinas Kesehatan	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6,00	3.066.000.000	1,00	540.900.000	1,00	163.200.000	1,00	101.150.000	100,00	61,98	2,00	642.050.000	33,33	20,94	Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	75,96						
										Predikat kinerja	(ST)	(T)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**%**	**100,00**	**3.087.000.000**	**100,00**	**566.400.000**	**100,00**	**204.000.000**	**100,00**	**133.450.000**	**100,00**	**65,42**	**100,00**	**205.700.065**	**100,00**	**6,66**		
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6,00	3.087.000.000	1,00	566.400.000	1,00	204.000.000	1,00	133.450.000	100,00	65,42	2,00	699.850.000	33,33	22,67	Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	65,42						
										Predikat kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**%**	**100,00**	**183.500.000**	**100,00**	**21.000.000**		-	-	-			**50,00**	-	**50,00**	-		
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	6,00	183.500.000	1,00	21.000.000	-	-	-	-			1,00	21.000.000	16,67	11,44	Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100,00**	**2.105.400.000**	**100,00**	**348.000.000**	**100,00**	**1.083.575.530**	**100,00**	**1.043.776.280**	**100,00**	**96,33**	**100,00**	**1.658.051.906**	**100,00**	**78,75**		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	6,00	2.105.400.000	1,00	348.000.000	1,00	500.800.000	1,00	461.000.750	100,00	92,05	2,00	809.000.750	33,33	38,43	Dinas Kesehatan	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		-		-	-	582.775.530	1,00	582.775.530			1,00	582.775.530	-	-	Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	92,05						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah**	**%**	**100,00**	**4.229.364.950**	**100,00**	**255.161.657**	**100,00**	**414.238.862**	**100,00**	**465.662.213**	**100,00**	**112,41**	**100,00**	**600.082.004**	**100,00**	**14,19**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	437.460.850			1,00	23.042.845	1,00	22.750.000	100,00	98,73						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6,00	1.514.586.900	1,00	114.586.900	1,00	199.971.017	1,00	199.639.456	100,00	99,83						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket						-	-	-			-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	293.752.200	2,00	36.940.200	2,00	25.000.000	2,00	24.931.960	100,00	99,73	4,00	61.872.160	33,33	21,06	Dinas Kesehatan	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6,00	90.000.000	1,00	13.660.000	1,00	15.000.000	1,00	14.980.000	100,00	99,87	2,00	28.640.000	33,33	31,82	Dinas Kesehatan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6,00	1.893.565.000	1,00	89.974.557	1,00	151.225.000	1,00	203.360.797	100,00	134,48	2,00	293.335.354	33,33	15,49	Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	111,36						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**90,00**	**53.109.580.000**	**90,00**	**9.990.000**	**90,00**	**4.770.000**	**90,00**	**4.715.000**	**100,00**	**98,85**	**90,00**	**4.715.099**	**100,00**	**0,01**		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	88,00	12.440.000.000				-										
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	80,00	3.000.000.000				-										
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	111,00	8.278.980.000	1,00	4.500.000	22,00	4.770.000	2,00	4.715.000	9,09	98,85	3,00	9.215.000	2,70	0,11	Dinas Kesehatan	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4,00	24.239.050.000	-			-	-	-			-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	2.101.550.000	-			-	-	-			-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15,00	3.050.000.000	1,00	5.490.000		-	-	-			1,00	5.490.000	6,67	0,18	Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	9,09	98,85						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**90,00**	**29.140.103.600**	**90,00**	**3.009.197.135**	**90,00**	**1.047.609.308**	**90,00**	**820.506.649**	**100,00**	**78,32**	**90,00**	**1.438.736.930**	**100,00**	**4,94**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6,00	61.500.000	1,00	4.500.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	100,00	100,00	2,00	14.500.000	33,33	23,58	Dinas Kesehatan	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6,00	13.841.113.700	1,00	794.217.135	1,00	687.022.160	1,00	577.301.649	100,00	84,03	2,00	1.371.518.784	33,33	9,91	Dinas Kesehatan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6,00	15.237.489.900	1,00	2.210.480.000	1,00	350.587.148	1,00	233.205.000	100,00	66,52	2,00	2.443.685.000	33,33	16,04	Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	83,52						
										Predikat kinerja	(ST)	(T)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**90,00**	**4.693.447.112**	**90,00**	**882.767.367**	**90,00**	**673.915.000**	**90,00**	**641.010.448**	**100,00**	**95,12**	**90,00**	**1.066.578.967**	**100,00**	**22,72**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	600,00	1.609.127.112	5,00	189.503.336	100,00	198.725.000	18,00	198.464.640	18,00	99,87	23,00	387.967.976	3,83	24,11	Dinas Kesehatan	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	402,00	324.500.000	10,00	45.844.000	67,00	50.250.000	55,00	50.172.500	82,09	99,85	65,00	96.016.500	16,17	29,59	Dinas Kesehatan	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	29,00	2.759.820.000	1,00	647.420.031	5,00	424.940.000	4,00	392.373.308	80,00	92,34	5,00	1.039.793.339	17,24	37,68	Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	60,03	97,35						
										Predikat kinerja	(R)	(ST)						
Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**	**%**	**100,00**	**545.000.000.000**				**133.285.829.046**	**100,00**	**124.606.595.357**			**50,00**	**249.213.190.714**	**50,00**	**45,73**		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	80,00	545.000.000.000	-			133.285.829.046	16,00	124.606.595.357			16,00	124.606.595.357	20,00	22,86	Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**88,54**						
										Predikat kinerja	**(ST)**	**(T)**						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi**	**%**	**90,00**	**1.543.071.474.802**	**90,00**	**168.675.122.936**	**90,00**	**120.656.688.168**	**90,00**	**81.591.417.083**	**100,00**	**67,62**	**90,00**	**132.669.807.262**	**100,00**	**8,60**		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**90,00**	**760.504.688.606**	**90,00**	**101.455.274.005**	**90,00**	**54.944.670.378**	**90,00**	**40.420.747.325**	**100,00**	**73,57**	**90,00**	**62.256.779.417**	**100,00**	**8,19**		

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	30,00	52.918.270.150	2,00	5.740.549.030		-	-	-			2,00	5.740.549.030	6,67	10,85	Dinas Kesehatan	
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	28,00	76.070.640.000	1,00	3.943.019.264	5,00	4.071.100.000	1,00	2.306.028.944	20,00	56,64					Dinas Kesehatan	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	70,00	20.200.000.000			14,00	3.951.373.000	1,00	3.646.056.723	7,14	92,27					Dinas Kesehatan	
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	6,00	40.029.587.240	1,00	6.517.401.350		-	-	-			1,00	6.517.401.350	16,67	16,28	Dinas Kesehatan	
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	15,00	4.100.000.000				-	-	-							Dinas Kesehatan	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	20,00	7.500.000.000				-	-	-							Dinas Kesehatan	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	18,00	4.215.730.000	2,00	179.567.000	3,00	49.599.880	3,00	43.401.000	100,00	87,50					Dinas Kesehatan	
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	150,00	18.343.100.286	20,00	5.752.740.400	25,00	1.675.000.000	2,00	1.603.399.880	8,00	95,73	22,00	7.356.140.280	14,67	40,10	Dinas Kesehatan	
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	30,00	33.705.174.502	15,00	11.096.772.473	5,00	111.543.500	3,00	97.550.000	60,00	87,45	18,00	11.194.322.473	60,00	33,21	Dinas Kesehatan	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	294,00	310.712.559.055	35,00	44.428.819.924	42,00	34.374.987.366	25,00	24.789.126.986	59,52	72,11	60,00	69.217.946.910	20,41	22,28	Dinas Kesehatan	
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit	5,00	899.100.000			1,00	238.000.000	1,00	165.368.600	100,00	69,48					Dinas Kesehatan	
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	6,00	90.283.515.053	120,00	13.153.945.794	1,00	4.798.299.115	1,00	2.436.832.190	100,00	50,79	121,00	15.590.777.984	2.016,67	17,27	Dinas Kesehatan	
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	6,00	99.239.736.320	250,00	10.563.923.770	1,00	5.521.667.053	1,00	5.243.377.511	100,00	94,96	251,00	15.807.301.281	4.183,33	15,93	Dinas Kesehatan	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	90,00	1.110.668.000	15,00	78.535.000	15,00	153.100.464	12,00	89.605.491	80,00	58,53	27,00	168.140.491	30,00	15,14	Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	-	1.176.608.000			-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	63,47	76,55						
										Predikat kinerja	(R)	(T)						
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**90,00**	**775.029.468.254**	**90,00**	**66.799.624.051**	**90,00**	**65.605.016.710**	**90,00**	**41.108.794.758**	**100,00**	**62,66**	**90,00**	**107.908.418.809**	**100,00**	**13,92**	Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	35.114,00	10.039.290.100	6.244,00	237.759.100	5.804,00	1.813.125.000	9.942,00	1.750.540.000	171,30	96,55	16.186,00	1.988.299.100	46,10	19,81	Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	33.515,00	13.510.575.850	5.960,00	655.099.350	5.540,00	550.028.000	7.725,00	17.340.000	139,44	3,15	13.685,00	672.439.350	40,83	4,98	Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	36.281,00	1.840.967.500	624,00	38.836.500	10.245,00	30.360.000	7.753,00	29.416.000	75,68	96,89	8.377,00	68.252.500	23,09	3,71	Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	149.549,00	2.846.376.450	2.820,00	1.034.361.250		40.260.000	37.999,00	27.355.000			40.819,00	1.061.716.250	27,29	37,30	Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	333.047,00	1.857.627.300	35.025,00	258.294.700		464.360.000	148.530,00	442.145.000			#########	700.439.700	55,11	37,71	Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	##########	1.246.000.000			#########	381.958.000	152.718,00	255.584.000	55,46	66,91	#########	255.584.000	11,94	20,51	Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	462.858,00	1.743.019.600	87.152,00	120.762.600		60.900.000	113.102,00	60.900.000			#########	60.900.000	43,26	3,49	Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	582.238,00	1.000.000.000			#########	3.556.200	118.112,00	3.556.200	101,43	100,00					Dinas Kesehatan	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	20.720,00	1.000.000.000			7.110,00	437.356.260	33.026,00	413.018.000	464,50	94,44					Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	3.325,00	1.407.571.600	170,00	17.283.600	573,00	162.634.920	1.406,00	105.559.000	245,38	64,91	1.576,00	105.559.000	47,40	7,50	Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	23.513,00	1.354.228.000	161,00	21.060.000	4.633,00	395.034.810	9.868,00	335.801.560	212,99	85,01					Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	38.009,00	1.337.769.000	60,00	7.360.000	7.625,00	218.895.060	7.626,00	198.232.310	100,01	90,56					Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	6,00	14.860.452.450	1,00	2.112.203.200	1,00	178.336.080	-	-	-	-	1,00	-	16,67	-	Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	6,00	579.049.000	1,00	70.795.000	1,00	23.640.000	-	9.960.000							Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	31,00	19.788.657.730	4,00	639.303.850	5,00	7.260.044.740	5,00	4.933.418.000	100,00	67,95	9,00	5.572.721.850	29,03	28,16	Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	6,00	7.454.872.150	1,00	86.086.000	1,00	338.005.000	1,00	326.755.000	100,00	96,67					Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	42,00	7.068.754.650	7,00	281.661.410	7,00	1.134.625.944	7,00	1.084.017.369	100,00	95,54	14,00	1.365.678.779	33,33	19,32	Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	112,00	8.510.552.200	25,00	565.659.200	15,00	1.158.483.424	15,00	1.147.488.144	100,00	99,05	40,00	1.713.147.344	35,71	20,13	Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	104,00	1.198.835.000				-	-	-							Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	6,00	7.454.872.150	1,00	186.084.000	1,00	429.268.771	-	374.844.563	-	87,32	1,00	560.928.563	16,67	7,52	Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	450,00	1.933.675.250	75,00	12.123.000	75,00	66.672.920	-	53.660.920	-	80,48	75,00	65.783.920	16,67	3,40	Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	30,00	1.724.500.000	5,00	137.712.000	5,00	150.000.000	3,00	147.838.000	60,00	98,56	8,00	285.550.000	26,67	16,56	Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	333,00	1.196.435.000				-	-	-							Dinas Kesehatan	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	110,00	15.640.099.850	9,00	512.662.200	23,00	2.286.681.100	23,00	2.157.605.700	100,00	94,36	32,00	2.670.267.900	29,09	17,07	Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	6,00	465.446.490.704	1,00	41.151.916.479	1,00	40.421.261.665	1,00	24.199.027.235	100,00	59,87	2,00	65.350.943.714	33,33	14,04	Dinas Kesehatan	
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	6,00	889.400.000	1,00	225.000		26.245.000	1,00	15.380.000							Dinas Kesehatan	
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	6,00	1.603.208.020	20,00	140.734.072	1,00	150.000.000	1,00	147.580.000	100,00	98,39	21,00	288.314.072	350,00	17,98	Dinas Kesehatan	
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan	Unit	180,00	2.601.450.000				-	-	-			-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	6,00	42.129.710.300	1,00	2.937.908.336		1.571.501.736	1,00	193.509.736			2,00	3.131.418.072	33,33	7,43	Dinas Kesehatan	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	6,00	91.124.041.731	1,00	8.822.079.768	1,00	5.028.234.381	1,00	2.576.902.199	100,00	51,25	2,00	11.398.981.967	33,33	12,51	Dinas Kesehatan	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	6,00	34.605.920.669	1,00	5.889.458.436	1,00	237.927.199	1,00	79.590.822	100,00	33,45	2,00	5.969.049.258	33,33	17,25	Dinas Kesehatan	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	24,00	2.950.058.000			4,00	10.000.000	1,00	3.030.000	25,00	30,30	1,00	3.030.000	4,17	0,10	Dinas Kesehatan	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	5,00	929.169.000				20.510.000	-	18.740.000							Dinas Kesehatan	
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	6,00	233.700.000	1,00	2.475.000		-	-	-							Dinas Kesehatan	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	96,00	5.922.139.000	20,00	859.720.000	16,00	35.000.000	-	-	-	-	20,00	859.720.000	20,83	14,52	Dinas Kesehatan	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang						139.635.000	4.633,00	126.535.000			4.633,00	126.535.000	-	-	Dinas Kesehatan	
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang						380.475.500	-	371.662.000			-	371.662.000	-	-	Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	106,30	70,48						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**%**	**90,00**	**4.764.169.942**		-		-					-	-	-	-		
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	5,00	175.082.320				-									Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	5,00	1.580.000.000				-									Dinas Kesehatan	
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Unit	100,00	3.009.087.622				-									Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**90,00**	**2.773.148.000**	**90,00**	**420.224.880**	**90,00**	**107.001.080**	**90,00**	**61.875.000**	**100,00**	**57,83**	**90,00**	**482.099.880**	**100,00**	**17,38**		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	240,00	669.450.000	1,00	96.800.000	1,00	27.500.000	1,00	27.500.000	100,00	100,00	2,00	124.300.000	0,83	18,57	Dinas Kesehatan	
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	200,00	272.500.000				-	-	-							Dinas Kesehatan	
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	24,00	1.533.198.000	15,00	323.424.880	4,00	79.501.080	4,00	34.375.000	100,00	43,24	19,00	357.799.880	79,17	23,34	Dinas Kesehatan	
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	5,00	298.000.000				-	-	-							Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	71,62						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**64,68**						
										Predikat kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat**	**%**	**90,00**	**83.400.508.179**	**90,00**	**27.302.094.078**	**90,00**	**9.410.899.088**	**90,00**	**3.453.082.290**	**100,00**	**36,69**	**90,00**	**30.755.176.368**	**100,00**	**36,88**		
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**%**	**90,00**	**1.191.000.000**		-		-	-	-			-	-	-	-		
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	750,00	946.000.000				-									Dinas Kesehatan	
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	5,00	245.000.000				-									Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**%**	**90,00**	**79.786.320.179**	**90,00**	**27.226.134.078**	**90,00**	**8.974.589.871**	**90,00**	**3.137.169.500**	**100,00**	**34,96**	**90,00**	**30.363.303.578**	**100,00**	**38,06**		
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	7.266,00	59.686.320.179	1.211,00	27.226.134.078	1.211,00	8.924.750.871	1.211,00	3.108.969.500	100,00	34,84	2.422,00	30.335.103.578	33,33	50,82	Dinas Kesehatan	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	5,00	20.100.000.000			1,00	49.839.000	1,00	28.200.000	100,00	56,58					Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	45,71						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**90,00**	**2.423.188.000**	**90,00**	**75.960.000**	**90,00**	**436.309.217**	**90,00**	**315.912.790**	**100,00**	**72,41**	**90,00**	**391.872.790**	**100,00**	**16,17**		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	1.575,00	2.423.188.000	150,00	75.960.000	150,00	436.309.217	150,00	315.912.790	100,00	72,41	300,00	391.872.790	19,05	16,17	Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	72,41						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	100,00	53,68						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase farmasi, alat kesehatan yang terpenuhi**	**%**	**90,00**	**6.712.123.000**	**90,00**	**67.199.125**	**90,00**	**415.822.000**	**90,00**	**415.822.000**	**100,00**	**100,00**	**90,00**	**483.021.125**	**100,00**	**7,20**		
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**%**	**90,00**	**2.461.900.000**		-	80,00	**63.726.000**	**80,00**	**63.726.000**	**100,00**	**100,00**	**40,00**	**63.726.000**	**44,44**	**2,59**		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	54,00	800.000.000				-									Dinas Kesehatan	
Penyusunan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Sarana	607,00	861.900.000			86,00	63.726.000	86,00	63.726.000	**100,00**	**100,00**					Dinas Kesehatan	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Sarana	250,00	800.000.000				-									Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	100,00						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu	**Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu**	**%**	**90,00**	**891.076.000**	**90,00**	**44.760.000**	**90,00**	**223.893.500**	**90,00**	**223.893.500**	**100,00**	**100,00**	**90,00**	**268.653.500**	**100,00**	**30,15**		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	Dokumen	861,00	891.076.000	500,00	44.760.000	160,00	223.893.500	160,00	223.893.500	100,00	100,00	660,00	268.653.500	76,66	30,15	Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	100,00						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**%**	**90,00**	**800.000.000**		-		-	-	-			-	-	-	-		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	4,00	800.000.000				-	-	-							Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	**Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**%**	**90,00**	**800.000.000**		-		-	-	-			-	-	-	-		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	4,00	800.000.000				-	-	-							Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**%**	**90,00**	**1.759.147.000**	**90,00**	**22.439.125**	**90,00**	**128.202.500**	**90,00**	**128.202.500**	**100,00**	**100,00**	**90,00**	**150.641.625**	**100,00**	**8,56**		
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	450,00	959.147.000	400,00	22.439.125	75,00	128.202.500	75,00	128.202.500	100,00	100,00	475,00	150.641.625	105,56	15,71	Dinas Kesehatan	
Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dokumen	8,00	800.000.000				-									Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	100,00						
										Predikat kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**100,00**						
										Predikat kinerja	**(ST)**	**(ST)**						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase masyarakat/kelompok masyarakat di bidang kesehatan yang diberdayakan**	**%**	**90,00**	**4.980.696.000**	**90,00**	**1.773.847.996**	**90,00**	**762.536.876**	**90,00**	**761.055.080**	**100,00**	**99,81**	**90,00**	**2.534.903.076**	**100,00**	**50,89**		
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**90,00**	**2.430.347.000**	**90,00**	**1.432.926.662**	**90,00**	**104.850.000**	**90,00**	**104.850.000**	**100,00**	**100,00**	**90,00**	**1.537.776.662**	**100,00**	**63,27**		
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pembedayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	6,00	2.430.347.000	1,00	1.432.926.662	1,00	104.850.000	1,00	104.850.000	100,00	100,00	2,00	1.537.776.662	33,33	63,27	Dinas Kesehatan	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	100,00						
										Predikat kinerja	(ST)	(ST)						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**90,00**	**728.570.000**		-		-	-	-			-	-	-	-		
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	6,00	728.570.000		-		-									Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat kinerja											(SR)	(SR)						
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah**	**%**	**90,00**	**1.821.779.000**	**90,00**	**340.921.334**	90,00	**657.686.876**	**90,00**	**656.205.080**	**100,00**	**99,77**	**90,00**	**997.126.414**	**100,00**	**54,73**		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	6,00	1.821.779.000	1,00	340.921.334	1,00	657.686.876	1,00	656.205.080	100,00	99,77					Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat kinerja											(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)											**100,00**	**99,89**						
Predikat kinerja											**(ST)**	**(ST)**						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)											**98,89**	**79,26**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											**SR**	**SR**						
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**1.488.703.471.543**		**519.443.546.005**		**400.331.844.911**		**250.647.228.706**		**62,61**		**770.090.774.711**		**51,73**		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**1.414.944.640.407**		**519.403.546.005**		**399.581.844.911**		**250.355.948.806**		**62,65**		**769.759.494.811**		**54,40**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi**	**%**	**80,00**		**80,00**		**99,00**		**99,00**		**100,00**		**89,50**		**111,88**	**29,58**		
	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	**%**	**80,00**		**80,00**		**99,00**		**99,00**		**100,00**		**89,50**		**111,88**	-		
	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	**%**	**80,00**	**75.333.502.075**	**80,00**	**14.305.833.427**	**99,00**	**10.270.718.201**	**99,00**	**7.974.665.927**	**100,00**	**77,64**	**89,50**	**22.280.499.354**	**111,88**	-	DPUTRPRKP	
	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	**%**	**80,00**		**80,00**		**99,00**		**99,00**		**100,00**		**89,50**		**111,88**	-		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	**Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu**	**%**	**80,00**	**3.382.515.969**	**100,00**	**359.604.602**	**98,54**	**1.466.098.502**	**98,54**	**1.138.563.885**	**100,00**	**77,66**	**99,27**	**1.498.168.487**	**124,09**	**44,29**	DPUTRPRKP	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	21,00	3.301.969.133	1,00	347.711.811	4,00	434.718.922	8,00	160.647.605	200,00	36,95	9,00	508.359.416	42,86	15,40	DPUTRPRKP	Penjabaran DPA sampai dengan 5 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24,00	80.546.836	9,00	11.892.791	4,00	1.031.379.580	7,00	977.916.280	175,00	94,82	16,00	989.809.071	66,67	1.228,86	DPUTRPRKP	Realisasi kinerja melebihi target renja
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											187,50	65,89						
Predikat kinerja											(ST)	(S)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**80,00**	**36.798.735.131**	**80,00**	**9.993.666.293**	**98,54**	**5.766.402.727**	**98,54**	**5.083.477.714**	**100,00**	**88,16**	**89,27**	**15.077.144.007**	**111,59**	**40,97**	DPUTRPRKP	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaam gaji dan tunjangan	Orang/bulan	72,00	35.494.057.683	12,00	9.510.201.518	56,00	5.516.846.867	56,00	4.904.177.714	100,00	88,89	68,00	14.414.379.232	94,44	40,61	DPUTRPRKP	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72,00	1.234.925.000	12,00	477.675.651	12,00	239.049.000	12,00	179.300.000	100,00	75,01	24,00	656.975.651	33,33	53,20	DPUTRPRKP	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6,00	34.351.224	1,00	2.540.990	1,00	5.006.600	-	-	-	-	1,00	2.540.990	16,67	7,40	DPUTRPRKP	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	35.401.224	6,00	3.248.134	2,00	5.500.260	2,00	-	100,00	-	8,00	3.248.134	66,67	9,18	DPUTRPRKP	Realisasi kinerja melebihi target renja, target renja hanya menghitung laporan keuangan semesteran, tidak dengan laporan keuangan triwulan dan bulanan SKPD
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											75,00	40,98						
Predikat kinerja											(S)	(SR)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80,00**	**388.241.945**	**80,00**	**30.505.000**	**98,54**	**54.000.200**	**89,27**	**38.355.000**	**90,59**	**71,03**	**84,64**	**68.860.000**	**105,79**	**17,74**	DPUTRPRKP	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72,00	388.241.945	12,00	30.505.000	12,00	54.000.200	12,00	38.355.000	100,00	71,03	24,00	68.860.000	33,33	17,74	DPUTRPRKP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											100,00	71,03						
Predikat kinerja											(ST)	(S)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**80,00**	**6.232.062.303**	**80,00**	**919.330.355**	**98,54**	**976.425.625**	**98,54**	**561.906.072**	**100,00**	**57,55**	**89,27**	**1.481.236.427**	**111,59**	**23,77**	DPUTRPRKP	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	1.409.400.360	1,00	9.190.743	1,00	6.839.305	1,00	2.998.000	100,00	43,83	2,00	12.188.743	33,33	0,86	DPUTRPRKP	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	1.617.311.437	1,00	252.509.076	1,00	117.469.080	1,00	109.787.928	100,00	93,46	2,00	362.297.004	33,33	22,40	DPUTRPRKP	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00	408.850.000	1,00	62.158.722	1,00	22.578.340	1,00	20.555.674	100,00	91,04	2,00	82.714.396	33,33	20,23	DPUTRPRKP	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6,00	846.750.506	1,00	133.405.000	1,00	40.080.900	1,00	20.900.000	100,00	52,14	2,00	154.305.000	33,33	18,22	DPUTRPRKP	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6,00	1.949.750.000	1,00	462.066.814	18,00	789.458.000	35,00	407.664.470	194,44	51,64	36,00	869.731.284	600,00	44,61	DPUTRPRKP	Realisasi kinerja melebihi target renja
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	118,89	66,42						
										Predikat kinerja	(ST)	(S)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**80,00**	**13.732.706.390**	**80,00**	**1.445.179.475**	**98,54**	**1.109.852.880**	**98,54**	**457.919.292**	**100,00**	**41,26**	**89,27**	**1.903.098.767**	**111,59**	**13,86**	DPUTRPRKP	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		600.000.000					-									
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		6.000.000.000					-									
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		1.527.238.830		-	50,00	190.247.600	95,00		190,00	-	95,00	-	-	-	DPUTRPRKP	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	125,00	2.741.467.560	10,00	634.399.990	25,00	571.605.280	5,00	123.141.492	20,00	21,54	15,00	757.541.482	12,00	27,63	DPUTRPRKP	Refocusing anggaran sehingga pengadaan peralatan dan mesin lainnya ditiadakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18,00	2.864.000.000	3,00	810.779.485	3,00	348.000.000	6,00	334.777.800	200,00	96,20	9,00	1.145.557.285	50,00	40,00	DPUTRPRKP	Realisasi kinerja melebihi target renja, adanya kebutuhan penambahan sewa gedung setelah perubahan renja
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	110,00	58,87						
										Predikat kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**98,00**	**653.707.962**				-					-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	398,00	210.787.962		-		-					-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12,00	442.920.000		-		-					-	-	-	-	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**80,00**	**10.417.358.757**	**56,30**	**1.157.935.644**	**98,54**	**726.462.500**	**98,54**	**436.415.812**	**100,00**	**60,07**	**77,42**	**1.594.351.456**	**96,78**	**15,30**	DPUTRPRKP	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72,00	2.174.114.625	12,00	10.000.000	12,00	15.900.000	1.125,00	15.000.000	9.375,00	94,34	1.137,00	25.000.000	1.579,17	1,15	DPUTRPRKP	Realisasi kinerja melebihi target renja
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72,00	3.966.000.000	12,00	576.466.803	12,00	196.708.000	27,00	123.037.612	225,00	62,55	39,00	699.504.415	54,17	17,64	DPUTRPRKP	Realisasi kinerja melebihi target renja
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	204,00	4.277.244.132	9,00	571.468.841	12,00	513.854.500	34,00	298.378.200	283,33	58,07	43,00	869.847.041	21,08	20,34	DPUTRPRKP	Realisasi kinerja melebihi target renja, realisasi menghitung jumlah honorarium non pns
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	3.294,44	71,65						
										Predikat kinerja	(ST)	(S)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah**	**%**	**80,00**	**3.728.173.619**	**80,00**	**399.612.058**	**98,54**	**171.475.767**	**63,17**	**68.329.152**	**64,10**	**39,85**	**71,58**	**467.941.210**	**89,48**	**12,55**	DPUTRPRKP	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	150,00	1.870.419.602	25,00	170.595.909	25,00	126.475.767	18,00	65.599.052	72,00	51,87	43,00	236.194.961	28,67	12,63	DPUTRPRKP	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	72,00	1.857.754.017	12,00	229.016.149	12,00	45.000.000	14,00	2.730.100	116,67	6,07	26,00	231.746.249	36,11	12,47	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	94,33	28,97						
										Predikat kinerja	(ST)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**93,53**	**62,22**						
										Predikat kinerja	**(ST)**	**(R)**						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik**	**%**	**69,57**	**146.855.491.224**	**50,90**	**66.736.381.709**	**70,57**	**31.579.678.141**	**70,57**	**25.116.939.666**	**100,00**	**79,54**	**60,74**	**91.853.321.375**	**87,30**	**62,55**	DPUTRPRKP	**tidak ada realisasi, karena tidak ada kegiatan di tahun 2023**
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada	**Prosentase Wilayah sungai yang terlindungi**	**%**	**72,57**	**25.500.000.000**		-				-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		25.500.000.000	-	335.718.000				-			-	335.718.000	-	1,32	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah	**Persentase Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik**	**%**	**69,57**	**121.355.491.224**	**69,57**	**66.736.381.709**	**70,57**	**31.579.678.141**	**70,57**	**28.342.574.952**	**100,00**	**89,75**	**70,07**	**95.078.956.661**	**100,72**	**78,35**	DPUTRPRKP	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	191,00	7.644.691.224	3,00	817.260.000	38,00	350.800.000	5,00	-	13,16	-	8,00	817.260.000	4,19	10,69	DPUTRPRKP	
Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Bendung				-			-	-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukiman	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km				9.488.470.559			-	-			-	9.488.470.559	-	-	DPUTRPRKP	
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukiman	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km				4.600.406.000			-	-			-	4.600.406.000	-	-	DPUTRPRKP	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	162,68	52.603.950.000	3,07	51.006.075.650	8,00	21.745.978.600	8,47	19.395.713.136	105,84	89,19	11,54	70.401.788.786	7,09	133,83	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di tw I dan II digunakan untuk pembayaran hutang tahun 2022
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung		10.200.000.000		-			-	-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	34,84	20.006.850.000	0,39	824.169.500	14,00	560.000.000	0,13	667.347.625	0,90	119,17	0,52	1.491.517.125	1,49	7,46	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di tw I, II dan III digunakan untuk pembayaran hutang tahun 2022

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendung		6.000.000.000		-		-	-	-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir yang Terbangun	%		10.600.000.000		-			-	-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	km					-	7.855.914.541	311,00	7.212.529.191	-	91,81					DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di tw I dan II digunakan untuk pembayaran hutang tahun 2022
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	km		14.300.000.000			4,00	1.066.985.000	-	1.066.985.000	-	100,00					DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di tw I digunakan untuk pembayaran hutang tahun 2022
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	23,98	80,03						
										Predikat kinerja	(SR)	(T)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**89,75**						
										Predikat kinerja	**(ST)**	**(T)**						
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Cakupan Layanan Teknis Air Minum Dan Air Bersih**	**%**	**72,00**	**30.432.315.000**	**188,00**	**7.653.521.190**	**73,00**	**19.331.465.400**	**73,00**	**9.173.327.286**	**100,00**	**47,45**	**130,50**	**16.826.848.476**	**181,25**	**55,29**	DPUTRPRKP	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Rumah Tangga Terlayani akses Air Minum**	**%**	**72,00**	**30.432.315.000**	**188,00**	**7.653.521.190**	**73,00**	**19.331.465.400**	**73,00**	**9.173.327.286**	**100,00**	**47,45**	**130,50**	**16.826.848.476**	**181,25**	**55,29**	DPUTRPRKP	
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	2.130,00		100,00	7.653.521.190		-	-	-			100,00	7.653.521.190	4,69	-	DPUTRPRKP	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen		3.180.000.000		-							-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR		4.800.000.000		-	210,00	2.895.700.000	534,00	2.720.411.000	254,29	93,95	534,00	2.720.411.000	-	56,68	DPUTRPRKP	Belum ada realisasi kinerja di tw III, baru ada pencairan keuangan untuk proses pekerjaan
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	325,00	8.400.000.000		-							-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada	SR	73,00	8.000.000.000			60,00	10.443.600.000	-	1.503.500.386	-	14,40						
Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga yang terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	SR	73,00	6.052.315.000			160,00	1.127.226.400	38,00	613.130.900	23,75	54,39						Pembayaran hutang tahun 2022
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR					500,00	4.864.939.000	1.125,00	4.336.285.000	225,00	89,13						Belum ada realisasi kinerja di tw III, baru ada pencairan keuangan untuk proses pekerjaan
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	254,29	93,95						
										Predikat kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**47,45**						
										Predikat kinerja	**(ST)**	**(SR)**						
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Persampahan**	**%**	**38,00**	**3.450.000.000**	**38,00**	**44.707.900**	**62,00**	**631.901.000**	**-**	**631.901.000**	**-**	**100,00**	**19,00**	**676.608.900**	**50,00**	**19,61**	DPUTRPRKP	
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase terbangunnya sarana persampahan**	**%**	**38,00**	**3.450.000.000**	**38,00**	**44.707.900**	**62,00**	**631.901.000**	**-**	**631.901.000**	**-**	**100,00**	**19,00**	**676.608.900**	**50,00**	**19,61**	DPUTRPRKP	
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga	29,00	3.450.000.000	1,00	44.707.900	200,00	631.901.000	-	631.901.000	-	100,00	1,00	676.608.900	3,45	19,61	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di tw I dan tw III digunakan untuk pembayaran hutang tahun 2022
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	100,00						
										Predikat kinerja	(SR)	(ST)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**-**	**100,00**						
										Predikat kinerja	**(SR)**	**(ST)**						
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Cakupan ketersediaan layanan air limbah**	**%**	**56,00**	**19.470.326.243**	**19,60**	**4.178.744.500**	**60,00**	**8.199.648.840**	**60,00**	**469.079.250**	**100,00**	**5,72**	**39,80**	**4.647.823.750**	**71,07**	**23,87**	DPUTRPRKP	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pengguna sanitasi aman**	**%**	**56,00**	**19.470.326.243**	**19,60**	**4.178.744.500**	**60,00**	**8.199.648.840**	**60,00**	**469.079.250**	**100,00**	**5,72**	**39,80**	**4.647.823.750**	**71,07**	**23,87**	DPUTRPRKP	
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	3,00	8.279.200.000	2,00	4.178.744.500	280,00	525.660.000	-	469.079.250	-	89,24	2,00	4.647.823.750	66,67	56,14	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di tw I, II dan III digunakan untuk pembayaran hutang tahun 2022
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	8,00	3.891.126.243		-			-	-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	1.060,00	7.300.000.000		-	400,00	7.673.988.840	1.016,00	7.494.745.000	254,00	97,66	1.016,00	7.494.745.000	95,85	102,67	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di tw II digunakan untuk pembayaran hutang tahun 2022, Triwulan 3 ada Pencairan untuk dana DAK
Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M2/Hari		-		-			-	-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	127,00	93,45						
										Predikat kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**5,72**						
										Predikat kinerja	**(ST)**	**(SR)**						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase Drainase Dan Gorong - Gorong Kabupaten Dalam Kondisi Baik**	**%**	**53,00**	**50.573.662.640**	**-**	**1.885.810.000**	**56,00**	**909.668.300**	**-**	**885.476.600**	**-**	**97,34**	**-**	**2.771.286.600**	**-**	**5,48**	DPUTRPRKP	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	**Persentase jaringan drainase lingkungan yang berfungsi baik**	**%**	**53,00**	**50.573.662.640**	**-**	**1.885.810.000**	**56,00**	**909.668.300**	**-**	**885.476.600**	**-**	**97,34**	**-**	**2.771.286.600**	**-**	**5,48**	DPUTRPRKP	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	6,00	9.793.344.682		-			-	-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Dokumen	5,00	31.405.317.958	1,00	1.885.810.000		-	-	-			1,00	1.885.810.000	20,00	6,00	DPUTRPRKP	
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	m		9.375.000.000	128,85	217.093.000	2.000,00	909.668.300	75,00	885.476.600	3,75	97,34	203,85	1.102.569.600	-	11,76	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di tw I dan II digunakan untuk pembayaran hutang tahun 2022
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	3,75	97,34						
										Predikat kinerja	(SR)	(ST)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**-**	**97,34**						
										Predikat kinerja	**(SR)**	**(ST)**						
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**Persentase Infrastruktur Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik**	**%**	**56,00**	**40.466.466.983**	**56,00**	**84.962.620.900**	**59,00**	**52.275.874.290**	**59,00**	**26.456.909.525**	**100,00**	**50,61**	**57,50**	**111.419.530.425**	**102,68**	**275,34**	DPUTRPRKP	
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik**	**%**	**56,00**	**40.466.466.983**	**56,00**	**84.962.620.900**	**59,00**	**52.275.874.290**	**59,00**	**26.456.909.525**	**100,00**	**50,61**	**57,50**	**111.419.530.425**	**102,68**	**275,34**	DPUTRPRKP	
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	44.500,00	32.766.466.983	8.000,00	84.962.620.900	1,00	52.275.874.290	20,66	26.456.909.525	2.066,00	50,61	8.020,66	111.419.530.425	18,02	340,04	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di tw I, II dan III digunakan untuk pembayaran hutang tahun 2022
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	5,00	7.700.000.000		-							-	-	-	-	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	2.066,00	50,61						
										Predikat kinerja	(ST)	(R)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**50,61**						
										Predikat kinerja	**(ST)**	**(R)**						
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Persentase Sarana Pemerintahan Yang Terbangun**	**%**	**28,50**	**725.577.190.184**	**10,96**	**29.213.174.452**	**42,80**	**15.090.042.030**	**27,82**	**8.029.542.880**	**65,00**	**53,21**	**19,39**	**37.242.717.332**	**68,04**	**5,13**	DPUTRPRKP	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	**Persentase jumlah gedung kantor yang dibangun di pusat pemerintahan**	**%**	**28,50**	**725.577.190.184**	**10,96**	**29.213.174.452**	**42,80**	**15.090.042.030**	**27,82**	**8.029.542.880**	**65,00**	**53,21**	**19,39**	**37.242.717.332**	**68,04**	**5,13**	DPUTRPRKP	
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	15,00	3.600.000.000	15,00	271.467.000	35,00	782.339.000	73,00	316.693.750	208,57	40,48	88,00	588.160.750	586,67	16,34	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di tw II dan III digunakan untuk pembayaran hutang tahun 2022
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	35,00	721.977.190.184	5,00	28.941.707.452	5,00	14.307.703.030	26,00	7.712.849.130	520,00	53,91	31,00	36.654.556.582	88,57	5,08	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di tw I, II, III digunakan untuk pembayaran hutang tahun 2022
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	364,29	47,19						
										Predikat kinerja	(ST)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**65,00**	**53,21**						
										Predikat kinerja	**(R)**	**(R)**						
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase Penerapan Arsitektur Kawasan Khas Pangandaran Pada Bangunan Pemerintah**		**81,30**	**6.866.586.794**									**-**	**-**	**-**	**-**	DPUTRPRKP	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah bangunan gedung kantor yang menerapkan arsitektur khas pangandaran**		**-**	**6.866.586.794**									**-**	**-**	**-**	**-**	DPUTRPRKP	
Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	-	1.954.010.736		-							-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	4.912.576.058		-							-	-	-	-	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**-**	**-**						
										Predikat kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase Jalan Baru yang Terbangun**	**%**	**78,50**	**289.229.207.213**	**74,58**	**306.850.640.227**	**75,85**	**259.256.577.238**	**12,09**	**163.719.892.609**	**15,94**	**63,15**	**43,33**	**470.570.532.836**	**55,20**	**162,70**	DPUTRPRKP	
	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	**%**					**82,50**											
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Jalan penghubung antar wilayah yang terbangun**	**%**	**78,50**	**289.229.207.213**	**74,58**	**306.850.640.227**	**75,85**	**259.256.577.238**	**12,09**	**163.719.892.609**	**15,94**	**63,15**	**43,33**	**470.570.532.836**	**55,20**	**162,70**	DPUTRPRKP	
	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	**%**					**82,50**											
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	60,00	5.408.456.282	20,00	2.229.496.000			-	-			20,00	2.229.496.000	33,33	41,22	DPUTRPRKP	
Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	KM	91,00	112.928.856.030	10,00	116.004.576.422	15,00	111.459.062.340	5,08	109.326.756.690	33,85	98,09	15,08	225.331.333.112	16,57	199,53	DPUTRPRKP	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Km	22,50	54.039.600.000	15,00	166.493.308.917	15,00	112.791.527.968	66,22	38.837.760.195	441,45	34,43	81,22	205.331.069.112	360,96	379,96	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di tw I dan II digunakan untuk pembayaran hutang tahun 2022, di triwulan III Pencairan untuk Kegiatan DAU SG
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	0,50	6.608.500.800	1,00	5.752.563.863	1,00	11.140.073.500	-	4.166.498.700	-	37,40	1,00	9.919.062.563	200,00	150,10	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di tw I, II dan III digunakan untuk pembayaran hutang tahun 2022
Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	m	10,00	64.350.440.861	2,00	16.370.695.025	40,00	13.237.713.430	78,40	3.126.257.630	196,00	23,62	80,40	19.496.952.655	-	-	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di tw I, II dan III digunakan untuk pembayaran hutang
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas lahan yang tersedia untuk penyelenggaraan jalan	m2	6.000,00	10.544.252.292		-	1.500,00	2.100.000.000	6.842,00	1.744.043.794	456,13	83,05	6.842,00	1.744.043.794	114,03	16,54	DPUTRPRKP	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	km	4,00	2.500.000.000			1,00	8.528.200.000	76,99	6.518.575.600	7.698,50	76,44	76,99	6.518.575.600	1.924,63	260,74	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di tw I digunakan untuk pembayaran hutang tahun 2022, dan di Triwulan III Untuk Pencairan Pengadaan Aspal
Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	m	160,00	7.500.000.000					-	-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	m	160,00	5.000.000.000					-	-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	m	160,00	5.049.700.000					-	-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	m	160,00	3.000.000.000					-	-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	m	160,00	9.000.000.000					-	-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	km	4,00	3.299.400.948					-	-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	1.470,99	58,84						
										Predikat kinerja	(ST)	(R)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**15,94**	**63,15**						
										Predikat kinerja	**(SR)**	**(R)**						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah**	**%**	**40,04**	**26.689.892.050**	**40,04**	**3.572.111.700**	**42,52**	**2.036.271.471**	**42,52**	**403.469.063**	**100,00**	**19,81**	**41,28**	**3.975.580.763**	**103,10**	**14,90**	DPUTRPRKP	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen RTRW yang ditetapkan**	**Dokumen**	**1,00**	**12.738.846.250**	**1,00**	**2.789.378.500**	**1,00**	**1.401.991.501**	1,00	**185.865.093**	**100,00**	**13,26**	**2,00**	**2.975.243.593**	**200,00**	**23,36**	DPUTRPRKP	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kab/Kota	Dokumen	9,00	10.838.846.250	6,00	2.789.378.500	1,00	1.401.991.501	1,00	185.865.093	100,00	13,26	7,00	2.975.243.593	77,78	27,45	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di tw I dan II digunakan untuk pembayaran hutang tahun 2022
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	7,00	1.100.000.000		-							-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	8,00	800.000.000		-							-	-	-	-	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	13,26						
										Predikat kinerja	(ST)	(SR)						
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kegiatan Perencanaan tata ruang daerah Kabupaten/kota yang dilaksanakan**	**%**	**50,00**	**2.400.000.000**	**50,00**	**452.700.200**	**-**	**414.001.270**	**-**	**199.325.270**	**-**	**48,15**	**25,00**	**652.025.470**	**50,00**	**27,17**	DPUTRPRKP	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	44,00	1.000.000.000	1,00	452.700.200	2,00	414.001.270	1,00	199.325.270	50,00	48,15	2,00	652.025.470	4,55	65,20	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di tw I , II dan III digunakan untuk pembayaran hutang tahun 2022
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	1.000.000.000		-							-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dokumen	4,00	400.000.000		-							-	-	-	-	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	50,00	48,15						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kegiatan Pemanfaatan tata ruang daerah Kabupaten/kota yang dilaksanakan**	**%**	**307,00**	**3.250.000.000**									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dok	5,00	750.000.000		-							-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dok	4,00	2.500.000.000		-							-	-	-	-	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kegiatan Pengendalian tata ruang daerah Kabupaten/kota yang dilaksanakan**	**%**	**20,00**	**8.301.045.800**	**50,00**	**330.033.000**	**25,00**	**220.278.700**	**-**	**18.278.700**	**-**	**8,30**	**25,00**	**348.311.700**	**125,00**	**4,20**	DPUTRPRKP	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	8,00	1.301.045.800	2,00	330.033.000	1,00	20.278.700	-	18.278.700	-	90,14	2,00	348.311.700	25,00	26,77	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di tw I, II dan III digunakan untuk pembayaran hutang tahun 2022

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	5,00	500.000.000		-				-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	5,00	500.000.000		-	6,00	200.000.000		-	-	-	-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus	5,00	6.000.000.000	-	35.630.000				-			-	35.630.000	-	0,59	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	45,07						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**25,00**	**17,43**						
										Predikat kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**68,09**	**59,45**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**SR**	**SR**						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				**73.758.831.136**		**40.000.000**		**750.000.000**		**291.279.900**		**38,84**	**-**	**331.279.900**	**-**	**0,45**	DPUTRPRKP	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni**	**Rumah**	**250,00**	**6.050.000.000**	**-**	**40.000.000**		**-**		**-**			**-**	**40.000.000**	**-**	**0,66**	DPUTRPRKP	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**250,00**	**500.000.000**									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	250,00	500.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Sosialiasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**kegiatan**	**15,00**	**500.000.000**									**-**	**-**	**-**	**-**	DPUTRPRKP	
Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas	orang	350,00	250.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	jumlah kegiatan	dok	350,00	250.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi program kabupaten yang terbangun**	**%**	**26,39**	**3.800.000.000**	**-**	**40.000.000**		**-**	**-**	**-**			**-**	**40.000.000**	**-**	**1,05**	DPUTRPRKP	
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit	25,00	750.000.000	-	40.000.000		-	-	-			-	40.000.000	-	5,33	DPUTRPRKP	
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah yang dibangun	Unit	15,00	1.250.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau	Jumlah dokumen	Dokumen	5,00	500.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah Rumah yang dibangun akibat reolkasi program kabupaten	Unit	15,00	1.300.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah Rumah yang diserahkan**	**unit**	**250,00**	**250.000.000**									**-**	**-**	**-**	**-**	DPUTRPRKP	
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program	Jumlah Rumah	Unit	15,00	250.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Dokumen**	**50,00**	**500.000.000**									**-**	**-**	**-**	**-**	DPUTRPRKP	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah izin	Dokumen	50,00	500.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Kegiatan	Laporan	-	-									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	**Jumlah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**	**Dokumen**	**50,00**	**500.000.000**									**-**	**-**	**-**	**-**	DPUTRPRKP	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Sertifikat	Dokumen	50,00	500.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni**	**%**	**50,00**	**62.008.831.136**		**-**	**26,14**	**750.000.000**	**5,23**	**291.279.900**	**20,00**	**38,84**	**2,61**	**291.279.900**	**5,23**	**0,47**	DPUTRPRKP	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni**	**%**	**50,00**	**62.008.831.136**		**-**	**26,14**	**750.000.000**	**5,23**	**291.279.900**	**20,00**	**38,84**	**5,23**	**291.279.900**	**10,46**	**0,47**	DPUTRPRKP	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	1.550,00	51.209.550.000		-	50,00	750.000.000	10,00	291.279.900	20,00	38,84	10,00	291.279.900	0,65	0,57	DPUTRPRKP	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran	Jumlah Dokumen	Dokumen	625,00	10.799.281.136		-			-	-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	20,00	38,84						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**20,00**	**38,84**						
										Predikat kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase PSU yang ditingkatkan**	**%**	**67,00**	**5.700.000.000**									**-**	**-**	**-**	**-**	DPUTRPRKP	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**%**	**67,00**	**5.700.000.000**									**-**	**-**	**-**	**-**	DPUTRPRKP	
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU	Dokumen	9,00	1.300.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang	Lokasi	8,00	3.850.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari	Dokumen	15,00	550.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**-**	**-**						
										Predikat kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**20,00**	**38,84**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**SR**	**SR**						
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**144.196.092.825**		**11.487.570.459**		**9.212.562.094**		**6.968.362.951**		**75,64**		**18.455.933.410**				
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**144.196.092.825**		**11.487.570.459**		**9.212.562.094**		**6.968.362.951**		**75,64**		**18.455.933.410**		**12,80**	Bakesbangpol	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100,00**	**43.108.251.659**	**100,00**	**5.146.114.541**	**100,00**	**2.688.909.381**	**100,00**	**2.333.322.377**	**100,00**	**86,78**	**100,00**	**7.479.436.918**	**100,00**	**17,35**	Bakesbangpol	
	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	**Persen**	**100,00**		**100,00**		**100,00**	-	-	-	-	-	**50,00**		**50,00**		Bakesbangpol	
	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	**Persen**	**100,00**		**100,00**		**100,00**	-	-	-	-	-	**50,00**		**50,00**		Bakesbangpol	
	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	**Persen**	**100,00**		**100,00**		**100,00**	-	-	-	-	-	**50,00**		**50,00**		Bakesbangpol	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu**	**Persen**	**100,00**	**537.148.100**	**100,00**	**78.179.500**	**100,00**	**22.188.380**	**100,00**	**13.837.000**	**100,00**	**62,36**	**100,00**	**92.016.500**	**100,00**	**17,13**	Bakesbangpol	perencanaan kinerja sesuai target
	Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	**Persen**	**100,00**		**100,00**		**100,00**	-	-	-	-	-	**50,00**		**50,00**		Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	**Persen**	**100,00**		**100,00**		**100,00**	-	-	-	-	-	**50,00**		**50,00**		Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6,00	260.183.300	4,00	42.803.750	6,00	22.188.380	5,00	13.837.000	83,33	62,36	9,00	56.640.750	150,00	21,77	Bakesbangpol	dokumen perencanaan daerah tersusun tepat waktu
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	dokumen	5,00	23.050.000			-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	dokumen	5,00	23.050.000			-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang dilaksanakan	dokumen	5,00	23.050.000			-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	dokumen	5,00	23.050.000			-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25,00	184.764.800	5,00	35.375.750	-	-	-	-			5,00	35.375.750	20,00	19,15	Bakesbangpol	dokumen laporan capaian kinerja dibuat dengan baik
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	83,33	62,36						
										Predikat Kinerja	(T)	(R)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan**	**persen**	**100,00**	**26.431.819.885**	**100,00**	**3.746.281.357**	**100,00**	**1.992.203.048**	**100,00**	**1.805.476.660**	**100,00**	**90,63**	**100,00**	**5.551.758.017**	**100,00**	**21,00**	Bakesbangpol	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	orang	169,00	25.800.053.205	14,00	3.691.662.357	28,00	1.966.007.628	18,00	1.788.131.160	64,29	90,95	32,00	5.479.793.517	18,93	21,24	Bakesbangpol	pengajuan nota dinas gaji selesai tepat waktu
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	dokumen	125,00	90.400.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen hasil penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	60,00	247.840.760	1,00	42.860.000	12,00	24.471.320	10,00	15.763.000	83,33	64,41	11,00	58.623.000	18,33	23,65	Bakesbangpol	Honor Non PNS ada yang dihutangkan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi SKPD yang dilaksanakan	Keg/Laporan	20,00	22.650.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	Laporan	5,00	231.343.920	1,00	11.254.000	1,00	1.396.100	1,00	1.262.500	100,00	90,43	2,00	12.516.500	40,00	5,41	Bakesbangpol	laporan akhir tahun tersusun dengan baik dan tepat waktu
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	dokumen	32,00	5.900.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	73,00	19.902.000	1,00	505.000	18,00	328.000	1,00	320.000	5,56	97,56	2,00	825.000	2,74	4,15	Bakesbangpol	**Disesuaikan dengan realisasi anggaran**
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analaisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Laporan	4,00	13.730.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	63,29	85,84						
										Predikat Kinerja	(R)	(T)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**jenis**	**138,00**	**790.497.000**	**100,00**	**40.744.000**	**138,00**	**22.479.000**	**100,00**	**13.814.000**	**72,46**	**61,45**	**200,00**	**54.558.000**	**144,93**	**6,90**	Bakesbangpol	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	dokumen	8,00	92.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	jenis	24,00	92.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD yang dilaksanakan	kegiatan dan laporan	16,00	92.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	kegiatan dan laporan	16,00	92.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	laporan	52,00	92.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	244.497.000	1,00	40.744.000	12,00	22.479.000	8,00	13.814.000	66,67	61,45	9,00	54.558.000	75,00	22,31	Bakesbangpol	Honor Non PNS ada yang dihutangkan
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD Yang Digunakan	jenis	-	85.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	66,67	61,45						
										Predikat Kinerja	(S)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**Persen**	**100,00**	**989.243.750**	**100,00**	**32.700.000**	**100,00**	**9.000.000**	**25,00**	**2.100.000**	**25,00**	**23,33**	**62,50**	**34.800.000**	**62,50**	**3,52**	Bakesbangpol	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang ditingkatkan	jenis	28,00	132.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	set	128,00	75.983.750	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data administrasi kepegawaian yang dikelola	data	120,00	92.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	48,00	192.160.000	1,00	32.700.000	12,00	9.000.000	3,00	2.100.000	25,00	23,33	4,00	34.800.000	8,33	18,11	Bakesbangpol	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	kegiatan dan laporan	120,00	91.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun yang dipulangkan	orang	4,00	86.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pegawai Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang dipulangkan	orang	4,00	86.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	orang	8,00	91.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	orang	8,00	142.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	25,00	23,33						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**Persen**	**100,00**	**5.759.601.736**	**100,00**	**579.981.096**	**100,00**	**219.321.722**	**100,00**	**158.268.815**	**100,00**	**72,16**	**100,00**	**738.249.911**	**100,00**	**12,82**	Bakesbangpol	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	206,00	123.774.160	6,00	1.134.500	1,00	3.431.298	1,00	2.568.750	100,00	74,86	7,00	3.703.250	3,40	2,99	Bakesbangpol	nota dinas dan spj dilaksanakan tepat waktu
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	18,00	3.587.033.599	67,00	404.798.400	1,00	55.105.082	1,00	50.197.000	100,00	91,09	68,00	454.995.400	377,78	12,68	Bakesbangpol	dokumen pesanan dibuat dengan baik
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	60,00	168.174.587	-	-	15,00	1.874.642	3,00	1.645.000	20,00	87,75	3,00	1.645.000	5,00	0,98	Bakesbangpol	nota dinas dan spj dilaksanakan tepat waktu

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	158.057.690	2,00	27.014.650	2,00	15.872.000	2,00	14.107.250	100,00	88,88	4,00	41.121.900	200,00	26,02	Bakesbangpol	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12,00	121.479.200	7,00	9.670.000	12,00	10.159.200	12,00	5.880.000	100,00	57,88	19,00	15.550.000	158,33	12,80	Bakesbangpol	tersedianya dokumen bahan bacaan
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Paket	24,00	82.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	Laporan	48,00	97.400.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	96,00	1.141.922.500	29,00	83.063.546	130,00	115.479.500	32,00	73.370.815	24,62	63,54	61,00	156.434.361	63,54	13,70	Bakesbangpol	terselenggaranya rapat dan koordinasi dengan baik
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	12,00	147.020.000	1,00	32.700.000	12,00	17.400.000	8,00	10.500.000	66,67	60,34	9,00	43.200.000	75,00	29,38	Bakesbangpol	Honor Non PNS ada yang dihutangkan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	12,00	132.740.000	1,00	21.600.000	-	-	-	-			1,00	21.600.000	8,33	16,27	Bakesbangpol	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	73,04	74,91						
										Predikat Kinerja	(S)	(S)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**Persen**	**100,00**	**6.029.710.000**	**100,00**	**320.800.000**	**100,00**	**150.000.000**	**100,00**	**150.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**470.800.000**	**100,00**	**7,81**	Bakesbangpol	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	unit	32,00	3.365.600.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	unit	12,00	323.800.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang diadakan	jenis/unit	24,00	265.900.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang diadakan	jenis/unit	32,00	110.600.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang diadakan	jenis/unit	4,00	46.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud Yang diadakan	jenis	36,00	91.610.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7,00	1.594.600.000	2,00	320.800.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	100,00	100,00	3,00	470.800.000	42,86	29,52	Bakesbangpol	tersedianya kontrak sewa gedung
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Terpenuhi	jenis/unit	4,00	115.750.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Terpenuhi	jenis/unit	4,00	115.750.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	100,00						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**Persen**	**100,00**	**1.244.109.432**	**100,00**	**219.991.862**	**100,00**	**158.421.875**	**100,00**	**108.387.876**	**100,00**	**68,42**	**100,00**	**328.379.738**	**100,00**	**26,39**	Bakesbangpol	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	593,00	26.816.900	130,00	3.200.000	12,00	2.100.000	9,00	2.020.000	75,00	96,19	139,00	5.220.000	23,44	19,47	Bakesbangpol	nota dinas dan spj dilaksanakan tepat waktu
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00	462.168.547	2,00	57.301.962	12,00	57.000.000	12,00	38.946.376	100,00	68,33	14,00	96.248.338	23,33	20,83	Bakesbangpol	pembayaran yang dilakukan tepat waktu
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pejabat Pengadaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	orang	20,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00	755.123.985	4,00	159.489.900	12,00	99.321.875	12,00	67.421.500	100,00	67,88	16,00	226.911.400	26,67	30,05	Bakesbangpol	nota dinas dan spj dilaksanakan tepat waktu
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	91,67	77,47						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**Persen**	**100,00**	**1.326.121.756**	**85,00**	**127.436.726**	**100,00**	**115.295.356**	**100,00**	**81.438.026**	**100,00**	**70,63**	**92,50**	**208.874.752**	**92,50**	**15,75**	Bakesbangpol	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	36,00	1.081.806.356	4,00	112.214.326	8,00	103.295.356	8,00	73.188.026	100,00	70,85	12,00	185.402.352	33,33	17,14	Bakesbangpol	pembayaran pajak tepat waktu
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit	32,00	90.531.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dikelola	unit	16,00	15.600.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	60,00	41.500.000	11,00	10.928.000	12,00	12.000.000	9,00	8.250.000	75,00	68,75	20,00	19.178.000	33,33	46,21	Bakesbangpol	nota dinas dan SPJ tepat waktu
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dikelola	unit	4,00	15.800.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dikelola	jenis/unit	8,00	21.400.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pemelihraan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	5,00	29.294.400	1,00	4.294.400	-	-	-	-			1,00	4.294.400	20,00	14,66	Bakesbangpol	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	jenis/unit	4,00	19.950.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	jenis/unit	4,00	4.400.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah luasan tanah yang dikelola	unit	4,00	5.840.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	87,50	69,80						
										Predikat Kinerja	(T)	(S)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**78,85**	**63,43**						
										Predikat Kinerja	**(T)**	**(R)**						
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Presentase Masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan**	**Persen**	**69,00**	**6.864.784.428**	**67,00**	**71.673.750**	**71,00**	**1.178.235.183**	**59,70**	**807.113.474**	**84,08**	**68,50**	**63,35**	**878.787.224**	**91,81**	**12,80**	Bakesbangpol	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**dokumen**	**14,00**	**6.864.784.428**	**1,00**	**71.673.750**	**9,00**	**1.178.235.183**	**9,00**	**807.113.474**	**100,00**	**68,50**	**10,00**	**878.787.224**	**71,43**	**12,80**	Bakesbangpol	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	kegiatan	20,00	1.547.046.871	35,00	39.853.750	3,00	249.999.288	-	-	-	-	35,00	39.853.750	175,00	2,58	Bakesbangpol	nota dinas dan SPJ lengkap dan diberikan tepat waktu
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Bela Negara	kegiatan	4,00	126.791.250	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan	orang	500,00	3.870.920.000	-	-	100,00	856.493.595	100,00	742.400.474	100,00	86,68	100,00	742.400.474	20,00	19,18	Bakesbangpol	nota dinas dan SPJ lengkap dan diberikan tepat waktu
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	3.000,00	1.048.124.557	150,00	31.820.000	900,00	71.742.300	34,00	64.713.000	3,78	90,20	184,00	96.533.000	6,13	9,21	Bakesbangpol	nota dinas dan SPJ lengkap dan diberikan tepat waktu
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pemahaman Peserta dalam Memahami Ideologi Wawasan Kebangsaan	orang/kegiatan	1.200,00	156.051.750	-	-	-	-										Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	30,00	115.850.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	34,59	58,96						
										Predikat Kinerja	(SR)	(R)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**68,50**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(S)**						
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Persentase masyarakat yang memahami tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persen**	**75,00**	**2.153.777.116**	**70,00**	**384.110.000**	**78,00**	**224.755.000**	**59,70**	**147.358.000**	**76,54**	**65,56**	**64,85**	**531.468.000**	**86,47**	**24,68**	Bakesbangpol	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Jumlah Kebijakan Teknis yang Tersusun**	**dokumen**	**1,00**	**2.153.777.116**	**1,00**	**384.110.000**	**6,00**	**224.755.000**	**4,00**	**147.358.000**	**66,67**	**65,56**	**5,00**	**531.468.000**	**500,00**	**24,68**	Bakesbangpol	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Penyusunan Program Kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	kegiatan dan orang	400,00	226.379.072	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	kegiatan dan orang	260,00	121.772.382	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	kegiatan dan orang	150,00	1.319.351.812	30,00	318.965.000	29,00	224.755.000	29,00	147.358.000	100,00	65,56	59,00	466.323.000	39,33	35,34	Bakesbangpol	nota dinas dan SPJ lengkap dan diberikan tepat waktu
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	kegiatan dan orang	1.330,00	434.256.600	50,00	65.145.000	-	-	-	-			50,00	65.145.000	3,76	15,00	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pemahaman Masyarakat tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	laporan	5,00	52.017.250	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	65,56						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**66,67**	**65,56**						
										Predikat Kinerja	**(S)**	**(S)**						
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Presentase Masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri**	**Persen**	**61,00**	**74.582.904.190**	**60,00**	**3.394.910.030**	**63,00**	**3.069.682.000**	**50,00**	**1.661.840.000**	**79,37**	**54,14**	**55,00**	**5.056.750.030**	**90,16**	**6,78**	Bakesbangpol	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**1. Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik 2. Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah 3. Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemantauan Situasi Politik**	**dokumen**	**1,00**	**74.582.904.190**	**1,00**	**3.394.910.030**	**1,00**	**3.069.682.000**	**1,00**	**1.661.840.000**	**100,00**	**54,14**	**2,00**	**5.056.750.030**	**200,00**	**6,78**	Bakesbangpol	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	dokumen	4,00	587.498.960	-	13.750.000	1,00	30.472.000	1,00	30.464.000	100,00	99,97	1,00	44.214.000	25,00	7,53	Bakesbangpol	Terselenggarakannya Pendidikan Politik di Kab. Pangandaran
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, di Bidang Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, di Bidang Pelaksanaan Pemantauan Situasi Politik	dokumen	4,00	216.719.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	30,00	72.505.047.000	1,00	3.265.576.030	8,00	2.939.918.000	8,00	1.539.918.000	100,00	52,38	9,00	4.805.494.030	30,00	6,63	Bakesbangpol	Terfasilitasinya dana hibah Parpol
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik d Daerah	orang	50,00	1.100.000.000	-	115.584.000	-	-	-	-			-	115.584.000	-	10,51	Bakesbangpol	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	5,00	173.639.230	-	-	1,00	99.292.000	1,00	91.458.000	100,00	92,11	1,00	91.458.000	20,00	52,67	Bakesbangpol	nota dinas dan SPJ lengkap dan diberikan tepat waktu

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		100,00	81,49					
										Predikat Kinerja		(ST)	(T)					
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)		**100,00**	**54,14**					
										Predikat Kinerja		**(ST)**	**(R)**					
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Persentase Masyarakat yang memahami tentang pemberdayaan dan pengawasan ormas**	**Persen**	**61,00**	**5.360.596.729**	**60,00**	**67.213.938**	**63,00**	**37.220.000**	**50,00**	**24.400.000**	**79,37**	**65,56**	**55,00**	**91.613.938**	**90,16**	**1,71**	Bakesbangpol	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Jumlah Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**dokumen**	**1,00**	**5.360.596.729**	**1,00**	**67.213.938**	**1,00**	**37.220.000**	**1,00**	**24.400.000**	**100,00**	**65,56**	**2,00**	**91.613.938**	**200,00**	**1,71**	Bakesbangpol	
Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas , dibidang Pemberdayaan Ormas, dibidang Mediasi Sengketa Ormas, dibidang Pengawasan Ormas Asing di Daerah, dibidang Verifikasi dan Pengawasan Ormas	dokumen	4,00	443.177.448	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas , dibidang Pemberdayaan Ormas, dibidang Mediasi Sengketa Ormas, dibidang Pengawasan Ormas Asing di Daerah, dibidang Verifikasi dan Pengawasan Ormas	dokumen	4,00	814.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	392,00	2.949.419.281	1,00	67.213.938	82,00	37.220.000	23,00	24.400.000	28,05	65,56	24,00	91.613.938	6,12	3,11	Bakesbangpol	nota dinas dan SPJ lengkap dan diberikan tepat waktu
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas , dibidang Pemberdayaan Ormas, dibidang Mediasi Sengketa Ormas, dibidang Pengawasan Ormas Asing di Daerah, dibidang Verifikasi dan Pengawasan Ormas	orang	50,00	1.154.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Pendaftaran Ormas yang Terverifikasi, Jumlah Pemberdayaan Ormas yang dilaksanakan, Jumlah Mediasi Sengketa Ormas, Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pengawasan Ormas, Jumlah Pengawasan Ormas Asing di Daerah	laporan	20,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		28,05	65,56					
										Predikat Kinerja		(SR)	(S)					
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)		**100,00**	**65,56**					
										Predikat Kinerja		**(ST)**	**(S)**					
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase pelaksanaan koordinasi kewaspadaan daerah**	**Persen**	**75,00**	**12.125.778.703**	**65,00**	**2.423.548.200**	**75,00**	**2.013.760.530**	**72,00**	**1.994.329.100**	**96,00**	**99,04**	**68,50**	**4.417.877.300**	**91,33**	**36,43**	Bakesbangpol	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**dokumen**	**17,00**	**12.125.778.703**	**1,00**	**2.423.548.200**	**27,00**	**2.013.760.530**	**27,00**	**1.994.329.100**	**100,00**	**99,04**	**28,00**	**4.417.877.300**	**164,71**	**36,43**	Bakesbangpol	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Penyusunan Program Kerja di Bidang Pemantauan Orang Asing	kegiatan	12,00	550.509.568	-	-	4,00	24.442.750	1,00	22.461.400	25,00	91,89	1,00	22.461.400	8,33	4,08	Bakesbangpol	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Penyusunan Bahan Perumusan Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Jumlah Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Penanganan Konflik di Daerah	dokumen	4,00	669.654.282	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	535,00	3.508.369.588	33,00	741.644.000	38,00	576.556.880	33,00	579.414.000	86,84	100,50	66,00	1.321.058.000	12,34	37,65	Bakesbangpol	Disesuaikan dengan realisasi kebutuhan

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	408,00	2.382.823.964	51,00	214.495.000	62,00	490.760.000	62,00	480.096.000	100,00	97,83	113,00	694.591.000	27,70	29,15	Bakesbangpol	nota dinas dan SPJ lengkap dan diberikan tepat waktu
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Bidang Kewaspadaan Dini yang terfasilitasi, Jumlah Kerjasama Intel, Jumlah Penanganan Konflik di Daerah	kali	24,00	63.062.551	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	60,00	4.951.358.750	12,00	1.467.409.200	12,00	922.000.900	12,00	912.357.700	100,00	98,95	24,00	2.379.766.900	40,00	48,06	Bakesbangpol	nota dinas dan SPJ lengkap dan diberikan tepat waktu
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	77,96	97,29						
										Predikat Kinerja	(T)	(ST)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**99,04**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(ST)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**73,39**	**73,26**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(S)**	**(S)**						
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				**120.747.484.114**		**25.963.076.124**		**17.544.852.831**		**13.680.605.749**		**77,98**		**39.643.681.873**		**32,83**		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**120.747.484.114**		**25.963.076.124**		**17.544.852.831**		**13.680.605.749**		**77,98**		**39.643.681.873**		**32,83**	SATPOL PP	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi**	**%**	**100,00**	**28.395.048.187**	**100,00**	**5.673.175.819**	**100,00**	**3.631.219.067**	**100,00**	**3.021.505.562**	**100,00**	**83,21**	**100,00**	**8.694.681.381**	**100,00**	**30,62**	SATPOL PP	
	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	**%**	**100,00**				**100,00**		**75,00**		**75,00**		**37,50**		**37,50**			
	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	**%**	**100,00**				**100,00**		**75,00**		**75,00**		**37,50**		**37,50**			
	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	**%**	**100,00**				**100,00**		**75,00**		**75,00**		**37,50**		**37,50**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu**	**%**	**100,00**	**204.737.000**	**100,00**	**42.000.000**	**100,00**	**21.134.400**	**100,00**	**13.724.300**	**100,00**	**64,94**	**100,00**	**55.724.300**	**100,00**	**27,22**	SATPOL PP	
	Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	**%**	**100,00**				**100,00**		**100,00**		**100,00**		**50,00**		**50,00**			
	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	**%**	**100,00**				**100,00**		**100,00**		**100,00**		**50,00**		**50,00**			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	50,00	204.737.000	18,00	42.000.000	6,00	21.134.400	6,00	13.724.300	100,00	64,94	24,00	55.724.300	48,00	27,22	SATPOL PP	Penundaan Pembayaran Honorarium Non PNS bulan September s.d Desember 2023
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	64,94						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**100,00**	**19.483.181.675**	**100,00**	**3.835.970.969**	**100,00**	**2.364.866.939**	**75,00**	**1.944.098.463**	**75,00**	**82,21**	**87,50**	**5.780.069.432**	**87,50**	**29,67**	SATPOL PP	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	115,00	18.748.159.895	37,00	3.654.995.969	26,00	2.274.726.539	19,00	1.902.611.663	73,08	83,64	56,00	5.557.607.632	48,70	29,64	SATPOL PP	Penundaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS bulan September s.d Desember 2023
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72,00	272.421.780	24,00	72.800.000	24,00	30.290.400	16,00	22.286.800	66,67	73,58	40,00	95.086.800	55,56	34,90	SATPOL PP	Penundaan Pembayaran Honorarium Non PNS bulan September s.d Desember 2023
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6,00	462.600.000	2,00	108.175.000	1,00	59.850.000	1,00	19.200.000	100,00	32,08	3,00	127.375.000	50,00	27,53	SATPOL PP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	79,91	63,10						
										Predikat Kinerja	(T)	(R)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100,00**	**204.536.820**	**100,00**	**42.000.000**	**100,00**	**21.134.400**	**100,00**	**13.714.000**	**100,00**	**64,89**	**100,00**	**55.714.000**	**100,00**	**27,24**	SATPOL PP	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72,00	204.536.820	24,00	42.000.000	12,00	21.134.400	12,00	13.714.000	100,00	64,89	36,00	55.714.000	50,00	27,24	SATPOL PP	Penundaan Pembayaran Honorarium Non PNS bulan September s.d Desember 2023
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	64,89						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**1.459.736.539**	**100,00**	**424.323.550**	**100,00**	**165.719.400**	**100,00**	**159.509.300**	**100,00**	**96,25**	**100,00**	**583.832.850**	**100,00**	**40,00**	SATPOL PP	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	13,00	1.292.279.699	6,00	392.323.550	1,00	148.185.000	1,00	148.185.000	100,00	100,00	7,00	540.508.550	53,85	41,83	SATPOL PP	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	84,00	167.456.840	28,00	32.000.000	30,00	17.534.400	12,00	11.324.300	40,00	64,58	40,00	43.324.300	47,62	25,87	SATPOL PP	Penundaan Pembayaran Honorarium Non PNS bulan September s.d Desember 2023
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	70,00	82,29						
										Predikat Kinerja	(S)	(T)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik**	**%**	**80,00**	**1.268.691.163**	**80,00**	**156.361.389**	**80,00**	**122.511.727**	**80,00**	**114.548.364**	**100,00**	**93,50**	**80,00**	**270.909.753**	**100,00**	**21,35**	SATPOL PP	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24,00	19.186.066	8,00	3.054.500	4,00	3.497.767	4,00	2.943.000	100,00	84,14	12,00	5.997.500	50,00	31,26	SATPOL PP	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	261,00	266.146.668	101,00	50.472.000	40,00	40.000.000	40,00	40.000.000	100,00	100,00	141,00	90.472.000	54,02	33,99	SATPOL PP	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15,00	63.999.732	3,00	11.926.300	3,00	12.999.960	3,00	7.212.500	100,00	55,48	6,00	19.138.800	40,00	29,90	SATPOL PP	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	102,00	96.234.000	34,00	28.865.000	17,00	16.014.000	17,00	14.580.000	100,00	91,05	51,00	43.445.000	50,00	45,15	SATPOL PP	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	195,00	823.124.697	20,00	62.043.589	35,00	50.000.000	65,00	49.812.864	185,71	99,63	85,00	111.856.453	43,59	13,59	SATPOL PP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	117,14	86,06						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi**	**%**	**75,00**	**1.260.000.000**	**75,00**	**250.000.000**	**75,00**	**200.000.000**	**75,00**	**200.000.000**	**100,00**	**100,00**	**75,00**	**450.000.000**	**100,00**	**35,71**	SATPOL PP	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	1.260.000.000	2,00	250.000.000	1,00	200.000.000	2,00	200.000.000	200,00	100,00	4,00	450.000.000	40,00	35,71	SATPOL PP	Realisasi Kinerja melebihi target kinerja dikarenakan sewa untuk Pos Damkar
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	200,00	100,00						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**100,00**	**2.099.700.429**	**100,00**	**471.989.265**	**100,00**	**515.518.624**	**100,00**	**343.572.335**	**100,00**	**66,65**	**100,00**	**815.561.600**	**100,00**	**38,84**	SATPOL PP	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72,00	18.437.500	15,00	3.275.000	12,00	1.400.000	5,00	1.050.000	41,67	75,00	20,00	4.325.000	27,78	23,46	SATPOL PP	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72,00	535.139.000	24,00	90.893.365	12,00	74.934.000	12,00	59.837.735	100,00	79,85	36,00	150.731.100	50,00	28,17	SATPOL PP	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00	1.546.123.929	24,00	377.820.900	12,00	439.184.624	12,00	282.684.600	100,00	64,37	36,00	660.505.500	50,00	42,72	SATPOL PP	Penundaan Pembayaran Honorarium Non PNS bulan September s.d Desember 2023
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	80,56	73,07						
										Predikat Kinerja	(T)	(S)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**100,00**	**2.414.464.561**	**100,00**	**450.530.646**	**100,00**	**220.333.577**	**90,00**	**232.338.800**	**90,00**	**105,45**	**95,00**	**682.869.446**	**95,00**	**28,28**	SATPOL PP	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	51,00	459.497.934	19,00	8.476.300	7,00	80.890.577	7,00	75.337.800	100,00	93,14	26,00	83.814.100	50,98	18,24	SATPOL PP	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30,00	1.259.431.828	5,00	2.961.700	7,00	122.193.000	7,00	143.536.000	100,00	117,47	12,00	146.497.700	40,00	11,63	SATPOL PP	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	110,00	695.534.799	50,00	439.092.646	26,00	17.250.000	25,00	13.465.000	96,15	78,06	75,00	452.557.646	68,18	65,07	SATPOL PP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	98,72	96,22						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**95,63**	**84,24**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(T)**						
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)**	**%**	**100,00**	**79.144.385.680**	**100,00**	**19.937.100.305**	**100,00**	**11.375.159.148**	**100,00**	**8.273.099.869**	**100,00**	**72,73**	**100,00**	**28.210.200.174**	**100,00**	**35,64**	SATPOL PP	
	Persentase capaian SPM trantibum	**%**	**61,00**				**58,00**		**58,00**		**100,00**		**29,00**		**47,54**		SATPOL PP	
Penangananan Ganguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penanganan Gangguan Kantrantibum**	**%**	**100,00**	**72.275.653.524**	**100,00**	**16.260.750.655**	**100,00**	**10.295.411.182**	**100,00**	**7.238.963.738**	**100,00**	**70,31**	**100,00**	**23.499.714.393**	**100,00**	**32,51**	SATPOL PP	
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus	600,00	65.159.936.974	113,00	15.994.620.655	70,00	9.719.770.682	82,00	7.008.193.738	117,14	72,10	195,00	23.002.814.393	32,50	35,30	SATPOL PP	Penundaan Pembayaran Honorarium Non PNS bulan September s.d Desember 2023
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	75,00	1.153.981.450	-	-	20,00	108.010.000	3,00	22.610.000	15,00	20,93	3,00	22.610.000			SATPOL PP	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dokumen	4,00	1.022.897.100	-	-	2,00	259.470.500		-	-	-	-	-			SATPOL PP	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	orang	1.900,00	4.938.838.000	189,00	266.130.000	150,00	208.160.000	100,00	208.160.000	66,67	100,00	289,00	474.290.000	15,21	9,60	SATPOL PP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	49,70	48,26						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati**	**%**	**75,00**	**6.768.732.156**	**33,30**	**3.676.349.650**	**100,00**	**1.047.447.966**	**100,00**	**1.001.836.131**	**100,00**	**95,65**	**66,65**	**4.678.185.781**	**88,87**	**69,11**	SATPOL PP	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	6,00	801.610.476	1,00	181.076.650	2,00	263.420.580	2,00	263.170.000	100,00	99,90	1,50	444.246.650			SATPOL PP	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	12,00	275.001.650	5,00	53.463.000	4,00	37.695.450	4,00	34.700.000	100,00	92,05	9,00	88.163.000	75,00	32,06	SATPOL PP	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	72,00	5.692.120.030	22,00	3.441.810.000	12,00	746.331.936	12,00	703.966.131	100,00	94,32	34,00	4.145.776.131	47,22	72,83	SATPOL PP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	95,43						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Persentase Pembinaan PPNS**	**%**	**5,00**	**100.000.000**	**-**	**-**	**5,00**	**32.300.000**	**2,50**	**32.300.000**	**50,00**	**100,00**	**1,25**	**32.300.000**	**25,00**		SATPOL PP	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1,00	100.000.000	-	-	1,00	32.300.000	1,00	32.300.000	100,00	100,00	0,50	32.300.000			SATPOL PP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	100,00						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**83,33**	**88,65**						
										Predikat Kinerja	**(T)**	**(T)**						
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**%**	**100,00**	**13.208.050.247**	**100,00**	**352.800.000**	**100,00**	**2.538.474.616**	**100,00**	**2.386.000.318**	**100,00**	**93,99**	**100,00**	**2.738.800.318**	**100,00**		SATPOL PP	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase/Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**100,00**	**12.998.050.227**	**100,00**	**352.800.000**	**100,00**	**2.488.474.596**	**100,00**	**2.336.000.298**	**100,00**	**93,87**	**100,00**	**2.688.800.298**	**100,00**		SATPOL PP	
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	dokumen	60,00	3.019.358.600	9,00	352.800.000	4,00	480.055.196	4,00	353.525.298	100,00	73,64	6,50	706.325.298				
Pengadaan Sarana danPrasarana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	unit	373,00	9.978.691.627	-	-	3,00	2.008.419.400	3,00	1.982.475.000	100,00	98,71	1,50	1.982.475.000				
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	86,18						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Persentase/Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**%**	**100,00**	**210.000.020**	**-**	**-**	**100,00**	**50.000.020**	**100,00**	**50.000.020**	**100,00**	**100,00**	**50,00**	**50.000.020**	**50,00**			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	200,00	210.000.020	-	-	200,00	50.000.020	200,00	50.000.020	100,00	100,00	100,00	50.000.020				
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	100,00						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**96,94**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(ST)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**100,00**	**83,31**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(T)**						
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**52.998.816.621**		**15.255.349.418**		**13.303.617.835**		**10.108.157.550**		**75,98**		**25.363.506.968**		**47,86**	BPBD	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas**	**%**	**100,00**	**25.300.459.054**	**1,00**	**4.805.384.793**	**100,00**	**3.438.043.507**	**95,00**	**2.333.961.675**	**95,00**	**67,89**	**48,00**	**7.139.346.468**	**48,00**	**28,22**	BPBD	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase Dokumen Penganggaran Kinerja Yang Disusun Tepat waktu 3. Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Yang disusun Tepat Waktu**	**%**	**100,00**	**286.280.000**	**1,00**	**67.350.000**	**100,00**	**38.668.800**	**100,00**	**26.524.384**	**100,00**	**68,59**	**50,50**	**93.874.384**	**50,50**	**32,79**	BPBD	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	24,00	156.000.000	5,00	39.450.000	4,00	21.134.400	4,00	14.537.192	100,00	68,78	9,00	53.987.192	37,50	34,61	BPBD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian penyusunan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25,00	130.280.000	5,00	27.900.000	5,00	17.534.400	4,00	11.987.192	80,00	68,36	9,00	39.887.192	36,00	30,62	BPBD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	90,00	68,57						
										Predikat Kinerja	(T)	(S)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**100,00**	**15.870.416.801**	**1,00**	**3.142.248.253**	**100,00**	**2.273.403.900**	**100,00**	**1.620.230.724**	**100,00**	**71,27**	**50,50**	**4.762.478.977**	**50,50**	**30,01**	BPBD	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Orang	102,00	15.667.916.801	41,00	3.102.798.253	17,00	2.252.269.500	17,00	1.605.693.532	100,00	71,29	58,00	4.708.491.785	56,86	30,05	BPBD	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	72,00	156.000.000	24,00	39.450.000	12,00	21.134.400	12,00	14.537.192	100,00	68,78	36,00	53.987.192	50,00	34,61	BPBD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	30,00	46.500.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	BPBD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	70,04						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100,00**	**157.700.000**	**1,00**	**39.450.000**	**100,00**	**21.134.400**	**100,00**	**14.537.192**	**100,00**	**68,78**	**50,50**	**53.987.192**	**50,50**	**34,23**	BPBD	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	Jenis	72,00	157.700.000	13,00	39.450.000	12,00	21.134.400	12,00	14.537.192	100,00	68,78	25,00	53.987.192	34,72	34,23	BPBD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	68,78						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**642.159.621**	**1,00**	**32.700.000**	**100,00**	**123.466.600**	**60,00**	**11.987.192**	**60,00**	**9,71**	**30,50**	**44.687.192**	**30,50**	**6,96**	BPBD	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Paket	250,00	279.179.621	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BPBD	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokemen	114,00	65.500.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	BPBD	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	Dokemen	72,00	137.480.000	13,00	32.700.000	12,00	123.466.600	12,00	11.987.192	100,00	9,71	25,00	44.687.192	34,72	32,50	BPBD	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20,00	160.000.000	-	-	-	-										
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	9,71						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**1.591.506.949**	**1,00**	**255.306.392**	**100,00**	**172.013.037**	**100,00**	**142.704.406**	**100,00**	**82,96**	**50,50**	**398.010.798**	**50,50**	**25,01**	BPBD	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	117,00	206.995.998	16,00	13.137.900	20,00	5.101.951	20,00	16.187.300	100,00	317,28	36,00	29.325.200	30,77	14,17	BPBD	Penambahan anggaran untuk instalasi jaringan listrik kantor yang sudah rusak
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Paket	35,00	357.916.562	54,00	63.303.000	4,00	32.590.589	4,00	23.354.188	100,00	71,66	58,00	86.657.188	165,71	24,21	BPBD	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	213,00	96.984.681	-	-	25,00	16.999.237	19,00	27.382.399	76,00	161,08	19,00	27.382.399	8,92	28,23	BPBD	Penyediaan peralatan untuk penanganan kebakaran di TPA Purbahayu

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	18,00	112.622.750	2.276,00	22.692.950	4,00	7.304.060	4,00	5.120.060	100,00	70,10	2.280,00	27.813.010	########	24,70	BPBD	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	133,00	118.690.000	79,00	18.642.500	21,00	17.277.200	20,00	11.620.000	95,24	67,26	99,00	30.262.500	74,44	25,50	BPBD	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan	202,00	698.296.958	37,00	137.530.042	20,00	92.740.000	20,00	59.040.459	100,00	63,66	57,00	196.570.501	28,22	28,15	BPBD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	95,21	125,17						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**%**	**100,00**	**2.117.833.484**	**1,00**	**309.246.910**	**100,00**	**358.380.000**	**50,00**	**140.000.000**	**50,00**	**39,06**	**25,50**	**449.246.910**	**25,50**	**21,21**	BPBD	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	unit	4,00	666.333.484	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BPBD	
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	unit	5,00	120.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BPBD	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	unit	55,00	245.000.000	-	-	10,00	108.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit	12,00	1.086.500.000	2,00	309.246.910	2,00	249.500.000	2,00	140.000.000	100,00	56,11	4,00	449.246.910	33,33	41,35	BPBD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	50,00	28,06						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**100,00**	**2.037.362.000**	**1,00**	**442.559.103**	**100,00**	**283.522.000**	**100,00**	**179.292.597**	**100,00**	**63,24**	**50,50**	**621.851.700**	**50,50**	**30,52**	BPBD	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Laporan	3.450,00	105.500.000	2.045,00	17.210.000	12,00	6.000.000	5,00	2.700.000	41,67	45,00	2.050,00	19.910.000	59,42	18,87	BPBD	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Laporan	36,00	1.045.100.000	16,00	238.281.514	12,00	165.850.000	12,00	101.452.547	100,00	61,17	28,00	339.734.061	77,78	32,51	BPBD	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	72,00	886.762.000	24,00	187.067.589	12,00	111.672.000	12,00	75.140.050	100,00	67,29	36,00	262.207.639	50,00	29,57	BPBD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	80,56	57,82						
										Predikat Kinerja	(T)	(R)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**100,00**	**2.597.200.199**	**1,00**	**516.524.135**	**100,00**	**167.454.770**	**60,00**	**198.685.180**	**60,00**	**118,65**	**30,50**	**715.209.315**	**30,50**	**27,54**	BPBD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit	119,00	2.003.453.199	39,00	469.469.635	20,00	156.204.770	20,00	192.358.180	100,00	123,14	59,00	661.827.815	49,58	33,03	BPBD	Untuk BBN kendaraan dinas sebanyak 4 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	unit	25,00	173.750.000	22,00	37.330.000	4,00	11.250.000	4,00	6.327.000	100,00	56,24	26,00	43.657.000	104,00	25,13	BPBD	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	unit	17,00	419.997.000	3,00	9.724.500		-	-	-			3,00	9.724.500	17,65	2,32	BPBD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	89,69						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**83,75**	**65,28**						
										Predikat Kinerja	**(T)**	**(S)**						
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase Penanggulangan Bencana**	**%**	**100,00**	**26.837.157.567**	**1,00**	**9.828.364.625**	**100,00**	**9.865.574.328**	**25,00**	**7.774.195.875**	**25,00**	**78,80**	**13,00**	**17.602.560.500**	**13,00**	**65,59**	BPBD	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase/Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**%**	**100,00**	**1.090.812.214**	**1,00**	**269.277.644**	**100,00**	**566.442.000**	**25,00**	**194.250.000**	**25,00**	**34,29**	**13,00**	**463.527.644**	**13,00**	**42,49**	BPBD	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	7,00	463.505.622	1,00	49.581.644	-	-	-	-			1,00	49.581.644	14,29	10,70	BPBD	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang	345,00	627.306.592	3,00	219.696.000	3,00	566.442.000	1,00	194.250.000	33,33	34,29	4,00	413.946.000	1,16	65,99	BPBD	penyerapan Untuk Triwulan 1 sebagai Pembayaran Hutang Tahun 2022
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	33,33	34,29						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Persentase/Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**%**	**100,00**	**10.143.578.647**	**1,00**	**272.777.500**	**100,00**	**6.864.643.918**	**70,00**	**6.582.260.731**	**70,00**	**95,89**	**35,50**	**6.855.038.231**	**35,50**	**67,58**	BPBD	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	2,00	315.685.338	-	-		-	-	-			-	-	-	-	BPBD	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	30,00	253.115.000	-	-	4,00	739.964.080	4,00	612.262.269	100,00	82,74	4,00	612.262.269	13,33	241,89	BPBD	Adanya Penambahan Anggaran DAU khusus Bidang Pendididkan Untuk Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	unit	205,00	6.271.905.000	-	-	1,00	6.010.854.438	1,00	5.874.920.000	100,00	97,74	1,00	5.874.920.000	0,49	93,67	BPBD	Banprov
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Unit	350,00	44.500.000	-	-		-	4,00	37.999.962			4,00	37.999.962	1,14	85,39	BPBD	
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	6,00	272.600.000	5,00	64.000.000		-	-	-			5,00	64.000.000	83,33	23,48	BPBD	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	kegiatan	14,00	254.000.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	BPBD	
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	kegiatan	16,00	656.008.115	10,00	166.360.000		-	-	-			10,00	166.360.000	62,50	25,36	BPBD	
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah enyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen	2,00	736.963.194	-	-		-	-	-			-	-	-	-	BPBD	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	kegiatan	60,00	938.802.000	6,00	42.417.500	4,00	113.825.400	1,00	57.078.500	25,00	50,15	7,00	99.496.000	11,67	10,60	BPBD	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen	2,00	400.000.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	BPBD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	75,00	76,88						
										Predikat Kinerja	(S)	(T)						
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Persentase/Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**%**	**100,00**	**10.516.338.315**	**1,00**	**6.643.059.751**	**100,00**	**1.371.682.260**	**60,00**	**167.194.016**	**60,00**	**12,19**	**30,50**	**6.810.253.767**	**30,50**	**64,76**	BPBD	
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan	4,00	230.000.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	BPBD	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	kejadian	72,00	1.684.731.500	13,00	434.801.640	12,00	229.690.800	12,00	167.194.016	100,00	72,79	25,00	601.995.656	34,72	35,73	BPBD	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kejadian	14,00	170.000.000	-	-	50,00	30.000.080	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	paket	14.700,00	8.171.606.815	2.000,00	6.208.258.111	2.300,00	1.111.991.380	-	-	-	-	2.000,00	6.208.258.111	13,61	75,97	BPBD	
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	posko	5,00	260.000.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	BPBD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	33,33	24,26						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penataan Sistem Dasar penanggulanan Bencana	**Persentase/Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**%**	**100,00**	**5.086.428.391**	**-**	**2.643.249.730**	**100,00**	**1.062.806.150**	**80,00**	**830.491.128**	**80,00**	**78,14**	**40,00**	**3.473.740.858**	**40,00**	**68,29**	BPBD	
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	kegiatan	9,00	2.972.972.600	1,00	2.476.249.730	12,00	841.521.630	12,00	724.706.400	100,00	86,12						Pembayaran Bimtek trauma hiling dan HRNA(Human Recovery Needs Assesment)
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	48,00	789.268.604	-	-		-	-	-			-	-	-	-	BPBD	
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	informasi	60,00	1.104.800.000	12,00	167.000.000	12,00	221.284.520	12,00	105.784.728	100,00	47,80	24,00	272.784.728	40,00	24,69	BPBD	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	kegiatan	5,00	219.387.187	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BPBD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	66,96						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**58,75**	**55,13**						
										Predikat Kinerja	**(R)**	**(R)**						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**PERSENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**%**	**100,00**	**861.200.000**	**1,00**	**621.600.000**		**-**	**-**	**-**			**0,50**	**621.600.000**	**0,50**	**72,18**	BPBD	Program damkar telah tidak ada dan telah berpindah ke satpol PP
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase/Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**100,00**	**861.200.000**	**1,00**	**621.600.000**		**-**	**-**	**-**			**0,50**	**621.600.000**	**0,50**	**72,18**	BPBD	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	2,00	861.200.000	30,00	621.600.000		-	-	-			30,00	621.600.000	1.500,00	72,18	BPBD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**60,00**	**73,34**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(R)**	**(S)**						
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**321.341.151.400**		**23.362.579.396**		**14.950.989.490**		**10.773.324.759**		**72,06**		**34.135.904.155**		**10,62**	Dinsos PMD	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				**102.077.324.904**		**15.069.073.695**		**10.569.442.539**		**7.386.487.660**		**69,89**		**22.455.561.355**		**22,00**	Dinsos PMD	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi**	**%**	**95,00**	**33.924.302.262**	**90,00**	**5.011.137.779**	**92,00**	**3.603.032.814**	**92,00**	**2.617.216.220**	**100,00**	**72,64**	**91,00**	**7.628.353.999**	**95,79**	**22,49**	Dinsos PMD	
	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	**%**	**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**	-	**100,00**		Dinsos PMD	
	3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	**%**	**95,00**	-	**90,00**	-	**92,00**		**92,00**		**100,00**		**91,00**	-	**95,79**		Dinsos PMD	
	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	**%**	**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**	-	**100,00**		Dinsos PMD	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu**	**%**	**100,00**	**483.192.548**	**100,00**	**79.548.000**	**100,00**	**20.534.400**	**100,00**	**12.750.000**	**100,00**	**62,09**	**100,00**	**92.298.000**	**100,00**	**19,10**	Dinsos PMD	
	2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	**%**	**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**	-	**100,00**		Dinsos PMD	
	3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	**%**	**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**	-	**100,00**		Dinsos PMD	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14,00	483.192.548	4,00	79.548.000	2,00	20.534.400	2,00	12.750.000	100,00	62,09	6,00	92.298.000	42,86	19,10	Dinsos PMD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	62,09						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**100,00**	**19.003.732.389**	**100,00**	**3.935.595.440**	**100,00**	**2.826.944.523**	**100,00**	**2.021.042.012**	**100,00**	**71,49**	**100,00**	**5.956.637.452**	**100,00**	**31,34**	Dinsos PMD	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	Orang	111,00	18.590.921.841	36,00	3.834.259.440	21,00	2.789.475.723	21,00	1.997.792.012	100,00	71,62	57,00	5.832.051.452	51,35	31,37	Dinsos PMD	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	7,00	412.810.548	24,00	101.336.000	12,00	37.468.800	12,00	23.250.000	100,00	62,05	36,00	124.586.000	514,29	30,18	Dinsos PMD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	66,84						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**Jenis**	**8,00**	**377.248.970**	**8,00**	**40.948.000**	**8,00**	**20.534.400**	**8,00**	**12.750.000**	**100,00**	**62,09**	**8,00**	**53.698.000**	**100,00**	**14,23**	Dinsos PMD	
		Unit/ Buah	**278,00**	-	**298,00**	-	**278,00**		**278,00**		**100,00**		**298,00**	-	**107,19**		Dinsos PMD	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	Dokumen	7,00	179.627.500	-	-		-									Dinsos PMD	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	84,00	197.621.470	12,00	40.948.000	12,00	20.534.400	12,00	12.750.000	100,00	62,09	12,00	53.698.000	14,29	27,17	Dinsos PMD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	62,09						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**202.155.281**	**100,00**	**33.400.000**	**100,00**	**16.934.400**	**100,00**	**10.500.000**	**100,00**	**62,00**	**100,00**	**43.900.000**	**100,00**	**21,72**	Dinsos PMD	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	7,00	202.155.281	2,00	33.400.000	1,00	16.934.400	1,00	10.500.000	100,00	62,00	3,00	43.900.000	42,86	21,72	Dinsos PMD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	62,00						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**96,00**	**2.695.332.573**	**90,00**	**240.560.000**	**94,00**	**210.164.304**	**94,00**	**131.085.075**	**100,00**	**62,37**	**92,00**	**371.645.075**	**95,83**	**13,79**	Dinsos PMD	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7,00	77.084.905	2,00	1.901.217	1,00	2.597.834	1,00	2.513.000	100,00	96,73	3,00	4.414.217	42,86	5,73	Dinsos PMD	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Paket	7,00	896.184.262	2,00	128.159.491	1,00	103.518.887	1,00	63.475.500	100,00	61,32	3,00	191.634.991	42,86	21,38	Dinsos PMD	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Paket	7,00	99.869.213	1,00	2.493.649	1,00	2.493.647	1,00	2.490.800	100,00	99,89	2,00	4.984.449	28,57	4,99	Dinsos PMD	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7,00	125.826.983	2,00	4.971.628	1,00	2.507.880	1,00	1.740.000	100,00	69,38	3,00	6.711.628	42,86	5,33	Dinsos PMD	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	7,00	247.764.372	2,00	48.389.000	1,00	25.174.800	1,00	16.940.000	100,00	67,29	3,00	65.329.000	42,86	26,37	Dinsos PMD	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	690,00	1.248.602.839	67,00	54.645.015	80,00	73.871.256	40,00	43.925.775	50,00	59,46	107,00	98.570.790	15,51	7,89	Dinsos PMD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	91,67	75,68						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**%**	**100,00**	**7.501.625.114**	**100,00**	**144.000.000**	**100,00**	**230.000.000**	**100,00**	**225.200.000**	**100,00**	**97,91**	**100,00**	**369.200.000**	**100,00**	**4,92**	Dinsos PMD	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	11,00	827.400.000	-	-		-					-	-	-	-	Dinsos PMD	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	34,00	2.717.353.614	-	-		-					-	-	-	-	Dinsos PMD	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	3.746.871.500	1,00	288.000.000	1,00	230.000.000	1,00	225.200.000	100,00	97,91	1,00	513.200.000	100,00	13,70	Dinsos PMD	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	2,00	210.000.000	-	-							-	-	-	-	Dinsos PMD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	97,91						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**100,00**	**1.807.526.028**	**100,00**	**268.367.486**	**100,00**	**146.911.200**	**100,00**	**99.908.781**	**100,00**	**68,01**	**100,00**	**368.276.267**	**100,00**	**20,37**	Dinsos PMD	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	84,00	68.051.000	24,00	2.000.000	12,00	2.000.000	3,00	500.000	25,00	25,00	27,00	2.500.000	32,14	3,67	Dinsos PMD	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	84,00	720.165.920	12,00	84.567.486	12,00	62.495.200	9,00	50.908.781	75,00	81,46	12,00	135.476.267	14,29	18,81	Dinsos PMD	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00	1.019.309.108	15,00	181.800.000	12,00	82.416.000	12,00	48.500.000	100,00	58,85	27,00	230.300.000	37,50	22,59	Dinsos PMD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	66,67	55,10						
										Predikat Kinerja	(S)	(R)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**90,00**	**1.853.489.360**	**80,00**	**124.718.853**	**84,00**	**131.009.587**	**84,00**	**103.980.352**	**100,00**	**79,37**	**82,00**	**228.699.205**	**91,11**	**12,34**	Dinsos PMD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2,00	556.924.376	2,00	67.897.677	2,00	60.012.258	2,00	45.441.116	100,00	75,72	2,00	113.338.793	100,00	20,35	Dinsos PMD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11,00	961.280.984	21,00	46.940.276	11,00	64.993.259	11,00	52.607.236	100,00	80,94	11,00	99.547.512	100,00	10,36	Dinsos PMD	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	Unit	7,00	132.102.000	13,00	5.276.400	7,00	3.000.000	7,00	3.000.000	100,00	100,00	7,00	8.276.400	100,00	6,27	Dinsos PMD	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	203.182.000	2,00	4.604.500	1,00	3.004.070	1,00	2.932.000	100,00	97,60	1,00	7.536.500	100,00	3,71	Dinsos PMD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	88,57						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**70,67**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(S)**						
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**%**	**80,00**	**4.618.045.791**	**110,00**	**153.990.145**	**60,00**	**201.900.000**	**45,00**	**39.700.000**	**75,00**	**19,66**	**77,50**	**193.690.145**	**96,88**	**4,19**	Dinsos PMD	
	Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	**%**	**100,00**	**-**	**150,00**	**-**	**80,00**		**60,00**		**75,00**		**105,00**	**-**	**105,00**		Dinsos PMD	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS**	**Orang**	**13,00**	**4.618.045.791**	**13,00**	**153.990.145**	**13,00**	**201.900.000**	**13,00**	**39.700.000**	**100,00**	**19,66**	**13,00**	**193.690.145**	**100,00**	**4,19**	Dinsos PMD	
	Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	**Lembaga**	**1,00**	**-**	**2,00**	**-**	**1,00**		**1,00**		**100,00**		**1,00**	**-**	**100,00**		Dinsos PMD	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	13,00	1.316.791.039	13,00	153.990.145	13,00	72.000.000	13,00	24.000.000	100,00	33,33	13,00	177.990.145	100,00	13,52	Dinsos PMD	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	1,00	3.301.254.752	-	-	1,00	129.900.000	1,00	15.700.000	100,00	12,09	1,00	15.700.000	100,00	0,48	Dinsos PMD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	22,71						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**19,66**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(SR)**						
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**	**%**	**48,20**	**42.477.621.000**	**16,00**	**4.508.696.927**	**8,00**	**2.900.983.600**	**8,00**	**2.314.790.404**	**100,00**	**79,79**	**12,00**	**6.823.487.331**	**24,90**	**16,06**	Dinsos PMD	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina**	**Orang**	**6.834,00**	**5.793.918.499**	**1.219,00**	**641.530.927**	**1.124,00**	**835.213.800**	**1.124,00**	**951.105.404**	**100,00**	**113,88**	**2.343,00**	**1.592.636.331**	**34,28**	**27,49**	Dinsos PMD	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5.954,00	2.072.071.000	1.190,00	407.564.560	924,00	33.868.800	924,00	197.696.904	100,00	583,71	2.114,00	605.261.464	35,51	29,21	Dinsos PMD	Adanya penambahan angagran untuk percepat penurunan stunting
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	205,00	333.433.339	29,00	33.944.867	20,00	38.254.000	20,00	22.593.750	100,00	2,96	49,00	56.538.617	23,90	16,96	Dinsos PMD	
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.233,00	3.388.414.160	110,00	200.021.500	180,00	763.091.000	180,00	730.814.750	100,00	95,77	290,00	930.836.250	23,52	27,47	Dinsos PMD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	227,48						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina**	**KK**	**1.100,00**	**36.683.702.501**	**185,00**	**3.867.166.000**	**100,00**	**2.065.769.800**	**100,00**	**1.363.685.000**	**100,00**	**66,01**	**285,00**	**5.230.851.000**	**25,91**	**14,26**	Dinsos PMD	PADA RKPD PENETAPAN TARGET KINERJA 150 KK
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.155,00	368.710.803	185,00	34.800.000	100,00	48.869.800	100,00	23.685.000	100,00	48,47	285,00	58.485.000	24,68	15,86	Dinsos PMD	
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	6,00	36.314.991.698	2,00	3.832.366.000	1,00	2.016.900.000	1,00	1.340.000.000	100,00	66,44	3,00	5.172.366.000	50,00	14,24	Dinsos PMD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	57,45						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**89,94**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(T)**						
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Presentase Keluarga Miskin yang Meningkat Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik**	**%**	**60,00**	**11.563.279.065**	**20,00**	**4.746.840.129**	**10,00**	**3.234.764.910**	**10,00**	**2.177.777.536**	**100,00**	**67,32**	**15,00**	**6.924.617.665**	**25,00**	**59,88**	Dinsos PMD	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan**	**Dokumen**	**7,00**	**11.563.279.065**	**2,00**	**4.746.840.129**	**1,00**	**3.234.764.910**	**1,00**	**2.177.777.536**	**100,00**	**67,32**	**3,00**	**6.924.617.665**	**42,86**	**59,88**	Dinsos PMD	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	22.711,00	4.899.226.928	17.064,00	812.185.689	########	402.000.000	17.064,00	134.000.000	100,00	33,33	34.128,00	946.185.689	150,27	19,31	Dinsos PMD	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	139.955,00	5.664.052.137	105.151,00	359.764.340	########	403.250.010	105.151,00	191.044.000	100,00	47,38	########	550.808.340	150,26	9,72	Dinsos PMD	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	1.500,00	1.000.000.000	19.320,00	3.574.890.100	616,00	2.429.514.900	616,00	1.852.733.536	100,00	76,26	19.936,00	5.427.623.636			Dinsos PMD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	52,32						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**67,32**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(S)**						
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup**	**%**	**100,00**	**8.538.547.418**	**100,00**	**545.045.564**	**100,00**	**524.876.765**	**100,00**	**176.236.000**	**100,00**	**33,58**	**100,00**	**721.281.564**	**100,00**	**8,45**	Dinsos PMD	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Jumlah perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang tertangani**	**KK**	**2.500,00**	**1.658.500.000**	-	-	**500,00**	-			-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2.500,00	829.250.000	-	-							-	-	-	-	Dinsos PMD	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2.500,00	829.250.000	-	-		-					-	-	-	-	Dinsos PMD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina**	**Desa**	**14,00**	**6.880.047.418**	**4,00**	**710.163.460**	**2,00**	**524.876.765**	**2,00**	**176.236.000**	**100,00**	**33,58**	**6,00**	**886.399.460**	**42,86**	**12,88**	Dinsos PMD	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	471,00	6.880.047.418	116,00	710.163.460	61,00	524.876.765	61,00	176.236.000	100,00	33,58	177,00	886.399.460	37,58	12,88	Dinsos PMD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											100,00	33,58						
Predikat Kinerja											(ST)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)											**100,00**	**33,58**						
Predikat Kinerja											**(ST)**	**(SR)**						
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola**	**%**	**100,00**	**955.529.368**	**100,00**	**103.363.151**	**100,00**	**103.884.450**	**100,00**	**60.767.500**	**100,00**	**58,50**	**100,00**	**164.130.651**	**100,00**	**17,18**	Dinsos PMD	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**Taman Makam**	**1,00**	**955.529.368**	**1,00**	**103.363.151**	**1,00**	**103.884.450**	**1,00**	**60.767.500**	**100,00**	**58,50**	**1,00**	**164.130.651**	**100,00**	**17,18**	Dinsos PMD	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	31,00	955.529.368	1,00	103.363.151	31,00	103.884.450	31,00	60.767.500	100,00	58,50	1,00	164.130.651	3,23	17,18	Dinsos PMD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											100,00	58,50						
Predikat Kinerja											(ST)	(R)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)											**100,00**	**58,50**						
Predikat Kinerja											**(ST)**	**(R)**						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)											**95,00**	**52,83**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											**(ST)**	**(R)**						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**219.263.826.496**	**-**	**8.293.505.701**		**4.381.546.951**		**3.386.837.099**		**77,30**	**-**	**11.680.342.800**		**5,33**	Dinsos PMD	
Program Penataan Desa	**Presentase penataan desa**	**%**	**70,00**	**1.052.893.000**	**-**	**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	Dinsos PMD	
Penyelenggaraan Penataan Desa	**Jumlah Desa yang di tata**	**Desa**	**93,00**	**1.052.893.000**	**-**	**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	Dinsos PMD	
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	93,00	255.255.000	-	-		-					-	-	-	-	Dinsos PMD	
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	93,00	403.153.000	-	-		-					-	-	-	-	Dinsos PMD	
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	93,00	394.485.000	-	-		-					-	-	-	-	Dinsos PMD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)											**-**	**-**						
Predikat Kinerja											**(SR)**	**(SR)**						
Program Peningkatan Kerjasama Desa	**Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa**	**%**	**20,00**	**94.658.500.000**	**-**	**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	Dinsos PMD	
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	**Jumlah Fasilitasi Kerjsama Desa**	**Desa**	**24,00**	**94.658.500.000**	**-**	**-**		**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	Dinsos PMD	
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	458.500.000	-	-		-					-	-	-	-	Dinsos PMD	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	94.200.000.000	-	-							-	-	-	-	Dinsos PMD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)											**-**	**-**						
Predikat Kinerja											**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib**	**%**	**70,00**	**57.808.777.921**	**100,00**	**692.326.365**	**55,00**	**840.225.766**	**55,00**	**395.354.600**	**100,00**	**47,05**	**77,50**	**1.087.680.965**	**110,71**	**1,88**	Dinsos PMD	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Desa**	**93,00**	**57.808.777.921**	**93,00**	**692.326.365**	**93,00**	**840.225.766**	**93,00**	**395.354.600**	**100,00**	**47,05**	**93,00**	**1.087.680.965**	**100,00**	**1,88**	Dinsos PMD	
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	7,00	1.172.323.061	-	-	1,00	19.750.000	1,00	17.650.000	100,00	89,37	1,00	17.650.000	14,29	1,51	Dinsos PMD	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	5,00	1.364.547.396	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Dinsos PMD	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	6,00	2.450.000.000	-	-	1,00	16.934.400	1,00	10.500.000	100,00	62,00	1,00	10.500.000	16,67	0,43	Dinsos PMD	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	7,00	1.236.802.440	2,00	241.037.500	1,00	426.934.400	1,00	10.500.000	100,00	2,46	3,00	251.537.500	42,86	20,34	Dinsos PMD	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	3.457,00	3.026.462.892	372,00	31.959.000	186,00	30.000.000	186,00	30.000.000	100,00	100,00	558,00	61.959.000	16,14	2,05	Dinsos PMD	
evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	5,00	535.510.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Dinsos PMD	
pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	7,00	40.233.963.896	-	-	1,00	40.000.000	1,00	38.975.000	100,00	97,44	1,00	38.975.000	14,29	0,10	Dinsos PMD	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	93,00	2.900.000.000	17,00	363.859.865	8,00	272.738.166	8,00	266.729.600	100,00	97,80	25,00	630.589.465	26,88	21,74	Dinsos PMD	
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	100,00	280.255.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Dinsos PMD	
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	7,00	862.317.856	2,00	33.400.000	1,00	16.934.400	1,00	10.500.000	100,00	62,00	3,00	43.900.000	42,86	5,09	Dinsos PMD	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	5,00	428.408.000	-	-	1,00	16.934.400	1,00	10.500.000	100,00	62,00	1,00	10.500.000	20,00	2,45	Dinsos PMD	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	465,00	748.300.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Dinsos PMD	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	6,00	2.569.887.380	1,00	22.070.000		-	-	-			1,00	22.070.000	16,67	0,86	Dinsos PMD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	71,63						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**47,05**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(SR)**						
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Presentase Lembaga Kemasyarakat Desa yang aktif**	**%**	**100,00**	**65.743.655.575**	**100,00**	**8.941.184.586**	**100,00**	**3.541.321.185**	**100,00**	**2.991.482.499**	**100,00**	**84,47**	**100,00**	**11.932.667.085**	**100,00**	**18,15**	Dinsos PMD	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina**	**Lembaga**	**5,00**	**65.743.655.575**	**5,00**	**8.941.184.586**	**1,00**	**3.541.321.185**	**2,00**	**2.991.482.499**	**200,00**	**84,47**	**5,00**	**11.932.667.085**	**100,00**	**18,15**	Dinsos PMD	
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	6,00	53.411.909.964	2,00	6.320.282.786	1,00	1.675.628.300	1,00	1.459.481.000	100,00	87,10	3,00	7.779.763.786	50,00	14,57	Dinsos PMD	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	6,00	581.000.000	-	-	1,00	32.022.112	1,00	28.048.500	100,00	87,59	1,00	28.048.500	16,67	4,83	Dinsos PMD	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	7,00	914.765.000	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Dinsos PMD	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	18,00	4.180.880.611	6,00	1.304.101.800	3,00	1.049.801.973	3,00	732.952.999	100,00	69,82	9,00	2.037.054.799	50,00	48,72	Dinsos PMD	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	6,00	6.655.100.000	2,00	1.316.800.000	1,00	783.868.800	1,00	771.000.000	100,00	98,36	3,00	2.087.800.000	50,00	31,37	Dinsos PMD	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	85,72						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**200,00**	**84,47**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(T)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**100,00**	**65,76**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(S)**						
DINAS KETENAGAKERJAAN				**32.265.734.834**		**3.592.560.955**		**4.019.184.554**		**3.103.487.667**		**77,22**		**4.983.869.960**		**15,45**	Disnaker	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				**31.680.137.844**		**3.592.560.955**		**4.019.184.554**		**3.103.487.667**		**77,22**		**4.983.869.960**		**15,73**	Disnaker	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				**31.680.137.844**		**3.592.560.955**		**4.019.184.554**		**3.103.487.667**		**77,22**		**4.983.869.960**		**15,73**	Disnaker	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi**	**%**	**85,00**	**22.818.789.485**	**50,58**	**2.494.161.169**	**80,00**	**2.278.724.933**	**79,06**	**1.829.286.652**	**98,82**	**80,28**	**64,82**	**4.323.447.821**	**76,26**	**18,95**	Disnaker	
	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	**%**	**95,00**		**43,84**		**70,00**		**69,43**	**-**	**99,18**	**-**	**56,63**	**-**	**59,61**	**-**	Disnaker	Target program telah tercapai

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur**	**%**	**85,00**		**50,58**		**80,00**		**79,06**	-	**98,82**	-	**64,82**	-	**76,26**	-	Disnaker	Target program telah tercapai
	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	**%**	**95,00**		**43,84**		**70,00**		**69,43**	-	**99,18**	-	**56,63**	-	**59,61**	-	Disnaker	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu**	**%**	**95,00**	**918.365.200**	**47,32**	**36.824.000**	**80,00**	**35.073.020**	**80,00**	**21.693.998**	**100,00**	**61,85**	**63,66**	**58.517.998**	**67,01**	**6,37**	Disnaker	Target kegiatan telah tercapai
	2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	**%**	**95,00**		**47,32**		**80,00**		**80,00**	-	**100,00**	-	**63,66**	-	**67,01**	-	Disnaker	
	3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	**%**	**95,00**		**47,32**		**80,00**		**80,00**	-	**100,00**	-	**63,66**	-	**67,01**	-	Disnaker	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20,00	198.270.000	4,00	24.955.000	4,00	22.338.620	4,00	14.074.109	100,00	63,00	8,00	39.029.109	40,00	19,68	Disnaker	Target Sub kegiatan telah tercapai
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Sub Kegiatan tidak akan dilaksanakan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Sub Kegiatan tidak akan dilaksanakan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Sub Kegiatan tidak akan dilaksanakan
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Sub Kegiatan tidak akan dilaksanakan
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Laporan	-	-	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Sub Kegiatan tidak akan dilaksanakan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12,00	720.095.200	1,00	11.869.000	2,00	12.734.400	1,00	7.619.889	50,00	59,84	2,00	19.488.889	16,67	2,71	Disnaker	Target Sub kegiatan telah tercapai
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	75,00	61,42						
										Predikat Kinerja	(S)	(R)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**95,00**	**13.913.188.524**	**52,09**	**1.813.601.467**	**80,00**	**1.736.611.200**	**79,42**	**1.385.685.501**	**99,28**	**79,79**	**65,76**	**3.199.286.968**	**69,22**	**22,99**	Disnaker	Target kegiatan telah tercapai
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	20,00	13.473.613.524	10,00	1.771.199.467	21,00	1.690.973.000	10,00	1.363.660.723	47,62	80,64	10,00	3.134.860.190	50,00	23,27	Disnaker	Jumlah ASN kurang dari target
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-								Bukan Sub Kegiatan prioritas
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	232,00	439.575.000	27,00	42.402.000	36,00	45.638.200	36,00	22.024.778	100,00	48,26						Target Sub kegiatan telah tercapai
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	-	-	-		-	-	-								Bukan Sub Kegiatan prioritas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	-	-	-		-	-	-								Bukan Sub Kegiatan prioritas
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	-	-	-	-		-	-	-								Bukan Sub Kegiatan prioritas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	-	-	-	-		-	-	-								Bukan Sub Kegiatan prioritas
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	-	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	73,81	64,45						
										Predikat Kinerja	(S)	(R)						
Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**Jenis**	**4,00**	**186.000.000**	**4,00**	**23.430.000**	**4,00**	**21.599.400**	**4,00**	**13.334.889**	**100,00**	**61,74**	**4,00**	**36.764.889**	**100,00**	**19,77**	Disnaker	Target kegiatan telah tercapai
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	75,00	186.000.000	9,00	23.430.000	14,00	21.599.400	14,00	13.334.889	100,00	61,74	23,00	36.764.889	30,67	19,77	Disnaker	Target Sub kegiatan telah tercapai
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	61,74						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik**	**%**	**95,00**	**372.200.000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	Disnaker	Bukan Kegiatan prioritas
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	190,00	280.000.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	36,00	52.200.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Orang	90,00	40.000.000	-	-		-										Bukan Sub Kegiatan prioritas

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Orang	-	-	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**95,00**	**2.572.175.158**	**44,56**	**196.257.500**	**80,00**	**100.292.465**	**77,99**	**97.772.300**	**97,49**	**97,49**	**61,28**	**294.029.800**	**64,50**	**11,43**	Disnaker	Target kegiatan telah tercapai
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	300,00	75.450.000	34,00	3.974.000	55,00	642.822	40,00	500.000	72,73	77,78	74,00	4.474.000	-	5,93	Disnaker	Rasionalisasi
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	500,00	1.331.576.758	73,00	59.350.000	105,00	71.613.742	102,00	69.400.000	97,14	96,91	175,00	128.750.000	-	9,67	Disnaker	Rasionalisasi
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	302,00	351.940.400	33,00	33.518.000	40,00	3.030.021	40,00	2.980.000	100,00	98,35	73,00	36.498.000	-	10,37	Disnaker	Target Sub kegiatan telah tercapai
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	200,00	85.500.000	30,00	4.800.000	4,00	1.299.880	4,00	1.280.000	100,00	98,47	34,00	6.080.000	-	7,11	Disnaker	Target Sub kegiatan telah tercapai
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60,00	81.000.000	9,00	14.000.000	9,00	841.500	4,00	750.000	44,44	89,13	13,00	14.750.000	-	18,21	Disnaker	Rasionalisasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	360,00	646.708.000	50,00	80.615.500	44,00	22.864.500	32,00	22.862.300	72,73	99,99	82,00	103.477.800	-	16,00	Disnaker	Rasionalisasi
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	81,17	93,44						
										Predikat Kinerja	(T)	(ST)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**%**	**95,00**	**2.075.000.000**	**57,61**	**149.990.000**	**80,00**	**120.000.000**	**80,00**	**120.000.000**	**100,00**	**100,00**	**68,80**	**269.990.000**	**72,42**	**13,01**	Disnaker	Target kegiatan telah tercapai
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	350,00	1.295.000.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Rasionalisasi
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	780.000.000	1,00	149.990.000	1,00	120.000.000	1,00	120.000.000	100,00	100,00	2,00	269.990.000	-	34,61	Disnaker	Telah dilaksanakan pada Triwulan I
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	100,00						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**95,00**	**1.424.409.940**	**50,70**	**194.475.302**	**80,00**	**168.340.800**	**80,00**	**104.401.064**	**100,00**	**62,02**	**65,35**	**298.876.366**	**68,79**	**20,98**	Disnaker	Target kegiatan telah tercapai
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72,00	250.852.500	9,00	31.040.000	8,00	13.384.400	8,00	8.269.889	100,00	61,79	17,00	39.309.889	23,61	15,67	Disnaker	Target Sub kegiatan telah tercapai
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72,00	355.517.440	9,00	27.435.302	5,00	44.500.000	5,00	27.161.841	100,00	61,04	14,00	54.597.143	-	15,36	Disnaker	Target Sub kegiatan telah tercapai
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00	818.040.000	9,00	136.000.000	20,00	110.456.400	20,00	68.969.334	100,00	62,44	29,00	204.969.334	-	25,06	Disnaker	Target Sub kegiatan telah tercapai
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	61,76						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**100,00**	**1.357.450.663**	**35,52**	**79.582.900**	**85,00**	**96.808.048**	**75,87**	**86.398.900**	**89,25**	**89,25**	**55,69**	**165.981.800**	**55,69**	**12,23**	Disnaker	Rasionalisasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00	549.694.584	6,00	57.262.900	6,00	54.752.584	6,00	45.434.400	100,00	82,98	12,00	102.697.300	200,00	18,68	Disnaker	Rasionalisasi
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	180,00	155.013.641	30,00	5.000.000	30,00	3.750.000	16,00	3.750.000	53,33	100,00	46,00	8.750.000	25,56	5,64	Disnaker	Rasionalisasi
Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	324.890.000	-	-	20,00	34.305.464	1,00	34.264.500	5,00	99,88	1,00	34.264.500	-	10,55	Disnaker	Rasionalisasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6,00	327.852.438	1,00	17.320.000	4,00	4.000.000	3,00	2.950.000	75,00	73,75	4,00	20.270.000	-	6,18	Disnaker	Rasionalisasi
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	58,33	89,15						
										Predikat Kinerja	(R)	(T)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**98,45**	**78,88**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(T)**						
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Persentase Dokumen RTK yang Diselesaikan**	**%**	**100,00**	**1.020.171.128**	**35,74**	**49.420.000**	**70,00**	**66.987.076**	**69,61**	**47.556.167**	**99,44**	**70,99**	**52,67**	**96.976.167**	**52,67**	**9,51**	Disnaker	Target program telah tercapai
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Jumlah Dokumen RTK**	**Dokumen**	**12,00**	**1.020.171.128**	**1,00**	**49.420.000**	**2,00**	**66.987.076**	**2,00**	**47.556.167**	**100,00**	**70,99**	**3,00**	**96.976.167**	**25,00**	**9,51**	Disnaker	Target kegiatan telah tercapai
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	5,00	399.292.737	-	-	1,00	3.475.000	1,00	3.335.000	100,00	95,97	1,00	3.335.000	20,00	0,84	Disnaker	Target Sub kegiatan telah tercapai
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan	10,00	620.878.391	1,00	49.420.000	2,00	63.512.076	2,00	44.221.167	100,00	69,63	3,00	93.641.167	30,00	15,08	Disnaker	Target Sub kegiatan telah tercapai
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	82,80						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	100,00	70,99						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja Meningkat**	**%**	**90,00**	**4.335.180.804**	**49,83**	**1.014.296.586**	**60,00**	**1.310.567.912**	**56,86**	**899.524.565**	**94,77**	**68,64**	**53,35**	**1.913.821.151**	**59,27**	**44,15**	Disnaker	Target program telah tercapai
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah Peserta Pelatihan**	**Orang**	**1.200,00**	**4.153.791.169**	**290,00**	**1.014.296.586**	**200,00**	**1.310.567.912**	**100,00**	**899.524.565**	**50,00**	**68,64**	**390,00**	**1.913.821.151**	**32,50**	**46,07**	Disnaker	Target kegiatan telah tercapai
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2022	Orang	1.200,00	3.278.889.470	290,00	1.014.296.586	200,00	1.310.567.912	100,00	899.524.565	50,00	68,64	390,00	1.913.821.151	32,50	58,37	Disnaker	Jumlah peserta pelatihan kurang dari target perencanaan dan ada penundaan pembayaran kegiatan yang bersumber dari anggaran DAU SG
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	1,00	874.901.699	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	50,00	68,64						
										Predikat Kinerja	(SR)	(S)						
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina**	**%**	**100,00**	**181.389.635**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	Disnaker	Bukan Kegiatan prioritas
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	34,00	181.389.635	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	50,00	68,64						
										Predikat Kinerja	(SR)	(S)						
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Tenaga Kerja yang diserap**	**%**	**85,00**	**2.060.827.380**	**21,00**	**20.998.000**	**60,00**	**121.514.675**	**60,00**	**108.451.200**	**100,00**	**89,25**	**40,50**	**129.449.200**	**47,65**	**6,28**	Disnaker	Target program telah tercapai
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi dalam mencari kerja**	**Orang**	**3.750,00**	**727.827.380**	**-**	**-**	**700,00**	**71.514.875**	**2.595,00**	**71.003.200**	**370,71**	**99,28**	**2.595,00**	**71.003.200**	**69,20**	**9,76**	Disnaker	Target kegiatan telah tercapai
Pelayanan antar Kerja	"Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL"	Orang	330,00	310.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	1.860,00	177.827.380	-	-	700,00	71.514.875	2.595,00	71.003.200	370,71	99,28	2.595,00	71.003.200	139,52	39,93	Disnaker	Pelaksanaan sub kegiatan ini dipakai untuk kegiatan Job Fair sehingga capaian target diisi dengan jumlah
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	1.560,00	240.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	370,71	99,28						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Kegiatan Pengelolaan IPK yang Terlaksana	Kegiatan	3,00	690.000.000	-	-	-	-										Bukan Kegiatan prioritas
Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	350,00	690.000.000	-	-	-	-										Bukan Sub Kegiatan prioritas
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Peresentase Jumlah kasus CPMI dan PMI menurun**	**%**	**100,00**	**643.000.000**	**33,60**	**20.998.000**	**85,00**	**49.999.800**	**22,39**	**37.448.000**	**26,34**	**74,90**	**27,99**	**58.446.000**	**27,99**	**9,09**	Disnaker	Jumlah kasus yang terjadi kurang dari yang ditargetkan
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	48,00	643.000.000	3,00	20.998.000	8,00	49.999.800	4,00	37.448.000	50,00	74,90	7,00	58.446.000	14,58	9,09	Disnaker	Jumlah kasus yang terjadi kurang dari yang ditargetkan
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	50,00	74,90						
										Predikat Kinerja	(SR)	(S)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	198,53	87,09						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Kasus Ketenagakerjaan pada Perusahaan Menurun**	**%**	**100,00**	**1.445.169.047**	**11,50**	**11.495.200**	**80,00**	**241.389.958**	**60,00**	**218.669.083**	**75,00**	**90,59**	**35,75**	**230.164.283**	**35,75**	**15,93**	Disnaker	Target program telah tercapai
Pengesahan Pengaturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perusahaan yang difasilitasi untuk Pengesahan Peraturan Perusahaannya**	**Dokumen**	**60,00**	**655.169.047**	**5,00**	**11.495.200**	**10,00**	**210.390.558**	**36,00**	**204.938.689**	**360,00**	**97,41**	**41,00**	**216.433.889**	**68,33**	**33,03**	Disnaker	Adanya pendataan kelengkapan Sarana Hubungan Industrial sehingga banyak perusahaan yang mulai melengkapi sarana HI tersebut
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	45,00	288.879.385	-	-	10,00	24.999.480	15,00	24.670.000	150,00	98,68	15,00	24.670.000	33,33	8,54	Disnaker	Target Sub kegiatan telah tercapai
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	45,00	366.289.662	5,00	11.495.200	10,00	185.391.078	10,00	180.268.689	100,00	97,24	15,00	191.763.889	33,33	-	Disnaker	Target Sub kegiatan telah tercapai
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	125,00	97,96						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang ditangani**	**Kegiatan**	**25,00**	**790.000.000**	**-**	**-**	**5,00**	**30.999.400**	**4,00**	**13.730.394**	**80,00**	**44,29**	**4,00**	**13.730.394**	**16,00**	**1,74**	Disnaker	Jumlah kasus yang terjadi kurang dari yang ditargetkan
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	16,00	210.000.000	-	-	5,00	15.925.000	2,00	4.325.000	40,00	27,16	2,00	4.325.000	12,50	2,06	Disnaker	Jumlah kasus yang terjadi kurang dari yang ditargetkan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	24,00	205.000.000	-	-	13,00	15.074.400	2,00	9.405.394	15,38	62,39	2,00	9.405.394	8,33	4,59	Disnaker	Jumlah kasus yang terjadi kurang dari yang ditargetkan
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Asosiasi dan Serikat Pekerja	3,00	175.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Lembaga	3,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	27,69	44,78						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**220,00**	**70,85**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(S)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**95,65**	**79,95**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(T)**						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										-			-	-			Disnaker	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				**585.596.990**		**2.190.000**				-			-	**2.190.000**			Disnaker	
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Persentase Rencana Kawasan Transmigrasi baru**	**%**	**100,00**	**175.000.000**	**-**	**2.190.000**		**-**	**-**	**-**			-	**2.190.000**	**-**	**1,25**	Disnaker	Bukan Program prioritas
Pecadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	**Jumlah Lokasi Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi**	**Lokasi**	**5,00**	**175.000.000**	**-**	**2.190.000**		**-**	**-**	**-**			-	**2.190.000**	**-**	**1,25**	Disnaker	Bukan Kegiatan prioritas
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Dokumen	5,00	85.000.000	-	2.190.000		-	-	-			-	2.190.000	-	2,58	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	5,00	90.000.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibangun**	**Lokasi**	**5,00**	**270.000.000**	**-**	**-**		**-**		**-**			-	**-**	**-**	**-**	Disnaker	Bukan Program prioritas
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah KK yang diberangkatkan**	**KK**	**25,00**	**270.000.000**	**-**	**-**		**-**		**-**			-	**-**	**-**	**-**	Disnaker	Bukan Kegiatan prioritas
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5,00	115.000.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala Keluarga	25,00	155.000.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Persentase Laju Kemandirian Transmigran**	**%**	**70,00**	**140.596.990**	**-**	**-**		**-**		**-**			-	**-**	**-**	**-**	Disnaker	Bukan Program prioritas
Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	**Jumlah Transmigran yang sudah mandiri di Kawasan Transmigrasi**	**Orang**	**122,00**	**140.596.990**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**			-	**-**	**-**	**-**	Disnaker	Bukan Kegiatan prioritas
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	25,00	140.596.990	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	-	-						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(SR)**	**(SR)**						
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN																		
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				**81.842.640.223**		**21.330.033.022**		**10.568.907.805**		**8.093.595.079**		**76,58**		**29.423.628.101**		**35,95**	DLHK	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi**	**%**	**100,00**	**34.819.552.043**	**100,00**	**9.260.454.268**	**100,00**	**5.384.094.310**	**100,00**	**4.513.600.297**	**100,00**	**83,83**	**100,00**	**13.774.054.565**	**100,00**	**39,56**	DLHK	
	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
	3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu**	**%**	**100,00**	**142.750.000**	**100,00**	**39.900.000**	**100,00**	**21.320.000**	**100,00**	**16.220.000**	**100,00**	**76,08**	**100,00**	**56.120.000**	**100,00**	**39,31**	DLHK	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24,00	142.750.000	8,00	39.900.000	4,00	21.320.000	4,00	16.220.000	100,00	76,08	7,00	56.120.000	29,17	39,31	DLHK	
											Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		100,00	76,08				
											Predikat Kinerja		(ST)	(T)				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu**	**%**	**100,00**	**22.753.216.395**	**100,00**	**6.710.742.081**	**100,00**	**3.638.163.778**	**100,00**	**2.975.069.848**	**100,00**	**81,77**	**100,00**	**9.685.811.929**	**100,00**	**42,57**	DLHK	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	38,00	22.583.326.395	37,00	6.647.262.081	37,00	3.616.907.778	37,00	2.958.913.848	100,00	81,81	37,00	9.606.175.929	97,37	42,54	DLHK	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36,00	169.890.000	7,00	63.480.000	6,00	21.256.000	6,00	16.156.000	100,00	76,01	10,00	79.636.000	27,78	46,88	DLHK	
											Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		100,00	78,91				
											Predikat Kinerja		(ST)	(T)				
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Persentase pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**%**	**100,00**	**139.075.000**	**100,00**	**40.477.000**	**100,00**	**20.932.000**	**100,00**	**15.832.000**	**100,00**	**75,64**	**100,00**	**56.309.000**	**100,00**	**40,49**	DLHK	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24,00	139.075.000	8,00	40.477.000	4,00	20.932.000	4,00	15.832.000	100,00	75,64	7,00	56.309.000	29,17	40,49	DLHK	
											Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		100,00	75,64				
											Predikat Kinerja		(ST)	(T)				
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase penatausahaan retribusi yang diterima Perangkat Daerah**	**%**	**100,00**	**165.909.000**	**100,00**	**40.359.000**	**100,00**	**20.616.000**	**100,00**	**15.516.000**	**100,00**	**75,26**	**100,00**	**55.875.000**	**100,00**	**33,68**	DLHK	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	3,00	27.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	24,00	138.909.000	2,00	40.359.000	4,00	20.616.000	4,00	15.516.000	100,00	75,26	4,00	55.875.000	16,67	40,22	DLHK	
											Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		100,00	75,26				
											Predikat Kinerja		(ST)	(T)				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**452.400.000**	**100,00**	**18.300.000**	**100,00**	**16.854.000**	**100,00**	**12.654.000**	**100,00**	**75,08**	**100,00**	**30.954.000**	**100,00**	**6,84**	DLHK	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	111,00	75.600.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	48,00	106.800.000	16,00	18.300.000	8,00	16.854.000	8,00	12.654.000	100,00	75,08	14,00	30.954.000	29,17	28,98	DLHK	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	108,00	270.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
											Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		100,00	75,08				
											Predikat Kinerja		(ST)	(T)				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**1.744.123.836**	**100,00**	**323.086.127**	**100,00**	**150.127.351**	**100,00**	**126.549.390**	**100,00**	**84,29**	**100,00**	**449.635.517**	**100,00**	**25,78**	DLHK	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	17.321.676	2,00	2.807.000	1,00	808.000	1,00	808.000	100,00	100,00	2,00	3.615.000	33,33	20,87	DLHK	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9,00	326.518.089	2,00	61.518.000	1,00	39.721.681	1,00	39.719.890	100,00	100,00	2,00	101.237.890	22,22	31,01	DLHK	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3,00	13.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30,00	584.849.571	10,00	134.029.750	5,00	31.661.370	5,00	26.699.700	100,00	84,33	9,00	160.729.450	30,00	27,48	DLHK	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	12,00	126.110.800	4,00	38.400.000	2,00	19.721.800	2,00	15.570.000	100,00	78,95	4,00	53.970.000	33,33	42,80	DLHK	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	388,00	569.023.700	56,00	66.831.377	35,00	41.414.500	25,00	31.151.800	71,43	75,22	38,00	97.983.177	9,79	17,22	DLHK	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	11,00	106.800.000	3,00	19.500.000	2,00	16.800.000	2,00	12.600.000	100,00	75,00	3,00	32.100.000	27,27	30,06	DLHK	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		95,24	85,58					
										Predikat Kinerja		(ST)	(T)					
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**%**	**100,00**	**1.604.000.000**	**100,00**	**230.000.000**	**100,00**	**120.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,00**	**230.000.000**	**50,00**	**14,34**	DLHK	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Opersional yang diadakan	Unit	2,00	794.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sewa Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	7,00	810.000.000	3,00	230.000.000	1,00	120.000.000	-	-	-	-	2,00	230.000.000	28,57	28,40	DLHK	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		-	-					
										Predikat Kinerja		(SR)	(SR)					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**100,00**	**1.006.385.412**	**100,00**	**279.343.860**	**100,00**	**138.978.537**	**100,00**	**141.369.459**	**100,00**	**101,72**	**100,00**	**420.713.319**	**100,00**	**41,80**	DLHK	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6,00	17.600.000	2,00	1.500.000	2,00	1.560.000	2,00	1.550.000	100,00	99,36	2,00	3.050.000	33,33	17,33	DLHK	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	258.035.612	4,00	76.494.860	2,00	26.300.240	2,00	25.338.859	100,00	96,34	4,00	101.833.719	33,33	39,46	DLHK	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	46,00	730.749.800	14,00	201.349.000	7,00	111.118.297	7,00	114.480.600	100,00	103,03	14,00	315.829.600	30,43	43,22	DLHK	Dalam Dpa ada kegiatan yang urgent jadi ada penambahan anggaran dengan total anggaran Rp. 143.182.897,-
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		100,00	99,58					
										Predikat Kinerja		(ST)	(ST)					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase sarana dan prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**100,00**	**6.811.692.400**	**100,00**	**1.578.246.200**	**100,00**	**1.257.102.644**	**100,00**	**1.210.389.600**	**100,00**	**96,28**	**100,00**	**2.788.635.800**	**100,00**	**40,94**	DLHK	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	25,00	6.727.292.400	20,00	1.574.096.850	25,00	1.254.102.644	20,00	1.207.389.600	80,00	96,28	20,00	2.781.486.450	80,00	41,35	DLHK	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	37,00	24.400.000	5,00	4.149.350	6,00	3.000.000	2,00	3.000.000	33,33	100,00	3,00	7.149.350	8,11	29,30	DLHK	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8,00	60.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		56,67	98,14					
										Predikat Kinerja		(R)	(ST)					
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)		**88,89**	**74,01**					
										Predikat Kinerja		**(T)**	**(S)**					
Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	**Prosentase Kualitas Air dan Udara yang memenuhi Baku Mutu**	**%**	**31,50**	**3.124.178.315**	**30,77**	**601.693.000**	**28,50**	**352.120.565**	**26,45**	**65.905.500**	**92,81**	**18,72**	**28,61**	**667.598.500**	**90,83**	**21,37**	DLHK	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah Upaya Penjegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota**	**Kegiatan**	**10,00**	**567.434.250**	**2,00**	**68.578.000**	**1,00**	**72.218.000**	**1,00**	**65.905.500**	**100,00**	**91,26**	**2,00**	**134.483.500**	**20,00**	**23,70**	DLHK	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	6,00	277.434.250	2,00	62.938.000	1,00	72.218.000	1,00	65.905.500	100,00	91,26	2,00	128.843.500	33,33	46,44	DLHK	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2,00	90.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	2,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		100,00	91,26					
										Predikat Kinerja		(ST)	(ST)					
Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	**Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota**	**Kegiatan**	**5,00**	**2.556.744.065**	**1,00**	**538.755.000**	**-**	**279.902.565**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,00**	**538.755.000**	**-**	**-**	DLHK	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Dokumen	2,00	1.076.835.000	1,00	538.755.000	-	-	-	-			1,00	538.755.000	-	-	DLHK	
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Lokasi	4,00	1.479.909.065	-	-	4,00	279.902.565	-	-	-	-	-	-	-	-	DLHK	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		-	-					
										Predikat Kinerja		(SR)	(SR)					
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)		**100,00**	**91,26**					
										Predikat Kinerja		**(ST)**	**(ST)**					
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	**Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**%**	**30,00**	**3.093.968.500**	**10,00**	**250.411.000**	**15,00**	**164.935.627**	**2,35**	**15.830.898**	**15,67**	**9,60**	**6,18**	**266.241.898**	**20,58**	**8,61**	DLHK	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	**Jumlah dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun**	**Dokumen**	**4,00**	**464.020.000**	**1,00**	**9.018.000**	**2,00**	**153.824.427**	**-**	**4.812.000**	**-**	**3,13**	**1,00**	**13.830.000**	**25,00**	**2,98**	DLHK	
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1,00	350.000.000	-	-	1,00	149.995.827	-	984.000	-	0,66	-	984.000	-	-	DLHK	Refocusing anggaran sehingga kinerja (dokumen) belum terealisasi
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00	114.020.000	1,00	9.018.000	1,00	3.828.600	-	3.828.000	-	99,98	1,00	12.846.000	25,00	11,27	DLHK	Refocusing anggaran sehingga kinerja (dokumen) belum terealisasi
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	50,32						
										Predikat Kinerja	(SR)	(R)						
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen KLHS yang disusun**	**Dokumen**	**15,00**	**2.629.948.500**	**1,00**	**241.393.000**	**1,00**	**11.111.200**	**-**	**11.018.898**	**-**	**99,17**	**1,00**	**252.411.898**	**6,67**	**-**	DLHK	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	12,00	1.897.720.000	4,00	209.165.000	1,00	190.000	-	190.000	-	100,00	4,00	209.355.000	33,33	11,03	DLHK	Refocusing anggaran sehingga kinerja (dokumen) belum terealisasi
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	3,00	732.228.500	1,00	32.228.000	2,00	10.921.200	-	10.828.898	-	99,15	1,00	43.056.898	33,33	5,88	DLHK	Refocusing anggaran sehingga kinerja (dokumen) belum terealisasi
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	99,58						
										Predikat Kinerja	(SR)	(ST)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**-**	**51,15**						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(R)**						
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	**Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan PPLH PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemda**	**%**	**70,00**	**350.328.600**	**72,73**	**29.867.222**	**73,00**	**18.210.700**	**72,73**	**16.200.500**	**99,63**	**88,96**	**72,73**	**46.067.722**	**103,90**	**13,15**	DLHK	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan**	**Pelaku Usaha**	**25,00**	**350.328.600**	**3,00**	**29.867.222**	**20,00**	**18.210.700**	**11,00**	**16.200.500**	**55,00**	**88,96**	**3,00**	**46.067.722**	**12,00**	**13,15**	DLHK	Target kinerja (Laporan) masih dalam proses pelaksanaan (penyusunan)
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pengawas Lingkungan Hidup yang mengikuti bimbingan teknis lingkungan hidup	Orang	1,00	60.000.000	-	-	4,00	10.272.700	4,00	10.262.500	100,00	99,90	-	10.262.500	-	17,10	DLHK	
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	6,00	290.328.600	3,00	29.867.222	1,00	7.938.000	1,00	5.938.000	100,00	74,80	3,00	35.805.222	50,00	12,33	DLHK	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	87,35						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**55,00**	**88,96**						
										Predikat Kinerja	**(R)**	**(T)**						
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	**Prosentase Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dibina**	**%**	**51,00**	**260.816.000**	**13,95**	**5.690.000**	**45,00**	**14.999.960**	**36,75**	**12.406.000**	**81,67**	**82,71**	**25,35**	**18.096.000**	**49,71**	**6,94**	DLHK	
Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil LB3 yang memenuhi ketentuan**	**pelaku usaha**	**100,00**	**260.816.000**	**10,00**	**5.690.000**	**100,00**	**14.999.960**	**60,00**	**12.406.000**	**60,00**	**82,71**	**10,00**	**18.096.000**	**10,00**	**6,94**	DLHK	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	3,00	105.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	5,00	155.816.000	1,00	5.690.000	10,00	14.999.960	6,00	12.406.000	60,00	82,71	1,00	18.096.000	20,00	11,61	DLHK	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	60,00	82,71						
										Predikat Kinerja	(R)	(T)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**60,00**	**82,71**						
										Predikat Kinerja	**(R)**	**(T)**						
Program Pengelolaan Persampahan	**Cakupan layanan persampahan**	**%**	**31,60**	**31.037.467.291**	**31,01**	**9.272.704.840**	**26,30**	**3.439.025.850**	**30,79**	**2.864.638.385**	**117,07**	**83,30**	**30,90**	**12.137.343.225**	**97,78**	**39,11**	DLHK	Banyaknya timbunan sampah
Pengelolaan Sampah	**Jumlah sampah yang terkelola**	**Ton**	**17.772,39**	**31.037.467.291**	**16.418,94**	**9.272.704.840**	**########**	**3.439.025.850**	**16.747,32**	**2.864.638.385**	**100,00**	**83,30**	**12.045,00**	**12.137.343.225**	**67,77**	**39,11**	DLHK	
Penyusunan Kebijakan dan Stretegi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	1,00	600.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengmpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Paket	23,00	22.454.097.291	4,00	5.509.863.740	3,00	3.239.054.010	3,00	2.685.037.885	100,00	82,90	4,00	8.194.901.625	17,39	36,50	DLHK	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	15,00	4.980.950.000	3,00	760.421.100	2,00	199.971.840	2,00	179.600.500	100,00	89,81	5,00	940.021.600	33,33	-	DLHK	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	1,00	3.002.420.000	1,00	3.002.420.000	-	-	-	-			1,00	3.002.420.000	100,00	100,00	DLHK	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											100,00	86,35						
Predikat Kinerja											(ST)	(T)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)											**100,00**	**83,30**						
Predikat Kinerja											**(ST)**	**(T)**						
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	**Persentase MHA yang Terdaftar dan terdata**	**%**	**35,00**	**120.000.000**	-	-	**20,00**	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**Jumlah MHA yang terdaftar dan terdata**	**MHA**	**2,00**	**120.000.000**	-	-	**2,00**	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal,Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	3,00	120.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)											-	-						
Predikat Kinerja											**(SR)**	**(SR)**						
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**%**	**44,00**	**379.000.000**	-	-	**32,00**	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**lembaga masyarakat**	**25,00**	**379.000.000**	-	-	**25,00**	-	-	-			-	**DLhk**	-	-	DLHK	
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Masyarakat	21,00	139.000.000	-	-	-	-	-	-			-	DLHK	-	-	DLHK	
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Orang	15,00	240.000.000	-	-	-	-	-	-			-	D.LHK	-	-	DLHK	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)											-	-						
Predikat Kinerja											**(SR)**	**(SR)**						
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	**Persentase Kasus Yang Ditangani Pemda**	**%**	**76,67**	**200.000.000**	-	-	**66,67**	**8.210.600**	**10,00**	**6.210.000**	**15,00**	**75,63**	**5,00**	**6.210.000**	**6,52**	**3,11**	DLHK	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani**	**Kasus**	**21,00**	**200.000.000**	-	-	**20,00**	**8.210.600**	**2,00**	**6.210.000**	**10,00**	**75,63**	-	**6.210.000**	-	**3,11**	DLHK	
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan Kasus Lingkungan	Dokumen	26,00	200.000.000	-	-	6,00	8.210.600	2,00	6.210.000	33,33	75,63	-	6.210.000	-	3,11	DLHK	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											33,33	75,63						
Predikat Kinerja											(SR)	(T)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)											**10,00**	**75,63**						
Predikat Kinerja											**(SR)**	**(T)**						
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	**Persentase Penerapan Adiwiyata Di Lingkungan Pemerintah Daerah**	**%**	**27,00**	**175.000.000**	-	-	**17,00**	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah sekolah Berperilaku Peduli dan Berbudaya Lingkungan**	**sekolah**	**6,00**	**175.000.000**	-	-	**30,00**	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang dibina dalam Program Adiwiyata	Organisasi	18,00	175.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)											-	-						
Predikat Kinerja											**(SR)**	**(SR)**						
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	**Persentase Tutupan Lahan yang dikelola**	**%**	**1,00**	**8.282.329.474**	**0,37**	**1.909.212.692**	**0,70**	**1.187.310.193**	**0,70**	**598.803.499**	**100,00**	**50,43**	**0,54**	**2.508.016.191**	**53,50**	**30,28**	DLHK	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Jumlah Luas Keanekaragaman hayati yang dikelola**	**Ha**	**131,40**	**8.282.329.474**	**51,40**	**1.909.212.692**	**71,40**	**1.187.310.193**	**53,55**	**598.803.499**	**75,00**	**50,43**	**52,48**	**2.508.016.191**	**39,94**	**30,28**	DLHK	
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Lokasi	11,00	7.878.337.258	11,00	1.921.813.839	11,00	1.159.283.827	11,00	570.981.499	100,00	49,25	11,00	2.492.795.338	100,00	31,64	DLHK	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	5,00	203.992.216	-	4.849.000	1,00	28.026.366	1,00	27.822.000	100,00	99,27	1,00	32.671.000	20,00	16,02	DLHK	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	74,26						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**75,00**	**50,43**						
										Predikat Kinerja	**(S)**	**(R)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**77,73**	**61,65**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(T)**	**(R)**						
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**53.417.626.551**		**6.996.282.106**		**4.187.803.455**		**2.505.223.342**		**59,82**		**9.501.505.448**			Disdukcapil	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**53.417.626.551**		**6.996.282.106**		**4.187.803.455**		**2.505.223.342**		**59,82**		**9.501.505.448**			Disdukcapil	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik**	**%**	**100,00**	**44.855.219.451**	**100,00**	**6.226.430.856**	**100,00**	**3.631.595.955**	**100,00**	**2.230.613.342**	**100,00**	**61,42**	**100,00**	**8.457.044.198**	**100,00**	**18,85**	Disdukcapil	
	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu**	**%**	**100,00**	**464.159.250**	**100,00**	**344.007.500**	**100,00**	**21.422.950**	**100,00**	**13.740.000**	**100,00**	**64,14**	**100,00**	**357.747.500**	**100,00**	**77,07**	Disdukcapil	
	Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	**%**	**100,00**		**-**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**50,00**		**50,00**			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	45,00	184.104.250	13,00	45.907.500	8,00	21.422.950	8,00	13.740.000	100,00	64,14	21,00	59.647.500	46,67	32,40	Disdukcapil	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	7,00	31.350.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5,00	11.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5,00	12.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5,00	10.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30,00	99.105.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24,00	425.200.000	4,00	298.100.000	-	-	-	-			4,00	298.100.000	16,67	70,11	Disdukcapil	Sumber Dana Sub Kegiatan Bersumber dari SiLPA DAK Non Fisik Tahun 2021, Dianggarkan kembali di Anggaran Perubahan Tahun 2022
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	64,14						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**100,00**	**20.366.881.220**	**100,00**	**4.040.832.031**	**100,00**	**2.188.677.026**	**100,00**	**1.705.971.106**	**100,00**	**77,95**	**100,00**	**5.746.803.137**	**100,00**	**28,22**	Disdukcapil	Tidak semua sub kegiatan mendapatkan prioritas
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	142,00	18.422.006.220	17,00	3.998.897.031	25,00	2.167.402.026	12,00	1.692.346.106	48,00	78,08	14,50	5.691.243.137	10,21	30,89	Disdukcapil	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72,00	187.600.000	24,00	40.585.000	12,00	21.275.000	8,00	13.625.000	66,67	64,04	32,00	54.210.000	44,44	28,90	Disdukcapil	Dalam Sub Kegiatan Isinya Honor NON ASN dan Baru terealisasi sebanyak 9 laporan sisanya SK Hutang
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	72,00	986.110.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6,00	725.865.000	2,00	1.150.000	-	-	-	-			2,00	1.150.000	33,33	0,16	Disdukcapil	-
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	60,00	14.300.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	90,00	25.000.000	5,00	200.000	-	-	-	-			5,00	200.000	5,56	0,80	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	10,00	6.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	57,33	71,06						
										Predikat Kinerja	(R)	(S)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100,00**	**214.100.000**	**100,00**	**40.594.500**	**100,00**	**20.400.000**	**100,00**	**12.750.000**	**100,00**	**62,50**	**100,00**	**53.344.500**	**100,00**	**24,92**	Disdukcapil	Tidak semua sub kegiatan mendapatkan prioritas
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	60,00	21.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	70,00	10.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	82,00	183.100.000	12,00	40.594.500	14,00	20.400.000	8,00	12.750.000	57,14	62,50	20,00	53.344.500	24,39	29,13	Disdukcapil	Dalam Sub Kegiatan Isinya Honor NON ASN dan Baru terealisasi sebanyak 9 laporan sisanya SK Hutang
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	57,14	62,50						
										Predikat Kinerja	(R)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**1.080.121.880**	**100,00**	**95.131.860**	**100,00**	**31.256.227**	**100,00**	**24.916.000**	**100,00**	**79,72**	**100,00**	**120.047.860**	**100,00**	**11,11**	Disdukcapil	Tidak semua sub kegiatan mendapatkan prioritas
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	265,00	300.000.000	-	-	53,00	14.456.227	53,00	14.416.000	100,00	99,72	53,00	14.416.000	20,00	4,81	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	72,00	133.800.000	24,00	32.700.000	12,00	16.800.000	8,00	10.500.000	66,67	62,50	32,00	43.200.000	44,44	32,29	Disdukcapil	Dalam Sub Kegiatan Isinya Honor NON ASN dan Baru terealisasi sebanyak 9 laporan sisanya SK Hutang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15,00	150.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1,00	25.520.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	266,00	470.801.880	53,00	62.431.860	-	-	-	-			53,00	62.431.860	19,92	13,26	Disdukcapil	Sumber Dana Sub Kegiatan Bersumber dari SiLPA DAK Non Fisik Tahun 2021, Dianggarkan kembali di Anggaran Perubahan Tahun 2022
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	83,33	81,11						
										Predikat Kinerja	(T)	(T)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**13.888.812.739**	**100,00**	**1.108.171.883**	**100,00**	**879.271.372**	**100,00**	**138.520.217**	**100,00**	**15,75**	**100,00**	**1.246.692.100**	**100,00**	**8,98**	Disdukcapil	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	87,00	50.873.180	27,00	3.755.000	15,00	3.086.624	15,00	1.855.000	100,00	60,10	42,00	5.610.000	48,28	11,03	Disdukcapil	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	112,00	12.671.541.577	22,00	996.499.158	20,00	700.400.586	20,00	59.104.137	100,00	8,44	42,00	1.055.603.295	37,50	8,33	Disdukcapil	Efesiensi anggaran pada sub kegiatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	87,00	32.596.632	27,00	3.586.000	15,00	5.992.160	15,00	2.303.000	100,00	38,43	42,00	5.889.000	48,28	18,07	Disdukcapil	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	51,00	53.900.000	11,00	3.237.250	10,00	5.943.770	10,00	110.000	100,00	1,85	21,00	3.347.250	41,18	6,21	Disdukcapil	Rasionalisasi anggaran sub kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	87,00	54.810.000	36,00	2.760.000	15,00	1.020.000	15,00	960.000	100,00	94,12	51,00	3.720.000	58,62	6,79	Disdukcapil	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	72,00	228.750.000	12,00	4.596.000	12,00	1.298.232	12,00	488.000	100,00	37,59	24,00	5.084.000	33,33	2,22	Disdukcapil	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	237,00	778.612.400	57,00	93.738.475	45,00	161.530.000	12,00	73.700.080	26,67	45,63	69,00	167.438.555	29,11	21,50	Disdukcapil	-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2,00	17.728.950	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	89,52	40,88						
										Predikat Kinerja	(T)	(SR)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**%**	**100,00**	**3.934.000.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Kegiatan tidak prioritas
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	24,00	920.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	9,00	370.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00	945.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	974.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	725.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**100,00**	**2.497.485.674**	**100,00**	**440.091.482**	**100,00**	**291.871.708**	**100,00**	**244.732.664**	**100,00**	**83,85**	**100,00**	**684.824.146**	**100,00**	**27,42**	Disdukcapil	Tidak semua sub kegiatan mendapatkan prioritas
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	22,00	87.438.000	24,00	1.585.000	12,00	2.000.000	12,00	1.400.000	100,00	70,00	36,00	2.985.000	163,64	3,41	Disdukcapil	Rasionalisasi anggaran sub kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	47,00	1.860.723.674	24,00	343.270.482	12,00	230.921.708	8,00	206.187.209	66,67	89,29	32,00	549.457.691	68,09	29,53	Disdukcapil	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	100,00	80.000.000	-	-	12,00	3.750.000	2,00	2.645.455	16,67	70,55	2,00	2.645.455	2,00	3,31	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	27,00	469.324.000	24,00	95.236.000	12,00	55.200.000	8,00	34.500.000	66,67	62,50	32,00	129.736.000	118,52	27,64	Disdukcapil	-
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	62,50	73,08						
										Predikat Kinerja	(R)	(S)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**100,00**	**2.472.090.568**	**100,00**	**157.601.600**	**100,00**	**198.696.672**	**100,00**	**89.983.355**	**100,00**	**45,29**	**100,00**	**247.584.955**	**100,00**	**10,02**	Disdukcapil	Tidak semua sub kegiatan mendapatkan prioritas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	55,00	515.000.000	-	-	9,00	52.727.964	4,00	34.520.500	44,44	65,47	4,00	34.520.500	7,27	6,70	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	53,00	794.590.568	9,00	132.851.600	9,00	95.718.708	9,00	44.667.400	100,00	46,67	9,00	177.519.000	16,98	22,34	Disdukcapil	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150,00	897.500.000	44,00	24.750.000	20,00	50.250.000	20,00	10.795.455	100,00	21,48	64,00	35.545.455	42,67	3,96	Disdukcapil	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10,00	130.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10,00	135.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	81,48	44,54						
										Predikat Kinerja	(T)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**61,31**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(R)**						
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan**	**%**	**100,00**	**6.165.393.469**	**99,33**	**289.110.000**	**100,00**	**320.580.000**	**100,00**	**157.500.000**	**100,00**	**49,13**	**99,67**	**446.610.000**	**99,67**	**7,24**	Disdukcapil	Ada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi prioritas pendananaan; Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Dokumen Administrasi Kependudukan.
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah penyelenggaraan pendafaran penduduk**	**Desa**	**465,00**	**3.834.768.469**	**-**	**-**	**93,00**	**68.580.000**	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	Disdukcapil	Kegiatan tidak prioritas
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	465,00	306.833.679	-	-	93,00	68.580.000	92,73	-	99,71	-	92,73	-	19,94	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Alat Rekam dan Cetak KTP Elektronik yang disediakan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	12,00	3.327.934.790	-	-	-	-	-									
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	2.625,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	99,71	-						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah penduduk yang terlayani dalam pendaftaran penduduk**	**Orang**	**326.052,00**	**2.280.625.000**	**59.482,00**	**289.110.000**	########	**252.000.000**	**62.265,00**	**157.500.000**	**98,83**	**62,50**	########	**446.610.000**	**37,34**	**19,58**	Disdukcapil	Tidak semua sub kegiatan mendapatkan prioritas
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	12,00	342.600.000	4,00	65.400.000	2,00	33.600.000	2,00	21.000.000	100,00	62,50	6,00	86.400.000	50,00	25,22	Disdukcapil	Dalam Sub Kegiatan Isinya Honor NON ASN dan Baru terealisasi sebanyak 9 laporan,sisanya SK Hutang
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	317.315,00	230.400.000	-	-	-	-									Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	265.000,00	1.375.200.000	56.359,00	195.210.000	########	184.800.000	52.000,00	115.500.000	100,00	62,50	########	310.710.000	40,89	22,59	Disdukcapil	Dalam Sub Kegiatan Isinya Honor NON ASN dan Baru terealisasi sebanyak 9 laporan,sisanya SK Hutang
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	Laporan	30.526,00	64.825.000	-	-	-	-	5.500,00	-			5.500,00	-	18,02	-	Disdukcapil	Dalam Sub Kegiatan Isinya Honor NON ASN dan Baru terealisasi sebanyak 9 laporan,sisanya SK Hutang
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	37.726,00	267.600.000	3.123,00	28.500.000	5.500,00	33.600.000	5.500,00	21.000.000	100,00	62,50	8.623,00	49.500.000	22,86	18,50	Disdukcapil	-
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	62,50						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang terlaksana**	**Laporan**	**60,00**	**50.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	Disdukcapil	Kegiatan tidak prioritas
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	Laporan	375,00	50.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**49,42**	**31,25**						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**%**	**100,00**	**1.332.796.009**	**110,48**	**218.300.000**	**100,00**	**142.403.500**	**100,00**	**91.420.000**	**100,00**	**64,20**	**105,24**	**309.720.000**	**105,24**	**23,24**	Disdukcapil	Ada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi prioritas pendananaan; Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Dokumen Akta-Akta Pencatatan Sipil.
Pelayanan Pencatatan Sipil	**Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pencatatan sipil**	**Orang**	**218.064,00**	**1.177.679.936**	**11.723,00**	**218.300.000**	**########**	**142.403.500**	**15.554,00**	**91.420.000**	**115,21**	**64,20**	**27.277,00**	**309.720.000**	**12,51**	**26,30**	Disdukcapil	Ada beberapa sub kegiatan yang tidak menjadi prioritas
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	22.588,00	183.380.062	254,00	12.425.000	466,00	28.420.000	466,00	28.420.000	100,00	100,00	720,00	40.845.000	3,19	22,27	Disdukcapil	-
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	198.064,00	802.800.000	6,00	205.875.000	3,00	100.800.000	3,00	63.000.000	100,00	62,50	9,00	268.875.000	0,00	33,49	Disdukcapil	Dalam Sub Kegiatan Isinya Honor NON ASN dan Baru terealisasi sebanyak 9 laporan sisanya SK Hutang
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen	20,00	24.151.648	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket	260.000,00	167.348.226	-	-	1,00	13.183.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	66,67	54,17						
										Predikat Kinerja	(S)	(R)						
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil yang terlaksana**	**Laporan**	**60,00**	**137.780.513**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	Disdukcapil	Kegiatan tidak prioritas
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	5,00	137.780.513	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang diselenggarakan**	**Layanan**	**20,00**	**17.335.560**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	Disdukcapil	Kegiatan tidak prioritas
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	20,00	17.335.560	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**115,21**	**64,20**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(R)**						
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Persentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik**	**%**	**100,00**	**1.064.217.622**	**100,00**	**262.441.250**	**100,00**	**93.224.000**	**100,00**	**25.690.000**	**100,00**	**27,56**	**100,00**	**288.131.250**	**100,00**	**27,07**	Disdukcapil	Ada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak mendapat prioritas
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Dokumen**	**36,00**	**515.603.998**	**6,00**	**49.598.750**	**6,00**	**52.118.000**	**1,00**	**10.500.000**	**16,67**	**20,15**	**7,00**	**60.098.750**	**19,44**	**11,66**	Disdukcapil	Beberapa Sub kegiatan tidak mendapat prioritas
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	119,00	186.814.750	12,00	48.338.750	2,00	19.992.000	2,00	-	100,00	-	14,00	48.338.750	11,76	25,88	Disdukcapil	-
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	23,00	74.589.248	1,00	1.260.000	4,00	7.698.000	4,00	-	100,00	-	5,00	1.260.000	21,74	1,69	Disdukcapil	-
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	60,00	254.200.000	-	-	12,00	24.428.000	9,00	10.500.000	75,00	42,98	9,00	10.500.000	15,00	4,13	Disdukcapil	Dalam Sub Kegiatan Isinya Honor NON ASN dan Baru terealisasi sebanyak 9 laporan sisanya SK Hutang
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	91,67	14,33						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Jumlah pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan**	**kegiatan**	**18,00**	**472.040.000**	**3,00**	**212.842.500**	**3,00**	**41.106.000**	**3,00**	**15.190.000**	**100,00**	**36,95**	**6,00**	**228.032.500**	**33,33**	**48,31**	Disdukcapil	-
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	120,00	322.040.000	12,00	65.400.000	12,00	41.106.000	9,00	15.190.000	75,00	36,95	21,00	80.590.000	17,50	25,02	Disdukcapil	Dalam Sub Kegiatan Isinya Honor NON ASN dan Baru terealisasi sebanyak 9 laporan sisanya SK Hutang

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	1,00	150.000.000	1,00	147.442.500	-	-	-	-			1,00	147.442.500	100,00	98,30	Disdukcapil	-
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	75,00	36,95						
										Predikat Kinerja	(S)	(SR)						
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Jumlah Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Laporan**	**20,00**	**51.573.624**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	Disdukcapil	Kegiatan tidak prioritas
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	20,00	51.573.624	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Jumlah dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang diterbitkan**	**Dokumen**	**113,00**	**25.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	Disdukcapil	Kegiatan tidak prioritas
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen	16,00	25.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**58,33**	**28,55**						
										Predikat Kinerja	**(R)**	**(SR)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**100,00**	**50,58**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(R)**						
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**53.048.805.702**		**15.894.925.740**		**10.423.057.892**		**9.453.635.898**		**90,70**		**8.948.609.233**		**16,87**		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**32.196.164.013**		**6.175.014.167**		**4.026.140.872**		**3.325.193.550**		**82,59**		**8.948.609.233**		**27,79**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi**	**%**	**100,00**		**80,00**		**85,00**		**85,00**		**100,00**		**82,50**		**82,50**			
	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	**%**	**100,00**	**26.669.945.326**	**100,00**	**5.585.160.024**	**100,00**	**3.065.970.112**	**100,00**	**2.052.358.948**	**100,00**	**66,94**	**100,00**	**7.637.518.972**	**100,00**	**28,64**	DKBP3A	
	3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	**%**	**100,00**		**80,00**		**85,00**		**85,00**		**100,00**		**82,50**		**82,50**			
	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu**	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
	2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	**%**	**100,00**	**420.800.000**	**100,00**	**73.700.000**	**100,00**	**37.200.000**	**100,00**	**23.250.000**	**100,00**	**62,50**	**100,00**	**96.950.000**	**100,00**	**23,04**	DKBP3A	
	3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14,00	370.800.000	4,00	73.700.000	2,00	37.200.000	2,00	23.250.000	100,00	62,50	6,00	96.950.000	42,86	26,15	DKBP3A	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	21,00	50.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	62,50						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**100,00**	**16.613.486.781**	**100,00**	**4.532.719.774**	**100,00**	**2.528.858.893**	**100,00**	**2.175.226.888**	**100,00**	**86,02**	**100,00**	**6.707.946.662**	**100,00**	**40,38**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	23,00	16.321.886.781	15,00	4.476.829.774	23,00	2.508.458.893	23,00	2.162.476.888	100,00	86,21	15,00	6.639.306.662	65,22	40,68	DKBP3A	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	98,00	261.600.000	26,00	55.890.000	14,00	20.400.000	9,00	12.750.000	64,29	62,50	35,00	68.640.000	35,71	26,24	DKBP3A	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	30.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	126,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	7,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	82,14	74,35						
										Predikat Kinerja	(T)	(S)						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**Jenis dan Unit**	**32 dan 420**	**222.000.000**	**24 dan 257**	**40.300.000**	**32 dan 390**	**20.400.000**	**32 dan 359**	**12.750.000**	**96,03**	**62,50**	**32 dan 300**	**53.050.000**	**68,00**	**23,90**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	84,00	222.000.000	24,00	40.300.000	12,00	20.400.000	9,00	12.750.000	75,00	62,50	33,00	53.050.000	39,29	23,90	DKBP3A	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											75,00	62,50						
Predikat Kinerja											(S)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**981.604.897**	**100,00**	**57.800.000**	**100,00**	**33.600.000**	**100,00**	**21.000.000**	**100,00**	**62,50**	**100,00**	**78.800.000**	**100,00**	**8,03**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Set	520,00	251.914.897	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	168,00	384.690.000	46,00	57.800.000	24,00	33.600.000	18,00	21.000.000	75,00	62,50	64,00	78.800.000	38,10	20,48	DKBP3A	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25,00	85.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100,00	130.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100,00	130.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											75,00	62,50						
Predikat Kinerja											(S)	(R)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**2.459.229.675**	**100,00**	**280.050.377**	**100,00**	**138.949.712**	**100,00**	**115.241.419**	**100,00**	**82,94**	**100,00**	**395.291.796**	**100,00**	**16,07**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	49,00	55.029.329	9,00	4.456.840	6,00	2.120.580	5,00	2.019.600	83,33	95,24	14,00	6.476.440	28,57	11,77	DKBP3A	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	349,00	932.448.966	56,00	153.780.604	24,00	37.393.895	24,00	37.375.502	100,00	99,95	80,00	191.156.106	22,92	20,50	DKBP3A	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	205,00	672.557.296	48,00	12.776.761	19,00	6.317.547	19,00	6.317.547	100,00	100,00	67,00	19.094.308	32,68	2,84	DKBP3A	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	42,00	95.696.184	6,00	9.378.250	6,00	15.749.490	6,00	11.488.770	100,00	72,95	12,00	20.867.020	28,57	21,81	DKBP3A	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	9,00	87.013.200	7,00	11.300.000	7,00	6.787.200	7,00	6.684.000	100,00	98,48	7,00	17.984.000	77,78	20,67	DKBP3A	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	342,00	616.484.700	66,00	88.357.922	50,00	70.581.000	50,00	51.356.000	100,00	72,76	116,00	139.713.922	33,92	22,66	DKBP3A	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											97,22	89,90						
Predikat Kinerja											(ST)	(T)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**%**	**100,00**	**2.960.981.441**	**100,00**	**240.000.000**	**100,00**	**120.000.000**	**100,00**	**120.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**360.000.000**	**100,00**	**12,16**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	75,00	689.999.860	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	300,00	244.472.060	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	281,00	1.009.509.621	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	5,00	224.999.900	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	21,00	792.000.000	6,00	240.000.000	3,00	120.000.000	3,00	120.000.000	100,00	100,00	9,00	360.000.000	42,86	45,45	DKBP3A	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											100,00	100,00						
Predikat Kinerja											(ST)	(ST)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**100,00**	**1.262.278.749**	**100,00**	**229.391.379**	**100,00**	**123.364.255**	**100,00**	**84.789.048**	**100,00**	**68,73**	**100,00**	**314.180.427**	**100,00**	**24,89**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	84,00	42.400.000	24,00	4.651.500	12,00	2.420.000	12,00	2.409.000	100,00	99,55	36,00	7.060.500	42,86	16,65	DKBP3A	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	252,00	197.298.749	72,00	41.644.879	36,00	28.244.255	36,00	22.980.048	100,00	81,36	108,00	64.624.927	42,86	32,75	DKBP3A	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	420,00	1.022.580.000	120,00	183.095.000	60,00	92.700.000	45,00	59.400.000	75,00	64,08	165,00	242.495.000	39,29	23,71	DKBP3A	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											91,67	81,66						
Predikat Kinerja											(ST)	(T)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**100,00**	**1.749.563.783**	**100,00**	**131.198.494**	**100,00**	**63.597.252**	**100,00**	**51.700.077**	**100,00**	**81,29**	**100,00**	**182.898.571**	**100,00**	**10,45**		

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00	219.643.718	1,00	41.712.134	1,00	33.990.546	1,00	28.807.871	100,00	84,75	1,00	70.520.005	100,00	32,11	DKBP3A	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	61,00	453.140.323	37,00	78.406.222	23,00	16.856.706	22,00	10.892.206	95,65	64,62	37,00	89.298.428	60,66	19,71	DKBP3A	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	258,00	145.826.818	31,00	11.080.138	17,00	12.750.000	16,00	12.000.000	94,12	94,12	47,00	23.080.138	18,22	15,83	DKBP3A	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	5,00	99.980.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12,00	830.972.924	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	96,59	81,16						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**99,50**	**75,81**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(T)**						
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**	**%**	**18,55**	**2.110.067.850**	**9,48**	**328.901.393**	**13,14**	**649.074.840**	**13,14**	**542.657.838**	**100,00**	**83,60**	**11,31**	**871.559.231**	**60,97**	**41,30**		
	2. Persentase Kelembagaan PUG aktif	**%**	**96,15**		**90,00**		**93,85**		**93,85**		**100,00**		**91,93**		**95,61**			
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah regulasi tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun**	**Dokumen**	**132,00**	**606.268.273**	**2,00**	**25.585.000**	**1,00**	**287.075.000**	**1,00**	**284.878.720**	**100,00**	**99,23**	**3,00**	**310.463.720**	**2,27**	**51,21**		
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	12,00	122.873.060	-	-	1,00	286.000.000	1,00	283.803.720	100,00	99,23	1,00	283.803.720	8,33	230,97	DKBP3A	ini melebihi pagu RKPD karena ada sumber dana Banprov yang tidak terakomodir di RKPD murni
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	230,00	337.849.402	3,00	25.585.000	1,00	480.000	1,00	480.000	100,00	100,00	4,00	26.065.000	1,74	7,71	DKBP3A	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	40,00	73.272.982	-	-	1,00	595.000	1,00	595.000	100,00	100,00	1,00	595.000	2,50	0,81	DKBP3A	
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	40,00	72.272.829	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	99,74						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**	**Orang**	**100,00**	**1.365.199.777**	**100,00**	**303.316.393**	**100,00**	**361.999.840**	**100,00**	**257.779.118**	**100,00**	**71,21**	**100,00**	**561.095.511**	**100,00**	**41,10**		
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	14,00	1.170.199.857	5,00	288.716.393	1,00	329.399.920	1,00	247.279.118	100,00	75,07	6,00	535.995.511	42,86	45,80	DKBP3A	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Organisasi	7,00	194.999.920	1,00	14.600.000	1,00	32.599.920	1,00	10.500.000	100,00	32,21	2,00	25.100.000	28,57	12,87	DKBP3A	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	53,64						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**	**Lembaga**	**9,00**	**138.599.800**	-	-	-		-	-			-	-	-	-		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	9,00	46.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	15,00	46.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2,00	46.199.800	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**85,22**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(T)**						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar**	**%**	**90,00**	**517.733.458**	**-**	**17.400.000**	**84,00**	**2.135.000**	**84,00**	**2.135.000**	**100,00**	**100,00**	**42,00**	**19.535.000**	**46,67**	**3,77**		
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan yang dilaksanakan**	**Regulasi (Perda/Perbup)**	**7,00**	**129.522.513**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	7,00	64.761.264	-	-			-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	13,00	64.761.249	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia**	**Kasus**	**13,00**	**129.165.881**	**2,00**	**17.400.000**	**2,00**	**2.135.000**	**2,00**	**2.135.000**	**100,00**	**100,00**	**4,00**	**19.535.000**	**30,77**	**15,12**		
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	15,00	39.800.000	2,00	17.400.000			-	-			2,00	17.400.000	13,33	43,72	DKBP3A	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	15,00	89.365.881	-	-	2,00	2.135.000	2,00	2.135.000	100,00	100,00	2,00	2.135.000	13,33	2,39	DKBP3A	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	100,00						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**	**Lembaga**	**1,00**	**259.045.064**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5,00	64.761.065	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	7,00	64.761.333	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	20,00	64.761.333	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	6,00	64.761.333	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)**	**%**	**100,00**	**1.179.776.760**	**20,00**	**158.000.000**	**40,00**	**190.183.600**	**40,00**	**90.000.000**	**100,00**	**47,32**	**30,00**	**248.000.000**	**30,00**	**21,02**		
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah PEKKA yang mendapatkan pelatihan**	**Kelompok**	**7,00**	**1.179.776.760**	**1,00**	**158.000.000**	**1,00**	**190.183.600**	**1,00**	**90.000.000**	**100,00**	**47,32**	**2,00**	**248.000.000**	**28,57**	**21,02**		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	9,00	165.832.335	-	-	1,00	10.183.600	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	62,00	1.013.944.425	12,00	158.000.000	12,00	180.000.000	6,00	90.000.000	50,00	50,00	18,00	248.000.000	29,03	24,46	DKBP3A	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	25,00	25,00						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**47,32**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(SR)**						
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid**	**%**	**80,00**	**133.766.221**	-	-	-		-	-			-	-	-	-		

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen data gender dan anak yang tersusun**	**Dokumen**	**5,00**	**133.766.221**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	5,00	81.850.053	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	51.916.168	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**1. Persentase pemenuhan kelompok hak anak**	**%**	**100,00**	**88.665.414**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**51,16**	**-**	**51,16**	**-**	**75,58**	**-**	**75,58**	**-**		
	2. Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak	**Nilai**	**Nindya (700-800)**	**901.538.714**	**Madya (600-700)**	**85.552.750**	**Madya (600-700)**	**88.433.280**	**Madya (600-700)**	**82.133.280**	**100,00**	**92,88**	**650,00**	**167.686.030**	**86,67**	**18,60**		
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah pelembagaan PHA yang terbentuk**	**Lembaga**	**7,00**	**88.665.414**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	21,00	44.332.707	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	44.332.707	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**	**Lembaga**	**9,00**	**901.538.714**	**3,00**	**85.552.750**	**1,00**	**88.433.280**	**1,00**	**82.133.280**	**100,00**	**92,88**	**4,00**	**167.686.030**	**44,44**	**18,60**		
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	263,00	176.826.116	-	-	5,00	4.234.080	5,00	4.234.080	100,00	100,00	5,00	4.234.080	1,90	2,39	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	35,00	144.332.934	-	-			-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	44.332.866	-	-			-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	7,00	536.046.798	2,00	85.552.750	1,00	84.199.200	1,00	77.899.200	100,00	92,52	3,00	163.451.950	42,86	30,49	DKBP3A	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	96,26						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**92,88**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(ST)**						
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase penurunan kekrasan terhadap anak**	**%**	**10,00**	**594.670.270**	-	-	**16,00**	**30.344.040**	**12,00**	**4.310.000**	**75,00**	**14,20**	**6,00**	**4.310.000**	**60,00**	**0,72**		Pada program tersebut terjadi pemangkasan anggaran APBD
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak**	**Lembaga**	**11,00**	**428.672.232**	-	-	**1,00**	**30.344.040**	**1,00**	**4.310.000**	**100,00**	**14,20**	**1,00**	**4.310.000**	**9,09**	**1,01**		Pada kegiatan tersebut terjadi pemangkasan anggaran APBD
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	24,00	344.986.116	-	-	2,00	29.349.040	2,00	3.315.000	100,00	11,30	2,00	3.315.000	8,33	0,96	DKBP3A	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	24,00	83.686.116	-	-	2,00	995.000	2,00	995.000	100,00	100,00	2,00	995.000	8,33	1,19	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	55,65						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang tersedia**	**Lembaga**	**10,00**	**55.332.666**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10,00	55.332.666	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**	**Lembaga**	**10,00**	**110.665.372**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	15,00	55.332.706	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	25,00	55.332.666	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**14,20**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(SR)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**95,83**	**67,49**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(S)**						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**20.852.641.689**		**9.719.911.573**		**6.396.917.020**		**6.128.442.348**		**95,80**		**15.837.254.081**		**75,95**		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**1. Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA)**	**%**	**100,00**	**2.453.284.532**	**100,00**	**124.921.400**	**100,00**	**256.912.180**	**100,00**	**250.748.680**	**100,00**	**97,60**	**100,00**	**364.570.240**	**100,00**	**14,86**		
	2. Validitas data keluarga beresiko stunting	**%**	**100,00**	**-**	**100,00**	**15.980.000**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**		**50,00**	**15.980.000**	**50,00**	**-**		
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Jumlah koordinasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dilaksanakan**	**Kali kegiatan**	**5,00**	**1.418.827.865**	**-**	**-**	**1,00**	**25.899.680**	**1,00**	**25.899.680**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	**14.799.840**	**20,00**	**1,04**		
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	3,00	275.029.810	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Dokumen	2,00	51.024.174	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Dokumen	2,00	51.024.175	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen	5,00	94.564.696	-	-	1,00	14.799.840	1,00	14.799.840	100,00	100,00	1,00	14.799.840	20,00	15,65	DKBP3A	
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Dokumen	5,00	94.564.696	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	94.564.920	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	94.564.920	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Satuan Pendidikan	5,00	95.564.737	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Laporan	5,00	95.564.737	-	-	1,00	11.099.840	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Dokumen	5,00	94.564.737	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Organisasi	5,00	94.564.737	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Organisasi	5,00	95.564.737	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Laporan	5,00	94.564.737	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	5,00	93.102.052	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	100,00						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**1. Jumlah dokumen pemetaan pengendalian penduduk cakupan daerah yang disusun**	**Dokumen**	**5,00**	**1.034.456.667**	**1,00**	**124.921.400**	**1,00**	**231.012.500**	**1,00**	**224.849.000**	**100,00**	**97,33**	**2,00**	**349.770.400**	**40,00**	**33,81**		
	2. Jumlah dokumen data keluarga beresiko stunting	**Dokumen**	**10,00**	**-**	**2,00**	**15.980.000**	**2,00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**2,00**	**15.980.000**	**20,00**	**-**		
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unit	12,00	259.357.252	1,00	5.000.000	1,00	14.019.800	1,00	11.010.000	100,00	78,53	2,00	16.010.000	16,67	6,17	DKBP3A	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	10,00	389.385.878	-	-	2,00	76.200.000	2,00	76.200.000	100,00	100,00	2,00	76.200.000	20,00	19,57	DKBP3A	Ini melebihi pagu RKPD karena ada sumber dana DAK yang tidak terakomodir di RKPD murni
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1. Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	18,00	73.785.898	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
	2. Jumlah dokumen data keluarga beresiko stunting tingkat RT	Dokumen	15.980,00	-	3.196,00	15.980.000	-	-	-	-			3.196,00	15.980.000	20,00	-	DKBP3A	Bersumber dari DAK Non Fisik
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	17,00	99.027.379	1,00	15.000.000	1,00	76.200.000	1,00	76.200.000	100,00	100,00	2,00	91.200.000	11,76	92,10	DKBP3A	
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	72,00	117.335.878	12,00	104.921.400	12,00	48.000.000	12,00	44.846.300	100,00	93,43	24,00	149.767.700	33,33	127,64	DKBP3A	
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Laporan	6,00	95.564.382	-	-	1,00	16.592.700	1,00	16.592.700	100,00	100,00	1,00	16.592.700	16,67	17,36	DKBP3A	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	94,39						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**75,00**	**98,67**						
										Predikat Kinerja	**(S)**	**(ST)**						
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**1. Prevalensi peserta KB aktif**	**%**	**75,84**	**14.842.502.429**	**75,64**	**7.295.242.177**	**75,69**	**3.489.044.840**	**56,77**	**3.233.314.468**	**75,00**	**92,67**	**66,20**	**10.528.556.645**	**87,29**	**70,94**		
	2. Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting	**%**	**75,00**	**-**	**75,00**	**192.200.000**	**75,00**	**217.800.000**	**75,00**	**213.750.000**	**100,00**	**98,14**	**75,00**	**405.950.000**	**100,00**	**-**		Bersumber dari DAK Non Fisik
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**1. Jumlah kegiatan advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB yang dilaksanakan**	**Kali Kegiatan**	**17,00**	**6.958.811.962**	**6,00**	**1.786.444.350**	**4,00**	**1.683.232.000**	**4,00**	**1.442.391.475**	**100,00**	**85,69**	**10,00**	**3.228.835.825**	**58,82**	**46,40**		
	2. Jumlah kali rakor tentang stunting tingkat kecamatan	**Kali Kegiatan**	**60,00**	**-**	**12,00**	**192.200.000**	**12,00**	**217.800.000**	**9,00**	**213.750.000**	**75,00**	**98,14**	**21,00**	**405.950.000**	**35,00**	**-**		Bersumber dari DAK Non Fisik
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	4,00	202.636.282	4,00	4.000.000	4,00	120.000.000	4,00	120.000.000	100,00	100,00	8,00	124.000.000	200,00	61,19	DKBP3A	
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1,00	73.160.732	1,00	24.990.000	-	-	-	-			1,00	24.990.000	100,00	34,16	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	63,00	106.207.177	4,00	326.369.250	-	-	-	-			4,00	326.369.250	6,35	307,29	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	4,00	1.012.537.907	4,00	69.640.000	4,00	150.000.000	3,00	149.902.750	75,00	99,94	7,00	219.542.750	175,00	21,68	DKBP3A	
Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah media yang digunakan dalam pencitraan program KKBPK	Jenis	24,00	338.765.627	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1. Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi	Laporan	62,00	241.827.875	-	-	-	-	10,00	136.000.000			10,00	136.000.000	16,13	56,24	DKBP3A	
	2. Jumlah peserta rakor tentang stunting tingkat kecamatan	Orang	1.560,00	-	1.560,00	154.200.000	1.560,00	137.800.000	-	-	-	-	1.560,00	154.200.000	100,00	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	72,00	466.904.633	24,00	948.559.100	12,00	1.065.232.000	12,00	996.238.725	100,00	93,52	36,00	1.944.797.825	50,00	416,53	DKBP3A	
Pengendalian Program KKBPK	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	84,00	4.516.771.729	24,00	412.886.000	12,00	348.000.000	8,00	40.250.000	66,67	11,57	32,00	453.136.000	38,10	10,03	DKBP3A	
	2. Jumlah TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang di audit	Orang	320,00	-	320,00	38.000.000	320,00	80.000.000	320,00	213.750.000	100,00	267,19	320,00	251.750.000	100,00	-	DKBP3A	Bersumber dari DAK Non Fisik
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	73,61	95,37						
										Predikat Kinerja	(S)	(ST)						
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan**	**Orang**	**63,00**	**897.492.536**	**63,00**	**892.800.000**	**63,00**	**314.000.000**	**63,00**	**314.000.000**	**100,00**	**100,00**	**63,00**	**1.206.800.000**	**100,00**	**134,46**		
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	4,00	117.927.316	-	-	4,00	128.000.000	4,00	128.000.000	100,00	100,00	4,00	128.000.000	100,00	108,54	DKBP3A	
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	24,00	131.394.142	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	72,00	184.078.218	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1.123,00	464.092.860	1.123,00	892.800.000	1.123,00	186.000.000	744,00	186.000.000	66,25	100,00	1.123,00	1.078.800.000	100,00	232,45	DKBP3A	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	83,13	100,00						
										Predikat Kinerja	(T)	(ST)						
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan**	**Kali kegiatan**	**2.064,00**	**4.497.017.647**	**336,00**	**3.575.437.827**	**336,00**	**1.002.312.840**	**183,00**	**990.522.993**	**54,46**	**98,82**	**519,00**	**4.565.960.820**	**25,15**	**101,53**		
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	72,00	460.653.516	24,00	51.617.500	12,00	15.300.000	8,00	14.251.000	66,67	93,14	32,00	65.868.500	44,44	14,30	DKBP3A	
Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana	Orang	16,00	77.304.914	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	32.867,00	2.402.462.972	14.436,00	1.522.895.827	1.749,00	975.312.840	2.170,00	964.571.993	124,07	98,90	16.606,00	2.487.467.820	50,52	103,54	DKBP3A	
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	72,00	172.712.895	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen	72,00	85.831.378	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	37,00	607.706.378	39,00	1.992.524.500	-	-	-	-			39,00	1.992.524.500	105,41	327,88	DKBP3A	
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang	1.787,00	86.783.118	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	72,00	153.817.606	12,00	8.400.000	12,00	11.700.000	8,00	11.700.000	66,67	100,00	20,00	20.100.000	27,78	13,07	DKBP3A	
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	1.787,00	113.324.654	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	86,00	223.095.562	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	17,00	113.324.654	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	85,80	97,35					
										Predikat Kinerja	(T)	(ST)					
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Jumlah kampung KB yang mendapat pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB**	**Kampung kb**	**31,00**	**2.489.180.284**	**31,00**	**1.040.560.000**	**31,00**	**489.500.000**	**31,00**	**486.400.000**	**100,00**	**99,37**	**31,00**	**1.526.960.000**	**100,00**	**61,34**		
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	4,00	123.557.536	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	72,00	833.719.490	-	-	12,00	9.000.000	12,00	9.000.000	100,00	100,00	12,00	9.000.000	16,67	1,08	DKBP3A	
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	31,00	698.183.768	31,00	1.040.560.000	31,00	480.500.000	31,00	477.400.000	100,00	99,35	31,00	1.517.960.000	100,00	217,42	DKBP3A	
Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	72,00	833.719.490	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	99,68					
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)					
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**85,49**	**97,53**					
										Predikat Kinerja	**(T)**	**(ST)**					
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**1. Persentase peningkatan pemberdayaan Keluarga Sejahtera**	**%**	**80,02**	**3.556.854.728**	**76,02**	**676.878.000**	**77,02**	**363.460.000**	**77,02**	**361.060.000**	**100,00**	**99,34**	**76,52**	**1.037.938.000**	**95,63**	**29,18**		
	2. Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting bagi calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil dan Ibu pasca persalinan	**%**	**75,00**	**-**	**75,00**	**1.414.689.996**	**75,00**	**2.069.700.000**	**75,00**	**2.069.569.200**	**100,00**	**99,99**	**75,00**	**3.484.259.196**	**100,00**	**-**		
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**1. Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina**	**Kelompok**	**387,00**	**1.964.675.338**	**2,00**	**676.878.000**	**2,00**	**363.460.000**	**2,00**	**361.060.000**	**100,00**	**99,34**	**4,00**	**1.037.938.000**	**1,03**	**52,83**		
	2. Jumlah pembinaan tentang stunting yang dilaksanakan	**Kali Kegiatan**	**60,00**	**-**	**12,00**	**1.414.689.996**	**12,00**	**2.069.700.000**	**12,00**	**2.069.569.200**	**100,00**	**99,99**	**24,00**	**3.484.259.196**	**40,00**	**-**		
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	120,00	-	39,00	629.055.500	30,00	352.200.000	20,00	352.200.000	66,67	100,00	59,00	981.255.500	49,17	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Laporan	72,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	25,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1. Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	500,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
	2. Jumlah sasaran pembinaan stunting	Orang	13.500,00	-	13.500,00	1.414.689.996	########	2.069.700.000	13.500,00	2.069.569.200	100,00	99,99	27.000,00	3.484.259.196	200,00	-	DKBP3A	
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	100,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	60,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	10,00	1.627.803.582	2,00	47.822.500	2,00	11.260.000	2,00	8.860.000	100,00	78,69	4,00	56.682.500	40,00	3,48	DKBP3A	
Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen	1,00	64.478.626	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen	1,00	64.478.626	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	
Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	30,00	64.478.626	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	30,00	64.478.626	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	2,00	78.957.252	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	88,89	92,89						
										Predikat Kinerja	(T)	(ST)						
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	**Kelompok**	**5,00**	**1.592.179.390**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	20,00	592.393.130	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	4,00	592.393.130	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	20,00	407.393.130	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**99,67**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(ST)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**79,17**	**97,56**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(T)**	**(ST)**						
DINAS PERHUBUNGAN																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				**113.406.209.751**		**10.657.542.008**		**16.529.066.254**		**13.816.716.327**		**83,59**		**24.474.258.335**		**21,58**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi**	**%**	**100,00**		**100,00**		**85,00**		**85,00**		**100,00**		**92,50**		**92,50**			
	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
	3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	**%**	**100,00**	**80.399.001.329**	**100,00**	**9.300.514.294**	**85,00**	**13.267.064.604**	**85,00**	**12.066.070.002**	**100,00**	**90,95**	**92,50**	**21.366.584.296**	**92,50**	**26,58**	DISHUB	
	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu**	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
	2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	**%**	**100,00**	**347.045.196**	**100,00**	**19.860.000**	**100,00**	**22.834.400**	**100,00**	**17.090.900**	**100,00**	**74,85**	**100,00**	**36.950.900**	**100,00**	**10,65**		
	3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		DISHUB	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20,00	334.452.543	3,00	19.860.000	4,00	22.834.400	4,00	17.090.900	100,00	74,85	3,50	36.950.900	17,50	11,05		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20,00	12.592.653	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	74,85						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**100,00**	**16.050.497.396**	**100,00**	**1.973.245.293**	**100,00**	**2.281.443.395**	**100,00**	**1.812.062.599**	**100,00**	**79,43**	**100,00**	**3.785.307.892**	**100,00**	**23,58**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	20,00	15.290.430.736	20,00	1.926.555.293	15,00	2.181.808.995	15,00	1.730.971.699	100,00	79,34	17,50	3.657.526.992	87,50	23,92		

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60,00	207.864.780	12,00	19.300.000	12,00	22.834.400	12,00	17.090.900	100,00	74,85	12,00	36.390.900	20,00	17,51	DISHUB	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15,00	552.201.880	2,00	27.390.000	3,00	76.800.000	3,00	64.000.000	100,00	83,33	2,50	91.390.000	16,67	16,55		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	79,17						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100,00**	**160.000.000**	**100,00**	**19.300.000**	**100,00**	**22.834.400**	**100,00**	**15.390.900**	**100,00**	**67,40**	**100,00**	**34.690.900**	**100,00**	**21,68**	DISHUB	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60,00	160.000.000	12,00	19.300.000	12,00	22.834.400	12,00	15.390.900	100,00	67,40	12,00	34.690.900	20,00	21,68		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	67,40						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah**	**%**	**100,00**	**1.283.000.000**	**100,00**	**135.300.000**	**100,00**	**160.178.400**	**100,00**	**106.299.900**	**100,00**	**66,36**	**100,00**	**241.599.900**	**100,00**	**18,83**	DISHUB	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	60,00	1.283.000.000	12,00	135.300.000	12,00	160.178.400	12,00	106.299.900	100,00	66,36	12,00	241.599.900	20,00	18,83		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	66,36						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**177.360.000**	**100,00**	**20.420.000**	**100,00**	**18.934.400**	**100,00**	**12.690.900**	**100,00**	**67,03**	**100,00**	**33.110.900**	**100,00**	**18,67**		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	25,00	137.520.000	5,00	11.600.000	5,00	18.934.400	5,00	12.690.900	100,00	67,03	5,00	24.290.900	20,00	17,66	DISHUB	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60,00	39.840.000	12,00	8.820.000	-	-	-	-			6,00	8.820.000	10,00	-		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	67,03						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**2.989.118.507**	**100,00**	**328.576.747**	**100,00**	**416.588.887**	**100,00**	**279.549.835**	**100,00**	**67,10**	**100,00**	**608.126.582**	**100,00**	**20,34**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	65.507.216	5,00	9.150.500	5,00	6.037.002	5,00	5.020.000	100,00	83,15	5,00	14.170.500	100,00	21,63		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	1.124.669.172	5,00	209.134.125	5,00	79.219.335	5,00	44.282.000	100,00	55,90	5,00	253.416.125	100,00	22,53		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	30,00	91.515.945	26,00	10.519.000	30,00	12.483.096	30,00	8.471.000	100,00	67,86	28,00	18.990.000	93,33	20,75	DISHUB	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20,00	506.818.614	17,00	21.435.600	20,00	162.236.954	20,00	86.600.835	100,00	53,38	18,50	108.036.435	92,50	21,32		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	50,00	75.760.000		-	10,00	10.000.500	10,00	9.620.000	100,00	96,20	-	-	-	-		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60,00	1.124.847.560	12,00	78.337.522	12,00	146.612.000	12,00	125.556.000	100,00	85,64	12,00	203.893.522	20,00	18,13		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	73,69						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**100,00**	**1.090.612.000**	**100,00**	**100.000.000**	**100,00**	**205.000.000**	**100,00**	**120.000.000**	**100,00**	**58,54**	**100,00**	**220.000.000**	**100,00**	**20,17**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit	4,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	2,00	30.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	860.612.000	1,00	100.000.000	1,00	205.000.000	1,00	120.000.000	100,00	58,54	1,00	220.000.000	100,00	25,56		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	58,54						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**100,00**	**55.925.872.715**	**100,00**	**6.580.399.597**	**100,00**	**9.815.965.120**	**100,00**	**9.339.058.293**	**100,00**	**95,14**	**100,00**	**15.919.457.890**	**100,00**	**28,47**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60,00	20.946.350	12,00	2.520.000	12,00	3.906.560	9,00	3.090.000	75,00	79,10	10,50	5.610.000	17,50	26,78		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00	53.724.425.730	12,00	6.405.939.597	12,00	9.487.072.560	12,00	9.133.258.793	100,00	96,27	12,00	15.539.198.390	20,00	28,92	DISHUB	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	75,00	2.180.500.635	15,00	171.940.000	15,00	324.986.000	15,00	202.709.500	100,00	62,37	15,00	374.649.500	20,00	17,18		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	91,67	79,25						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100,00**	**2.375.495.515**	**100,00**	**123.412.657**	**100,00**	**323.285.602**	**100,00**	**363.926.675**	**100,00**	**112,57**	**100,00**	**487.339.332**	**100,00**	**20,52**		

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	55,00	2.080.783.847	11,00	112.382.657	11,00	306.270.225	11,00	358.441.675	100,00	117,03	11,00	470.824.332	20,00	22,63		Mandatori Pimpinan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	115,00	149.102.000	23,00	11.030.000	23,00	15.000.000	23,00	3.500.000	100,00	23,33	23,00	14.530.000	20,00	9,75	DISHUB	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20,00	145.609.668	-	-	4,00	2.015.377	4,00	1.985.000	100,00	98,49	2,00	1.985.000	10,00	1,36		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	79,62						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**76,49**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(T)**						
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Persentase Pelayanan Angkutan Darat**	**%**	**20,00**		**-**		**15,00**		**14,00**		**93,33**		**7,00**		**35,00**			
	Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	**%**	**20,00**		**-**		**5,00**		**3,50**		**70,00**		**1,75**		**8,75**			
	Presentase Pelayanan Izin Trayek	**%**	**30,00**	**33.007.208.422**	**-**	**1.357.027.714**	**10,00**	**3.262.001.650**	**10,20**	**1.750.646.325**	**102,00**	**53,67**	**5,10**	**3.107.674.039**	**17,00**	**9,42**	DISHUB	
	Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	**%**	**75,00**		**45,00**		**60,00**		**60,00**		**100,00**		**52,50**		**70,00**			
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**5,00**	**3.371.596.000**	**-**	**-**	**1,00**	**-**	**-**	**-**			**16,67**	**-**	**16,67**	**-**		
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	3,00	3.104.596.000	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-		
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00	180.000.000	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	3,00	87.000.000	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Unit**	**3.816,00**	**17.696.807.161**		**697.817.172**	**195,00**	**2.721.597.300**	**195,00**	**1.409.623.825**	**100,00**	**51,79**	**27,39**	**2.107.440.997**	**27,39**	**11,91**		
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	1,00	91.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2.995,00	14.740.656.203	5.000,00	316.541.363	195,00	2.337.827.380	195,00	1.334.737.525	100,00	57,09	5.195,00	1.651.278.888	173,46	11,20	DISHUB	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Unit	125,00	714.418.958	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	695,00	2.150.732.000	500,00	381.275.809	110,00	383.769.920	110,00	74.886.300	100,00	19,51	610,00	456.162.109	87,77	21,21		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	38,30						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Terminal**	**2,00**	**739.000.000**	**-**	**-**	**2,00**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen	1,00	160.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Pembangunan Gedung Terminal	Unit	-		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Unit	10,00	260.000.000	-	-	10,00	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Unit	8,00	160.000.000	-	-	2,00	-	-	-			-	-	-	-		
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Orang	10,00	159.000.000	-	-	7,00	-	-	-			-	-	-	-		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Laporan**	**60,00**	**557.580.500**		**-**	**12,00**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Koordinasi dan Sinkronasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	60,00	557.580.500	-	-	4,00	-	-	-			-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Laporan**	**60,00**	**1.910.840.000**		**22.100.000**	**12,00**	**32.668.800**	**12,00**	**21.781.800**	**100,00**	**66,67**	**12,00**	**43.881.800**	**20,00**	**2,30**		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	40,00	932.840.000	12,00	22.100.000	10,00	32.668.800	3,00	21.781.800	30,00	66,67	15,00	43.881.800	37,50	4,70		Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Khususnya Dinas Perhubungan belum mempunyai gedung uji dan alat uji, untuk sementara ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran untuk status alat uji yang digunakan sekarang adalah alat uji pinjam pakai dari Kemenhub yang bersifat tidak tetap sehingga sewaktu waktu alat uji tersebut bisa dipinjam pakai oleh Kabupaten/Kota lain berdasarkan kebijakan Kementerian.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	13.300,00	104.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	1.200,00	360.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2,00	245.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	1,00	120.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1,00	100.000.000	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-		
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1,00	49.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											30,00	66,67						
Predikat Kinerja											(SR)	(S)						
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Laporan**	**60,00**	**5.685.740.000**		**637.110.542**	**12,00**	**468.791.200**	**12,00**	**319.240.700**	**100,00**	**68,10**	**25,00**	**956.351.242**	**25,00**	**16,82**		
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Laporan	60,00	4.832.740.000	12,00	637.110.542	12,00	468.791.200	12,00	319.240.700	100,00	68,10	12,00	956.351.242	20,00	19,79		
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	1,00	200.000.000	-	-	30,00	-	-	-			-	-	30,00	-		
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	18,00	464.000.000	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	48,00	144.000.000	-	-	1,00	-	-	-			-	-	1,00	-		
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1,00	45.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											100,00	68,10						
Predikat Kinerja											(ST)	(S)						
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Laporan**	**60,00**	**387.723.700**	**-**	**-**	**12,00**	**38.944.350**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	5,00	126.076.500	-	-	1,00	38.944.350	-	-	-	-	-	-	-	-		
Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Orang	7,00	112.330.000	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang dilaksanakan	Laporan	60,00	149.317.200	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Laporan**	**25,00**	**735.244.150**	**-**	**-**	**5,00**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	DISHUB	
Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Orang	20,00	226.996.950	-	-	4,00	-	-	-			-	-	-	-		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	12,00	103.544.640	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	60,00	295.952.640	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	25,00	100.000.000	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	12,00	8.749.920	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Unit**	**63,00**	**285.000.440**	**-**	**-**	**10,00**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	DISHUB	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan	60,00	285.000.440	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**1,00**	**215.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	DISHUB	
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	180.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi	1,00	35.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**5,00**	**471.884.080**		**-**	**1,00**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	DISHUB	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	125.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	200.445.700	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-		
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	146.438.380	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**2,00**	**234.000.000**	**-**	**-**	**1,00**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	DISHUB	
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	100.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	134.000.000	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan**	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan**	**60,00**	**195.477.540**		**-**	**12,00**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4,00	195.477.540		-	1,00	-	-	-			-	-	-	-		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan**	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan**	**60,00**	**521.314.851**	**-**	**-**	**12,00**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00	160.606.836	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	209.999.760	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-		
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5,00	150.708.255	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**75,00**	**46,64**						
										Predikat Kinerja	**(S)**	**(SR)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**95,67**	**72,31**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(S)**						
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				**51.522.319.503**		**4.085.992.393**		**4.437.805.656**		**2.684.819.274**		**60,50**		**6.770.811.667**		**13,14**	Diskominfo	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**48.755.319.632**		**4.085.992.393**		**4.437.805.656**		**2.684.819.274**		**60,50**		**6.770.811.667**		**13,89**	Diskominfo	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**47.467.401.632**		**4.070.692.393**		**4.405.019.656**		**2.663.830.768**		**60,47**		**6.734.523.161**		**14,19**	Diskominfo	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi** **2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik** **3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur** **4. Persentase Perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas**	**%**	**95,00**	**26.583.937.878**	**91,00**	**3.208.030.328**	**92,00**	**3.579.326.466**	**92,00**	**2.800.886.881**	**100,00**	**78,25**	**91,50**	**6.008.917.209**	**96,32**	**22,60**	Diskominfo	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu** **2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu** **3. Persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu**	**%**	**95,00**	**215.900.000**	**91,00**	**18.450.000**	**92,00**	**20.400.000**	**92,00**	**12.750.000**	**100,00**	**62,50**	**91,50**	**31.200.000**	**96,32**	**14,45**	Diskominfo	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dilaksanakan	laporan	5,00	3.100.000		-		-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	15,00	212.800.000	3,00	18.450.000	3,00	20.400.000	3,00	12.750.000	100,00	62,50	3,00	31.200.000	100,00	14,66	Diskominfo	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	62,50						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**95,00**	**15.794.252.148**	**91,00**	**2.417.236.717**	**92,00**	**2.733.178.747**	**92,00**	**2.096.301.951**	**100,00**	**76,70**	**91,50**	**4.513.538.668**	**96,32**	**28,58**	Diskominfo	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	30,00	15.559.352.148	23,00	2.398.786.717	27,00	2.712.778.747	27,00	2.083.551.951	100,00	76,81	18,00	4.482.338.668	85,71	28,81	Diskominfo	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keungan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	15,00	230.800.000	3,00	18.450.000	3,00	20.400.000	3,00	12.750.000	100,00	62,50	3,00	31.200.000	100,00	13,52	Diskominfo	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dilaksanakan	laporan	5,00	2.050.000		-		-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang tersusun	laporan	5,00	2.050.000		-		-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	69,65						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang millik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**unit**	**1.550,00**	**212.800.000**	**250,00**	**18.450.000**	**255,00**	**20.400.000**	**250,00**	**12.750.000**	**98,04**	**62,50**	**500,00**	**31.200.000**	**32,26**	**14,66**	Diskominfo	
Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	5,00	212.800.000	1,00	18.450.000	2,00	20.400.000	2,00	12.750.000	100,00	62,50	1,00	31.200.000	14,29	14,66	Diskominfo	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	62,50						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Adminsitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase peningkatan retribusi yang diterima perangkat daerah**	**%**	**5,00**	**169.500.000**	**5,00**	**17.400.000**	**5,00**	**19.200.000**	**5,00**	**12.000.000**	**100,00**	**62,50**	**5,00**	**29.400.000**	**50,00**	**17,35**	Diskominfo	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	5,00	169.500.000	1,00	17.400.000	1,00	19.200.000	1,00	12.000.000	100,00	62,50	1,00	29.400.000	100,00	17,35	Diskominfo	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	62,50						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik**	**%**	**95,00**	**153.320.000**	**91,00**	**15.300.000**	**92,00**	**16.800.000**	**92,00**	**10.500.000**	**100,00**	**62,50**	**91,50**	**25.800.000**	**96,32**	**16,83**	Diskominfo	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	15,00	153.320.000	3,00	15.300.000	3,00	16.800.000	12,00	10.500.000	100,00	62,50	3,00	25.800.000	100,00	16,83	Diskominfo	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	62,50						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik**	**%**	**95,00**	**3.478.469.630**	**91,00**	**136.830.365**	**92,00**	**91.728.268**	**92,00**	**80.657.750**	**100,00**	**87,93**	**91,50**	**217.488.115**	**96,32**	**6,25**	Diskominfo	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1,00	33.043.030	1,00	714.000	1,00	527.340	1,00	518.000	100,00	98,23	1,00	1.232.000	20,00	3,73	Diskominfo	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1,00	1.287.690.950	2,00	74.017.365	1,00	10.039.921	1,00	10.026.000	100,00	99,86	1,00	84.043.365	100,00	6,53	Diskominfo	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1,00	46.565.650	1,00	2.059.500	1,00	997.007	1,00	923.000	100,00	92,58	1,00	2.982.500	100,00	6,40	Diskominfo	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1,00	15.063.000		-		-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	3,00	114.870.000	3,00	4.304.500	3,00	7.194.000	3,00	6.512.750	100,00	90,53	1,00	10.817.250	33,33	9,42	Diskominfo	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	5,00	149.400.000	1,00	15.360.000	6,00	18.000.000	6,00	12.900.000	100,00	71,67	6,00	28.260.000	100,00	18,92	Diskominfo	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	138,00	1.831.837.000	24,00	40.375.000	26,00	54.970.000	26,00	49.778.000	100,00	90,55	12,00	90.153.000	50,00	4,92	Diskominfo	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	90,57						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi**	**%**	**95,00**	**2.137.500.000**	**91,00**	**100.000.000**	**92,00**	**111.000.000**	**92,00**	**111.000.000**	**100,00**	**100,00**	**91,50**	**211.000.000**	**96,32**	**9,87**	Diskominfo	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	unit	25,00	172.500.000		-	30,00	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	42,00	105.000.000		-	100,00	-	-	-			1,00	-	100,00	-	Diskominfo	Sewa gedung kantor selama 1 tahun
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	unit	5,00	810.000.000	1,00	100.000.000	1,00	111.000.000	1,00	111.000.000	100,00	100,00	2,00	-	0,40	-	Diskominfo	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit	2,00	700.000.000		-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit	4,00	350.000.000		-	12,00	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	100,00						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Penyediaan Jasa Penunjang Uursan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**95,00**	**3.182.079.552**	**91,00**	**407.873.346**	**92,00**	**464.702.975**	**92,00**	**376.446.155**	**100,00**	**81,01**	**91,50**	**784.319.501**	**96,32**	**24,65**	Diskominfo	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	230,00	58.100.000	1,00	3.025.350	40,00	4.000.000	16,00	3.630.000	40,00	90,75	1,00	6.655.350	2,50	11,45	Diskominfo	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	25,00	2.030.591.552	5,00	311.991.996	5,00	350.398.975	5,00	314.928.155	100,00	89,88	3,00	626.920.151	60,00	30,87	Diskominfo	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	15,00	1.093.388.000	3,00	92.856.000	4,00	110.304.000	4,00	57.888.000	100,00	52,48	4,00	150.744.000	100,00	13,79	Diskominfo	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	80,00	77,70						
										Predikat Kinerja	(T)	(T)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**95,00**	**1.240.116.548**	**91,00**	**76.489.900**	**92,00**	**101.916.476**	**92,00**	**88.481.025**	**100,00**	**86,82**	**91,50**	**164.970.925**	**96,32**	**13,30**	Diskominfo	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	17,00	871.181.548	2,00	60.992.800	3,00	82.798.360	2,00	74.650.500	66,67	90,16	2,00	135.643.300	100,00	15,57	Diskominfo	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	24,00	276.895.000	3,00	9.572.100	4,00	15.368.116	3,00	10.930.525	75,00	71,12	3,00	20.502.625	100,00	7,40	Diskominfo	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	34,00	55.100.000	5,00	5.925.000	6,00	3.750.000	6,00	2.900.000	100,00	77,33	5,00	8.825.000	100,00	16,02	Diskominfo	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5,00	36.940.000		-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	80,56	79,54						
										Predikat Kinerja	(T)	(T)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**99,78**	**75,83**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(T)**						
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase tata kelola layanan informasi publik, Persentase tata kelola komunikasi publik**	**%**	**75,00**	**11.674.139.974**	**60,00**	**640.018.565**	**60,00**	**501.637.190**	**60,00**	**489.807.452**	**100,00**	**97,64**	**60,00**	**1.129.826.017**	**80,00**	**9,68**	Diskominfo	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase ketersediaan konten yang dipublikasikan, Persentase pengelolaan media massa dan lainnya**	**%**	**80,00**	**11.674.139.974**	**60,00**	**640.018.565**	**65,00**	**501.637.190**	**64,00**	**489.807.452**	**98,46**	**97,64**	**62,00**	**1.129.826.017**	**77,50**	**9,68**	Diskominfo	
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1. Jumlah kebijakan teknis bidang informasi publik yang dijalankan dengan baik; 2. Jumlah kebijakan teknis bidang komunikasi publik yang dijalankan dengan baik	dokumen	30,00	520.000.000		-	8,00	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah yang diinformasikan kepada publik	dokumen	139,00	223.999.974		-	25,00	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah yang diinformasikan kepada publik	dokumen	10,00	193.000.000		-	2,00	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah konten yang dipublikasikan	dokumen	5,00	215.000.000		-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dokumen	10,00	580.340.000	2,00	54.071.565	1,00	22.325.000	1,00	16.475.000	100,00	73,80	1,00	70.546.565	100,00	12,16	Diskominfo	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	5,00	346.800.000	1,00	14.250.000	1,00	15.600.000	1,00	9.750.000	100,00	62,50	1,00	24.000.000	100,00	6,92	Diskominfo	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	orang	200,00	170.000.000		-	100,00	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	dokumen	15,00	9.000.000.000	3,00	571.697.000	3,00	463.712.190	3,00	463.582.452	100,00	99,97	3,00	1.035.279.452	100,00	11,50	Diskominfo	
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang dikelola	unit	47,00	425.000.000		-		-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	78,76						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**98,46**	**97,64**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(ST)**						
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**Tingkat kematangan tata kelola SPBE**	**Indeks**	**3,50**	**9.209.323.780**	**3,10**	**222.643.500**	**3,20**	**324.056.000**	**3,10**	**115.000.000**	**96,88**	**35,49**	**6,20**	**337.643.500**	**88,57**	**3,67**	Diskominfo	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	**1. Persentase domain yang terkelola; 2. Persentase sub domain yang terkelola**	**%**	**100 85**	**3.058.000.000**		-	**100; 85**	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah domain yang berjalan dengan baik; 2. Jumlah sub domain yang berjalan dengan baik	dokumen	5,00	248.000.000	1,20	-	1,00	-	-	-			1,20	-	0,24	-	Diskominfo	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang terhubung ke jaringan intra pemerintah daerah	unit	40,00	2.810.000.000		-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase OPD yang memiliki layanan publik berbasis sistem elektronik**	**%**	**75,00**	**6.151.323.780**	**5,00**	**222.643.500**	**65,00**	**324.056.000**	**62,00**	**115.000.000**	**95,38**	**35,49**	**33,50**	**337.643.500**	**44,67**	**5,49**	Diskominfo	
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	unit	23,00	1.274.000.000	3,50	-	3,00	-	-	-			3,50	-	0,15	-	Diskominfo	
sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah dokumen sinkronisasi pengelolaan rencana induk yang disusun	dokumen	2,00	400.000.000		-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit	30,00	1.169.800.000	4,00	96.300.000	3,00	120.000.000	3,00	67.500.000	100,00	56,25	2,00	163.800.000	50,00	14,00	Diskominfo	
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	5,00	1.901.523.780	1,00	126.343.500	1,00	204.056.000	1,00	47.500.000	100,00	23,28	1,00	173.843.500	100,00	9,14	Diskominfo	
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	1. Jumlah pengembangan infrastruktur Kabupaten cerdas; 2. Cakupan pengelolaan ekosistem Kabupaten Cerdas	dokumen	4,00	1.210.000.000		-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi pemerintah daerah	dokumen					1,00	-	-	-								
Monitoring evaluasi dan Pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi SPBE	dokumen	4,00	196.000.000		-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	39,76						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**95,38**	**35,49**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(SR)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**98,96**	**70,46**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(S)**						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				**2.766.999.871**		-	**60,00**	**15.986.000**		**12.588.506**		**78,75**		-			Diskominfo	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Persentase publikasi data statistik sektoral**	**%**	**75,00**	**2.766.999.871**		-	**60,00**	**15.986.000**	**60,00**	**12.588.506**	**100,00**	**78,75**	**30,00**	**12.588.506**	**20,00**	**0,45**	Diskominfo	
Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	**Jumlah dokumen statistik sektoral yang dipub**	**publikasi**	**15,00**	**2.766.999.871**		-	**60,00**	**15.986.000**	**60,00**	**12.588.506**	**100,00**	**78,75**	**60,00**	**12.588.506**	**400,00**	**0,45**	Diskominfo	
Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1. Jumlah koordinasi pemenuhan dan analisis data statistik sektoral dengan OPD; 2. Jumlah pengumpulan dan pengolahan data; 3. Jumlah analisis dan diseminasi data statistik sektoral	dokumen	5,00	1.236.999.871		-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
Peningkatan Kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya	orang	150,00	310.000.000		-	150,00	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang disusun	dokumen	15,00	590.000.000		-	3,00	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
Pengembangan infrastruktur	Jumlah infrastruktur statistik sektoral yang dikelola	unit	5,00	630.000.000		-	1,00	15.986.000	1,00	12.588.506	100,00	78,75	1,00	-	0,20	-	Diskominfo	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	78,75						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**78,75**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(T)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**100,00**	**78,75**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(T)**						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				**1.287.918.000**		**15.300.000**		**16.800.000**		**10.500.000**		**62,50**		**25.800.000**				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman**	**%**	**40,00**	**1.287.918.000**	**25,00**	**15.300.000**	**25,00**	**16.800.000**	**20,00**	**10.500.000**	**80,00**	**62,50**	**22,50**	**25.800.000**	**56,25**	**2,00**	Diskominfo	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah**	**%**	**40,00**	**999.998.000**	**1,00**	-	**25,00**	-	-	-			**0,50**	-	**1,25**	-	Diskominfo	
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang diuji keamanannya	laporan	5,00	999.998.000	1,00	-	1,00	-	-	-			1,00	-	0,20	-	Diskominfo	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah prosedur komunikasi sandi antar perangkat daerah yang disusun**	**prosedur**	**16,00**	**287.920.000**	**1,00**	**15.300.000**	**2,00**	**16.800.000**	**2,00**	**10.500.000**	**100,00**	**62,50**	**3,00**	**25.800.000**	**6,67**	**8,96**	Diskominfo	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Operasionalisasi Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	perangkat daerah	5,00	287.920.000	1,00	15.300.000	10,00	16.800.000	10,00	10.500.000	100,00	62,50	11,00	25.800.000	6,67	8,96	Diskominfo	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	62,50						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**62,50**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(R)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**80,00**	**62,50**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(T)**	**(R)**						
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**21.636.636.875**		**3.277.065.073**		**7.039.648.892**		**4.642.666.163**		**65,95**		**7.919.731.236**		**36,60**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tingkat Kualitas dan Kapasitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran**	**Nilai**	**64,00**	**16.784.994.145**	**60,00**	**2.498.390.643**	**61,00**	**6.389.654.561**	**61,00**	**4.194.466.913**	**100,00**	**65,64**	**60,50**	**6.692.857.556**	**94,53**	**26,44**	DPMPTSP	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun**	**Dokumen**	**15,00**	**276.827.520**	**6,00**	**24.953.180**	**6,00**	**31.295.940**	**6,00**	**20.400.000**	**100,00**	**65,18**	**6,00**	**45.353.180**	**40,00**	**16,38**	DPMPTSP	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12,00	6.772.000	3,00	-	-	-	-	-			3,00	-	25,00	-	DPMPTSP	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	36,00	212.103.520	6,00	20.150.000	3,00	21.000.000	3,00	13.600.000	100,00	64,76	9,00	33.750.000	25,00	15,91	DPMPTSP	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18,00	30.864.000	3,00	4.803.180	3,00	10.295.940	2,00	6.800.000	66,67	66,05	5,00	11.603.180	27,78	37,59	DPMPTSP	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6,00	6.772.000	-	-	-	-										
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	6,00	6.772.000	-	-	-	-										
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	6,00	6.772.000	-	-	-	-										
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	6,00	6.772.000	-	-	-	-										
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	83,33	65,40						
										Predikat Kinerja	(T)	(S)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**Dokumen**	**90,00**	**12.635.744.103**	**36,00**	**1.969.317.203**	**15,00**	**1.837.943.350**	**15,00**	**1.381.960.733**	**100,00**	**75,19**	**25,50**	**3.351.277.936**	**28,33**	**26,52**	DPMPTSP	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	96,00	12.456.811.663	16,00	1.945.923.203	16,00	1.811.903.350	9,00	1.368.360.733	56,25	75,52	16,00	3.314.283.936	16,67	26,61	DPMPTSP	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	13.072.000	2,00	1.622.000	2,00	2.520.000	-	-	-	-	2,00	1.622.000	16,67	12,41	DPMPTSP	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6,00	31.180.000	1,00	1.622.000	1,00	2.520.000	-	-	-	-	1,00	1.622.000	16,67	5,20	DPMPTSP	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6,00	134.680.440	1,00	20.150.000	1,00	21.000.000	1,00	13.600.000	100,00	64,76	2,00	33.750.000	33,33	25,06	DPMPTSP	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	39,06	35,07						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**6,00**	**134.680.440**	**1,00**	**20.150.000**	**1,00**	**21.000.000**	**1,00**	**13.600.000**	**100,00**	**64,76**	**1,00**	**33.750.000**	**16,67**	**25,06**	DPMPTSP	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	6,00	134.680.440	1,00	20.150.000	1,00	21.000.000	1,00	13.600.000	100,00	64,76	2,00	33.750.000	33,33	25,06	DPMPTSP	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	64,76						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**Laporan**	**6,00**	**134.680.440**	**1,00**	**20.150.000**	**1,00**	**21.000.000**	**1,00**	**13.600.000**	**100,00**	**64,76**	**2,00**	**33.750.000**	**33,33**	**25,06**	DPMPTSP	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6,00	134.680.440	1,00	20.150.000	1,00	21.000.000	1,00	13.600.000	100,00	64,76	2,00	33.750.000	33,33	25,06	DPMPTSP	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	64,76						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**Dokumen**	**6,00**	**392.131.079**	**1,00**	**27.627.000**	**1,00**	**17.400.000**	**1,00**	**11.200.000**	**100,00**	**64,37**	**1,00**	**38.827.000**	**16,67**	**9,90**	DPMPTSP	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	6,00	112.942.000	1,00	16.700.000	1,00	17.400.000	1,00	11.200.000	100,00	64,37	2,00	27.900.000	33,33	24,70	DPMPTSP	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	16,00	11.000.000	16,00	10.927.000	-	-	-	-			16,00	10.927.000	100,00	-	DPMPTSP	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	199.488.768	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	68.700.311	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	64,37						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**Laporan**	**18,00**	**1.292.072.433**	**6,00**	**154.779.489**	**3,00**	**446.416.317**	**3,00**	**186.987.846**	**100,00**	**41,89**	**4,50**	**341.767.335**	**25,00**	**26,45**	DPMPTSP	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	113.955.725	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36,00	156.879.160	4,00	13.820.000	6,00	37.804.000	4,00	10.761.500	66,67	28,47	8,00	24.581.500	22,22	15,67	DPMPTSP	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30,00	12.458.562	5,00	1.000.000	5,00	10.820.330	1,00	515.000	20,00	4,76	6,00	1.515.000	20,00	12,16	DPMPTSP	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	36,00	104.518.899	4,00	4.586.850	6,00	108.372.857	3,00	4.654.100	50,00	4,29	7,00	9.240.950	19,44	8,84	DPMPTSP	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	90,00	68.619.200	12,00	9.200.000	10,00	20.954.800	4,00	6.450.000	40,00	30,78	16,00	15.650.000	17,78	22,81	DPMPTSP	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	347,00	572.106.426	27,00	86.872.534	30,00	140.235.000	24,00	123.628.216	80,00	88,16	51,00	210.500.750	14,70	36,79	DPMPTSP	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	420,00	263.534.461	69,00	39.300.105	70,00	128.229.330	30,00	40.979.030	42,86	31,96	99,00	80.279.135	23,57	30,46	DPMPTSP	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	49,92	31,40						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**Laporan**	**18,00**	**1.075.505.308**	**6,00**	**146.893.120**	**3,00**	**525.614.404**	**3,00**	**332.943.813**	**100,00**	**63,34**	**4,50**	**479.836.933**	**25,00**	**44,62**	DPMPTSP	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	182,00	17.510.000	110,00	3.100.000	12,00	2.800.000	4,00	1.800.000	33,33	64,29	114,00	4.900.000	62,64	27,98	DPMPTSP	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	356.121.700	2,00	48.000.000	3,00	408.364.404	3,00	270.803.662	100,00	66,31	5,00	318.803.662	41,67	89,52	DPMPTSP	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36,00	701.873.608	5,00	95.793.120	6,00	114.450.000	4,00	60.340.151	66,67	52,72	9,00	156.133.271	25,00	22,25	DPMPTSP	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	66,67	61,11						
										Predikat Kinerja	(S)	(R)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**Laporan**	**6,00**	**201.722.930**	**1,00**	**23.583.125**	**1,00**	**3.309.504.190**	**1,00**	**2.104.141.991**	**100,00**	**63,58**	**1,00**	**2.127.725.116**	**16,67**	**1.054,78**	DPMPTSP	Ada penambahan target kinerja dan anggaran untuk sarpras Gedung MPP
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00	92.928.055	4,00	14.233.125	394,00	2.388.008.912	362,00	2.104.141.991	91,88	88,11	366,00	2.118.375.116	7.320,00	2.279,59	DPMPTSP	Ada penambahan target kinerja dan anggaran untuk sarpras Gedung MPP
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7,00	68.794.875	1,00	9.350.000	45,00	921.495.278	-	-	-	-	1,00	9.350.000	14,29	13,59	DPMPTSP	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	#DIV/0!	DPMPTSP	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	45,94	44,06						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**Laporan**	**24,00**	**641.629.892**	**8,00**	**110.937.526**	**4,00**	**179.480.360**	**4,00**	**129.632.530**	**100,00**	**72,23**	**6,00**	**240.570.056**	**25,00**	**37,49**	DPMPTSP	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	31,00	55.851.392	1,00	8.025.000	1,00	64.030.360	1,00	63.130.000	100,00	98,59	2,00	71.155.000	6,45	127,40	DPMPTSP	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00	267.608.000	1,00	48.494.242	1,00	40.000.000	1,00	30.194.730	100,00	75,49	2,00	78.688.972	33,33	29,40	DPMPTSP	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30,00	279.170.500	5,00	49.048.284	5,00	60.700.000	5,00	34.313.000	100,00	56,53	10,00	83.361.284	33,33	29,86	DPMPTSP	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	26,00	39.000.000	15,00	5.370.000	3,00	14.750.000	1,00	1.994.800	33,33	13,52	16,00	7.364.800	61,54	18,88	DPMPTSP	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	83,33	61,03						
										Predikat Kinerja	(T)	(R)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**63,92**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(R)**						
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Cakupan Pertumbuhan Jumlah Investor**	**Jumlah Investor**	**10.500,00**	**654.778.000**	**1.000,00**	**100.109.800**	-	-	-	-			**1.000,00**	**100.109.800**	**9,52**	**15,29**	DPMPTSP	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dan jenis Dokumen/Laporan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**6,00**	**332.289.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1,00	110.763.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	2,00	221.526.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Jumlah dan Jenis Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**6,00**	**322.489.000**	**1,00**	**100.109.800**	-	-	-	-			**1,00**	**100.109.800**	**16,67**	**31,04**	DPMPTSP	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	100.963.000	1,00	100.109.800	-	-	-	-			1,00	100.109.800	100,00	99,15	DPMPTSP	
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	221.526.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Terpublikasi**	**Kegiatan Promosi**	**73,00**	**699.285.700**	**13,00**	-	-	-	-	-			**13,00**	-	**17,81**	-	DPMPTSP	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah/Jenis Dokumen/Laporan Event Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**38,00**	**699.285.700**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	110.763.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	36,00	588.522.700	-	-	7,00	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal**	**Nilai**	**70,00**	**2.125.390.780**	**100,00**	**330.119.630**	**80,00**	**178.709.031**	**80,00**	**65.385.500**	**100,00**	**36,59**	**90,00**	**395.505.130**	**128,57**	**18,61**	DPMPTSP	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Jangka Waktu Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang Tepat Waktu Sesuai SOP**	**Laporan**	**6,00**	**2.125.390.780**	**1,00**	**330.119.630**	**1,00**	**178.709.031**	**1,00**	**65.385.500**	**100,00**	**36,59**	**1,00**	**395.505.130**	**16,67**	**18,61**	DPMPTSP	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	2.130,00	810.801.020	305,00	120.832.530	335,00	102.809.031	31.505,00	17.495.500	9.404,48	17,02	31.810,00	138.328.030	1.493,43	17,06	DPMPTSP	Data yang didapat merupakan angka riil, dikarenakan semua perizinan berusaha di keluarkan melalui OSS
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	2.130,00	694.856.760	305,00	88.200.000	240,00	39.300.000	84,00	22.500.000	35,00	57,25	389,00	110.700.000	18,26	15,93	DPMPTSP	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	600,00	369.749.700	25,00	21.038.000	100,00	36.600.000	4,00	25.390.000	4,00	69,37	29,00	46.428.000	4,83	12,56	DPMPTSP	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	2.130,00	249.983.300	305,00	100.049.100	-	-	-	-			305,00	100.049.100	14,32	40,02	DPMPTSP	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	3.147,83	47,88						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**36,59**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(SR)**						
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Cakupan Kepatuhan Pendataan Nilai Investasi PMDN & PMA Terhadap Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah**	**Kegiatan Pengendalian**	**73,00**	**1.293.802.250**	**5,00**	**348.445.000**	**10,00**	**430.565.300**	**10,00**	**382.813.750**	**100,00**	**88,91**	**15,00**	**731.258.750**	**20,55**	**56,52**	DPMPTSP	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah/Jenis Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan**	**Laporan**	**18,00**	**1.293.802.250**	**3,00**	**348.445.000**	**3,00**	**430.565.300**	**3,00**	**382.813.750**	**100,00**	**88,91**	**6,00**	**731.258.750**	**33,33**	**56,52**	DPMPTSP	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	100,00	80.920.000	305,00	26.075.000	-	-	-	-			305,00	26.075.000	305,00	32,22	DPMPTSP	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	50,00	713.875.800	305,00	210.466.000	240,00	248.613.760	478,00	236.813.750	199,17	95,25	783,00	447.279.750	-	62,66	DPMPTSP	Karena adanya tambahan anggaran DAK Non Fisik dari Provinsi terjadi penyesuaian pada target
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	219,00	499.006.450	305,00	111.904.000	240,00	181.951.540	295,00	146.000.000	122,92	80,24	600,00	257.904.000	273,97	51,68	DPMPTSP	Karena adanya tambahan anggaran DAK Non Fisik dari Provinsi terjadi penyesuaian pada target
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	161,04	87,75						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**88,91**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(T)**						
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Cakupan Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Dokumen**	**45,00**	**78.386.000**	-	-	**10,00**	**40.720.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**3,00**	**78.386.000**	-	-	**1,00**	**40.720.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	48,00	78.386.000	-	-	1,00	40.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**75,00**	**47,79**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(S)**	**(SR)**						
DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				**57.244.555.421**		**9.154.136.600**		**5.248.177.400**		**3.427.222.089**		**65,30**		**12.581.358.689**		**21,98**		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				**37.603.142.542**		**7.652.973.366**		**4.142.863.216**		**2.542.169.005**		**61,36**		**10.195.142.371**		**27,11**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi**	**%**	**100,00**	**26.164.054.210**	**100,00**	**6.128.278.110**	**100,00**	**3.508.393.816**	**100,00**	**2.983.143.401**	**100,00**	**85,03**	**100,00**	**9.111.421.511**	**100,00**	**34,82**	Diskopdagin	
	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
	3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu (%)**	**%**	**100,00**	**329.684.000**	**100,00**	**53.479.000**	**100,00**	**33.267.400**	**100,00**	**25.583.800**	**100,00**	**76,90**	**100,00**	**79.062.800**	**100,00**	**23,98**	Diskopdagin	
	2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu (%)	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
	3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu (%)	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12,00	210.493.000	4,00	42.940.000	3,00	22.534.400	2,00	14.850.800	66,67	65,90	6,00	57.790.800	50,00	27,45	Diskopdagin	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	15,00	11.944.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	15,00	11.944.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	15,00	11.944.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	15,00	11.944.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15,00	29.810.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18,00	41.605.000	6,00	10.539.000	3,00	10.733.000	3,00	10.733.000	100,00	100,00	9,00	21.272.000	50,00	51,13	Diskopdagin	Anggaran ditambahkan di PPAS
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	83,33	82,95						
										Predikat kinerja	(T)	(T)						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik (%)**	**%**	**100,00**	**16.433.260.485**	**100,00**	**4.262.347.410**	**100,00**	**2.611.899.326**	**100,00**	**2.215.685.110**	**100,00**	**84,83**	**100,00**	**6.478.032.520**	**100,00**	**39,42**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	137,00	16.057.678.335	39,00	4.210.831.660	19,00	2.589.364.926	21,00	2.200.834.310	110,53	85,00	60,00	6.411.665.970	43,80	39,93	Diskopdagin	Adanya Penambahan CASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72,00	209.610.000	24,00	39.450.000	12,00	20.534.400	12,00	12.850.800	100,00	62,58	36,00	52.300.800	50,00	24,95	Diskopdagin	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	60,00	25.082.400	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	72,00	100.402.750	2,00	12.065.750	1,00	2.000.000	1,00	2.000.000	100,00	100,00	3,00	14.065.750	4,17	14,01	Diskopdagin	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	10,00	11.944.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	12.983.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	10,00	15.560.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	103,51	82,53						
										Predikat kinerja	(ST)	(T)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100,00**	**263.856.200**	**100,00**	**40.535.000**	**100,00**	**24.400.000**	**100,00**	**16.716.400**	**100,00**	**68,51**	**100,00**	**57.251.400**	**100,00**	**21,70**		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10,00	11.944.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	5,00	5.662.000	10,00	-		-	-	-			10,00	-	200,00	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5,00	9.625.400	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60,00	14.332.800	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72,00	209.032.000	18,00	40.535.000	12,00	24.400.000	12,00	16.716.400	100,00	68,51	30,00	57.251.400	41,67	27,39	Diskopdagin	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4,00	13.260.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	68,51						
										Predikat kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah**	**%**	**100,00**	**1.374.079.300**	**100,00**	**208.365.000**	**100,00**	**122.460.400**	**100,00**	**76.775.200**	**100,00**	**62,69**	**100,00**	**285.140.200**	**100,00**	**20,75**		
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	5,00	139.230.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	2.368,00	1.051.713.300	2,00	167.400.000	1,00	101.606.400	1,00	63.604.800	100,00	62,60	3,00	231.004.800	0,13	21,96	Diskopdagin	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	72,00	183.136.000	14,00	40.965.000	12,00	20.854.000	12,00	13.170.400	100,00	63,16	26,00	54.135.400	36,11	29,56	Diskopdagin	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	62,88						
										Predikat kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**781.434.660**	**100,00**	**528.984.300**	**100,00**	**16.934.400**	**100,00**	**10.600.800**	**100,00**	**62,60**	**100,00**	**539.585.100**	**100,00**	**69,05**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	220,00	125.366.860	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	72,00	241.067.800	24,00	48.000.000	12,00	16.934.400	12,00	10.600.800	100,00	62,60	36,00	58.600.800	50,00	24,31	Diskopdagin	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	120,00	415.000.000	15,00	480.984.300	-	-	-	-			15,00	480.984.300	12,50	115,90	Diskopdagin	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	62,60						
										Predikat kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100,00**	**2.940.759.360**	**100,00**	**336.179.239**	**100,00**	**231.585.040**	**100,00**	**221.334.460**	**100,00**	**95,57**	**100,00**	**557.513.699**	**100,00**	**18,96**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	9.784.884	2,00	1.501.000	1,00	1.500.000	1,00	1.500.000	100,00	100,00	3,00	3.001.000	50,00	30,67	Diskopdagin	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	453.890.381	2,00	88.200.543	1,00	51.000.000	1,00	51.000.000	100,00	100,00	3,00	139.200.543	50,00	30,67	Diskopdagin	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6,00	113.538.552	2,00	9.338.164	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	100,00	100,00	3,00	19.338.164	50,00	17,03	Diskopdagin	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	27.120.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20,00	329.431.858	2,00	76.939.555	1,00	54.722.240	1,00	54.722.240	100,00	100,00	3,00	131.661.795	15,00	39,97	Diskopdagin	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60,00	85.380.576	24,00	22.500.000	12,00	12.000.000	12,00	12.000.000	100,00	100,00	36,00	34.500.000	60,00	40,41	Diskopdagin	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5,00	49.269.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60,00	65.692.000	12,00	10.417.500	12,00	4.750.000	12,00	4.750.000	100,00	100,00	24,00	15.167.500	40,00	23,09	Diskopdagin	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	165,00	1.521.781.949	121,00	100.432.477	60,00	63.744.000	60,00	68.294.220	100,00	107,14	181,00	168.726.697	109,70	11,09	Diskopdagin	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	60,00	135.000.000	-	-	12,00	16.934.400	12,00	9.889.600	100,00	58,40					Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	72,00	149.870.160	15,00	26.850.000	1,00	16.934.400	1,00	9.178.400	100,00	54,20	16,00	36.028.400	22,22	24,04	Diskopdagin	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	91,08						
										Predikat kinerja	(ST)	(ST)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**%**	**100,00**	**1.748.851.810**	**100,00**	**232.000.000**	**100,00**	**160.000.000**	**100,00**	**160.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**392.000.000**	**100,00**	**22,41**		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6,00	191.904.100	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6,00	224.700.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	40,00	138.752.586	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14,00	331.855.124	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12,00	861.640.000	4,00	232.000.000	2,00	160.000.000	2,00	160.000.000	100,00	100,00	6,00	392.000.000	50,00	45,49	Diskopdagin	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	100,00						
										Predikat kinerja	(ST)	(ST)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediaka**	**%**	**100,00**	**1.212.752.587**	**100,00**	**263.361.012**	**100,00**	**162.304.750**	**100,00**	**125.937.525**	**100,00**	**77,59**	**100,00**	**389.298.537**	**100,00**	**32,10**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3.005,00	25.810.972	24,00	4.147.700	12,00	3.500.000	12,00	3.498.500	100,00	99,96	36,00	7.646.200	1,20	29,62	Diskopdagin	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	62,00	417.820.065	14,00	113.924.412	24,00	79.339.550	24,00	76.023.925	100,00	95,82	38,00	189.948.337	61,29	45,46	Diskopdagin	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00	769.121.550	24,00	145.288.900	12,00	79.465.200	12,00	46.415.100	100,00	58,41	36,00	191.704.000	50,00	24,93	Diskopdagin	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	84,73						
										Predikat kinerja	(ST)	(T)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**100,00**	**1.079.375.808**	**100,00**	**203.027.149**	**100,00**	**145.542.500**	**100,00**	**130.510.106**	**100,00**	**89,67**	**100,00**	**333.537.255**	**100,00**	**30,90**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	72,00	311.726.748	2,00	68.776.520	1,00	39.424.000	1,00	34.196.520	100,00	86,74	3,00	102.973.040	4,17	33,03	Diskopdagin	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	100,00	613.105.200	15,00	110.166.929	8,00	76.118.500	8,00	66.313.586	100,00	87,12	23,00	176.480.515	23,00	28,78	Diskopdagin	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	72,00	19.707.600	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100,00	95.580.000	24,00	17.495.600	10,00	14.000.000	10,00	14.000.000	100,00	100,00	34,00	31.495.600	34,00	32,95	Diskopdagin	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	72,00	39.256.260	7,00	6.588.100	1,00	16.000.000	1,00	16.000.000	100,00	100,00	8,00	22.588.100	11,11	57,54	Diskopdagin	Pindah gedung kantor ke tempat yang lebih strategis ditambah pagu dipergeseran
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	93,46						
										Predikat kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**79,82**						
										Predikat kinerja	**(ST)**	**(T)**						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase Peningkatan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**	**%**		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbe	**Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dalam satu tahun (%)**	**%**		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		-						
										Predikat kinerja		(SR)	(SR)					
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang dalam satu tahun (%)**	**%**		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		-						
										Predikat kinerja		(SR)	(SR)					
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri	**Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri dalam satu tahun (%)**	**%**		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		-						
										Predikat kinerja		(SR)	(SR)					
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri	**Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri dalam satu tahun (%)**	**%**		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		-						
										Predikat kinerja		(SR)	(SR)					
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	**Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat dalam satu tahun (%)**	**%**		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		-						
										Predikat kinerja		(SR)	(SR)					
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam satu tahun (%)**	**%**		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Pemeriksanaan Penyimpanan Bahan berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		-						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	**Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) dalam satu tahun (%)**	**%**		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi**	**%**	**38,46**	**5.694.351.541**	**26,92**	**1.296.878.250**	**26,92**	**45.148.800**	**25,00**	**32.481.600**	**92,87**	**71,94**	**25,96**	**1.329.359.850**	**67,50**	**23,35**		
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi**	**Unit**	**5,00**	**4.749.991.541**	**-**	**1.249.578.250**		-	-	-			-	**1.249.578.250**	-	**26,31**		
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	6,00	4.512.991.541	1,00	1.249.578.250		-	-	-			1,00	1.249.578.250	16,67	27,69	Diskopdagin	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	12,00	237.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	**Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya**	**Orang**	**375,00**	**944.360.000**	**75,00**	**47.300.000**	**75,00**	**45.148.800**	**75,00**	**32.481.600**	**100,00**	**71,94**	**150,00**	**79.781.600**	**40,00**	**8,45**		
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	6,00	279.360.000	1,00	42.300.000	1,00	-	-	-			1,00	42.300.000	16,67	15,14	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	5,00	665.000.000	-	5.000.000	1,00	45.148.800	1,00	32.481.600	100,00	71,94	1,00	37.481.600	20,00	5,64	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	71,94						
										Predikat kinerja	(ST)	(S)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**71,94**						
										Predikat kinerja	**(ST)**	**(S)**						
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil**	**%**	**83,00**	**2.619.991.791**	**71,43**	**124.600.000**	**66,67**	**512.800.000**	**66,67**	**36.795.800**	**100,00**	**7,18**	**69,05**	**161.395.800**	**83,19**	**6,16**		
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terjamin ketersediannya**	**Barang pokok dan penting**	**18,00**	**975.000.000**	**18,00**	**32.100.000**		-	**18,00**	-			**18,00**	**32.100.000**	**100,00**	**3,29**		
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	60,00	325.000.000	5,00	32.100.000		-	1,00	-			6,00	32.100.000	10,00	9,88	Diskopdagin	
Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	60,00	325.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	60,00	325.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya**	**Barang Pokok**	**21,00**	**1.287.491.791**	**21,00**	**92.500.000**	**21,00**	**512.800.000**	**21,00**	**36.795.800**	**100,00**	**7,18**	**42,00**	**129.295.800**	**100,00**	**10,04**		
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	60,00	375.000.000	6,00	63.300.000	4,00	487.800.000	4,00	11.795.800	100,00	2,42	10,00	75.095.800	16,67	20,03	Diskopdagin	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	60,00	512.491.791	4,00	4.200.000		-	-	-			4,00	4.200.000	6,67	0,82	Diskopdagin	
Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	6,00	400.000.000	4,00	25.000.000	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	100,00	100,00	5,00	50.000.000	83,33	12,50	Diskopdagin	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	51,21						
										Predikat kinerja	(ST)	(R)						
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pupuk dan pestisida yang diterima oleh masyarakat**	**Jenis Pupuk**	**4,00**	**357.500.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	4,00	102.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	5,00	127.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	5,00	127.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**7,18**						
										Predikat kinerja	**(ST)**	**(SR)**						
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Persentase peningkatan nilai ekspor**	**%**	**20,00**	**881.500.000**	**10,00**	**-**		**-**	**10,00**	**-**			**10,00**	**-**	**50,00**	**-**		
Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Produk Ekspor Unggulan yang meningkat penjualannya**	**Produk**	**15,00**	**881.500.000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku Usaha	15,00	260.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	10,00	255.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	10,00	260.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	15,00	41.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	15,00	39.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	15,00	25.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**-**	**-**						
										Predikat kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase UTTP yang tertib ukur**	**%**	**56,41**	**1.421.245.000**	**51,28**	**103.217.006**	**52,56**	**31.870.600**	**52,56**	**29.748.200**	**100,00**	**93,34**	**51,92**	**132.965.206**	**92,04**	**9,36**		
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Jumlah UTTP yang ditera, tera ulang, dan diawasi**	**Unit**	**2.500,00**	**1.421.245.000**	**3.431,00**	**103.217.006**	**2.100,00**	**31.870.600**	**2.000,00**	**29.748.200**	**95,24**	**93,34**	**5.431,00**	**132.965.206**	**217,24**	**9,36**		
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	12.300,00	894.745.000	45,00	103.217.006	2.100,00	31.870.600	2.000,00	29.748.200	95,24	93,34	2.045,00	132.965.206	16,63	14,86	Diskopdagin	
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	32,00	271.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	10,00	255.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	95,24	93,34						
										Predikat kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**95,24**	**93,34**						
										Predikat kinerja	**(ST)**	**(ST)**						
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya**	**%**	**3,00**	**822.000.000**	**1,00**	**-**	**1,50**	**44.650.000**	**1,00**	**44.650.000**	**66,67**	**100,00**	**1,00**	**44.650.000**	**33,33**	**5,43**		
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Jumlah produk lokal yang meningkat omsetnya**	**Produk**	**17,00**	**822.000.000**	**3,00**	**-**	**3,00**	**44.650.000**	**3,00**	**44.650.000**	**100,00**	**100,00**	**6,00**	**44.650.000**	**35,29**	**5,43**		
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	25,00	127.000.000	-	-	5,00	44.650.000	12,00	44.650.000	240,00	100,00	12,00	44.650.000	48,00	35,16	Diskopdagin	Konsep acara berubah sehingga permintaan panitia untuk peserta bertambah
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, *Marketplace,* Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	15,00	266.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	5,00	399.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	90,00	30.000.000	-	-	-	-						-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	240,00	100,00						
										Predikat kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**100,00**						
										Predikat kinerja	**(ST)**	**(ST)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**91,91**	**71,50**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(S)**						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI UKM				**13.972.398.199**		**746.058.078**		**482.712.190**		**471.544.990**		**97,69**		**1.217.603.068**		**8,71**		
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	**Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam (%)**	**%**		**-**		**-**		**-**		**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlayani (%)**	**%**		-		-		-		-			-	-	-	-		
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terlayani (%)**	**%**		-		-		-		-			-	-	-	-		
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kotai	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Persentase Koperasi yang patuh**	**%**	**55,00**	**1.300.367.000**	**97,61**	**100.631.000**	**50,68**	**43.443.800**	**50,29**	**30.776.600**	**99,23**	**70,84**	**73,95**	**131.407.600**	**134,45**	**10,11**		
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	**Jumlah koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan**	**Koperasi**	**200,00**	**1.300.367.000**	**73,00**	**100.631.000**	**37,00**	**43.443.800**	**37,00**	**30.776.600**	**100,00**	**70,84**	**110,00**	**131.407.600**	**55,00**	**10,11**		
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	205,00	1.050.367.000	82,00	100.631.000	40,00	43.443.800	40,00	30.776.600	100,00	70,84	122,00	131.407.600	59,51	12,51	Diskopdagin	
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Unit Usaha	175,00	250.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	70,84						
										Predikat kinerja	(ST)	(S)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**70,84**						
										Predikat kinerja	**(ST)**	**(S)**						
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Persentase Koperasi yang meningkat status kesehatannya**	**%**	**70,00**	**625.000.000**	**3,03**	-	-	-	**3,03**	-			**3,03**	-	**4,33**	-		
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah	**Jumlah koperasi yang meningkat status kesehatannya**	**Koperasi**	**23,00**	**625.000.000**	**1,00**	-	-	-	**1,00**	-			**2,00**	-	**8,70**	-		
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	103,00	375.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	5,00	250.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase SDM Pengelola Koperasi bersertifikat**	**%**	**50,00**	**480.000.000**	-	**399.498.000**	**35,00**	**379.783.000**	**100,00**	**381.283.000**	**285,71**	**100,39**	**50,00**	**780.781.000**	**100,00**	**162,66**		
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya**	**Pengelola Koperasi**	**23,00**	**400.000.000**	-	**399.498.000**	**25,00**	**379.783.000**	**100,00**	**381.283.000**	**400,00**	**100,39**	**100,00**	**780.781.000**	**434,78**	**195,20**		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	145,00	400.000.000			25,00	379.783.000	100,00	381.283.000	400,00	100,39	100,00	381.283.000	68,97	95,32	Diskopdagin	Perubahan Juknis DAK yang menambah peserta
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	400,00	100,39						
										Predikat kinerja	(ST)	(ST)						
Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah SDM UKM yang meningkat kapasitasnya**	**Pelaku UKM**	**30,00**	**40.000.000**			-	-	-	-					-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UKM yang memahami pengetahuan Kewirausahaan	Pelaku UKM	120,00	40.000.000			-	-	-	-					-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah SDM Usaha Mikro yang meningkat kapasitasnya**	**Pelaku Usaha Mikro**	**30,00**	**40.000.000**			-	-	-	-					-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM Usaha mikro yang memahami pengetahuan Kewirausahaan	Pelaku Usaha Mikro	120,00	40.000.000	30,00	399.498.000	-	-	-	-					-	-	Diskopdagin	Ada penambahan DAK non fisik PK2UMK
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**400,00**	**100,39**						
										Predikat kinerja	**(ST)**	**(ST)**						
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya**	**%**	**5,00**	**1.000.000.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah koperasi yang meningkat volume usahanya**	**Kopeasi**	**21,00**	**1.000.000.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	150,00	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**-**	**-**						
										Predikat kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya**	**%**	**15,00**	**4.135.000.000**	**1,10**	**217.451.978**		-	**1,10**	-			**1,10**	**217.451.978**	**7,33**	**5,26**		
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya**	**Wirausaha Baru**	**5.000,00**	**4.135.000.000**	**120,00**	**217.451.978**		-	**50,00**	-			**170,00**	**217.451.978**	**3,40**	**5,26**		
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	151.000,00	1.310.000.000	45.000,00	217.451.978	-	-	-	-			45.000,00	217.451.978	29,80	16,60	Diskopdagin	
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	240,00	1.550.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	240,00	280.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	150,00	535.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	150,00	270.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	120,00	190.000.000	-	-	-	-							-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**-**	**-**						
										Predikat kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase Usaha Mikro yang naik kelas**	**%**	**0,60**	**6.432.031.199**	**0,10**	**28.477.100**	**0,10**	**59.485.390**	**0,05**	**59.485.390**	**50,00**	**100,00**	**0,08**	**87.962.490**	**12,50**	**1,37**		
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Jumlah usaha mikro yang naik kelas**	**Pelaku**	**500,00**	**6.432.031.199**	**100,00**	**28.477.100**	**100,00**	**59.485.390**	**50,00**	**59.485.390**	**50,00**	**100,00**	**150,00**	**87.962.490**	**30,00**	**1,37**		
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	600,00	6.432.031.199	100,00	28.477.100	100,00	59.485.390	50,00	59.485.390	50,00	100,00	150,00	87.962.490	25,00	1,37	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	50,00	100,00						
										Predikat kinerja	(SR)	(ST)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	50,00	100,00						
										Predikat kinerja	**(SR)**	**(ST)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**144,98**	**90,41**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(ST)**						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				**5.669.014.680**		**755.105.156**		**622.601.994**		**608.237.544**			-	**1.363.342.700**				
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani**	**%**	**100,00**	**4.289.424.846**	**75,00**	**721.563.356**	**60,00**	**616.957.194**	**60,00**	**602.603.944**	**100,00**	**97,67**	**67,50**	**1.324.167.300**	**67,50**	**30,87**		
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Persentase Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**%**	**90,00**	**4.289.424.846**	**90,00**	**721.563.356**	**60,00**	**616.957.194**	**56,00**	**602.603.944**	**93,33**	**97,67**	**73,00**	**1.324.167.300**	**81,11**	**30,87**		

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	3,00	110.000.000	1,00	10.152.250	1,00	90.635.094	1,00	89.819.594	100,00	99,10	2,00	99.971.844	66,67	90,88	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	42,00	400.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	53,00	651.173.170	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	25,00	450.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	60,00	1.339.125.838	21,00	711.411.106	20,00	526.322.100	20,00	512.784.350	100,00	97,43	41,00	1.224.195.456	68,33	91,42	Diskopdagin	
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	5,00	1.339.125.838	-	-	-	-	-	-					-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	98,26						
										Predikat kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**93,33**	**97,67**						
										Predikat kinerja	**(ST)**	**(ST)**						
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	**Persentase Industri Kecil dan menengah yang berizin**	**%**	**100,00**	**410.000.000**	**100,00**	**-**		**-**	**15,00**	**-**			**57,50**	**-**	**57,50**	**-**		
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah IUI Kecil dan Menengah yang difasilitasi perizinannya**	**Dokumen**	**45,00**	**410.000.000**	**4,00**	**-**		**-**	**4,00**	**-**			**8,00**	**-**	**17,78**	**-**		
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	150,00	190.000.000	4,00	-		-	-	-			4,00	-	2,67	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	150,00	220.000.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**-**	**-**						
										Predikat kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Persentase Jumlah Data Informasi Industri Kabupaten Pangandaran yang diiformasikan**	**%**	**50,00**	**969.589.834**	**15,00**	**33.541.800**	**20,00**	**5.644.800**	**4,00**	**5.633.600**	**20,00**	**99,80**	**9,50**	**39.175.400**	**19,00**	**4,04**		
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Informasi Industri yang Tersedia**	**Data**	**120,00**	**969.589.834**	**40,00**	**33.541.800**	**20,00**	**5.644.800**	**6,00**	**5.633.600**	**30,00**	**99,80**	**46,00**	**39.175.400**	**38,33**	**4,04**		
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	63,00	711.000.000	10,00	33.541.800	6,00	5.644.800	4,00	5.633.600	66,67	99,80	14,00	39.175.400	22,22	5,51	Diskopdagin	
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	17,00	129.294.917	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	17,00	129.294.917	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Bukan Kegiatan Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	66,67	99,80						
										Predikat kinerja	(S)	(ST)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**30,00**	**99,80**						
										Predikat kinerja	**(SR)**	**(ST)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**60,00**	**98,74**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(R)**	**(ST)**						
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				**38.474.184.325**		**3.031.706.124**		**4.132.275.548**		**3.039.701.634**		**73,56**		**6.071.407.758**				
URUSAN PERPUSTAKAAN				**36.623.429.487**		**2.983.536.124**		**4.084.703.841**		**3.007.987.130**		**73,64**		**5.991.523.254**				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi**	**%**	**95,00**	**31.945.445.945**	**89,00**	**2.327.255.474**	**90,00**	**3.190.540.317**	**79,10**	**2.327.785.746**	**87,89**	**72,96**	**84,05**	**4.655.041.220**	**88,47**	**14,57**	Dispusip	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1 Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2 Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3 Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu**	**%**	**85,00**	**450.652.076**	**55,00**	**23.799.750**	**50,00**	**47.279.550**	**39,76**	**29.883.347**	**79,52**	**63,21**	**47,38**	**53.683.097**	**55,74**	**11,91**	Dispusip	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10,00	439.457.856	4,00	22.599.750	2,00	43.955.800	2,00	28.169.597	100,00	64,09	6,00	50.769.347	60,00	11,55	Dispusip	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	11.194.220	1,00	1.200.000	1,00	3.323.750	1,00	1.713.750	100,00	51,56	2,00	2.913.750	40,00	26,03	Dispusip	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	57,82						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**85,00**	**20.418.064.853**	**55,00**	**1.689.794.604**	**55,00**	**2.407.640.058**	**53,33**	**1.722.074.379**	**96,96**	**71,53**	**54,17**	**3.411.868.983**	**63,72**	**16,71**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1.204,00	19.249.497.477	224,00	1.611.439.604	238,00	2.361.444.438	224,00	1.690.844.962	94,12	71,60	224,00	3.302.284.566	18,60	17,16	Dispusip	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60,00	427.542.799	12,00	35.680.000	12,00	39.739.800	12,00	25.968.597	100,00	65,35	24,00	61.648.597	40,00	14,42	Dispusip	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5,00	728.790.228	1,00	41.625.000	1,00	3.526.500	1,00	3.526.500	100,00	100,00	2,00	45.151.500	40,00	6,20	Dispusip	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5,00	12.234.349	2,00	1.050.000	1,00	2.929.320	1,00	1.734.320	100,00	59,21	3,00	2.784.320	60,00	22,76	Dispusip	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	98,53	74,04						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**Jenis**	**45,00**	**468.121.838**	**41,00**	**38.600.000**	**42,00**	**43.021.800**	**27,00**	**26.675.597**	**64,29**	**62,00**	**34,00**	**65.275.597**	**75,56**	**13,94**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	Laporan	60,00	468.121.838	12,00	38.600.000	12,00	43.021.800	12,00	26.675.597	100,00	62,00	12,00	65.275.597	20,00	13,94	Dispusip	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	62,00						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**85,00**	**204.548.892**	**81,00**	**16.250.000**	**82,00**	**17.254.400**	**80,00**	**10.927.798**	**97,56**	**63,33**	**80,50**	**27.177.798**	**94,71**	**13,29**		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	Dokumen	60,00	204.548.892	12,00	16.250.000	12,00	17.254.400	12,00	10.927.798	100,00	63,33	12,00	27.177.798	20,00	13,29	Dispusip	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	63,33						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**85,00**	**1.724.663.990**	**81,00**	**65.366.283**	**82,00**	**134.303.369**	**61,00**	**95.921.861**	**74,39**	**71,42**	**71,00**	**161.288.144**	**83,53**	**9,35**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	30,00	161.365.686	20,00	12.237.454	25,00	758.531	14,00	757.500	56,00	99,86	34,00	12.994.954	113,33	8,05	Dispusip	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Paket	55,00	254.414.044	44,00	20.141.941	35,00	48.742.998	33,00	48.743.111	94,29	100,00	38,50	68.885.052	70,00	27,08	Dispusip	Ada perubahan standar harga pada alat tulis kantor, sehingga penyerapan melebihi RKPD sebesar Rp113
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2,00	165.637.205	2,00	11.305.000	2,00	6.177.940	2,00	3.915.250	100,00	63,37	2,00	15.220.250	100,00	9,19	Dispusip	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	180,00	79.377.182	36,00	5.860.000	36,00	1.371.900	18,00	1.371.000	50,00	99,93	27,00	7.231.000	15,00	9,11	Dispusip	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan	325,00	1.063.869.873	54,00	15.821.888	60,00	77.252.000	15,00	41.135.000	25,00	53,25	69,00	56.956.888	21,23	5,35	Dispusip	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	65,06	83,28						
										Predikat Kinerja	(S)	(T)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**%**	**85,00**	**2.070.582.931**	**60,00**	**106.650.000**	**70,00**	-	-	-			**30,00**	**106.650.000**	**35,29**	**5,15**		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	90,00	1.192.070.215	18,00	6.650.000	17,00	-	-	-			18,00	6.650.000	20,00	0,56	Dispusip	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	5,00	878.512.716	1,00	100.000.000	1,00	-	-	-			1,00	100.000.000	20,00	11,38	Dispusip	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**85,00**	**4.557.572.222**	**65,00**	**286.654.437**	**70,00**	**459.902.140**	**76,71**	**356.878.964**	**109,58**	**77,60**	**70,85**	**643.533.401**	**83,36**	**14,12**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Laporan	500,00	9.445.121	92,00	920.000	110,00	600.000	80,00	800.000	72,73	133,33	172,00	1.720.000	34,40	18,21	Dispusip	Penganggaran lebih besar daripada RKPD karena miss persepsi pada saat perumusan KUA-PPAS Perubahan, dan sedang di tindak lanjuti ke BKAD
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Laporan	300,00	1.712.208.187	60,00	138.336.287	60,00	197.999.205	36,00	191.245.338	60,00	96,59	48,00	329.581.625	16,00	19,25	Dispusip	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	657,00	2.835.918.914	180,00	147.398.150	180,00	261.302.935	180,00	164.833.626	100,00	63,08	180,00	312.231.776	27,40	11,01	Dispusip	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		100,00	97,67					
										Predikat Kinerja		(ST)	(ST)					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**85,00**	**2.051.239.143**	**65,00**	**100.140.400**	**70,00**	**81.139.000**	**51,58**	**85.423.800**	**73,69**	**105,28**	**58,29**	**185.564.200**	**68,58**	**9,05**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7,00	1.542.411.057	4,00	91.140.400	7,00	50.139.000	6,00	54.423.800	85,71	108,55	5,00	145.564.200	71,43	9,44	Dispusip	Banyaknya Kendaraan Dinas yang mengalami rusak sedang sampai rusak berat, dan perlu adanya penanganan ekstra. Sehingga penganggaran melebihi RKPD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	Unit	40,00	508.828.086	20,00	9.000.000	25,00	31.000.000	17,00	31.000.000	68,00	100,00	37,00	40.000.000	92,50	7,86	Dispusip	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		76,86	104,27					
										Predikat Kinerja		(T)	(ST)					
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)		**85,14**	**73,48**					
										Predikat Kinerja		**(T)**	**(S)**					
Program Pembinaan Perpustakaan	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**	**Indeks**	**20,24**	**3.572.509.508**	**17,45**	**656.280.650**	**19,16**	**833.258.893**	**19,16**	**628.693.700**	**100,00**	**75,45**	**18,31**	**1.284.974.350**	**90,44**	**35,97**		
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah aspek pembangunan literasi masyarakat**	**Aspek**	**7,00**	**2.309.729.689**	**7,00**	**544.441.550**	**7,00**	**543.237.146**	**7,00**	**441.627.998**	**100,00**	**81,30**	**7,00**	**986.069.548**	**100,00**	**42,69**		
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan	5,00	289.472.239	5,00	406.545.550	5,00	110.646.300	5,00	78.302.897	100,00	70,77	5,00	484.848.447	100,00	167,49	Dispusip	
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	2,00	362.647.679	1,00	62.445.000	2,00	197.013.174	1,00	197.013.110	50,00	100,00	2,00	259.458.110	100,00	71,55	Dispusip	
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi bahan pustaka khas daerah	Bahan Pustaka	50,00	116.025.333	-	-	11,00	22.970.160	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispusip	
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah bimbingan minat dan bakat pada pengelola perpustakaan dan pemustaka pada satuan pendidikan dasar	Perpustakaan	60,00	163.000.000	-	-	14,00	21.914.904	1,00	21.279.302	7,14	97,10	1,00	21.279.302	1,67	13,05	Dispusip	
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan perpustakaan khusus	Perpustakaan	50,00	163.000.000	-	-	15,00	21.609.432	1,00	20.973.830	6,67	97,06	1,00	20.973.830	2,00	12,87	Dispusip	
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti BIMTEK	Orang	556,00	59.000.000	-	-	102,00	9.216.196	1,00	6.183.944	0,98	67,10	1,00	6.183.944	0,18	10,48	Dispusip	
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	10,00	92.820.266	-	-	2,00	51.118.000	2,00	35.404.298	100,00	69,26	2,00	35.404.298	20,00	38,14	Dispusip	
Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Eksemplar	2.100,00	253.128.064	276,00	20.766.000	330,00	5.760.000	-	5.760.000	-	100,00	276,00	26.526.000	13,14	10,48	Dispusip	
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang diolah	Eksemplar	2.100,00	439.786.108	276,00	48.835.000	330,00	80.293.596	330,00	58.745.075	100,00	73,16	606,00	107.580.075	28,86	24,46	Dispusip	
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	370.850.000	1,00	5.850.000	1,00	22.695.384	1,00	17.965.542	100,00	79,16	2,00	23.815.542	200,00	6,42	Dispusip	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		46,48	75,36					
										Predikat Kinerja		(SR)	(T)					
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai Budaya Gemar Membaca**	**Nilai**	**16,16**	**1.262.779.819**	**11,69**	**111.839.100**	**14,76**	**290.021.747**	**16,06**	**187.065.702**	**108,81**	**64,50**	**27,75**	**298.904.802**	**171,72**	**23,67**		
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	70,00	516.886.450	50,00	74.948.450	55,00	61.859.557	55,00	42.998.844	100,00	69,51	105,00	117.947.294	150,00	22,82	Dispusip	
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	4,00	140.002.719	-	-	1,00	56.236.114	1,00	39.039.668	100,00	69,42	1,00	39.039.668	25,00	27,88	Dispusip	
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	30,00	438.890.650	6,00	36.890.650	16,00	72.340.370	16,00	65.783.854	100,00	90,94	22,00	102.674.504	73,33	23,39	Dispusip	
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	69,00	74.000.000	-	-	12,00	57.991.570	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispusip	
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang	500,00	93.000.000	-	-	110,00	41.594.136	100,00	39.243.336	90,91	94,35	100,00	39.243.336	20,00	42,20	Dispusip	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		78,18	64,84					
										Predikat Kinerja		(T)	(R)					
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)		**104,40**	**72,90**					
										Predikat Kinerja		**(ST)**	**(S)**					
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	**Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan**	**%**	**10,00**	**1.105.474.034**	**-**	**-**	**10,00**	**60.904.631**	**10,00**	**51.507.684**	**100,00**	**84,57**	**5,00**	**51.507.684**	**50,00**	**4,66**		
Pelestarian Naskah kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Naskah Kuno yang didigitalisasi/Alih aksarakan**	**Dokumen**	**1,00**	**883.089.053**	**-**	**-**	**1,00**	**44.576.122**	**1,00**	**41.181.420**	**100,00**	**92,38**	**1,00**	**41.181.420**	**100,00**	**4,66**		

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Naskah	50,00	616.227.078	-	-	10,00	24.282.622	10,00	24.282.622	100,00	100,00	10,00	24.282.622	20,00	3,94	Dispusip	
Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Naskah	5,00	266.861.975	-	-	1,00	20.293.500	1,00	16.898.798	100,00	83,27	1,00	16.898.798	20,00	6,33	Dispusip	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	91,64						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan seleksi budaya etnis nusantara**	**Kegiatan**	**2,00**	**222.384.981**	**-**	**-**	**2,00**	**16.328.509**	**2,00**	**10.326.264**	**100,00**	**63,24**	**2,00**	**10.326.264**		**0,05**		
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Kegiatan	5,00	162.969.146	-	-	1,00	9.025.964	1,00	5.895.264	100,00	65,31	1,00	5.895.264	0,20	0,04	Dispusip	
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Jumlah	5,00	59.415.835	-	-	1,00	7.302.545	1,00	4.431.000	100,00	60,68	1,00	4.431.000	0,20	0,07	Dispusip	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	63,00						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**77,81**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(T)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**95,96**	**77,66**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(T)**						
URUSAN KEARSIPAN				**1.850.754.838**		**48.170.000**		**47.571.707**		**31.714.504**								
Program Pengelolaan Arsip	**Nilai LAKE Kabupaten/Kota**	**Nilai**	**4.180,00**	**1.353.179.085**	**2.532,00**	**48.170.000**	**3.019,00**	**47.571.707**	**1.432,00**	**31.714.504**	**47,43**	**66,67**	**1.982,00**	**79.884.504**	**47,42**	**5,90**		
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah SKPD taat perundang-undangan**	**SKPD**	**24,00**	**553.373.569**	**-**	**-**	**24,00**	**44.385.707**	**24,00**	**31.714.504**	**100,00**	**71,45**	**24,00**	**31.714.504**	**100,00**	**5,73**		
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah SKPD yang Tertib Instumen Kearsipan	Berkas	24,00	258.711.406	-	-	24,00	40.134.174	24,00	27.462.971	100,00	68,43	24,00	27.462.971	100,00	10,62	Dispusip	
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Perda Penyelenggaraan Kearsipan	Perda	5,00	294.662.163	-	-	1,00	4.251.533	-	4.251.533	-	100,00	-	4.251.533	-	1,44	Dispusip	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	50,00	84,21						
										Predikat Kinerja	(SR)	(T)						
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Arsip Statis yang Dikelola**	**Dokumen**	**150,00**	**227.825.190**	**19,00**	**47.200.000**		**-**	**-**	**-**			**19,00**	**47.200.000**	**12,67**	**20,72**		
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Naskah yang ditelusuri	Naskah	78,00	160.060.488	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Dispusip	
Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang di Perservasi	Dokumen	100,00	67.764.702	18,00	47.200.000		-	-	-			18,00	47.200.000	18,00	69,65	Dispusip	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Jumlah pengelolaan simpul jaringan informasi**	**Jaringan**	**1,00**	**571.980.326**	**1,00**	**970.000**	**1,00**	**3.186.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,00**	**970.000**	**100,00**	**0,17**		
Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Informasi Kearsipan melalui JIKN	Pengguna	1,00	282.875.676	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Dispusip	
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan di SKPD	Laporan	100,00	289.104.650	10,00	970.000	100,00	3.186.000	-	-	-	-	10,00	970.000	10,00	0,34	Dispusip	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**50,00**	**35,73**						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	**Persentase LAKE Kabupaten/Kota**	**%**	**100,00**	**497.575.753**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	**Jumlah dokumen Penyusutan Arsip Inaktif**	**Dokumen**	**24,00**	**312.255.184**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah dokumen arsip yang di musnahkan	Dokumen	24,00	262.025.184	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Dispusip	
Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi Arsip di Bawah 10 Tahun	Jumlah Dokumen arsip yang di nilai dan di tetapkan	Dokumen	8,00	50.230.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Dispusip	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Kearsipan yang teridentifikasi dan terselamatkan**	**Dokumen**	**400,00**	**61.019.292**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Terselamatkan	Dokumen	50,00	61.019.292	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Dispusip	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	**Jumlah penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Dokumen**	**2,00**	**62.157.397**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Pemekaran Desa	Dokumen	5,00	62.157.397	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dispusip	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	**Jumlah Arsip Statis yang di Alih Mediakan melalui Autentikasi**	**Naskah**	**78,00**	**62.143.880**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai persyaratan Penjaminan keabsahan Arsip	Jumlah Arsip Statis yang dialihmediakan melalui autentifikasi	Naskah	78,00	62.143.880	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dispusip	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**47,43**	**66,67**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(SR)**	**(S)**						
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN				**269.853.904.367**		**19.134.958.644**		**12.414.550.432**		**7.586.347.381**		**61,11**	-	**26.721.306.025**	-	**9,90**		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				**82.601.431.992**		**12.850.489.625**		**4.906.915.952**		**3.645.031.329**		**74,28**	-	**16.495.520.954**	-	**19,97**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi**	**%**	**90,00**	**30.136.440.992**	**90,00**	**6.092.401.071**	**90,00**	**4.292.160.135**	**90,00**	**3.338.139.306**	**100,00**	**77,77**	**90,00**	**9.430.540.377**	**100,00**	**31,29**	DKPKP	Faktor pendorong Program ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidang nya
	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	**%**	**90,00**		**90,00**		**90,00**		**90,00**		**100,00**		**90,00**		**100,00**			
	3. Persentase peningkatan	**%**	**90,00**		**90,00**		**90,00**		**90,00**		**100,00**		**90,00**		**100,00**			
	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	**%**	**90,00**		**90,00**		**90,00**		**90,00**		**100,00**		**90,00**		**100,00**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**dokumen**	**2,00**	**638.429.816**	**2,00**	**115.972.714**	**2,00**	**85.404.400**	**2,00**	**48.574.640**	**100,00**	**56,88**	**2,00**	**164.547.354**	**100,00**	**25,77**	DKPKP	realisasi fisik sudah terealisasi, tetapi ke
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7,00	406.849.564	7,00	81.030.464	7,00	67.207.200	7,00	38.159.440	100,00	56,78	7,00	119.189.904	100,00	29,30	DKPKP	realisasi fisik sudah terealisasi, tetapi keuangan belum disalurakan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	24,00	231.580.252	24,00	34.942.250	24,00	18.197.200	24,00	10.415.200	100,00	57,24	24,00	45.357.450	100,00	19,59	DKPKP	realisasi fisik sudah terealisasi, tetapi keuangan belum disalurakan
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	57,01						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**dokumen**	**4,00**	**24.631.642.058**	**4,00**	**5.092.860.847**	**4,00**	**3.578.754.740**	**4,00**	**2.851.712.564**	**100,00**	**79,68**	**8,00**	**7.944.573.411**	**200,00**	**32,25**	DKPKP	Faktor pendorong kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidang nya
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang bulan	546,00	24.005.742.802	444,00	5.027.347.847	468,00	3.551.251.007	468,00	2.833.610.204	100,00	79,79	456,00	7.860.958.051	83,52	32,75	DKPKP	realisasi fisik sudah terealisasi, tetapi keuangan belum disalurakan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12,00	241.479.752	12,00	46.653.000	12,00	24.943.134	12,00	15.542.000	100,00	62,31	12,00	62.195.000	100,00	25,76	DKPKP	realisasi fisik sudah terealisasi, tetapi keuangan belum disalurakan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1,00	338.947.252	1,00	17.310.000	1,00	1.562.199	1,00	1.561.960	100,00	99,98	1,00	18.871.960	100,00	5,57	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidang nya
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	13,00	45.472.252	12,00	1.550.000	4,00	998.400	4,00	998.400	100,00	100,00	8,00	2.548.400	61,54	5,60	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidang nya
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	85,52						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	dokumen	**1,00**	**217.559.752**	**1,00**	**41.650.000**	**1,00**	**22.331.400**	**1,00**	**13.230.600**	**100,00**	**59,25**	**2,00**	**54.880.600**	**200,00**	**25,23**	DKPKP	realisasi fisik sudah terealisasi, tetapi keuangan belum disalurakan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	12,00	217.559.752	12,00	41.650.000	12,00	22.331.400	12,00	13.230.600	100,00	59,25	12,00	54.880.600	100,00	25,23	DKPKP	realisasi fisik sudah terealisasi, tetapi keuangan belum disalurakan
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	59,25						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah**	dokumen	**1,00**	**203.259.752**	**1,00**	**41.220.000**	**1,00**	**21.210.000**	**1,00**	**12.040.000**	**100,00**	**56,77**	**2,00**	**53.260.000**	**200,00**	**26,20**	DKPKP	realisasi fisik sudah terealisasi, tetapi keuangan belum disalurakan
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	12,00	203.259.752	12,00	41.220.000	12,00	21.210.000	12,00	12.040.000	100,00	56,77	12,00	53.260.000	100,00	26,20	DKPKP	realisasi fisik sudah terealisasi, tetapi keuangan belum disalurakan
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	56,77						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	dokumen	**1,00**	**139.134.752**	**1,00**	**3.375.000**	**1,00**	**3.337.200**	**1,00**	**3.337.200**	**100,00**	**100,00**	**2,00**	**6.712.200**	**200,00**	**4,82**	DKPKP	Faktor pendorong kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidangnya
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	39,00	139.134.752	-	3.375.000	39,00	3.337.200	37,00	3.337.200	94,87	100,00	18,50	6.712.200	47,44	4,82	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidangnya
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	94,87	100,00						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	dokumen	**1,00**	**2.159.059.704**	**1,00**	**382.726.236**	**7,00**	**292.017.031**	**7,00**	**226.280.969**	**100,00**	**77,49**	**8,00**	**609.007.205**	**800,00**	**28,21**	DKPKP	Faktor pendorong kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidangnya
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	10,00	56.288.772	10,00	3.421.800	3,00	3.718.000	3,00	2.819.500	100,00	75,83	6,50	6.241.300	65,00	11,09	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidang nya
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	72,00	599.103.447	72,00	155.941.500	72,00	92.032.834	72,00	89.222.834	100,00	96,95	72,00	245.164.334	100,00	40,92	DKPKP	realisasi fisik sudah terealisasi, tetapi keuangan belum disalurakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	5,00	372.454.752	5,00	79.056.800	5,00	63.914.000	5,00	39.498.000	100,00	61,80	5,00	118.554.800	100,00	31,83	DKPKP	bahan logistik selalu terealisasi setiap bulan sebanyak 5 jenis
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	5,00	86.218.477	5,00	13.847.200	5,00	9.040.850	5,00	5.078.000	100,00	56,17	5,00	18.925.200	100,00	21,95	DKPKP	penyediaan cetakan dan penggadaan selalu terealisasi setiap bulan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	204,00	192.268.252	204,00	22.625.000	180,00	15.360.000	168,00	13.380.000	93,33	87,11	186,00	36.005.000	91,18	18,73	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi informasi di kantor
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	laporan	12,00	290.434.752	-	-		-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dokumen	14,00	562.291.252	11,00	107.833.936	18,00	107.951.347	16,00	76.282.635	88,89	70,66	13,50	184.116.571	96,43	32,74	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	97,04	74,75						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**dokumen**	**3,00**	**1.507.991.053**	**3,00**	**274.321.987**	**3,00**	**183.050.000**	**3,00**	**110.203.127**	**100,00**	**60,20**	**6,00**	**384.525.114**	**200,00**	**25,50**	DKPKP	realisasi fisik sudah terealisasi, tetapi keuangan belum disalurakan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12,00	62.791.634	12,00	5.981.000	12,00	1.100.000	12,00	950.000	100,00	86,36	12,00	6.931.000	100,00	11,04	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah untuk operasional kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12,00	347.627.134	3,00	79.098.887	12,00	45.200.000	12,00	41.304.827	100,00	91,38	7,50	120.403.714	62,50	34,64	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah adanya tagihan listrik setiap bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12,00	1.097.572.285	7,00	189.242.100	12,00	136.750.000	12,00	67.948.300	100,00	49,69	9,50	257.190.400	79,17	23,43	DKPKP	realisasi fisik sudah terealisasi, tetapi keuangan belum disalurakan
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	75,81						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**dokumen**	**3,00**	**639.364.105**	**3,00**	**140.274.287**	**3,00**	**106.055.364**	**3,00**	**72.760.206**	**100,00**	**68,61**	**6,00**	**213.034.493**	**200,00**	**33,32**	DKPKP	realisasi fisik terserap setiap bulan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	11,00	419.922.556	11,00	113.686.987	11,00	83.195.200	11,00	59.874.386	100,00	71,97	11,00	173.561.373	100,00	41,33	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah untuk operasional kantor
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10,00	117.469.915	10,00	13.493.300	10,00	10.485.000	10,00	7.643.000	100,00	72,89	10,00	21.136.300	100,00	17,99	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah untuk operasional kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3,00	101.971.634	3,00	13.094.000	3,00	12.375.164	3,00	5.242.820	100,00	42,37	3,00	18.336.820	100,00	17,98	DKPKP	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor setiap bulan terealisasi
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	62,41						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**69,86**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(S)**						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				**52.464.991.000**		**6.758.088.554**		**614.755.817**		**306.892.023**		**49,92**		**7.064.980.577**		**13,47**	DKPKP	tidak adanya penambahan jumlah cadangan pangan pemerintah
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	**Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan**	**%**	**8,00**	**35.104.325.000**	**1,00**	**5.483.661.000**	**8**	**252.881.217**	**-**	**12.040.000**	-	**4,76**	**0,50**	**5.495.701.000**	**6,25**	**15,66**	DKPKP	Faktor penghambat kegiatan ini pengadaan gabah kering giling secara fisik sudah dilaksanakan namun pembayaran dihutangkan di tahun 2024
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandiriaan pangan**	**dokumen**	**1,00**	**35.104.325.000**	**1,00**	**5.483.661.000**	**1,00**	**252.881.217**	**1,00**	**12.040.000**	**100,00**	**4,76**	**2,00**	**5.495.701.000**	**200,00**	**15,66**	DKPKP	Faktor penghambat sub kegiatan ini pengadaan gabah kering giling secara fisik sudah dilaksanakan namun pembayaran dihutangkan di tahun 2024
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	unit	5,00	35.104.325.000	5,00	5.483.661.000	6,00	252.881.217	5,00	12.040.000	83,33	4,76	5,00	5.495.701.000	100,00	15,66	DKPKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	83,33	4,76						
										Predikat Kinerja	(T)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**4,76**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(SR)**						
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**1. Angka Kecukupan Energi**	**Kcal**	**2.100,00**	**13.411.880.500**	**2.100,00**	**1.176.847.854**	**2.100,00**	**221.989.900**	**2.259,00**	**183.935.223**	**107,57**	**82,86**	**2.179,50**	**1.360.783.077**	**103,79**	**10,15**	DKPKP	Faktor pendorong Program ini yaitu tingginya konsumsi masyarakat dari berbagai komoditas pangan
	2. Angka Kecukupan Protein	**gr**	**57,00**		**57,00**		**57,00**		**67,40**		**118,25**		**62,20**		**109,12**		DKPKP	Faktor pendorong kegiatan ini yaitu adanya pegawai yang kompeten serta didukung oleh koordinasi yang baik
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kotadalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten / Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan**	**dokumen**	**2,00**	**257.950.500**	**2,00**	**51.801.600**	**2,00**	**39.593.200**	**2,00**	**34.730.423**	**100,00**	**87,72**	**2,00**	**86.532.023**	**100,00**	**33,55**	DKPKP	tidak ada penganggaran pada sub kegiatan tersebut di tahun ini

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	desa	1,00	51.386.500	-	31.239.400	-	-	-	-			-	31.239.400	-	60,79	DKPKP	tidak ada penganggaran pada sub kegiatan tersebut di tahun ini
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	dokumen	24,00	206.564.000	24,00	20.562.200	24,00	39.593.200	24,00	34.730.423	100,00	87,72	24,00	55.292.623	100,00	26,77	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah - Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidang nya - Koordinasi yang baik antar stakeholder terkait
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	87,72						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten /Kota**	**dokumen**	**1,00**	**610.510.000**	-	-		-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	10,00	610.510.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pagan Pemerintah Kabupaten/Kota belum menjadi kegiatan prioritas sehingga belum dianggarakan di tahun ini
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**dokumen**	**1,00**	**12.543.420.000**	**12,00**	**1.125.046.254**	**1,00**	**182.396.700**	**1,00**	**149.204.800**	**100,00**	**81,80**	13,00	**1.274.251.054**	**1.300,00**	**10,16**	DKPKP	Kegiatan ini terlaksana tidak terlepas dari koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai stakeholder serta didukung oleh adanya pegawai yang kompeten di bidangnya
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	12,00	12.543.420.000	12,00	1.125.046.254	3,00	182.396.700	3,00	149.204.800	100,00	81,80	15,00	1.274.251.054	125,00	10,16	DKPKP	Sub Kegiatan ini tidak lepas dari koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan pihak lain seperti PKK Kabupaten dan Kecamatan, SKPD lain dan Indonesia Chef Asosiation (ICA).
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	81,80						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**84,76**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(T)**						
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)**	**%**	**1,00**	**3.033.020.500**	**2,00**	**97.579.700**	**4,00**	**125.050.600**	**1,10**	**97.960.800**	**27,50**	**78,34**	**1,55**	**195.540.500**	**155,00**	**6,45**	DKPKP	Program ini sudah dilaksanakan melalui dana Dekonsentrasi Provinsi meskipun tidak dianggarkan pada APBD Kabupaten
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Jumlah dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**dokumen**	**1,00**	**610.510.000**	-	-		-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Kegiatan ini sudah dilaksanakan melalui dana Dekonsentrasi Provinsi meskipun tidak dianggarkan pada APBD Kabupaten
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen	1,00	610.510.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Sub Kegiatan ini sudah dilaksanakan melalui dana Dekonsentrasi Provinsi meskipun tidak dianggarkan pada APBD Kabupaten
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**dokumen**	**2,00**	**2.422.510.500**	**2,00**	**97.579.700**	**2,00**	**125.050.600**	**2,00**	**97.960.800**	**100,00**	**78,34**	**4,00**	**195.540.500**	**200,00**	**8,07**	DKPKP	Kegiatan dilaksankan dengan melibatkan dari berbagai stakeholder serta adanya pegawai yang kompeten
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	laporan	12,00	511.277.000	12,00	20.134.500	1,00	125.050.600	1,00	97.960.800	100,00	78,34	6,50	118.095.300	54,17	23,10	DKPKP	Realisasi fisik terjadi setiap bulan dengan melibatkan dari SKPD lain seperti Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan sebagai pemberi data yang diolah oleh petugas
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1,00	1.911.233.500	1,00	77.445.200		-	-	-			0,50	77.445.200	50,00	4,05	DKPKP	tidak ada penganggaran pada sub kegiatan tersebut di tahun ini
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	78,34						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**78,34**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(T)**						
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase pangan segar aman**	**%**	**75,00**	**915.765.000**	-	-	**60,00**	**14.834.100**	**69,80**	**12.956.000**	**116,33**	**87,34**	**34,90**	**12.956.000**	**46,53**	**1,41**	DKPKP	Pelaksanaan kegiatan didukung oleh adanya dukungan dana dekonsentrasi Provinsi Jawa Barat serta sikap yang
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**dokumen**	**2,00**	**915.765.000**	-	-	**2,00**	**14.834.100**	**2,00**	**12.956.000**	**100,00**	**87,34**	**2,00**	**12.956.000**	**100,00**	**1,41**	DKPKP	Kegiatan ini sudah dilaksanakan melalui dana Dekonsentrasi Provinsi meskipun tidak dianggarkan pada APBD Kabupaten
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1,00	305.255.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1,00	610.510.000	-	-	1,00	14.834.100	1,00	12.956.000	100,00	87,34	1,00	12.956.000	100,00	2,12	DKPKP	Pelaksanaan Kegiatan berupa sosialisasi keamanan pangan segar asal tumbuhan yang ditujukan kepada pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan dengan melibatkan petugas yang kompeten di bidangnya
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	87,34						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	100,00	87,34						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(T)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**71,35**	**66,21**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(S)**	**(S)**						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				**187.252.472.374**		**6.284.469.019**		**7.507.634.480**		**3.941.316.052**		**52,50**	**-**	**10.225.785.071**		**5,46**	DKPKP	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**%**	**0,20**	**37.779.476.281**	**0,20**	**2.893.332.732**	**0,20**	**3.770.389.745**	**0,10**	**1.533.361.102**	**50,00**	**40,67**	**0,15**	**4.426.693.834**	**75,00**	**11,72**	DKPKP	realisasi fisik di lihat dari hasil akhir tahun dengan menggunakan rumus: $\frac{TAHUN\ 2023\ -\ TAHUN\ 2022(TON)}{TAHUN\ 2022\ (TON)}$
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen izin usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan**	**Dokumen**	**2,00**	**1.221.020.000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	DKPKP	adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), hanya saja
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan	Dokumen	1,00	610.510.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Kegiatan tidak dianggarkan di tahun ini
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha yang Diterbitkan	Dokumen	5,00	610.510.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Kegiatan tidak dianggarkan di tahun ini
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	**Jumlah dokumen kelayakan usaha Pembudidaya Ikan Kecil skala kecil**	**Dokumen**	**4,00**	**11.354.672.550**	**4,00**	**605.891.900**	**8,00**	**315.429.739**	**4,00**	**324.976.071**	**50,00**	**103,03**	**4,00**	**930.867.971**	**100,00**	**8,20**	DKPKP	Belum optimal nya pemahaman masyarakat untuk menjadikan budidaya ikan sebagai pekerjaan utama
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	41,00	8.454.750.050	20,00	605.891.900	16,00	315.429.739	10,00	324.976.071	62,50	103,03	30,00	930.867.971	73,17	11,01	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah antusias kelompok untuk mengikuti pengembangan kapasitas
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	60,00	610.510.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Kegiatan tidak dianggarkan di tahun ini
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok	35,00	763.137.500	-	-		-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Kegiatan tidak dianggarkan di tahun ini
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	29,00	1.526.275.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Kegiatan tidak dianggarkan di tahun ini
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	62,50	103,03						
										Predikat Kinerja	(R)	(ST)						
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen izin usaha Pembudidaya Ikan Kecil**	**Dokumen**	**50,00**	**1.098.846.000**	**-**	**-**	**76,00**	**14.810.000**	**75,00**	**3.080.000**	**98,68**	**20,80**	**75,00**	**3.080.000**	**150,00**	**0,28**	DKPKP	Minimnya anggaran yang diperoleh
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	rekomendasi	60,00	610.510.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Kegiatan tidak dianggarkan di tahun ini
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	rekomendasi	240,00	488.336.000	-	-	1,00	14.810.000	44,00	3.080.000	4.400,00	20,80	44,00	3.080.000	18,33	0,63	DKPKP	Jumlah anggaran yang diperoleh masih sangat minim sehingga belum optimal dalam melaksanakan pelayanan
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Pengelolaan pembudidayaan ikan	**Jumlah produksi perikanan budidaya**	**ton**	**250,00**	**24.104.937.731**	**323,00**	**2.287.440.832**	**275,00**	**3.440.150.006**	**326,06**	**1.205.305.031**	**118,57**	**35,04**	**649,06**	**3.492.745.863**	**259,62**	**14,49**	DKPKP	realisasi fisik melebihi target yang ditetapkan
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	305.255.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Kegiatan tidak dianggarkan di tahun ini

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2,00	7.326.120.000	-	-	2,00	2.919.250.000	2,00	1.121.447.350	100,00	38,42	2,00	1.121.447.350	100,00	15,31	DKPKP	Kegiatan fisik telah dilaksanakan namun anggaran kegiatan belum dibayarkan
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	16,00	8.994.815.231	4,00	2.287.440.832	2,00	161.400.006	2,00	71.646.881	100,00	44,39	6,00	2.359.087.713	37,50	26,23	DKPKP	Kegiatan fisik telah dilaksanakan namun anggaran kegiatan belum dibayarkan
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	dokumen	1,00	1.068.392.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Kegiatan tidak dianggarkan di tahun ini
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	orang	50,00	305.255.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Kegiatan tidak dianggarkan di tahun ini
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Hektar	29,00	3.052.550.000	-	-	5,00	359.500.000	5,00	12.210.800	100,00	3,40	5,00	12.210.800	17,24	0,40	DKPKP	Kegiatan fisik telah dilaksanakan namun anggaran kegiatan belum dibayarkan
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	orang	290,00	3.052.550.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Kegiatan tidak dianggarkan di tahun ini
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	28,73						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**89,08**	**52,95**						
										Predikat Kinerja	**(T)**	**(R)**						
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil perikanan**	%	**90,00**	**6.040.835.246**	**50,00**	**498.184.887**	**90,00**	**198.819.518**	**33,00**	**121.463.950**	**36,67**	**61,09**	**41,50**	**619.648.837**	**46,11**	**10,26**	DKPKP	Belum tersedianya pasar ikan modern atau outlet pemasaran ikan yang lengkap
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Jumlah dokumen izin usaha Pengolahan hasil Perikanan**	**Dokumen**	**5,00**	**723.267.230**	**-**	**-**	**5,00**	**9.630.000**	**5,00**	**8.978.200**	**100,00**	**93,23**	**5,00**	**8.978.200**	**100,00**	**1,24**	DKPKP	Minimnya anggaran yang diperoleh
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	1,00	723.267.230	-	-	4,00	9.630.000	2,00	8.978.200	50,00	93,23	2,00	8.978.200	200,00	1,24	DKPKP	Jumlah anggaran yang diperoleh masih sangat minim sehingga belum optimal dalam penyediaan data dan informasi usaha
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Jumlah dokumen Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)**	**Dokumen**	**1,00**	**1.250.000.000**	**-**	**-**	**5,00**	**41.861.218**	**5,00**	**9.700.000**	**100,00**	**23,17**	**5,00**	**9.700.000**	**500,00**	**0,78**	DKPKP	Minimnya anggaran yang diperoleh
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	unit usaha	1,00	1.250.000.000	-	-	10,00	41.861.218	10,00	9.700.000	100,00	23,17	10,00	9.700.000	1.000,00	0,78	DKPKP	Jumlah anggaran yang diperoleh masih sangat minim sehingga belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/	**Jumlah laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku**	**Dokumen**	**2,00**	**4.067.568.016**	**50,00**	**498.184.887**	**2,00**	**147.328.300**	**2,00**	**102.785.750**	**100,00**	**69,77**	**52,00**	**600.970.637**	**2.600,00**	**14,77**	DKPKP	Belum tersedianya pasar ikan modern
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	30,00	1.567.568.016	-	96.186.871	5,50	147.328.300	5,50	102.785.750	100,00	69,77	5,50	198.972.621	18,33	12,69	DKPKP	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	pelaku usaha	50,00	2.500.000.000	50,00	401.998.016		-	-	-			50,00	401.998.016	100,00	16,08	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah besarnya antusias kelompok yang membutuhkan bantuan Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	69,77						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**62,06**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(R)**						
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	**%**	**0,30**	**129.493.812.501**	**0,20**	**2.887.746.400**	**0,30**	**3.459.929.000**	**1,02**	**2.270.242.750**	**340,00**	**65,62**	**0,61**	**5.157.989.150**	**203,33**	**3,98**	DKPKP	Keterbatasan anggaran yang diberikan $\frac{TAHUN\ 2023\ -\ TAHUN\ 2022(TON)}{TAHUN\ 2022\ (TON)}$
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	**Jumlah dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan**	**Dokumen**	**3,00**	**107.907.432.216**	**3,00**	**1.129.967.900**	**3,00**	**2.946.492.220**	**2,00**	**1.947.532.650**	**66,67**	**66,10**	**2,50**	**3.077.500.550**	**83,33**	**2,85**	DKPKP	Faktor pendorong: besarnya potensi di sektor perikanan tangkap
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1,00	1.035.765.000	-	38.995.000		-	-	-			-	38.995.000	-	3,76	DKPKP	Faktor pendorong: besarnya potensi di sektor perikanan tangkap
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	unit	6,00	68.015.414.500	-	831.013.300	1,00	1.017.133.220	-	44.029.750	-	4,33	-	875.043.050	-	1,29	DKPKP	Faktor pendorong: mendapat bantuan keuangan untuk kegiatan rehabilitasi TPI
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	unit	39,00	38.856.252.716	5,00	259.959.600	25,00	1.929.359.000	**7,00**	1.903.502.900	28,00	98,66	12,00	2.163.462.500	30,77	5,57	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah proses pengadaan barang dan jasa lebih cepat, proses salur anggaran dari pusat ke daerah lebih cepat, proses pemenuhan syarat penyaluran lebih cepat

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		14,00	51,49					
										Predikat Kinerja		(SR)	(R)					
Pengelolaan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pemberdayaan Nelayan Kecil**	**laporan**	**3,00**	**11.931.360.285**	**3,00**	**1.482.555.700**	**3,00**	**158.055.000**	**2,00**	**142.216.480**	**66,67**	**89,98**	**5,00**	**1.624.772.180**	**166,67**	**13,62**	DKPKP	Keterbatasan anggaran yang diberikan
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	orang	500,00	9.688.360.285	100,00	1.482.555.700	300,00	158.055.000	300,00	142.216.480	100,00	89,98	400,00	1.624.772.180	80,00	16,77	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah antusias nelayan untuk mengikuti pengembangan kapasitas
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	2,00	935.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	untuk tahun ini Tidak ada anggaran di sub kegiatan dimaksud
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	unit usaha	1,00	1.308.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	untuk tahun ini Tidak ada anggaran di sub kegiatan dimaksud
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		100,00	89,98					
										Predikat Kinerja		(ST)	(T)					
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan(TPI)	**Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Dokumen**	**2,00**	**6.144.420.000**	**2,00**	**275.222.800**	**2,00**	**355.381.780**	**1,00**	**180.493.620**	**50,00**	**50,79**	**1,50**	**455.716.420**	**75,00**	**7,42**	DKPKP	Faktor pendukung: Terdapat 13 TPI di Kabupaten Pangandaran sebagai sarana pemasaran produk perikanan tangkap
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	1,00	1.221.020.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	untuk tahun ini Tidak ada anggaran di sub kegiatan dimaksud
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	layanan	8,00	4.923.400.000	8,00	275.222.800	8,00	355.381.780	8,00	180.493.620	100,00	50,79	8,00	455.716.420	100,00	9,26	DKPKP	Faktor pendukung: Pemkab memiliki kerjasama pengelolaan TPI dengan koperasi perikanan. Faktor penghambat: adanya keterikatan nelayan dengan pemasar perikanan
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		100,00	50,79					
										Predikat Kinerja		(ST)	(R)					
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat	**Jumlah dokumen Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT**	**Dokumen**	**2,00**	**1.170.200.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Keterbatasan anggaran yang diberikan
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1,00	585.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	untuk tahun ini Tidak ada anggaran di sub kegiatan dimaksud
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	rekomendasi	10,00	585.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	untuk tahun ini Tidak ada anggaran di sub kegiatan dimaksud
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		-	-					
										Predikat Kinerja		(SR)	(SR)					
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat	**Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT**	**Dokumen**	**2,00**	**1.170.200.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Keterbatasan anggaran yang diberikan
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1,00	585.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	untuk tahun ini Tidak ada anggaran di sub kegiatan dimaksud
Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	rekomendasi	1,00	585.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	untuk tahun ini Tidak ada anggaran di sub kegiatan dimaksud
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		-	-					
										Predikat Kinerja		(SR)	(SR)					
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau,	**Jumlah dokumen Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT**	**Dokumen**	**2,00**	**1.170.200.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Keterbatasan anggaran yang diberikan
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1,00	585.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	untuk tahun ini Tidak ada anggaran di sub kegiatan dimaksud
Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	rekomendasi	1,00	585.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	untuk tahun ini Tidak ada anggaran di sub kegiatan dimaksud
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		-	-					
										Predikat Kinerja		(SR)	(SR)					
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)		**61,11**	**68,95**					
										Predikat Kinerja		**(R)**	**(S)**					
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan**	**%**	5,00	**13.938.348.347**	**3,00**	**5.205.000**	**5,00**	**78.496.217**	**5,00**	**16.248.250**	**100,00**	**20,70**	**4,00**	**21.453.250**	**80,00**	**0,15**	DKPKP	Keterbatasan anggaran yang diberikan
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	**Jumlah dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan**	**Dokumen**	2,00	**13.938.348.347**	**2,00**	**5.205.000**	**2,00**	**78.496.217**	**1,00**	**16.248.250**	**50,00**	**20,70**	**3,00**	**21.453.250**	**150,00**	**0,15**	DKPKP	Keterbatasan anggaran yang diberikan
Pengawasan Usaha PerikananTangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yangdapat Diusahakan dalamKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	dokumen	2,00	13.449.940.347	-	5.205.000	2,00	78.496.217	1,00	16.248.250	50,00	20,70	1,00	21.453.250	50,00	0,16	DKPKP	Faktor pendukung: dapat bekerjasama dengan petugas pengawasan instansi lain.Faktor penghambat: belum memiliki SDM pengawas

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	dokumen	2,00	488.408.000	-	-	-	-	-		-	-	-	-	DKPKP	untuk tahun ini Tidak ada anggaran di sub kegiatan dimaksud
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	50,00	20,70						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**50,00**	**20,70**						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**131,67**	**47,02**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(SR)**						
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				**237.418.746.741**		**33.710.392.961**		**16.663.312.611**		**11.386.407.373**		**68,33**		**45.096.800.334**				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				**220.116.998.219**		**32.618.594.511**		**15.762.591.411**		**10.762.094.190**		**68,28**		**43.380.688.701**				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi**	**%**	**90,00**	**72.517.611.503**	**100,00**	**11.243.070.310**	**90,00**	**8.314.027.276**	**75,00**	**5.570.256.694**	**83,33**	**67,00**	**87,50**	**16.813.327.004**	**97,22**	**23,19**		
	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	**%**	**90,00**		**100,00**		**90,00**		**90,00**	**-**	**100,00**		**95,00**		**105,56**		Disparbud	
	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	**%**	**90,00**		**100,00**		**90,00**		**80,00**		**88,89**		**90,00**		**100,00**			
	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	**%**	**90,00**		**100,00**		**90,00**		**90,00**		**100,00**		**95,00**		**105,56**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu**	**%**	**90,00**	**686.455.500**	**100,00**	**93.410.000**	**90,00**	**47.967.380**	**100,00**	**34.853.628**	**111,11**	**72,66**	**100,00**	**128.263.628**	**111,11**	**18,68**		
	Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	**%**	**90,00**		**100,00**		**90,00**		**100,00**		**111,11**		**100,00**		**111,11**		Disparbud	
	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	**%**	**90,00**		**100,00**		**90,00**		**100,00**		**111,11**		**100,00**		**111,11**			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	55,00	423.910.000	27,00	83.790.000	10,00	44.879.140	10,00	32.306.128	100,00	71,98	37,00	116.096.128	67,27	27,39	Disparbud	Penyusunan Dokumen Perencanaan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5,00	12.752.500	1,00	610.000	1,00	647.000	2,00	627.500	200,00	96,99	3,00	1.237.500	60,00	9,70	Disparbud	Dokumen RKA SKPD, RKA Pergeseran (3 dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5,00	12.752.500	1,00	240.000	1,00	237.000	1,00	217.500	100,00	91,77	2,00	457.500	40,00	3,59	Disparbud	Dokumen Perubahan RKA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5,00	12.752.500	5,00	610.000	1,00	647.000	2,00	627.500	200,00	96,99	7,00	1.237.500	140,00	9,70	Disparbud	Dokumen DPA SKPD, DPA Pergeseran (3 dokumen) jadi total ada 4 dokumen capaian
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5,00	12.752.500	2,00	240.000	1,00	237.000	1,00	217.500	100,00	91,77	3,00	457.500	60,00	3,59	Disparbud	Dokumen Perubahan DPA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	80,00	178.531.000	17,00	1.365.000	16,00	526.040	16,00	114.500	100,00	21,77	33,00	1.479.500	41,25	0,83	Disparbud	Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18,00	33.004.500	6,00	6.555.000	3,00	794.200	4,00	743.000	133,33	93,55	10,00	7.298.000	55,56	22,11	Disparbud	Penyusunan Laporan Evaluasi
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	133,33	80,69						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**90,00**	**40.284.707.716**	**100,00**	**9.383.484.808**	**90,00**	**6.746.266.126**	**90,00**	**4.533.217.607**	**100,00**	**67,20**	**95,00**	**13.916.702.415**	**105,56**			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	250,00	39.639.113.466	75,00	9.273.914.808	42,00	6.697.115.246	36,00	4.495.776.479	85,71	67,13	111,00	13.769.691.287	44,40	34,74	Disparbud	Jelas
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5,00	12.752.250	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	11,00	210.870.000	2,00	57.640.000	1,00	21.764.400	1,00	16.050.564	100,00	73,75	3,00	73.690.564	27,27	34,95	Disparbud	Jelas
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	10,00	153.030.000	1,00	18.450.000	2,00	21.454.400	2,00	15.740.564	100,00	73,37	3,00	34.190.564	30,00	22,34	Disparbud	Jelas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6,00	172.630.000	2,00	28.680.000	1,00	4.932.300	1,00	4.725.000	100,00	95,80	3,00	33.405.000	50,00	19,35	Disparbud	Jelas
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	7,00	50.504.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	6,00	30.504.500	2,00	4.800.000	1,00	999.780	1,00	925.000	100,00	92,52	3,00	5.725.000	50,00	18,77	Disparbud	Jelas
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5,00	15.303.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	97,14	80,51						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**Jenis**	**25,00**	**487.582.500**	**24,00**	**78.900.000**	**30,00**	**42.364.000**	**24,00**	**15.420.564**	**80,00**	**36,40**	**48,00**	**94.320.564**	**192,00**			

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
		Unit/Buah	**900,00**		**1.057,00**		**900,00**		**870,00**		**96,67**		**1.927,00**		**214,11**			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5,00	25.504.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5,00	25.504.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	5,00	25.504.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5,00	25.504.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60,00	153.030.000	12,00	18.450.000	12,00	21.190.400	12,00	15.420.564	100,00	72,77	24,00	33.870.564	40,00	22,13	Disparbud	Jelas
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6,00	207.030.000	2,00	60.450.000	1,00	21.173.600	-	-	-	-	2,00	60.450.000	33,33	29,20	Disparbud	Jelas
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5,00	25.504.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	50,00	36,39						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah**	**%**	**30,00**	**934.800.500**	**75,93**	**79.980.000**	**15,00**	**42.422.800**	**- 1,52**	**30.841.128**	**- 10,13**	**72,70**	**37,20**	**110.821.128**	**124,02**			PAD masih dibawah tahun kemarin, jadi peningkatannya masih minus (-), karena rumusnya peningkatan PAD
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	5,00	166.513.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	5,00	256.513.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	5,00	156.513.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	10,00	153.030.000	2,00	18.450.000	1,00	21.190.400	1,00	15.420.564	100,00	72,77	3,00	33.870.564	30,00	22,13	Disparbud	Pengolahan PAD
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	6,00	202.230.000	2,00	61.530.000	1,00	21.232.400	1,00	15.420.564	100,00	72,63	3,00	76.950.564	-	38,05	Disparbud	Pelaporan PAD
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	72,70						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**90,00**	**2.852.034.000**	**100,00**	**58.400.000**	**90,00**	**35.164.000**	**90,00**	**25.441.128**	**100,00**	**72,35**	**95,00**	**83.841.128**	**105,56**			
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	25,00	254.545.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5,00	237.525.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6,00	295.254.000	2,00	28.700.000	1,00	17.587.600	1,00	12.720.564	100,00	72,33	3,00	41.420.564	50,00	14,03	Disparbud	Jelas
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	6,00	162.376.500	2,00	29.700.000	1,00	17.576.400	1,00	12.720.564	100,00	72,37	3,00	42.420.564	50,00	26,12	Disparbud	Jelas
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5,00	328.513.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	420,00	709.090.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	840,00	434.090.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	210,00	430.640.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	72,35						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**90,00**	**6.582.137.748**	**100,00**	**620.292.747**	**90,00**	**632.239.336**	**90,00**	**445.672.162**	**100,00**	**70,49**	**95,00**	**1.065.964.909**	**105,56**			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	81.476.076	2,00	6.581.000	1,00	12.622.743	1,00	5.391.000	100,00	42,71	3,00	11.972.000	50,00	14,69	Disparbud	Capaian 1 paket, tapi persentase capaian baru 25%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	2.676.179.068	2,00	422.956.219	2,00	80.128.639	1,00	79.300.533	50,00	98,97	3,00	502.256.752	25,00	18,77	Disparbud	Jelas
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00	127.522.500	-	1.650.000	1,00	9.999.030	1,00	5.115.500	100,00	51,16	1,00	6.765.500	20,00	5,31	Disparbud	Jelas
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	58.199.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	1.123.055.750	4,00	22.927.350	2,00	342.145.940	2,00	255.145.705	100,00	74,57	6,00	278.073.055	50,00	24,76	Disparbud	Jelas
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	152,00	228.748.000	42,00	27.320.000	15,00	24.999.760	10,00	15.550.000	66,67	62,20	52,00	42.870.000	34,21	18,74	Disparbud	Jelas
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5,00	25.504.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	125,00	382.575.000	13,00	8.199.000	25,00	21.000.000	10,00	8.000.000	40,00	38,10	23,00	16.199.000	18,40	4,23	Disparbud	Jelas
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	900,00	1.703.278.854	57,00	130.659.178	150,00	141.343.224	82,00	77.169.424	54,67	54,60	139,00	207.828.602	15,44	12,20	Disparbud	Perjalanan Dinas
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	10,00	25.504.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	10,00	150.094.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	73,05	60,33						
										Predikat Kinerja	(S)	(R)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**%**	**90,00**	**12.746.721.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	25,00	2.935.582.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	15,00	3.336.663.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15,00	510.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50,00	612.120.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	1.275.251.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	10,00	510.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00	2.546.703.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	100,00	1.020.201.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**90,00**	**4.721.468.635**	**100,00**	**655.528.662**	**90,00**	**525.504.000**	**90,00**	**301.475.859**	**100,00**	**57,37**	**95,00**	**957.004.521**	**105,56**			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	208.536.500	4,00	23.700.000	2,00	18.494.400	2,00	13.680.564	100,00	73,97	6,00	37.380.564	50,00	17,93	Disparbud	Surat Masuk dan Keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	18,00	2.015.828.000	6,00	289.941.162	3,00	319.900.000	3,00	149.220.971	100,00	46,65	9,00	439.162.133	50,00	21,79	Disparbud	Rekening Listrik, PDAM dan Intenet
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10,00	153.030.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	30,00	2.344.074.135	10,00	341.887.500	4,00	187.109.600	4,00	138.574.324	100,00	74,06	14,00	480.461.824	46,67	20,50	Disparbud	Kebersihan, Keamanan, Sopir dan Administrasi Kantor, Mamin Tamu
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	64,89						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**90,00**	**3.221.703.404**	**88,96**	**273.074.093**	**90,00**	**242.099.634**	**81,00**	**183.334.618**	**90,00**	**75,73**	**84,98**	**456.408.711**	**94,42**			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	66,00	1.391.609.404	23,00	202.479.093	11,00	175.107.846	11,00	136.773.672	100,00	78,11	34,00	339.252.765	51,52	24,38	Disparbud	Jelas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20,00	510.100.000	-	-	4,00	49.999.788	4,00	35.332.946	100,00	70,67	4,00	35.332.946	20,00	6,93	Disparbud	Jelas
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	78,00	137.775.000	9,00	9.720.000	15,00	9.750.000	10,00	9.035.000	66,67	92,67	19,00	18.755.000	24,36	13,61	Disparbud	Jelas
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	15,00	25.504.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	5,00	76.513.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	14,00	1.080.201.000	3,00	60.875.000	2,00	7.242.000	1,00	2.193.000	50,00	30,28	4,00	63.068.000	28,57	5,84	Disparbud	Rehab Gedung Kantor
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	79,17	67,93						
										Predikat Kinerja	(T)	(S)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**84,91**	**65,61**						
										Predikat Kinerja	**(T)**	**(S)**						
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	**Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan**	**%**	**18,00**	**114.093.906.106**	**17,45**	**19.602.688.488**	**12,00**	**6.751.041.601**	**13,62**	**4.806.966.052**	**113,54**	**71,20**	**15,54**	**24.409.654.540**	**86,31**			
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Persentase daya tarik wisata yang dikelola**	**%**	**18,00**	**11.927.030.000**	**47,66**	**101.720.000**	**12,00**	**89.100.522**	**30,59**	**68.948.800**	**254,93**	**77,38**	**39,13**	**170.668.800**	**217,36**			Daya Tarik yang dikelola memang banyak
Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lokasi	10,00	230.050.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	15,00	1.545.452.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	25,00	9.575.467.000	5,00	101.720.000	5,00	31.285.000	5,00	11.135.000	100,00	35,59	10,00	112.855.000	40,00	1,18	Disparbud	Jelas
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	576.060.500	-	-	1,00	57.815.522	1,00	57.813.800	100,00	100,00	1,00	57.813.800	20,00	10,04	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	67,79						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola**	**%**	**18,00**	**7.466.637.000**	**35,71**	**4.540.000**	**12,00**	**464.250.840**	**35,71**	**464.250.840**	**297,62**	**100,00**	**35,71**	**468.790.840**	**198,41**			Kawasan Strategis yang dikelola memang banyak
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	3.665.603.000	1,00	4.540.000	3,00	464.250.840	1,00	464.250.840	33,33	100,00	2,00	468.790.840	40,00	12,79	Disparbud	Review Ripparda
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	25,00	1.744.331.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	241.801.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	1,00	1.814.901.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	33,33	100,00						
										Predikat Kinerja	(SR)	(ST)						
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase destinasi pariwisata yang dikelola**	**%**	**18,00**	**92.107.489.106**	**50,00**	**19.200.300.488**	**12,00**	**6.004.457.650**	**53,33**	**4.193.711.284**	**444,44**	**69,84**	**51,67**	**23.394.011.772**	**287,04**			Destinasi pariwisata yang dikelola memang banyak
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	25,00	21.874.354.500	10,00	49.565.250	6,00	1.327.993.161	1,00	340.134.159	16,67	25,61	11,00	389.699.409	-	1,78	Disparbud	Realisasi Dilaksanakan untuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	30,00	37.462.650.887	41,00	4.345.629.926	5,00	3.873.916.800	5,00	3.090.285.411	100,00	79,77	46,00	7.435.915.337	153,33	19,85	Disparbud	Juru Pungut Retribusi, Pemandu Wisata, Penyelamat Wisata Tirta dan Penyuluh Wisata
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	25,00	22.693.295.091	6,00	12.323.378.500	10,00	641.011.734	3,00	619.133.434	30,00	96,59	9,00	12.942.511.934	36,00	57,03	Disparbud	Realisasi Dilaksanakan untuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	5,00	6.697.316.950	5,00	2.094.988.312	1,00	29.999.780	1,00	29.999.780	100,00	100,00	6,00	2.124.988.092	120,00	31,73	Disparbud	Jelas
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	1,00	3.379.871.678	1,00	386.738.500	1,00	131.536.175	1,00	114.158.500	100,00	86,79	2,00	500.897.000	200,00	14,82	Disparbud	Penerapan Indikator GSTC-D
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	69,33	77,75						
										Predikat Kinerja	(S)	(T)						
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan**	**%**	**50,00**	**2.592.750.000**	**48,28**	**296.128.000**	**12,00**	**193.232.589**	**99,44**	**80.055.128**	**828,71**	**41,43**	**73,86**	**376.183.128**	**147,73**			TDUP yang ditetapkan memang melebihi target
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	300,00	429.675.000	350,00	65.400.000	50,00	44.242.800	47,00	34.615.128	94,00	78,24	397,00	100.015.128	132,33	23,28	Disparbud	Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran TDUP memang melebihi target
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	12,00	1.908.025.000	4,00	230.728.000	3,00	148.989.789	1,00	45.440.000	33,33	30,50	5,00	276.168.000	41,67	14,47	Disparbud	Jelas
Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	10,00	255.050.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	63,67	54,37						
										Predikat Kinerja	(R)	(R)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**456,42**	**72,16**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(S)**						
Program Pemasaran Pariwisata	**Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan**	**%**	**45,00**	**20.546.627.397**	**17,76**	**559.667.500**	**30,00**	**489.048.200**	**28,81**	**282.036.980**	**96,05**	**57,67**	**23,29**	**841.704.480**	**51,75**			Revisi Capaian
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata yang dipasarkan dan dipromosikan**	**%**	**45,00**	**20.546.627.397**	**17,76**	**559.667.500**	**30,00**	**489.048.200**	**28,81**	**282.036.980**	**96,05**	**57,67**	**23,29**	**841.704.480**	**51,75**			Revisi Capaian
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	6,00	7.853.535.897	2,00	127.928.000	2,00	53.855.400	1,00	43.127.767	50,00	80,08	3,00	171.055.767	50,00	2,18	Disparbud	Promosi Medsos dan Website Promosi
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	5,00	8.475.910.000	1,00	347.813.000	2,00	321.476.460	1,00	152.056.185	50,00	47,30	2,00	499.869.185	40,00	5,90	Disparbud	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	6,00	881.550.000	2,00	82.846.500	1,00	36.502.200	1,00	26.866.128	100,00	73,60	3,00	109.712.628	50,00	12,45	Disparbud	Penyediaan Database Kepariwisataan

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	12,00	530.100.000	1,00	280.000	2,00	16.778.940	-	-	-	-	1,00	280.000	8,33	0,05	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	25,00	2.805.531.500	2,00	800.000	5,00	60.435.200	2,00	59.986.900	40,00	99,26	4,00	60.786.900	16,00	2,17	Disparbud	Realisasi Dilaksanakan untuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	48,00	60,05						
										Predikat Kinerja	(SR)	(R)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**96,05**	**57,67**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(R)**						
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan	**Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi**	**%**	**18,00**	**6.401.313.500**	**11,76**	**32.700.000**	**12,00**	**18.980.080**	**17,65**	**14.108.564**	**147,06**	**74,33**	**14,71**	**46.808.564**	**81,70**			
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi,	**Persentase parasana kreatif yang dibangun**	**%**	**18,00**	**2.420.552.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**			
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit	5,00	2.420.552.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	**Persentase ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan**	**%**	**18,00**	**3.980.761.000**	**2,44**	**32.700.000**	**12,00**	**18.980.080**	**19,61**	**14.108.564**	**163,40**	**74,33**	**11,02**	**46.808.564**	**61,24**			
Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	5,00	395.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	6,00	1.046.000.000	2,00	32.700.000	1,00	18.980.080	1,00	14.108.564	100,00	74,33	3,00	46.808.564	50,00	4,48	Disparbud	Database Ekonomi Kreatif
Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	10,00	720.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	15,00	1.334.361.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	10,00	230.050.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	5,00	255.050.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	74,33						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**163,40**	**74,33**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(S)**						
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	**Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing**	**%**	**35,00**	**6.557.539.713**	**2,28**	**1.180.468.213**	**20,00**	**189.494.254**	**11,58**	**88.725.900**	**57,91**	**46,82**	**6,93**	**1.269.194.113**	**19,80**			
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas tingkat dasar**	**%**	**35,00**	**5.488.804.713**	**2,12**	**1.155.468.213**	**20,00**	**99.666.134**	**11,12**	**-**	**55,61**	**-**	**6,62**	**1.155.468.213**	**18,91**			
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	900,00	1.921.751.856	530,00	748.227.356	150,00	99.666.134	-	-	-	-	530,00	748.227.356	58,89	38,93	Disparbud	Pelatihan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	300,00	1.071.601.357	220,00	407.240.857	-	-	-	-			220,00	407.240.857	73,33	38,00	Disparbud	Pelatihan
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang	1.100,00	1.680.301.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	145,00	560.100.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	5,00	255.050.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Persentase kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan**	**%**	**35,00**	**1.068.735.000**	**4,29**	**25.000.000**	**20,00**	**89.828.120**	**57,59**	**88.725.900**	**287,97**	**98,77**	**30,94**		**88,40**			Sesuai dilapangan, Jumlah total pelaku ekraf: 368 Orang dan Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan (mendapat pelatihan) sebanyak: 247 Orang dari tahun 2019
Pelatihan, Bimbingan teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	75,00	688.635.000	15,00	25.000.000	60,00	89.828.120	50,00	88.725.900	83,33	98,77	65,00	113.725.900	86,67	16,51	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	95,00	380.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	83,33	98,77						
										Predikat Kinerja	(T)	(ST)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**171,79**	**49,39**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(SR)**						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)											**101,52**	**63,41**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											**(ST)**	**(R)**						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**17.301.748.522**		**1.091.798.450**		**900.721.200**		**624.313.183**		**69,31**		**1.716.111.633**				
Program Pengembangan Kebudayaan	**Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan**	**%**	**20,00**	**13.887.251.000**	**40,00**	**1.036.791.450**	**14,00**	**788.367.800**	**14,00**	**608.523.948**	**100,00**	**77,19**	**27,00**	**1.645.315.398**	**135,00**			
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kebudayaan masyarakat lokal yang dikelola**	**%**	**20,00**	**10.418.128.000**	**40,00**	**990.801.450**	**14,00**	**699.867.800**	**14,00**	**520.023.948**	**100,00**	**74,30**	**27,00**	**1.510.825.398**	**135,00**			
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	6,00	9.558.083.000	2,00	990.801.450	2,00	699.867.800	2,00	520.023.948	100,00	74,30	4,00	1.510.825.398	66,67	15,81	Disparbud	Penyusunan Dokumen Database Kebudayaan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	325,00	860.045.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											100,00	74,30						
Predikat Kinerja											(ST)	(S)						
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kesenian tradisional masyarakat lokal yang dilestarikan**	**%**	**20,00**	**1.223.671.000**	**75,00**	**45.990.000**	**14,00**	**88.500.000**	**14,00**	**88.500.000**	**100,00**	**100,00**	**44,50**	**134.490.000**	**222,50**			
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	5,00	968.621.000	1,00	45.990.000	1,00	88.500.000	1,00	88.500.000	100,00	100,00	2,00	134.490.000	40,00	13,88	Disparbud	Pakem Budaya Lokal
Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertfifikat	10,00	255.050.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											100,00	100,00						
Predikat Kinerja											(ST)	(ST)						
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase lembaga adat yang dibina**	**%**	**20,00**	**2.245.452.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**			
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	12,00	1.325.251.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	500,00	920.201.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											**100,00**	**87,15**						
Predikat Kinerja											**(ST)**	**(T)**						
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	**Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan**	**%**	**20,00**	**1.225.251.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**			
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pembinaan kesenian masyarakat lokal yang dilakukan**	**%**	**20,00**	**1.225.251.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**			
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	250,00	460.100.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	125,00	510.100.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	10,00	255.050.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											-	-						
Predikat Kinerja											**(SR)**	**(SR)**						
Program Pembinaan Sejarah	**Persentase pembinaan sejarah yang dilakukan**	**%**	**20,00**	**385.100.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**			
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pembinaan sejarah lokal yang dilakukan**	**%**	**20,00**	**385.100.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**			
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	190,00	385.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											-	-						
Predikat Kinerja											**(SR)**	**(SR)**						
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	**Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola**	**%**	**13,00**	**1.804.146.522**	**30,19**	**55.007.000**	**7,00**	**112.353.400**	**7,00**	**15.789.235**	**100,00**	**14,05**	**18,59**	**70.796.235**	**143,03**			
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Persentase cagar budaya yang ditetapkan**	**%**	**13,00**	**1.192.025.902**	**7,69**	**55.007.000**	**7,00**	**92.373.400**	**3,13**	**15.789.235**	**44,64**	**17,09**	**5,41**	**70.796.235**	**41,61**			Tahun ini belum ada cagar budaya yang ditetapkan
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	25,00	528.895.381	4,00	55.007.000	10,00	42.382.400	8,00	15.789.235	80,00	37,25	12,00	70.796.235	48,00	13,39	Disparbud	Akses ke aplikasi DAPOBUD belum bisa masuk menunggu hasil verifikasi administrasi oleh pihak kementerian pendidikan dan kebudayaan
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	15,00	663.130.521	-	-	3,00	49.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disparbud	Jelas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											40,00	18,63						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Persentase cagar budaya yang dikelola**	**%**	**13,00**	**612.120.620**	**-**	**-**	**7,00**	**19.980.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	15,00	612.119.500	-	-	3,00	19.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disparbud	Jelas
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**22,32**	**8,55**						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**100,00**	**45,62**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(SR)**						
DINAS PERTANIAN																		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				**106.304.804.758**		**25.674.559.842**		**17.166.578.477**		**13.512.519.139**		**78,71**		**40.297.478.581**				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik**	**%**	**90,00**	**56.531.635.042**	**90,00**	**13.224.481.679**	**90,00**	**7.768.568.902**	**90,00**	**6.457.257.213**	**100,00**	**83,12**	**90,00**	**19.681.738.892**	**100,00**	**34,82**		
	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	**%**	**90,00**		**90,00**		**90,00**		**90,00**		**100,00**		**90,00**				Dinas Pertanian	
	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	**%**	**90,00**		**90,00**		**90,00**		**90,00**		**100,00**		**90,00**					
	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	**%**	**20,00**		**20,00**		**20,00**		**20,00**		**100,00**		**20,00**					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu**	**%**	**90,00**	**1.722.721.500**	**90,00**	**95.053.300**	**8,00**	**57.187.512**	**8,00**	**40.097.952**	**100,00**	**70,12**	**49,00**	**135.151.252**	**54,44**	**7,85**	Dinas Pertanian	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	42,00	566.866.500	14,00	54.961.300	7,00	32.429.952	7,00	23.735.652	100,00	73,19	21,00	78.696.952	50,00	13,88	Dinas Pertanian	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	30,00	321.240.000	10,00	40.092.000	5,00	24.757.560	5,00	16.362.300	100,00	66,09	15,00	56.454.300	50,00	17,57	Dinas Pertanian	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	6,00	834.615.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	69,64						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**90,00**	**46.739.710.418**	**90,00**	**11.647.510.633**	**1,00**	**6.732.231.646**	**1,00**	**5.713.189.464**	**100,00**	**84,86**	**45,50**	**17.360.700.097**	**50,56**	**37,14**	Dinas Pertanian	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	95,00	45.469.011.918	71,00	11.540.525.833	75,00	6.685.199.806	75,00	5.682.664.864	100,00	85,00	71,00	17.223.190.697	74,74	37,88	Dinas Pertanian	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas Keuangan SKPD	dokumen	72,00	1.179.671.000	24,00	77.880.000	12,00	47.031.840	12,00	30.524.600	100,00	64,90	36,00	108.404.600	50,00	9,19	Dinas Pertanian	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	6,00	70.562.500	1,00	29.104.800	-	-	-	-			1,00	29.104.800	16,67	41,25	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	6,00	20.465.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	74,95						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**jenis**	**3,00**	**215.573.000**	**3,00**	**42.000.000**	**1,00**	**21.134.400**	**1,00**	**12.880.800**	**100,00**	**60,95**	**2,00**	**54.880.800**	**66,67**	**25,46**	Dinas Pertanian	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	72,00	215.573.000	24,00	42.000.000	12,00	21.134.400	12,00	12.880.800	100,00	60,95	36,00	54.880.800	50,00	25,46	Dinas Pertanian	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	60,95						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**90,00**	**745.177.000**	**90,00**	**33.850.000**	**1,00**	**19.914.640**	**1,00**	**13.010.800**	**100,00**	**65,33**	**45,50**	**46.860.800**	**50,56**	**6,29**	Dinas Pertanian	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	72,00	178.767.000	24,00	33.850.000	12,00	19.914.640	12,00	13.010.800	100,00	65,33	36,00	46.860.800	50,00	26,21	Dinas Pertanian	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	6,00	288.205.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	50,00	278.205.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	65,33						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**90,00**	**1.783.448.723**	**90,00**	**284.424.363**	**1,00**	**141.030.948**	**1,00**	**130.463.100**	**100,00**	**92,51**	**45,50**	**414.887.463**	**50,56**	**23,26**	Dinas Pertanian	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6,00	34.514.479	2,00	5.366.500	1,00	854.046	1,00	850.000	100,00	99,53	3,00	6.216.500	50,00	18,01	Dinas Pertanian	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6,00	566.190.941	2,00	147.602.130	1,00	75.235.756	1,00	74.969.700	100,00	99,65	3,00	222.571.830	50,00	39,31	Dinas Pertanian	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	6,00	52.066.903	2,00	10.649.550	1,00	1.856.746	1,00	1.832.600	100,00	98,70	3,00	12.482.150	50,00	23,97	Dinas Pertanian	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12,00	155.737.000	4,00	15.670.435	1,00	7.800.000	1,00	7.800.000	100,00	100,00	5,00	23.470.435	41,67	15,07	Dinas Pertanian	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	13.104,00	166.132.500	377,00	23.945.000	160,00	3.000.000	160,00	3.000.000	100,00	100,00	537,00	26.945.000	4,10	16,22	Dinas Pertanian	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	360,00	631.966.700	16,00	48.640.748	10,00	33.275.000	10,00	30.055.000	100,00	90,32	26,00	78.695.748	7,22	12,45	Dinas Pertanian	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	12,00	176.840.200	4,00	32.550.000	2,00	19.009.400	2,00	11.955.800	100,00	62,89	6,00	44.505.800	50,00	25,17	Dinas Pertanian	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	93,01						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**%**	**10,00**	**1.939.706.500**	**10,00**	**352.569.823**	**1,00**	**120.000.000**	**1,00**	**120.000.000**	**100,00**	**100,00**	**5,50**	**472.569.823**	**55,00**	**24,36**	Dinas Pertanian	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	85,00	278.205.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	4.800,00	588.425.000	94,00	80.603.704	-	-	-	-			94,00	80.603.704	1,96	13,70	Dinas Pertanian	Pembelian alat dan bahan dalam penanganan COVID di tahun 2022 sebanyak 91 unit sehingga kinerja mnjadi besar yang pada awalnya tidak teranggarkan dalam RENSTRA
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	6,00	1.073.076.500	2,00	271.966.119	1,00	120.000.000	1,00	120.000.000	100,00	100,00	3,00	391.966.119	50,00	36,53	Dinas Pertanian	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	100,00						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**10,00**	**2.636.359.500**	**10,00**	**614.436.222**	**1,00**	**619.111.500**	**1,00**	**364.865.871**	**100,00**	**58,93**	**5,50**	**979.302.093**	**55,00**	**37,15**	Dinas Pertanian	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12,00	51.755.000	4,00	7.460.000	12,00	3.000.000	12,00	3.000.000	100,00	100,00	16,00	10.460.000	133,33	20,21	Dinas Pertanian	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	6,00	793.616.500	2,00	134.976.222	12,00	110.479.500	12,00	57.513.683	100,00	52,06	14,00	192.489.905	233,33	24,25	Dinas Pertanian	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	6,00	1.790.988.000	2,00	472.000.000	12,00	505.632.000	12,00	304.352.188	100,00	60,19	14,00	776.352.188	233,33	43,35	Dinas Pertanian	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	70,75						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Unit**	**20,00**	**748.938.401**	**20,00**	**154.637.338**	**9,00**	**57.958.256**	**9,00**	**62.749.226**	**100,00**	**108,27**	**14,50**	**217.386.564**	**72,50**	**29,03**	Dinas Pertanian	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	24,00	682.437.401	8,00	144.743.488	4,00	54.208.256	4,00	59.007.560	100,00	108,85	12,00	203.751.048	50,00	29,86	Dinas Pertanian	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	120,00	66.501.000	35,00	9.893.850	5,00	3.750.000	5,00	3.741.666	100,00	99,78	40,00	13.635.516	33,33	20,50	Dinas Pertanian	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	104,32						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**80,12**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(T)**						
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Indeks Pertanaman**	**Indeks**	**200,00**	**10.639.353.015**	**208,00**	**2.279.652.370**	**200,00**	**3.572.878.300**	**117,13**	**2.966.622.075**	**58,57**	**83,03**	**325,13**	**5.246.274.445**	**162,57**	**49,31**	Dinas Pertanian	
	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	**%**	**3,00**		**74,01**		**3,00**		**- 10,87**		**- 362,33**		**31,57**		**1.052,33**			Efek musim kemarau panjang sehingga produksi tidak maksimal
	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	**%**	**2,30**		**15,17**		**1,30**		**- 8,21**		**- 631,54**		**3,48**		**151,30**			Efek banyaknya penyebaran penyakit ternak (PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), LSD (Lumpy Skin Disease))
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura	**%**	**2,00**		**110,14**		**1,20**		**115,26**		**9.605,00**		**112,70**		**5.635,00**			Peralihan musim panen yang biasanya panen di bulan November-Desember menjadi bulan Januari-Februari
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Frekuensi Pelaksanaan**	**bulan**	**12,00**	**883.644.250**	**12,00**	**732.660.200**	**1,00**	**1.317.768.350**	**1,00**	**648.884.625**	**100,00**	**49,24**	**13,00**	**1.381.544.825**	**108,33**	**156,35**	Dinas Pertanian	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	laporan	6,00	583.644.250	2,00	732.660.200	2,00	350.000.000	1,00	129.918.625	50,00	37,12	3,00	862.578.825	50,00	147,79	Dinas Pertanian	adanya penambahan anggaran dari DAK NF dan DID (Insentif Fiskal) yang awalnya tidak dialokasikan di RENSTRA
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	6,00	300.000.000	-	-	5,00	967.768.350	3,00	518.966.000	60,00	53,63	3,00	518.966.000	50,00	172,99	Dinas Pertanian	adanya penambahan anggaran dari DBH Sawit dan DID (Insentif Fiskal)
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	55,00	45,37						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Predikat Kinerja	(R)	(SR)						
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**jumlah komoditi yang dikelola**	**jenis**	**4,00**	**6.354.820.831**	**3,00**	**1.110.399.600**	**-**	**456.837.150**	**-**	**456.837.150**	**-**	**100,00**	**3,00**	**1.567.236.750**	**75,00**	**24,66**	Dinas Pertanian	
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1,00	1.495.000.000	1,00	1.095.000.000	-	-	-	-			1,00	1.095.000.000	100,00	73,24	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	dokumen	2,00	4.859.820.831	2,00	15.399.600	-	456.837.150	-	456.837.150	-	100,00	2,00	472.236.750	-	-	Dinas Pertanian	Pembayaran hutang kegiatan tahun 2022 jadi untuk kinerja sub kegiatan
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	100,00						
										Predikat Kinerja	(SR)	(ST)						
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak**	**%**	**10,00**	**278.986.152**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasa Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tana Skala Kecil	laporan	5,00	278.986.152	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	laporan	1,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah	**Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	**ekor**	**184,00**	**3.121.901.782**	**110,00**	**436.592.570**	**525,00**	**1.798.272.800**	**645,00**	**1.860.900.300**	**122,86**	**103,48**	**755,00**	**2.297.492.870**	**410,33**	**73,59**	Dinas Pertanian	
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ekor	184,00	3.121.901.782	110,00	436.592.570	525,00	1.798.272.800	645,00	1.860.900.300	122,86	103,48	755,00	2.297.492.870	410,33	73,59	Dinas Pertanian	Adanya penambahan anggaran dari DID (Insentif Fiskal)
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	122,86	103,48						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**74,29**	**84,24**						
										Predikat Kinerja	**(S)**	**(T)**						
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian**	**%**	**3,00**	**23.024.476.138**	**14,70**	**6.749.948.038**	**1,20**	**3.652.950.955**	**- 33,87**	**2.178.062.290**	**- 2.822,58**	**59,62**	**- 9,59**	**8.928.010.328**	**- 319,52**	**38,78**	Dinas Pertanian	Jumlah bantuan dari APBN menurun
Pengembangan Prasarana Pertanian	**Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian**	**unit**	**9,00**	**5.672.314.582**	**3,00**	**1.069.033.730**	-	-	-	-			**3,00**	**1.069.033.730**	**33,33**	**18,85**	Dinas Pertanian	
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	dokumen	3,00	2.200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	dokumen	3,00	2.837.265.078	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	laporan	3,00	635.049.504	3,00	1.069.033.730	-	-	-	-			3,00	1.069.033.730	100,00	168,34	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Pembangunan Prasarana Pertanian	**Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian**	**unit**	**50,00**	**16.952.161.556**	**70,00**	**5.680.914.308**	**13,00**	**3.652.950.955**	**25,00**	**2.178.062.290**	**192,31**	**59,62**	**95,00**	**7.858.976.598**	**190,00**	**46,36**	Dinas Pertanian	Adanya penambahan anggaran dari DID (Insentif Fiskal) dan DBH-CHT
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi ,dan Dipelihara	unit	9,00	5.800.000.104	16,00	1.593.693.300	3,00	1.378.903.455	3,00	746.223.500	100,00	54,12	19,00	2.339.916.800	211,11	40,34	Dinas Pertanian	Adanya penambahan anggaran dari DID (Insentif Fiskal)
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	11,00	3.400.000.000	7,00	612.296.200	10,00	2.274.047.500	22,00	1.431.838.790	220,00	62,96	29,00	2.044.134.990	263,64	60,12	Dinas Pertanian	Adanya penambahan anggaran dari DID (Insentif Fiskal) dan DBH-CHT
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	-	-	10,00	1.198.734.200	-	-	-	-			10,00	1.198.734.200	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	-	-	5,00	1.104.432.608	-	-	-	-			5,00	1.104.432.608	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	30,00	7.752.161.452	7,00	1.171.758.000	-	-	-	-			7,00	1.171.758.000	23,33	15,12	Dinas Pertanian	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	160,00	58,54						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	**Jumlah Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum**	**unit**	**1,00**	**400.000.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	
Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	ha	2,00	400.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**192,31**	**59,62**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(R)**						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan Yang ASUH & Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular Ternak**	**%**	**10,00**	**2.143.689.078**	-	-	**10,00**	**214.180.320**	**20,11**	**208.887.085**	**201,10**	**97,53**	**10,06**	**208.887.085**	**100,55**	**9,74**	Dinas Pertanian	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan adanya tambahan anggaran dari DAKNF
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Hewan dalam keadaan sehat**	**%**	**50,00**	**2.003.800.000**	-	-	**1,00**	**63.605.320**	**1,00**	**63.529.147**	**100,00**	**99,88**	**0,50**	**63.529.147**	**1,00**	**3,17**	Dinas Pertanian	
Pengendalian dan Penanggulang an Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	laporan	4,00	600.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan	4,00	600.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	laporan	4,00	803.800.000	-	-	1,00	63.605.320	1,00	63.529.147	100,00	99,88	1,00	63.529.147	25,00	7,90	Dinas Pertanian	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	99,88						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**Frekuensi Pelaksanaan**	**bulan**	**12,00**	**139.889.078**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	laporan	4,00	139.889.078	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pelayanan Jasa Medik Veteriner**	**dokumen**	-	-	-	-	**1,00**	**150.575.000**	**1,00**	**145.357.938**	**100,00**	**96,54**						
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	laporan	-	-	-	-	1,00	150.575.000	1,00	145.357.938	100,00	96,54						Berdasarkan SE Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan Klasifikasi
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	96,54						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**98,21**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(ST)**						
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Persentase Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**%**	**60,00**	**3.283.343.910**	-	-	**65,00**	**680.000.000**	**17,54**	**571.823.050**	**26,99**	**84,09**	**8,77**	**571.823.050**	**14,62**	**17,42**	Dinas Pertanian	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**ha**	**1.900,00**	**3.283.343.910**	-	-	**300,00**	**680.000.000**	**959,00**	**571.823.050**	**319,67**	**84,09**	**959,00**	**571.823.050**	**50,47**	**17,42**	Dinas Pertanian	Adanya Bantuan Obat-obatan sehingga luas pengedalian OPT meningkat dan
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	ha	1.900,00	2.000.000.000	-	-	300,00	300.000.000	534,00	199.838.700	178,00	66,61	534,00	199.838.700	28,11	9,99	Dinas Pertanian	Adanya bantuan obat-obatan sehingga luas pengedalian OPT meningkat
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	ha	1.900,00	1.283.343.910	-	-	300,00	380.000.000	425,00	371.984.350	141,67	97,89	425,00	371.984.350	22,37	28,99	Dinas Pertanian	Adanya bantuan pompanisasi dalam menanggulangi kekeringan
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	159,83	82,25						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**319,67**	**84,09**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(T)**						
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan**	**%**	**100,00**	**200.000.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pertanian**	**buah**	**50,00**	**200.000.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	laporan	5,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**-**	**-**						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani**	**%**	**10,00**	**10.482.307.575**	**11,11**	**3.420.477.755**	**10,00**	**1.278.000.000**	**12,65**	**673.030.276**	**126,50**	**52,66**	**11,88**	**4.093.508.031**	**118,80**	**39,05**	Dinas Pertanian	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Jumlah Kelompok Tani Yang Skornya Naik**	**kelompok**	**224,00**	**10.482.307.575**	**112,00**	**3.420.477.755**	**112,00**	**1.278.000.000**	**112,00**	**673.030.276**	**100,00**	**52,66**	**224,00**	**4.093.508.031**	**100,00**	**39,05**	Dinas Pertanian	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	10,00	1.654.500.000	1,00	27.880.800	10,00	460.000.000	10,00	459.647.695	100,00	99,92	11,00	487.528.495	110,00	29,47	Dinas Pertanian	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	10,00	7.711.807.575	2,00	3.219.103.355	112,00	623.000.000	112,00	213.382.581	100,00	34,25	1,00	3.432.485.936	10,00	44,51	Dinas Pertanian	
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	-	-	20,00	173.493.600	39,00	195.000.000	10,00	-	25,64	-	30,00	173.493.600	-	-	Dinas Pertanian	Sub kegiatan ini di renstra tidak ada target kinerja dan anggarannya, pada tahun 2022 ada capaian kinerja karena didanai dari kegiatan DAKNF, dan pada
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	unit	60,00	1.116.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	75,21	44,72						
										Predikat Kinerja	(T)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**52,66**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(R)**						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)											- 33,43	76,68						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											(SR)	(T)						
SEKRETARIAT DAERAH				367.568.468.985		78.617.427.108		65.132.790.236		47.020.420.020		72,19		125.637.847.128				
URUSAN PERTANAHAN	**Indeks Tertib Administrasi**	**Indeks**	95,00	1.451.979.095		657.758.319		241.237.740		75.813.000		31,43	2,00	733.571.319	2,11	50,52	Sekretariat Daerah	
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	**Persentase Izin LokasiYang Diterbitkan**	**%**	100,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat Daerah	
Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan**	25,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat Daerah	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Laporan	25,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat Daerah	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Diselesaikan**	**%**	100,00	505.577.719	100,00	505.577.719	-	-	-	-			50,00	505.577.719	50,00	100,00	Sekretariat Daerah	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan**	25,00	505.577.719	9,00	505.577.719	-	-	-	-			9,00	505.577.719	36,00	100,00	Sekretariat Daerah	
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	25,00	504.377.719	1,00	504.377.719	-	-	-	-			1,00	504.377.719	4,00	100,00	Sekretariat Daerah	
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	25,00	1.200.000	1,00	1.200.000	-	-	-	-			1,00	1.200.000	4,00	100,00	Sekretariat Daerah	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**Persentase Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan**	**%**	100,00	85.310.872	-	-	100,00	14.992.240	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah	
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PenyelesaianMasalah Ganti Kerugiandan Santunan Tanahuntuk Pembangunanoleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota**	**%**	100,00	85.310.872	-	-	100,00	14.992.240	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	20,00	85.310.872	-	-	4,00	14.992.240	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah	Anggaran dialihkan untuk kegiatan lain di PPAS Perubahan 2023
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Cakupan Penggunaan Tanah Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	100,00	854.361.704	17,02	145.451.800	12,00	226.245.500	5,00	75.813.000	41,67	33,51	11,01	221.264.800	11,01	25,90	Sekretariat Daerah	
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan**	60,00	854.361.704	23,00	145.451.800	12,00	226.245.500	5,00	75.813.000	41,67	33,51	28,00	221.264.800	46,67	25,90	Sekretariat Daerah	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	38,00	284.366.193	12,00	50.000.000	12,00	226.245.500	4,00	75.813.000	33,33	33,51	16,00	125.813.000	42,11	44,24	Sekretariat Daerah	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jumlah anggran yang diterima
Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokumen	38,00	284.174.511	12,00	47.000.000	-	-	-	-			12,00	47.000.000	31,58	16,54	Sekretariat Daerah	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	20,00	285.821.001	18,00	48.451.800	-	-	-	-			18,00	48.451.800	90,00	16,95	Sekretariat Daerah	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)											33,33	33,51						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											41,67	33,51						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	**Cakupan Laporan Penetapan Tanah**	**laporan**	N/A	6.728.800	-	6.728.800	-	-	-	-			-	6.728.800	-	100,00	Sekretariat Daerah	
Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daera	**Jumlah Laporan Penetapan Tanah Ulayat yang**	**laporan**	N/A	6.728.800	-	6.728.800	-	-	-	-			-	6.728.800	-	100,00	Sekretariat Daerah	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan	N/A	6.728.800	-	6.728.800	-	-	-	-			-	6.728.800	-	100,00	Sekretariat Daerah	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**20,83**	**16,75**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(SR)**	**(SR)**						
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH				**366.116.489.890**		**77.959.668.789**		**64.891.552.496**		**46.944.607.020**		**72,34**		**124.904.275.809**		**34,12**		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**1. Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan Kerjasama yang dirumuskan 2. Persentase Pelayanan Administrasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat 3. Persentase Produk Hukum Daerah yang Diharmonisasi**	**%**	**90,00**	**106.501.309.150**	**12,51**	**14.808.266.222**	**87,00**	**22.652.761.648**	**59,58**	**14.913.151.109**	**68,48**	**65,83**	**36,04**	**29.721.417.331**	**40,05**	**27,91**	Sekretariat Daerah	
Administrasi Tata Pemerintahan	**Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**	**Nilai**	**Tinggi**	**14.887.079.509**	**20,00**	**2.358.312.955**	**3,41**	**1.960.254.620**	**3,00**	**1.520.616.129**	**87,98**	**77,57**	**23,00**	**3.878.929.084**	**-**	**26,06**	Sekretariat Daerah	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	30,00	3.812.160.832	7,00	1.227.532.690	6,00	492.930.000	6,00	366.358.629	100,00	74,32	13,00	1.593.891.319	43,33	41,81	Sekretariat Daerah	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jumlah anggran yang diterima
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	9,00	2.883.546.000	3,00	66.659.006	2,00	120.128.000	-	40.790.200	-	33,96	3,00	107.449.206	33,33	3,73	Sekretariat Daerah	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jumlah anggran yang diterima
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	60,00	8.191.372.677	12,00	1.064.121.259	12,00	1.347.196.620	10,00	1.113.467.300	83,33	82,65	22,00	2.177.588.559	36,67	26,58	Sekretariat Daerah	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jumlah anggran yang diterima
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	61,11	63,64						
										Predikat Kinerja	(R)	(R)						
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan**	**Kebijakan**	**1.500,00**	**77.712.364.583**	**152,00**	**10.410.441.960**	**281,00**	**17.629.972.648**	**73,00**	**11.319.914.525**	**25,98**	**64,21**	**225,00**	**21.730.356.485**	**15,00**	**27,96**	Sekretariat Daerah	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	178,00	16.193.240.887	48,00	4.306.735.025	37,00	5.954.939.434	35,00	5.003.915.400	94,59	84,03	83,00	9.310.650.425	46,63	57,50	Sekretariat Daerah	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	1.180,00	57.699.172.630	38,00	4.164.004.434	216,00	11.331.233.254	23,00	6.135.300.125	10,65	54,15	61,00	10.299.304.559	5,17	17,85	Sekretariat Daerah	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	142,00	3.819.951.066	66,00	1.939.702.501	28,00	343.799.960	15,00	180.699.000	53,57	52,56	81,00	2.120.401.501	57,04	55,51	Sekretariat Daerah	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	52,94	63,58						
										Predikat Kinerja	(R)	(R)						
Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	**Jumlah Fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselenggarakan**	**Persen**	**100,00**	**12.597.008.222**	**15,39**	**1.938.756.507**	**100,00**	**2.937.534.380**	**99,00**	**2.015.019.821**	**99,00**	**68,60**	**57,20**	**3.953.776.328**	**57,20**	**31,39**	Sekretariat Daerah	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	75,00	3.580.687.668	110,00	376.807.277	75,00	747.494.700	75,00	552.117.200	100,00	73,86	185,00	928.924.477	246,67	25,94	Sekretariat Daerah	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	5,00	7.717.899.285	4,00	1.366.157.430	2,00	2.043.408.680	2,00	1.447.743.221	100,00	70,85	6,00	2.813.900.651	120,00	36,46	Sekretariat Daerah	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	75,00	1.298.421.269	110,00	195.791.800	75,00	146.631.000	75,00	15.159.400	100,00	10,34	185,00	210.951.200	246,67	16,25	Sekretariat Daerah	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	51,68						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri**	**Dokumen**	**35,00**	**1.304.856.836**	**11,00**	**100.754.800**	**7,00**	**125.000.000**	**2,00**	**57.600.634**	**28,57**	**46,08**	**13,00**	**158.355.434**	**37,14**	**12,14**	Sekretariat Daerah	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jumlah anggran yang diterima
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	34,00	1.304.856.836	11,00	100.754.800	7,00	125.000.000	2,00	57.600.634	28,57	46,08	7,00	158.355.434	20,59	12,14	Sekretariat Daerah	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jumlah anggran yang diterima
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	28,57	46,08						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**60,38**	**64,11**						
										Predikat Kinerja	**(R)**	**(R)**						
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**%**	**100,00**	**25.614.974.523**	**14,00**	**5.242.633.254**	**89,00**	**4.716.924.465**	**62,37**	**3.239.491.007**	**70,08**	**68,68**	**38,18**	**8.482.124.261**	**38,18**	**33,11**	Sekretariat Daerah	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan**	**%**	**100,00**	**7.048.598.660**	**14,73**	**1.038.345.829**	**100,00**	**1.235.008.229**	**46,44**	**573.551.348**	**46,44**	**46,44**	**30,59**	**1.611.897.177**	**30,59**	**22,87**	Sekretariat Daerah	
Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	20,00	2.937.121.254	8,00	428.140.872	4,00	529.479.381	4,00	442.233.306	100,00	83,52	12,00	870.374.178	60,00	29,63	Sekretariat Daerah	Kegiatan kurang maksimal karena pagu di alihkan ke kegiatan yang lain

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen	15,00	2.083.519.365	6,00	553.307.909	3,00	293.457.000	5,00	103.660.045	166,67	35,32	11,00	656.967.954	73,33	31,53	Sekretariat Daerah	Kegiatan kurang maksimal karena pagu di alihkan ke kegiatan yang lain
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	30,00	2.027.958.041	20,00	56.897.048	20,00	412.071.848	11,00	27.657.997	55,00	6,71	31,00	84.555.045	103,33	4,17	Sekretariat Daerah	Kegiatan kurang maksimal karena pagu di alihkan ke kegiatan yang lain
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	107,22	41,85						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Jumlah Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Kegiatan**	**20,00**	**873.405.700**	**10,00**	**85.167.702**	**5,00**	**236.058.900**	**4,00**	**77.151.765**	**80,00**	**32,68**	**14,00**	**162.319.467**	**70,00**	**18,58**	Sekretariat Daerah	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	14,00	759.031.636	10,00	74.793.902	10,00	208.649.900	8,00	75.476.765	80,00	36,17	18,00	150.270.667	128,57	19,80	Sekretariat Daerah	Kegiatan kurang tercapai karena pagu di alihkan ke kegiatan yang lain
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	14,00	114.374.064	10,00	10.373.800	1,00	27.409.000	1,00	1.675.000	100,00	6,11	11,00	12.048.800	78,57	10,53	Sekretariat Daerah	Kegiatan kurang tercapai karena pagu di alihkan ke kegiatan yang lain
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	90,00	21,14						
										Predikat Kinerja	(T)	(SR)						
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase Keberhasilan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**%**	**100,00**	**10.625.149.918**	**20,01**	**2.126.434.408**	**100,00**	**1.601.557.336**	**80,06**	**1.270.780.360**	**80,06**	**79,35**	**50,04**	**3.397.214.768**	**50,04**	**31,97**	Sekretariat Daerah	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	20,00	3.907.493.082	8,00	870.164.205	4,00	872.247.000	4,00	702.620.060	100,00	80,55	12,00	1.572.784.265	60,00	40,25	Sekretariat Daerah	Kegiatan kurang tercapai karena pagu di alihkan ke kegiatan lain
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	54,00	1.985.188.347	23,00	747.736.800	12,00	154.305.416	12,00	57.808.400	100,00	37,46	35,00	805.545.200	64,81	40,58	Sekretariat Daerah	Kegiatan kurang tercapai karena pagu di alihkan ke kegiatan lain
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	120,00	4.732.468.489	19,00	508.533.403	24,00	575.004.920	21,00	510.351.900	87,50	88,76	40,00	1.018.885.303	33,33	21,53	Sekretariat Daerah	Kegiatan kurang tercapai karena pagu di alihkan ke kegiatan lain
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	95,83	68,92						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Nilai Penggunaan E-Procurement**	**Nilai**	**100,00**	**7.067.820.245**	**54,13**	**1.992.685.315**	**50,00**	**1.644.300.000**	**50,00**	**1.318.007.534**	**100,00**	**80,16**	**104,13**	**3.310.692.849**	**104,13**	**46,84**	Sekretariat Daerah	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	3.433,00	2.232.925.845	1.276,00	1.074.766.565	700,00	322.100.000	781,00	180.045.538	111,57	55,90	2.057,00	1.254.812.103	59,92	56,20	Sekretariat Daerah	kinerja bertambah dari perencanaan hal tersebut diindikasikan dari usulan SKPD kepada UKPBJ
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	3.433,00	414.977.600	1.144,00	249.068.750	700,00	150.400.000	781,00	84.093.496	111,57	55,91	1.925,00	333.162.246	56,07	80,28	Sekretariat Daerah	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	800,00	4.419.916.800	160,00	668.850.000	160,00	1.171.800.000	160,00	1.053.868.500	100,00	89,94	320,00	1.722.718.500	40,00	38,98	Sekretariat Daerah	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	107,71	67,25						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**76,63**	**59,66**						
										Predikat Kinerja	**(T)**	**(R)**						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi**	**%**	**100,00**	**234.000.206.217**	**29,00**	**57.908.769.313**	**100,00**	**37.521.866.383**	**76,73**	**28.791.964.904**	**76,73**	**76,73**	**52,87**	**86.700.734.217**	**52,87**	**37,05**	Sekretariat Daerah	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu**	**%**	**100,00**	**1.435.606.140**	**16,42**	**235.690.000**	**100,00**	**23.000.000**	**81,30**	**18.700.000**	**81,30**	**81,30**	**48,86**	**254.390.000**	**48,86**	**17,72**	Sekretariat Daerah	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Dokumen	20,00	1.234.402.200	8,00	235.690.000	4,00	23.000.000	4,00	18.700.000	100,00	81,30	12,00	254.390.000	60,00	20,61	Sekretariat Daerah	Belum dibayarkannya Honor OP Perencanaan bulan Desember
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5,00	43.862.980	1,00	-	-	-										
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5,00	43.862.980	1,00	-	-	-										
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5,00	43.862.980	1,00	-	-	-										
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	69.615.000	1,00	-	-	-										
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	81,30						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**100,00**	**105.254.135.535**	**24,37**	**25.655.104.754**	**100,00**	**17.823.497.414**	**68,87**	**12.274.894.185**	**68,87**	**68,87**	**46,62**	**37.929.998.939**	**46,62**	**36,04**	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	90,00	103.489.722.015	173,00	25.260.054.754	98,00	17.539.497.414	90,00	12.087.304.185	91,84	68,91	90,00	37.347.358.939	100,00	36,09	Sekretariat Daerah	Belum dibayarkannya TPP pegawai bulan September-Desember
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	20,00	1.684.816.000	24,00	395.050.000	4,00	278.000.000	4,00	187.590.000	100,00	67,48	28,00	582.640.000	140,00	34,58	Sekretariat Daerah	Belum dibayarkannya honor OP Keuangan bulan Desember, serta adanya pergeseran anggaran yang dialihkan untuk kegiatan lain

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5,00	38.798.760	-	-	1,00	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15,00	40.798.760	-	-	4,00	3.000.000	4,00	-	100,00	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	72,96	34,10						
										Predikat Kinerja	(S)	(SR)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**60,00**	**419.130.660**	**23,00**	**103.300.000**	**12,00**	**63.000.000**	**12,00**	**37.400.000**	**100,00**	**59,37**	**35,00**	**140.700.000**	**58,33**	**33,57**	Sekretariat Daerah	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60,00	419.130.660	24,00	103.300.000	12,00	63.000.000	12,00	37.400.000	100,00	59,37	36,00	140.700.000	60,00	33,57	Sekretariat Daerah	Belum dibayarkannya honor OP BMD bulan Desember, serta adanya pergeseran anggaran yang dialihkan untuk kegiatan lain
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	59,37						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Laporan**	**12,00**	**2.732.628.518**	**4,00**	**730.285.100**	**2,00**	**229.510.800**	**2,00**	**15.400.000**	**100,00**	**6,71**	**6,00**	**745.685.100**	**50,00**	**27,29**	Sekretariat Daerah	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5,00	1.198.960.746	1,00	257.997.300		-	-	-			1,00	257.997.300	20,00	21,52	Sekretariat Daerah	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	40,00	162.153.400	10,00	79.597.500	8,00	17.400.000	8,00	15.400.000	100,00	88,51	18,00	94.997.500	45,00	58,58	Sekretariat Daerah	Belum dibayarkannya honor OP Kepegawaian bulan Desember
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Tekni	Orang	175,00	1.371.514.372	35,00	392.690.300	35,00	212.110.800	-	-	-	-	35,00	392.690.300	20,00	28,63	Sekretariat Daerah	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	50,00	44,25						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Keberhasilan Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah**	**%**	**100,00**	**15.678.229.226**	**28,37**	**4.447.761.233**	**100,00**	**3.057.346.201**	**64,70**	**2.572.046.165**	**64,70**	**84,13**	**46,53**	**7.019.807.398**	**46,53**	**44,77**	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	185,00	179.018.078	64,00	34.079.300	37,00	10.000.000	2,00	3.134.700	5,41	31,35	66,00	37.214.000	35,68	20,79	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	6.765.033.136	6,00	1.306.696.097	1,00	1.112.854.535	1,00	702.649.850	100,00	63,14	7,00	2.009.345.947	140,00	29,70	Sekretariat Daerah	Adanya Paket Pekerjaan yang belum dibayarkan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00	1.060.196.000	4,00	490.696.820	1,00	48.898.000	-	-	-	-	4,00	490.696.820	80,00	46,28	Sekretariat Daerah	Tidak terlaksananya belanja modal pada tahun berjalan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00	833.282.116	2,00	296.985.000	1,00	155.475.050	1,00	96.400.000	100,00	62,00	3,00	393.385.000	60,00	47,21	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10,00	706.512.000	4,00	215.885.000	2,00	112.000.000	2,00	102.522.000	100,00	91,54	6,00	318.407.000	60,00	45,07	Sekretariat Daerah	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.450,00	6.134.187.896	464,00	2.103.419.016	290,00	1.618.118.616	187,00	1.667.339.615	64,48	103,04	651,00	3.770.758.631	44,90	61,47	Sekretariat Daerah	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	61,65	58,51						
										Predikat Kinerja	(R)	(R)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang dibeli**	**Jenis**	**4,00**	**1.240.721.457**	**3,00**	**244.267.850**	**4,00**	**20.000.000**	-	-	-	-	**3,00**	**244.267.850**	**75,00**	**19,69**	Sekretariat Daerah	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	35,00	719.839.457	1,00	197.810.350	7,00	20.000.000	-	-	-	-	1,00	197.810.350	2,86	27,48	Sekretariat Daerah	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	520.882.000	2,00	46.457.500	2,00	-	-	-			2,00	46.457.500	20,00	8,92	Sekretariat Daerah	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**100,00**	**55.203.727.071**	**24,04**	**13.268.596.966**	**100,00**	**9.275.493.810**	**81,98**	**7.604.490.890**	**81,98**	**81,98**	**53,01**	**20.873.087.856**	**53,01**	**37,81**	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	35,00	118.044.040	14,00	13.900.000	7,00	10.000.000	7,00	10.000.000	100,00	100,00	21,00	23.900.000	60,00	20,25	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15,00	12.263.351.681	6,00	2.501.154.796	3,00	1.932.576.000	3,00	996.265.554	100,00	51,55	9,00	3.497.420.350	60,00	28,52	Sekretariat Daerah	Adanya paket pekerjaan yang belum dibayarkan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	380,00	9.861.674.500	329,00	2.188.336.777	1,00	1.961.300.000	1,00	1.812.675.240	100,00	92,42	330,00	4.001.012.017	86,84	40,57	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	45,00	32.960.656.850	19,00	8.565.205.393	9,00	5.371.617.810	9,00	4.785.550.096	100,00	89,09	28,00	13.350.755.489	62,22	40,51	Sekretariat Daerah	belum dibayarkannya honor tenaga administrasi, serta adanya paket pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan namun belum dibayar
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	83,27						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang di Pelihara**	**Jenis**	**61,00**	**9.246.482.349**	**35,00**	**3.104.692.587**	**7,00**	**2.053.166.968**	**7,00**	**1.997.858.313**	**100,00**	**97,31**	**42,00**	**5.102.550.900**	**68,85**	**55,18**	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	90,00	5.057.688.734	70,00	1.530.303.961	18,00	914.300.770	18,00	1.056.038.667	100,00	115,50	88,00	2.586.342.628	97,78	51,14	Sekretariat Daerah	Kegiatan dilaksanakan menggunakan pagu setelah pergeseran

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	170,00	1.833.361.530	34,00	300.265.839	34,00	383.407.940	34,00	414.428.596	100,00	108,09	68,00	714.694.435	40,00	38,98	Sekretariat Daerah	Kegiatan dilaksanakan menggunakan pagu setelah pergeseran
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	35,00	65.806.619	7,00	8.500.000		-	-	-			7,00	8.500.000	20,00	12,92	Sekretariat Daerah	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10,00	2.289.625.465	6,00	1.265.622.787	2,00	755.458.258	2,00	527.391.050	100,00	69,81	8,00	1.793.013.837	80,00	78,31	Sekretariat Daerah	Adanya paket pekerjaan yang sudah dilaksanakan namun belum dibayar
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	97,80						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase penyediaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**%**	**100,00**	**9.152.210.025**	**22,72**	**2.079.637.472**	**100,00**	**1.072.441.430**	**92,14**	**988.191.277**	**92,14**	**92,14**	**57,43**	**3.067.828.749**	**57,43**	**33,52**	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	10,00	5.305.589.072	4,00	1.336.815.978	2,00	840.799.630	2,00	771.257.532	100,00	91,73	2,00	2.108.073.510	20,00	39,73	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	10,00	1.230.443.381	4,00	353.507.800	2,00	158.641.800	2,00	155.553.350	100,00	98,05	6,00	509.061.150	60,00	41,37	Sekretariat Daerah	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	40,00	930.184.664	17,00	189.352.772	4,00	73.000.000	4,00	61.380.395	100,00	84,08	21,00	250.733.167	52,50	26,96	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operaasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang/Bulan	10,00	1.685.992.907	2,00	199.960.922		-	-	-			2,00	199.960.922	20,00	11,86	Sekretariat Daerah	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	91,29						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	**Jumlah Jenis Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi**	**Jenis**	**2,00**	**4.295.388.789**	**4,00**	**701.783.500**	**2,00**	**690.000.000**	**2,00**	**680.907.000**	**100,00**	**98,68**	**2,00**	**1.382.690.500**	**100,00**	**32,19**	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	10,00	1.969.604.391	2,00	294.250.100	2,00	300.000.000	2,00	295.304.000	100,00	98,43	4,00	589.554.100	40,00	29,93	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	10,00	1.412.354.888	2,00	234.050.640	2,00	240.000.000	2,00	236.132.000	100,00	98,39	4,00	470.182.640	40,00	33,29	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	10,00	913.429.510	4,00	173.482.760	2,00	150.000.000	2,00	149.471.000	100,00	99,65	6,00	322.953.760	60,00	35,36	Sekretariat Daerah	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	98,82						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Penataan Organisasi	**Persentase penataan organisasi yang dilaksanakan**	**%**	**100,00**	**11.383.317.057**	**18,98**	**2.161.058.531**	**100,00**	**1.509.509.760**	**100,00**	**1.366.736.930**	**100,00**	**90,54**	**59,49**	**3.527.795.461**	**59,49**	**30,99**	Sekretariat Daerah	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	20,00	3.892.482.496	15,00	783.845.371	4,00	411.467.520	4,00	393.529.587	100,00	95,64	19,00	1.177.374.958	95,00	30,25	Sekretariat Daerah	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	9,00	2.320.609.770	2,00	487.799.540	1,00	454.431.240	1,00	395.470.223	100,00	87,03	3,00	883.269.763	33,33	38,06	Sekretariat Daerah	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	5,00	2.218.337.356	3,00	343.287.660	1,00	314.776.000	1,00	301.490.290	100,00	95,78	4,00	644.777.950	80,00	29,07	Sekretariat Daerah	
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	10,00	324.488.477	92,00	77.423.977	2,00	59.975.000	2,00	26.696.330	100,00	44,51	94,00	104.120.307	940,00	32,09	Sekretariat Daerah	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	5,00	2.627.398.957	1,00	468.701.983	1,00	268.860.000	1,00	249.550.500	100,00	92,82	2,00	718.252.483	40,00	27,34	Sekretariat Daerah	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	83,16						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan**	**%**	**100,00**	**17.958.629.391**	**28,83**	**5.176.591.320**	**100,00**	**1.704.900.000**	**72,46**	**1.235.340.144**	**72,46**	**72,46**	**50,64**	**6.411.931.464**	**50,64**	**35,70**	Sekretariat Daerah	
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	20,00	3.577.776.366	32,00	852.274.621	4,00	354.600.000	4,00	311.156.532	100,00	87,75	36,00	1.163.431.153	180,00	32,52	Sekretariat Daerah	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	15,00	4.342.229.380	739,00	575.137.727	3,00	267.779.500	3,00	109.572.454	100,00	40,92	742,00	684.710.181	4.946,67	15,77	Sekretariat Daerah	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	32,00	10.038.623.645	10,00	3.749.178.972	6,00	1.082.520.500	6,00	814.611.158	100,00	75,25	16,00	4.563.790.130	50,00	45,46	Sekretariat Daerah	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	67,97						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**80,12**	**69,46**						
										Predikat Kinerja	**(T)**	**(S)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**71,76**	**70,42**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(S)**	**(S)**						
SEKRETARIAT DPRD				**281.849.926.924**		**34.068.222.325**		**39.392.865.628**		**34.945.147.651**		**88,71**		**69.013.369.976**		**24,49**		
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				**281.849.926.924**		**34.068.222.325**		**39.392.865.628**		**34.945.147.651**		**88,71**		**69.013.369.976**		**24,49**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, peningkatan kompetensi aparatur, perencanaan dan evaluasi yang berkualitas, sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi**	**Persen**	**90,00**	**181.215.623.051**	**17,45**	**27.233.479.105**	**90,00**	**30.312.554.508**	**89,99**	**28.230.076.187**	**99,99**	**93,13**	**53,72**	**55.463.555.292**	**59,69**	**30,61**	Sekretariat DPRD	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase perencanaan kinerja, dokumen penganggaran kinerja, dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu**	**Dokumen**	**45,00**	**422.922.863**	**9,00**	**44.495.000**	**9,00**	**47.891.080**	**8,00**	**30.448.140**	**88,89**	**63,58**	**17,00**	**74.943.140**	**37,78**	**17,72**	Sekretariat DPRD	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15,00	335.886.582	3,00	40.300.000	3,00	42.000.000	3,00	27.200.000	100,00	64,76	6,00	67.500.000	40,00	20,10	Sekretariat DPRD	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5,00	5.101.005	1,00	740.000	1,00	1.121.500	1,00	1.121.500	100,00	100,00	2,00	1.861.500	40,00	36,49	Sekretariat DPRD	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5,00	5.101.005	1,00	740.000	1,00	1.121.500	1,00	-	100,00	-	2,00	740.000	40,00	14,51	Sekretariat DPRD	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5,00	22.444.422	1,00	1.357.500	1,00	1.935.000	1,00	1.935.000	100,00	100,00	2,00	3.292.500	40,00	14,67	Sekretariat DPRD	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5,00	22.444.422	1,00	1.357.500	1,00	1.500.100	1,00	-	100,00	-	2,00	1.357.500	40,00	6,05	Sekretariat DPRD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	26.844.422	1,00	-	1,00	212.980	1,00	191.640	100,00	89,98	2,00	191.640	40,00	0,71	Sekretariat DPRD	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	5.101.005	1,00	-	-	-	-	-			1,00	-	20,00	-	Sekretariat DPRD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	59,12						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**Dokumen**	**275,00**	**27.122.961.624**	**53,00**	**3.355.319.158**	**53,00**	**3.469.230.383**	**51,00**	**2.978.693.912**	**96,23**	**85,86**	**104,00**	**6.334.013.070**	**37,82**	**23,35**	Sekretariat DPRD	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25,00	25.786.147.590	25,00	3.315.019.158	25,00	3.423.755.083	24,00	2.948.067.772	96,00	86,11	49,00	6.263.086.930	196,00	24,29	Sekretariat DPRD	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60,00	397.412.302	12,00	40.300.000	12,00	43.345.500	12,00	28.539.000	100,00	65,84	24,00	68.839.000	40,00	17,32	Sekretariat DPRD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5,00	924.368.917	1,00	-	1,00	1.821.500	1,00	1.795.500	100,00	98,57	2,00	1.795.500	40,00	0,19	Sekretariat DPRD	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	5,00	2.550.503	1,00	-	-	-	-	-			1,00	-	20,00	-	Sekretariat DPRD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	70,00	8.401.508	12,00	-	14,00	308.300	14,00	291.640	100,00	94,60	26,00	291.640	37,14	3,47	Sekretariat DPRD	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	10,00	4.080.804	2,00	-	-	-	-	-			2,00	-	20,00	-	Sekretariat DPRD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	99,00	86,28						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**Dokumen**	**215,00**	**463.418.084**	**42,00**	**52.570.810**	**43,00**	**56.883.000**	**26,00**	**42.050.400**	**60,47**	**73,92**	**68,00**	**94.621.210**	**31,63**	**20,42**	Sekretariat DPRD	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10,00	4.335.854	2,00	-	-	-	-	-			2,00	-	20,00	-	Sekretariat DPRD	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10,00	77.739.316	2,00	15.670.810	2,00	14.883.000	2,00	14.850.400	100,00	99,78	4,00	30.521.210	40,00	39,26	Sekretariat DPRD	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	10,00	4.080.804	2,00	-	-	-	-	-			2,00	-	20,00	-	Sekretariat DPRD	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5,00	12.752.513	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	120,00	15.303.015	24,00	-	-	-	12,00	-			36,00	-	30,00	-	Sekretariat DPRD	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60,00	349.206.582	12,00	36.900.000	12,00	42.000.000	12,00	27.200.000	100,00	64,76	24,00	64.100.000	40,00	18,36	Sekretariat DPRD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	82,27						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**Dokumen**	**1.340,00**	**3.436.313.016**	**112,00**	**487.053.532**	**23,00**	**605.300.000**	**23,00**	**428.319.478**	**100,00**	**70,76**	**135,00**	**915.373.010**	**10,07**	**26,64**	Sekretariat DPRD	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5,00	714.140.701	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	60,00	156.927.135	12,00	30.600.000	12,00	17.400.000	12,00	1.400.000	100,00	8,05	24,00	32.000.000	40,00	20,39	Sekretariat DPRD	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	125,00	667.625.626	25,00	190.387.500	-	-	-	-			25,00	190.387.500	20,00	28,52	Sekretariat DPRD	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	250,00	360.810.301	50,00	23.750.000	-	-	-	-			50,00	23.750.000	20,00	6,58	Sekretariat DPRD	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	900,00	1.536.809.253	25,00	242.316.032	180,00	587.900.000	110,00	426.919.478	61,11	72,62	135,00	669.235.510	15,00	43,55	Sekretariat DPRD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	80,56	40,33						
										Predikat Kinerja	(T)	(SR)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**Dokumen**	**3.885,00**	**13.548.876.221**	**717,00**	**2.295.112.155**	**777,00**	**1.434.269.785**	**717,00**	**1.296.096.764**	**92,28**	**90,37**	**1.434,00**	**3.591.208.919**	**36,91**	**26,51**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5,00	492.236.135	1,00	19.553.000	1,00	50.653.115	1,00	52.492.000	100,00	103,63	2,00	72.045.000	40,00	14,64	Sekretariat DPRD	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	15,00	1.877.797.980	3,00	437.442.000	3,00	124.401.332	3,00	91.394.014	100,00	73,47	6,00	528.836.014	40,00	28,16	Sekretariat DPRD	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	10,00	293.337.851	2,00	76.444.310	2,00	39.257.620	2,00	52.354.000	100,00	133,36	4,00	128.798.310	40,00	43,91	Sekretariat DPRD	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	20,00	1.084.964.444	4,00	160.995.000	4,00	161.000.000	4,00	134.600.000	100,00	83,60	8,00	295.595.000	40,00	27,24	Sekretariat DPRD	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	5,00	876.450.812	1,00	189.481.400	1,00	135.827.718	1,00	122.985.000	100,00	90,54	2,00	312.466.400	40,00	35,65	Sekretariat DPRD	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	65,00	490.282.411	13,00	71.845.000	13,00	69.126.000	13,00	63.016.250	100,00	91,16	13,00	134.861.250	20,00	27,51	Sekretariat DPRD	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	5,00	1.034.073.185	1,00	10.915.000	-	-	-	-			1,00	10.915.000	20,00	1,06	Sekretariat DPRD	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1.200,00	971.868.980	200,00	647.639.825	240,00	544.240.000	275,00	565.541.000	114,58	103,91	475,00	1.213.180.825	39,58	124,83	Sekretariat DPRD	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.500,00	6.162.612.164	480,00	630.696.620	500,00	257.564.000	340,00	180.114.500	68,00	69,93	820,00	810.811.120	32,80	13,16	Sekretariat DPRD	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	60,00	265.252.261	12,00	50.100.000	12,00	52.200.000	12,00	33.600.000	100,00	64,37	24,00	83.700.000	40,00	31,55	Sekretariat DPRD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	98,06	90,44						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**Unit**	**160,00**	**2.235.840.578**	**7,00**	**80.000.000**	**29,00**	**352.954.000**	**10,00**	**201.604.000**	**34,48**	**57,12**	**17,00**	**281.604.000**	**10,63**	**12,59**	Sekretariat DPRD	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5,00	510.100.501	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10,00	597.455.826	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	130,00	720.203.850	2,00	-	26,00	193.700.000	8,00	122.350.000	30,77	63,16	10,00	122.350.000	7,69	16,99	Sekretariat DPRD	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	10,00	-	2,00	-	2,00	79.254.000	2,00	79.254.000	100,00	100,00	4,00	79.254.000	40,00	-	Sekretariat DPRD	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00	408.080.401	3,00	80.000.000	1,00	80.000.000	-	-	-	-	3,00	80.000.000	60,00	19,60	Sekretariat DPRD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	43,59	54,39						
										Predikat Kinerja	(SR)	(R)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**Laporan**	**6.350,00**	**13.683.070.929**	**1.233,00**	**2.902.411.266**	**1.270,00**	**3.233.579.927**	**903,00**	**2.574.259.952**	**71,10**	**79,61**	**2.136,00**	**5.476.671.218**	**33,64**	**40,03**	Sekretariat DPRD	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5.750,00	113.063.075	1.150,00	16.917.000	1.150,00	10.800.000	783,00	5.182.500	68,09	47,99	1.933,00	22.099.500	33,62	19,55	Sekretariat DPRD	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00	2.732.852.255	8,00	530.076.732	12,00	652.800.000	12,00	655.638.275	100,00	100,43	20,00	1.185.715.007	33,33	43,39	Sekretariat DPRD	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	80.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	540,00	10.757.155.600	75,00	2.355.417.534	108,00	2.569.979.927	108,00	1.913.439.177	100,00	74,45	183,00	4.268.856.711	33,89	39,68	Sekretariat DPRD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	89,36	74,29						
										Predikat Kinerja	(T)	(S)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah**	**Unit**	**672,00**	**5.706.968.141**	**120,00**	**937.926.681**	**140,00**	**983.349.111**	**124,00**	**768.863.815**	**88,57**	**78,19**	**122,00**	**1.706.790.496**	**18,15**	**29,91**	Sekretariat DPRD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	35,00	1.615.842.888	7,00	272.932.008	7,00	314.000.000	7,00	272.894.141	100,00	86,91	14,00	545.826.149	40,00	33,78	Sekretariat DPRD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	100,00	1.763.367.317	15,00	307.924.173	20,00	285.720.000	20,00	195.616.674	100,00	68,46	35,00	503.540.847	35,00	28,56	Sekretariat DPRD	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	75,00	127.525.125	-	-	15,00	11.250.000	16,00	5.400.000	106,67	48,00	16,00	5.400.000	21,33	4,23	Sekretariat DPRD	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	320,00	771.777.134	64,00	83.646.000	64,00	44.250.000	51,00	34.310.000	79,69	77,54	115,00	117.956.000	35,94	15,28	Sekretariat DPRD	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	135,00	127.525.125	27,00	48.430.000	27,00	75.600.000	24,00	55.996.000	88,89	74,07	51,00	104.426.000	37,78	81,89	Sekretariat DPRD	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	535.779.801	3,00	167.926.500	3,00	174.300.000	3,00	139.807.000	100,00	80,21	6,00	307.733.500	200,00	57,44	Sekretariat DPRD	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	255.050.251	3,00	20.230.000	3,00	78.229.111	3,00	64.840.000	100,00	82,88	6,00	85.070.000	200,00	33,35	Sekretariat DPRD	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	1,00	510.100.501	1,00	36.838.000	-	-	-	-			1,00	36.838.000	100,00	7,22	Sekretariat DPRD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	96,46	74,01						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Persentase layanan keuangan yang tersedia**	**Persen**	**85,00**	**107.248.059.419**	**40,00**	**16.477.704.503**	**80,00**	**19.768.110.022**	**40,00**	**19.624.259.726**	**50,00**	**99,27**	**80,00**	**36.101.964.229**	**94,12**	**33,66**	Sekretariat DPRD	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	40,00	104.895.969.462	40,00	16.477.704.503	40,00	19.688.110.022	40,00	19.624.259.726	100,00	99,68	80,00	36.101.964.229	200,00	34,42	Sekretariat DPRD	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	5,00	1.864.009.556	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	40,00	488.080.401	-	-	40,00	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	50,00	49,84						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Layanan Administrasi DPRD	**Persentase layanan administrasi DPRD yang tersedia**	**Laporan**	**420,00**	**7.347.192.176**	**13,00**	**600.886.000**	**84,00**	**360.987.200**	**14,00**	**285.480.000**	**16,67**	**79,08**	**27,00**	**886.366.000**	**6,43**	**12,06**	Sekretariat DPRD	
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	360,00	1.166.089.745	1,00	510.000	72,00	42.000.000	2,00	-	2,78	-	3,00	510.000	0,83	0,04	Sekretariat DPRD	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	60,00	6.181.102.431	12,00	600.376.000	12,00	318.987.200	12,00	285.480.000	100,00	89,50	24,00	885.856.000	40,00	14,33	Sekretariat DPRD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	51,39	44,75						
										Predikat Kinerja	(R)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**69,87**	**77,78**						
										Predikat Kinerja	**(S)**	**(T)**						
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang telaksana dengan baik**	**Persen**	**65,28**	**100.634.303.873**	**0,00**	**6.834.743.220**	**63,00**	**9.080.311.120**	**42,38**	**6.715.071.464**	**67,26**	**73,95**	**21,19**	**13.549.814.684**	**32,46**	**13,46**	Sekretariat DPRD	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun**	**Dokumen**	**121,00**	**21.504.616.342**	**26,00**	**1.158.360.740**	**24,00**	**1.219.813.890**	**24,00**	**933.905.500**	**100,00**	**76,56**	**50,00**	**2.092.266.240**	**41,32**	**9,73**	Sekretariat DPRD	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	45,00	510.100.501	9,00	69.960.000	9,00	98.131.750	9,00	68.410.000	100,00	69,71	18,00	138.370.000	40,00	27,13	Sekretariat DPRD	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	45,00	16.050.581.182	11,00	496.897.550	9,00	528.925.500	9,00	388.155.500	100,00	73,39	20,00	885.053.050	44,44	5,51	Sekretariat DPRD	
Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	10,00	255.050.251	2,00	5.750.000	2,00	3.236.480	2,00	-	100,00	-	4,00	5.750.000	40,00	2,25	Sekretariat DPRD	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	20,00	4.488.884.409	4,00	585.753.190	4,00	589.520.160	4,00	477.340.000	100,00	80,97	8,00	1.063.093.190	40,00	23,68	Sekretariat DPRD	
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib yang tersusun	Dokumen	1,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	56,02						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Jumlah dokumen hasil pembahasan Kebijakan anggaran yang tersusun**	**Dokumen**	**35,00**	**6.656.811.538**	**7,00**	**582.461.810**	**7,00**	**813.068.600**	**6,00**	**561.572.000**	**85,71**	**69,07**	**13,00**	**1.144.033.810**	**37,14**	**17,19**	Sekretariat DPRD	
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	5,00	1.326.261.303	1,00	133.489.610	1,00	141.101.050	1,00	132.921.000	100,00	94,20	2,00	266.410.610	40,00	20,09	Sekretariat DPRD	
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	5,00	1.326.261.303	1,00	122.938.000	1,00	181.314.000	1,00	125.213.000	100,00	69,06	2,00	248.151.000	40,00	18,71	Sekretariat DPRD	
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	5,00	1.326.261.303	1,00	108.212.200	1,00	176.775.850	1,00	102.485.000	100,00	57,97	2,00	210.697.200	40,00	15,89	Sekretariat DPRD	
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	5,00	1.326.261.303	1,00	101.792.000	1,00	181.564.000	1,00	72.285.000	100,00	39,81	2,00	174.077.000	40,00	13,13	Sekretariat DPRD	
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	10,00	25.505.025	2,00	-	2,00	2.400.000	2,00	-	100,00	-	4,00	-	40,00	-	Sekretariat DPRD	
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	5,00	1.326.261.303	1,00	116.030.000	1,00	129.913.700	1,00	128.668.000	100,00	99,04	2,00	244.698.000	40,00	18,45	Sekretariat DPRD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	60,01						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun**	**Laporan**	**1.540,00**	**3.688.177.612**	**243,00**	**175.377.000**	**278,00**	**261.811.850**	**148,00**	**186.783.500**	**53,24**	**71,34**	**391,00**	**362.160.500**	**25,39**	**9,82**	Sekretariat DPRD	
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	360,00	464.347.547	60,00	19.170.000	72,00	37.560.000	38,00	19.566.000	52,78	52,09	98,00	38.736.000	27,22	8,34	Sekretariat DPRD	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	300,00	519.516.956	60,00	29.475.000	60,00	40.965.000	36,00	23.270.000	60,00	56,80	96,00	52.745.000	32,00	10,15	Sekretariat DPRD	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	360,00	464.347.547	60,00	11.475.000	72,00	35.740.000	35,00	17.235.000	48,61	48,22	95,00	28.710.000	26,39	6,18	Sekretariat DPRD	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	360,00	464.347.547	60,00	11.200.000	72,00	33.465.000	37,00	14.966.000	51,39	44,72	97,00	26.166.000	26,94	5,64	Sekretariat DPRD	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	140,00	382.575.376	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	5,00	464.347.547	1,00	-	1,00	7.010.000	1,00	7.000.000	100,00	99,86	2,00	7.000.000	40,00	1,51	Sekretariat DPRD	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	10,00	464.347.547	1,00	-	-	-	-	-			1,00	-	10,00	-	Sekretariat DPRD	
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	5,00	464.347.547	1,00	104.057.000	1,00	107.071.850	1,00	104.746.500	100,00	97,83	2,00	208.803.500	40,00	44,97	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											68,80	66,59						
Predikat Kinerja											(S)	(S)						
Peningkatan Kapasitas DPRD	**Jumlah Dokumen Peningkatan kapasitas DPRD**	**Dokumen**	**292,00**	**20.047.024.558**	**53,00**	**2.022.849.700**	**311,00**	**2.210.004.670**	**111,00**	**1.712.660.022**	**35,69**	**77,50**	**164,00**	**3.735.509.722**	**56,16**	**18,63**	Sekretariat DPRD	
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1,00	500.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	20,00	15.414.427.904	6,00	1.526.149.700	160,00	1.751.689.750	160,00	1.343.300.022	100,00	76,69	166,00	2.869.449.722	830,00	18,62	Sekretariat DPRD	
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	60,00	294.999.761	12,00	27.800.000	12,00	14.000.000	7,00	15.400.000	58,33	110,00	19,00	43.200.000	31,67	14,64	Sekretariat DPRD	
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	60,00	612.120.601	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6,00	1.836.361.804	6,00	273.000.000	6,00	105.000.000	6,00	210.000.000	100,00	200,00	12,00	483.000.000	200,00	26,30	Sekretariat DPRD	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	140,00	1.343.205.443	28,00	192.400.000	120,00	331.175.080	36,00	141.150.000	30,00	42,62	64,00	333.550.000	45,71	24,83	Sekretariat DPRD	
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	5,00	45.909.045	1,00	3.500.000	1,00	8.139.840	1,00	2.810.000	100,00	34,52	2,00	6.310.000	40,00	13,74	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											77,67	92,77						
Predikat Kinerja											(T)	(ST)						
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang tersusun**	**Dokumen**	**140,00**	**19.703.861.667**	**28,00**	**1.215.502.250**	**28,00**	**2.518.541.920**	**7,00**	**2.007.745.840**	**25,00**	**79,72**	**35,00**	**3.223.248.090**	**25,00**	**16,36**	Sekretariat DPRD	
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	120,00	3.010.991.908	24,00	60.260.000	24,00	33.744.000	3,00	3.744.000	12,50	11,10	27,00	64.004.000	22,50	2,13	Sekretariat DPRD	
Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	5,00	178.535.175	1,00	4.800.000	1,00	1.350.000	1,00	1.050.000	100,00	77,78	2,00	5.850.000	40,00	3,28	Sekretariat DPRD	
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	15,00	16.514.334.583	3,00	1.150.442.250	3,00	2.483.447.920	3,00	2.002.951.840	100,00	80,65	6,00	3.153.394.090	40,00	19,09	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											70,83	56,51						
Predikat Kinerja											(S)	(R)						
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang tersusun**	**Dokumen**	**6,00**	**594.730.816**	**1,00**	**28.740.000**	**1,00**	**59.233.350**	**1,00**	**50.035.000**	**100,00**	**84,47**	**2,00**	**78.775.000**	**33,33**	**13,25**	Sekretariat DPRD	
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1,00	95.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	5,00	499.730.816	1,00	28.740.000	1,00	59.233.350	1,00	50.035.000	100,00	84,47	2,00	78.775.000	40,00	15,76	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											100,00	84,47						
Predikat Kinerja											(ST)	(T)						
Pembahasan Kerja Sama Daerah	**Jumlah Laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**165,00**	**4.764.945.923**	**33,00**	**532.000.000**	**33,00**	**639.000.000**	**23,00**	**603.000.000**	**69,70**	**94,37**	**56,00**	**1.135.000.000**	**33,94**	**23,82**	Sekretariat DPRD	
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	165,00	4.764.945.923	33,00	532.000.000	33,00	639.000.000	23,00	603.000.000	69,70	94,37	56,00	1.135.000.000	33,94	23,82	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											69,70	94,37						
Predikat Kinerja											(S)	(ST)						
Fasilitasi Tugas DPRD	**Jumlah Fasilitasi DPRD yang terlaksana**	**Dokumen**	**205,00**	**23.674.135.418**	**41,00**	**1.119.451.720**	**41,00**	**1.358.836.840**	**43,00**	**659.369.602**	**104,88**	**48,52**	**84,00**	**1.778.821.322**	**40,98**	**7,51**	Sekretariat DPRD	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	80,00	21.712.058.325	16,00	648.864.700	16,00	807.789.500	16,00	267.790.000	100,00	33,15	32,00	916.654.700	40,00	4,22	Sekretariat DPRD	
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	5,00	127.525.125	1,00	8.000.000	1,00	13.950.040	1,00	-	100,00	-	-	8.000.000	-	6,27	Sekretariat DPRD	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	60,00	1.103.455.525	12,00	22.830.000	12,00	133.139.900	12,00	115.534.800	100,00	86,78	24,00	138.364.800	40,00	12,54	Sekretariat DPRD	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	60,00	731.096.442	12,00	439.757.020	12,00	403.957.400	14,00	276.044.802	116,67	68,34	26,00	715.801.822	43,33	97,91	Sekretariat DPRD	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											104,17	47,07						
Predikat Kinerja											(ST)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											**71,78**	**75,19**						
Predikat Kinerja											**(S)**	**(T)**						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)											**83,63**	**83,54**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											**(T)**	**(T)**						
INSPEKTORAT																		
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				**93.983.882.217**		**13.115.578.754**		**9.267.371.335**		**6.361.174.108**		**68,64**		**19.476.752.862**		**20,72**		
	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	**Persen**	**95,00**		**90,00**		**90,00**		**84,29**		**93,66**		**87,15**		**87,50**			

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik**	**Persen**	**95,00**	**66.613.989.554**	**90,00**	**10.624.771.147**	**90,00**	**7.622.969.798**	**88,24**	**5.764.479.708**	**98,04**	**75,62**	**89,12**	**16.389.250.855**	**87,50**	**24,60**	Inspektorat	
	3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	**Persen**	**95,00**		**90,00**		**90,00**		**77,50**		**86,11**		**83,75**		**87,50**			
	4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	**Persen**	**95,00**		**90,00**		**90,00**		**91,67**		**101,85**		**90,83**		**87,50**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu**	**Persen**	**95,00**	**1.514.794.000**	**90,00**	**87.218.900**	**90,00**	**25.209.150**	**100,00**	**14.494.000**	**111,11**	**57,49**	**95,00**	**101.712.900**	**87,50**	**6,71**	Inspektorat	
	2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	**Persen**	**95,00**		**90,00**		**90,00**		**90,00**		**100,00**		**90,00**		**87,50**			
	3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	**Persen**	**95,00**		**90,00**		**90,00**		**83,33**		**92,59**		**86,67**		**87,50**			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	80,00	551.690.000	28,00	42.948.900	13,00	24.508.900	13,00	14.226.000	100,00	58,04	41,00	57.174.900	51,25	10,36	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5,00	59.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Inspektorat	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5,00	59.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Inspektorat	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5,00	59.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Inspektorat	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5,00	59.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Inspektorat	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	31,00	667.604.000	2,00	44.270.000	6,00	700.250	5,00	268.000	83,33	38,27	7,00	44.538.000	22,58	6,67	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20,00	59.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Inspektorat	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	91,67	48,16						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Unit Kerja yang Menyusun Laporan Kinerja Keuangan dengan baik**	**Dokumen**	**170,00**	**53.300.393.250**	**98,00**	**9.186.010.952**	**34,00**	**6.051.520.593**	**30,00**	**4.737.356.873**	**88,24**	**78,28**	**78,75**	**13.923.367.825**	**46,32**	**26,12**	Inspektorat	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	240,00	52.715.625.250	73,00	9.146.560.952	40,00	6.029.909.593	38,00	4.723.337.373	95,00	78,33	111,00	13.869.898.325	46,25	26,31	Inspektorat	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	168,00	269.311.000	97,00	39.450.000	28,00	21.098.000	28,00	13.696.500	100,00	64,92	125,00	53.146.500	74,40	19,73	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Inspektorat	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12,00	206.855.000	1,00	-	1,00	263.000	1,00	143.000	100,00	54,37	2,00	143.000	16,67	0,07	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	24,00	108.602.000	-	-	1,00	250.000	1,00	180.000	100,00	72,00	1,00	180.000	4,17	0,17	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Inspektorat	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	98,75	67,41						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**Laporan**	**222,00**	**371.237.350**	**52,00**	**39.450.000**	**26,00**	**21.280.000**	**23,00**	**13.880.000**	**88,46**	**65,23**	**75,00**	**53.330.000**	**33,78**	**14,37**	Inspektorat	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10,00	34.675.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Inspektorat	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Inspektorat	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Inspektorat	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	70,00	57.600.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Inspektorat	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	142,00	278.962.350	52,00	39.450.000	23,00	21.280.000	23,00	13.880.000	100,00	65,23	75,00	53.330.000	52,82	19,12	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	65,23						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**Dokumen**	**50,00**	**2.862.420.000**	**77,00**	**331.982.422**	**12,00**	**577.259.500**	**12,00**	**461.545.190**	**100,00**	**79,95**	**44,50**	**793.527.612**	**89,00**	**27,72**	Inspektorat	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	72,00	215.920.000	24,00	32.700.000	12,00	17.400.000	12,00	11.200.000	100,00	64,37	36,00	43.900.000	50,00	20,33	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	238,00	90.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Inspektorat	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	238,00	2.556.500.000	53,00	299.282.422	40,00	559.859.500	31,00	450.345.190	77,50	80,44	84,00	749.627.612	35,29	29,32	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	88,75	72,40						
										Predikat Kinerja	(T)	(S)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1. Jumlah Paket Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah**	**Paket**	**25,00**	**2.934.451.308**	**7,00**	**257.033.363**	**5,00**	**196.369.977**	**5,00**	**153.353.917**	**100,00**	**78,09**	**6,00**	**410.387.280**	**24,00**	**13,99**	Inspektorat	
	2. Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah	**Dokumen**	**20,00**		**8,00**		**4,00**		**3,00**		**75,00**							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	61.700.000	-	-	1,00	1.097.500	1,00	497.500	100,00	45,33	1,00	497.500	20,00	0,81	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	306.509.108	3,00	85.735.506	1,00	32.230.004	1,00	23.927.986	100,00	74,24	4,00	109.663.492	80,00	35,78	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15,00	133.860.700	5,00	6.807.862	3,00	8.650.000	3,00	4.559.349	100,00	52,71	8,00	11.367.211	53,33	8,49	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60,00	160.500.000	24,00	18.615.000	12,00	13.637.400	10,00	7.455.000	83,33	54,67	34,00	26.070.000	56,67	16,24	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60,00	222.250.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Inspektorat	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	204,00	1.828.711.500	67,00	113.174.995	40,00	123.355.073	36,00	105.714.082	90,00	85,70	103,00	218.889.077	50,49	11,97	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	60,00	220.920.000	24,00	32.700.000	12,00	17.400.000	12,00	11.200.000	100,00	64,37	36,00	43.900.000	60,00	19,87	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	95,56	62,84						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**Persen**	**90,00**	**2.522.700.000**	**90,00**	**300.000.000**	**90,00**	**327.003.400**	**90,00**	**197.379.000**	**100,00**	**60,36**	**90,00**	**497.379.000**	**100,00**	**19,72**	Inspektorat	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	6,00	850.000.000	-	-	1,00	129.624.400	1,00	-	100,00	-	1,00	-	16,67	-		Realisasi Kinerja Tercapai, Realisasi Keuangan di hutangkan di Tahun Anggaran 2024
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	92,00	708.300.000	-	-	5,00	43.200.000	5,00	43.200.000	100,00	100,00	5,00	43.200.000	5,43	6,10		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6,00	964.400.000	2,00	300.000.000	1,00	154.179.000	1,00	154.179.000	100,00	100,00	3,00	454.179.000	50,00	47,09	Inspektorat	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	66,67						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**Persen**	**90,00**	**1.634.737.112**	**90,00**	**284.176.247**	**90,00**	**193.657.178**	**12,00**	**118.768.759**	**13,33**	**61,33**	**51,00**	**402.945.006**	**56,67**	**24,65**	Inspektorat	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72,00	26.370.000	24,00	1.418.000	12,00	1.040.000	12,00	872.000	100,00	83,85	36,00	2.290.000	50,00	8,68	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72,00	470.398.000	24,00	95.261.087	12,00	74.175.696	12,00	44.384.059	100,00	59,84	36,00	139.645.146	50,00	29,69	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00	1.137.969.112	24,00	187.497.160	12,00	118.441.482	12,00	73.512.700	100,00	62,07	36,00	261.009.860	50,00	22,94	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	68,58						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**Persen**	**90,00**	**1.473.256.534**	**90,00**	**138.899.263**	**42,00**	**230.670.000**	**34,00**	**67.701.969**	**80,95**	**29,35**	**62,00**	**206.601.232**	**68,89**	**14,02**	Inspektorat	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00	192.485.056	2,00	41.590.940	1,00	30.000.000	1,00	20.993.500	100,00	69,98	3,00	62.584.440	50,00	32,51	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	72,00	1.113.771.478	24,00	87.472.123	12,00	191.670.000	12,00	42.163.469	100,00	22,00	36,00	129.635.592	50,00	11,64	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	17.000.000	1,00	300.000	-	-	-	-			1,00	300.000	100,00	1,76	Inspektorat	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	222,00	150.000.000	37,00	9.536.200	29,00	9.000.000	20,00	4.545.000	68,97	50,50	57,00	14.081.200	25,68	9,39	Inspektorat	Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	89,66	47,49						
										Predikat Kinerja	(T)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**85,26**	**63,76**						
										Predikat Kinerja	**(T)**	**(R)**						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD**	**Nilai**	**81,25**	**20.147.531.981**	**58,57**	**1.626.258.207**	**69,25**	**1.060.813.080**	**64,82**	**321.350.400**	**93,60**	**30,29**	**123,39**	**1.947.608.607**	**151,86**	**9,67**	Inspektorat	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	Nilai	3,30		3,12		3,10		3,36		108,39		6,48	-	196,45	-	Inspektorat	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja dan Pengawasan Keuangan	Laporan	219,00	15.218.314.500	22,00	1.185.683.207	30,00	687.748.880	30,00	225.705.400	100,00	32,82	52,00	1.411.388.607	23,74	9,27	Inspektorat	
	2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dan Pengawasan Internal	Laporan	42,00		12,00		9,00		5,00		55,56		17,00		40,48		Inspektorat	
	3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	Laporan	60,00		24,00		12,00		12,00		100,00		36,00		60,00		Inspektorat	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	114,00	2.567.787.500	6,00	428.468.040	14,00	112.060.500	12,00	30.584.500	85,71	27,29	18,00	459.052.540	15,79	17,88	Inspektorat	Capaian kinerja tercapai, Penyerapan Anggaran kegiatan tersebut dihutangkan
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	48,00	3.212.252.500	16,00	147.837.500	17,00	110.271.000	18,00	56.286.500	105,88	51,04	34,00	204.124.000	70,83	6,35	Inspektorat	Capaian kinerja melebihi 100% dikarenakan adanya penugasan diluar PKPT atas Perintah Kepala Daerah, Penyerapan anggaran kegiatan tersebut dihutangkan
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Pelaksanaan Reviu kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	444,00	1.813.145.000	4,00	68.466.000	75,00	98.467.840	75,00	77.900.500	100,00	79,11	79,00	146.366.500	17,79	8,07	Inspektorat	Capaian kinerja tercapai, Penyerapan Anggaran kegiatan tersebut dihutangkan
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Reviu keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	240,00	529.207.500	4,00	55.884.000	75,00	88.739.060	75,00	49.910.500	100,00	56,24	79,00	105.794.500	32,92	19,99	Inspektorat	Capaian kinerja tercapai, Penyerapan Anggaran kegiatan tersebut dihutangkan
Pengawasan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Desa	Laporan	240,00	4.040.265.000	4,00	425.112.571	8,00	142.729.280	8,00	303.000	100,00	0,21	12,00	425.415.571	5,00	10,53	Inspektorat	Capaian kinerja tercapai, Penyerapan Anggaran kegiatan tersebut dihutangkan
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksanaan kerjasama pengawasan internal	Laporan	12,00	765.875.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Inspektorat	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Pelaksanaan Monev TLHP BPK-RI dan APIP	Laporan	72,00	2.289.782.000	24,00	59.915.096	12,00	135.481.200	12,00	10.720.400	100,00	7,91	36,00	70.635.496	50,00	3,08	Inspektorat	Capaian kinerja tercapai, Penyerapan Anggaran kegiatan tersebut dihutangkan
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	98,60	36,97						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	42,00	4.929.217.481	52,00	440.575.000	26,00	373.064.200	31,00	95.645.000	119,23	25,64	83,00	536.220.000	197,62	10,88	Inspektorat	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah	Laporan	54,00	1.589.225.000	20,00	80.048.000	10,00	56.235.400	9,00	38.220.000	90,00	67,96	29,00	118.268.000	53,70	7,44	Inspektorat	Capaian kinerja tercapai, Penyerapan Anggaran kegiatan tersebut dihutangkan
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	182,00	3.339.992.481	32,00	360.527.000	19,00	316.828.800	22,00	57.425.000	115,79	18,12	54,00	417.952.000	29,67	12,51	Inspektorat	Capaian kinerja melebihi 100% dikarenakan adanya penugasan diluar PKPT atas Perintah Kepala Daerah, Penyerapan anggaran kegiatan tersebut dihutangkan
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	102,89	43,04						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**102,21**	**29,23**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(SR)**						
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	82,00	7.222.360.682	67,71	864.549.400	65,00	583.588.457	56,48	275.344.000	86,89	47,18	124,19	1.139.893.400	151,45	15,78	Inspektorat	
	Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas	Unit Kerja	4,00		-		4,00		4,00		100,00		4,00	-	100,00	-		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang dirumuskan	Dokumen	12,00	259.000.000	-	-	2,00	-	-	-			-	-	-	-	Inspektorat	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan	Dokumen	6,00	129.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Inspektorat	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	Dokumen	6,00	129.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Inspektorat	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen laporan hasil pendampingan dan asistensi yang tersusun	Laporan	324,00	6.963.360.682	14,00	864.549.400	54,00	583.588.457	54,00	275.344.000	100,00	47,18	68,00	1.139.893.400	20,99	16,37	Inspektorat	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	216,00	631.250.000	-	-	36,00	173.989.900	36,00	4.470.000	100,00	2,57	36,00	4.470.000	16,67	0,71	Inspektorat	Capaian kinerja tercapai, Penyerapan Anggaran kegiatan tersebut dihutangkan
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	60,00	1.230.915.000	2,00	69.887.000	10,00	30.292.200	10,00	-	100,00	-	12,00	69.887.000	20,00	5,68	Inspektorat	Capaian kinerja tercapai, Penyerapan Anggaran kegiatan tersebut dihutangkan
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	24,00	3.681.871.000	24,00	252.897.400	4,00	349.070.157	4,00	264.748.000	100,00	75,84	28,00	517.645.400	116,67	14,06	Inspektorat	Capaian kinerja tercapai, Penyerapan Anggaran kegiatan tersebut dihutangkan
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	24,00	1.419.324.682	2,00	541.765.000	4,00	30.236.200	4,00	6.126.000	100,00	20,26	6,00	547.891.000	25,00	38,60	Inspektorat	Capaian kinerja tercapai, Penyerapan Anggaran kegiatan tersebut dihutangkan
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	24,67						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**47,18**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(SR)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**96,03**	**51,03**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(R)**						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				**125.899.464.716**		**19.064.658.536**		**12.644.503.113**		**8.892.232.889**		**70,32**		**27.956.891.425**		**22,21**		
URUSAN PERENCANAAN				**116.953.255.603**		**17.797.615.957**		**11.751.968.155**		**8.767.628.544**		**74,61**		**26.565.244.501**		**22,71**		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase sarana pasarana kantor yang terpenuhi**	%	**95,00**	**62.629.197.778**	**86,43**	**9.316.788.277**	**96,00**	**6.424.915.710**	**85,22**	**3.752.165.062**	**88,77**	**58,40**	**85,82**	**13.068.953.339**	**90,34**	**20,87**	Bappeda	
	Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	%	**98,00**		**96,00**		**96,00**		**100,00**		**104,17**		**98,00**		**100,00**		Bappeda	
	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	**98,00**		**100,00**		**96,00**		**100,00**		**104,17**		**100,00**		**102,04**		Bappeda	
	Persentase Perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	**98,00**		**100,00**		**96,00**		**116,67**		**121,53**		**108,33**		**110,54**		Bappeda	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu**	%	**100,00**	**785.311.819**	**100,00**	**42.932.000**	**100,00**	**182.548.020**	**125,00**	**77.784.874**	**125,00**	**42,61**	**112,50**	**120.716.874**	**112,50**	**15,37**	Bappeda	
	Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	%	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**125,00**		**125,00**		**112,50**		**112,50**		Bappeda	
	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		Bappeda	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	26,00	601.758.420	8,00	40.650.000	4,00	172.548.220	5,00	76.165.034	125,00	44,14	13,00	116.815.034	0,19	0,13	Bappeda	Penambahan Kegiatan IAIN sehingga adanya penambahan capaian kinerja
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	51,00	183.553.399	11,00	2.282.000	10,00	9.999.800	10,00	1.619.840	100,00	16,20	21,00	3.901.840	0,20	0,01	Bappeda	
											Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		112,50	30,17				
											Predikat Kinerja		(ST)	(SR)				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	%	**100,00**	**36.051.126.564**	**100,00**	**7.433.701.116**	**100,00**	**4.782.346.821**	**100,00**	**3.775.527.104**	**100,00**	**78,95**	**100,00**	**11.209.228.220**	**100,00**	**31,09**	Bappeda	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	252,00	34.612.524.346	72,00	7.318.360.866	45,00	4.653.558.821	45,00	3.664.010.246	100,00	78,74	117,00	10.982.371.112	0,18	0,11	Bappeda	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	144,00	810.718.958	13,00	85.525.250	1,00	121.488.300	1,00	106.271.718	100,00	87,47	14,00	191.796.968	0,01	0,13	Bappeda	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6,00	491.101.860	2,00	28.065.000	1,00	5.499.860	1,00	4.661.260	100,00	84,75	3,00	32.726.260	0,17	0,01	Bappeda	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	6,00	136.781.400	1,00	1.750.000	3,00	1.799.840	3,00	583.880	100,00	32,44	4,00	2.333.880	0,50	0,00		
											Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		100,00	70,85				
											Predikat Kinerja		(ST)	(S)				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	%	**100,00**	**243.404.940**	**100,00**	**39.450.000**	**100,00**	**21.399.880**	**100,00**	**14.379.800**	**100,00**	**67,20**	**100,00**	**53.829.800**	**100,00**	**22,12**	Bappeda	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72,00	243.404.940	24,00	39.450.000	1,00	21.399.880	1,00	14.379.800	100,00	67,20	25,00	53.829.800	0,01	0,06	Bappeda	
											Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		100,00	67,20				
											Predikat Kinerja		(ST)	(S)				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	%	**100,00**	**644.532.280**	**100,00**	**40.995.000**	**100,00**	**21.399.880**	**100,00**	**14.379.800**	**100,00**	**67,20**	**100,00**	**55.374.800**	**100,00**	**8,59**	Bappeda	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	72,00	244.532.280	13,00	40.995.000	1,00	21.399.880	1,00	14.379.800	100,00	67,20	14,00	55.374.800	0,01	0,06	Bappeda	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	280,00	400.000.000	-	-	0	0	-	-			-	-	-	-		
											Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		100,00	67,20				
											Predikat Kinerja		(ST)	(S)				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	%	**100,00**	**11.506.143.903**	**100,00**	**428.711.684**	**100,00**	**508.342.481**	**96,67**	**278.113.149**	**96,67**	**54,71**	**98,33**	**706.824.833**	**98,33**	**6,14**	Bappeda	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	144.141.472	2,00	13.947.364	2,00	4.527.280	1,00	3.846.000	50,00	84,95	3,00	17.793.364	0,17	0,03	Bappeda	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	5.979.478.440	58,00	141.143.662	2,00	66.077.220	2,00	61.620.700	100,00	93,26	60,00	202.764.362	0,17	0,01	Bappeda	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6,00	2.022.773.571	2,00	49.919.829	1,00	21.081.743	1,00	14.139.074	100,00	67,07	3,00	64.058.903	0,17	0,01	Bappeda	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00	181.002.377	2,00	14.716.027	3,00	13.539.020	3,00	8.236.637	100,00	60,84	5,00	22.952.664	0,50	0,05	Bappeda	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Dokumen	6,00	253.431.600	2,00	20.060.000	1,00	34.824.000	1,00	5.400.000	100,00	15,51	3,00	25.460.000	0,17	0,02	Bappeda	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	6,00	424.470.343	1,00	52.922.955	1,00	21.245.218	1,00	19.476.842	100,00	91,68	2,00	72.399.797	0,17	0,05	Bappeda	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72,00	1.946.100.000	24,00	122.701.847	12,00	333.048.000	12,00	165.393.896	100,00	49,66	36,00	288.095.743	0,17	0,08	Bappeda	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	6,00	554.746.100	1,00	13.300.000	1,00	14.000.000	-	-	-	-	1,00	13.300.000	-	-	Bappeda	
											Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		81,25	24,83				
											Predikat Kinerja		(T)	(SR)				

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**%**	**100,00**	**3.191.194.979**	**56,25**	**258.237.500**	**100,00**	**46.643.628**	**29,41**	**39.376.450**	**29,41**	**84,42**	**42,83**	**297.613.950**	**42,83**	**9,33**	Bappeda	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6,00	681.557.100	-	-	1,00	2.601.000	1,00	2.601.000	100,00	100,00	1,00	2.601.000	0,17	0,00	Bappeda	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	95,00	2.219.637.879	17,00	159.237.500	16,00	44.042.628	4,00	36.775.450	25,00	83,50	21,00	196.012.950	0,04	0,02	Bappeda	Refocusing anggaran sehingga pengadaan peralatan dan mesin lainnya ditiadakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00	290.000.000	1,00	99.000.000	-	0	-	-			1,00	99.000.000	-	-	Bappeda	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	62,50	91,75						
										Predikat Kinerja	(R)	(ST)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**100,00**	**7.852.712.489**	**100,00**	**882.740.894**	**100,00**	**679.125.000**	**100,00**	**511.309.483**	**100,00**	**75,29**	**100,00**	**1.394.050.377**	**100,00**	**17,75**	Bappeda	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6,00	56.302.970	2,00	4.190.000	1,00	1.500.000	1,00	700.000	100,00	46,67	3,00	4.890.000	0,17	0,01	Bappeda	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6,00	4.762.944.096	2,00	422.356.098	12,00	424.080.000	12,00	324.673.091	100,00	76,56	14,00	747.029.189	2,00	0,07	Bappeda	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6,00	3.033.465.423	2,00	456.194.796	12,00	253.545.000	12,00	185.936.392	100,00	73,33	14,00	642.131.188	2,00	0,06	Bappeda	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	65,52						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**100,00**	**2.354.770.804**	**100,00**	**190.020.083**	**100,00**	**183.110.000**	**91,67**	**114.793.672**	**91,67**	**62,69**	**95,83**	**304.813.755**	**95,83**	**12,94**	Bappeda	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	144,00	1.743.020.804	24,00	146.856.492	12,00	121.860.000	12,00	97.271.972	100,00	79,82	36,00	244.128.464	0,08	0,06	Bappeda	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6,00	611.750.000	2,00	43.163.591	1,00	61.250.000	1,00	17.521.700	100,00	28,61	3,00	60.685.291	0,17	0,03	Bappeda	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	54,21						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**92,84**	**66,63**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(S)**						
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah**	**%**	**100,00**	**20.413.490.580**	**100,00**	**4.111.037.755**	**100,00**	**2.498.779.845**	**100,00**	**1.761.825.392**	**100,00**	**70,51**	**100,00**	**5.872.863.147**	**100,00**	**28,77**	Bappeda	
	Persentase realisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	**%**	**62,00**		**73,80**		**59,00**		**87,79**		**148,80**		**80,80**		**130,31**			
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD**	**Dokumen**	**12,00**	**13.275.395.852**	**12,00**	**3.019.771.653**	**12,00**	**1.494.814.445**	**12,00**	**1.098.429.008**	**100,00**	**73,48**	**12,00**	**4.118.200.661**	**100,00**	**31,02**	Bappeda	
	Jumlah Aplikasi yang dikelola	**Aplikasi**	**1,00**		**1,00**				-									
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	24,00	180.657.352	8,00	27.165.250	4,00	17.300.675	4,00	17.285.800	100,00	99,91	12,00	44.451.050	0,17	0,10	Bappeda	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	6,00	1.655.568.600	2,00	239.520.131	1,00	135.091.530	1,00	131.888.459	100,00	97,63	3,00	371.408.590	0,17	0,08	Bappeda	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	14,00	11.439.169.900	4,00	2.753.086.272	2,00	1.342.422.240	2,00	949.254.749	100,00	70,71	6,00	3.702.341.021	0,14	0,08	Bappeda	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	89,42						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Pemenuhan Data Perencanaan Pembangunan daerah**	**%**	**87,00**	**2.208.743.728**	**89,00**	**586.510.220**	**100,00**	**175.530.600**	**100,00**	**147.735.384**	**100,00**	**84,17**	**94,50**	**734.245.604**	**108,62**	**33,24**	Bappeda	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	12,00	1.057.440.000	2,00	112.884.571	1,00	175.530.600	1,00	147.735.384	100,00	84,17	3,00	260.619.955	0,08	0,14	Bappeda	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	70,00	1.151.303.728	1,00	473.625.649	-	0	-	-			1,00	473.625.649	-	-	Bappeda	Sub kegiatan tidak dilaksanakan lagi dan untuk substansi pelaksanaan kegiatan ini digabung pada sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	84,17						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase realisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah**	**%**	**62,00**	**4.929.351.000**	**65,90**	**504.755.882**	**59,00**	**828.434.800**	**87,79**	**515.661.000**	**148,80**	**62,25**	**76,85**	**1.020.416.882**	**123,94**	**20,70**	Bappeda	Evaluasi capaian kinerja diukur setelah penetapan APBD sesuai formula bahwa untuk indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara kegiatan di RKPD dan APBD
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	72,00	4.929.351.000	8,00	504.755.882	4,00	828.434.800	4,00	515.661.000	100,00	62,25	12,00	1.020.416.882	0,06	0,10	Bappeda	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	62,25						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**116,27**	**73,30**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(S)**						
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase perangkat daerah yang memiliki keselarasan program RPJMD dan RKPD**	**%**	**98,00**	**33.910.567.245**	**88,65**	**4.369.789.925**	**95,00**	**2.828.272.600**	**95,00**	**2.180.138.820**	**100,00**	**77,08**	**91,83**	**6.549.928.745**	**93,70**	**19,32**	Bappeda	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
	Persentase perangkat daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran	%	**100,00**		**86,96**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**93,48**				Bappeda	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah**	**Dokumen**	**2,00**	**9.944.360.362**	**2,00**	**1.512.492.905**	**5,00**	**1.109.908.280**	**5,00**	**769.464.540**	**100,00**	**69,33**	**7,00**	**2.281.957.445**	**350,00**	**22,95**	Bappeda	
	Jumlah Laporan Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	**Laporan**	**3,00**		**2,00**				1,00	-							Bappeda	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11,00	4.320.018.875	4,00	1.300.817.755	1,00	1.028.779.760	1,00	710.613.580	100,00	69,07	5,00	2.011.431.335	0,09	0,16	Bappeda	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	21.522.550	1,00	21.522.550	-	0	-	-			1,00	21.522.550	-	-	Bappeda	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	7,00	1.109.042.000	2,00	127.443.400	1,00	14.728.760	1,00	8.981.960	100,00	60,98	3,00	136.425.360	0,14	0,01	Bappeda	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11,00	1.671.318.000	2,00	62.709.200	1,00	45.999.760	1,00	36.269.000	100,00	78,85	3,00	98.978.200	0,09	0,02	Bappeda	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	90,00	2.458.074.093	-	-	1,00	20.400.000	5,00	13.600.000	500,00	66,67	5,00	13.600.000	0,06	0,01	Bappeda	Dibawah lingkup koordinasi bidang pembangunan manusia ada 5 SKPD
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	90,00	364.384.844	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Bappeda	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-								
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	200,00	68,89						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah**	**Dokumen**	**6,00**	**3.757.300.483**	**6,00**	**174.615.937**	**6,00**	**298.242.020**	**6,00**	**212.132.848**	**100,00**	**71,13**	**12,00**	**386.748.785**	**200,00**	**10,29**	Bappeda	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6,00	1.297.300.483	3,00	85.785.561	1,00	211.836.160	1,00	170.173.800	100,00	80,33	4,00	255.959.361	0,17	0,13	Bappeda	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	20,00	480.000.000	-	-	4,00	12.541.860	4,00	6.901.800	100,00	55,03	4,00	6.901.800	0,20	0,01	Bappeda	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	24,00	530.000.000	4,00	10.121.000	-	-	-	-			4,00	10.121.000	-	-	Bappeda	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6,00	640.000.000	2,00	69.365.376	1,00	45.099.000	1,00	24.471.000	100,00	54,26	3,00	93.836.376	0,17	0,04	Bappeda	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	10,00	380.000.000	-	-	2,00	16.303.000	2,00	5.511.248	100,00	33,81	2,00	5.511.248	0,20	0,01	Bappeda	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	12,00	430.000.000	3,00	9.344.000	2,00	12.462.000	2,00	5.075.000	100,00	40,72	5,00	14.419.000	0,17	0,01	Bappeda	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	52,83						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah**	**Dokumen**	**13,00**	**20.208.906.400**		**2.682.681.083**	**8,00**	**1.420.122.300**	**8,00**	**1.198.541.432**	**100,00**	**84,40**	**8,00**	**3.881.222.515**	**61,54**	**19,21**	Bappeda	
	Jumlah Peta Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	**Peta**	**10,00**						-								Bappeda	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11,00	1.255.000.000	-	-	5,00	246.596.960	5,00	200.524.520	100,00	81,32	5,00	200.524.520	0,45	0,16	Bappeda	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	90,00	255.000.000	5,00	17.696.994	5,00	-	5,00	-			10,00	17.696.994	0,06	-	Bappeda	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	90,00	255.000.000	5,00	3.000.000	5,00	-	5,00	-			10,00	3.000.000	0,06	-	Bappeda	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	24,00	9.711.440.425	7,00	987.067.387	5,00	154.980.000	5,00	89.561.591	100,00	57,79	12,00	1.076.628.978	0,21	0,01	Bappeda	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11,00	255.000.000	-	-	35,00	-	-	-			-	-	-	-	Bappeda	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	90,00	255.000.000	-	-	10,00	-	10,00	-			10,00	-	0,11	-	Bappeda	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	90,00	255.000.000	10,00	3.000.000	10,00	-	20,00	-			30,00	3.000.000	0,22	-	Bappeda	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	24,00	7.967.465.975	15,00	1.671.916.702	5,00	1.018.545.340	5,00	908.455.321	100,00	89,19	20,00	2.580.372.023	0,21	0,11	Bappeda	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	76,10						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**74,95**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(S)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**101,55**	**68,66**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(S)**						
URUSAN PENELITIAN DAN PENGAMBANGAN				**8.946.209.113**		**1.267.042.579**		**892.534.958**		**124.604.345**		**13,96**	-	**1.391.646.924**		**15,56**		
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	**Persentase Hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti**	**%**	**60,00**	**8.946.209.113**	**60,00**	**1.267.042.579**	**45,00**	**892.534.958**	**45,00**	**124.604.345**	**100,00**	**13,96**	**52,50**	**1.391.646.924**	**87,50**	**15,56**	Bappeda	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Jumlah Dokumen pernelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan**	**Dokumen**	-	**1.595.398.007**	-	**268.238.432**	**2,00**	**456.018.778**	**2,00**	**95.869.028**	**100,00**	**21,02**	**2,00**	**364.107.460**	-	**22,82**	Bappeda	
	Jumlah laporan pernelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	**Laporan**	**2,00**		-				-	-							Bappeda	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	0	-	-			-	-	-	-	Bappeda	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	2,00	317.904.400	1,00	224.113.100	-	0	-	-			1,00	224.113.100	-	-	Bappeda	
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	19,00	1.277.493.607	3,00	44.125.332	2,00	456.018.778	2,00	95.869.028	100,00	21,02	5,00	139.994.360	0,11	0,08	Bappeda	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	21,02						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Dokumen**	**1,00**	**279.901.000**	**1,00**	**4.793.800**	**1,00**	**175.000.000**	**1,00**	**11.050.117**	**100,00**	**6,31**	**2,00**	**15.843.917**	**200,00**	**5,66**	Bappeda	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	-	-	-	-	1,00	175.000.000	1,00	11.050.117	100,00	6,31	1,00	11.050.117	-	-	Bappeda	
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1,00	279.901.000	-	4.793.800	-	0	-	-			-	4.793.800	-	-	Bappeda	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	6,31						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Dokumen**	**1,00**	**5.845.910.971**	**2,00**	**912.752.963**	**1,00**	**179.999.980**	**1,00**	-	**100,00**	-	**3,00**	**912.752.963**	**300,00**	**15,61**	Bappeda	
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1,00	1.438.619.500	-	-	-	0	-	-			-	-	-	-	Bappeda	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	6,00	3.001.828.371	1,00	203.861.240	1,00	179.999.980	**1,00**	-	100,00	-	2,00	203.861.240	0,17	-	Bappeda	
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	1,00	1.405.463.100	1,00	708.891.723	-	0	-	-			1,00	708.891.723	-	-	Bappeda	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	-						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Dokumen**	**2,00**	**1.224.999.135**	**2,00**	**81.257.384**	**2,00**	**81.516.200**	**2,00**	**17.685.200**	**100,00**	**21,70**	**4,00**	**98.942.584**	**200,00**	**8,08**	Bappeda	
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	2,00	824.999.135	1,00	81.257.384	2,00	81.516.200	2,00	17.685.200	100,00	21,70	3,00	98.942.584	1,00	0,02	Bappeda	
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	2,00	400.000.000	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Bappeda	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	21,70						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**12,26**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(SR)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**100,00**	**13,96**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(SR)**						
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-			**2.278.943.037.725**		**320.203.841.543**		**225.175.108.302**		**100.068.206.764**		**44,44**		**203.080.925.523**				
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN				**2.278.943.037.725**		**320.203.841.543**		**225.175.108.302**		**100.068.206.764**		**44,44**		**203.080.925.523**				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi**	**%**	**95,00**	**142.761.084.525**	**78,46**	**15.260.675.455**	**92,00**	**7.231.716.748**	**95,15**	**5.838.714.298**	**103,42**	**80,74**	**86,81**	**13.777.686.344**	**74,17**	**9,36**	BKAD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen yang harus disusun dan diselesaikan tepat waktu, Capaian target kinerja untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melebihi target kinerja sejumlah 98% dengan realisasi capaian target kinerja
	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	**%**	**100,00**		**100,00**		**98,00**		**100,00**		**102,04**		**100,00**		**25,00**			
	3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	**%**	**96,00**		**95,00**		**90,00**		**100,00**		**111,11**		**97,50**		**20,83**			
	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	**%**	**97,00**		**100,25**		**95,00**		**100,50**		**105,79**		**100,38**		**63,14**			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu**	**%**	**98,00**	**985.000.000**	**100,00**	**141.111.250**	**95,00**	**209.049.925**	**100,00**	**163.671.994**	**105,26**	**78,29**	**100,00**	**98.086.750**	**51,02**	**5,99**	BKAD	
	2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	**%**	**98,00**		**100,00**		**95,00**		**100,00**		**105,26**		**100,00**		**51,02**			
	3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	**%**	**98,00**		**100,00**		**95,00**		**100,00**		**105,26**		**100,00**		**76,53**			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20,00	538.500.000	10,00	72.856.750	4,00	34.049.925	5,00	26.599.500	125,00	78,12	4,00	63.808.250	100,00	8,31	BKAD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20,00	446.500.000	8,00	68.254.500	4,00	175.000.000	4,00	137.072.494	100,00	78,33	4,00	34.278.500	100,00	3,94	BKAD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	112,50	78,22						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**99,00**	**95.630.751.331**	**100,00**	**11.515.934.338**	**85,00**	**4.574.164.503**	**100,00**	**3.348.055.449**	**117,65**	**73,19**	**100,00**	**14.863.989.787**	**101,01**	**15,54**	BKAD	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	250,00	94.980.751.331	80,00	11.427.246.088	50,00	4.531.714.503	24,00	3.315.059.449	48,00	73,15	104,00	14.742.305.537	41,60	15,52	BKAD	Adanya data yang riil terkait data untuk pembayaran gaji dan tunjangan sudah sesuai sedangkan untuk target pada awal perencanaan tidak diakumulatif jadi sampai dengan triwulan III target yang dicapai melebihi target awal
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	25,00	316.000.000	10,00	53.863.250	5,00	31.200.000	5,00	25.544.500	100,00	81,87	15,00	79.407.750	60,00	25,13	BKAD	Dokumen yang dihasilkan sesuai bukti laporan verifikasi penatausahaan keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5,00	208.000.000	2,00	34.652.000	1,00	5.625.000	1,00	4.845.500	100,00	86,14	3,00	39.497.500	60,00	18,99	BKAD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15,00	63.000.000	1,00	173.000	12,00	5.625.000	12,00	2.606.000	100,00	46,33	13,00	2.779.000	86,67	4,41	BKAD	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5,00	63.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKAD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	87,00	71,87						
										Predikat Kinerja	(T)	(S)						
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**%**	**90,00**	**10.668.246.000**	**70,00**	**38.725.500**	**78,00**	**31.200.000**	**100,00**	**25.919.750**	**128,21**	**83,08**	**85,00**	**64.645.250**	**94,44**	**0,61**	BKAD	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60,00	10.668.246.000	24,00	38.725.500	12,00	31.200.000	11,00	25.919.750	91,67	83,08	35,00	64.645.250	58,33	0,61	BKAD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	91,67	83,08						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah**	**%**	-	**74.300.000**	-	**34.921.000**	-	-	-	-			-	**34.921.000**	-	**47,00**	BKAD	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	-	74.300.000	2,00	34.921.000	-	-	-	-			2,00	34.921.000	-	47,00	BKAD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**99,00**	**1.622.786.300**	**100,00**	**69.818.500**	**95,00**	**284.163.800**	**104,17**	**271.229.750**	**109,65**	**95,45**	**102,09**	**341.048.250**	**103,12**	**21,02**	BKAD	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	650,00	976.286.300	-	-	3,00	25.000.000	1,00	24.750.000	33,33	99,00	1,00	24.750.000	0,15	2,54	BKAD	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	25,00	646.500.000	9,00	69.818.500	5,00	259.163.800	5,00	246.479.750	100,00	95,11	14,00	316.298.250	56,00	48,92	BKAD	Dokumen yang dihasilkan sesuai dengan target kegiatan
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	66,67	97,05						
										Predikat Kinerja	(S)	(ST)						
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**99,00**	**3.182.000.000**	**100,00**	**476.373.859**	**92,00**	**296.663.000**	**92,00**	**278.114.075**	**100,00**	**93,75**	**96,00**	**754.487.934**	**96,97**	**23,71**	BKAD	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20,00	87.250.000	2,00	5.630.500	1,00	4.000.000	1,00	4.000.000	100,00	100,00	3,00	9.630.500	15,00	11,04	BKAD	Penyediaan alat untuk komponen peralatan listrik sesuai dengan kebutuhan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	1.490.500.000	2,00	279.055.000	1,00	125.000.000	1,00	123.950.728	100,00	99,16	3,00	403.005.728	60,00	27,04	BKAD	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	23,00	278.000.000	6,00	47.277.100	3,00	34.567.000	3,00	33.273.000	100,00	96,26	9,00	80.550.100	39,13	28,97	BKAD	Capaian target melebihi target awal
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	9,00	71.250.000	4,00	11.720.000	2,00	7.860.000	1,00	7.660.000	50,00	97,46	5,00	19.380.000	55,56	27,20	BKAD	Capaian target melebihi target awal
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	480,00	1.255.000.000	86,00	132.691.259	100,00	125.236.000	50,00	109.230.347	50,00	87,22	136,00	241.921.606	28,33	19,28	BKAD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	80,00	96,02						
										Predikat Kinerja	(T)	(ST)						
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**%**	**36,00**	**17.817.500.000**	**96,00**	**595.012.330**	**27,00**	**218.000.000**	**14,25**	**203.787.000**	**52,78**	**93,48**	**55,13**	**798.799.330**	**153,13**	**4,48**	BKAD	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	42,00	12.910.000.000	1,00	39.656.250	-	-	-	-			1,00	39.656.250	2,38	0,31	BKAD	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	11,00	1.232.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKAD	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	111,00	1.040.000.000	90,00	149.850.000	85,00	55.000.000	45,00	53.190.000	52,94	96,71	135,00	203.040.000	121,62	19,52	BKAD	Untuk pengadaan mebel pada pelaksanaan pembelian mebel untuk volume rak menjadi diperbanyak
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	118,00	1.090.500.000	16,00	236.456.080	20,00	63.000.000	10,00	50.597.000	50,00	80,31	26,00	287.053.080	22,03	26,32	BKAD	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	1.545.000.000	6,00	169.050.000	3,00	100.000.000	2,00	100.000.000	66,67	100,00	8,00	269.050.000	80,00	17,41	BKAD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	56,54	92,34						
										Predikat Kinerja	(R)	(ST)						
KegiatanPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**99,00**	**7.155.000.894**	**100,00**	**1.522.505.832**	**90,00**	**961.708.520**	**100,00**	**884.098.793**	**111,11**	**91,93**	**100,00**	**2.406.604.625**	**101,01**	**33,64**	BKAD	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60,00	49.500.000	24,00	4.387.500	12,00	4.000.000	12,00	3.767.000	100,00	94,18	36,00	8.154.500	60,00	16,47	BKAD	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00	4.280.500.894	24,00	1.064.207.832	12,00	596.000.000	12,00	567.736.653	100,00	95,26	36,00	1.631.944.485	60,00	38,13	BKAD	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00	2.825.000.000	24,00	453.910.500	12,00	361.708.520	12,00	312.595.140	100,00	86,42	36,00	766.505.640	60,00	27,13	BKAD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	91,95						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**98,00**	**5.625.500.000**	**100,00**	**866.272.846**	**94,00**	**656.767.000**	**100,00**	**663.837.487**	**106,38**	**101,08**	**100,00**	**1.530.110.333**	**102,04**	**27,20**	BKAD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	175,00	2.570.000.000	219,00	369.541.346	60,00	339.237.000	28,00	372.862.187	46,67	109,91	247,00	742.403.533	141,14	28,89	BKAD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada pelaksanaan Pemeliharaan untuk kendaraan dinas dihitung bukan dari banyaknya kendaraan dinas yang ada di BKAD tetapi dihitung volume pelaksanaan pemeliharaan yang telah dilakukan 'Capaian target melebihi target awal
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50,00	155.500.000	24,00	14.060.000	85,00	11.250.000	48,00	6.960.000	56,47	61,87	72,00	21.020.000	144,00	13,52	BKAD	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50,00	1.460.000.000	112,00	162.996.000	35,00	146.100.000	73,00	123.838.000	208,57	84,76	185,00	286.834.000	370,00	19,65	BKAD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada pelaksanaan Pemeliharaan untuk peralatan mesin dihitung bukan dari banyaknya peralatan yang ada di BKAD tetapi dihitung volume pelaksanaan pemeliharaan yang telah dilakukan 'Capaian target melebihi target awal

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20,00	1.440.000.000	17,00	319.675.500	7,00	160.180.000	7,00	160.177.300	100,00	100,00	24,00	479.852.800	120,00	33,32	BKAD	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantr pada pelaksanaan Pemeliharaan untuk rehab gedung dihitung bukan dari banyaknya peralatan yang ada di BKAD tetapi dihitung volume pelaksanaan pemeliharaan yang telah dilakukan
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	102,93	89,13						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**103,88**	**88,78**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(T)**						
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan**	**%**	**100,00**	**2.039.199.041.775**	**92,00**	**294.051.947.814**	**90,00**	**211.531.630.074**	**100,00**	**89.104.026.695**	**111,11**	**42,12**	**96,00**	**180.044.979.411**	**92,00**	**8,68**	BKAD	
	Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**50,00**		**50,00**			
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	**Persentase PD yang mengirimkan RKA dan DPA**	**%**	**100,00**	**42.220.672.896**	**100,00**	**8.455.236.914**	**100,00**	**3.480.594.875**	**100,00**	**3.294.038.971**	**100,00**	**94,64**	**100,00**	**11.749.275.885**	**100,00**	**27,83**	BKAD	
	Persentase Raperda Raperbub APBD sesuai ketentuan	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	10,00	3.248.975.150	4,00	599.310.000	6,00	259.438.000	3,00	252.080.000	50,00	97,16	2,00	851.390.000	20,00	26,20	BKAD	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	10,00	3.252.255.400	4,00	588.900.000	6,00	252.780.000	6,00	249.790.000	100,00	98,82	2,00	838.690.000	20,00	25,79	BKAD	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	180,00	2.637.865.800	51,00	646.000.000	36,00	214.112.500	36,00	221.234.647	100,00	103,33	87,00	867.234.647	48,33	32,88	BKAD	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	180,00	2.714.445.850	70,00	649.100.000	36,00	191.230.000	20,00	201.215.000	55,56	105,22	35,00	850.315.000	19,44	31,33	BKAD	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	180,00	2.718.633.450	56,00	619.694.500	36,00	201.230.000	36,00	-	100,00	-	92,00	619.694.500	51,11	22,79	BKAD	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	180,00	3.546.512.100	70,00	713.928.000	36,00	203.780.000	36,00	183.600.000	100,00	90,10	35,00	897.528.000	19,44	25,31	BKAD	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	10,00	5.570.746.600	36,00	1.199.898.765	10,00	730.948.800	10,00	804.424.306	100,00	110,05	-	2.004.323.071	-	35,98	BKAD	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	28,00	8.665.966.700	11,00	1.890.273.879	10,00	801.108.235	10,00	953.949.366	100,00	119,08	3,00	2.844.223.245	10,71	32,82	BKAD	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	52,00	3.650.879.950	7,00	737.658.000	6,00	362.359.000	6,00	228.321.652	100,00	63,01	13,00	965.979.652	25,00	26,46	BKAD	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	125,00	1.896.482.408	8,00	195.599.915	25,00	11.995.000	-	-	-	-	8,00	195.599.915	6,40	10,31	BKAD	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	145,00	1.896.482.408	24,00	255.493.855	36,00	11.999.960	-	-	-	-	24,00	255.493.855	16,55	13,47	BKAD	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	100,00	1.607.904.680	-	90.980.000	1,00	11.719.880	-	89.574.000	-	764,29	-	180.554.000	-	11,23	BKAD	
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	180,00	813.522.400	35,00	268.400.000	36,00	227.893.500	15,00	109.850.000	41,67	48,20	50,00	378.250.000	27,78	46,50	BKAD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	65,17	123,02						
										Predikat Kinerja	(S)	(ST)						
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase PD yang melaksanakan penyerapan belanja yang tertib dan sesuai ketentuan**	**%**	**98,00**	**15.648.999.475**	**100,00**	**1.850.370.614**	**85,00**	**5.727.415.136**	**100,00**	**729.869.900**	**117,65**	**12,74**	**100,00**	**2.580.240.514**	**102,04**	**16,49**	BKAD	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	60,00	3.543.536.550	12,00	984.079.977	12,00	535.299.980	12,00	407.800.100	100,00	76,18	3,00	1.391.880.077	5,00	39,28	BKAD	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	180,00	1.046.728.125	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKAD	
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	180,00	1.486.386.300	35,00	303.903.650	4,00	218.367.560	4,00	186.956.200	100,00	85,62	35,00	490.859.850	19,44	33,02	BKAD	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	40,00	2.605.974.050	8,00	331.417.487	-	-	-	-			-	331.417.487	-	12,72	BKAD	
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	5,00	1.953.894.425	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKAD	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	60,00	1.395.638.875	-	-	12,00	4.791.921.196	-	-	-	-	-	-	-	-	BKAD	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	23.500,00	1.685.856.200	13.267,00	230.969.500	4.700,00	181.826.400	4.700,00	135.113.600	100,00	74,31	1.575,00	366.083.100	6,70	21,71	BKAD	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	425,00	1.930.984.950	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKAD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	75,00	59,03						
										Predikat Kinerja	(S)	(R)						
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Peresentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP(Akrual)**	**%**	**100,00**	**18.014.631.550**	**92,00**	**4.012.056.300**	**80,00**	**2.281.042.735**	**80,00**	**2.269.209.245**	**100,00**	**99,48**	**86,00**	**6.281.265.545**	**86,00**	**34,87**	BKAD	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	45,00	1.173.494.600	12,00	452.500.000	12,00	162.326.800	6,00	161.854.950	50,00	99,71	18,00	614.354.950	40,00	52,35	BKAD	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	180,00	1.657.655.900	24,00	255.914.500	12,00	220.000.000	12,00	219.950.000	100,00	99,98	36,00	475.864.500	20,00	28,71	BKAD	
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	5,00	2.375.704.800	2,00	616.679.000	18,00	450.530.000	18,00	450.499.038	100,00	99,99	20,00	1.067.178.038	400,00	44,92	BKAD	Adanya penambahan untuk capaian target kinerja
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	5,00	6.592.978.900	2,00	1.713.754.900	2,00	904.043.200	2,00	903.028.256	100,00	99,89	4,00	2.616.783.156	80,00	39,69	BKAD	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	4.140.823.400	14,00	973.207.900	4,00	544.142.735	4,00	533.877.001	100,00	98,11	-	1.507.084.901	-	36,40	BKAD	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	425,00	2.073.973.950	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKAD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	90,00	99,54						
										Predikat Kinerja	(T)	(ST)						
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase penyerapan anggaran belanja sesuai aturan**	**%**	**98,00**	**1.959.738.390.154**	**58,31**	**278.291.238.736**	**87,00**	**199.082.232.628**	**50,37**	**69.482.251.993**	**57,90**	**34,90**	**54,34**	**347.773.490.729**	**55,45**	**17,75**	BKAD	
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	48,00	66.000.000.000	-	-	12,00	12.000.000.000	12,00	12.138.715.286	100,00	101,16						
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	465,00	1.655.728.713.754	24,00	268.969.510.151	12,00	169.672.200.548	9,00	65.572.798.832	75,00	38,65	33,00	334.542.308.983	7,10	20,21	BKAD	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	5,00	192.509.676.400	1,00	4.618.091.483	1,00	5.500.000.000	-	2.415.160.944	-	43,91	1,00	7.033.252.427	20,00	3,65	BKAD	
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	465,00	45.500.000.000	93,00	4.703.637.102	93,00	11.910.032.080	3,00	1.494.292.217	3,23	12,55	96,00	6.197.929.319	20,65	13,62	BKAD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	26,08	31,70						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan	**Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**3.576.347.700**	**50,00**	**1.443.045.250**	**100,00**	**960.344.700**	**100,00**	**1.189.941.300**	**100,00**	**123,91**	**75,00**	**2.632.986.550**	**75,00**	**73,62**	BKAD	
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	5,00	2.851.222.100	2,00	57.096.500	12,00	58.712.500	12,00	358.886.000	100,00	611,26	14,00	415.982.500	280,00	14,59	BKAD	
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	60,00	725.125.600	20,00	1.385.948.750	12,00	901.632.200	12,00	831.055.300	100,00	92,17	32,00	2.217.004.050	53,33	305,74	BKAD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	351,72						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**95,11**	**63,67**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(R)**						
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel oleh Perangkat Daerah**	**%**	**100,00**	**87.814.965.424**	**100,00**	**10.891.218.274**	**95,00**	**6.411.761.480**	**88,75**	**5.125.465.771**	**93,42**	**79,94**	**94,38**	**16.016.684.045**	**94,38**	**18,24**	BKAD	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisir**	**%**	**100,00**	**87.814.965.424**	**100,00**	**10.891.218.274**	**95,00**	**6.411.761.480**	**100,00**	**5.125.465.771**	**105,26**	**79,94**	**100,00**	**16.016.684.045**	**100,00**	**18,24**	BKAD	
	Presentase PD yang melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sesuai standar	**%**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**	-	**100,00**			
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	5,00	62.369.701.000	2,00	6.977.587.080	1,00	1.469.999.920	1,00	946.464.000	100,00	64,39	3,00	7.924.051.080	60,00	12,70	BKAD	
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	5,00	1.268.832.000	2,00	70.335.000	-	-	-	-			2,00	70.335.000	40,00	5,54	BKAD	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	5,00	1.288.998.910	2,00	147.003.234	1,00	1.942.659.590	1,00	1.733.621.290	100,00	89,24	3,00	1.880.624.524	60,00	145,90	BKAD	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	2,00	2.944.728.178	1,00	1.030.246.208	-	-	-	-			1,00	1.030.246.208	50,00	34,99	BKAD	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	44,00	5.247.928.970	18,00	811.870.490	50,00	526.499.850	9,00	135.366.000	18,00	25,71	3,00	947.236.490	6,82	18,05	BKAD	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	72,00	8.011.988.516	24,00	1.070.924.416	7,00	1.113.999.880	7,00	1.188.252.581	100,00	106,67	31,00	2.259.176.997	43,06	28,20	BKAD	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	180,00	3.928.680.000	24,00	402.018.960	12,00	1.087.397.490	12,00	884.376.900	100,00	81,33	35,00	1.286.395.860	19,44	32,74	BKAD	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	5,00	1.354.107.850	12,00	181.232.886	12,00	174.570.400	12,00	141.885.000	100,00	81,28	3,00	323.117.886	60,00	23,86	BKAD	
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	215,00	1.400.000.000	45,00	200.000.000	45,00	96.634.350	45,00	95.500.000	100,00	98,83	90,00	295.500.000	41,86	21,11	BKAD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	88,29	78,20						
										Predikat Kinerja	(T)	(T)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**102,63**	**79,94**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(T)**						
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Persentase Realiasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah, Sektor PBB BPHTB, Sektor Pajak Daerah Lainnya**	**%**	-	**9.167.946.001**	-	**3.534.586.680**	-	-	-	-			-	**3.534.586.680**	-	**38,55**	BKAD	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutahirkan**	**%**	-	**9.167.946.001**	-	**3.534.586.680**	-	-	-	-			-	**3.534.586.680**	-	**38,55**	BKAD	
	persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani	**%**	-		-		-		-				-		-			
	Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	**Laporan**	-		-		-		-				-		-			
	persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani	**%**	-		-		-		-				-		-			
	Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	**Dokumen**	-		-		-		-				-		-			
	Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	**%**	-		-		-		-				-		-			
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1,00	543.344.046	1,00	308.750.250	-	-	-	-			1,00	308.750.250	100,00	56,82	BKAD	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	2,00	769.923.844	2,00	1.926.065.743	-	-	-	-			2,00	1.926.065.743	100,00	250,16	BKAD	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	650,00	260.140.804	150,00	21.915.000	-	-	-	-			150,00	21.915.000	23,08	8,42	BKAD	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	110,00	619.793.300	-	36.015.400	-	-	-	-			3,00	36.015.400	2,73	5,81	BKAD	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4,00	341.589.988	1,00	23.600.000	-	-	-	-			1,00	23.600.000	25,00	6,91	BKAD	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	100.000,00	272.758.864	-	27.495.000	-	-	-	-			35,00	27.495.000	0,04	10,08	BKAD	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	486,00	3.713.604.000	736,00	101.370.137	-	-	-	-			3,00	101.370.137	0,62	2,73	BKAD	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	7.000,00	220.241.581	20.535,00	241.050.000	-	-	-	-			20.535,00	241.050.000	293,36	-	BKAD	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	8.000,00	647.318.591	1.950,00	204.084.500	-	-	-	-			1.950,00	204.084.500	24,38	31,53	BKAD	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	3.000,00	447.307.858	6.685,00	129.911.900	-	-	-	-			3,00	129.911.900	0,10	29,04	BKAD	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	4.200,00	526.834.352	6.316,00	470.465.750	-	-	-	-			6.316,00	470.465.750	150,38	89,30	BKAD	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	345,00	170.074.326	-	40.240.000	-	-	-	-			35,00	40.240.000	10,14	23,66	BKAD	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	60,00	490.058.709	7,00	3.623.000	-	-	-	-			3,00	3.623.000	5,00	0,74	BKAD	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	150,00	144.955.739	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKAD	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**101,52**	**67,60**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(S)**						
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**92.608.252.147**		**19.147.892.506**		**8.793.168.774**		**6.482.086.967**		**73,72**		**25.629.979.473**		**27,68**		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN				**74.159.931.294**		**14.399.749.606**		**8.172.023.174**		**5.880.708.067**		**71,96**		**20.280.457.673**		**27,35**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpenuhi**	**%**	**95,00**	**40.485.086.049**	**95,00**	**8.283.084.230**	**95,00**	**5.073.288.934**	**95,00**	**4.043.634.906**	**100,00**	**79,70**	**95,00**	**12.326.719.136**	**100,00**	**30,45**	BKPSDM	
	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	**%**	**95,00**		**95,00**		**95,00**		**95,00**		**100,00**		**95,00**		**100,00**			
	Pesentase peningkatan kompetensi aparatur	**%**	**95,00**		**95,00**		**95,00**		**95,00**		**100,00**		**95,00**		**100,00**			
	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	**%**	**95,00**		**95,00**		**95,00**		**95,00**		**100,00**		**95,00**		**100,00**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu**	**%**	**95,00**	**886.689.415**	**95,00**	**197.596.800**	**95,00**	**61.238.440**	**95,00**	**51.644.250**	**100,00**	**84,33**	**95,00**	**249.241.050**	**100,00**	**28,11**	BKPSDM	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	22,00	242.306.750	6,00	49.578.600	4,00	26.670.000	4,00	18.986.500	100,00	71,19	10,00	68.565.100	45,45	28,30	BKPSDM	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4,00	22.377.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKPSDM	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4,00	22.377.500	-	-	-	-					-	-	-	-	BKPSDM	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4,00	22.377.500	-	-	-	-					-	-	-	-	BKPSDM	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4,00	22.377.500	-	-	-	-					-	-	-	-	BKPSDM	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	72,00	534.141.990	24,00	147.390.000	12,00	31.568.300	12,00	30.850.750	100,00	97,73	36,00	178.240.750	50,00	33,37	BKPSDM	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24,00	20.730.675	8,00	628.200	4,00	3.000.140	4,00	1.807.000	100,00	60,23	12,00	2.435.200	50,00	11,75	BKPSDM	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	76,38						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu**	**%**	**95,00**	**23.148.231.982**	**95,00**	**6.186.376.552**	**95,00**	**3.340.529.745**	**95,00**	**2.797.746.229**	**100,00**	**83,75**	**95,00**	**8.984.122.781**	**100,00**	**38,81**	BKPSDM	
Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	178,00	22.833.444.308	58,00	6.142.812.552	30,00	3.316.535.025	28,00	2.781.426.479	93,33	83,87	86,00	8.924.239.031	48,31	39,08	BKPSDM	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	229.593.500	4,00	43.489.000	2,00	22.797.000	2,00	15.147.000	100,00	66,44	6,00	58.636.000	50,00	25,54	BKPSDM	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	48,00	44.177.500	-	-	-	-							-	-	BKPSDM	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5,00	20.508.337	-	75.000	1,00	1.116.400	1,00	1.114.000	100,00	99,79	1,00	1.189.000	20,00	5,80	BKPSDM	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	65,00	20.508.337	-	-	13,00	81.320	13,00	58.750	100,00	72,25	13,00	58.750	20,00	0,29	BKPSDM	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	98,33	80,58						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu**	**%**	**100,00**	**249.101.837**	**100,00**	**39.558.000**	**95,00**	**20.808.000**	**95,00**	**13.158.000**	**100,00**	**63,24**	**97,50**	**52.716.000**	**97,50**	**21,16**	BKPSDM	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	35,00	19.508.337	13,00	108.000	13,00	236.000	13,00	236.000	100,00	100,00	26,00	344.000	74,29	1,76	BKPSDM	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72,00	229.593.500	24,00	39.450.000	12,00	20.572.000	12,00	12.922.000	100,00	62,81	36,00	52.372.000	50,00	22,81	BKPSDM	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	81,41						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik**	**%**	**95,00**	**5.176.505.641**	**95,00**	**645.962.199**	**95,00**	**422.648.000**	**95,00**	**412.679.556**	**100,00**	**97,64**	**95,00**	**1.058.641.755**	**100,00**	**20,45**	BKPSDM	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut	Paket	16,00	495.664.375	-	-	-	-	-	-			1,00	-	6,25	-	BKPSDM	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	6,00	155.896.683	2,00	32.700.000	1,00	17.819.000	1,00	11.519.000	100,00	64,64			-	-	BKPSDM	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	168,00	3.337.533.333	102,00	613.262.199	38,00	404.829.000	38,00	401.160.556	100,00	99,09			-	-	BKPSDM	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	168,00	215.506.250	-	-	-	-	-	-					-	-	BKPSDM	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	168,00	971.905.000	-	-	-	-	-	-			70,00	-	41,67	-	BKPSDM	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	81,87						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Sarana dan Prasarana yang Disediakan**	**%**	**95,00**	**3.296.112.930**	**95,00**	**515.695.562**	**95,00**	**443.698.257**	**95,00**	**337.564.901**	**100,00**	**76,08**	**95,00**	**853.260.463**	**100,00**	**25,89**	BKPSDM	
Penyediaan Komponen Instanlasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	90,00	61.220.263	30,00	6.518.000	1,00	8.865.500	1,00	5.218.600	100,00	58,86	31,00	11.736.600	34,44	19,17	BKPSDM	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	606.750.100	2,00	162.136.344	1,00	74.078.811	1,00	73.700.500	100,00	99,49	3,00	235.836.844	50,00	38,87	BKPSDM	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6,00	107.804.389	2,00	9.498.837	1,00	12.369.006	1,00	5.119.700	100,00	41,39	3,00	14.618.537	50,00	13,56	BKPSDM	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00	249.116.388	2,00	41.887.300	1,00	37.247.740	1,00	35.545.740	100,00	95,43	3,00	77.433.040	50,00	31,08	BKPSDM	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	102,00	143.857.540	34,00	39.125.000	17,00	20.605.200	17,00	20.400.000	100,00	99,00	51,00	59.525.000	50,00	41,38	BKPSDM	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4,00	283.741.250	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKPSDM	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72,00	1.843.623.000	24,00	256.530.081	12,00	290.532.000	12,00	197.580.361	100,00	68,01	36,00	454.110.442	50,00	24,63	BKPSDM	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	77,03						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi**	**%**	**100,00**	**4.209.016.928**	**100,00**	**171.406.350**	**100,00**	**391.465.995**	**100,00**	**141.176.100**	**100,00**	**36,06**	**100,00**	**312.582.450**	**100,00**	**7,43**	BKPSDM	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	8,00	1.295.750.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKPSDM	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	BKPSDM	
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Unit	17,00	219.559.195	2,00	-	9,00	27.433.206	9,00	27.360.000	100,00	99,73	11,00	27.360.000	64,71	12,46	BKPSDM	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	52,00	1.979.430.233	10,00	21.406.350	14,00	122.532.789	3,00	22.316.100	21,43	18,21	13,00	43.722.450	25,00	2,21	BKPSDM	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKPSDM	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKPSDM	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6,00	630.177.500	2,00	150.000.000	1,00	241.500.000	1,00	91.500.000	100,00	37,89	3,00	241.500.000	50,00	38,32	BKPSDM	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4,00	42.050.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKPSDM	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4,00	42.050.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKPSDM	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	73,81	51,94						
										Predikat Kinerja	(S)	(R)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan**	**%**	**95,00**	**1.643.943.969**	**95,00**	**329.438.796**	**95,00**	**192.013.805**	**95,00**	**142.675.811**	**100,00**	**74,30**	**95,00**	**472.114.607**	**100,00**	**28,72**	BKPSDM	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6,00	34.615.250	2,00	7.930.000	1,00	5.250.000	1,00	4.238.000	100,00	80,72	1,00	12.168.000	16,67	35,15	BKPSDM	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72,00	530.530.719	24,00	129.787.055	12,00	65.998.705	12,00	59.293.661	100,00	89,84	2,00	189.080.716	2,78	35,64	BKPSDM	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	62,00	21.025.000	-	-	-	-	-	-			21,00	-	33,87	-	BKPSDM	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00	1.057.773.000	24,00	191.721.741	12,00	120.765.100	12,00	79.144.150	100,00	65,54	21,00	270.865.891	29,17	25,61	BKPSDM	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	78,70						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemeliharaan BMD yang dilaksanakan**	**%**	**95,00**	**1.875.483.347**	**95,00**	**197.049.971**	**95,00**	**200.886.692**	**75,00**	**146.990.059**	**78,95**	**73,17**	**85,00**	**344.040.030**	**89,47**	**18,34**	BKPSDM	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	36,00	1.583.972.347	6,00	185.864.971	6,00	179.379.792	6,00	134.400.650	100,00	74,93	12,00	320.265.621	33,33	20,22	BKPSDM	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya	Unit	3,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKPSDM	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	411,00	86.850.000	8,00	6.130.000	17,00	12.750.000	11,00	7.137.909	64,71	55,98	19,00	13.267.909	4,62	15,28	BKPSDM	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKPSDM	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKPSDM	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11,00	69.230.500	2,00	5.055.000	1,00	8.756.900	1,00	5.451.500	100,00	62,25	3,00	10.506.500	27,27	15,18	BKPSDM	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	86.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKPSDM	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	49.230.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKPSDM	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	88,24	64,39						
										Predikat Kinerja	(T)	(R)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**97,37**	**73,57**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(S)**						
Program Kepegawaian Daerah	**Persentase kegiatan layanan kepegawaian ASN yang terlaksana**	**%**	**95,00**	**33.674.845.245**	**90,00**	**6.116.665.376**	**100,00**	**3.098.734.240**	**100,00**	**1.837.073.161**	**100,00**	**59,28**	**95,00**	**7.953.738.537**	**100,00**	**23,62**	BKPSDM	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Persentase pelayanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN**	**%**	**100,00**	**9.586.785.911**	**100,00**	**1.583.709.549**	**100,00**	**578.713.980**	**100,00**	**69.125.609**	**100,00**	**11,94**	**100,00**	**1.652.835.158**	100,00	17,24	BKPSDM	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	12,00	7.858.220.183	4,00	1.467.535.196	2,00	509.567.500	2,00	35.005.000	100,00	6,87	3,00	1.502.540.196	25,00	19,12	BKPSDM	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	6,00	311.152.412	2,00	9.871.600	1,00	4.054.000	1,00	3.584.000	100,00	88,41	1,50	13.455.600	25,00	4,32	BKPSDM	
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	6,00	401.034.008	2,00	7.186.000	1,00	1.225.000	1,00	-	100,00	-	1,50	7.186.000	25,00	1,79	BKPSDM	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	14,00	1.016.379.308	2,00	99.116.753	3,00	63.867.480	3,00	30.536.609	100,00	47,81	2,50	129.653.362	17,86	12,76	BKPSDM	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	35,77						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase pelayanan Mutasi dan Promosi ASN**	**%**	**95,00**	**5.861.849.534**	**83,00**	**1.663.032.275**	**88,00**	**798.253.180**	**88,00**	**368.065.968**	**100,00**	**46,11**	**85,50**	**2.031.098.243**	**90,00**	**34,65**	BKPSDM	
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	6,00	326.968.235	2,00	8.300.000	1,00	7.480.000	1,00	6.677.000	100,00	89,26	1,50	14.977.000	25,00	4,58	BKPSDM	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	12,00	1.513.944.621	4,00	449.044.100	2,00	167.159.500	2,00	130.000.000	100,00	77,77	3,00	579.044.100	25,00	38,25	BKPSDM	
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Hasil Promosi ASN	Dokumen	11,00	4.020.936.678	2,00	1.205.688.175	2,00	623.613.680	2,00	249.064.968	100,00	39,94	2,00	1.454.753.143	18,18	36,18	BKPSDM	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	68,99						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang terealisasi**	**%**	**95,00**	**8.838.389.754**	**87,00**	**1.590.559.110**	**89,00**	**989.360.080**	**89,00**	**733.836.540**	**100,00**	**74,17**	**88,00**	**2.324.395.650**	**92,63**	**26,30**	BKPSDM	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	64,00	6.369.002.625	16,00	959.743.600	9,00	748.241.000	9,00	506.040.700	100,00	67,63	12,50	1.465.784.300	19,53	23,01	BKPSDM	
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	6,00	1.858.167.429	2,00	630.815.510	1,00	241.119.080	1,00	227.795.840	100,00	94,47	1,50	858.611.350	25,00	46,21	BKPSDM	
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen	12,00	611.219.700	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKPSDM	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	81,05						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase pelayanan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur**	**%**	**96,00**	**9.387.820.046**	**87,00**	**1.279.364.442**	**91,00**	**732.407.000**	**91,00**	**633.589.044**	**100,00**	**86,51**	**89,00**	**1.912.953.486**	**92,71**	**20,38**	BKPSDM	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	6,00	4.017.195.750	2,00	553.484.762	1,00	465.019.000	1,00	431.185.544	100,00	92,72	1,50	984.670.306	25,00	24,51	BKPSDM	
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4,00	490.546.005	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKPSDM	
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	4,00	957.509.900	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKPSDM	
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	40,00	1.819.126.477	40,00	434.990.400	9,00	228.102.000	9,00	215.393.500	100,00	94,43	24,50	650.383.900	61,25	35,75	BKPSDM	
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	5,00	1.721.243.220	2,00	290.889.280	1,00	39.286.000	1,00	1.210.000	100,00	3,08	1,50	292.099.280	30,00	16,97	BKPSDM	
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayanai	Dokumen	4,00	382.198.694	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKPSDM	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	63,41						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**54,68**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(R)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**100,00**	**69,49**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(S)**						
Bidang Pendidikan dan Pelatihan				**18.448.320.853**		**4.748.142.900**		**621.145.600**		**601.378.900**		**96,82**		**5.349.521.800**		**29,00**	BKPSDM	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Persentase ASN yang mendapatkan sertifikat dalam pengembangan kompetensi jabatan fungsional kepemimpinan, manajerial dan prajabatan**	**%**	**93,00**	**18.448.320.853**	**100,00**	**4.748.142.900**	**100,00**	**621.145.600**	**100,00**	**601.378.900**	**100,00**	**96,82**	**100,00**	**5.349.521.800**	**107,53**	**29,00**	BKPSDM	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan yang dilaksanakan**	**%**	**93,00**	**18.448.320.853**	**83,00**	**4.748.142.900**	**87,00**	**621.145.600**	**87,00**	**601.378.900**	**100,00**	**96,82**	**85,00**	**5.349.521.800**	**91,40**	**29,00**	BKPSDM	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Laporan	18,00	18.448.320.853	6,00	4.748.142.900	3,00	621.145.600	3,00	601.378.900	100,00	96,82	4,50	5.349.521.800	25,00	29,00	BKPSDM	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	96,82						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**96,82**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(ST)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**100,00**	**96,82**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(ST)**						
BADAN PENDAPATAN DAERAH				**105.900.313.750**		**9.989.465.021**		**17.000.000.000**		**10.711.982.571**		**63,01**						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi**	**Persen**	**95,00**	**62.115.710.500**		**7.011.102.841**	**91,00**	**12.030.712.758**	**90,00**	**7.300.129.411**	**98,90**	**60,68**	**45,00**	**54.845.750**	**89,47**	**0,04**	Bapenda	
	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	**Persen**	**100,00**				**97,00**		**95,00**		**97,94**		**47,50**		**190,00**			
	3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	**Persen**	**96,00**				**85,00**		**85,00**		**100,00**		**42,50**		**177,08**			
	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	**Persen**	**97,00**				**92,00**		**92,00**		**100,00**		**46,00**		**170,10**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu**	**Persen**	**98,00**	**276.281.559**		**46.145.750**	**92,00**	**21.000.000**	**95,00**	**21.955.500**	**103,26**	**104,55**	**47,50**	**68.101.250**	**48,47**	**24,65**	Bapenda	
	2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	**Persen**	**98,00**				**92,00**		**95,00**		**103,26**		**47,50**		**48,47**			
	3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	**Persen**	**98,00**				**92,00**		**95,00**		**103,26**		**47,50**		**48,47**			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4,00	193.397.091	4,00	30.156.250	4,00	21.000.000	4,00	21.955.500	100,00	104,55	8,00	52.111.750	200,00	26,95	Bapenda	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4,00	82.884.468	4,00	15.989.500	-	-	-	-			4,00	15.989.500	100,00	19,29	Bapenda	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	104,55						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**Persen**	**99,00**	**29.002.273.484**	**-**	**5.698.808.066**	**82,00**	**7.190.876.983**	**89,96**	**3.838.023.563**	**109,71**	**53,37**	**44,98**	**9.536.831.629**	**45,43**	**32,88**	Bapenda	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	420,00	28.560.222.987	40,00	5.676.208.316	20,00	7.159.876.983	18,00	3.809.629.063	90,00	53,21	58,00	9.485.837.379	13,81	33,21	Bapenda	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	30,00	193.397.093	5,00	22.599.750	5,00	21.000.000	5,00	18.674.500	100,00	88,93	10,00	41.274.250	33,33	21,34	Bapenda	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	Laporan	5,00	82.884.468			-	-	-	-			-	-	-	-	Bapenda	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan aporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18,00	82.884.468	-	-	1,00	5.000.000	1,00	4.860.000	100,00	97,20	1,00	4.860.000	5,56	5,86	Bapenda	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	6,00	82.884.468	-	-	1,00	5.000.000	1,00	4.860.000	100,00	97,20	1,00	4.860.000	16,67	5,86	Bapenda	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	97,50	84,13						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**Persen**	**90,00**	**193.397.093**	**90,00**	**19.319.500**	**74,00**	**21.000.000**	**93,00**	**18.598.000**	**125,68**	**88,56**	**91,50**	**37.917.500**	**101,67**	**19,61**	Bapenda	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	18,00	193.397.093	3,00	19.319.500	3,00	21.000.000	3,00	18.598.000	100,00	88,56	6,00	37.917.500	33,33	19,61	Bapenda	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	88,56						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**Persen**	**99,00**	**4.202.853.091**	**-**	**31.790.000**	**93,00**	**17.400.000**	**95,00**	**15.344.000**	**102,15**	**88,18**	**47,50**	**47.134.000**	**47,98**	**1,12**	Bapenda	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dokumen	100,00	690.703.906			-	-										
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	15,00	1.391.669.958			-	-										
Koordinasi dan Pelaksaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	30,00	146.429.227	5,00	31.790.000	5,00	17.400.000	5,00	15.344.000	100,00	88,18	10,00	47.134.000	-	-	Bapenda	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	160,00	1.974.050.000			-	-	-	-			-	-	-	-	Bapenda	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	88,18						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**Persen**	**99,00**	**5.891.672.606**	**-**	**224.578.500**	**90,00**	**857.107.177**	**94,42**	**803.809.845**	**104,91**	**93,78**	**47,21**	**563.393.288**	**47,69**	**9,56**	Bapenda	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36,00	395.082.633	6,00	1.196.500	1,00	16.795.775	1,00	16.795.000	100,00	100,00	7,00	17.991.500	19,44	4,55	Bapenda	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	690,00	2.410.828.014	68,00	156.180.000	1,00	383.728.000									Bapenda	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4,00	276.281.562			-	-									Bapenda	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30,00	916.943.017	5,00	22.685.000	1,00	150.000.000	1,00	170.057.750	100,00	113,37	6,00	192.742.750	20,00	21,02	Bapenda	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	32,00	81.027.856	4,00	5.870.000	4,00	12.000.000	4,00	11.713.550	100,00	97,61	8,00	17.583.550	25,00	21,70	Bapenda	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48,00	255.050.251			-	-	-	-			-	-	-	-	Bapenda	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	800,00	1.556.459.273	48,00	38.647.000	100,00	294.583.402	100,00	296.428.488	100,00	100,63	148,00	335.075.488	18,50	21,53	Bapenda	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	102,90						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**Persen**	**36,00**	**3.464.649.342**	**33,33**	**-**	**25,00**	**910.128.598**	**25,00**	**71.291.775**	**100,00**	**7,83**	**29,17**	**71.291.775**	**81,01**	**2,06**	Bapenda	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	25,00	950.000.000	-	-	6,00	800.000.000	6,00	22.991.775	100,00	2,87	6,00	22.991.775	24,00	2,42	Bapenda	Untuk Kendaraan Dinas Kepala Badan dan Sekretaris Badan Belum di anggarkan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4,00	793.060.150	-	-	1,00	110.128.598	1,00	48.300.000	100,00	43,86	1,00	48.300.000	25,00	6,09	Bapenda	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	15,00	956.438.440	-	-	-	-									Bapenda	Tidak di anggarkan pada APBD 2023
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	40,00	765.150.752	-	-	-	-									Bapenda	Tidak di anggarkan pada APBD 2023
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	23,37						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**Persen**	**99,00**	**14.384.880.793**	**69,00**	**706.654.112**	**87,00**	**2.509.200.000**	**87,00**	**2.104.602.070**	**100,00**	**83,88**	**78,00**	**2.811.256.182**	**78,79**	**19,54**	Bapenda	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5,00	55.256.312	80,00	600.000	1,00	9.000.000	1,00	8.650.000	100,00	96,11	81,00	9.250.000	1.620,00	16,74	Bapenda	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	20,00	2.059.212.717	4,00	486.152.612	4,00	210.000.000	4,00	193.281.070	100,00	92,04	8,00	679.433.682	40,00	32,99	Bapenda	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	20,00	12.270.411.764	11,00	219.901.500	4,00	2.290.200.000	4,00	1.902.671.000	100,00	83,08	15,00	2.122.572.500	-	-	Bapenda	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	90,41						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**Persen**	**98,00**	**4.699.702.532**	**154,69**	**283.806.913**	**92,00**	**504.000.000**	**91,67**	**426.504.658**	**99,64**	**84,62**	**123,18**	**710.311.571**	**125,69**	**15,11**	Bapenda	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	435,00	1.349.948.026	107,00	109.604.913	25,00	200.000.000	25,00	189.818.500	100,00	94,91	132,00	299.423.413	30,34	22,18	Bapenda	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6,00	828.844.688			-	-										
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dikelola	Unit	50,00	276.281.562			-	-	-	-			-	-	-	-	Bapenda	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	42,00	911.170.625	12,00	53.340.000	40,00	244.000.000	40,00	203.986.158	100,00	83,60	52,00	257.326.158	123,81	28,24	Bapenda	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	42,00	1.333.457.631	8,00	120.862.000	1,00	60.000.000	1,00	32.700.000	100,00	54,50	9,00	153.562.000	21,43	11,52	Bapenda	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	77,67						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**105,67**	**66,89**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(S)**						
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**1. Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB**	**Persen**	**100,00**	**43.784.603.250**	**80,10**	**2.978.362.180**	**100,00**	**4.969.287.242**	**82,40**	**3.411.853.160**	**82,40**	**68,66**	**81,25**	**6.390.215.340**	**81,25**	**14,59**	Bapenda	
	2. Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainya	**Persen**	**100,00**		**90,90**		**100,00**		**90,88**		**90,88**		**90,89**		**90,89**			
	3. Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	**Persen**	**100,00**		**86,13**		**100,00**		**90,12**		**90,12**		**88,13**		**88,13**			
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**1. Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutahirkan**	**Persen**	**20,00**	**43.784.603.250**	**-**	**2.978.362.180**	**20,00**	**4.969.287.242**	**20,00**	**3.411.853.160**	**100,00**	**68,66**	**10,00**	**6.390.215.340**	**50,00**	**14,59**	Bapenda	
	2. persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani	**Persen**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			
	3. Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	**Wajib Pajak**	**150,00**		**322,00**		**150,00**		**100,00**		**66,67**		**422,00**		**281,33**			
	4. persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani	**Persen**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**			

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
	5. Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	**Dokumen**	**12,00**		**12,00**		**12,00**		**12,00**		**100,00**		**24,00**		**200,00**			
	6. Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	**Persen**	**80,00**		**90,00**		**74,00**		**70,00**		**94,59**		**80,00**		**100,00**			
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	15,00	3.295.682.453	3,00	296.727.750	3,00	271.076.000	3,00	235.684.100	100,00	86,94	6,00	532.411.850	40,00	16,15	Bapenda	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	5,00	963.663.527	1,00	1.438.435.743	1,00	50.900.000	1,00	19.732.500	100,00	38,77	2,00	1.458.168.243	40,00	151,32	Bapenda	Kebutuhan anggaran dalam kegiatan ini melebihi pagu renstra
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	60,00	2.720.691.477	12,00	21.915.000	12,00	298.590.000	12,00	489.742.700	100,00	164,02	24,00	511.657.700	40,00	18,81	Bapenda	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	25,00	6.841.301.976	-	36.015.400	5,00	1.400.000.000	5,00	699.881.550	100,00	49,99	5,00	735.896.950	20,00	10,76	Bapenda	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	10,00	6.998.589.334	1,00	17.820.000	2,00	1.072.083.280	2,00	930.517.780	100,00	86,80	3,00	948.337.780	30,00	13,55	Bapenda	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	15,00	968.223.699	3,00	27.495.000	3,00	160.000.000	2,00	49.950.000	66,67	31,22	5,00	77.445.000	33,33	8,00	Bapenda	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	100.000,00	2.983.779.869	-	94.370.137	########	183.790.000	20.000,00	17.210.000	100,00	9,36	20.000,00	111.580.137	20,00	3,74	Bapenda	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	10,00	1.782.732.349	2,00	241.050.000	2,00	232.370.302	2,00	201.843.444	100,00	86,86	4,00	442.893.444	40,00	24,84	Bapenda	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	7.500,00	4.239.570.258	-	193.892.500	1.500,00	79.420.000	801,00	46.784.765	53,40	58,91	801,00	240.677.265	10,68	5,68	Bapenda	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	5,00	2.342.047.793	1,00	129.911.900	1,00	268.294.280	1,00	153.974.000	100,00	57,39	2,00	283.885.900	40,00	12,12	Bapenda	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	41.000,00	5.495.486.556	-	436.865.750	4.200,00	579.763.380	3.073,00	276.317.522	73,17	47,66	3.073,00	713.183.272	7,50	12,98	Bapenda	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1.225,00	1.026.600.807	-	40.240.000	-	-	-	-			-	40.240.000	-	3,92	Bapenda	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	300,00	3.487.905.510	-	3.623.000	60,00	373.000.000	60,00	276.562.299	100,00	74,15	60,00	280.185.299	20,00	8,03	Bapenda	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	100,00	638.327.642	-	-		-	-	13.652.500			-	13.652.500	-	2,14	Bapenda	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	91,10	66,01						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**93,54**	**68,66**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(S)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**93,50**	**64,67**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(R)**						
KECAMATAN PADAHERANG				**17.049.039.510**		**1.248.828.221**		**1.672.343.421**		**1.257.778.164**		**75,21**		**2.506.606.385**		**14,70**		
URUSAN KEWILAYAHAN				**17.049.039.510**		**1.248.828.221**		**1.672.343.421**		**1.257.778.164**		**75,21**		**2.506.606.385**		**14,70**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas**	**%**	**100,00**	**15.006.874.358**	**91,00**	**1.096.828.221**	**100,00**	**1.647.343.302**	**74,83**	**1.232.778.164**	**74,83**	**74,83**	**82,92**	**2.329.606.385**	**82,92**	**15,52**	Kec. Padaherang	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu**	**%**	**100,00**	**235.491.128**	**92,00**	**18.260.000**	**100,00**	**21.000.000**	**60,71**	**12.750.000**	**60,71**	**60,71**	**76,36**	**31.010.000**	**76,36**	**13,17**	Kec. Padaherang	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4,00	204.813.000	4,00	18.260.000	4,00	21.000.000	4,00	12.750.000	100,00	60,71	4,00	31.010.000	100,00	15,14	Kec. Padaherang	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	6.105.100	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	6.105.100	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	6.105.100	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	6.105.100	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3,00	6.257.728	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	60,71						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**100,00**	**10.695.051.470**	**90,00**	**894.056.041**	**100,00**	**1.281.898.490**	**79,81**	**1.023.037.630**	**79,81**	**79,81**	**84,90**	**1.917.093.671**	**84,90**	**17,93**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	11,00	10.477.753.270	11,00	873.821.041	11,00	1.260.898.490	11,00	1.010.287.630	100,00	80,12	11,00	1.884.108.671	100,00	17,98	Kec. Padaherang	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6,00	205.088.000	3,00	20.235.000	3,00	21.000.000	3,00	12.750.000	100,00	60,71	6,00	32.985.000	100,00	16,08	Kec. Padaherang	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	6.105.100	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5,00	6.105.100	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	70,42						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100,00**	**217.488.200**	**26,00**	**20.262.500**	**100,00**	**21.000.000**	**60,71**	**12.750.000**	**60,71**	**60,71**	**43,36**	**33.012.500**	**43,36**	**15,18**		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milim Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	12.210.200	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	205.278.000	1,00	20.262.500	12,00	21.000.000	12,00	12.750.000	100,00	60,71	13,00	33.012.500	108,33	16,08	Kec. Padaherang	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	60,71						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**642.704.251**	**100,00**	**11.950.000**	**100,00**	**17.400.000**	**60,34**	**10.500.000**	**60,34**	**60,34**	**80,17**	**22.450.000**	**80,17**	**3,49**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	25,00	57.017.818	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	17,00	255.650.909	8,00	11.950.000	12,00	17.400.000	12,00	10.500.000	100,00	60,34	20,00	22.450.000	117,65	8,78	Kec. Padaherang	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	11,00	19.780.524	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11,00	310.255.000	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	60,34						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**483.351.797**	**99,00**	**39.693.000**	**100,00**	**50.038.962**	**57,31**	**28.678.000**	**57,31**	**57,31**	**78,16**	**68.371.000**	**78,16**	**14,15**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	51.137.939	2,00	20.500.000	2,00	5.774.806	2,00	3.300.000	100,00	57,14	4,00	23.800.000	100,00	46,54	Kec. Padaherang	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60,00	132.246.980	38,00	11.366.000	38,00	18.003.916	37,00	12.502.000	97,37	69,44	37,50	23.868.000	62,50	18,05	Kec. Padaherang	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	66.288.302	2,00	4.677.000	2,00	8.024.540	2,00	6.076.000	100,00	75,72	4,00	10.753.000	100,00	16,22	Kec. Padaherang	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2,00	38.315.376	1,00	3.150.000	2,00	3.605.700	2,00	3.550.000	100,00	98,46	3,00	6.700.000	150,00	17,49	Kec. Padaherang	
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5,00	12.210.200	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	90,00	183.153.000	-	-	90,00	14.630.000	45,00	3.250.000	50,00	22,21	45,00	3.250.000	50,00	1,77	Kec. Padaherang	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	89,47	64,59						
										Predikat Kinerja	(T)	(R)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**%**	**100,00**	**689.520.563**	**-**	**-**	**100,00**	**39.000.000**	**37,18**	**14.500.000**	**37,18**	**37,18**	**18,59**	**14.500.000**	**18,59**	**2,10**		
Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2,00	225.500.000	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8,00	402.969.563	-	-	7,00	39.000.000	3,00	14.500.000	42,86	37,18	3,00	14.500.000	37,50	3,60	Kec. Padaherang	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	61.051.000	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	42,86	37,18						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**100,00**	**1.288.771.882**	**96,00**	**105.194.680**	**100,00**	**168.300.000**	**60,34**	**101.553.334**	**60,34**	**60,34**	**78,17**	**206.748.014**	**78,17**	**16,04**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	240,00	12.088.098	-	-	80,00	1.000.000	60,00	400.000	75,00	40,00	60,00	400.000	25,00	3,31	Kec. Padaherang	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2,00	241.478.601	2,00	48.322.180	2,00	50.500.000	2,00	35.373.334	100,00	70,05	2,00	83.695.514	100,00	34,66	Kec. Padaherang	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00	1.035.205.183	12,00	56.872.500	60,00	116.800.000	26,00	65.780.000	43,33	56,32	38,00	122.652.500	63,33	11,85	Kec. Padaherang	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	72,78	55,45						
										Predikat Kinerja	(S)	(R)						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**100,00**	**754.495.068**	**100,00**	**7.412.000**	**100,00**	**48.705.850**	**59,56**	**29.009.200**	**59,56**	**59,56**	**79,78**	**36.421.200**	**79,78**	**4,83**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00	643.263.603	6,00	883.000	6,00	35.474.276	5,00	18.647.200	83,33	52,57	5,50	19.530.200	91,67	3,04	Kec. Padaherang	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14,00	83.334.615	-	-	8,00	6.000.000	7,00	3.379.000	87,50	56,32	7,00	3.379.000	50,00	4,05	Kec. Padaherang	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00	27.896.850	2,00	6.529.000	5,00	7.231.574	3,00	6.983.000	60,00	96,56	5,00	13.512.000	100,00	48,44	Kec. Padaherang	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	76,94	68,48						
										Predikat Kinerja	(T)	(S)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**59,50**	**59,50**						
										Predikat Kinerja	**(R)**	**(R)**						
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**%**	**100,00**	**1.450.346.496**	**52,00**	**152.000.000**		**-**	**-**	**-**			**26,00**	**152.000.000**	**26,00**	**10,48**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**%**	**100,00**	**1.450.346.496**	**52,00**	**152.000.000**		**-**	**-**	**-**			**26,00**	**152.000.000**	**26,00**	**10,48**		
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	14,00	119.415.756	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	11,00	1.330.930.740	11,00	152.000.000			-	-			11,00	152.000.000	100,00	11,42	Kec. Padaherang	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**-**	**-**						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**%**	**100,00**	**61.051.000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**%**	**100,00**	**61.051.000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	14,00	61.051.000	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**-**	**-**						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum**	**%**	**100,00**	**42.735.700**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum**	**%**	**100,00**	**42.735.700**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan harmonisasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	14,00	42.735.700	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**-**	**-**						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**%**	**100,00**	**12.210.200**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan**	**%**	**100,00**	**12.210.200**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	10,00	12.210.200	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**-**	**-**						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**%**	**100,00**	**475.821.756**	**-**	**-**	**100,00**	**25.000.119**	**100,00**	**25.000.000**	**100,00**	**100,00**	**50,00**	**25.000.000**	**50,00**	**5,25**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa**	**%**	**100,00**	**475.821.756**	**-**	**-**	**100,00**	**25.000.119**	**100,00**	**25.000.000**	**100,00**	**100,00**	**50,00**	**25.000.000**	**50,00**	**5,25**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	14,00	54.945.900	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	5,00	9.000.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1,00	301.984.056	-	-	1,00	25.000.119	1,00	25.000.000	100,00	100,00	1,00	25.000.000	100,00	8,28	Kec. Padaherang	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	14,00	109.891.800	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	100,00						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**100,00**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(ST)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**87,42**	**87,42**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(T)**	**(T)**						
KECAMATAN MANGUNJAYA				**11.945.324.116**		**1.331.980.289**		**1.657.223.632**		**1.170.894.611**		**70,65**		**2.502.874.900**		**20,95**		
UNSUR KEWILAYAHAN				**11.945.324.116**		**1.331.980.289**		**1.657.223.632**		**1.170.894.611**		**70,65**		**2.502.874.900**		**20,95**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas**	**%**	**100,00**	**11.000.468.601**	**91,00**	**1.262.800.289**	**100,00**	**1.621.238.908**	**70,58**	**1.137.561.295**	**70,58**	**70,17**	**80,79**	**2.400.361.584**	**80,79**	**21,82**	Kec. Mangunjaya	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu**	**%**	**100,00**	**267.783.595**	**92,00**	**19.825.000**	**100,00**	**22.040.120**	**58,67**	**12.930.000**	**58,67**	**58,67**	**75,33**	**32.755.000**	**75,33**	**12,23**	Kec. Mangunjaya	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4,00	221.139.386	4,00	19.680.000	4,00	21.000.000	4,00	12.750.000	100,00	60,71	4,00	32.430.000	100,00	14,66	Kec. Mangunjaya	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	10.304.533	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	10.304.534	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	10.304.534	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	10.304.534	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4,00	145.000	-	-	-	-	-	-			-				Kec. Mangunjaya	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3,00	5.281.074	2,00	145.000	3,00	1.040.120	1,00	180.000	33,33	17,31	3,00	325.000	100,00	6,15	Kec. Mangunjaya	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	66,67	39,01						
										Predikat Kinerja	(S)	(SR)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**100,00**	**8.095.785.005**	**90,00**	**1.074.500.584**	**100,00**	**1.296.728.659**	**71,83**	**931.464.635**	**71,83**	**71,83**	**80,92**	**2.005.965.219**	**80,92**	**24,78**	Kec. Mangunjaya	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	11,00	7.793.247.280	11,00	1.048.680.584	11,00	1.263.128.659	7,00	912.264.635	63,64	72,22	11,00	1.960.945.219	100,00	25,16	Kec. Mangunjaya	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3,00	293.191.962	3,00	25.820.000	3,00	33.600.000	3,00	19.200.000	100,00	57,14	3,00	45.020.000	100,00	15,36	Kec. Mangunjaya	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	4.842.911	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5,00	4.502.852	-	-	5,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	81,82	64,68						
										Predikat Kinerja	(T)	(R)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100,00**	**195.157.534**	**84,00**	**17.840.000**	**100,00**	**21.000.000**	**60,71**	**12.750.000**	**60,71**	**60,71**	**72,36**	**30.590.000**	**72,36**	**15,67**	Kec. Mangunjaya	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	23.494.297	-	17.840.000	12,00	-	-	-			-	17.840.000	-	75,93	Kec. Mangunjaya	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	171.663.237	1,00	17.840.000	12,00	21.000.000	12,00	12.750.000	100,00	60,71	13,00	30.590.000	108,33	17,82	Kec. Mangunjaya	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	60,71						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**487.252.594**	**54,00**	**7.090.000**	**100,00**	**17.400.000**	**60,34**	**10.500.000**	**60,34**	**60,34**	**57,17**	**17.590.000**	**57,17**	**3,61**	Kec. Mangunjaya	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	25,00	46.854.495	-	-	25,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	24,00	141.896.673	11,00	11.090.000	12,00	17.400.000	12,00	10.500.000	100,00	60,34	23,00	21.590.000	95,83	15,22	Kec. Mangunjaya	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12,00	15.951.745	-	-	22,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11,00	282.549.681	-	-	11,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	60,34						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**299.045.631**	**99,00**	**8.270.000**	**100,00**	**37.652.331**	**61,16**	**23.029.000**	**61,16**	**61,16**	**80,08**	**31.299.000**	**80,08**	**10,47**	Kec. Mangunjaya	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	16.338.663	2,00	970.000	2,00	1.862.520	2,00	950.000	100,00	51,01	2,00	1.920.000	100,00	11,75	Kec. Mangunjaya	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	228,00	88.147.971	34,00	5.365.000	34,00	16.004.891	24,00	10.627.000	70,59	66,40	58,00	15.992.000	25,44	18,14	Kec. Mangunjaya	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	16.486.660	2,00	1.030.000	2,00	1.999.620	2,00	927.000	100,00	46,36	2,00	1.957.000	100,00	11,87	Kec. Mangunjaya	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00	23.933.537	1,00	600.000	1,00	3.075.300	1,00	2.800.000	100,00	91,05	1,00	3.400.000	100,00	14,21	Kec. Mangunjaya	
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5,00	61.746.938	-	-	9,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	90,00	92.391.862	4,00	305.000	90,00	14.710.000	70,00	7.725.000	77,78	52,52	74,00	8.030.000	82,22	8,69	Kec. Mangunjaya	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	89,67	61,47						
										Predikat Kinerja	(T)	(R)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**%**	**100,00**	**501.691.963**	-	-	**100,00**	**35.575.250**	**100,00**	**35.400.000**	**100,00**	**99,51**	**50,00**	**35.400.000**	**50,00**	**7,06**	Kec. Mangunjaya	
Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	92.145.817	-	-	53,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8,00	353.008.626	-	-	16,00	20.410.400	2,00	20.300.000	12,50	99,46	2,00	20.300.000	25,00	5,75	Kec. Mangunjaya	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	56.537.520	-	-	1,00	15.164.850	1,00	15.100.000	100,00	99,57	1,00	15.100.000	100,00	26,71	Kec. Mangunjaya	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	56,25	99,52						
										Predikat Kinerja	(R)	(ST)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**100,00**	**845.038.248**	**96,00**	**112.028.705**	**100,00**	**136.057.654**	**59,26**	**80.624.960**	**59,26**	**59,26**	**77,63**	**192.653.665**	**77,63**	**22,80**	Kec. Mangunjaya	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	240,00	5.288.249	32,00	320.000	50,00	500.000	40,00	200.000	80,00	40,00	72,00	520.000	30,00	9,83	Kec. Mangunjaya	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2,00	168.706.339	2,00	27.214.705	2,00	28.500.000	2,00	25.812.460	100,00	90,57	2,00	53.027.165	100,00	31,43	Kec. Mangunjaya	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00	671.043.660	12,00	84.494.000	60,00	107.057.654	60,00	54.612.500	100,00	51,01	60,00	139.106.500	100,00	20,73	Kec. Mangunjaya	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	93,33	60,53						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**100,00**	**308.714.031**	**100,00**	**19.246.000**	**100,00**	**54.784.894**	**56,33**	**30.862.700**	**56,33**	**56,33**	**78,17**	**50.108.700**	**78,17**	**16,23**	Kec. Mangunjaya	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00	255.291.496	6,00	14.685.000	6,00	45.236.064	6,00	23.962.700	100,00	52,97	6,00	38.647.700	100,00	15,14	Kec. Mangunjaya	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14,00	34.713.601	2,00	3.885.000	8,00	6.000.000	6,00	3.900.000	75,00	65,00	8,00	7.785.000	57,14	22,43	Kec. Mangunjaya	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00	18.708.934	2,00	676.000	5,00	3.548.830	5,00	3.000.000	100,00	84,53	7,00	3.676.000	140,00	19,65	Kec. Mangunjaya	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	91,67	67,50						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**66,04**	**65,98**						
										Predikat Kinerja	**(S)**	**(S)**						
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**%**	**100,00**	**640.877.415**	**52,00**	**59.180.000**	**100,00**	-	-	-			**26,00**	**59.180.000**	**26,00**	**9,23**	Kec. Mangunjaya	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	**100,00**	**628.522.278**	-	-	**100,00**	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	320,00	628.522.278	16,00	59.180.000	11,00	-	-	-			16,00	59.180.000	5,00	9,42	Kec. Mangunjaya	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**%**	**100,00**	**12.355.137**	**52,00**	-	**100,00**	-	-	-			**26,00**	-	**26,00**	-	Kec. Mangunjaya	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00	12.355.137	-	-	5,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**%**	**100,00**	**15.580.939**	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**%**	**100,00**	**15.580.939**	-	-	**100,00**	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	5,00	15.580.939	-	-	5,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum**	**%**	**100,00**	**14.454.059**	-	-	**100,00**	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100,00**	**14.454.059**	-	-	**100,00**	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	14.454.059	-	-	5,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**%**	**100,00**	**15.936.375**	-	-	**100,00**	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100,00**	**15.936.375**	-	-	**100,00**	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	10,00	15.936.375	-	-	10,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**%**	**100,00**	**258.006.727**	**100,00**	**10.000.000**	**100,00**	**35.984.724**	-	**33.333.316**	-	**92,63**	**50,00**	**43.333.316**	**50,00**	**16,80**	Kec. Mangunjaya	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa**	**%**	**100,00**	**258.006.727**	**100,00**	**10.000.000**	**100,00**	**35.984.724**	-	**33.333.316**	-	**92,63**	**50,00**	**43.333.316**	**50,00**	**16,80**	Kec. Mangunjaya	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	12.378.166	-	-	5,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1,00	12.354.927	-	-	2,00	2.433.760	-	145.000	-	5,96	-	145.000	-	1,17	Kec. Mangunjaya	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1,00	209.788.540	-	10.000.000	1,00	33.550.964	1,00	33.188.316	100,00	98,92	1,00	43.188.316	100,00	20,59	Kec. Mangunjaya	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00	23.485.094	-	-	5,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	50,00	52,44						
										Predikat Kinerja	(SR)	(R)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	92,63						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(ST)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**35,29**	**81,40**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(SR)**	**(T)**						
KECAMATAN KALIPUCANG				**17.669.910.173**		**1.462.969.609**		**1.415.439.772**		**1.140.652.843**		**80,59**		**2.545.799.850**		**14,41**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas**	**%**	**100,00**	**15.866.186.881**	**9,15**	**1.451.553.859**	**100,00**	**1.392.235.390**	**80,52**	**1.121.081.843**	**80,52**	**80,52**	**44,84**	**2.572.635.702**	**44,84**	**16,21**	Kec. Kalipucang	
Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu**	**%**	**100,00**	**389.098.850**	**5,66**	**22.025.000**	**100,00**	**23.299.240**	**61,50**	**14.329.160**	**61,50**	**61,50**	**33,58**	**36.354.160**	**33,58**	**9,34**	Kec. Kalipucang	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Operator Perencanaan	Orang/ Bulan	72,00	343.301.542	6,12	21.000.000	12,00	21.000.000	8,00	12.750.000	66,67	60,71	14,12	33.750.000	19,61	9,83	Kec. Kalipucang	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA – SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	5,00	10.457.395	-		1,00	299.840	1,00	119.800	100,00	39,95	1,00	119.800	20,00	1,15	Kec. Kalipucang	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA – SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	5,00	8.852.395	-		1,00	299.840	1,00	119.800	100,00	39,95	1,00	119.800	20,00	1,35	Kec. Kalipucang	
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA – SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	5,00	8.852.395	-		1,00	399.800	1,00	219.800	100,00	54,98	1,00	219.800	20,00	2,48	Kec. Kalipucang	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	5,00	8.852.395	-		1,00	399.800	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	32,00	8.782.728	5,00	1.025.000	5,00	899.960	5,00	1.119.760	100,00	124,42	10,00	2.144.760	31,25	24,42	Kec. Kalipucang	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	77,78	53,34						
										Predikat Kinerja	(T)	(R)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1. Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**100,00**	**11.238.934.208**	**10,35**	**1.162.668.446**	**100,00**	**1.093.186.140**	**84,98**	**928.980.196**	**84,98**	**84,98**	**47,66**	**2.091.648.642**	**47,66**	**18,61**	Kec. Kalipucang	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS yang dibayarkan	Orang	12,00	10.718.718.380	12,00	1.140.103.446	12,00	1.070.986.540	11,00	915.490.396	91,67	85,48	12,00	2.055.593.842	100,00	19,18	Kec. Kalipucang	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Operator Keuangan	Orang/ Bulan	72,00	343.361.542	12,00	21.000.000	12,00	21.000.000	8,00	12.750.000	66,67	60,71	20,00	33.750.000	27,78	9,83	Kec. Kalipucang	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	Dokumen	72,00	25.242.473	12,00	745.000	1,00	599.800	1,00	590.000	100,00	98,37	13,00	1.335.000	18,06	5,29	Kec. Kalipucang	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Penyusunan Keuangan Semesteran / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	24,00	151.611.813	0,54	820.000	4,00	599.800	1,00	149.800	25,00	24,97	1,54	969.800	6,42	0,64	Kec. Kalipucang	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	70,83	67,38						
										Predikat Kinerja	(S)	(S)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Prosentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100,00**	**364.607.290**	**6,23**	**22.700.000**	**100,00**	**21.588.000**	**60,45**	**13.050.000**	**60,45**	**60,45**	**33,34**	**35.750.000**	**33,34**	**9,81**	Kec. Kalipucang	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	Laporan	72,00	21.245.748	-	-	12,00	588.000	1,00	300.000	8,33	51,02	1,00	300.000	1,39	1,41	Kec. Kalipucang	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah SDM SIMDA BMD setiap bulan	Orang	72,00	343.361.542	6,61	22.700.000	12,00	21.000.000	8,00	12.750.000	66,67	60,71	14,61	35.450.000	20,29	10,32	Kec. Kalipucang	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	37,50	55,87						
										Predikat Kinerja	(SR)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**669.407.443**	**2,03**	**13.600.000**	**100,00**	**21.491.385**	**67,89**	**14.590.000**	**67,89**	**67,89**	**34,96**	**28.190.000**	**34,96**	**4,21**	Kec. Kalipucang	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang di adakan	Paket	132,00	68.844.531	-	-	22,00	4.091.385	8,00	4.090.000	36,36	99,97	8,00	4.090.000	6,06	5,94	Kec. Kalipucang	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah SDM Kepegawaian setiap bulan	Orang	60,00	207.397.560	6,56	13.600.000	12,00	17.400.000	8,00	10.500.000	66,67	60,34	14,56	24.100.000	24,26	11,62	Kec. Kalipucang	
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	72,00	15.384.852	-	-	12,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	72,00	347.780.500	-	-	11,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3,00	30.000.000	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	51,52	80,16						
										Predikat Kinerja	(R)	(T)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**650.513.579**	**7,05**	**45.843.607**	**100,00**	**54.980.443**	**66,07**	**35.078.500**	**66,07**	**63,80**	**36,56**	**35.078.500**	**36,56**	**5,39**	Kec. Kalipucang	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	120,00	18.322.432	22,05	4.041.000	24,00	4.502.514	24,00	2.525.000	100,00	56,08	46,05	2.525.000	38,38	13,78	Kec. Kalipucang	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan disediakan	Paket	225,00	142.520.480	12,57	17.910.000	45,00	19.005.101	35,00	13.990.000	77,78	73,61	47,57	13.990.000	21,14	9,82	Kec. Kalipucang	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	20,00	68.511.595	11,27	7.719.250	4,00	7.499.500	4,00	4.891.000	100,00	65,22	15,27	4.891.000	76,34	7,14	Kec. Kalipucang	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	20,00	40.590.600	8,87	3.600.000	4,00	4.498.200	4,00	4.100.000	100,00	91,15	12,87	4.100.000	64,35	10,10	Kec. Kalipucang	
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Paket	25,00	12.210.200	-	-	5,00	1.465.128	1,00	1.465.000	20,00	99,99	1,00	1.465.000	4,00	12,00	Kec. Kalipucang	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.630,00	368.358.272	3,41	12.573.357	326,00	18.010.000	49,00	8.107.500	15,03	45,02	52,41	8.107.500	3,22	2,20	Kec. Kalipucang	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	68,80	71,84						
										Predikat Kinerja	(S)	(S)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan**	**%**	**100,00**	**430.409.550**	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	110,00	155.680.050	-	-	22,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	25,00	195.363.200	-	-	14,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang disediakan	Unit	60,00	79.366.300	-	-	12,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**100,00**	**1.603.750.946**	**9,25**	**148.415.206**	**100,00**	**134.436.918**	**64,06**	**86.116.887**	**64,06**	**64,06**	**36,66**	**86.116.887**	**36,66**	**5,37**	Kec. Kalipucang	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.800,00	12.190.262	16,09	1.962.000	360,00	2.500.000	293,00	1.480.000	81,39	59,20	309,09	1.480.000	17,17	12,14	Kec. Kalipucang	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	Laporan	120,00	349.238.832	5,36	18.715.706	24,00	18.550.000	24,00	16.021.887	100,00	86,37	29,36	16.021.887	24,47	4,59	Kec. Kalipucang	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lapoan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	60,00	1.242.321.852	10,28	127.737.500	12,00	113.386.918	12,00	68.615.000	100,00	60,51	22,28	68.615.000	37,14	5,52	Kec. Kalipucang	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	93,80	68,70						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**100,00**	**519.465.015**	**6,99**	**36.301.600**	**100,00**	**43.253.264**	**66,90**	**28.937.100**	**66,90**	**66,90**	**36,94**	**28.937.100**	**36,94**	**5,57**	Kec. Kalipucang	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	25,00	411.600.750	8,14	33.501.600	5,00	39.980.000	5,00	27.587.100	100,00	69,00	13,14	27.587.100	52,56	6,70	Kec. Kalipucang	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	70,00	90.084.615	3,11	2.800.000	14,00	2.250.000	2,00	1.350.000	14,29	60,00	5,11	1.350.000	7,30	1,50	Kec. Kalipucang	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	Unit	5,00	17.779.650	-	-	1,00	1.023.264	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	38,10	43,00						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**67,41**	**67,08**						
										Predikat Kinerja	**(S)**	**(S)**						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**%**	**100,00**	**1.176.147.856**	-	-	**100,00**	**2.060.000**	**2,00**	**1.030.000**	**2,00**	**50,00**	**1,00**	**1.030.000**	**1,00**	**0,09**	Kec. Kalipucang	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang baik**	**%**	**100,00**	**1.054.732.100**	-	-	**100,00**	**2.060.000**	**2,00**	**1.030.000**	**2,00**	**50,00**	**1,00**	**1.030.000**	**1,00**	**0,10**	Kec. Kalipucang	
Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	60,00	1.050.752.100	-	-	12,00	2.060.000	2,00	1.030.000	16,67	50,00	2,00	1.030.000	3,33	0,10	Kec. Kalipucang	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	3.600,00	3.980.000	-				-	-			-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	16,67	50,00						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		**%**	**100,00**	**121.415.756**	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	60,00	121.415.756	-	-	12,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**2,00**	**50,00**						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**%**	**100,00**	**26.648.881**	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**%**	**100,00**	**26.648.881**	-	-	**100,00**	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	45,00	26.648.881	-	-	9,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**%**	**100,00**	**21.123.646**	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		**%**	**100,00**	**21.123.646**	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	45,00	21.123.646	-	-	9,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**%**	**100,00**	**62.149.918**	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**%**	**100,00**	**62.149.918**	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Kalipucang	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	30,00	62.149.918	-	-	6,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**%**	**100,00**	**517.652.991**	**2,21**	**11.415.750**	**100,00**	**21.144.382**	**87,69**	**18.541.000**	**87,69**	**87,69**	**44,95**	**18.541.000**	**44,95**	**3,58**	Kec. Kalipucang	
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Presentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**%**	**100,00**	**517.652.991**	**2,21**	**11.415.750**	**100,00**	**21.144.382**	**87,69**	**18.541.000**	**87,69**	**87,69**	**44,95**	**18.541.000**	**44,95**	**3,58**	Kec. Kalipucang	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	45,00	123.945.756	-	-	9,00	2.000.000	1,00	1.000.000	11,11	50,00	-	1.000.000	-	0,81	Kec. Kalipucang	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	Dokumen	55,00	250.871.480	4,55	11.415.750	11,00	17.548.382	11,00	17.541.000	100,00	99,96	15,55	17.541.000	28,27	6,99	Kec. Kalipucang	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	45,00	142.835.755	-	-	-	1.596.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	37,04	49,99						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**87,69**	**87,69**						
										Predikat Kinerja	**(T)**	**(T)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**56,74**	**72,74**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(R)**	**(S)**						
KECAMATAN PANGANDARAN				**15.816.790.840**		**1.499.405.561**		**1.526.465.916**		**1.154.611.796**		**75,64**		**2.654.017.357**		**16,78**		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas**	**Persen**	**100,00**	**13.964.189.056**	**80,00**	**1.499.405.561**	**100,00**	**1.492.959.127**	**100,00**	**1.154.611.796**	**100,00**	**77,34**	**90,00**	**2.654.017.357**	**90,00**	**19,01**	Kec. Pangandaran	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu**	**Persen**	**100,00**	**278.081.728**	**15,00**	**22.700.000**	**100,00**	**21.000.000**	**100,00**	**12.750.000**	**100,00**	**60,71**	**57,50**	**35.450.000**	**57,50**	**12,75**	Kec. Pangandaran	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Operator Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	84,00	241.298.500	15,00	22.700.000	4,00	21.000.000	4,00	12.750.000	100,00	60,71	22,62	35.450.000	26,93	14,69	Kec. Pangandaran	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6,00	7.631.375	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	6,00	7.631.375	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	6,00	7.631.375	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	6,00	7.631.375	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24,00	6.257.728	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	60,71						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1. Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**100,00**	**10.062.809.048**	**71,00**	**1.202.802.477**	**5,00**	**1.152.212.051**	**5,00**	**920.583.672**	**100,00**	**79,90**	**38,00**	**2.123.386.149**	**38,00**	**21,10**	Kec. Pangandaran	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS yang dibayarkan	Orang/Bulan	66,00	9.672.217.675	11,00	1.180.102.477	10,00	1.127.212.831	10,00	904.838.072	100,00	80,27	11,00	2.084.940.549	16,67	21,56	Kec. Pangandaran	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Operator Keuangan Jumlah dokumen Keuangan	Dokumen	360,00	243.639.500	60,00	22.700.000	5,00	21.000.000	5,00	14.450.000	100,00	68,81	65,00	37.150.000	18,06	15,25	Kec. Pangandaran	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6,00	23.952.473	-	-	1,00	1.499.460	1,00	550.000	100,00	36,68	1,00	550.000	16,67	2,30	Kec. Pangandaran	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	30,00	122.999.400	-	-	5,00	2.499.760	5,00	745.600	100,00	29,83	5,00	745.600	16,67	0,61	Kec. Pangandaran	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	53,90						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**Laporan**	**100,00**	**262.544.248**	**12,00**	**22.700.000**	**12,00**	**21.499.620**	**12,00**	**14.450.000**	**100,00**	**67,21**	**12,00**	**37.150.000**	**12,00**	**14,15**	Kec. Pangandaran	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60,00	21.245.748	-	-	12,00	499.620	12,00	-	100,00	-	12,00	-	20,00	-	Kec. Pangandaran	
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Operator Aset Jumlah dokumen BMD	Laporan	72,00	241.298.500	12,00	22.700.000	12,00	21.000.000	12,00	14.450.000	100,00	68,81	24,00	37.150.000	33,33	15,40	Kec. Pangandaran	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	34,40						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**~~Paket~~**	**100,00**	**560.119.332**	**12,00**	**13.600.000**	**1,00**	**25.564.250**	**1,00**	**18.500.000**	**100,00**	**72,37**	**6,50**	**32.100.000**	**6,50**	**5,73**	Kec. Pangandaran	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Paket	6,00	63.750.980	-	-	1,00	8.164.250	1,00	8.000.000	100,00	97,99	1,00	8.000.000	16,67	12,55	Kec. Pangandaran	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Operator Kepegawaian Jumlah dokumen Kepegawaian	Dokumen	72,00	165.227.500	12,00	13.600.000	1,00	17.400.000	1,00	10.500.000	100,00	60,34	13,00	24.100.000	18,06	14,59	Kec. Pangandaran	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	72,00	15.384.852	-	-		-	12,00	-			12,00	-	16,67	-	Kec. Pangandaran	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	55,00	315.756.000	-	-		-	10,00	-			10,00	-	18,18	-	Kec. Pangandaran	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	79,17						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**~~Paket~~**	**100,00**	**543.155.724**	**64,00**	**42.688.036**	**1,00**	**43.273.500**	**1,00**	**21.494.500**	**100,00**	**49,67**	**32,50**	**64.182.536**	**32,50**	**11,82**	Kec. Pangandaran	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan Jumlah Komponen Listrik yang dibeli	Paket	6,00	13.861.513	1,00	2.995.000	1,00	2.370.593	1,00	1.200.000	100,00	50,62	2,00	4.195.000	33,33	30,26	Kec. Pangandaran	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	Paket	6,00	132.859.516	1,00	18.004.786	1,00	23.993.727	1,00	11.031.000	100,00	45,97	2,00	29.035.786	33,33	21,85	Kec. Pangandaran	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang di Cetak dan digandakan	Paket	6,00	64.291.595	1,00	4.698.250	1,00	2.999.980	1,00	2.649.500	100,00	88,32	2,00	7.347.750	33,33	11,43	Kec. Pangandaran	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang dibeli setiap bulannya	Paket	1.584,00	78.995.100	160,00	3.000.000	1,00	2.917.200	1,00	1.850.000	100,00	63,42	161,00	4.850.000	10,16	6,14	Kec. Pangandaran	
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5,00	39.469.500	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan	1.630,00	213.678.500	72,00	13.990.000	197,00	10.992.000	197,00	4.764.000	100,00	43,34	269,00	18.754.000	16,50	8,78	Kec. Pangandaran	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	58,33						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**Unit**	**100,00**	**396.831.500**	**-**	**20.832.380**	**5,00**	**29.304.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.832.380**	**-**	**5,25**	Kec. Pangandaran	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15,00	122.102.000	-	20.832.380		-	-	-			-	20.832.380	-	17,06	Kec. Pangandaran	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20,00	213.678.500	-	-	5,00	29.304.600	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15,00	61.051.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**Laporan**	**100,00**	**1.455.734.176**	**90,00**	**128.086.788**	**12,00**	**149.788.912**	**12,00**	**106.661.924**	**100,00**	**71,21**	**51,00**	**234.748.712**	**51,00**	**16,13**	Kec. Pangandaran	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.440,00	19.665.360	240,00	2.400.000	312,00	2.400.000	312,00	1.182.000	100,00	49,25	552,00	3.582.000	38,33	18,21	Kec. Pangandaran	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	216,00	236.113.100	36,00	33.240.000	36,00	46.875.000	36,00	40.682.924	100,00	86,79	72,00	73.922.924	33,33	31,31	Kec. Pangandaran	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00	1.199.955.716	12,00	92.446.788	12,00	100.513.912	12,00	64.797.000	100,00	64,47	24,00	157.243.788	33,33	13,10	Kec. Pangandaran	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	66,84						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**Unit**	**100,00**	**404.913.300**	**3,00**	**45.995.880**	**3,00**	**50.316.194**	**3,00**	**26.691.700**	**100,00**	**53,05**	**3,00**	**72.687.580**	**3,00**	**17,95**	Kec. Pangandaran	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18,00	295.674.500	3,00	38.495.880	3,00	42.066.194	3,00	23.316.700	100,00	55,43	6,00	61.812.580	33,33	20,91	Kec. Pangandaran	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70,00	61.051.000	-	7.500.000	16,00	8.250.000	16,00	3.375.000	100,00	40,91	16,00	10.875.000	22,86	17,81	Kec. Pangandaran	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00	48.187.800	-	-	1,00	-	1,00	-	100,00	-	1,00	-	20,00	-	Kec. Pangandaran	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	32,11						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**87,50**	**56,76**						
										Predikat Kinerja	**(T)**	**(R)**						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**%**	**100,00**	**1.475.187.703**	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persen**	**100,00**	**1.349.636.343**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	72,00	1.349.636.343	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persen**	**100,00**	**125.551.360**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	64,00	125.551.360	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**%**	**100,00**	**17.063.755**	-	-			-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Lembaga**	**100,00**	**17.063.755**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	48,00	17.063.755	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum**	**%**	**100,00**	**5.433.539**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100,00**	**5.433.539**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	48,00	5.433.539	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**%**	**100,00**	**10.561.823**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan**	**Kali**	**48,00**	**10.561.823**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	40,00	10.561.823	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**%**	**100,00**	**344.354.964**	-	-	**100,00**	**33.506.789**	**100,00**	**33.480.000**	**100,00**	**99,92**	**50,00**	**33.480.000**	**50,00**	**9,72**	Kec. Pangandaran	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Dokumen**	**100,00**	**344.354.964**	-	-	**1,00**	**33.506.789**	**1,00**	**33.480.000**	**100,00**	**99,92**	-	**33.480.000**	-	**9,72**	Kec. Pangandaran	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	72,00	74.161.945	-	-		-	4,00	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah DURKPDes yang Tersusun Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Dokumen	6,00	187.937.600	-	-	1,00	33.506.789	1,00	33.480.000	100,00	99,92	1,00	33.480.000	16,67	17,81	Kec. Pangandaran	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Dokumen	72,00	82.255.419	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	99,92						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**100,00**	**99,92**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(ST)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**100,00**	**88,63**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(T)**						
KECAMATAN SIDAMULIH				**17.319.837.691**		**925.937.104**		**1.517.120.154**		**1.184.499.669**		**78,08**	**-**	**2.110.436.773**	-	**12,19**		

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
UNSUR KEWILAYAHAN				**17.319.837.691**		**925.937.104**		**1.517.120.154**		**1.184.499.669**		**78,08**	**-**	**2.110.436.773**	**-**	**12,19**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas**	**%**	**100,00**	**15.606.848.994**	**91,00**	**876.514.104**	**100,00**	**1.492.100.154**	**100,00**	**1.159.479.669**	**100,00**	**77,71**	**95,50**	**2.035.993.773**	**95,50**	**13,05**	Kec. Sidamulih	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu**	**%**	**100,00**	**470.275.147**	**92,00**	**41.450.000**	**100,00**	**21.000.000**	**97,14**	**13.600.000**	**97,14**	**64,76**	**94,57**	**55.050.000**	**94,57**	**11,71**	Kec. Sidamulih	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	84,00	379.116.619	1,00	15.900.000	4,00	21.000.000	4,00	13.600.000	100,00	64,76	5,00	29.500.000	5,95	7,78	Kec. Sidamulih	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30,00	36.600.000	1,00	25.550.000	-	-	-	-			1,00	25.550.000	3,33	69,81	Kec. Sidamulih	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	12.210.200	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Sidamulih	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	12.030.200	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Sidamulih	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	12.030.200	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Sidamulih	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	12.030.200	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Sidamulih	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	6.257.728	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Sidamulih	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	64,76						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**100,00**	**11.894.492.539**	**90,00**	**777.112.114**	**100,00**	**1.258.415.877**	**100,00**	**1.009.830.772**	**100,00**	**80,25**	**95,00**	**1.786.942.886**	**95,00**	**15,02**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	11,00	11.507.277.505	11,00	762.912.114	12,00	1.237.415.877	12,00	995.380.772	100,00	80,44	10,00	1.758.292.886	90,91	15,28	Kec. Sidamulih	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60,00	376.140.383	1,00	14.200.000	5,00	21.000.000	4,00	14.450.000	80,00	68,81	5,00	28.650.000	8,33	7,62	Kec. Sidamulih	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	5.738.794	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	1,00	5.335.857	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	90,00	74,62						
										Predikat Kinerja	(T)	(S)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100,00**	**273.691.633**	**-**	**-**	**100,00**	**21.000.000**	**97,14**	**13.600.000**	**97,14**	**64,76**	**48,57**	**13.600.000**	**48,57**	**4,97**		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	27.839.256	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Sidamulih	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	245.852.377	-	-	12,00	21.000.000	12,00	13.600.000	100,00	64,76	12,00	13.600.000	100,00	5,53		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	64,76						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**563.727.840**	**-**	**-**	**100,00**	**26.325.000**	**63,82**	**11.200.000**	**63,82**	**42,55**	**31,91**	**11.200.000**	**31,91**	**1,99**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	25,00	55.539.316	-	-	25,00	8.925.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12,00	152.627.500	-	-	12,00	17.400.000	12,00	11.200.000	100,00	64,37	12,00	11.200.000	100,00	7,34	Kec. Sidamulih	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	26,00	19.780.524	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Bedasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11,00	335.780.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	50,00	32,18						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**472.086.228**	**99,00**	**6.165.750**	**100,00**	**31.912.951**	**88,69**	**22.909.720**	**88,69**	**71,79**	**93,84**	**29.075.470**	**93,84**	**6,16**		

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	2,00	4.920.729	-	-	1,00	793.743	1,00	252.000	100,00	31,75	1,00	252.000	50,00	5,12	Kec. Sidamulih	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	180,00	144.369.254	61,00	3.501.000	1,00	18.162.838	1,00	15.988.000	100,00	88,03	62,00	19.489.000	34,44	13,50	Kec. Sidamulih	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	48,00	30.227.310	6,00	454.000	1,00	2.981.370	1,00	1.927.220	100,00	64,64	7,00	2.381.220	14,58	7,88	Kec. Sidamulih	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	24,00	23.480.099	11,00	1.275.000	-	-	-	-			11,00	1.275.000	45,83	5,43	Kec. Sidamulih	
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	5,00	73.261.200	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36,00	195.827.636	2,00	935.750	6,00	9.975.000	6,00	4.742.500	100,00	47,54	8,00	5.678.250	22,22	2,90	Kec. Sidamulih	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	57,99						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**%**	**100,00**	**669.275.165**	**-**	**-**	**100,00**	**9.537.000**	**94,37**	**9.000.000**	**94,37**	**94,37**	**47,18**	**9.000.000**	**47,18**	**1,34**		
Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	16,00	40.449.865	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	42,00	567.774.300	-	-	10,00	9.537.000	3,00	9.000.000	30,00	94,37	3,00	9.000.000	7,14	1,59	Kec. Sidamulih	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1,00	61.051.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	30,00	94,37						
										Predikat Kinerja	(SR)	(ST)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**100,00**	**877.905.539**	**96,00**	**24.930.040**	**100,00**	**88.009.045**	**99,78**	**56.754.877**	**99,78**	**64,49**	**97,89**	**81.684.917**	**97,89**	**9,30**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	240,00	6.593.508	-	-	12,00	975.000	12,00	325.000	100,00	33,33	12,00	325.000	5,00	4,93	Kec. Sidamulih	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Rekening	2,00	180.642.068	2,00	11.700.040	2,00	19.740.000	2,00	14.830.877	100,00	75,13	2,00	26.530.917	100,00	14,69	Kec. Sidamulih	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	60,00	690.669.963	12,00	13.230.000	12,00	67.294.045	12,00	41.599.000	100,00	61,82	24,00	54.829.000	40,00	7,94	Kec. Sidamulih	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	56,76						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**100,00**	**385.394.903**	**100,00**	**26.856.200**	**100,00**	**35.900.281**	**70,57**	**22.584.300**	**70,57**	**62,91**	**85,29**	**49.440.500**	**85,29**	**12,83**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6,00	295.588.603	4,00	9.000.000	6,00	29.152.207	4,00	20.170.000	66,67	69,19	8,00	29.170.000	133,33	9,87	Kec. Sidamulih	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6,00	38.410.800	4,00	356.200	6,00	2.250.000	4,00	1.614.300	66,67	71,75	8,00	1.970.500	133,33	5,13	Kec. Sidamulih	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	14,00	21.367.850	-	-	14,00	3.000.000	3,00	800.000	21,43	26,67	3,00	800.000	21,43	3,74	Kec. Sidamulih	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1,00	30.027.650	1,00	17.500.000	1,00	1.498.074	-	-	-	-	1,00	17.500.000	100,00	58,28	Kec. Sidamulih	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	38,69	41,90						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**88,94**	**68,23**						
										Predikat Kinerja	**(T)**	**(S)**						
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**%**	**100,00**	**1.303.077.704**	**52,00**	**41.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**26,00**	**41.600.000**	**26,00**	**3,19**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**%**	**100,00**	**1.303.077.704**	**52,00**	**41.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**26,00**	**41.600.000**	**26,00**	**3,19**	Kec. Sidamulih	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5,00	82.042.544	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	66,00	1.221.035.160	80,00	41.600.000	-	-	-	-			80,00	41.600.000	121,21	3,41	Kec. Sidamulih	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**-**	**-**						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**%**	**100,00**	**19.749.999**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**%**	**100,00**	**19.749.999**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	7,00	19.749.999	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Sidamulih	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum**	**%**	**100,00**	**19.749.999**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum**	**Kali**	**7,00**	**19.749.999**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	7,00	19.749.999	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Sidamulih	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**%**	**100,00**	**21.276.274**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan**	**Kali**	**5,00**	**21.276.274**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**		
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen semua urusan pemerintahaan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikan	Dokumen	10,00	21.276.274	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Sidamulih	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**%**	**100,00**	**349.134.721**	**100,00**	**7.823.000**	**100,00**	**25.020.000**	**100,00**	**25.020.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**32.843.000**	**100,00**	**9,41**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa**	**%**	**100,00**	**349.134.721**	**100,00**	**7.823.000**	**100,00**	**25.020.000**	**100,00**	**25.020.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**32.843.000**	**100,00**	**9,41**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	7,00	14.640.030	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Sidamulih	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	42,00	252.442.147	7,00	7.823.000	7,00	25.020.000	4,00	25.020.000	57,14	100,00	11,00	32.843.000	26,19	13,01	Kec. Sidamulih	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	7,00	82.052.544	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	57,14	100,00						
										Predikat Kinerja	(R)	(ST)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**100,00**	**100,00**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(ST)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**100,00**	**88,85**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(ST)**	**(T)**						
KECAMATAN PARIGI				**14.394.087.893**		**2.536.450.867**		**1.549.810.241**		**1.029.339.641**		**66,42**		**3.565.790.508**		**24,77**		
URUSAN KEWILAYAHAN				**14.394.087.893**		**2.536.450.867**		**1.549.810.241**		**1.029.339.641**		**66,42**		**3.565.790.508**		**24,77**	Kec. Parigi	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas**	**%**	**100,00**	**13.081.484.611**	**100,00**	**2.401.664.367**	**100,00**	**1.514.913.243**	**65,64**	**994.446.641**	**65,64**	**65,64**	**82,82**	**3.396.111.008**	**82,82**	**25,96**	Kec. Parigi	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu**	**%**	**100,00**	**317.395.977**	**100,00**	**40.300.000**	**100,00**	**21.000.000**	**60,71**	**12.750.000**	**60,71**	**60,71**	**80,36**	**53.050.000**	**80,36**	**16,71**	Kec. Parigi	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	14,00	280.190.377	14,00	40.300.000	14,00	21.000.000	12,00	12.750.000	85,71	60,71	13,00	53.050.000	92,86	18,93	Kec. Parigi	
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	12,00	6.680.100	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	5,00	6.105.100	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	1,00	6.105.100	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	1,00	6.105.100	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	1,00	6.105.100	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan	Laporan	1,00	6.105.100	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	85,71	60,71						
										Predikat Kinerja	(T)	(R)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**100,00**	**9.195.585.179**	**100,00**	**2.004.091.345**	**100,00**	**1.140.628.319**	**73,31**	**836.234.363**	**73,31**	**73,31**	**86,66**	**2.840.325.708**	**86,66**	**30,89**	Kec. Parigi	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	Orang/Bulan	11,00	8.885.525.602	11,00	1.963.791.345	11,00	1.119.029.119	7,00	822.885.163	63,64	73,54	7,00	2.786.676.508	63,64	31,36	Kec. Parigi	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60,00	278.699.377	60,00	40.300.000	60,00	21.000.000	60,00	12.750.000	100,00	60,71	60,00	53.050.000	100,00	19,03	Kec. Parigi	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	Laporan	1,00	24.680.100	-	-	1,00	599.200	1,00	599.200	100,00	100,00	1,00	599.200	100,00	2,43	Kec. Parigi	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Laporan	5,00	6.680.100	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	87,88	78,08						
										Predikat Kinerja	(T)	(T)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100,00**	**284.608.727**	**100,00**	**40.300.000**	**100,00**	**21.000.000**	**60,71**	**12.750.000**	**60,71**	**60,71**	**80,36**	**53.050.000**	**80,36**	**18,64**	Kec. Parigi	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	Laporan	12,00	6.105.100	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	Laporan	61,00	278.503.627	61,00	40.300.000	61,00	21.000.000	61,00	12.750.000	100,00	60,71	122,00	53.050.000	200,00	19,05	Kec. Parigi	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	60,71						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**343.536.392**	**100,00**	**24.200.000**	**100,00**	**25.337.600**	**49,17**	**12.458.400**	**49,17**	**49,17**	**74,58**	**36.658.400**	**74,58**	**10,67**	Kec. Parigi	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Paket	11,00	64.582.400	-	-	11,00	2.937.600	11,00	1.958.400	100,00	66,67	11,00	1.958.400	100,00	3,03	Kec. Parigi	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	Dokumen	12,00	162.848.892	12,00	24.200.000	12,00	17.400.000	12,00	10.500.000	100,00	60,34	12,00	34.700.000	100,00	21,31	Kec. Parigi	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Orang	12,00	6.105.100	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	10,00	110.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Parigi	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	66,67	42,34						
										Predikat Kinerja	(S)	(SR)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**515.427.228**	**100,00**	**43.121.550**	**100,00**	**45.109.543**	**52,82**	**23.828.700**	**52,82**	**52,82**	**76,41**	**66.950.250**	**76,41**	**12,99**	Kec. Parigi	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	2,00	22.668.335	2,00	6.933.900	2,00	3.509.414	2,00	2.718.700	100,00	77,47	2,00	9.652.600	100,00	42,58	Kec. Parigi	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Paket	38,00	231.649.512	38,00	27.616.650	38,00	23.120.629	38,00	14.465.000	100,00	62,56	38,00	42.081.650	100,00	18,17	Kec. Parigi	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2,00	40.880.600	2,00	3.871.000	2,00	4.344.500	2,00	2.620.000	100,00	60,31	2,00	6.491.000	100,00	15,88	Kec. Parigi	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	Dokumen	2,00	28.380.400	2,00	3.400.000	2,00	4.200.000	2,00	1.300.000	100,00	30,95	4,00	4.700.000	200,00	16,56	Kec. Parigi	
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Bahan / Material yang disediakan	Paket	1,00	15.262.750	-	-	1,00	2.400.000	1,00	2.400.000	100,00	100,00	1,00	2.400.000	100,00	15,72	Kec. Parigi	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan	90,00	176.585.631	4,00	1.300.000	90,00	7.535.000	2,00	325.000	2,22	4,31	6,00	1.625.000	6,67	0,92	Kec. Parigi	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	83,70	55,93						
										Predikat Kinerja	(T)	(R)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**%**	**100,00**	**380.829.168**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
Pengadaan Meubel	Jumlah mebel yang diadakan	Paket	2,00	102.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	3,00	218.496.168	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	Unit	1,00	60.333.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**100,00**	**1.371.064.690**	**100,00**	**158.538.895**	**100,00**	**204.410.319**	**32,87**	**67.198.978**	**32,87**	**32,87**	**66,44**	**225.737.873**	**66,44**	**16,46**	Kec. Parigi	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Laporan	240,00	24.417.850	100,00	1.320.000	240,00	1.000.000	100,00	250.000	41,67	25,00	100,00	1.570.000	41,67	6,43	Kec. Parigi	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Laporan	3,00	211.353.000	2,00	33.371.395	2,00	22.000.000	2,00	19.525.278	100,00	88,75	2,00	52.896.673	66,67	25,03	Kec. Parigi	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12,00	1.135.293.840	12,00	123.847.500	12,00	181.410.319	12,00	47.423.700	100,00	26,14	12,00	171.271.200	100,00	15,09	Kec. Parigi	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	80,56	46,63						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Predikat Kinerja	(T)	(SR)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**100,00**	**673.037.250**	**100,00**	**91.112.577**	**100,00**	**57.427.462**	**50,89**	**29.226.200**	**50,89**	**50,89**	**75,45**	**120.338.777**	**75,45**	**17,88**	Kec. Parigi	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	6,00	469.906.500	6,00	58.242.577	6,00	42.975.128	6,00	24.826.200	100,00	57,77	6,00	83.068.777	100,00	17,68	Kec. Parigi	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	Unit	14,00	137.102.000	14,00	8.950.000	14,00	6.750.000	14,00	4.400.000	100,00	65,19	14,00	13.350.000	100,00	9,74	Kec. Parigi	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	5,00	66.028.750	5,00	23.920.000	2,00	7.702.334	-	-	-	-	-	23.920.000	-	36,23	Kec. Parigi	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	66,67	40,98						
										Predikat Kinerja	(S)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**54,36**	**54,36**						
										Predikat Kinerja	**(R)**	**(R)**						
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**%**	**100,00**	**746.708.556**	**52,00**	**115.200.000**	-	-	-	-			**26,00**	**115.200.000**	**26,00**	**15,43**	Kec. Parigi	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**%**	**100,00**	**746.708.556**	**52,00**	**115.200.000**		-	-	-			**26,00**	**115.200.000**	**26,00**	**15,43**	Kec. Parigi	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksankan	Laporan	4,00	61.051.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi pemerintahan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait yang di selenggarakan	Laporan	12,00	685.657.556	12,00	115.200.000	-	-	-	-			-	115.200.000	-	16,80	Kec. Parigi	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**%**	**100,00**	**63.307.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**%**	**100,00**	**63.307.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di monitoring pelaksanaan musrenbangnya	Lembaga Kemasyarakatan	10,00	63.307.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum**	**%**	**100,00**	**61.051.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum**	**%**	**10,00**	**61.051.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan harmonisasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	10,00	61.051.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**%**	**100,00**	**61.051.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan**	**%**	**10,00**	**61.051.000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen verifikasi bantuan keuangan Desa	Dokumen	10,00	61.051.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**%**	**100,00**	**380.485.726**	**100,00**	**19.586.500**	**100,00**	**34.896.998**	**99,99**	**34.893.000**	**99,99**	**99,99**	**99,99**	**54.479.500**	**99,99**	**14,32**	Kec. Parigi	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa**	**%**	**100,00**	**380.485.726**	**100,00**	**19.586.500**	**100,00**	**34.896.998**	**99,99**	**34.893.000**	**99,99**	**99,99**	**99,99**	**54.479.500**	**99,99**	**14,32**	Kec. Parigi	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	4,00	61.051.000	-	-	1,00	4.000.000	1,00	4.000.000	100,00	100,00	1,00	4.000.000	25,00	6,55	Kec. Parigi	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah DURKPDes yang tersusun dan Jumlah kegiatan penyelengaraan musrenbang kecamatan	Dokumen	2,00	258.383.726	2,00	19.586.500	2,00	30.896.998	2,00	30.893.000	100,00	99,99	2,00	50.479.500	100,00	19,54	Kec. Parigi	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi pembangunan desa wisata dan Jumlah Fasilitasi Desa Wisata	Laporan	4,00	61.051.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	100,00	99,99						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)											99,99	99,99						
Predikat Kinerja											(ST)	(ST)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)											82,82	82,82						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											(T)	(T)						
KECAMATAN CIJULANG				**15.083.329.851**		**1.220.032.264**		**1.607.135.375**		**1.157.483.471**		**72,02**		**2.377.515.735**		**15,76**		
UNSUR KEWILAYAHAN				**15.083.329.851**		**1.220.032.264**		**1.607.135.375**		**1.157.483.471**		**72,02**		**2.377.515.735**		**15,76**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas**	**%**	**100,00**	**13.432.624.953**	**100,00**	**1.202.632.264**	**100,00**	**1.556.342.875**	**100,00**	**1.121.990.971**	**100,00**	**72,09**	**100,00**	**2.324.623.235**	-	**17,31**	Kec. Cijulang	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu**	**Persen**	**100,00**	**371.195.637**	**100,00**	**21.000.000**	**100,00**	**21.000.000**	**100,00**	**12.750.000**	**100,00**	**60,71**	**100,00**	**33.750.000**	-	**9,09**	Kec. Cijulang	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	38,00	327.244.857	13,00	21.000.000	4,00	21.000.000	4,00	12.750.000	100,00	60,71	17,00	33.750.000	44,74	10,31	Kec. Cijulang	Terbentur dengan ketersediaan anggaran di BKAD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4,00	9.084.450	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4,00	9.084.450	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4,00	9.084.450	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4,00	9.084.450	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	4,00	798.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	15,00	6.814.980	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											100,00	60,71						
Predikat Kinerja											(ST)	(R)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**100,00**	**9.102.218.271**	**100,00**	**908.089.113**	**100,00**	**1.250.563.960**	**100,00**	**914.904.393**	**100,00**	**73,16**	**100,00**	**1.822.993.506**	**100,00**	**20,03**	Kec. Cijulang	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	60,00	8.659.618.007	8,00	887.089.113	9,00	1.229.563.960	9,00	901.304.393	100,00	73,30	17,00	1.788.393.506	28,33	20,65	Kec. Cijulang	Disesuaikan dengan Jumlah ASN yang ada
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	360,00	322.853.857	60,00	21.000.000	5,00	21.000.000	5,00	13.600.000	100,00	64,76	65,00	34.600.000	18,06	10,72	Kec. Cijulang	Terbentur dengan ketersediaan anggaran di BKAD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5,00	4.720.097	-	-	1	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	25,00	115.026.310	-	-	5	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											100,00	69,03						
Predikat Kinerja											(ST)	(S)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**Buah**	**418,00**	**323.526.857**	**61,00**	**22.700.000**	**12,00**	**21.000.000**	**12,00**	**12.750.000**	**100,00**	**60,71**	**73,00**	**35.450.000**	**17,46**	**10,96**	Kec. Cijulang	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72,00	323.526.857	12,00	22.700.000	12,00	21.000.000	12,00	12.750.000	100,00	60,71	24,00	35.450.000	33,33	10,96	Kec. Cijulang	Terbentur dengan ketersediaan anggaran di BKAD
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											100,00	60,71						
Predikat Kinerja											(ST)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**Persen**	**100,00**	**491.896.356**	**100,00**	**16.321.600**	**100,00**	**20.339.130**	**100,00**	**13.400.000**	**100,00**	**65,88**	**100,00**	**29.721.600**	-	**6,04**	Kec. Cijulang	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6,00	66.027.367	21,00	2.721.600	1,00	2.939.130	1,00	2.900.000	100,00	98,67	22,00	5.621.600	366,67	8,51	Kec. Cijulang	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	72,00	158.004.137	12,00	13.600.000	12,00	17.400.000	12,00	10.500.000	100,00	60,34	24,00	24.100.000	33,33	15,25	Kec. Cijulang	Terbentur dengan ketersediaan anggaran di BKAD
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	46,00	12.864.852	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	51,00	255.000.000	-	-	10,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	79,51						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**Persen**	**100,00**	**708.662.368**	**100,00**	**35.400.214**	**100,00**	**33.440.271**	**100,00**	**21.303.750**	**100,00**	**63,71**	**100,00**	**56.703.964**	**-**	**8,00**	Kec. Cijulang	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	22.886.051	1,00	1.625.000	1,00	1.027.208	1,00	1.018.000	100,00	99,10	2,00	2.643.000	33,33	11,55	Kec. Cijulang	Kinerjanya tidak di jumlah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	172.829.840	1,00	14.774.000	1,00	12.048.863	1,00	10.000.000	100,00	83,00	2,00	24.774.000	33,33	14,33	Kec. Cijulang	Kinerjanya tidak di jumlah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00	99.139.109	48,00	7.772.250	1,00	4.959.200	1,00	4.769.750	100,00	96,18	49,00	12.542.000	816,67	12,65	Kec. Cijulang	Kinerjanya tidak di jumlah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	288,00	26.402.190	15,00	1.500.000	1,00	-	-	-			15,00	1.500.000	5,21	5,68	Kec. Cijulang	
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Paket	4,00	56.500.000	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.357,00	330.905.178	13,00	9.728.964	326,00	15.405.000	15,00	5.516.000	4,60	35,81	28,00	15.244.964	2,06	4,61	Kec. Cijulang	Disesuaikan dengan SPPD Luar Daerah yang dilaksanakan, dan yang bisa diserap hanya SPPD luar daerah
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	76,15	78,52						
										Predikat Kinerja	(T)	(T)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**Persen**	**100,00**	**399.084.779**	**100,00**	**8.685.000**	**100,00**	**18.376.728**	**25,00**	**18.376.728**	**25,00**	**100,00**	**62,50**	**27.061.728**	**-**	**6,78**	Kec. Cijulang	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	100,00	148.590.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	22,00	209.094.779	2,00	8.685.000	5,00	18.376.728	3,00	18.376.728	60,00	100,00	-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	37,00	41.400.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	60,00	100,00						
										Predikat Kinerja	(R)	(ST)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**Persen**	**100,00**	**1.472.639.961**	**100,00**	**151.670.637**	**100,00**	**146.102.322**	**100,00**	**100.096.100**	**100,00**	**68,51**	**100,00**	**251.766.737**	**-**	**17,10**	Kec. Cijulang	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.320,00	14.237.660	120,00	1.200.000	120,00	1.200.000	53,00	800.000	44,17	66,67	173,00	2.000.000	13,11	14,05	Kec. Cijulang	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	144,00	317.604.000	24,00	25.932.837	24,00	37.676.425	24,00	35.093.600	100,00	93,14	48,00	61.026.437	33,33	19,21	Kec. Cijulang	Standar Harga di SSH SBU terlalu tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga yang diambil yang mendekati kebutuhan SKPD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00	1.140.798.301	12,00	124.537.800	12,00	107.225.897	12,00	64.202.500	100,00	59,88	24,00	188.740.300	33,33	16,54	Kec. Cijulang	Terbentur dengan ketersediaan anggaran di BKAD
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	81,39	73,23						
										Predikat Kinerja	(T)	(S)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**Persen**	**100,00**	**563.400.724**	**100,00**	**38.765.700**	**100,00**	**45.520.464**	**100,00**	**28.410.000**	**100,00**	**62,41**	**100,00**	**67.175.700**	**-**	**11,92**	Kec. Cijulang	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32,00	382.925.024	5,00	24.940.700	5,00	36.520.464	5,00	23.297.000	100,00	63,79	10,00	48.237.700	31,25	12,60	Kec. Cijulang	Disesuaikan dengan jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan yang dibutuhkan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	84,00	120.097.825	10,00	13.825.000	14,00	9.000.000	13,00	5.113.000	92,86	56,81	23,00	18.938.000	27,38	15,77	Kec. Cijulang	Disesuaikan dengan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00	60.377.875	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	96,43	60,30						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**90,63**	**69,39**						
										Predikat Kinerja	**(ST)**	**(S)**						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**%**	**100,00**	**1.023.776.487**	**-**	**5.800.000**	**100,00**	**12.600.000**	**100,00**	**7.500.000**	**100,00**	**59,52**	**50,00**	**13.300.000**	**-**	**1,30**	Kec. Cijulang	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persen**	**100,00**	**879.534.260**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	Kec. Cijulang	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	16,00	879.534.260	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persen**	**100,00**	**144.242.227**	**100,00**	**5.800.000**	**100,00**	**12.600.000**	**100,00**	**7.500.000**	**100,00**	**59,52**	**100,00**	**13.300.000**	**-**	**9,22**	Kec. Cijulang	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24,00	144.242.227	4,00	5.800.000	4,00	12.600.000	4,00	7.500.000	100,00	59,52	8,00	13.300.000	33,33	9,22	Kec. Cijulang	Terbentur dengan ketersediaan anggaran di BKAD
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	59,52						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											**100,00**	**59,52**						
Predikat Kinerja											**(ST)**	**(R)**						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**%**	**100,00**	**37.889.825**	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persen**	**100,00**	**37.889.825**	-	-	**100,00**	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	35,00	37.889.825	-	-	7,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											-	-						
Predikat Kinerja											**(SR)**	**(SR)**						
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum**	**%**	**100,00**	**25.584.195**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**%**	**100,00**	**25.584.195**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	28,00	25.584.195	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											-	-						
Predikat Kinerja											**(SR)**	**(SR)**						
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**%**	**100,00**	**72.131.945**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan**	**%**	**100,00**	**72.131.945**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Dokumen	28,00	72.131.945	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											-	-						
Predikat Kinerja											**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**%**	**100,00**	**491.322.446**	**100,00**	**11.600.000**	**100,00**	**38.192.500**	**100,00**	**27.992.500**	**100,00**	**73,29**	**100,00**	**39.592.500**	-	**8,06**	Kec. Cijulang	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persen**	**100,00**	**491.322.446**	**100,00**	**11.600.000**	**100,00**	**38.192.500**	100,00	27.992.500	**100,00**	**73,29**	**100,00**	**39.592.500**	-	**8,06**	Kec. Cijulang	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	24,00	156.915.227	4,00	5.800.000	4,00	12.600.000	4,00	7.500.000	100,00	59,52	8,00	13.300.000	33,33	8,48	Kec. Cijulang	Terbentur dengan ketersediaan anggaran di BKAD
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	5,00	188.286.992	-	-	1,00	12.992.500	1,00	12.992.500	100,00	100,00	1,00	12.992.500	20,00	6,90	Kec. Cijulang	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	24,00	146.120.227	4,00	5.800.000	4,00	12.600.000	4,00	7.500.000	100,00	59,52	8,00	13.300.000	33,33	9,10	Kec. Cijulang	Terbentur dengan ketersediaan anggaran di BKAD
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											100,00	73,02						
Predikat Kinerja											(ST)	(S)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											**100,00**	**73,29**						
Predikat Kinerja											**(ST)**	**(S)**						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)											**100,00**	**68,30**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											**(ST)**	**(S)**						
KECAMATAN CIMERAK				**14.930.442.083**		**1.040.445.047**		**1.279.903.083**		**982.031.018**		**76,73**		**2.022.476.065**		**13,55**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas**	**%**	**100,00**	**12.451.140.555**	**100,00**	**899.271.047**	**100,00**	**1.242.816.702**	**65,26**	**958.622.018**	**65,26**	**77,13**	**82,63**	**1.857.893.065**	**82,63**	**14,92**	Kec.Cimerak	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu**	**%**	**100,00**	**317.995.303**	**100,00**	**21.000.000**	**100,00**	**21.000.000**	**100,00**	**12.750.000**	**100,00**	**60,71**	**100,00**	**33.750.000**	**100,00**	**10,61**	Kec.Cimerak	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	84,00	265.783.985	14,00	21.000.000	4,00	21.000.000	3,00	12.750.000	75,00	60,71	17,00	33.750.000	20,24	12,70	Kec.Cimerak	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	25,00	36.736.785	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	25,00	2.136.785	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	25,00	2.136.785	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	25,00	2.136.785	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	25,00	9.064.178	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	75,00	60,71						
										Predikat Kinerja	(S)	(R)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**100,00**	**8.652.701.174**	**100,00**	**743.649.987**	**100,00**	**847.629.199**	**83,70**	**709.499.003**	**83,70**	**83,70**	**91,85**	**1.453.148.990**	**91,85**	**16,79**	Kec.Cimerak	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	66,00	8.256.420.677	11,00	722.649.987	14,00	826.629.199	12,00	628.690.753	85,71	76,05	23,00	1.351.340.740	34,85	16,37	Kec.Cimerak	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	300,00	265.783.985	60,00	21.000.000	5,00	21.000.000	10,00	12.750.000	200,00	60,71	70,00	33.750.000	23,33	12,70	Kec.Cimerak	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	15,00	4.578.825	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	5,00	125.917.688	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	142,86	68,38						
										Predikat Kinerja	(ST)	(S)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100,00**	**248.886.612**	**100,00**	**21.000.000**	**100,00**	**21.000.000**	**100,00**	**14.450.000**	**100,00**	**68,81**	**100,00**	**35.450.000**	**100,00**	**14,24**	Kec.Cimerak	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	60,00	4.102.627	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	305,00	244.783.985	61,00	21.000.000	12,00	21.000.000	15,00	12.750.000	125,00	60,71	76,00	33.750.000	24,92	13,79	Kec.Cimerak	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	125,00	60,71						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**321.986.692**	**100,00**	**11.600.000**	**100,00**	**20.945.867**	**25,00**	**14.200.000**	**25,00**	**67,79**	**62,50**	**25.800.000**	**62,50**	**8,01**	Kec.Cimerak	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	130,00	41.209.425	-	-	1,00	3.545.867	1,00	3.500.000	100,00	98,71	1,00	3.500.000	0,77	8,49	Kec.Cimerak	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	60,00	149.892.415	12,00	11.600.000	14,00	17.400.000	9,00	10.500.000	64,29	60,34	21,00	22.100.000	35,00	14,74	Kec.Cimerak	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	60,00	15.384.852	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11,00	115.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	82,14	79,53						
										Predikat Kinerja	(T)	(T)						
Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**1.115.476.430**	**100,00**	**20.157.050**	**100,00**	**47.624.235**	**37,32**	**17.775.104**	**37,32**	**37,32**	**68,66**	**37.932.154**	**68,66**	**3,40**	Kec.Cimerak	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30,00	28.116.331	5,00	769.000	5,00	4.482.460	2,00	1.800.000	40,00	40,16	7,00	2.569.000	23,33	9,14	Kec.Cimerak	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	270,00	19.340.035	30,00	8.345.200	45,00	13.802.915	40,00	11.639.000	88,89	84,32	70,00	19.984.200	25,93	103,33	Kec.Cimerak	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24,00	62.609.073	4,00	4.762.850	4,00	6.028.860	2,00	4.400.000	50,00	72,98	6,00	9.162.850	25,00	14,64	Kec.Cimerak	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36,00	53.417.616	4,00	3.300.000	6,00	3.315.000	4,00	2.216.000	66,67	66,85	8,00	5.516.000	22,22	10,33	Kec.Cimerak	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	25,00	12.210.200	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.996,00	939.783.175	181,00	2.980.000	326,00	19.995.000	117,00	10.304.000	35,89	51,53	298,00	13.284.000	14,93	1,41	Kec.Cimerak	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	56,29	63,17						
										Predikat Kinerja	(R)	(R)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi**	**%**	**100,00**	**403.200.000**	**100,00**	-	-	-	-	-			**50,00**	-	-	-	Kec.Cimerak	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15,00	220.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12,00	105.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jenis	1,00	77.600.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**100,00**	**763.440.300**	**100,00**	**37.957.905**	**100,00**	**126.616.086**	**58,63**	**74.232.311**	**58,63**	**58,63**	**79,31**	-	-	-	Kec.Cimerak	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.440,00	14.613.832	240,00	450.000	240,00	3.000.000	161,00	1.400.000	67,08	46,67	401,00	1.850.000	28,00	12,66	Kec.Cimerak	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	18,00	275.907.513	3,00	16.245.505	4,00	23.625.000	3,00	18.114.999	75,00	76,68	6,00	34.360.504	12,00	12,45	Kec.Cimerak	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00	472.918.955	12,00	21.262.400	3,00	99.991.086	4,00	58.400.000	133,33	58,41	16,00	79.662.400	12,00	16,84	Kec.Cimerak	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	91,81	60,58						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**100,00**	**627.454.044**	**100,00**	**43.906.105**	**100,00**	**158.001.315**	**73,24**	**115.715.600**	**73,24**	**73,24**	**86,62**	-	**86,62**	-	Kec.Cimerak	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12,00	373.124.154	12,00	16.461.105	13,00	35.001.315	6,00	18.615.600	46,15	53,19	12,00	35.076.705	92,31	9,40	Kec.Cimerak	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	12,00	168.945.275	2,00	25.400.000	-	120.000.000	-	95.000.000	-	79,17	2,00	-	-	-	Kec.Cimerak	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14,00	85.384.615	14,00	2.045.000	14,00	3.000.000	3,00	2.100.000	21,43	70,00	17,00	4.145.000	121,43	4,85	Kec.Cimerak	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	22,53	67,45						
										Predikat Kinerja	(SR)	(S)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**59,74**	**56,28**						
										Predikat Kinerja	**(R)**	**(R)**						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**%**	**100,00**	**1.859.056.684**	**100,00**	**122.400.000**	-	**10.137.489**	-	**623.000**	-	**6,15**	**50,00**	-	-	-	Kec.Cimerak	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Laporan**	**60,00**	**148.430.694**	**8,00**	**122.400.000**	-	**627.489**	-	-	-	-	**8,00**	**122.400.000**	**13,33**	**82,46**	Kec.Cimerak	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	60,00	148.430.694	8,00	1.200.000	4,00	627.489	4,00	623.000	100,00	99,28	12,00	1.823.000	20,00	1,23	Kec.Cimerak	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	99,28						
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**	**%**	**100,00**	**1.710.625.990**	-		-	**9.510.000**	-	**4.415.000**	-	**46,42**	-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	72,00	1.710.625.990	6,00	121.200.000	4,00	9.510.000	6,00	4.415.000	150,00	46,42	12,00	125.615.000	16,67	7,34	Kec.Cimerak	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	150,00	46,42						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PENYELELNGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan**	**%**	**100**	**23382880,85**	**100**	**0**	**0**	**0**					**50,00**					
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**laporan**	**100**	**23382880,85**	**100**	**0**	**0**	**0**										
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	laporan	11	23382880,85	0	0	0											
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Presentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**46954324**	**0**	**0**	**0**	**0**					-					
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**jumlah upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum**	**laporan**	**11**	**46954324**	**0**	**0**	**0**	**0**										
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	11	46954324	0	0	0	0										
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan**	**%**	**100,00**	**22.182.881**	-	-	**100,00**	**2.074.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**laporan**	**12,00**	**22.182.881**	-	-	**100,00**	**2.074.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	laporan	12,00	22.182.881	-	-	8,00	2.074.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec.Cimerak	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											-	-						
Predikat Kinerja											**(SR)**	**(SR)**						
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**Presentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**18,33**	**46.954.324**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**jumlah upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum**	**laporan**	**18,33**	**46.954.324**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	18,33	46.954.324	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											-	-						
Predikat Kinerja											**(SR)**	**(SR)**						
Program Penyelelnggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**%**	**10,00**	**9.157.650**	-	-	**100,00**	**935.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan**	**Dokumen**	**30,00**	**9.157.650**	-	-	**100,00**	**935.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	30,00	9.157.650	-	-	7,00	935.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat Kinerja											(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											-	-						
Predikat Kinerja											**(SR)**	**(SR)**						
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemeintahan Desa	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**%**	**6,67**	**471.612.784**	**100,00**	**18.774.000**	**100,00**	**23.939.892**	**95,18**	**22.786.000**	**95,18**	**95,18**	**97,59**	-	-	-	Kec.Cimerak	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa**	**%**	**20,00**	**471.612.784**	**100,00**	**18.774.000**	**100,00**	**23.939.892**	**95,18**	**22.786.000**	**95,18**	**95,18**	**97,59**	-	-	-	Kec.Cimerak	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	10,00	133.036.234	-	-	4,00	2.310.000	12,00	2.293.000	300,00	99,26	12,00	2.293.000	-	1,72	Kec.Cimerak	
	Jumlah desa yang melaksanakan PILKADes serentak (tahun 2022)	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah DURKPDes yang tersusun	Laporan	2,00	212.109.966	2,00	16.186.000	1,00	21.629.892	1,00	21.609.000	100,00	99,90	2,00	37.795.000	2,00	17,82	Kec.Cimerak	
	Jumlah kegiatan penyelengaraan musrenbang kecamatan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	8,00	126.466.584	1,00	2.588.000	-	-	-	-			1,00	2.588.000	12,50	2,05	Kec.Cimerak	
	Jumlah Fasilitasi Desa Wisata	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											200,00	99,58						
Predikat Kinerja											(ST)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											**95,18**	**95,18**						
Predikat Kinerja											**(ST)**	**(ST)**						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)											**26,74**	**29,74**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											**(SR)**	**(SR)**						
KECAMATAN CIGUGUR				**10.558.993.521**		**1.331.236.005**		**1.637.924.352**		**1.182.550.912**		**72,20**		**2.823.230.244**		**26,65**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi**	**persen**	**100,00**	**9.400.203.803**	**100,00**	**1.320.169.005**	**100,00**	**1.606.460.930**	**100,00**	**1.153.257.490**	**100,00**	**71,79**	**100,00**	**2.664.880.244**	**100,00**	**28,24**	Kec. Cigugur	
	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	**persen**											-					
	3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	**persen**											-					
	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	**persen**											-					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu**	**persen**	**100,00**	**258.402.500**	**100,00**	**20.150.000**	**100,00**	**21.988.000**	**93,22**	**13.498.000**	**93,22**	**61,39**	**96,61**	**50.900.000**	**96,61**	**19,70**	Kec. Cigugur	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24,00	242.547.000	100,00	20.150.000	14,00	20.890.000	14,00	12.750.000	100,00	61,03	114,00	49.400.000	66,67	20,37	Kec. Cigugur	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5,00	1.802.000	100,00	-	1,00	200.000	1,00	-	100,00	-	50,50	-	-	-	Kec. Cigugur	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5,00	1.802.000	100,00	-	1,00	200.000	1,00	200.000	100,00	100,00	50,50	-	-	-	Kec. Cigugur	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	5,00	1.802.000	100,00	-	1,00	200.000	1,00	174.000	100,00	87,00	50,50	-	-	-	Kec. Cigugur	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5,00	1.802.000	100,00	-	1,00	374.000	1,00	374.000	100,00	100,00	50,50	-	-	-	Kec. Cigugur	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	17,00	8.647.500	100,00	-	1,00	124.000	-	-	-	-	100,00	1.500.000	588,24	17,35	Kec. Cigugur	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											83,33	58,01						
Predikat Kinerja											(T)	(R)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**persen**	**100,00**	**7.331.630.056**	**100,00**	**1.121.317.023**	**71,00**	**1.327.642.520**	**71,00**	**989.013.716**	**100,00**	**74,49**	**85,50**	**2.053.746.752**	**85,50**	**28,01**	Kec. Cigugur	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	Orang/bulan	56,00	7.080.112.056	100,00	1.101.167.023	11,00	1.305.797.520	11,00	975.618.716	100,00	74,71	111,00	2.001.356.752	198,21	28,27	Kec. Cigugur	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	264,00	221.898.500	100,00	20.150.000	60,00	21.345.000	30,00	13.240.000	50,00	62,03	130,00	49.400.000	49,24	22,26	Kec. Cigugur	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	Laporan	9,00	20.152.000	100,00	-	1,00	300.000	1,00	155.000	100,00	51,67	101,00	2.990.000	1.122,22	14,84	Kec. Cigugur	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	5,00	9.467.500	100,00	-	-	200.000	-	-	-	-	100,00	-	2.000,00	-	Kec. Cigugur	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	62,50	47,10						
										Predikat Kinerja	(R)	(SR)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Da	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**persen**	**100,00**	**181.980.000**	**100,00**	**20.150.000**	**61,00**	**20.930.000**	**60,07**	**13.280.000**	**98,47**	**63,45**	**80,03**	**49.400.000**	**102,00**	**27,15**	Kec. Cigugur	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	laporan	60,00	1.802.000	100,00	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dikelola	Laporan	61,00	180.178.000	100,00	20.150.000	61,00	20.930.000	61,00	13.280.000	100,00	63,45	103,00	49.400.000	24,59	27,42	Kec. Cigugur	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	63,45						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik**	**persen**	**100,00**	**201.450.000**	**100,00**	**12.100.000**	**73,00**	**19.334.565**	**72,00**	**12.719.565**	**98,63**	**65,79**	**86,00**	**27.400.000**	**109,00**	**13,60**	Kec. Cigugur	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Paket	2,00	10.000.000	100,00		26,00	1.469.565	1,00	1.469.565	3,85	100,00	-	-	-	-	Kec. Cigugur	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	Dokumen	61,00	133.800.000	100,00	12.100.000	10,00	17.115.000	10,00	10.500.000	100,00	61,35	21,00	27.400.000	34,42	20,48	Kec. Cigugur	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	60,00	7.650.000	100,00	-	26,00	750.000	2,00	750.000	7,69	100,00	-	-	-	-	Kec. Cigugur	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	55,00	50.000.000	100,00	-	11,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	37,18	87,12						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**persen**	**100,00**	**496.963.091**	**100,00**	**38.609.050**	**103,00**	**38.095.924**	**44,51**	**9.567.815**	**43,22**	**25,12**	**72,26**	**255.340.750**	**141,00**	**51,38**	Kec. Cigugur	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	5,00	13.415.884	100,00	3.268.000	2,00	3.034.124	2,00	2.063.815	100,00	68,02	102,00	5.331.815	2.040,00	39,74	Kec. Cigugur	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Paket	1,00	246.583.732	100,00	18.992.500	-	-	-	-			-	18.992.500	-	7,70	Kec. Cigugur	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	15,00	23.920.475	100,00	2.599.750	3,00	1.500.000	3,00	1.134.000	100,00	75,60	103,00	3.733.750	686,67	15,61	Kec. Cigugur	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	240,00	24.095.000	100,00	4.110.000	3,00	3.916.800	4,00	1.470.000	133,33	37,53	104,00	5.580.000	43,33	23,16	Kec. Cigugur	
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1,00	10.000.000				-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan	475,00	178.948.000	100,00	9.638.800	95,00	29.645.000	28,00	4.900.000	29,47	16,53	128,00	14.538.800	26,95	8,12	Kec. Cigugur	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	90,70	49,42						
										Predikat Kinerja	(ST)	(SR)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi**	**persen**	**100,00**	**96.426.475**	**200,00**	**-**	**8,00**	**7.650.000**	**8,00**	**6.789.541**	**100,00**	**88,75**	**104,00**	**-**	**-**	**-**	Kec. Cigugur	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	2,00	54.000.000			8,00	7.650.000	1,00	6.789.541	12,50	88,75	-	-	-	-	Kec. Cigugur	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang diadakan	Unit	8,00	37.426.475	100,00	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	Unit	1,00	5.000.000	100,00	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**persen**	**100,00**	**771.517.335**	**100,00**	**76.328.684**	**176,00**	**118.456.879**	**161,37**	**73.702.653**	**91,69**	**62,22**	**130,68**	**180.505.798**	**275,00**	**23,40**	Kec. Cigugur	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Laporan	60,00	11.178.000	100,00	860.000	170,00	500.000	47,00	390.000	27,65	78,00	147,00	1.770.000	245,00	15,83	Kec. Cigugur	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik disediakan	Laporan	120,00	146.793.000	100,00	18.968.684	2,00	30.584.500	2,00	19.558.401	100,00	63,95	102,00	38.495.798	85,00	26,22	Kec. Cigugur	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	Laporan	240,00	613.546.335	100,00	56.500.000	4,00	87.372.379	4,00	53.754.252	100,00	61,52	104,00	140.240.000	43,33	22,86	Kec. Cigugur	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	75,88	79,09						
										Predikat Kinerja	(ST)	(T)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**persen**	**100,00**	**61.834.346**	**100,00**	**31.514.248**	**8,00**	**52.363.042**	**7,27**	**34.686.200**	**90,86**	**66,24**	**53,63**	**47.586.944**	**115,00**	**48,74**	Kec. Cigugur	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	25,00	56.004.346	100,00	30.014.248	5,00	47.113.042	5,00	30.561.200	100,00	64,87	20,00	40.255.844	80,00	71,88	Kec. Cigugur	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya yang dikelola	Unit	5,00	5.830.000	100,00	1.500.000	3,00	5.250.000	3,00	4.125.000	100,00	78,57	3,00	6.560.000	60,00	112,52	Kec. Cigugur	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	71,72						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**79,57**	**56,38**						
										Predikat Kinerja	**(T)**	**(R)**						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**persen**	**100,00**	**562.405.000**	**100,00**	**-**		**-**	**-**	**-**			**50,00**	**128.000.000**	**100,00**	**22,76**	Kec. Cigugur	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**persen**	**100,00**	**66.750.000**	**100,00**	**-**		**-**	**-**	-			**50,00**	**128.000.000**	**100,00**	**22,76**	Kec. Cigugur	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksankan	Laporan	60,00	66.750.000	100,00			-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**	**persen**	**100,00**	**495.655.000**				**-**	**-**	**-**			**-**	**128.000.000**	**-**	**-**	Kec. Cigugur	
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah koordinasi pemerintahan perangat daerah dan instansi vertikal terkait yang di selenggarakan	Laporan	60,00	495.655.000	100,00	-		-	-	-			5,00	128.000.000	8,33	25,82	Kec. Cigugur	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**-**	**-**						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**persen**	**100,00**	**73.293.850**	**100,00**			**-**	**-**	**-**			**50,00**	**-**	**-**	**-**	Kec. Cigugur	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**persen**	**100,00**	**73.293.850**	**100,00**			**-**	**-**	-			**50,00**	**-**	**-**	**-**	Kec. Cigugur	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di monitoring pelaksanaan musrenbangnya	Lembaga	105,00	24.293.850	100,00			-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	39,00	49.000.000					-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**-**	**-**						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**persen**	**100,00**	**21.457.850**	**100,00**			**-**	**-**	**-**			**50,00**	**-**	**-**	**-**	Kec. Cigugur	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**persen**	**100,00**	**21.457.850**	**100,00**			**-**	**-**	-			**50,00**	**-**	**-**	**-**	Kec. Cigugur	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan harmonisasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	60,00	21.457.850	100,00			-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**-**	**-**						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Penyelelnggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase Penyelelnggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**persen**	**100,00**	**17.704.790**	**100,00**			**-**	**-**	**-**			**50,00**	**-**	**-**	**-**	Kec. Cigugur	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan**	**persen**	**100,00**	**17.704.790**	**100,00**			**-**	**-**	-			**50,00**	-	-	-	Kec. Cigugur	
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen verifikasi bantuan keuangan Desa	Dokumen	35,00	17.704.790	100,00			-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**-**	**-**						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemeintahan Desa	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemeintahan Desa**	**persen**	**100,00**	**483.928.228**	**100,00**	**11.067.000**	**21,00**	**31.463.422**	**19,55**	**29.293.422**	**93,10**	**93,10**	**59,78**	**30.350.000**	**59,78**	**6,27**	Kec. Cigugur	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa**	**persen**	**100,00**	**483.928.228**	**100,00**	**11.067.000**	**21,00**	**31.463.422**	**19,55**	**29.293.422**	**93,10**	**93,10**	**59,78**	**30.350.000**	**59,78**	**6,27**	Kec. Cigugur	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	35,00	143.566.300	100,00		12,00	2.170.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cigugur	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah DURKPDes yang tersusun	Dokumen	5,00	256.795.628	100,00	11.067.000	2,00	29.293.422	2,00	29.293.422	100,00	100,00	102,00	40.360.422	2.040,00	11,82	Kec. Cigugur	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi pembangunan desa wisata	Laporan	35,00	83.566.300	100,00			-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	50,00	50,00						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**93,10**	**93,10**						

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Predikat Kinerja	(ST)	(ST)						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	96,55	82,45						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	(ST)	(T)						
KECAMATAN LANGKAPLANCAR				**14.722.269.990**		**1.154.908.363**		**1.162.436.203**		**886.805.395**		**76,29**		**2.041.713.758**		**13,87**		
UNSUR KEWILAYAHAN				**14.722.269.990**		**1.154.908.363**		**1.162.436.203**		**886.805.395**		**76,29**		**2.041.713.758**		**13,87**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas**	**%**	**100,00**	**14.424.082.840**	**91,00**	**1.154.908.363**	**100,00**	**1.131.455.125**	**100,00**	**886.805.395**	**100,00**	**78,38**	**95,50**	**2.041.713.758**	**95,50**	**14,15**	Kec. Langkaplancar	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu**	**%**	**100,00**	**182.174.640**	**92,00**	**23.550.000**	**100,00**	**20.400.000**	**100,00**	**12.750.000**	**100,00**	**62,50**	**96,00**	**36.300.000**	**96,00**	**19,93**	Kec. Langkaplancar	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	14,00	182.174.640	6,00	23.550.000	12,00	20.400.000	12,00	12.750.000	100,00	62,50	18,00	36.300.000	128,57	19,93	Kec. Langkaplancar	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	100,00	62,50						
										Predikat Kinerja	(ST)	(R)						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**%**	**100,00**	**12.058.981.459**	**90,00**	**948.212.463**	**100,00**	**862.367.898**	**100,00**	**742.692.845**	**100,00**	**86,12**	**95,00**	**1.690.905.308**	**95,00**	**14,02**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	Orang dan Bulan	7 dan 12	11.608.945.557	7 dan 12	924.662.463	7 dan 12	840.487.184	7 dan 12	729.942.845	100,00	86,85	7 dan 12	1.654.605.308	-	14,25	Kec. Langkaplancar	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60,00	188.279.740	23,00	23.550.000	60,00	20.400.000	12,00	12.750.000	20,00	62,50	37,00	36.300.000	61,67	19,28	Kec. Langkaplancar	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	Kegiatan dan Laporan	3 dan 1	115.233.762	3 dan 1	-	3 dan 1	740.130	9,00	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	1 dan 1	146.522.400	1 dan 1	-	1,00	740.584	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	30,00	37,34						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**Jenis, Unit/Buah**	**61 dan 170**	**179.489.940**	**84,00**	**23.550.000**	**61 dan 170**	**20.614.880**	**61 dan 170**	**12.750.000**	**100,00**	**61,85**	**#VALUE!**	**36.300.000**		**20,22**		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	Laporan	12,00	12.210.200	12,00	-	12,00	214.880	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jenis dan Unit/Buah	61 dan 170	167.279.740	1,00	23.550.000	12,00	20.400.000	12,00	12.750.000	100,00	62,50	13,00	36.300.000	4,12	21,70	Kec. Langkaplancar	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	50,00	31,25						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**185.106.632**	**54,00**	**14.100.000**	**100,00**	**22.298.550**	**100,00**	**15.398.550**	**100,00**	**69,06**	**77,00**	**29.498.550**	**77,00**	**15,94**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stel	25,00	42.735.700	25,00	-	25,00	4.898.550	6,00	4.898.550	24,00	100,00	-	4.898.550	-	11,46	Kec. Langkaplancar	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	Kegiatan dan Laporan	24 dan 12	142.370.932	24 dan 12	14.100.000	12,00	17.400.000	12,00	10.500.000	100,00	60,34	24 dan 12	24.600.000	-	17,28	Kec. Langkaplancar	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	62,00	80,17						
										Predikat Kinerja	(R)	(T)						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**%**	**100,00**	**379.004.670**	**99,00**	**10.630.000**	**100,00**	**28.657.859**	**100,00**	**11.368.000**	**100,00**	**39,67**	**99,50**	**21.998.000**	**99,50**	**5,80**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis dan Unit/Buah	2 dan 29	162.259.700	2 dan 29	-	2 dan 29	3.565.725	12,00	-	-	-	57,00	-	96,55	-	Kec. Langkaplancar	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Jenis dan Unit/Buah	38 dan 1528	122.496.020	140,00	9.246.000	45 dan 1528	17.994.254	3,00	9.828.000	-	54,62	143,00	19.074.000	-	15,57	Kec. Langkaplancar	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jenis dan Lembar	2 dan 12000	54.532.840	40,00	784.000	2 dan 12000	3.499.880	2 dan 6000	-	-	-	-	784.000	-	1,44	Kec. Langkaplancar	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	2,00	24.453.360	2,00	600.000	2,00	3.598.000	2,00	-	100,00	-	2,00	600.000	100,00	2,45	Kec. Langkaplancar	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kegiatan dan Laporan	90 dan 90	15.262.750	4,00	-		-	3,00	1.540.000			-	1.540.000	-	10,09	Kec. Langkaplancar	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	25,00	13,65						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**%**	**100,00**	**259.466.750**	-	-	**100,00**	**22.265.938**	-	-	-	-	-	-	-	-		

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jenis dan Unit/Buah	3 dan 7	183.153.000	-	-	3 dan 7	14.003.340	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	Jenis dan Unit/Buah	1 dan 1	76.313.750	-	-	1 dan 1	8.262.598	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**100,00**	**860.256.764**	**100,00**	**105.377.000**	**100,00**	**113.850.000**	**100,00**	**71.548.000**	**100,00**	**62,84**	**100,00**	**176.925.000**	**125,00**	**20,57**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Buah	240,00	10.657.650	240,00	850.000	240,00	1.650.000	-	-	-	-	240,00	850.000	100,00	7,98	Kec. Langkaplancar	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Rekening dan Bulan	2 dan 12	109.525.494	2 dan 12	17.202.000	2 dan 12	18.600.000	2 dan 3	13.048.000	-	70,15	15,00	30.250.000	12,50	27,62	Kec. Langkaplancar	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Bulan dan Orang	12 dan 4	740.073.620	12 dan 6	87.325.000	12 dan 4	93.600.000	3 dan 4	58.500.000	-	62,50	15,00	145.825.000	12,50	19,70	Kec. Langkaplancar	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	44,22						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**100,00**	**319.601.985**	**100,00**	**29.488.900**	**100,00**	**41.000.000**	**100,00**	**20.298.000**	**100,00**	**49,51**	**100,00**	**49.786.900**	**100,00**	**15,58**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	7,00	228.025.485	7,00	29.488.900	7,00	36.500.000	7,00	20.298.000	100,00	55,61	14,00	49.786.900	200,00	21,83	Kec. Langkaplancar	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	Unit	20,00	91.576.500	2,00	-	20,00	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	50,00	27,81						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**87,50**	**53,94**						
										Predikat Kinerja	**(T)**	**(R)**						
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**%**	**100,00**	**298.187.150**	**100,00**	**-**	**100,00**	**30.981.078**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,00**	**-**	**50,00**	**-**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa**	**%**	**100,00**	**298.187.150**	**100,00**	**-**	**100,00**	**30.981.078**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,00**	**-**	**50,00**	**-**	Kec. Langkaplancar	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Kali	15,00	91.576.500	-	-	15,00	980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	
	Jumlah desa yang melaksanakan PILKADes serentak (tahun 2022)	Desa	15,00	10.000.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah DURKPDes yang tersusun	Dokumen	15,00	9.157.650	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	
	Jumlah kegiatan penyelengaraan musrenbang kecamatan	Kegiatan	2,00	187.453.000	2,00	-	2,00	30.001.078	2,00	29.930.000	100,00	99,76	2,00	29.930.000	100,00	15,97	Kec. Langkaplancar	
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	50,00	49,88						
										Predikat Kinerja	(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-						
										Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**50,00**	**39,19**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(SR)**	**(SR)**						

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja	:	1. Adanya komitmen yang tinggi dari aparatur pelaksana kegiatan dan pemahaman terhadap tugas dan fungsinya, sehingga dapat melaksanakan kegiatan sesuai target kinerja; 2. Adanya perencanaan yang tepat; 3. Adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur pelaksana kegiatan; 4. Adanya kerja sama yang baik antar stakeholder; 5. Ketersediaan dana tepat waktu; 6. 6. Adanya sumber pendanaan lain diluar APBD.
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Kegiatan monitoring pengendalian dan evaluasi secara internal di tiap SKPD belum terlaksana secara optimal; 2. Kurangnya kuantitas SDM di beberapa Perangkat Daerah;
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	Meningkatkan koordinasi dan melaksanakan pengendalian serta evalusi terhadap program kegiatan yang ada di Perangkat Daerah
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	Memaksimalkan fungsi aplikasi Sigenah dalam melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja program/kegiatan secara berkala.

Pemerintah
Kabupaten Pangandaran

LAMPIRAN II

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran
2025

@pangandaranbappeda

https://bappeda.pangandarankab.go.id

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA						**682.504.920.920,00**							**458.340.278.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**604.319.720.920,00**							**431.513.528.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**604.319.720.920,00**							**431.513.528.500,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas***	**95 %** **95 %** **85 %** **96 %**			**94 %** **94 %** **84 %** **95 %**	**343.957.962.378,00**						**95 %** **95 %** **85 %** **96 %**	**313.819.788.000,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu*	95 %			94 %	63.888.500,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran	95 %	834.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	20.864.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		93.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	16.499.500,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.525.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		704.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		3.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	100 %			99 %	338.148.365.712,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran	100 %	280.891.880.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2800 Orang/bulan	338.086.485.712,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		280.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	27.720.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		27.980.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		76.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	15.910.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		16.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.400.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		6.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		7.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	5.400.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		5.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.950.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		2.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik*	322 unit/jenis			322 jenis	240.811.500,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran	322 unit/jenis	518.880.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	76.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		77.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	93.181.500,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		93.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	11.520.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.700.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		3.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	9.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	21.420.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		302.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	26.490.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		27.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik*	100 %			99 %	619.090.000,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran	100 %	742.063.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	8.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	117.218.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		116.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	184.260.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		52.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		144.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		142.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				25 Orang	24.612.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	47.400.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		48.028.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				265 Orang	70.900.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		73.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	130.200.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		134.635.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	100 %			99 %	824.838.218,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran	100 %	1.041.405.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.453.158,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		21.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	205.060.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		206.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	27.310.400,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		27.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	139.356.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		139.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	34.851.660,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		35.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	3.180.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		3.175.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	30.015.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		56.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	342.312.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		436.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	300.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		92.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		23.320.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi*	100 %			99 %	988.766.850,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran	100 %	1.094.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		344.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				203 Unit	175.857.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		183.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	382.100.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		383.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	168.750.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		170.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	12.059.850,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		13.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 %			99 %	2.197.990.010,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran	100 %	27.749.110.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	18.414.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		19.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	638.176.010,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		26.501.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	37.800.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		38.160.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.503.600.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		1.189.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 %			99 %	874.211.588,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran	100 %	947.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				34 Unit	52.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		99.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	26.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		53.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				8 Unit	5.250.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		5.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	64.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		61.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				320 Unit	500.595.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		500.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				320 Unit	45.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		45.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	100.599.948,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		100.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	11.099.640,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		11.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	15.467.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		15.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				3 Ha	53.200.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pegawai dan Kantor Disdikpora Kabupaten Pangandaran		53.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan*** ***Persentase Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Pandemi*** ***Persentase Layanan Pendidikan Non Formal Dan Informal*** ***Persentase Tingkat Budi Pekerti Peserta Didik***	**100 %** **88 %** **96 %** **100 %**			**100 %** **96 %** **86 %** **93 %**	**256.223.758.844,00**						**100 %** **88 %** **96 %** **100 %**	**113.985.740.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah satuan pendidikan SD yang terkelola*	285 sekolah			285 sekolah	73.759.615.665,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan	285 sekolah	48.990.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	389.907.812,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	899.999.980,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Satuan Pendidikan		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	581.704.500,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	249.999.997,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	583.344.600,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	400.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	400.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1.934.003.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				33810 Peserta Didik	7.421.040.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		10.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				15998 Orang	7.246.600.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		16.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				282 Satuan Pendidikan	5.305.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		7.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				287 Satuan Pendidikan	29.130.300.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	42.840.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	150.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12 Dokumen	399.999.672,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	6.700.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		6.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	300.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	Satuan Pendidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	100.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				10 Satuan Pendidikan	119.999.900,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	6.480.369.900,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				31900 Peserta Didik	3.550.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		3.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1.674.106.304,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah pendidikan SMP yang terkelola*	53 sekolah			53 sekolah	153.444.722.355,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan	53 sekolah	38.935.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	254.954.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		380.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	391.020.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	300.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		380.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1.010.740.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		430.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	324.400.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	250.090.356,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	78.983.999,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	732.725.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	273.386.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		290.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	324.400.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1.160.430.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				13545 Peserta Didik	2.600.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		2.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				12501 Peserta Didik	5.560.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		8.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				9859 Orang	6.226.220.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		10.860.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				54 Satuan Pendidikan	5.292.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		6.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				54 Satuan Pendidikan	15.243.600.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	42.840.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	200.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				54 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				54 Satuan Pendidikan	660.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		680.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	226.128.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		380.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				14200 Paket	111.258.687.800,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		5.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	718.998.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	389.819.200,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Jumlah pendidikan PAUD yang terkelola*	263 lembaga			263 lembaga	14.380.791.224,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Meningkatnya Layanan Pendidikan	263 lembaga	12.828.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				8230 Peserta Didik	600.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Meningkatnya Layanan Pendidikan		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				12499 Orang	3.309.479.950,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Meningkatnya Layanan Pendidikan		8.337.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				262 Satuan Pendidikan	279.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Meningkatnya Layanan Pendidikan		289.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				282 Satuan Pendidikan	5.090.400.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Meningkatnya Layanan Pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				262 Orang	114.999.700,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Meningkatnya Layanan Pendidikan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	42.840.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Meningkatnya Layanan Pendidikan		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	200.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Meningkatnya Layanan Pendidikan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5 Dokumen	299.499.774,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Meningkatnya Layanan Pendidikan		75.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Meningkatnya Layanan Pendidikan		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				8375 Paket	2.500.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Meningkatnya Layanan Pendidikan		2.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				8230 Satuan Pendidikan	201.499.800,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Meningkatnya Layanan Pendidikan		202.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	1.643.072.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Meningkatnya Layanan Pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah pendidikan non formal/kesetaraan yang terkelola*	13 lembaga			13 Lembaga	14.638.629.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan	13 lembaga	13.232.240.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				910 Peserta Didik	535.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		540.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				7000 Orang	9.180.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		9.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				329 Orang	649.999.850,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				4 Satuan Pendidikan	725.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		770.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				13 Satuan Pendidikan	2.199.600.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				15 Orang	115.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	21.420.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				20 Dokumen	642.609.750,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		697.240.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				2500 Peserta Didik	370.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	***persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Standar Isi***	**56 %**			**56 %**	**2.017.999.698,00**						**56 %**	**2.073.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Persentase dokumen kurikulum yang dibuat*	60 % 60 %			58 %	1.019.999.854,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Siswa, Tenaga Pendidik	60 % 60 %	1.040.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Siswa, Tenaga Pendidik		180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				1000 Buku	514.999.854,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Siswa, Tenaga Pendidik		520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				100 Orang	215.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Siswa, Tenaga Pendidik		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Siswa, Tenaga Pendidik		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*persentase dokumen kurkulum yang dibuat*	60 % 60 %			58 %	997.999.844,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Siswa, Tenaga Pendidik	60 % 60 %	1.033.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	212.999.900,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Siswa, Tenaga Pendidik		228.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				11699 Buku	604.999.944,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Siswa, Tenaga Pendidik		615.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Siswa, Tenaga Pendidik		190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	***persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan***	**58 %**			**58 %**	**1.600.000.000,00**						**58 %**	**1.100.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan persentase PTK berkompeten*	52 % 0 %			80 % 80 %	1.600.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 % 0 %	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Dokumen	750.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Laporan	850.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	***persentase Layanan Literasi Siswa***	**64 %**			**64 %**	**520.000.000,00**						**64 %**	**535.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Layanan Literasi Sswa* *persentase layanan yang dilakukan*	65 % 65 %			65 % 64 %	520.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	siswa	65 % 65 %	535.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.06.2.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota														
			Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi				4280 Buku	215.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	siswa		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				215 Peserta Didik	215.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	siswa		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun				1 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	siswa		95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**78.185.200.000,00**							**26.826.750.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**78.185.200.000,00**							**26.826.750.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Presentase pembinaan wirausaha muda dan Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan Cakupan pembinaan wirausaha muda dan Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan***	**80 %**			**80 % 80 %**	**15.888.100.000,00**						**80 %**	**16.441.750.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Persentase pemuda Yang mengikuti pembinaan*	80 %			80 %	14.816.100.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	80 %	15.359.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				153 Orang	325.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				3065 Orang	14.306.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		14.358.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				20 Orang	120.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				4 Unit	100.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		451.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentasi peserta yang mengikuti kegiatan*	80 %			80 %	1.072.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Meningkatnya Jumlah Pemuda dan Atlit Berprestasi yang mendapat penghargaan baik tingkat Provinsi, Nasional atau Internasiona	80 %	1.082.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1.072.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Meningkatnya Jumlah Pemuda dan Atlit Berprestasi yang mendapat penghargaan baik tingkat Provinsi, Nasional atau Internasiona		1.082.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Persentase Prestasi Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional***	**80 %**			**80 %**	**62.167.100.000,00**						**80 %**	**10.245.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*persentase peralatan yang disediakan*	80 %			80 %	53.570.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Atlet Pelajar	80 %	1.260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota				1 Unit	70.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Atlet Pelajar		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				15 Unit	53.500.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Atlet Pelajar		1.185.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase jumlah peserta yang mengikuti partisipasi dalam penyelenggaraan*	80 %			80 %	3.405.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Meningkatnya Jumlah Pemuda dan Atlit Berprestasi yang mendapat penghargaan baik tingkat Provinsi, Nasional atau Internasiona	80 %	3.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	1.089.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Meningkatnya Jumlah Pemuda dan Atlit Berprestasi yang mendapat penghargaan baik tingkat Provinsi, Nasional atau Internasiona		1.110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				24 Orang	2.316.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Meningkatnya Jumlah Pemuda dan Atlit Berprestasi yang mendapat penghargaan baik tingkat Provinsi, Nasional atau Internasiona		2.340.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*persentase juara yang diraih*	80 %			80 %	2.262.000.000,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Atlet dan Organisasi Olahraga	80 %	2.385.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				7 Orang	1.150.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Atlet dan Organisasi Olahraga		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)														
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				100 Pelatda	910.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Atlet dan Organisasi Olahraga		980.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				4 Orang	202.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Atlet dan Organisasi Olahraga		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*persentase Organisasi yang di Bina*	80 %			80 %	2.790.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Organisasi Olahraga	80 %	2.850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				1 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Organisasi Olahraga		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2.650.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Organisasi Olahraga		2.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*persentase peserta yang mengikuti Festival Senam*	80 %			80 %	140.100.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Atlet dan Masyarakat	80 %	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				10 Unit	100.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Atlet dan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	140.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Atlet dan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	***persentase Pemuda Yang aktif dalam Kepramukaan***	**80 %**			**80 %**	**130.000.000,00**						**80 %**	**140.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan persentase peserta yang mengikuti jambore*	1 organisasi			1 organisasi 80 %	130.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Organisasi Kepramukaan	1 organisasi	140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				1 Organisasi	130.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Organisasi Kepramukaan		140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS KESEHATAN						**201.897.764.000,00**							**177.588.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**201.897.764.000,00**							**177.588.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**201.897.764.000,00**							**177.588.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas***	**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**			**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**90.504.772.330,00**						**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**97.408.000.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 %			100 %	129.215.000,00			-	-	DINKES Pangandaran	100 %	240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	129.215.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %			100 %	84.435.571.625,00			-	-	DINKES Pangandaran	100 %	90.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1192 Orang/bulan	84.435.571.625,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DINKES Pangandaran		90.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100 %			100 %	50.000.000,00			-	-	DINKES Pangandaran	100 %	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*	100 %			100 %	63.000.000,00			-	-	DINKES Pangandaran	100 %	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	63.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah*	100 %			100 %	614.035.000,00			-	-	DINKES Pangandaran	100 %	705.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	220.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	39.950.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	14.950.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	299.135.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	90 %			90 %	796.760.660,00			-	-	DINKES Pangandaran	90 %	4.110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		3.110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	146.760.660,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	350.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	90 %			90 %	3.602.940.045,00			-	-	DINKES Pangandaran	90 %	1.110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	443.559.545,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.149.380.500,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	90 %			90 %	813.250.000,00			-	-	DINKES Pangandaran	90 %	793.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	297.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		297.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				67 Unit	50.250.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	466.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase pelayanan kesehatan masyarakat yang terpenuhi*** ***Persentase sistem informasi yang terkelola*** ***Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi***	**90 %** **90 %** **90 %**			**90 %** **90 %** **90 %**	**110.892.991.670,00**						**90 %** **90 %** **90 %**	**79.080.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	-			90 %	47.706.970.670,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Pengguna Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	-	17.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	6.000.000.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Pengguna Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				10 Unit	5.000.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Pengguna Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				14 Unit	17.133.190.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Pengguna Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				20 Unit	2.900.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Pengguna Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat Pengguna Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				104 Unit	5.000.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Pengguna Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				60 Unit	373.780.670,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Pengguna Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	9.000.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat Pengguna Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP		15.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				15 Paket	300.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Pengguna Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	90 % 90 % 90 %			90 %	62.936.021.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP	90 % 90 % 90 %	61.560.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5728 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5467 Orang	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5085 Orang	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25214 Orang	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48956 Orang	2.500.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				255954 Orang	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				78323 Orang	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				116510 Orang	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4146 Orang	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				578 Orang	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4627 Orang	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				7625 Orang	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	2.261.421.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	40.329.600.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	14.495.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				4 Unit	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			90 %	250.000.000,00			-	-	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				4 Unit	250.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat***	**90 %**			**90 %**	**300.000.000,00**						**90 %**	**500.000.000,00**	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	90 %			90 %	300.000.000,00			-	-	SDM Kesehatan	90 %	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				268 Orang	300.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	SDM Kesehatan		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Persentase farmasi, alat kesehatan yang terpenuhi***	**90 %**			**90 %**	**200.000.000,00**						**90 %**	**600.000.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	90 %			90 %	100.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal serta UMOT	90 %	600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal serta UMOT		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	90 %			90 %	100.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Industri Rumah Tangga Penghasil Produk Pangan dan Minuman	90 %	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Industri Rumah Tangga Penghasil Produk Pangan dan Minuman		0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PADAHERANG						**5.000.000.000,00**							**4.040.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.000.000.000,00**							**4.040.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5.000.000.000,00**							**4.040.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas***	**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**			**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**5.000.000.000,00**						**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**4.040.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	5.000.000.000,00			-	-	Puskesmas Padaherang	100 %	4.040.000.000,00	PUSKESMAS PADAHERANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	5.000.000.000,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangpawitan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Padaherang		4.040.000.000,00	PUSKESMAS PADAHERANG
		PUSKESMAS SINDANGWANGI						**2.200.000.000,00**							**1.830.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.200.000.000,00**							**1.830.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.200.000.000,00**							**1.830.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik***	**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**			**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**2.200.000.000,00**						**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**1.830.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	2.200.000.000,00			-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Puskesmas Sindangwangi	100 %	1.830.000.000,00	PUSKESMAS SINDANGWANGI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.200.000.000,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Sindangwangi	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Puskesmas Sindangwangi		1.830.000.000,00	PUSKESMAS SINDANGWANGI
		PUSKESMAS MANGUNJAYA						**3.750.000.000,00**							**2.950.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.750.000.000,00**							**2.950.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.750.000.000,00**							**2.950.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas***	**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**			**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**3.750.000.000,00**						**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**2.950.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	3.750.000.000,00			-	-	Puskesmas Mangunjaya	100 %	2.950.000.000,00	PUSKESMAS MANGUNJAYA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.750.000.000,00	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Mangunjaya	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Mangunjaya		2.950.000.000,00	PUSKESMAS MANGUNJAYA
		PUSKESMAS KALIPUCANG						**4.500.000.000,00**							**3.800.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.500.000.000,00**							**3.800.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.500.000.000,00**							**3.800.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur***	**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**			**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**4.500.000.000,00**						**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**3.800.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	4.500.000.000,00			-	-	Puskesmas Kalipucang	100 %	3.800.000.000,00	PUSKESMAS KALIPUCANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.500.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Kalipucang, Kalipucang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Kalipucang		3.800.000.000,00	PUSKESMAS KALIPUCANG
		PUSKESMAS PANGANDARAN						**7.400.000.000,00**							**6.000.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.400.000.000,00**							**6.000.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**7.400.000.000,00**							**6.000.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi***	**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**			**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**7.400.000.000,00**						**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**6.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	7.400.000.000,00			-	-	Puskesmas Pangandaran	100 %	6.000.000.000,00	PUSKESMAS PANGANDARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	7.400.000.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Babakan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Pangandaran		6.000.000.000,00	PUSKESMAS PANGANDARAN
		PUSKESMAS SIDAMULIH						**1.233.600.000,00**							**1.300.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.233.600.000,00**							**1.300.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.233.600.000,00**							**1.300.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi***	**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**			**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**1.233.600.000,00**						**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**1.300.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	1.233.600.000,00			-	-	Puskesmas Sidamulih	100 %	1.300.000.000,00	PUSKESMAS SIDAMULIH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.233.600.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Sidamulih		1.300.000.000,00	PUSKESMAS SIDAMULIH
		PUSKESMAS CIKEMBULAN						**2.721.800.000,00**							**1.872.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.721.800.000,00**							**1.872.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.721.800.000,00**							**1.872.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi***	**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**			**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**2.721.800.000,00**						**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**1.872.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	2.721.800.000,00			-	-	Puskesmas Cikembulan	100 %	1.872.000.000,00	PUSKESMAS CIKEMBULAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.721.800.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Cikembulan		1.872.000.000,00	PUSKESMAS CIKEMBULAN
		PUSKESMAS PARIGI						**4.800.000.000,00**							**3.640.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.800.000.000,00**							**3.640.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.800.000.000,00**							**3.640.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi***	**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**			**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**4.800.000.000,00**						**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**3.640.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	4.800.000.000,00			-	-	Puskesmas Parigi	100 %	3.640.000.000,00	PUSKESMAS PARIGI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.800.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Parigi		3.640.000.000,00	PUSKESMAS PARIGI
		PUSKESMAS SELASARI						**1.165.200.000,00**							**1.150.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.165.200.000,00**							**1.150.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.165.200.000,00**							**1.150.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi***	**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**			**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**1.165.200.000,00**						**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**1.150.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	1.165.200.000,00			-	-	Puskesmas Selasari	100 %	1.150.000.000,00	PUSKESMAS SELASARI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.165.200.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Selasari	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Selasari		1.150.000.000,00	PUSKESMAS SELASARI
		PUSKESMAS CIJULANG						**4.500.000.000,00**							**3.020.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.500.000.000,00**							**3.020.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.500.000.000,00**							**3.020.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas***	**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**			**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**4.500.000.000,00**						**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**3.020.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	4.500.000.000,00			-	-	Puskesmas Cijulang	100 %	3.020.000.000,00	PUSKESMAS CIJULANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.500.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Cijulang		3.020.000.000,00	PUSKESMAS CIJULANG
		PUSKESMAS CIMERAK						**2.448.000.000,00**							**2.448.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.448.000.000,00**							**2.448.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.448.000.000,00**							**2.448.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi***	**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**			**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**2.448.000.000,00**						**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**2.448.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	2.448.000.000,00			-	-	Puskesmas Cimerak	100 %	2.448.000.000,00	PUSKESMAS CIMERAK
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.448.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cimerak, Sukajaya	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Cimerak		2.448.000.000,00	PUSKESMAS CIMERAK
		PUSKESMAS LEGOKJAWA						**2.400.000.000,00**							**2.400.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.400.000.000,00**							**2.400.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.400.000.000,00**							**2.400.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi***	**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**			**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**2.400.000.000,00**						**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**2.400.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	2.400.000.000,00			-	-	Puskesmas Legokjawa	100 %	2.400.000.000,00	PUSKESMAS LEGOKJAWA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.400.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cimerak, Legokjawa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Legokjawa		2.400.000.000,00	PUSKESMAS LEGOKJAWA
		PUSKESMAS CIGUGUR						**2.650.000.000,00**							**2.650.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.650.000.000,00**							**2.650.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.650.000.000,00**							**2.650.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur***	**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**			**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**2.650.000.000,00**						**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**2.650.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	2.650.000.000,00			-	-	Puskesmas Cigugur	100 %	2.650.000.000,00	PUSKESMAS CIGUGUR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.650.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cigugur, Cigugur	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Cigugur		2.650.000.000,00	PUSKESMAS CIGUGUR
		PUSKESMAS LANGKAPLANCAR						**3.250.000.000,00**							**3.250.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.250.000.000,00**							**3.250.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.250.000.000,00**							**3.250.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** **90 %** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** **90 %** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** **90 %** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** **90 %**					**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**3.250.000.000,00**						**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**3.250.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	3.250.000.000,00			-	-	Puskesmas Langkaplancar	100 %	3.250.000.000,00	PUSKESMAS LANGKAPLANCAR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.250.000.000,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Bangunjaya	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Langkaplancar		3.250.000.000,00	PUSKESMAS LANGKAPLANCAR
		PUSKESMAS JADIKARYA						**2.150.000.000,00**							**2.150.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.150.000.000,00**							**2.150.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.150.000.000,00**							**2.150.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** **90 %** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** **90 %** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** **90 %** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** **90 %**					**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**2.150.000.000,00**						**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**2.150.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	2.150.000.000,00			-	-	Puskesmas Jadikarya	100 %	2.150.000.000,00	PUSKESMAS JADIKARYA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.150.000.000,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Jadikarya	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Jadikarya		2.150.000.000,00	PUSKESMAS JADIKARYA
		RSUD PANDEGA						**120.000.000.000,00**							**117.500.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**120.000.000.000,00**							**117.500.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**120.000.000.000,00**							**117.500.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi***	**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**			**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**115.000.000.000,00**						**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**107.500.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*	100 %			100 %	115.000.000.000,00			-	-	RSUD Pandega	100 %	107.500.000.000,00	RSUD PANDEGA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	115.000.000.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	RSUD Pandega		107.500.000.000,00	RSUD PANDEGA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase pelayanan kesehatan masyarakat yang terpenuhi*** ***Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi*** ***Persentase sistem informasi yang terkelola***	**90 %** **90 %** **90 %**			**90 %** **90 %** **90 %**	**5.000.000.000,00**						**90 %** **90 %** **90 %**	**10.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	-			90 %	5.000.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	10.000.000.000,00	RSUD PANDEGA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				135 Unit	5.000.000.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		10.000.000.000,00	RSUD PANDEGA
		DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**384.825.291.973,00**							**445.740.031.852,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**384.825.291.973,00**							**445.740.031.852,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**382.267.291.973,00**							**431.890.031.852,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi***	**96 %** **96 %** **96 %** **96 %**			**94 %** **94 %** **94 %** **94 %**	**9.876.212.481,00**						**96 %** **96 %** **96 %** **96 %**	**12.651.720.235,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu*	95.89 %			94.27 %	489.651.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai	95.89 %	689.409.224,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	302.710.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai		669.409.224,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	186.941.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	95.89 %			94.27 %	6.111.724.469,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai	95.89 %	6.214.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61/12 Orang/bulan	5.576.748.469,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	297.268.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	146.508.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai		7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	91.200.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai		7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik*	95,89 %			94,27 %	54.800.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai	95,89 %	79.123.992,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	54.800.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai		79.123.992,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik*	95,89 %			94,27 %	10.500.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai	95,89 %	133.986.511,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				400 Unit	4.500.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai		43.986.511,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				60 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai		90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	95,89 %			94,27 %	521.273.108,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai	95,89 %	1.230.149.912,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	99.946.136,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	41.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai		230.149.912,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	340.326.972,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	95,89 %			94,27 %	395.300.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai	95,89 %	1.470.314.060,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	7.500.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai		370.314.060,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	7.800.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	380.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	95,89 %			94,27 %	2.130.591.500,00			-	-	Pegawai	95,89 %	2.182.532.519,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.500.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai		582.532.519,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	140.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.980.091.500,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah*	95,89 %			94,27 %	162.372.404,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai	95,89 %	652.204.017,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	117.372.404,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pegawai		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	45.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai		352.204.017,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik***	**72,57 %**			**72,57 %**	**14.795.500.000,00**						**72,57 %**	**47.370.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase Wilayah sungai yang terlindungi*	72,57 %			72,57 %	6.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Terkelolanya Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai	72,57 %	1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				15 Unit	6.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Terkelolanya Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai		1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Genangan yang tertangani* *Persentase Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik*	72,57 % 72,57 %			72,57 % 72,57 %	14.789.500.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran	72,57 % 72,57 %	45.470.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				4 KM	9.900.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		18.585.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0009	Peningkatan Bendung Irigasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan				20 Bendung	7.800.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				8 KM	14.500.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		14.385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				14 KM	261.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi														
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Bendung	6.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				40 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		5.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Cakupan Layanan Teknis Air Minum Dan Air Bersih***	**75 %**			**75 %**	**256.900.000,00**						**75 %**	**1.550.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rumah Tangga Terlayani akses Air Minum*	76 %			75 %	256.900.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Meningkatnya sistem penyediaan air minum di daerah kabupaten/kota	76 %	1.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				6 Dokumen	6.900.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Meningkatnya sistem penyediaan air minum di daerah kabupaten/kota		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				160 Liter/Detik	250.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Meningkatnya sistem penyediaan air minum di daerah kabupaten/kota		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Persampahan***	**100 %**			**100 %**	**4.800.000,00**						**100 %**	**750.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terbangunnya sarana persampahan*	100 %			100 %	4.800.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran	100 %	750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				40 Ton/hari	4.800.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Cakupan ketersediaan layanan air limbah***	**61,00 %**			**61,00 %**	**254.980.000,00**						**61,00 %**	**5.100.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengguna sanitasi aman*	61,50 %			61,00 %	254.980.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran	61,50 %	5.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				280 M³/Hari	140.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				260 Rumah Tangga	110.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				2 Dokumen	4.980.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Persentase Drainase Dan Gorong - Gorong Kabupaten Dalam Kondisi Baik***	**62 %**			**62 %**	**14.700.000,00**						**62 %**	**18.006.016.104,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jaringan drainase lingkungan yang berfungsi baik*	65,00 %			62,00 %	14.700.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran	65,00 %	18.006.016.104,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				10000 M	9.900.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		15.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				2 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		2.256.016.104,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	***Persentase Infrastruktur Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik***	**65 %**			**65 %**	**69.950.979.000,00**						**65 %**	**5.200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik*	68,00 %			65,00 %	69.950.979.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	-	68,00 %	5.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.2.01.0020	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				500 SR	49.991.502.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	-		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.2.01.0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan				210 Liter/Detik	19.959.477.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	-		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Persentase Sarana Pemerintahan Yang Terbangun***	**79,40 %**			**79,40 %**	**29.333.241.000,00**						**79,40 %**	**120.820.858.866,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase jumlah gedung kantor yang dibangun di pusat pemerintahan*	95,70 %			79,40 %	29.333.241.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	-	95,70 %	120.820.858.866,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	29.316.241.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	-		119.420.858.866,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				30 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	-		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Presentase Jalan Dalam Kondisi Mantap Persentase Jalan Baru Yang Terbangun***	**95,40 % 100 %**			**89,50 % 91,58 %**	**257.721.979.492,00**						**95,40 % 100 %**	**216.021.436.647,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Jalan penghubung antar wilayah yang terbangun Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap*	100 % 95,40 %			91,58 % 89,50 %	257.721.979.492,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran	100 % 95,40 %	216.021.436.647,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				8 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Diganti				2 Jembatan	8.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun				15 KM	10.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		30.555.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				50 KM	207.654.083.973,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		165.375.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1 KM	50.000.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				10 Jembatan	5.895.519,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				4 Jembatan	8.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	10.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		11.091.436.647,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				10 Jembatan	5.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	8.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dilebarkan				2 Jembatan	8.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah***	**47,54 %**			**47,54 %**	**58.000.000,00**						**47,54 %**	**4.420.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen RTRW yang ditetapkan*	3 Dokumen			1 Dokumen	27.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran	1 Dokumen	2.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				3 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang														
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang				1 Publikasi	5.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan Perencanaan tata ruang daerah Kabupaten/kota yang dilaksanakan*	100 %			60 %	7.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran	100 %	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan Pengendalian tata ruang daerah Kabupaten/kota yang dilaksanakan*	45 %			40 %	24.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran	45 %	1.620.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				1 Kasus	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				2 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR														
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				1 Kasus	7.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal														
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	5.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**2.558.000.000,00**							**13.850.000.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Jumlah Rumah Korban Bencana yang ditangani***	**50 Rumah**			**50 Rumah**	**530.000.000,00**						**50 Rumah**	**1.150.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	50 dokumen			50 dokumen	200.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran	50 dokumen	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				50 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Sosialiasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	15 kegiatan			3 kegiatan	10.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran	3 kegiatan	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				70 Orang	5.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				70 Orang	5.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi program kabupaten yang terbangun*	250 dokumen			50 dokumen	310.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran	50 dokumen	650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				2 Unit Rumah	10.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				3 Unit Rumah	200.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				3 Unit Rumah	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*	10 izin			10 izin	5.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran	10 izin	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				10 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	*Jumlah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)*	10 sertifikat			10 sertifikat	5.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	-	10 sertifikat	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)				10 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase Rumah Tidak Layak Huni***	**25,64 %**			**25,64 %**	**2.000.000.000,00**						**25,64 %**	**11.000.000.000,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*persentase jumlah rumah yang layak huni di kawasan kumuh*	25,39 %			25,64 %	2.000.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran	25,39 %	11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				125 Unit Rumah	2.000.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	***persentase PSU yang ditingkatkan***	**15 %**			**15 %**	**28.000.000,00**						**15 %**	**1.700.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Persentase penyelenggaraan PSU perumahan*	17 %			15 %	28.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran	17 %	1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				2 Lokasi	7.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		1.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				4 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang														
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat di Kabupaten Pangandaran		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**17.997.907.300,00**							**15.498.909.600,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.997.907.300,00**							**15.498.909.600,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**17.997.907.300,00**							**15.498.909.600,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi***	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**			**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**9.628.116.710,00**						**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**5.259.323.512,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu* *Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu* *Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu*	100 % 100 % 100 %			100 % 100 % 100 %	15.000.000,00			-	-	SATPOL PP	100 % 100 % 100 %	32.134.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SATPOL PP		32.134.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	100 %			100 %	2.492.100.000,00			-	-	SATPOL PP	100 %	3.622.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2.400.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	SATPOL PP		3.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SATPOL PP		45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	77.100.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SATPOL PP		77.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik* *Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik*	100 %			100 % 100 Jenis dan Unit/Buah	15.000.000,00			-	-	SATPOL PP	100 %	32.134.280,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SATPOL PP		32.134.280,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik*	100 %			100 %	189.590.583,00			-	-	SATPOL PP	100 %	230.134.010,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	174.590.583,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SATPOL PP		198.999.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				14 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SATPOL PP		31.134.210,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik*	100 %			100 %	227.511.727,00			-	-	SATPOL PP	100 %	248.130.348,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3.497.767,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SATPOL PP		3.497.767,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	45.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SATPOL PP		51.999.174,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	12.999.960,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SATPOL PP		12.999.960,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				17 Dokumen	16.014.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SATPOL PP		16.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	150.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SATPOL PP		163.133.447,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi*	100 %			100 %	250.000.000,00			-	-	SATPOL PP	100 %	250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	250.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SATPOL PP		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 %			100 %	5.988.664.400,00			-	-	SATPOL PP	100 %	364.690.624,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.750.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SATPOL PP		3.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	95.700.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SATPOL PP		110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5.889.214.400,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SATPOL PP		250.940.624,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 %			100 %	450.250.000,00			-	-	SATPOL PP	100 %	480.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	110.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SATPOL PP		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	320.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SATPOL PP		320.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20.250.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SATPOL PP		40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase capaian SPM trantibum* *Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)***	**61 % 100 %**			**61 % 100 %**	**7.713.923.440,00**						**61 % 100 %**	**9.201.101.588,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Gangguan Kantrantibum*	100 %			100 %	6.752.606.494,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat	100 %	8.515.455.942,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				161 Orang	300.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				4 Orang	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat														
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya				60 Orang	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				100 laporan	5.197.606.494,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat		7.770.455.942,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				15 Laporan	200.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				2 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				272 Unit	660.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati*	100 %			100 %	861.316.946,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat	100 %	685.645.646,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	196.950.100,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat		130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	614.366.846,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat		505.645.646,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Persentase Pembinaan PPNS*	5 %			100 %	100.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	SATPOL PP	- %	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	SATPOL PP		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran***	**-**			**100 %**	**655.867.150,00**						**-**	**1.038.484.500,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	380.876.450,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat	-	753.484.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				12 Dokumen	126.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat		687.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	59.885.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat		65.884.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				9 Orang	94.991.450,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran*	-			100 %	124.990.700,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat	-	125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				10 Dokumen	74.990.700,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				10 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran*	-			100 %	150.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat	-	160.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				50 Orang	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				2 Desa/Kelurahan	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**5.263.525.000,00**							**4.291.248.459,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.263.525.000,00**							**4.291.248.459,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**5.263.525.000,00**							**4.291.248.459,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Sarana Prasarana Kantor yang Terpenuhi*** ***Presentase Peningkatan Kompetensi Aparatur*** ***Presentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas*** ***Presentase Laporan Keuangan dengan kualitas baik***	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**			**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**3.359.520.006,00**						**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**4.211.248.459,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* *Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun*	100 %			100 % 100 %	1.685.950,00			-	-	Pemerintah dan Steakholder BPBD Kabupaten Pangandaran	100 %	49.920.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.190.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Steakholder BPBD Kabupaten Pangandaran		27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	495.950,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Steakholder BPBD Kabupaten Pangandaran		22.920.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	100 %			100 %	1.919.554.292,00			-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran	100 %	2.732.728.459,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1.918.714.292,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran		2.705.728.459,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	840.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran		27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Presentase Sarana prasarana kantor yang terpenuhi*	100 %			100 %	840.000,00			-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran	100 %	27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	840.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran		27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang Baik*	100 %			100 %	840.000,00			-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran	100 %	22.920.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	840.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran		22.920.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	100 %			100 %	223.228.034,00			-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran	100 %	350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	43.223.410,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran		110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				50 Paket	15.402.380,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	20.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	20.012.244,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	124.590.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi*	100 %			100 %	200.000.000,00			-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran	100 %	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 %			100 %	809.202.000,00			-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran	100 %	378.680.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				700 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	93.600.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	695.602.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran		148.680.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 %			100 %	204.169.730,00			-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran	100 %	450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	189.169.730,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran		410.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPBD Kabupaten Pangandaran		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Persentase Penanggulangan Bencana***	**100 %**			**100 %**	**1.904.004.994,00**						**100 %**	**80.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase/Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*	100 %			100 %	378.400.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	10 Kecamatan	100 %	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				200 Orang	78.400.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	10 Kecamatan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	10 Kecamatan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase/Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	100 %			100 %	757.105.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	10 Kecamatan	100 %	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				200 Orang	157.105.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	10 Kecamatan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	10 Kecamatan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	10 Kecamatan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase/Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	100 %			100 %	518.500.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	10 Kecamatan	100 %	80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				5 Orang	115.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	10 Kecamatan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				5 Orang	278.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	10 Kecamatan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	125.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	10 Kecamatan		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase/Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*	100 %			100 %	249.999.994,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	10 Kecamatan	100 %	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				12 Kegiatan	249.999.994,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	10 Kecamatan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**13.073.462.085,00**							**26.340.686.125,93**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.382.462.085,00**							**13.100.288.438,36**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**9.382.462.085,00**							**13.100.288.438,36**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur***	**95 %** **95 %** **100 %** **100 %**			**94 %** **100 %** **100 %** **94 %**	**3.692.462.085,00**						**95 %** **95 %** **100 %** **100 %**	**6.196.611.492,87**	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	100 %			100 %	2.645.450.578,00			-	-	Pegawai Dinsospmd	100 %	3.800.727.676,17	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan			16 Orang/bulan	2.645.450.578,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Dinsospmd	16 Orang/bulan	3.800.727.676,17	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	96 %			96 %	150.852.703,00			-	-	Pegawai Dinsospmd	96 %	545.241.088,70	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	2.597.834,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinsospmd	1 Paket	14.641.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	45.000.457,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinsospmd	1 Paket	207.345.842,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	2.277.016,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinsospmd	1 Paket	18.601.390,50	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	2.031.340,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinsospmd	1 Paket	23.169.382,50	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen			1 Dokumen	25.174.800,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinsospmd	1 Dokumen	55.225.852,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	690 Laporan			100 Laporan	73.771.256,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinsospmd	100 Laporan	226.257.621,70	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi*	100 %			100 %	230.000.000,00			-	-	Pegawai Dinsospmd	100 %	1.043.806.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit			1 Unit	230.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinsospmd	1 Unit	1.043.806.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 %			100 %	562.806.400,00			-	-	Pegawai Dinsospmd	100 %	405.672.828,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinsospmd	12 Laporan	14.641.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			12 Laporan	75.406.400,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinsospmd	12 Laporan	161.051.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan			12 Laporan	485.400.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinsospmd	12 Laporan	229.980.828,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	90 %			88 %	103.352.404,00			-	-	Pegawai Dinsospmd	90 %	401.163.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit			2 Unit	49.058.398,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinsospmd	2 Unit	122.984.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit			11 Unit	48.289.936,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinsospmd	11 Unit	219.615.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit			7 Unit	3.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinsospmd	7 Unit	29.282.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	3.004.070,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinsospmd	1 Unit	29.282.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial*** ***Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial***	**80 %** **100 %**			**95 %** **75 %**	**66.000.000,00**						**80 %** **100 %**	**121.000.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)* *Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS*	1 Lembaga 13 Orang			1 Lembaga 13 Orang	66.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	PSKS	1 Lembaga 13 Orang	121.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang			13 Orang	66.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	PSKS	13 Orang	121.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial***	**8 %**			**8 %**	**4.370.000.000,00**						**8 %**	**3.981.760.749,49**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina*	7964 Orang			1200 Orang	3.350.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1200 Orang	714.273.973,49	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5954 Orang			1000 Orang	180.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	10000 Orang	307.461.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	205 Orang			20 Orang	3.040.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	20 Orang	45.100.413,49	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1233 Orang			180 Orang	130.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	180 Orang	361.712.560,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina*	900 KK			150 KK	1.020.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	150 KK	3.267.486.776,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	6 Dokumen			1 Dokumen	1.020.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1 Dokumen	3.267.486.776,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Presentase Keluarga Miskin yang Meningkat Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik***	**10 %**			**10 %**	**648.000.000,00**						**10 %**	**1.159.006.196,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan*	7 Dokumen			1 Dokumen	648.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	1.159.006.196,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	22711 Orang			17064 Orang	408.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat Tidak Mampu	22711 Orang	456.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	139955 Keluarga			105151 Keluarga	40.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat Tidak Mampu	139955 Keluarga	503.006.196,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Keluarga			300 Keluarga	200.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat Tidak Mampu	300 Keluarga	200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup***	**100 %**			**100 %**	**566.000.000,00**						**100 %**	**1.495.500.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang tertangani*	2500 KK			500 KK	200.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat yang terkena dampak Korban Bencana Alam	500 KK	423.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang			500 Orang	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat yang terkena dampak Korban Bencana Alam	500 Orang	211.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang			500 Orang	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat yang terkena dampak Korban Bencana Alam	500 Orang	211.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina*	14 Desa			2 Desa	366.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat	2 Desa	1.072.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	471 Orang			81 Orang	366.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat	81 Orang	1.072.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola***	**100 %**			**100 %**	**40.000.000,00**						**100 %**	**146.410.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan*	1 Taman Makam			1 Taman Makam	40.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Taman Makam Pahlawan Kabupaten	1 Taman Makam	146.410.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	31 Makam			31 Makam	40.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Taman Makam Pahlawan Kabupaten	31 Makam	146.410.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.691.000.000,00**							**13.240.397.687,57**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**3.691.000.000,00**							**13.240.397.687,57**	
1.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib***	**65 %**			**65 %**	**500.000.000,00**						**65 %**	**2.700.082.687,57**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	93 Desa			93 Desa	500.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Desa	93 Desa	2.700.082.687,57	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7 Dokumen			1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Desa	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Desa	1 Dokumen	329.336.056,57	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	7 Dokumen			1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Desa	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	3457 Orang			186 Orang	65.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Desa	186 Orang	500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	7 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Desa	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	93 Laporan			8 Laporan	150.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Desa	0 Laporan	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	7 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Desa	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5 Dokumen			1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Desa	1 Dokumen	117.128.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	17 Dokumen			1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Desa	1 Dokumen	453.618.631,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Presentase Lembaga Kemasyarakat Desa yang aktif***	**100 %**			**100 %**	**3.191.000.000,00**						**100 %**	**10.540.315.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*	5 Lembaga			5 Lembaga	3.191.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Lembaga	10.540.315.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	7 Dokumen			1 Dokumen	366.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.485.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	121.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7 Laporan			1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	219.615.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	21 Laporan			3 Laporan	2.275.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	7 Dokumen			1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.464.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS KETENAGAKERJAAN						**3.094.640.500,00**							**3.945.464.692,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.094.640.500,00**							**3.945.464.692,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**3.094.640.500,00**							**3.945.464.692,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur***	**95 %** **85 %** **85 %** **95 %**			**80 %** **90 %** **90 %** **80 %**	**2.267.261.000,00**						**95 %** **85 %** **85 %** **95 %**	**3.175.464.692,00**	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	95 %			90 %	1.633.073.764,00			-	-	Disnaker	95 %	2.190.602.254,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1.633.073.764,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Disnaker		2.190.602.254,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	95 %			90 %	95.133.636,00			-	-	Disnaker	95 %	460.250.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	65.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disnaker		270.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				65 Paket	4.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disnaker		60.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				45 Paket	5.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disnaker		10.250.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	20.633.636,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disnaker		120.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi*	95 %			90 %	120.000.000,00			-	-	Disnaker	95 %	130.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	120.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disnaker		130.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	95 %			90 %	358.553.600,00			-	-	Disnaker	95 %	210.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	32.400.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disnaker		60.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	326.153.600,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disnaker		150.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 %			95 %	60.500.000,00			-	-	Disnaker	100 %	184.612.438,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	56.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disnaker		100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disnaker		84.612.438,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	***Persentase Dokumen RTK yang Diselesaikan***	**90 %**			**90 %**	**70.000.000,00**						**90 %**	**120.000.000,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah Dokumen RTK*	2 Dokumen			2 Dokumen	70.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	-	Disnaker dan Perusahaan	2 Dokumen	120.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	-	Disnaker dan Perusahaan		100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				2 Orang	20.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Disnaker dan Perusahaan		20.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Persentase Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja Meningkat***	**80 %**			**80 %**	**421.379.500,00**						**80 %**	**250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Peserta Pelatihan*	200 Orang			200 Orang	421.379.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	Tenaga Kerja dan Pencari Kerja	200 Orang	250.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				200 Orang	421.379.500,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	Tenaga Kerja dan Pencari Kerja		250.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase Tenaga Kerja yang diserap***	**75 %**			**75 %**	**80.000.000,00**						**75 %**	**245.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi dalam mencari kerja*	850 Orang			800 Orang	30.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pencari Kerja	850 Orang	130.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				110 Orang	10.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pencari Kerja		110.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				170 Orang	20.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pencari Kerja		20.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Kasus CPMI dan PMI menurun*	100 %			95 %	50.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	PMI/CPMI	100 %	115.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	PMI/CPMI		115.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Persentase Kasus Ketenagakerjaan pada Perusahaan Menurun***	**90 %**			**90 %**	**256.000.000,00**						**90 %**	**155.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perusahaan yang difasilitasi untuk Pengesahan Peraturan Perusahaannya*	10 Dokumen			10 Dokumen	196.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Perusahan dan pekerja	10 Dokumen	105.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				5 Laporan	196.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Perusahan dan pekerja		105.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang ditangani*	5 Kegiatan			5 Kegiatan	60.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Perusahan dan pekerja	5 Kegiatan	50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				2 Perkara	60.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Perusahan dan pekerja		50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
		DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**9.934.147.000,00**							**5.122.264.410,68**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.934.147.000,00**							**5.122.264.410,68**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**4.167.681.122,00**							**1.812.281.997,68**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik***	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**			**100 %** **95 %** **95 %** **100 %**	**3.635.020.584,00**						**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**1.265.692.384,68**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu*	1. 100 2. 100 3. 100 %			1. 100 2. 100 3. 100 %	10.000.000,00			-	-	Pegawai DKBP3A	1. 100 2. 100 3. 100 %	10.000.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DKBP3A		10.000.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	100 %			100 %	2.680.576.974,00			-	-	Pegawai DKBP3A	100 %	5.000.002,68	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	2.675.576.974,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai DKBP3A		2,68	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DKBP3A		5.000.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik*	100 %			100 %	36.800.000,00			-	-	DKBP3A	100 %	50.000.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				104 Paket	36.800.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DKBP3A		50.000.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	100 %			100 %	173.925.505,00			-	-	DKBP3A	100 %	482.809.120,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6.564.615,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DKBP3A		10.328.800,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	49.742.197,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DKBP3A		200.000.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				28 Paket	13.505.586,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DKBP3A		158.310.320,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	11.675.091,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DKBP3A		17.050.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				9 Dokumen	13.838.016,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DKBP3A		14.520.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	78.600.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DKBP3A		82.600.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi*	100 %			100 %	277.886.740,00			-	-	DKBP3A	100 %	346.808.262,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				47 Unit	14.800.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DKBP3A		48.903.515,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	123.086.740,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DKBP3A		141.904.747,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	140.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DKBP3A		156.000.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 %			100 %	387.234.865,00			-	-	DKBP3A	100 %	282.840.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DKBP3A		7.700.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	33.298.865,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DKBP3A		33.340.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				228 Laporan	348.936.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DKBP3A		241.800.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 %			100 %	68.596.500,00			-	-	DKBP3A	100 %	88.235.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	31.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DKBP3A		30.000.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	22.596.500,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DKBP3A		28.496.500,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				106 Unit	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DKBP3A		29.738.500,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase kelembagaan PUG aktif*** ***Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah***	**96,15 %** **18,55 %**			**95,38 %** **16,79 %**	**178.848.784,00**						**96,15 %** **18,55 %**	**180.880.483,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah regulasi tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun*	132 Dokumen			1 Dokumen	44.548.784,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Perangkat Daerah	1 Dokumen	44.980.483,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	14.849.680,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Perangkat Daerah		14.980.483,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				1 Laporan	14.849.402,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Perangkat Daerah		15.000.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				100 Orang	14.849.702,00	Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Perangkat Daerah		15.000.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah*	100 Orang			100 Orang	134.300.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat	100 Orang	135.900.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	134.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Masyarakat		135.900.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar***	**88 %**			**88 %**	**26.516.984,00**						**88 %**	**27.028.726,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan yang dilaksanakan*	7 Regulasi			1 Regulasi	13.258.492,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Perangkat Daerah	1 Regulasi	13.514.363,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	13.258.492,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Perangkat Daerah		13.514.363,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia*	13 Kasus			2 Kasus	13.258.492,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat	2 Kasus	13.514.363,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Layanan	13.258.492,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat		13.514.363,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)***	**80 %**			**80 %**	**204.000.000,00**						**80 %**	**206.800.134,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah PEKKA yang mendapatkan pelatihan*	7 Kelompok			1 Kelompok	204.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Kelompok Masyarakat	1 Kelompok	206.800.134,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	204.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Kelompok Masyarakat		206.800.134,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak Persentase pemenuhan kelompok hak anak***	**Nindya (700-800) Nilai 100 %**			**Nindya (700-800) Nilai 100 %**	**56.350.944,00**						**Nindya (700-800) Nilai 100 %**	**62.400.054,00**	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan*	9 Lembaga			1 Lembaga	56.350.944,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	-	Lembaga Pemerintah	1 Lembaga	62.400.054,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	8.950.944,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	-	Lembaga Pemerintah		9.000.054,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	47.400.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Lembaga Pemerintah		53.400.000,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase penurunan kekerasan terhadap anak***	**12 %**			**12 %**	**66.943.826,00**						**12 %**	**69.480.216,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak*	11 Lembaga			1 Lembaga	32.710.944,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Lembaga Pemerintah	1 Lembaga	34.320.054,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA														
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				2 Orang	32.710.944,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Lembaga Pemerintah		34.320.054,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang tersedia*	10 Lembaga			1 Lembaga	11.410.944,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Lembaga Pemerintah	1 Lembaga	11.720.054,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				2 Orang	11.410.944,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Lembaga Pemerintah		11.720.054,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan*	10 Lembaga			1 Lembaga	22.821.938,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Lembaga Pemerintah	1 Lembaga	23.440.108,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar				1 Lembaga	11.410.994,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Lembaga Pemerintah		11.720.054,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				1 Kegiatan	11.410.944,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana	Lembaga Pemerintah		11.720.054,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**5.766.465.878,00**							**3.309.982.413,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA) Validitas data keluarga beresiko stunting***	**100 % 100 %**			**100 % 100 %**	**313.735.878,00**						**100 % 100 %**	**114.030.012,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah koordinasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dilaksanakan*	5 Kali Kegiatan			1 Kali Kegiatan	37.857.252,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Sekolah Formal dan non Formal	1 Kali Kegiatan	37.857.252,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal														
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				1 Kegiatan	19.178.626,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Sekolah Formal dan non Formal		19.178.626,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				1 Kegiatan	18.678.626,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Sekolah Formal dan non Formal		18.678.626,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*1) Jumlah dokumen pemetaan pengendalian penduduk cakupan daerah yang disusun* *2) Jumlah dokumen data keluarga beresiko stunting*	5 Dokumen 10 Dokumen			1 Dokumen 2 Dokumen	275.878.626,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat	1 Dokumen 2 Dokumen	76.172.760,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				10 Laporan	60.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat		17.678.626,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	76.200.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	-	Masyarakat		21.136.882,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat		17.678.626,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				1 Unit	19.678.626,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat		19.678.626,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Prevalensi peserta KB aktif Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting***	**75 % 75,84 %**			**75,79 % 75 %**	**3.007.541.000,00**						**75 % 75,84 %**	**2.634.394.881,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*1. jumlah kegiatan advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB yang dilaksanakan* *2) Jumlah kali rakor tentang stunting tingkat kecamatan*	17 Kali Kegiatan 60 Kali Kegiatan			2 Kali Kegiatan 12 Kali Kegiatan	1.147.400.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat	2 Kali Kegiatan 12 Kali Kegiatan	1.407.108.835,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				12 Laporan	382.400.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat		853.831.176,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	315.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat		120.798.350,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat		60.248.133,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				8 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat		320.981.362,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				4 Organisasi	200.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat		51.249.814,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan*	63 Orang			63 Orang	279.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	PLKB	63 Orang	115.419.624,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				1123 Orang	279.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	PLKB		115.419.624,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan*	2064 Kali Kegiatan			336 Kali Kegiatan	1.088.891.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Fasilitas Layanan Kesehatan	336 Kali Kegiatan	748.536.498,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	8.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Fasilitas Layanan Kesehatan		119.153.182,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1868 Orang	1.067.691.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Fasilitas Layanan Kesehatan		591.972.167,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12.700.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Fasilitas Layanan Kesehatan		37.411.149,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah kampung KB yang mendapat pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB*	31 Kampung KB			31 Kampung KB	492.250.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Kampung KB	31 Kampung KB	363.329.924,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				12 Dokumen	3.750.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Kampung KB		181.664.962,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				31 Kampung	488.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Kampung KB		181.664.962,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting bagi calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil dan Ibu pasca persalinan*** ***Persentase peningkatan pemberdayaan Keluarga Sejahtera***	**75 %** **80,02 %**			**75 %** **79,02 %**	**2.445.189.000,00**						**75 %** **80,02 %**	**561.557.520,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*1. Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina* *2. Jumlah pembinaan tentang stunting yang dilaksanakan*	60 Kali Kegiatan 5 Kelompok			2 Kelompok 12 Kali Kegiatan	372.089.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat	12 Kali Kegiatan 2 Kelompok	397.078.894,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				2 Laporan	52.889.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat		397.078.894,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				1 Laporan / Dokumen	19.200.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat		0,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				30 Unit	300.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat		0,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga*	5 Kelompok			5 Kelompok	2.073.100.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat	5 Kelompok	164.478.626,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				4 Organisasi	13.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat		164.478.626,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				12 laporan	981.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat		0,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				12 laporan	1.079.100.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat		0,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN						**51.109.083.000,00**							**12.649.371.517,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**51.109.083.000,00**							**12.649.371.517,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**51.109.083.000,00**							**12.649.371.517,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur***	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**			**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**4.726.709.451,00**						**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**5.947.101.042,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu*	100 %			100 %	22.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Aparatur	100 %	24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Aparatur		24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu*	100 %			100 %	3.091.524.395,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Aparatur	100 %	3.850.601.042,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.069.524.395,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Aparatur		3.826.601.042,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Aparatur		24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah*	100 %			100 %	22.000.000,00			-	-	Aparatur	100 %	24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	22.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase penatausahaan retribusi yang diterima Perangkat Daerah*	100 %			100 %	22.000.000,00			-	-	Aparatur	100 %	24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik*	100 %			100 %	18.000.000,00			-	-	Aparatur	100 %	22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				8 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	100 %			100 %	219.462.649,00			-	-	Aparatur	100 %	368.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.491.580,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	44.997.559,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	88.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	20.474.010,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	44.999.500,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi*	100 %			100 %	120.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Aparatur	100 %	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	120.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Aparatur		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan* *Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 %			100 % 100 %	151.690.348,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Aparatur	100 %	178.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Aparatur		3.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	34.609.725,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Aparatur		45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	114.580.623,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Aparatur		130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase sarana dan prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 %			100 %	1.060.032.059,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Aparatur	100 %	1.306.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	1.055.532.059,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Aparatur		1.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	4.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Aparatur		6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup***	**25 %**			**25 %**	**15.000.000,00**						**25 %**	**35.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun*	5 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat	1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase Kualitas Air dan Udara yang memenuhi Baku Mutu***	**30,50 %**			**30,50 %**	**45.000.000,00**						**30,50 %**	**55.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah Upaya Penjegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota*	-			1 Kegiatan	45.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat	-	55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Persentase Tutupan Lahan yang dikelola***	**0,90 %**			**0,90 %**	**11.182.098.382,00**						**0,90 %**	**1.598.870.475,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Jumlah Luas Keanekaragaman hayati yang dikelola*	131,4 Ha			111,4 Ha	11.182.098.382,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat	131,4 Ha	1.598.870.475,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				111,4 Ha	1.427.553.341,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat		1.553.870.475,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				2 Unit	9.754.545.041,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat		45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	***Persentase Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dibina***	**49 %**			**49 %**	**14.999.200,00**						**49 %**	**35.000.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil LB3 yang memenuhi ketentuan*	100 Pelaku Usaha			100 Pelaku Usaha	14.999.200,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat	100 Pelaku Usaha	35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	14.999.200,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan PPLH PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemda***	**71 %**			**71 %**	**14.999.300,00**						**71 %**	**65.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan*	20 Pelaku Usaha			20 Pelaku Usaha	14.999.300,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat	20 Pelaku Usaha	65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup															
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				1 Badan Usaha	14.999.300,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat		65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
7.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase Kasus Yang Ditangani Pemda***	**73,33 %**			**73,33 %**	**14.991.950,00**						**73,33 %**	**60.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengaduan yang ditangani*	21 Kasus			19 Kasus	14.991.950,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat Kab. Pangandaran	21 Kasus	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				24 Pengaduan	14.991.950,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat Kab. Pangandaran		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
8.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Cakupan layanan persampahan***	**29,50 %**			**29,50 %**	**35.095.284.717,00**						**29,50 %**	**4.853.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Jumlah sampah yang terkelola*	17772,389 ton			17423,91 ton	35.095.284.717,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat	17772,389 ton	4.853.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				4 Unit	32.075.497.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat		265.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				17423,91 Ton	3.019.787.717,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat		4.588.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**4.814.392.632,00**							**6.722.515.469,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.814.392.632,00**							**6.722.515.469,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**4.814.392.632,00**							**6.722.515.469,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi***	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**			**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**4.372.932.682,00**						**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**6.221.717.339,00**	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	100 %			100 %	1.800.487.376,00			-	-	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	3.070.334.370,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	1.800.487.376,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		3.070.334.370,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	100 %			100 %	395.943.148,00			-	-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	2.316.720.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	3.269.560,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	285.691.865,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		2.155.720.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	4.045.355,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	5.789.700,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	1.023.168,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.940.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	90.183.500,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi*	100 %			100 %	999.999.998,00			-	-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	999.999.998,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 %			100 %	872.174.440,00			-	-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	404.662.969,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	255.478.440,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		320.622.969,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				34 Laporan	615.696.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		74.040.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 %			100 %	304.327.720,00			-	-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100 %	430.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	50.042.588,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	122.198.352,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	116.250.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	15.836.780,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan***	**100 %**			**100 %**	**196.375.550,00**						**100 %**	**359.346.379,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah penduduk yang terlayani dalam pendaftaran penduduk*	69642 Orang			67310 Orang	49.950.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	69642 Orang	275.040.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				54000 Dokumen	49.950.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan		275.040.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk*	93 Desa			93 Desa	146.425.550,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	93 Desa	84.306.379,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				93 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan		44.306.379,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				572 Laporan	56.425.550,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil***	**100 %**			**100 %**	**159.843.400,00**						**100 %**	**103.247.783,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pencatatan sipil*	15000 Orang			14500 Orang	102.142.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	15000 Orang	70.361.545,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				564 Dokumen	52.742.400,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		35.288.689,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan														
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				53000 Paket	49.400.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		35.072.856,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang diselenggarakan*	4 Pelayanan			4 layanan	31.650.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	4 Pelayanan	3.778.516,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam															
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				4 Laporan	31.650.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		3.778.516,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil yang terlaksana*	12 Laporan			12 laporan	26.051.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	12 Laporan	29.107.722,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	26.051.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		29.107.722,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Persentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik***	**100 %**			**100 %**	**85.241.000,00**						**100 %**	**38.203.968,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan*	6 Dokumen			6 Dokumen	85.241.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Persentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik	6 Dokumen	38.203.968,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	61.526.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Persentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	23.715.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Persentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik		18.203.968,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN						**135.472.877.490,00**							**19.068.545.604,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**135.472.877.490,00**							**19.068.545.604,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**135.472.877.490,00**							**19.068.545.604,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur***	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**			**95 %** **100 %** **100 %** **95 %**	**13.554.920.040,00**						**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**14.634.313.604,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu*	100 %			100 %	19.880.000,00			-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan	100 %	71.308.991,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	18.380.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		68.710.213,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		2.598.778,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	100 %			100 %	1.940.855.434,00			-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan	100 %	2.657.976.390,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.780.275.434,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		2.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	18.380.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		42.605.310,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	142.200.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		115.371.080,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik*	100 %			100 %	1.500.000,00			-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan	100 %	27.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		27.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah*	100 %			100 %	1.500.000,00			-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan	100 %	222.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		222.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik*	100 %			100 %	1.500.000,00			-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan	100 %	22.920.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		22.920.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik*	100 %			100 %	401.265.757,00			-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan	100 %	466.863.858,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	11.773.610,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		13.402.489,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	149.309.054,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		100.625.119,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	11.272.977,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		18.301.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	102.420.300,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		95.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	19.872.816,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		19.920.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	106.617.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		219.615.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah*	100 %			100 %	205.000.000,00			-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan	100 %	175.692.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	205.000.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		175.692.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 %			100 %	10.606.932.000,00			-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan	100 %	10.541.205.715,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.900.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		4.245.890,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9.591.704.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		10.167.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.011.328.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		369.459.825,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 %			100 %	376.486.849,00			-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan	100 %	448.746.650,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	328.120.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		395.307.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	26.500.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		29.282.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	21.866.849,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lingkup Pegawai Dinas Perhubungan		24.157.650,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Persentase Pelayanan Angkutan Darat*** ***Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas*** ***Persentase Pelayanan Izin Trayek*** ***Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum***	**20 %** **20 %** **30 %** **75 %**			**25 %** **70 %** **15 %** **15 %**	**121.917.957.450,00**						**20 %** **20 %** **30 %** **75 %**	**4.434.232.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*	11 unit			11 unit	109.628.857.450,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat Kabupaten Pangandaran	11 unit	3.274.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				5456 Unit	109.378.857.450,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		2.783.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				100 Unit	250.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		491.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	12 laporan			12 laporan	12.200.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat Kabupaten Pangandaran	12 laporan	262.440.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	12.200.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		262.440.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	12 laporan			12 laporan	89.100.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat Kabupaten Pangandaran	12 laporan	896.992.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				12 Laporan	89.100.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		896.992.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						**4.266.685.000,00**							**7.288.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.266.685.000,00**							**7.288.400.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**4.237.423.000,00**							**6.908.400.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi***	**95 %** **95 %** **95 %** **95 %**			**94 %** **94 %** **94 %** **94 %**	**3.666.685.000,00**						**95 %** **95 %** **95 %** **95 %**	**4.871.500.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu* *Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu*	95 % 95 % 95 %			94 % 94 % 94 %	1.000.000,00			-	-	Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	95 % 95 % 95 %	1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kienrja keuangan dengan baik*	95 %			94 %	2.601.000.000,00			-	-	Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	95 %	3.501.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2.600.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		3.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik*	270 Unit			265 Unit	1.000.000,00			-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	270 Unit	1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik*	95 %			94 %	1.000.000,00			-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	95 %	1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik*	95 %			94 %	99.795.000,00			-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	95 %	455.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	490.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.002.832,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.008.078,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		8.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2.700.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		21.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		18.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	70.594.090,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi*	95 %			94 %	130.000.000,00			-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	95 %	140.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	130.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		140.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemeirntahan yang disediakan*	95 %			94 %	743.330.000,00			-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	95 %	569.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	331.840.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		370.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	409.490.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		190.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	95 %			94 %	89.560.000,00			-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	95 %	201.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	69.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		135.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	19.060.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		57.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	1.500.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Persentase tata kelola komunikasi publik*** ***Persentase tata kelola layanan informasi publik***	**75 %** **75 %**			**70 %** **70 %**	**308.498.000,00**						**0 %** **75 %**	**1.670.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan konten yang dipublikasikan* *Persentase pengelolaan media massa dan lainnya*	80 % 80 %			75 % 75 %	308.498.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran	80 % 80 %	1.670.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				3 Laporan	257.686.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran		1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				1 Permohonan	30.112.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2 Media	20.700.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Tingkat kematangan tata kelola SPBE***	**3.4 Indeks**			**3.4 Indeks**	**262.240.000,00**						**3.4 Indeks**	**366.900.000,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase OPD yang memiliki layanan publik berbasis sistem elektronik*	75 %			71 %	262.240.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran	75 %	366.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	235.980.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran		366.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				1 Dokumen	26.260.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**18.152.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Persentase publikasi data statistik sektoral***	**70 %**			**70 %**	**18.152.000,00**						**70 %**	**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen statistik sektoral yang dipublikasikan Persentase publikasi data statistik sektoral*	3 Publikasi			3 Publikasi 70 %	18.152.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran	3 Publikasi	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	18.152.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**11.110.000,00**							**180.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	***Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman***	**35 %**			**35 %**	**11.110.000,00**						**35 %**	**180.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah*	40 %			35 %	11.110.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran	40 %	180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	11.110.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Kabupaten Pangandaran		180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN						**6.125.493.000,00**							**7.237.501.351,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.400.493.000,00**							**5.997.501.351,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**4.400.493.000,00**							**5.997.501.351,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur***	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**			**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**3.770.982.000,00**						**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**4.166.748.292,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu* *Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu* *Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu*	100 % 100 % 100 %			100 % 100 % 100 %	2.706.000,00			-	-	Pegawai Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	39.930.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.706.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Perangkat Daerah		39.930.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	100 %			100 %	2.753.528.398,00			-	-	Pegawai Perangkat Daerah	100 %	2.965.606.923,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2.750.822.398,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Perangkat Daerah		2.925.606.923,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	2.706.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Perangkat Daerah		40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Presentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik*	100 %			100 %	2.706.000,00			-	-	Pegawai Perangkat Daerah	100 %	41.261.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2.706.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Perangkat Daerah		41.261.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah*	100 %			100 %	2.706.000,00			-	-	Pegawai Perangkat Daerah	100 %	37.268.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	2.706.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Perangkat Daerah		37.268.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %			100 %	205.800.000,00			-	-	Pegawai Perangkat Daerah	100 %	489.527.277,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Perangkat Daerah		1.892.682,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Perangkat Daerah		87.795.422,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Perangkat Daerah		21.961.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	55.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Perangkat Daerah		63.721.625,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	12.300.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Perangkat Daerah		16.515.048,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Perangkat Daerah		14.641.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	65.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Perangkat Daerah		283.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi*	100 %			100 %	175.000.000,00			-	-	Pegawai Perangkat Daerah	100 %	159.720.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	175.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Perangkat Daerah		159.720.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 %			100 %	504.000.000,00			-	-	Pegawai Perangkat Daerah	100 %	234.581.030,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Perangkat Daerah		4.992.581,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Perangkat Daerah		80.818.320,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	420.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Perangkat Daerah		148.770.129,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 %			100 %	124.535.602,00			-	-	Pegawai Perangkat Daerah	100 %	198.854.062,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Perangkat Daerah		60.296.962,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	74.535.602,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Perangkat Daerah		118.592.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Perangkat Daerah		19.965.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Persentase Koperasi yang patuh***	**52,00 %**			**52,00 %**	**21.807.750,00**						**52,00 %**	**175.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan*	37 Koperasi			36 Koperasi	21.807.750,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Koperasi	37 Koperasi	175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				35 Unit Usaha	21.807.750,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Koperasi		175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase Peningkatan SDM Pengelola Koperasi bersertifikat***	**45 %**			**45 %**	**554.511.000,00**						**45 %**	**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya*	125 Orang			25 Orang	554.511.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Koperasi	25 Orang	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				30 Orang	554.511.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Koperasi		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
4.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya***	**0,1 %**			**0,1 %**	**53.192.250,00**						**0,1 %**	**1.555.753.059,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah usaha mikro yang omsetnya meningkat*	100 Pelaku Usaha Mikro			100 Pelaku Usaha Mikro	53.192.250,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku UMKM	100 Pelaku Usaha Mikro	1.555.753.059,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				100 Unit Usaha	53.192.250,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku UMKM		1.555.753.059,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.725.000.000,00**							**1.240.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**150.000.000,00**							**485.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi***	**34,62 %**			**34,62 %**	**50.000.000,00**						**34,62 %**	**55.000.000,00**	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya*	-			75 Orang	50.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha	-	55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil***	**77,80 %**			**77,80 %**	**60.000.000,00**						**77,80 %**	**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya*	21 Barang Pokok dan Penting			21 Barang Pokok dan Penting	60.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha	21 Barang Pokok dan Penting	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase UTTP yang tertib ukur***	**55,12 %**			**55,12 %**	**15.000.000,00**						**55,12 %**	**225.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah UTTP yang ditera, tera ulang, dan diawasi*	2500 Unit			2400 Unit	15.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha	2500 Unit	225.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				500 Unit	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha		225.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
4.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya***	**2,50 %**			**2,50 %**	**25.000.000,00**						**2,50 %**	**55.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah produk lokal yang meningkat omsetnya*	0 Buah			4 Buah	25.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha	4 Buah	55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				5 UMKM	25.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**1.575.000.000,00**							**755.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani***	**85 %**			**85 %**	**1.565.000.000,00**						**85 %**	**700.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*	90 %			80 %	1.565.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Industri	90 %	700.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1.550.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Industri		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Industri		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***Persentase Industri Kecil dan menengah yang berizin***	**100 %**			**100 %**	**10.000.000,00**						**100 %**	**55.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah IUI Kecil dan Menengah yang difasilitasi perizinannya*	45 Dokumen			40 Dokumen	10.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Industri	45 Dokumen	55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				35 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Industri		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**15.546.600.000,00**							**3.306.535.168,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.546.600.000,00**							**3.306.535.168,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**15.546.600.000,00**							**3.306.535.168,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas***	**64 Nilai**			**86 Persentase** **86 Persentase** **86 Persentase** **86 Persentase**	**4.303.071.524,00**						**64 Nilai**	**2.722.483.298,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun*	3 Dokumen			3 Dokumen	5.144.000,00			-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran	3 Dokumen	5.144.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	5.144.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran		5.144.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumenn Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun*	15 Dokumen			15 Dokumen	2.444.701.912,00			-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran	15 Dokumen	2.131.103.335,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	2.438.711.912,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran		2.125.717.335,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.995.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran		2.693.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2.995.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran		2.693.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun*	3 Laporan			3 Laporan	315.059.846,00			-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran	3 Laporan	248.293.203,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3.001.526,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran		3.281.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				70 Paket	70.018.006,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran		45.901.075,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	25.088.657,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran		18.843.875,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	25.252.682,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran		33.854.540,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	10.954.800,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran		10.954.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	180.744.175,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran		135.457.163,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	57.460.000,00			-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran	1 Laporan	23.802.912,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	21.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	36.460.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran		23.802.912,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan*	3 Laporan			3 Laporan	1.204.676.000,00			-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran	3 Laporan	197.702.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				38 Laporan	3.100.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran		3.102.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	523.040.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran		64.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	678.536.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran		130.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara*	4 Laporan			4 Laporan	276.029.766,00			-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran	4 Laporan	116.437.848,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	52.014.883,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran		48.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	64.014.883,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran		49.075.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	7.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran		7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	152.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPMPTSP Kab. Pangandaran		11.862.848,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Tingkat Pertumbuhan Jumlah Investor***	**221 Investor**			**221 Investor**	**221.526.000,00**						**221 Investor**	**110.763.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan*	1 Dokumen			1 Dokumen	110.763.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha dan mitra kerja DPMPTSP Kab.Pangandaran	1 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	110.763.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha dan mitra kerja DPMPTSP Kab.Pangandaran		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*	1 Dokumen			1 Dokumen	110.763.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha dan mitra kerja DPMPTSP Kab.Pangandaran	1 Dokumen	110.763.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	110.763.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha dan mitra kerja DPMPTSP Kab.Pangandaran		110.763.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Terpublikasi***	**10 Persentase**			**10 Persentase**	**193.287.820,00**						**10 Persentase**	**110.763.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	10 Dokumen			9 Dokumen	193.287.820,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha dan mitra kerja DPMPTSP Kab.Pangandaran	10 Dokumen	110.763.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	193.287.820,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha dan mitra kerja DPMPTSP Kab.Pangandaran		110.763.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal***	**90 Persentase**			**90 Persentase**	**10.121.831.447,00**						**90 Persentase**	**291.830.370,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*	1 Laporan			1 Laporan	10.121.831.447,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha dan mitra kerja DPMPTSP Kab. Pangandaran	1 Laporan	291.830.370,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				404 Pelaku Usaha	10.022.473.618,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha dan mitra kerja DPMPTSP Kab. Pangandaran		161.473.630,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	54.107.629,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha dan mitra kerja DPMPTSP Kab. Pangandaran		85.106.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				404 Kegiatan Usaha	45.250.200,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha dan mitra kerja DPMPTSP Kab. Pangandaran		45.250.440,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Cakupan Kepatuhan Pendataan Nilai Investasi PMDN & PMATerhadap Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah***	**471,58 Milyar Rupiah**			**471,58 Milyar Rupiah**	**647.851.800,00**						**471,58 Milyar Rupiah**	**45.099.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	3 Laporan 0 Laporan			3 Laporan	647.851.800,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha dan mitra kerja DPMPTSP Kab.Pangandaran	3 Laporan 0 Laporan	45.099.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				11 Kegiatan Usaha.	90.425.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha dan mitra kerja DPMPTSP Kab.Pangandaran		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				323 Pelaku Usaha	331.563.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha dan mitra kerja DPMPTSP Kab.Pangandaran		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				52 Kegiatan Usaha	225.863.800,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha dan mitra kerja DPMPTSP Kab.Pangandaran		45.099.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Cakupan Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal***	**10 Persentase**			**10 Persentase**	**59.031.409,00**						**10 Persentase**	**25.596.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen			1 Dokumen	59.031.409,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha dan mitra kerja DPMPTSP Kab. Pangandaran	1 Dokumen	25.596.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	59.031.409,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pelaku Usaha dan mitra kerja DPMPTSP Kab. Pangandaran		25.596.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**14.396.053.967,00**							**6.011.823.236,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.396.053.967,00**							**6.011.823.236,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**4.307.251.053,00**							**5.901.345.798,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi***	**92,25 %** **92,25 %** **97,5 %** **94 %**			**90 %** **95 %** **90 %** **93 %**	**3.246.053.967,00**						**92,25 %** **92,25 %** **97,5 %** **94 %**	**5.088.456.325,00**	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	75 %			70 %	2.278.774.137,00			-	-	Dispusip Kabupaten Pangadaran	75 %	3.742.957.843,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	2.278.774.137,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dispusip Kabupaten Pangadaran		3.742.957.843,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	85 %			84 %	63.429.360,00			-	-	Dispusip Kabupaten Pangandaran	85 %	111.551.068,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	2.706.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dispusip Kabupaten Pangandaran		30.959.736,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	44.942.773,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dispusip Kabupaten Pangandaran		48.812.060,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15.780.587,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dispusip Kabupaten Pangandaran		31.779.272,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	85 %			80 %	883.838.470,00			-	-	Dispusip Kabupaten Pangandaran	85 %	926.580.406,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	229.800.070,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dispusip Kabupaten Pangandaran		348.824.587,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				204 Laporan	654.038.400,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dispusip Kabupaten Pangandaran		577.755.819,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	85 %			80 %	20.012.000,00			-	-	Dispusip Kabupaten Pangandaran	85 %	307.367.008,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	20.012.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dispusip Kabupaten Pangandaran		307.367.008,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat***	**19,95 Indeks**			**19,95 Indeks**	**1.023.261.919,00**						**19,95 Indeks**	**623.164.407,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah aspek pembangunan literasi masyarakat*	7 Aspek			7 Aspek	916.276.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran	7 Aspek	398.545.256,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				18 Perpustakaan	19.099.400,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		31.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				2 Perpustakaan	750.114.300,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		69.178.869,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				2 Layanan	25.318.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		19.221.020,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				7 Perpustakaan	17.235.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		31.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				120 Orang	12.000.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	19.102.300,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				390 Eksemplar	21.348.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		80.087.587,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				13 Eksemplar	21.326.300,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		24.026.276,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				5 Perpustakaan	30.733.300,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		45.431.504,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai Budaya Gemar Membaca*	16,16 Nilai			15,77 Nilai	106.985.319,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran	16,16 Nilai	224.619.151,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				130 Orang	20.000.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				16 Perpustakaan	12.000.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	19.865.909,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		22.219.151,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				26 Orang	24.251.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				65 Lokus	30.868.410,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		90.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	***Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan***	**10 %**			**10 %**	**37.935.167,00**						**10 %**	**189.725.066,00**	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Naskah Kuno yang didigitalisasi/Alih aksarakan*	1 Dokumen			1 Dokumen	23.185.622,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran	1 Dokumen	151.558.630,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				10 Orang	8.830.622,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		105.758.906,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				1 Eksemplar	14.355.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		45.799.724,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan seleksi budaya etnis nusantara*	2 Kegiatan			2 Kegiatan	14.749.545,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran	2 Kegiatan	38.166.436,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				1 Eksemplar	9.992.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		27.969.297,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				1 Eksemplar	4.757.545,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		10.197.139,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**10.088.802.914,00**							**110.477.438,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Nilai LAKE Kabupaten/Kota***	**(A) 3732 Nilai**			**(A) 3732 Nilai**	**10.050.614.955,00**						**(A) 3732 Nilai**	**59.333.479,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SKPD taat perundang-undangan*	24 SKPD			24 SKPD	48.691.157,00			-	-	SKPD di Kabupaten Pangandaran	24 SKPD	48.691.157,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				24 Berkas	48.691.157,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SKPD di Kabupaten Pangandaran		48.691.157,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip Statis yang Dikelola*	150 Dokumen			125 Dokumen	10.001.923.798,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Arsip Statis di Kabupaten Pangandaran	150 Dokumen	10.642.322,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				20 Arsip	10.001.923.798,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Arsip Statis di Kabupaten Pangandaran		10.642.322,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	***Persentase LAKE Kabupaten/Kota***	**89,29 %**			**89,29 %**	**38.187.959,00**						**89,29 %**	**51.143.959,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Jumlah dokumen Penyusutan Arsip Inaktif*	90 Dokumen			80 Dokumen	38.187.959,00			-	-	Arsip in-Aktif di Kabupaten Pangandaran	90 Dokumen	51.143.959,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun														
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				4 Berkas	38.187.959,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Arsip in-Aktif di Kabupaten Pangandaran		51.143.959,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN						**17.383.364.183,00**							**26.584.598.922,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**643.000.000,00**							**453.871.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**643.000.000,00**							**453.871.000,00**	
1.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Angka Kecukupan Protein*** ***Angka Kecukupan Energi***	**2100 Angka** **57 Angka**			**57 Angka** **2100 Angka**	**575.000.000,00**						**2100 Angka** **57 Angka**	**263.538.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten / Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan*	2 dokumen			1 dokumen	25.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	Pelaku usaha pangan dan masyarakat umum	2 dokumen	43.923.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				24 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	Pelaku usaha pangan dan masyarakat umum		43.923.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten /Kota*	1 dokumen			1 dokumen	500.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	Masyarakat rentan pangan, masyarakat terdampak bencana alam dan bencana sosial, gejolak harga atau keadaan darurat lainnya	1 dokumen	146.410.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				76 Ton	500.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	Masyarakat rentan pangan, masyarakat terdampak bencana alam dan bencana sosial, gejolak harga atau keadaan darurat lainnya		146.410.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*	-			1 dokumen	50.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	Anak sekolah, PKK, Ibu rumah tangga	-	73.205.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	Anak sekolah, PKK, Ibu rumah tangga		73.205.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)***	**2 %**			**2 %**	**50.000.000,00**						**2 %**	**117.128.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota*	2 dokumen			1 dokumen	50.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	Pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	2 dokumen	117.128.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				5 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	Pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan		117.128.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Persentase pangan segar aman***	**70 %**			**70 %**	**18.000.000,00**						**70 %**	**73.205.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota*	2 dokumen			1 dokumen	18.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	Masyarakat daerah rawan pangan	2 dokumen	73.205.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				2 Laporan	18.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	Masyarakat daerah rawan pangan		73.205.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**16.740.364.183,00**							**26.130.727.922,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**16.740.364.183,00**							**26.130.727.922,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas***	**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**			**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**4.792.437.183,00**						**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**5.823.161.465,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	2 dokumen			2 dokumen	15.310.000,00			-	-	Pegawai DKPKP	2 dokumen	67.862.958,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	15.310.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DKPKP		67.862.958,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*	4 dokumen			4 dokumen	3.814.637.183,00			-	-	Pegawai DKPKP	4 dokumen	4.764.582.084,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	3.814.637.183,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai DKPKP		4.764.582.084,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	7 dokumen			7 dokumen	184.434.000,00			-	-	Pegawai DKPKP	7 dokumen	346.015.348,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				72 Paket	76.544.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DKPKP		109.553.813,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	12.340.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DKPKP		71.197.880,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DKPKP		22.757.895,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				21 Dokumen	17.300.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DKPKP		40.704.780,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	73.250.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DKPKP		101.800.980,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			1 Dokumen	170.000.000,00			-	-	Pegawai DKPKP	-	250.000.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	170.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DKPKP		250.000.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 dokumen			3 dokumen	491.256.000,00			-	-	Pegawai DKPKP	3 dokumen	261.727.724,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	99.600.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DKPKP		66.991.580,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	391.656.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DKPKP		194.736.144,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 dokumen			3 dokumen	116.800.000,00			-	-	Pegawai DKPKP	3 dokumen	132.973.351,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	81.800.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DKPKP		79.210.805,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	20.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DKPKP		28.192.666,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DKPKP		25.569.880,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap***	**0,30 %**			**0,30 %**	**3.461.483.500,00**						**0,30 %**	**12.611.400.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan*	3 dokumen			1 dokumen	2.365.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Nelayan, Koperasi, KUB	3 dokumen	9.461.700.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				10 Unit	2.365.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Nelayan, Koperasi, KUB		9.461.700.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemberdayaan Nelayan Kecil*	3 laporan			1 laporan	30.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Nelayan, Koperasi, KUB	3 laporan	2.084.900.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				200 Orang	30.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Nelayan, Koperasi, KUB		2.084.900.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*	2 dokumen			1 dokumen	1.066.483.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Koperasi, Pemasar, Nelayan	2 dokumen	1.064.800.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				8 Layanan	1.066.483.500,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Koperasi, Pemasar, Nelayan		1.064.800.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya***	**0,20 %**			**0,20 %**	**7.771.277.000,00**						**0,20 %**	**3.645.955.726,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah dokumen kelayakan usaha Pembudidaya Ikan Kecil skala kecil*	4 dokumen			4 dokumen	1.850.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pembudidaya ikan	4 dokumen	183.012.500,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				2 Kelompok	1.850.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Pembudidaya ikan		183.012.500,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah produksi perikanan budidaya*	350 ton			325 ton	5.921.277.000,00			-	-	Pembudidaya ikan	350 ton	3.462.943.226,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit	3.741.277.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	Pembudidaya ikan		1.756.920.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	70.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pembudidaya ikan		1.632.818.226,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				100 Unit	2.110.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-	Pembudidaya ikan		73.205.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	***Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan***	**5 %**			**5 %**	**35.166.500,00**						**5 %**	**3.222.153.213,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan*	2 dokumen			1 dokumen	35.166.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Pokmas, Nelayan, Pembudidaya	2 dokumen	3.222.153.213,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				9 Pelaku Usaha	35.166.500,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Pokmas, Nelayan, Pembudidaya		3.222.153.213,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil perikanan***	**90 %**			**90 %**	**680.000.000,00**						**90 %**	**828.057.518,00**	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku*	2 dokumen			2 dokumen	680.000.000,00			-	-	Poklahsar	2 dokumen	828.057.518,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5,5 Ton	80.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Poklahsar		328.057.518,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				50 Pelaku Usaha	600.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	Poklahsar		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						**71.184.431.000,00**							**33.581.848.401,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**310.000.000,00**							**2.195.104.901,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**310.000.000,00**							**2.195.104.901,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan***	**18 %**			**18 %**	**230.000.000,00**						**18 %**	**1.836.096.500,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kebudayaan masyarakat lokal yang dikelola*	20 %			18 %	170.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran	20 %	1.638.951.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				1 Objek	170.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		1.638.951.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kesenian tradisional masyarakat lokal yang dilestarikan*	20 %			18 %	60.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran	20 %	197.145.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	60.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		197.145.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	***Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola***	**11 %**			**11 %**	**80.000.000,00**						**11 %**	**359.008.401,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Persentase cagar budaya yang ditetapkan*	13 %			11 %	70.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran	13 %	234.135.901,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				5 Objek	20.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		98.857.380,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				3 Objek	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		135.278.521,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Persentase cagar budaya yang dikelola*	13 %			11 %	10.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran	13 %	124.872.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				1 Objek	10.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran		124.872.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**70.874.431.000,00**							**31.386.743.500,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**70.874.431.000,00**							**31.386.743.500,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi***	**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**			**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**11.923.870.407,00**						**90 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**11.651.791.000,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu* *Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu* *Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu*	90 % 90 % 90 %			90 % 90 % 90 %	33.698.632,00			-	-	Pegawai Disparbud	90 % 90 % 90 %	124.872.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	17.870.280,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		72.842.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.276.048,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		2.601.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.276.048,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		2.601.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.276.048,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		2.601.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.276.048,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		2.601.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	5.426.328,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		36.421.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	5.297.832,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		5.203.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	90 %			90 %	5.742.957.469,00			-	-	Pegawai Disparbud	90 %	8.466.428.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	5.728.651.469,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Disparbud		8.367.571.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2.043.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		31.218.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2.043.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		31.218.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.110.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		31.218.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	5.110.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		5.203.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Jenis barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik Jumlah Unit barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik*	900 Unit/Buah 25 Jenis			25 Jenis 900 Unit/Buah	3.039.900,00			-	-	Pegawai Disparbud	900 Unit/Buah 25 Jenis	62.436.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.840.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		31.218.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.199.900,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		31.218.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah*	30 %			25 %	3.729.900,00			-	-	Pegawai Disparbud	30 %	62.436.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				2 Laporan	1.199.900,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		31.218.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	2.530.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		31.218.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik*	90 %			90 %	107.011.850,00			-	-	Pegawai Disparbud	90 %	305.675.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1.199.900,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		56.192.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1.199.900,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		28.616.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		107.212.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	100.612.050,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		113.654.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	90 %			90 %	503.008.526,00			-	-	Pegawai Disparbud	90 %	1.207.848.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.454.160,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		15.609.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	172.130.443,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		451.943.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.531.575,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		26.015.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	43.312.500,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		282.431.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				27 Dokumen	24.026.848,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		41.624.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				25 Laporan	31.928.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		78.045.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	206.625.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		312.181.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	90 %			90 %	5.162.773.900,00			-	-	Pegawai Disparbud	90 %	823.748.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2.003.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		38.502.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	313.200.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		357.558.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	4.847.570.900,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		427.688.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	90 %			90 %	367.650.230,00			-	-	Pegawai Disparbud	90 %	598.347.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	170.000.625,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		260.151.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	44.399.605,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		104.060.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	15.750.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		26.015.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	137.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Disparbud		208.121.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan***	**16 %**			**16 %**	**58.233.198.970,00**						**16 %**	**15.140.695.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Persentase daya tarik wisata yang dikelola*	18 %			16 %	129.999.900,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Wisatawan, Stakeholder Pariwisata	18 %	152.436.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	129.999.900,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Wisatawan, Stakeholder Pariwisata		152.436.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola*	18 %			16 %	399.999.725,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Wisatawan, Stakeholder Pariwisata	18 %	777.877.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	399.999.725,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Wisatawan, Stakeholder Pariwisata		777.877.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase destinasi pariwisata yang dikelola*	18 %			16 %	57.699.999.395,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Wisatawan, Stakeholder Pariwisata	18 %	14.132.336.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Dokumen	249.999.775,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Wisatawan, Stakeholder Pariwisata		4.688.889.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				5 Lokasi	1.850.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Wisatawan, Stakeholder Pariwisata		7.005.435.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				5 Unit	55.500.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Wisatawan, Stakeholder Pariwisata		2.044.941.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Lokasi	99.999.620,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Wisatawan, Stakeholder Pariwisata		393.071.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan*	50 %			50 %	3.199.950,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Wisatawan, Stakeholder Pariwisata	50 %	78.045.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota				50 Dokumen	3.199.950,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Wisatawan, Stakeholder Pariwisata		78.045.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan***	**40 %**			**40 %**	**416.999.793,00**						**40 %**	**3.777.384.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata yang dipasarkan dan dipromosikan*	45 %			40 %	416.999.793,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Wisatawan, Stakeholder Pariwisata	45 %	3.777.384.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	7.971.890,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Wisatawan, Stakeholder Pariwisata		156.090.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	20.410.693,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Wisatawan, Stakeholder Pariwisata		104.060.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				2 Dokumen	46.589.110,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Wisatawan, Stakeholder Pariwisata		572.321.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	224.753.400,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Wisatawan, Stakeholder Pariwisata		1.519.128.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	117.274.700,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Wisatawan, Stakeholder Pariwisata		1.425.785.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	***Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi***	**16 %**			**16 %**	**3.199.950,00**						**16 %**	**208.120.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Persentase ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan*	18 %			16 %	3.199.950,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Stakeholder Pariwisata	18 %	208.120.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Laporan	3.199.950,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Stakeholder Pariwisata		208.120.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi keratif yang berdaya saing***	**30 %**			**30 %**	**297.161.880,00**						**30 %**	**608.752.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas tingkat dasar*	35 %			30 %	247.161.900,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Stakeholder Pariwisata	35 %	468.271.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				160 Orang	40.362.200,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Stakeholder Pariwisata		312.181.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				40 Orang	206.799.700,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Stakeholder Pariwisata		156.090.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Persentase kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan*	35 %			30 %	49.999.980,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Stakeholder Pariwisata	35 %	140.481.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				15 Orang	49.999.980,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Stakeholder Pariwisata		140.481.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS PERTANIAN						**10.651.589.400,00**							**12.087.890.896,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**10.651.589.400,00**							**12.087.890.896,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**10.651.589.400,00**							**12.087.890.896,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik***	**20 %** **90 %** **90 %** **90 %**			**20 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**7.473.889.000,00**						**20 %** **90 %** **90 %** **90 %**	**9.407.290.628,00**	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	6 Dokumen			1 dokumen	6.611.078.462,00			-	-	Pegawai Dinas Pertanian	1 Dokumen	8.364.419.628,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	6.611.078.462,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Dinas Pertanian		8.364.419.628,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	6 Dokumen			1 dokumen	29.995.775,00			-	-	Pegawai Dinas Pertanian	1 Dokumen	124.448.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29.995.775,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Pertanian		124.448.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	99 Unit			1 unit	120.000.000,00			-	-	Pegawai Dinas Pertanian	25 Unit	241.576.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	120.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Pertanian		241.576.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	6 Dokumen			1 dokumen	663.472.000,00			-	-	Pegawai Dinas Pertanian	1 Dokumen	530.436.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	70.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Pertanian		177.928.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	593.472.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Pertanian		352.508.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	109 Unit			5 unit	49.342.763,00			-	-	Pegawai Dinas Pertanian	23 Unit	146.410.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	49.342.763,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Pertanian		146.410.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Indeks Pertanaman*** ***Persentase Peningkatan Produksi Peternakan*** ***Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan*** ***Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura***	**2,0 %** **200 Indeks** **3 %** **2,3 %**			**200 Indeks** **2,0 %** **3 %** **2,0 %**	**650.000.000,00**						**2,0 %** **200 Indeks** **3 %** **2,3 %**	**200.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Dokumen Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	5 dokumen			1 dokumen	650.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Kelompok Tani	1 dokumen	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	650.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Kelompok Tani		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian***	**2 %**			**2 %**	**2.327.700.400,00**						**2 %**	**1.250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian*	5 dokumen			1 dokumen	1.027.700.400,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Kelompok Tani	1 dokumen	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2 Laporan	1.027.700.400,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Kelompok Tani		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian*	75 unit			1 unit	1.300.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Kelompok Tani	15 unit	1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	1.300.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Kelompok Tani		1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan Yang ASUH & Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular Ternak***	**10 %**			**10 %**	**50.000.000,00**						**10 %**	**37.600.268,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota*	4 dokumen			1 dokumen	50.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Kelompok Tani	1 dokumen	37.600.268,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Kelompok Tani		37.600.268,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Persentase Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian***	**72 %**			**72 %**	**100.000.000,00**						**72 %**	**500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota*	300 ha			500 ha	100.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Kelompok Tani	300 ha	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				500 Ha	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Kelompok Tani		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani***	**10 %**			**10 %**	**50.000.000,00**						**10 %**	**693.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Kelompok Tani Yang Skornya Naik*	672 unit			112 unit	50.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Kelompok Tani	112 unit	693.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				112 Unit	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Kelompok Tani		693.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		SEKRETARIAT DAERAH						**46.135.422.000,00**							**80.166.428.944,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**60.000.000,00**							**167.214.265,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**60.000.000,00**							**167.214.265,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	***Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Diselesaikan***	**100 %**			**100 %**	**30.000.000,00**						**100 %**	**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	5 Laporan			5 Laporan	30.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Pemilik Tanah, Instansi dan Stakeholder terkait bidang Pertanahan	0 Laporan	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Berita Acara	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Pemilik Tanah, Instansi dan Stakeholder terkait bidang Pertanahan		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Pemilik Tanah, Instansi dan Stakeholder terkait bidang Pertanahan		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	***Cakupan Penggunaan Tanah Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota***	**100 %**			**100 %**	**30.000.000,00**						**100 %**	**67.214.265,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota*	12 Laporan			12 Laporan	30.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Instansi dan Stakeholder terkait bidang Pertanahan	12 Laporan	67.214.265,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Instansi dan Stakeholder terkait bidang Pertanahan		67.214.265,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**46.075.422.000,00**							**79.999.214.679,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**46.075.422.000,00**							**79.999.214.679,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Dokumentasi Kegiatan KDH / WKDH yang dilaksanakan*** ***Persentase Penataan Kelembagaan Organisasi, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik Tatalaksanaan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Daerah***	**92 %** **100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **100 %**			**100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **90 %**	**35.635.422.000,00**						**92 %** **100 %** **100 %** **0 %** **100 %** **0 %**	**49.235.143.839,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu* *Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu* *Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu*	-			100 % 100 % 100 %	22.000.000,00			-	-	Pegawai sekretariat daerah	-	342.088.140,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		285.100.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		12.340.980,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		12.340.980,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		12.340.980,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		19.965.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	-			100 %	16.502.081.626,00			-	-	Pegawai sekretariat daerah	-	22.618.587.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/bulan	16.475.391.626,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai sekretariat daerah		22.228.977.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	6.740.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		367.356.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		11.127.160,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	9.950.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		11.127.160,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			12 Dokumen	3.370.000,00			-	-	Pegawai sekretariat daerah	-	85.530.060,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3.370.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		85.530.060,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			2 Laporan	418.215.500,00			-	-	Pegawai sekretariat daerah	-	563.611.884,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	187.500.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		269.860.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				8 Dokumen	3.720.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		23.159.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	226.995.500,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		270.592.034,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Keberhasilan Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah*	-			100 %	2.210.389.373,00			-	-	Pegawai sekretariat daerah	-	3.220.513.534,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				37 Paket	11.233.200,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		40.680.484,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	340.773.547,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		1.427.590.184,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	19.650.081,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		159.720.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	129.620.200,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		153.442.738,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	132.250.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		142.417.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				290 Laporan	1.576.862.345,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		1.296.663.128,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	-			100 %	11.760.781.177,00			-	-	Pegawai sekretariat daerah	-	11.879.760.640,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		29.867.640,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	1.717.638.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		2.795.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Laporan	3.945.900.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		2.133.593.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	6.082.243.177,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		6.921.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang di Pelihara*	-			7 Jenis	1.814.412.390,00			-	-	Pegawai sekretariat daerah	-	1.654.432.201,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	1.024.375.400,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		1.011.560.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	252.536.990,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		439.669.230,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	537.500.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai sekretariat daerah		203.202.971,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan*	-			100 %	1.512.171.934,00			-	-	Kepala daerah dan wakil kepala daerah	-	1.596.127.538,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	840.799.630,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala daerah dan wakil kepala daerah		1.141.486.688,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	173.944.720,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala daerah dan wakil kepala daerah		250.794.207,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	110.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala daerah dan wakil kepala daerah		203.846.643,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	387.427.584,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala daerah dan wakil kepala daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Jenis Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi*	2 Jenis			2 Jenis	792.000.000,00			-	-	Kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah	2 Jenis	1.026.825.572,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	330.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah		478.828.581,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	264.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah		336.221.581,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	198.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah		211.775.410,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase SOTK perangkat daerah yang ditata*	-			100 %	300.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN sekretariat daerah, masyarakat kabupaten pangandaran, instansi dan stakeholder terkait	-	2.684.573.175,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN sekretariat daerah, masyarakat kabupaten pangandaran, instansi dan stakeholder terkait		914.117.171,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN sekretariat daerah, masyarakat kabupaten pangandaran, instansi dan stakeholder terkait		567.298.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN sekretariat daerah, masyarakat kabupaten pangandaran, instansi dan stakeholder terkait		537.723.947,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN sekretariat daerah, masyarakat kabupaten pangandaran, instansi dan stakeholder terkait		67.215.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN sekretariat daerah, masyarakat kabupaten pangandaran, instansi dan stakeholder terkait		598.217.737,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan*	-			100 %	300.000.000,00			-	-	Kepala daerah dan wakil kepala daerah, masyarakat kabupaten pangandaran, steakholder terkait	-	3.563.093.655,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				4 Laporan	116.791.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala daerah dan wakil kepala daerah, masyarakat kabupaten pangandaran, steakholder terkait		772.306.095,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				3 Laporan	81.299.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala daerah dan wakil kepala daerah, masyarakat kabupaten pangandaran, steakholder terkait		1.018.986.980,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				6 Laporan	101.910.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala daerah dan wakil kepala daerah, masyarakat kabupaten pangandaran, steakholder terkait		1.771.800.580,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan Kerjasama yang dirumuskan*** ***Persentase Produk Hukum Daerah yang Diharmonisasi*** ***Persentase Pelayanan Administrasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat***	**90 %** **95 %** **95 %**			**95 %** **95 %** **90 %**	**9.240.000.000,00**						**90 %** **95 %** **0 %**	**24.988.361.254,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)*	Tinggi Nilai			Tinggi Nilai	1.910.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Instansi dan Stakeholder terkait	Tinggi Nilai	3.481.708.329,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				6 Dokumen	1.080.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Instansi dan Stakeholder terkait		712.433.722,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Instansi dan Stakeholder terkait		806.586.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				12 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Instansi dan Stakeholder terkait		1.962.688.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan*	281 Kegiatan			281 Kegiatan	5.300.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Lembaga Agama, Kelompok Keagamaan, Stakeholder terkait	281 Kegiatan	18.225.409.354,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				37 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Lembaga Agama, Kelompok Keagamaan, Stakeholder terkait		3.404.464.476,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				216 Dokumen	5.100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Lembaga Agama, Kelompok Keagamaan, Stakeholder terkait		14.283.267.463,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				28 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Lembaga Agama, Kelompok Keagamaan, Stakeholder terkait		537.677.415,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase Fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselenggarakan*	100 %			100 %	2.000.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah Daerah, Instansi terkait, Masyarakat, Stakeholder terkait	100 %	2.945.166.204,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				75 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah Daerah, Instansi terkait, Masyarakat, Stakeholder terkait		838.994.599,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	1.800.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah Daerah, Instansi terkait, Masyarakat, Stakeholder terkait		1.797.766.926,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				75 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah Daerah, Instansi terkait, Masyarakat, Stakeholder terkait		308.404.679,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah Dokumen kerjasama daerah*	7 Dokumen			7 Dokumen	30.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Universitas, Lembaga, Masyarakat, Instansi dan Stakeholder terkait	7 Dokumen	336.077.367,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				7 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Universitas, Lembaga, Masyarakat, Instansi dan Stakeholder terkait		336.077.367,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa*** ***Persentase Penyusunan Program,Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian Pembangunan Fisik dan Keuangan Sesuai Target*** ***Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Pengendalian Perekonomian dan Sumber Daya Alam***	**90 %** **100 %** **95 %**			**90 %** **95 %** **100 %**	**1.200.000.000,00**						**90 %** **100 %** **95 %**	**5.775.709.586,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan*	100 %			100 %	250.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Instansi dan Stakeholder terkait	100 %	1.719.344.962,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Instansi dan Stakeholder terkait		717.647.756,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				3 Laporan	150.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Instansi dan Stakeholder terkait		436.586.513,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya	Masyarakat Kabupaten Pangandaran, Instansi dan Stakeholder terkait		565.110.693,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase Keberhasilan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan*	100 %			100 %	500.000.000,00			-	-	Masyarakat, Instansi dan Stakeholder terkait	100 %	2.409.447.648,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat, Instansi dan Stakeholder terkait		846.185.007,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat, Instansi dan Stakeholder terkait		354.812.922,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				24 Laporan	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat, Instansi dan Stakeholder terkait		1.208.449.719,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan*	70 Nilai			65 Nilai	300.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	OPD, penyedia dan Stakeholder terkait	70 Nilai	1.420.435.480,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				667 Dokumen	145.800.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	OPD, penyedia dan Stakeholder terkait		331.145.080,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				667 Dokumen	123.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	OPD, penyedia dan Stakeholder terkait		97.961.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				160 Orang	30.700.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	OPD, penyedia dan Stakeholder terkait		991.328.800,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam*	5 Kegiatan			5 Kegiatan	150.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat, Instansi dan Stakeholder terkait	5 Kegiatan	226.481.496,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat, Instansi dan Stakeholder terkait		196.655.117,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat, Instansi dan Stakeholder terkait		29.826.379,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						**44.175.681.000,00**							**46.563.745.842,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**44.175.681.000,00**							**46.563.745.842,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**44.175.681.000,00**							**46.563.745.842,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi, 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur, 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas***	**95 %**			**95 %**	**29.984.234.168,00**						**95 %**	**30.781.077.770,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu*	9 Dokumen			9 Dokumen	3.818.400,00			-	-	SEKRETARIAT	9 Dokumen	75.443.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	270.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		58.586.006,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		1.040.640,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		1.040.640,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		4.578.658,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	330.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		4.578.658,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.050.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		4.578.658,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.178.400,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		1.040.640,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang tersusun dengan baik*	57 Dokumen			23 Dokumen	3.611.104.850,00			-	-	SEKRETARIAT	57 Dokumen	4.398.155.475,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	3.611.104.850,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	SEKRETARIAT		4.398.155.475,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang tersedia dalam kondisi baik*	43 Dokumen			2 Dokumen	14.203.000,00			-	-	SEKRETARIAT	43 Dokumen	15.858.805,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	14.203.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		15.858.805,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersusun*	23 Dokumen			96 Dokumen	458.803.600,00			-	-	SEKRETARIAT	023 Dokumen	322.587.244,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				46 Orang	20.575.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		62.436.241,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	438.228.600,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		260.151.003,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana*	780 Dokumen			294 Dokumen	1.403.063.546,00			-	-	SEKRETARIAT	780 Dokumen	2.273.319.782,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	98.031.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		320.282.331,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	138.238.160,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		156.090.602,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				240 Laporan	486.345.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		198.261.079,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	680.449.386,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		1.598.685.770,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Prasarana yang baik dan layak fungsi*	29 Unit			1 Unit	80.000.000,00			-	-	SEKRETARIAT	29 Unit	83.248.321,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	80.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		83.248.321,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	1270 Laporan			1532 Laporan	3.063.614.000,00			-	-	SEKRETARIAT	1270 Laporan	3.250.152.280,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1400 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		15.609.060,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	671.214.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		468.271.805,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				120 Laporan	2.377.400.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		2.766.271.415,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara*	139 Unit			122 Unit	859.871.728,00			-	-	SEKRETARIAT	139 Unit	816.697.246,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	279.020.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		257.143.657,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	231.220.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		313.450.740,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				95 Unit	66.250.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		131.636.407,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	161.981.728,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		62.436.241,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	121.400.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		52.030.201,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah orang yang menerima layanan keuangan yang tersedia*	120 Orang			120 Orang	19.834.755.044,00			-	-	SEKRETARIAT	120 Orang	18.338.654.547,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/Bulan	19.340.158.964,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		17.937.475.686,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	414.596.080,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		317.930.540,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	80.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		83.248.321,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah Laporan layanan administrasi DPRD yang tersedia*	84 Laporan			72 Laporan	655.000.000,00			-	-	SEKRETARIAT	84 Laporan	1.206.960.170,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				60 Laporan	50.200.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		237.882.077,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	604.800.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SEKRETARIAT		969.078.093,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang telaksana dengan baik***	**70 %**			**70 %**	**14.191.446.832,00**						**70 %**	**15.782.668.072,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun*	24 Dokumen			24 Dokumen	1.998.741.358,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD	24 Dokumen	4.020.116.639,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				9 Dokumen	179.559.464,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		104.060.401,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				9 Dokumen	1.014.593.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		2.948.294.508,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				2 Dokumen	18.694.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		52.030.201,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	785.894.894,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		915.731.529,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah dokumen hasil pembahasan Kebijakan anggaran yang tersusun*	7 Dokumen			7 Dokumen	1.232.806.360,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD	7 Dokumen	1.357.988.235,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	245.781.272,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		270.557.043,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	245.781.272,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		270.557.043,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	245.781.272,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		270.557.043,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	245.781.272,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		270.557.043,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	3.900.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		5.203.020,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	245.781.272,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		270.557.043,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun*	308 Laporan			104 Laporan	612.794.734,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD	308 Laporan	674.342.198,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				25 Laporan	39.186.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		94.726.807,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				25 Laporan	39.186.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		105.981.356,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				25 Laporan	39.186.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		94.726.807,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				25 Laporan	39.186.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		94.726.807,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	236.481.272,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		94.726.807,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				2 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		94.726.807,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	215.969.462,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		94.726.807,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah Dokumen peningkatan kapasitas DPRD*	45 Dokumen			45 Dokumen	2.860.642.750,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Dokumen	816.170.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	2.216.597.850,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				12 Orang	60.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parakanmanggu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		124.872.481,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	360.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		374.617.444,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				28 Dokumen	179.999.900,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		253.203.930,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	9.245.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		9.365.436,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	34.800.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		54.111.409,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang tersusun*	28 Laporan			28 Laporan	1.419.696.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD	28 Laporan	3.156.847.086,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				24 Laporan	64.924.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		303.696.118,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		36.421.140,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	1.343.772.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		2.816.729.828,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang tersusun*	1 Laporan			1 Laporan	112.050.388,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Laporan	6.709.126,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	112.050.388,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		6.709.126,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Jumlah Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah yang tersusun*	33 Dokumen			33 Dokumen	639.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD	33 Dokumen	812.722.138,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	17 Dokumen			33 Dokumen	639.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD	0 Dokumen	812.722.138,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana*	57 Dokumen			47 Dokumen	5.315.715.242,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD	57 Dokumen	4.937.771.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	3.034.482.142,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		3.830.206.976,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	8.374.100,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		26.015.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	246.925.500,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		225.104.708,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				6 Dokumen	1.620.847.500,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		149.143.529,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				10 Dokumen	405.086.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pimpinan dan Anggota DPRD		707.301.637,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**14.570.690.452,00**							**20.444.726.486,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**14.570.690.452,00**							**20.444.726.486,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**14.050.690.564,00**							**20.263.632.089,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase sarana pasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase Laporan keuangan Bappeda dengan kualitas yang baik*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur***	**98 %** **98 %** **95 %** **98 %**			**97 %** **94 %** **97 %** **97 %**	**6.333.443.407,00**						**98 %** **98 %** **95 %** **98 %**	**11.477.397.880,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu* *2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu* *3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu*	100 %			100 % 100 % 100 %	1.629.600,00			-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran	100 %	151.151.399,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	929.600,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran		112.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	700.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran		38.951.399,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	100 %			100 %	4.874.370.369,00			-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran	100 %	6.777.515.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	4.870.380.369,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran		6.483.362.524,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	1.050.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran		147.457.036,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.295.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran		104.040.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.645.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran		42.656.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik*	100 %			100 %	175.000,00			-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran	100 %	47.763.540,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	175.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran		47.763.540,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik*	100 %			100 %	175.000,00			-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran	100 %	49.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	175.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran		49.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	100 %			100 %	262.536.768,00			-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran	100 %	2.330.901.314,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.946.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran		28.683.128,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	79.347.530,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran		1.490.940.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	12.039.698,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran		339.660.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.250.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran		36.018.186,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran		50.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150.153.540,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran		385.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 %			100 %	1.021.696.670,00			-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran	100 %	1.618.415.667,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran		10.981.694,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	425.200.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran		1.098.124.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	595.496.670,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Bappeda Kabupaten Pangandaran		509.309.673,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 %			100 %	172.860.000,00			-	-	Bappeda Kabupaten Pangandaran	100 %	502.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	127.860.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bappeda Kabupaten Pangandaran		381.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	45.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bappeda Kabupaten Pangandaran		121.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase realisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah*** ***Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah***	**100 %** **62 %**			**61 %** **100 %**	**3.817.255.145,00**						**100 %** **62 %**	**3.849.356.394,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Aplikasi yang dikelola* *Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD*	1 Aplikasi 12 Dokumen			1 Aplikasi 12 Dokumen	2.625.501.433,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Pembangunan di Kabupaten Pangandaran	1 Aplikasi 12 Dokumen	2.600.014.394,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				4 Berita Acara	23.472.114,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Pembangunan di Kabupaten Pangandaran		26.294.394,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	487.999.819,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Pembangunan di Kabupaten Pangandaran		243.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				2 Dokumen	2.114.029.500,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Pembangunan di Kabupaten Pangandaran		2.330.720.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Pemenuhan Data Perencanaan Pembangunan daerah*	87 %			85 %	180.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Pembangunan di Kabupaten Pangandaran	87 %	187.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Pembangunan di Kabupaten Pangandaran		187.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase realisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah*	62 %			61 %	1.011.753.712,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Pembangunan di Kabupaten Pangandaran	62 %	1.062.342.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				12 Laporan	1.011.753.712,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Pembangunan di Kabupaten Pangandaran		1.062.342.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase perangkat daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran*** ***Persentase perangkat daerah yang memiliki keselarasan program RPJMD dan RKPD***	**100 %** **98 %**			**100 %** **97 %**	**3.899.992.012,00**						**100 %** **98 %**	**4.936.877.815,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah* *Jumlah Laporan Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah*	3 Laporan 2 Dokumen			2 Dokumen 3 Laporan	1.155.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Kabupaten Pangandaran	3 Laporan 2 Dokumen	1.308.115.744,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	395.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Kabupaten Pangandaran		507.091.502,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	105.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Kabupaten Pangandaran		145.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Kabupaten Pangandaran		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	345.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Kabupaten Pangandaran		345.578.031,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Kabupaten Pangandaran		60.446.211,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah*	6 Dokumen			6 Dokumen	469.999.726,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Perekonomian dan SDA di Kabupaten Pangandaran	6 Dokumen	741.336.520,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	199.999.908,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Perekonomian dan SDA di Kabupaten Pangandaran		236.336.520,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	44.999.978,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Perekonomian dan SDA di Kabupaten Pangandaran		105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	44.999.970,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Perekonomian dan SDA di Kabupaten Pangandaran		105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	99.999.930,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Perekonomian dan SDA di Kabupaten Pangandaran		125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	39.999.970,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Perekonomian dan SDA di Kabupaten Pangandaran		85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	39.999.970,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Perekonomian dan SDA di Kabupaten Pangandaran		85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah* *Jumlah Peta Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah*	10 Peta 13 Dokumen			2 Dokumen 5 Peta	2.274.992.286,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Infrastruktur dan Kewilayahan di Kabupaten Pangandaran	10 Peta 13 Dokumen	2.887.425.551,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	199.992.680,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Infrastruktur dan Kewilayahan di Kabupaten Pangandaran		270.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	14.999.866,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Infrastruktur dan Kewilayahan di Kabupaten Pangandaran		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	14.999.866,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Infrastruktur dan Kewilayahan di Kabupaten Pangandaran		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				2 Laporan	1.599.999.972,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Infrastruktur dan Kewilayahan di Kabupaten Pangandaran		2.029.154.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	14.999.970,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pemerintah dan Stakeholder Infrastruktur dan Kewilayahan di Kabupaten Pangandaran		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	14.999.970,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Infrastruktur dan Kewilayahan di Kabupaten Pangandaran		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	14.999.970,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Infrastruktur dan Kewilayahan di Kabupaten Pangandaran		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	399.999.992,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah dan Stakeholder Infrastruktur dan Kewilayahan di Kabupaten Pangandaran		488.270.591,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**519.999.888,00**							**181.094.397,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Persentase Hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti***	**55 %**			**55 %**	**519.999.888,00**						**55 %**	**181.094.397,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah Laporan pernelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan*	2 Laporan			2 Laporan	269.999.940,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah Daerah dan Stakeholder di Kabupaten Pangandaran	0 Laporan	181.094.397,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2 Laporan	269.999.940,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah Daerah dan Stakeholder di Kabupaten Pangandaran		181.094.397,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	2 Dokumen			1 Dokumen	249.999.948,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah Daerah dan Stakeholder di Kabupaten Pangandaran	0 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	249.999.948,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Pemerintah Daerah dan Stakeholder di Kabupaten Pangandaran		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**150.220.133.376,00**							**438.823.488.625,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**150.220.133.376,00**							**438.823.488.625,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**150.220.133.376,00**							**438.823.488.625,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi***	**97 %** **100 %** **96 %** **95 %**			**100 %** **96 %** **97 %** **94 %**	**10.226.077.000,00**						**97 %** **100 %** **96 %** **95 %**	**22.075.307.695,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu* *Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu* *Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu*	98 % 98 % 98 %			98 % 98 % 98 %	180.000.000,00			-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah	98 % 98 % 98 %	180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		95.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	85.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	99 %			99 %	5.506.017.000,00			-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah	99 %	18.056.957.695,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	5.418.017.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		17.968.957.695,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	11.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	11.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik*	90 %			86 %	55.000.000,00			-	-	Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah	90 %	55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	55.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah		55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik*	99 %			99 %	554.530.000,00			-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah	99 %	284.350.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	170.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		165.850.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	384.530.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		118.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	99 %			96 %	580.000.000,00			-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah	99 %	510.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	10.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	190.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		160.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	70.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		48.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	200.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		197.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi*	36 %			33 %	330.000.000,00			-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah	36 %	555.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	200.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		155.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	80.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	99 %			99 %	1.523.000.000,00			-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah	99 %	1.383.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		8.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	650.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		875.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	870.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	98 %			97 %	1.497.530.000,00			-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah	98 %	1.050.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	1.077.530.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	170.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	250.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Badan Aset dan Keuangan Daerah		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan*** ***Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai waktu dan sesuai ketentuan***	**100 %** **100 %**			**100 %** **100 %**	**137.484.103.126,00**						**100 %** **100 %**	**401.128.108.930,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase PD yang mengirimkan RKA dan DPA persentase Raperda Raperbub APBD sesuai ketentuan*	100 % 100 %			100 % 100 %	3.819.542.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah	100 % 100 %	8.060.678.978,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	319.300.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		622.519.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	319.300.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		623.147.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				36 Dokumen	267.990.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		505.428.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				36 Dokumen	267.990.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		520.100.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				36 Dokumen	246.050.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		520.903.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				36 Dokumen	246.050.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		679.529.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	551.020.800,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		1.067.382.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				5 Dokumen	736.934.400,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		1.660.442.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	175.250.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		701.769.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				25 Dokumen	50.250.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		362.050.634,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				29 Dokumen	133.046.800,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		362.050.634,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				20 Dokumen	45.310.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		289.088.360,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				36 Orang	461.050.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		146.264.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase PD yang melaksanakan penyerapan belanja yang tertib dan sesuai ketentuan*	95 %			93 %	3.206.806.125,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah	95 %	3.315.490.525,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	621.215.100,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		652.275.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				2 Laporan	200.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				36 Dokumen	191.008.125,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		200.557.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				36 Dokumen	275.183.700,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		278.390.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				8 Dokumen	486.179.100,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		510.488.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	356.548.500,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		374.375.925,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				4700 Dokumen	313.756.300,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		318.342.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				85 Orang	362.915.300,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		381.060.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Peresentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP(Akrual)*	95 %			90 %	1.387.078.801,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah	95 %	2.910.728.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				9 Laporan	30.599.920,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		219.087.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				36 Dokumen	50.000.200,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		311.058.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	200.000.400,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		445.772.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	610.000.041,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		1.250.013.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	496.478.240,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		684.797.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase penyerapan anggaran belanja sesuai aturan*	95 %			93 %	128.338.828.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Perangkat Daerah	95 %	386.560.005.627,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				12 Laporan	37.000.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Perangkat Daerah		18.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	57.035.663.500,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		329.929.301.427,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	5.000.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		30.380.704.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				12 Laporan	29.303.164.500,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		8.250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik*	100 %			100 %	731.848.200,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah	100 %	281.205.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				12 Dokumen	129.348.200,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		162.360.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				12 Dokumen	602.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		118.845.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel oleh Perangkat Daerah***	**100 %**			**100 %**	**2.509.953.250,00**						**100 %**	**15.620.072.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisir* *Presentase PD yang melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sesuai standar*	100 % 100 %			100 % 100 %	2.509.953.250,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah	100 % 100 %	15.620.072.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	110.395.600,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		11.675.072.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	314.390.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				8 Laporan	496.327.750,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		1.080.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				15 Dokumen	1.166.379.900,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		1.440.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				36 Laporan	317.050.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		900.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	105.410.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah		275.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**13.974.163.000,00**							**22.265.804.672,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**13.974.163.000,00**							**22.265.804.672,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**13.974.163.000,00**							**22.265.804.672,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi***	**-**			**100 %** **97 %** **96 %** **94 %**	**9.773.573.556,00**						**-**	**13.026.870.922,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu* *Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu* *Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu*	-			98 % 98 % 98 %	26.000.000,00			-	-	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan eksternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran	-	60.775.311,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan eksternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		42.542.718,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan ekternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		18.232.593,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	-			99 %	6.664.007.269,00			-	-	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan ekternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran	-	6.328.974.288,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				280 Orang/bulan	6.628.007.269,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan ekternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		6.231.733.791,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan ekternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		42.542.718,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan ekternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		18.232.593,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan ekternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		18.232.593,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan ekternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		18.232.593,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik*	-			86 Unit	21.000.000,00			-	-	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan ekternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran	-	42.542.718,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	21.000.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan ekternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		42.542.718,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang baik*	-			5858 nesrePrep%	500.000,00			-	-	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan ekternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran	-	100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan ekternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik*	-			99 %	98.350.000,00			-	-	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan ekternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran	-	1.053.333.184,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				20 Unit	500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan ekternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		151.938.281,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	79.950.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan ekternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		306.133.988,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	17.400.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan ekternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		32.210.915,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan ekternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		563.050.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	-			96 %	740.169.032,00			-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran	-	1.147.626.574,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.557.286,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran		86.908.896,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	199.998.412,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran		393.574.982,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	26.389.680,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran		60.775.312,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	280.366.480,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran		175.570.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4.860.048,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran		17.824.183,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran		52.030.201,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	206.997.126,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran		360.943.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi*	-			96 %	174.864.255,00			-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran	-	505.749.004,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	34.999.880,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran		154.545.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	39.364.375,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran		195.113.252,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran		156.090.602,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	-			99 %	1.660.393.000,00			-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran	-	2.833.119.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.993.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran		12.155.062,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	393.200.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran		389.453.778,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.261.200.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran		2.431.510.360,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	-			97 %	388.290.000,00			-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran	-	954.750.643,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	201.630.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran		244.181.337,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	99.660.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran		182.325.938,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran		60.775.312,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	57.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran		191.008.125,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran		276.459.931,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainya Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah***	**100 % 100 % 100 %**			**100 % 100 % 100 %**	**4.200.589.444,00**						**100 % 100 % 100 %**	**9.238.933.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan* *Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar* *Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutahirkan* *persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani* *persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani* *Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku*	80 % 150 Wajib Pajak 100 % 100 % 20 % 12 Dokumen			12 Dokumen 150 Wajib Pajak 20 % 100 % 100 % 78 %	4.200.589.444,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan eksternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran	80 % 150 Wajib Pajak 100 % 100 % 20 % 12 Dokumen	9.238.933.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Dokumen	609.686.736,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan eksternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		692.023.374,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	129.358.830,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan eksternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		222.254.990,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	164.843.760,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan eksternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		529.785.542,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				5 Unit	688.501.760,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan eksternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		1.559.855.713,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	563.593.410,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan eksternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		1.345.013.460,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3 Laporan	142.009.438,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan eksternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		182.337.464,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				20000 Obyek Pajak	174.279.800,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan eksternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		715.914.134,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				2 Dokumen	298.480.800,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan eksternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		414.756.078,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1500 Layanan	50.000.070,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan eksternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		848.764.831,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	50.889.800,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan eksternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		512.439.941,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				4200 Dokumen	600.171.654,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan eksternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		1.070.933.365,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				245 Dokumen	133.650.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan eksternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		241.734.772,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				60 Dokumen	495.922.450,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan eksternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		711.700.977,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				20 Laporan	99.200.936,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Seluruh pegawai BAPENDA Kabupaten Pangandaran, unsur pemerintah/stake holder baik internal dan eksternal, serta masyarakat di Kabupaten Pangandaran		191.419.109,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH						**7.015.662.000,00**							**18.374.997.603,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.015.662.000,00**							**18.374.997.603,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**6.796.666.000,00**							**13.918.381.680,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur***	**95 %**			**95 %**	**5.481.883.000,00**						**95 %**	**7.638.140.786,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu*	95 %			95 %	40.438.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran	95 %	149.321.865,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	13.580.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		48.914.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	22.540.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		95.516.190,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4.318.100,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		4.891.425,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Keuangan yang Disusun Tepat Waktu*	95 %			95 %	3.782.626.806,00			-	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran	95 %	4.570.985.415,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	3.773.842.431,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		4.514.638.741,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	4.909.375,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		47.008.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.575.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		4.669.087,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	1.300.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		4.669.087,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu*	100 %			100 %	6.416.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran	100 %	51.677.587,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				13 Laporan	1.416.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		4.669.087,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		47.008.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik*	95 %			100 %	201.506.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran	95 %	777.652.289,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	5.506.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		30.575.853,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang			28 Orang	196.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran	42 Orang	747.076.436,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana yang Disediakan*	95 %			95 %	445.309.920,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran	95 %	661.149.693,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.154.739,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		12.007.065,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	80.467.084,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		121.275.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.930.515,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		24.255.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	46.304.700,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		50.935.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				17 Dokumen	22.056.504,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		28.214.628,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	278.396.378,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		424.462.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi*	100 %			100 %	377.434.088,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran	100 %	705.128.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	32.774.088,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		51.976.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	194.660.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		519.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		133.402.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan*	95 %			95 %	402.598.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran	95 %	342.040.183,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.100.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		6.987.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	93.408.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		104.052.433,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	305.090.100,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		231.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan BMD yang Dilaksanakan*	95 %			95 %	225.553.986,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran	95 %	380.185.254,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	162.998.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		348.059.754,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12.750.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	49.805.986,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN/Non ASN BKPSDM Kabupaten Pangandaran		13.975.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Persentase Cakupan Layanan Kepegawaian Daerah***	**100 %**			**100 %**	**1.314.783.000,00**						**100 %**	**6.280.240.894,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase palayanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN*	100 %			100 %	313.600.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran	100 %	1.726.808.370,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen			2 Dokumen	255.714.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran	2 Dokumen	1.346.733.452,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	4.646.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran		57.299.543,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				3 Lembaga	9.109.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran		101.962.416,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	44.131.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran		220.812.959,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN*	95 %			93 %	351.643.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran	95 %	1.014.607.324,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	9.606.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran		65.831.535,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	133.779.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran		258.395.791,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen			2 Dokumen	208.258.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran	2 Dokumen	690.379.998,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang Terealisasi*	95 %			93 %	379.308.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran	95 %	1.688.850.404,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				7 Orang	330.413.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran		1.362.956.972,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	48.895.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Kabupaten Pangandaran		325.893.432,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase Pelayanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	96 %			94 %	270.232.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran	96 %	1.849.974.796,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	176.985.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran		720.567.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	22.794.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran		104.948.209,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				1 Orang	22.818.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran		258.402.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				7 Orang	28.241.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran		333.014.217,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	11.894.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran		336.954.870,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran		96.087.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**218.996.000,00**							**4.456.615.923,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Persentase ASN yang mendapatkan sertifikat dalam pengembangan kompetensi jabatan fungsional, kepemimpinan, manajerial dan prajabatan***	**100 %**			**100 %**	**218.996.000,00**						**100 %**	**4.456.615.923,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase sertifikasi dan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan yang terealisasi*	93 %			100 %	218.996.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran	93 %	4.456.615.923,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan			3 Laporan	218.996.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	ASN Kabupaten Pangandaran	3 Laporan	4.456.615.923,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		INSPEKTORAT						**9.640.000.000,00**							**17.153.714.774,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.640.000.000,00**							**17.153.714.774,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**9.640.000.000,00**							**17.153.714.774,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur*** ***Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas*** ***Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik***	**95 Persen** **95 Persen** **95 Persen** **95 Persen**			**93 Persen** **93 Persen** **93 Persen** **93 Persen**	**6.527.961.000,00**						**95 Persen** **95 Persen** **95 Persen** **95 Persen**	**11.865.502.274,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu* *Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu* *Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu*	95 % 95 % 95 %			93 % 93 % 93 %	100.897.000,00			-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran	95 % 95 % 95 %	325.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	1.215.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		14.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		14.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		14.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		14.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	80.670.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		145.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	5.012.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		14.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	34 Dokumen			34 Dokumen	5.640.268.738,00			-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran	34 Dokumen	10.039.552.274,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	5.626.834.738,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		9.927.552.274,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				28 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	1.344.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		38.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	3.590.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		24.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan barang milik daerah*	42 Laporan			42 Laporan	420.000,00			-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran	42 Laporan	54.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				26 Laporan	420.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		54.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*	50 Dokumen			50 Dokumen	340.000,00			-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran	50 Dokumen	44.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	340.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		44.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah* *Jumlah Paket Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah*	5 Paket 4 Dokumen			4 Dokumen 5 Paket	171.248.884,00			-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran	5 Paket 4 Dokumen	533.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.686.083,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		14.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.871.728,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		54.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	10.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.454.060,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		35.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42 Laporan	95.237.013,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase realisasi pengadaan Barang Milik Daerah* *Persentase realisasi pengadaan Barang Milik Daerah*	95 %			90 % 93 %	210.718.964,00			-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran	95 %	308.700.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	50.718.964,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		132.300.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	160.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		176.400.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Bulanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan*	12 Laporan			12 Laporan	289.572.414,00			-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran	12 Laporan	305.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		5.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	72.930.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		85.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	215.142.414,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		215.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah prasarana yang baik dan layak fungsi*	55 Unit			27 Unit	114.495.000,00			-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran	55 Unit	255.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	88.995.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		194.250.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	10.500.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		31.500.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD*** ***Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD***	**-**			**3.25 Nilai** **76.25 Nilai**	**1.583.000.000,00**						**-**	**3.842.212.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja dan Pengawasan Keuangan* *2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dan Pengawasan Internal* *3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti*	-			46 Laporan 25 Laporan 12 Laporan	1.280.275.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah dan Desa	-	2.872.012.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				15 Laporan	322.895.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah dan Desa		496.125.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				8 Laporan	148.970.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah dan Desa		644.962.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				74 Laporan	174.458.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah dan Desa		385.875.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				40 Laporan	173.006.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah dan Desa		104.737.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				16 Laporan	113.250.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah dan Desa		799.312.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				12 Dokumen	347.696.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah dan Desa		441.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	-			22 Laporan	302.725.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah dan Stakholder Pemerintah Kabupaten Pangandaran	-	970.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				10 Laporan	95.820.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah dan Stakholder Pemerintah Kabupaten Pangandaran		330.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				32 Laporan	206.905.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah dan Stakholder Pemerintah Kabupaten Pangandaran		639.450.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)***	**-**			**4 Unit Kerja 75.00 Nilai**	**1.529.039.000,00**						**-**	**1.446.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*	-			2 Rekomendasi	606.499.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah, Desa dan Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran	-	66.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	577.159.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah, Desa dan Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		33.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	29.340.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah, Desa dan Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		33.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah laporan hasil pendampingan, asistensi dan Monev*	-			54 Laporan	922.540.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah, Desa dan Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran	-	1.380.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				36 perangkat daerah	84.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah, Desa dan Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		135.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	44.940.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah, Desa dan Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	748.860.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah, Desa dan Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		825.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				4 perangkat daerah	44.740.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Perangkat Daerah, Desa dan Stakeholder Inspektorat Kabupaten Pangandaran		170.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN PARIGI						**1.416.004.000,00**							**2.506.261.847,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.416.004.000,00**							**2.506.261.847,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.416.004.000,00**							**2.506.261.847,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi***	**100 %**			**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**1.386.042.149,00**						**100 %**	**2.438.913.247,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	100 %			100 %	905.228.458,00			-	-	Kecamatan Parigi	100 %	1.836.964.270,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	905.228.458,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kecamatan Parigi		1.836.964.270,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik*	100 %			100 %	9.000.000,00			-	-	Kecamatan Parigi	100 %	20.000.000,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	9.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Parigi		20.000.000,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	100 %			100 %	57.159.383,00			-	-	Kecamatan Parigi	100 %	102.214.677,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	10.615.680,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Parigi		4.685.120,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				38 Paket	26.458.203,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Parigi		51.243.500,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	9.412.500,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Parigi		8.784.600,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Parigi		5.856.400,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	8.273.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Parigi		31.645.057,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi*	100 %			100 %	8.526.400,00			-	-	Kecamatan Parigi	100 %	53.240.000,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	8.526.400,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Parigi		53.240.000,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 %			100 %	306.510.817,00			-	-	Kecamatan Parigi	100 %	298.385.550,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Parigi		5.124.350,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Parigi		43.923.000,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	275.510.817,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Parigi		249.338.200,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 %			100 %	99.617.091,00			-	-	Kecamatan Parigi	100 %	128.108.750,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	77.324.007,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Parigi		95.166.500,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Parigi		29.282.000,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	7.293.084,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Parigi		3.660.250,00	KECAMATAN PARIGI
2.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**100 %**			**100 %**	**29.961.851,00**						**100 %**	**67.348.600,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa*	100 % 100 %			100 %	29.961.851,00			-	-	Kecamatan Parigi	100 % 100 %	67.348.600,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	2.794.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Parigi		14.641.000,00	KECAMATAN PARIGI
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	27.167.851,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Parigi		52.707.600,00	KECAMATAN PARIGI
		KECAMATAN CIJULANG						**1.453.853.000,00**							**2.966.197.476,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.453.853.000,00**							**2.966.197.476,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.453.853.000,00**							**2.966.197.476,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas***	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**			**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**1.428.987.700,00**						**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**2.815.302.718,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu*	100 %			100 %	1.050.000,00			-	-	Kantor Kecamatan Cijulang	100 %	81.405.045,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.050.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		81.405.045,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	100 %			100 %	1.106.621.182,00			-	-	Pegawai Kecamatan Cijulang	100 %	2.003.834.615,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1.105.571.182,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Kecamatan Cijulang		1.922.429.570,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	1.050.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kecamatan Cijulang		81.405.045,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik*	100 %			100 %	1.050.000,00			-	-	Kantor Kecamatan Cijulang	100 %	81.405.045,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.050.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		81.405.045,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik*	100 %			100 %	1.050.000,00			-	-	Kantor Kecamatan Cijulang	100 %	36.677.157,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	1.050.000,00	Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		36.677.157,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik*	100 %			100 %	19.767.340,00			-	-	Kantor Kecamatan Cijulang	100 %	147.354.994,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	972.500,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		5.024.932,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.628.260,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		40.493.873,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.544.580,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		27.000.000,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				326 Laporan	6.622.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		74.836.189,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi*	100 %			100 %	10.073.652,00			-	-	Kantor Kecamatan Cijulang	100 %	39.725.000,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	10.073.652,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		39.725.000,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 %			100 %	254.040.650,00			-	-	Kecamatan Cijulang	100 %	316.772.208,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	1.200.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Cijulang		3.492.060,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	48.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Cijulang		73.002.000,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	204.840.650,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Cijulang		240.278.148,00	KECAMATAN CIJULANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 %			100 %	35.334.876,00			-	-	Kantor Kecamatan Cijulang	100 %	108.128.654,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	29.084.876,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		85.069.079,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	6.250.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		23.059.575,00	KECAMATAN CIJULANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	**100 %**			**100 %**	**350.000,00**						**100 %**	**35.971.642,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan*	100 % 100 %			100 %	350.000,00			-	-	Kantor Kecamatan Cijulang	100 % 100 %	35.971.642,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	350.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		35.971.642,00	KECAMATAN CIJULANG
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**100 %**			**100 %**	**24.515.300,00**						**100 %**	**114.923.116,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase perencanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa*	100 % 100 %			100 %	24.515.300,00			-	-	Kantor Kecamatan Cijulang	100 % 100 %	114.923.116,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	350.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		35.971.642,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	23.815.300,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		42.979.832,00	KECAMATAN CIJULANG
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	350.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		35.971.642,00	KECAMATAN CIJULANG
		KECAMATAN PANGANDARAN						**1.260.121.000,00**							**2.730.285.969,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.260.121.000,00**							**2.730.285.969,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.260.121.000,00**							**2.730.285.969,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur***	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**			**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**1.230.246.000,00**						**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**2.617.340.302,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu"*	100 %			100 %	1.050.000,00			-	-	-	100 %	1.830.125,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.050.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pangandaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.830.125,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	100 %			100 %	928.798.486,00			-	-	Kecamatan Pangandaran	100 %	2.070.115.261,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	927.748.486,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kecamatan Pangandaran		2.016.451.761,00	KECAMATAN PANGANDARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	1.050.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Pangandaran		53.663.500,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik*	100 %			100 %	1.050.000,00			-	-	Kecamatan Pangandaran	100 %	36.602.500,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	1.050.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Pangandaran		36.602.500,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	100 %			100 %	17.380.000,00			-	-	-	100 %	51.243.500,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				326 Laporan	17.380.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		51.243.500,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi*	100 %			100 %	10.073.652,00			-	-	Kecamatan Pangandaran	100 %	51.243.500,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	10.073.652,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Pangandaran		51.243.500,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 %			100 %	231.716.211,00			-	-	Kecamatan Pangandaran	100 %	325.779.916,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Pangandaran		4.907.760,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	45.100.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Pangandaran		51.243.500,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	183.616.211,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Pangandaran		269.628.656,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 %			100 %	40.177.651,00			-	-	Kantor Kecamatan Pangandaran	100 %	80.525.500,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	33.927.651,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Pangandaran		65.884.500,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	6.250.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Pangandaran		14.641.000,00	KECAMATAN PANGANDARAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	**100 %**			**100 %**	**350.000,00**						**100 %**	**33.221.760,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 % 100 %			100 %	350.000,00			-	-	Kantor Kecamatan Pangandaran	100 % 100 %	33.221.760,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	350.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Pangandaran		33.221.760,00	KECAMATAN PANGANDARAN
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**100 %**			**100 %**	**29.525.000,00**						**100 %**	**79.723.907,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	100 % 100 %			100 %	29.525.000,00			-	-	Kantor Kecamatan Pangandaran	100 % 100 %	79.723.907,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	1.050.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Pangandaran		17.647.564,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				6 Dokumen	28.125.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Pangandaran		44.721.600,00	KECAMATAN PANGANDARAN
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	350.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Pangandaran		17.354.743,00	KECAMATAN PANGANDARAN
		KECAMATAN MANGUNJAYA						**1.536.448.000,00**							**1.649.677.580,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.536.448.000,00**							**1.649.677.580,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.536.448.000,00**							**1.649.677.580,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1.Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi, 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur, 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas***	**100 %**			**100 %**	**1.490.628.892,00**						**100 %**	**1.603.121.930,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Unit Kerja yang Menyusun Laporan Kinerja Keuangan dengan Baik*	100 Persen			100 Persen	1.244.517.055,00			-	-	Kecamatan Mangunjaya	100 Persen	1.360.957.792,00	KECAMATAN MANGUNJAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1.244.517.055,00	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kecamatan Mangunjaya		1.360.957.792,00	KECAMATAN MANGUNJAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	100 Persen			100 Persen	31.767.337,00			-	-	Kecamatan Mangunjaya	100 Persen	44.296.254,00	KECAMATAN MANGUNJAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.686.120,00	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Mangunjaya		3.171.057,00	KECAMATAN MANGUNJAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				160 Paket	18.129.337,00	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Mangunjaya		14.143.213,00	KECAMATAN MANGUNJAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1.500.000,00	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Mangunjaya		3.184.090,00	KECAMATAN MANGUNJAYA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.836.880,00	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Mangunjaya		4.839.818,00	KECAMATAN MANGUNJAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				326 Laporan	6.615.000,00	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Mangunjaya		18.958.076,00	KECAMATAN MANGUNJAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 Persen			100 Persen	207.900.000,00			-	-	Kecamatan Mangunjaya	100 Persen	148.653.305,00	KECAMATAN MANGUNJAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	27.900.000,00	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Mangunjaya		28.581.247,00	KECAMATAN MANGUNJAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	180.000.000,00	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Mangunjaya		120.072.058,00	KECAMATAN MANGUNJAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 Persen			100 Persen	6.444.500,00			-	-	-	100 Persen	49.214.579,00	KECAMATAN MANGUNJAYA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6.444.500,00	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		49.214.579,00	KECAMATAN MANGUNJAYA
2.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**100 %**			**100 %**	**45.819.108,00**						**100 %**	**46.555.650,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa*	100 Persen 100 %			100 %	45.819.108,00			-	-	Kecamatan Mangunjaya	100 Persen 100 %	46.555.650,00	KECAMATAN MANGUNJAYA
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				5 Dokumen	40.879.108,00	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Mangunjaya		41.465.350,00	KECAMATAN MANGUNJAYA
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	4.940.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Mangunjaya		5.090.300,00	KECAMATAN MANGUNJAYA
		KECAMATAN PADAHERANG						**1.636.920.000,00**							**2.914.393.987,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.636.920.000,00**							**2.914.393.987,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.636.920.000,00**							**2.914.393.987,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1.Persentase Sarana Prasarana Kantor yang Terpenuhi, 2.Persentase Dokumen Penganggaran Kinerja yang disusun Tepat Waktu, 3.Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun Tepat Waktu, 4.Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas*** ***3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur***	**100 %** **100 %**			**100 %** **100 %**	**1.611.780.725,00**						**100 %** **100 %**	**2.837.440.891,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu*	100 Persen			100 Persen	573.000,00			-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang	100 Persen	43.923.000,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	573.000,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang		43.923.000,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	100 Persen			100 Persen	1.213.971.107,00			-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang	100 Persen	2.203.065.032,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1.213.398.107,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang		2.201.600.932,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	573.000,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang		1.464.100,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik*	61/170 Jenis dan Unit/ Buah			61/170 Jenis dan Unit/ Buah	573.000,00			-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang	61/170 Jenis dan Unit/ Buah	2.928.200,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	573.000,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang		2.928.200,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	100 Persen			100 Persen	39.996.242,00			-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang	100 Persen	103.204.432,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				29 Paket	5.054.916,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang		7.083.667,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				38 Paket	13.576.550,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang		28.989.180,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.952.600,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang		14.775.369,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	7.162.176,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang		8.433.216,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	8.250.000,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang		43.923.000,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi*	100 Persen			100 Persen	78.859.200,00			-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang	100 Persen	114.408.813,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	78.859.200,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang		114.408.813,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 Persen			100 Persen	240.804.000,00			-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang	100 Persen	276.912.953,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang		2.898.918,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	33.900.000,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang		43.923.000,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	205.904.000,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang		230.091.035,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 Persen			100 Persen	37.004.176,00			-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang	100 Persen	92.998.461,00	KECAMATAN PADAHERANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	30.050.000,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang		67.889.146,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	4.500.000,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang		19.984.965,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	2.454.176,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang		5.124.350,00	KECAMATAN PADAHERANG
2.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**100 %**			**100 %**	**25.139.275,00**						**100 %**	**76.953.096,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa*	100 Persen			100 Persen	25.139.275,00			-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang	100 Persen	76.953.096,00	KECAMATAN PADAHERANG
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	25.139.275,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang		76.953.096,00	KECAMATAN PADAHERANG
		KECAMATAN CIGUGUR						**1.427.582.000,00**							**1.397.916.967,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.427.582.000,00**							**1.397.916.967,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.427.582.000,00**							**1.397.916.967,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** ***2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur***	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**			**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**1.403.898.600,00**						**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**1.339.352.967,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	100 %			100 %	1.194.442.950,00			-	-	Kecamatan Cigugur	100 %	1.180.018.676,00	KECAMATAN CIGUGUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1.194.442.950,00	Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kecamatan Cigugur		1.180.018.676,00	KECAMATAN CIGUGUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	100 %			100 %	6.505.650,00			-	-	Kecamatan Cigugur	100 %	9.000.000,00	KECAMATAN CIGUGUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	6.212.150,00	Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Cigugur		5.000.000,00	KECAMATAN CIGUGUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	293.500,00	Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Cigugur		4.000.000,00	KECAMATAN CIGUGUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 %			100 %	168.225.000,00			-	-	Kecamatan Cigugur	100 %	144.092.598,00	KECAMATAN CIGUGUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	600.000,00	Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Cigugur		2.400.000,00	KECAMATAN CIGUGUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	22.425.000,00	Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Cigugur		25.773.000,00	KECAMATAN CIGUGUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	145.200.000,00	Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Cigugur		115.919.598,00	KECAMATAN CIGUGUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 %			100 %	34.725.000,00			-	-	Kecamatan Cigugur	100 %	6.241.693,00	KECAMATAN CIGUGUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	34.725.000,00	Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Cigugur		6.241.693,00	KECAMATAN CIGUGUR
2.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**100 %**			**100 %**	**23.683.400,00**						**100 %**	**58.564.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* *Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa*	100 persen 12 Bulan			12 Bulan 100 persen	23.683.400,00			-	-	Kecamatan Cigugur	100 persen 12 Bulan	58.564.000,00	KECAMATAN CIGUGUR
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	23.683.400,00	Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Cigugur		58.564.000,00	KECAMATAN CIGUGUR
		KECAMATAN SIDAMULIH						**1.204.960.000,00**							**3.143.719.326,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.204.960.000,00**							**3.143.719.326,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.204.960.000,00**							**3.143.719.326,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi; 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik; 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur; 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas***	**100 %**			**100 %**	**1.180.816.500,00**						**100 %**	**3.085.055.767,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*1. Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun tepat waktu; 2. Persentase Dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu; 3. Persentase Dokumen Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu*	100 %			100 %	21.000.000,00			-	-	Kecamatan Sidamulih	100 %	85.882.056,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Sidamulih		85.882.056,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Unit Kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	100 %			100 %	1.011.862.511,00			-	-	Kecamatan Sidamulih	100 %	2.587.050.623,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	990.862.511,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kecamatan Sidamulih		2.501.882.315,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Sidamulih		85.168.308,00	KECAMATAN SIDAMULIH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik*	100 %			100 %	21.000.000,00			-	-	Kecamatan Sidamulih	100 %	58.959.307,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	21.000.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Sidamulih		58.959.307,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik*	100 %			100 %	17.400.000,00			-	-	Kecamatan Sidamulih	100 %	36.602.500,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	17.400.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Sidamulih		36.602.500,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik*	100 %			100 %	13.949.989,00			-	-	Kecamatan Sidamulih	100 %	33.246.218,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.949.989,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Sidamulih		33.246.218,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 %			100 %	79.100.000,00			-	-	Kecamatan Sidamulih	100 %	206.641.317,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	1.400.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Sidamulih		1.581.228,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.500.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Sidamulih		39.426.456,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	52.200.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Sidamulih		165.633.633,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 %			100 %	16.504.000,00			-	-	Kantor Kecamatan Sidamulih	100 %	76.673.746,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	15.004.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Sidamulih		67.889.146,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	1.500.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Sidamulih		8.784.600,00	KECAMATAN SIDAMULIH
2.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**100 %**			**100 %**	**24.143.500,00**						**100 %**	**58.663.559,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	100 Persen 100 %			100 %	24.143.500,00			-	-	Kecamatan Sidamulih	100 Persen 100 %	58.663.559,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				7 Dokumen	24.143.500,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Sidamulih		58.663.559,00	KECAMATAN SIDAMULIH
		KECAMATAN LANGKAPLANCAR						**1.918.380.623,00**							**2.584.562.722,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.918.380.623,00**							**2.584.562.722,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.918.380.623,00**							**2.584.562.722,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas***	**-**			**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**1.892.023.261,00**						**-**	**2.509.163.572,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan kinerja, Persentase dokumen penganggaran kinerja, dan persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu*	-			100 %	24.993.100,00			-	-	-	-	51.609.525,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	20.400.000,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.652.240,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	825.400,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.830.125,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	616.900,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.830.125,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	825.400,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.830.125,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	825.400,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.830.125,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.636.785,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	-			100 %	1.568.715.480,00			-	-	Kecamatan Langkaplancar	-	1.969.755.193,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1.546.703.180,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kecamatan Langkaplancar		1.866.865.566,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	20.400.000,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		40.116.340,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	825.400,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		27.634.887,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	786.900,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		35.138.400,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik*	-			100 %	23.676.900,00			-	-	Kecamatan Langkaplancar	-	43.044.540,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3.276.900,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		2.928.200,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	20.400.000,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		40.116.340,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik*	-			100 %	32.908.700,00			-	-	Kecamatan Langkaplancar	-	99.148.852,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	8.084.000,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		10.248.700,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	16.800.000,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		34.142.812,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	818.700,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		3.513.840,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7.206.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		51.243.500,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 %	53.045.037,00			-	-	Kecamatan Langkaplancar	-	76.279.610,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6.205.739,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		33.674.300,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	12.611.848,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		26.646.620,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	9.327.450,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		12.298.440,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	24.900.000,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		3.660.250,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi*	-			100 %	9.784.044,00			-	-	Kecamatan Langkaplancar	-	30.014.050,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	9.784.044,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		30.014.050,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	-			100 %	131.300.000,00			-	-	Kecamatan Langkaplancar	-	184.627.667,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	2.600.000,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		2.415.765,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	27.900.000,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		26.265.954,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	100.800.000,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		155.945.948,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Prasarana yang Baik dan Layak Fungsi*	-			100 %	47.600.000,00			-	-	Kecamatan Langkaplancar	-	54.684.135,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	47.600.000,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		54.684.135,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
2.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**100 %**			**100 %**	**26.357.362,00**						**100 %**	**75.399.150,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa*	-			100 %	26.357.362,00			-	-	Kecamatan Langkaplancar	-	75.399.150,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	23.081.362,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		46.119.150,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				15 Laporan	3.276.000,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Langkaplancar		29.280.000,00	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
		KECAMATAN KALIPUCANG						**1.660.042.000,00**							**2.107.171.113,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.660.042.000,00**							**2.107.171.113,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.660.042.000,00**							**2.107.171.113,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** ***2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** ***3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** ***4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas***	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**			**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**1.608.833.000,00**						**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**1.941.342.213,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu, 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu, 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu*	100 Persen			100 Persen	8.970.000,00			-	-	Kantor Kecamatan Kalipucang	100 Persen	32.296.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3.565.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Kalipucang		26.741.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	985.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Kalipucang		781.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	835.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Kalipucang		781.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	955.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Kalipucang		1.089.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	955.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Kalipucang		1.089.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1.675.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Kalipucang		1.815.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	100 Persen			100 Persen	1.245.278.073,00			-	-	Kantor Kecamatan Kalipucang	100 Persen	1.516.485.913,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.234.503.073,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor Kecamatan Kalipucang		1.487.518.513,00	KECAMATAN KALIPUCANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	9.655.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Kalipucang		26.741.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	615.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Kalipucang		883.300,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	505.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Kalipucang		1.343.100,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik*	100 Persen			100 Persen	4.205.000,00			-	-	Kecamatan Kalipucang	100 Persen	28.773.800,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	850.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		2.032.800,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3.355.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		26.741.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik*	100 Persen			100 Persen	6.226.470,00			-	-	Kecamatan Kalipucang	100 Persen	37.873.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	2.736.470,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		9.317.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	2.890.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		26.741.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	600.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		1.815.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik*	100 Persen			100 Persen	58.156.816,00			-	-	Kecamatan Kalipucang	100 Persen	88.935.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.622.500,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		5.445.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	18.096.868,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		25.410.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	6.512.400,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		9.075.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4.860.048,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		5.445.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				326 Laporan	26.065.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		43.560.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 Persen			100 Persen	228.259.801,00			-	-	Kantor Kecamatan Kalipucang	100 Persen	176.478.500,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				360 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Kalipucang		3.025.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	27.900.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Kalipucang		28.616.500,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	197.859.801,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Kalipucang		144.837.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 Persen			100 Persen	57.736.840,00			-	-	Kecamatan Kalipucang	100 Persen	60.500.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	44.870.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		50.215.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	4.500.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		4.235.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8.366.840,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		6.050.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	**100 %**			**100 %**	**5.822.000,00**						**100 %**	**17.424.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja di Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			100 %	3.822.000,00			-	-	Kecamatan Kalipucang	-	8.712.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	3.822.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		8.712.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 Persen 100 %			100 %	2.000.000,00			-	-	Kecamatan Kalipucang	100 Persen 100 %	8.712.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		8.712.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa***	**100 %**			**100 %**	**8.400.000,00**						**100 %**	**37.026.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Presentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa*	100 % 100 %			100 %	2.000.000,00			-	-	Kecamatan Kalipucang	100 % 100 %	6.534.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		6.534.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	100 %			100 %	6.400.000,00			-	-	Kecamatan Kalipucang	100 %	30.492.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				90 Keluarga	1.600.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		7.623.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				90 Keluarga	1.600.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		7.623.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				90 Keluarga	1.600.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		7.623.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				90 Keluarga	1.600.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		7.623.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum***	**100 %**			**100 %**	**3.000.000,00**						**100 %**	**17.278.800,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum*	100 % 100 %			100 %	3.000.000,00			-	-	Kecamatan Kalipucang	100 % 100 %	17.278.800,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	2.200.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		12.705.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				9 Laporan	800.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		4.573.800,00	KECAMATAN KALIPUCANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**100 %**			**100 %**	**380.000,00**						**100 %**	**4.573.800,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan*	100 Persen 100 %			100 %	380.000,00			-	-	Kecamatan Kalipucang	100 Persen 100 %	4.573.800,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				6 Dokumen	380.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		4.573.800,00	KECAMATAN KALIPUCANG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Presentase pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**100 %**			**100 %**	**33.607.000,00**						**100 %**	**89.526.300,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Presentase Perencanaan pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	100 Persen 100 %			100 %	33.607.000,00			-	-	Kecamatan Kalipucang	100 Persen 100 %	89.526.300,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				72 Dokumen	840.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		10.018.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 Dokumen	840.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		9.147.600,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				72 Dokumen	840.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		10.018.000,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				45 Dokumen	840.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		6.261.750,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				27 Dokumen	840.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		3.757.050,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				27 Dokumen	760.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		3.757.050,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				9 Dokumen	1.400.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		4.573.800,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				45 Dokumen	800.000,00	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		6.261.750,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				11 Dokumen	25.647.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		31.157.500,00	KECAMATAN KALIPUCANG
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	800.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Kalipucang		4.573.800,00	KECAMATAN KALIPUCANG
		KECAMATAN CIMERAK						**1.018.281.000,00**							**2.417.306.263,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.018.281.000,00**							**2.417.306.263,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.018.281.000,00**							**2.417.306.263,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik*** **100 %** ***3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur*** **100 %** ***4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas*** **100 %** ***1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi*** **100 %**				**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**994.556.700,00**						**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**2.370.320.582,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	100 %			100 %	644.937.982,00			-	-	Kantor Kecamatan Cimerak	100 %	1.793.113.408,00	KECAMATAN CIMERAK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	644.937.982,00	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor Kecamatan Cimerak		1.793.113.408,00	KECAMATAN CIMERAK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	100 %			100 %	23.522.792,00			-	-	Kantor Kecamatan Cimerak	100 %	264.886.437,00	KECAMATAN CIMERAK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	13.008.792,00	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cimerak		26.353.800,00	KECAMATAN CIMERAK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4.670.000,00	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cimerak		13.872.348,00	KECAMATAN CIMERAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				326 Laporan	5.844.000,00	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cimerak		224.660.289,00	KECAMATAN CIMERAK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 %			100 %	188.821.156,00			-	-	Kecamatan Cimerak	100 %	173.369.937,00	KECAMATAN CIMERAK
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	840.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Cimerak		3.396.712,00	KECAMATAN CIMERAK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	27.900.000,00	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Cimerak		61.843.584,00	KECAMATAN CIMERAK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	160.081.156,00	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Cimerak		108.129.641,00	KECAMATAN CIMERAK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 %			100 %	137.274.770,00			-	-	Kecamatan Cimerak	100 %	138.950.800,00	KECAMATAN CIMERAK
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	12.774.770,00	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Cimerak		85.068.992,00	KECAMATAN CIMERAK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	4.500.000,00	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Cimerak		19.984.965,00	KECAMATAN CIMERAK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	120.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Cimerak		33.896.843,00	KECAMATAN CIMERAK
2.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**100 %**			**100 %**	**23.724.300,00**						**100 %**	**46.985.681,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa*	100 % 100 %			100 %	23.724.300,00			-	-	Masyarakat Desa	100 % 100 %	46.985.681,00	KECAMATAN CIMERAK
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	23.724.300,00	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Desa		46.985.681,00	KECAMATAN CIMERAK
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**6.490.481.000,00**							**16.243.793.102,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**6.490.481.000,00**							**16.243.793.102,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**6.490.481.000,00**							**16.243.793.102,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas***	**100 %**			**100 %**	**2.992.535.515,00**						**100 %**	**7.899.690.448,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu*	100 %			100 %	2.657.850,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran	100 %	94.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	1.957.950,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		56.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	699.900,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		38.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*	100 %			100 %	2.234.871.078,00			-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran	100 %	5.560.838.448,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	2.229.981.328,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		5.453.038.448,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	3.899.800,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		49.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	639.950,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	350.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		3.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik*	138 Jenis			138 Jenis	2.294.000,00			-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran	138 Jenis	51.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2.294.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		51.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik*	100 %			100 %	1.702.000,00			-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran	100 %	42.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	1.702.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		42.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik*	100 %			100 %	157.669.857,00			-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran	100 %	1.298.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.395.333,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		31.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	49.711.336,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		840.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.744.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		46.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	11.449.750,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		34.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10.498.488,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		27.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				134 Laporan	82.162.950,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		260.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	324.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	384.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi*	100 %			100 %	150.000.000,00			-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran	100 %	363.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		363.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*	100 %			100 %	323.466.807,00			-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran	100 %	252.652.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		5.652.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	57.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		97.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	265.466.807,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*	100 %			100 %	119.873.923,00			-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran	100 %	238.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	104.873.923,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		227.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bakesbangpol Kab. Pangandaran		11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Persentase Masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan***	**75 %**			**75 %**	**751.269.785,00**						**75 %**	**1.251.564.312,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*	-			1 Laporan	751.269.785,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	-	Forum Pembaruan Kebangsaan dan Paskibraka Kabupaten Pangandaran	-	1.251.564.312,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				36 Orang	72.750.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	-	Forum Pembaruan Kebangsaan dan Paskibraka Kabupaten Pangandaran		140.344.312,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paskibraka				80 Orang	574.512.070,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Forum Pembaruan Kebangsaan dan Paskibraka Kabupaten Pangandaran		1.111.220.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	65.450.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Forum Pembaruan Kebangsaan dan Paskibraka Kabupaten Pangandaran		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				40 Orang	38.557.715,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Forum Pembaruan Kebangsaan dan Paskibraka Kabupaten Pangandaran		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Persentase Masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri***	**68 %**			**68 %**	**1.120.696.800,00**						**68 %**	**3.213.502.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis, Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Pemantapan Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Pemantapan Pelaksanaan Pemantauan Situasi Politik*	1 Laporan			1 Laporan	1.120.696.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat Umum, Pemilih Pemula, Partai Politik	1 Laporan	3.213.502.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	44.940.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat Umum, Pemilih Pemula, Partai Politik		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				9 Orang	1.073.256.800,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat Umum, Pemilih Pemula, Partai Politik		2.763.502.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				500 Orang	2.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Masyarakat Umum, Pemilih Pemula, Partai Politik		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase Masyarakat yang memahami tentang pemberdayaan dan pengawasan ormas***	**68 %**			**68 %**	**2.500.000,00**						**68 %**	**1.000.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	1 Laporan			1 Laporan	2.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Organisasi Masyarakat	1 Laporan	1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				92 Orang	2.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Organisasi Masyarakat		1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Persentase masyarakat yang memahami tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	**84 %**			**84 %**	**151.140.000,00**						**84 %**	**264.602.800,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah Kebijakan Teknis yang Tersusun*	1 Laporan			1 Laporan	151.140.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Forum Umat Beragama Kabupaten Pangandaran	1 Laporan	264.602.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				29 Orang	151.140.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Forum Umat Beragama Kabupaten Pangandaran		264.602.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase pelaksanaan koordinasi kewaspadaan daerah***	**85 %**			**85 %**	**1.472.338.900,00**						**85 %**	**2.614.433.542,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	1 Laporan			1 Laporan	1.472.338.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Intelijen, Masyarakat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Kecamatan	1 Laporan	2.614.433.542,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	67.573.900,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Intelijen, Masyarakat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Kecamatan		146.410.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	550.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Intelijen, Masyarakat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Kecamatan		226.410.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				39 Orang	384.582.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Intelijen, Masyarakat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Kecamatan		743.212.123,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				82 Orang	586.493.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Intelijen, Masyarakat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Kecamatan		495.760.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	400.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Intelijen, Masyarakat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Kecamatan		25.679.419,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	432.740.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Intelijen, Masyarakat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Kecamatan		976.962.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**2.126.465.652.901,00**							**2.115.860.107.501,61**	

BAPPEDA
Pangandaran

"Peningkatan Daya Saing Daerah"

RKPD
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2025